



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026



**BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2025**



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 22 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan Daerah harus dapat terlaksana dan mencapai sasaran atau tujuan serta berkesinambungan, sehingga diperlukan perencanaan pembangunan yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas yang akan menjadi landasan bagi semua pihak dalam penentuan perencanaan ke depan;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 memuat kebijakan yang merupakan kesepakatan atau kesatuan pandangan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penyelenggaraan dan merupakan sinkronisasi penjabaran secara konkrit, sistematis dan terukur dari RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan RKP Tahun 2025;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 116);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 325);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
6. Kepala Badan adalah Kepala Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025–2029.

Pasal 3

Kedudukan RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan acuan dalam menyusun KUA, PPAS dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2026.

Pasal 4

RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I : Pendahuluan;
- b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
- d. Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- e. Bab V : Arah Kebijakan Pembangunan Daerah;
- f. Bab VI : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- g. Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- h. Bab VIII : Penutup.

Pasal 5

Isi beserta uraian RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025
NOMOR 768

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kepada kita kemampuan dan kelapangan berfikir sehingga dimampukan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Tahunan ini yaitu berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 Kabupaten Gunung Mas.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 ini disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta sekaligus merupakan kesepakatan seluruh Pemangku Kepentingan di daerah yang dihasilkan melalui Forum Gabungan Perangkat Daerah Tanggal 12 Februari 2025 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Gunung Mas Tanggal 11 Maret 2025 di Kuala Kurun.

Dokumen RKPD adalah merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah sebagai Acuan utama perencanaan teknis operasional masing-masing Perangkat Daerah serta pedoman utama penyusunan APBD. Oleh karena itu kedudukan dan peranannya sangat penting dalam menentukan arah perkembangan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan, untuk itu seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas harus mentaatinya serta melakukan langkah-langkah sinkronisasi atau memaduserasikan rencana program hingga pelaksanaannya.

Kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berpartisipasi dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2026 Kabupaten Gunung Mas disampaikan ucapan terima kasih dan semoga pelaksanaan pembangunan yang akan kita laksanakan di daerah pada tahun 2026 dapat meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Gunung Mas.

BUPATI GUNUNG MAS,

JAYA SAMAYA MONONG

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	5
1.4. Maksud dan Tujuan	6
1.5. Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	7
BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	1
2.1. Kondisi Umum Daerah	1
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berjalan RKPD Tahun 2024	96
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	97
2.4. Hasil Rakortek	111
BAB. III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	2
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	9
3.3. Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	38
BAB. IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ...	1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	3
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026 ...	4
4.3. Kegiatan Strategis Tahun 2026	17
4.4. Inovasi Daerah	19
4.5. Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Gunung Mas	22
4.6. Usulan Perencanaan Pembangunan Dari Kecamatan Se-Kabupaten Gunung Mas	23
4.7. Usulan Perencanaan Pembangunan Dari Kabupaten Gunung Mas Ke Provinsi Kalimantan Tengah	24
BAB. V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	1
BAB. VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	1

6.1.	Program Pembangunan RPJMD dan Target Capaian Tahun 2026	1
6.2.	Rencana Kerja RKPD Tahun 2026	11
BAB. VII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	1
BAB. VIII	PENUTUP	1
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Data Wilayah Administratif Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2024 II-2

Tabel 2.2. Panjang Sungai di Kabupaten Gunung Mas II-7

Tabel 2.3. Indeks Polusi dan Kriteria Mutu Air Sungai di Kabupaten
Gunung Mas II-7

Tabel 2.4. Formasi Geologi di Kabupaten Gunung Mas II-11

Tabel 2.5. Pengamatan Unsur Iklim di Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2024 II-12

Tabel 2.6. Rencana Sistem Pusat Kegiatan Wilayah II-14

Tabel 2.7. Rencana Sistem Pusat Kegiatan Lokal Tewah II-15

Tabel 2.8. Rencana Sistem Pusat Kegiatan Lokal Tumbang Miri II-16

Tabel 2.9. Rencana Sistem Pusat Kegiatan Lokal Sepang Simin II-17

Tabel 2.10. Rencana Sistem Pusat Kegiatan Lokal Jakatan Raya II-18

Tabel 2.11. Rencana Sistem Pusat Kegiatan Lokal Tumbang Talaken .. II-19

Tabel 2.12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten
Gunung Mas, Tahun 2020 – 2024 II-32

Tabel 2.13. Jumlah, Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut
Kecamatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 II-37

Tabel 2.14. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis
Kelamin di Kabupaten Gunung Mas (Ribuan Jiwa) Tahun
2024..... II-39

Tabel 2.15. Proyeksi Penduduk Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2025-2030 II-43

Tabel 2.16. Proyeksi Penduduk Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2025-2030 II-44

Tabel 2.17. Distribusi PDRB Kabupaten Gunung Mas Atas Dasar
Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2020-2024 II-46

Tabel 2.18. Tabel Garis Kemiskinan, Penduduk Miskin, P0, P1,
dan P2 Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 II-48

Tabel 2.19. Capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 II-54

Tabel 2.20. Indikator Pembangunan Kesehatan Kabupaten

Gunung Mas Tahun 2020 – 2024	II-57
Tabel 2.21. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Menurut Kelompok Makanan dan Bukan Makanan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II-64
Tabel 2.22. Indikator Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II-65
Tabel 2.23. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2023	II-67
Tabel 2.24. Rasio Ketergantungan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II-69
Tabel 2.25. Rasio PDRB Industri Pengolahan dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II-70
Tabel 2.26. Capaian Perekonomian Sektor Pertanian Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II-73
Tabel 2.27. Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II-75
Tabel 2.28. Panjang Jalan (km) Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II-78
Tabel 2.29. Capaian Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II-80
Tabel 2.30. Kondisi Kemanan dan Ketertiban di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II-81
Tabel 2.31. Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Gunung Mas dan Pilar Penyusunnya Tahun 2022-2024	II-82
Tabel 2.32. Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II-83
Tabel 3.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi.....	III-7
Tabel 3.2. Kerangka Pendapatan Daerah.....	III-39
Tabel 3.3. Kerangka Belanja Daerah.....	III-40
Tabel 4.1. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026.....	IV-7
Tabel 4.2. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029..	IV-11
Tabel 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029.....	V-8

Tabel 6.1. Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 Kabupaten
Gunung Mas VI-8

Tabel 6.2. Target Indikator Kinerja Daerah Tahun 2026 Kabupaten
Gunung Mas VI-9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Hubungan Keterkaitan antara RKPD dengan Dokumen
Perencanaan dan Penganggaran Lainnya I-6

Gambar 2.1. Peta Kabupaten Gunung Mas II-2

Gambar 2.2. Grafik Persentase Luas Kecamatan Terhadap Luas
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 II-3

Gambar 2.3. Peta Topografi (kiri) dan Peta Kelerengan (kanan)
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 II-4

Gambar 2.4. Peta Hidrologi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 ... II-6

Gambar 2.5. Peta Persebaran Geologi Kabupaten Gunung Mas 2021. II-9

Gambar 2.6. Gambar Model Daya Dukung Air II-20

Gambar 2.7. Grafik Daya Dukung Air serta proyeksi ketersediaan
dan kebutuhan air di Kabupaten Gunung Mas II-21

Gambar 2.8. Model Daya Tampung Beban Pencemaran II-22

Gambar 2.9. Gambar Grafik Daya Tampung Beban Pencemaran II-23

Gambar 2.10. Gambar Model Pengelolaan Persampahan II-24

Gambar 2.11. Grafik Peningkatan Sampah Rumah Tanggal,
Kapasitas Angkut dan TPA II-25

Gambar 2.12. Persentase Pengelolaan Persampahan di Kabupaten
Gunung Mas II-26

Gambar 2.13. Grafik Rasio Sampah Tidak Terangkut II-26

Gambar 2.14. Gambar Model Daya Dukung Pangan II-27

Gambar 2.15. Grafik Proyeksi Produksi Beras di Kabupaten
Gunung Mas II-27

Gambar 2.16. Grafik Daya Dukung Pangan II-28

Gambar 2.17. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2021-2024 II-30

Gambar 2.18. Prevalensi Ketidacukupan Pangan Kabupaten
Gunung Mas Tahun 2020-2023 II-31

Gambar 2.19. Rumah Tangga mempunyai Akses Sanitasi Aman di
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (%) II-33

Gambar 2.20. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2020-2024 II-35

Gambar 2.21. Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 II-37

Gambar 2.22. Piramida Penduduk Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 (ribu jiwa) II-40

Gambar 2.23. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kabupaten Gunung Mas, 2020-2024 (Juta Rupiah) II-50

Gambar 2.24. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 – 2024 II-51

Gambar 2.25. Indeks Gini Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024.II-53

Gambar 2.26. Usia Harapan Hidup Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 II-56

Gambar 2.27. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 II-58

Gambar 2.28. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 II-60

Gambar 2.29. Indeks Pendidikan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 II-61

Gambar 2.30. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu/Kapita/ Tahun) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 II-62

Gambar 2.31. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Untuk Makanan dan Bukan Makanan di Kabupaten Gunung Mas tahun 2020-2024 II-64

Gambar 2.32. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 II-71

Gambar 2.33. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2024..... II-72

Gambar 2.34. Indeks Kualitas Infrastruktur Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 II-77

Gambar 2.35. IPM Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 II-100

Gambar 2.36. Pertumbuhan IPM Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 II-101

Gambar 2.37. Usia harapan Hidup Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024..... II-102

Gambar 2.38. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024..... II-104

Gambar 2.39. Kontribusi PDRB Kabupaten se-Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2024 II-105

Gambar 2.40. Kontribusi PDRB Kabupaten se-Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2024 II-107

Gambar 2.41. Tingkat Kemiskinan Kabupaten se-Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2024 II-108

Gambar 2.42. Indeks Gini Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2024 II-109

Gambar 4.1. Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih Kabupaten
Gunung Mas Tahun 2025-2029..... IV-4

Gambar 4.2. Keselarasan Arah Pembangunan antara Nasional
dengan Kabupaten..... IV-14

Gambar 4.3. Keselarasan Arah Pembangunan antara Provinsi
dengan Kabupaten..... IV-15

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR :
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 disusun sesuai amanat perundangan-undangan yang berlaku, mengacu pada Pedoman Penyusunan RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026.

Bagi Perangkat Daerah, RKPD merupakan Pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan Rencana Kerja (Renja)

Perangkat Daerah dan untuk menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

- Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 19. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan RKP Tahun 2025;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 116);

- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 325);
- 25. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026.

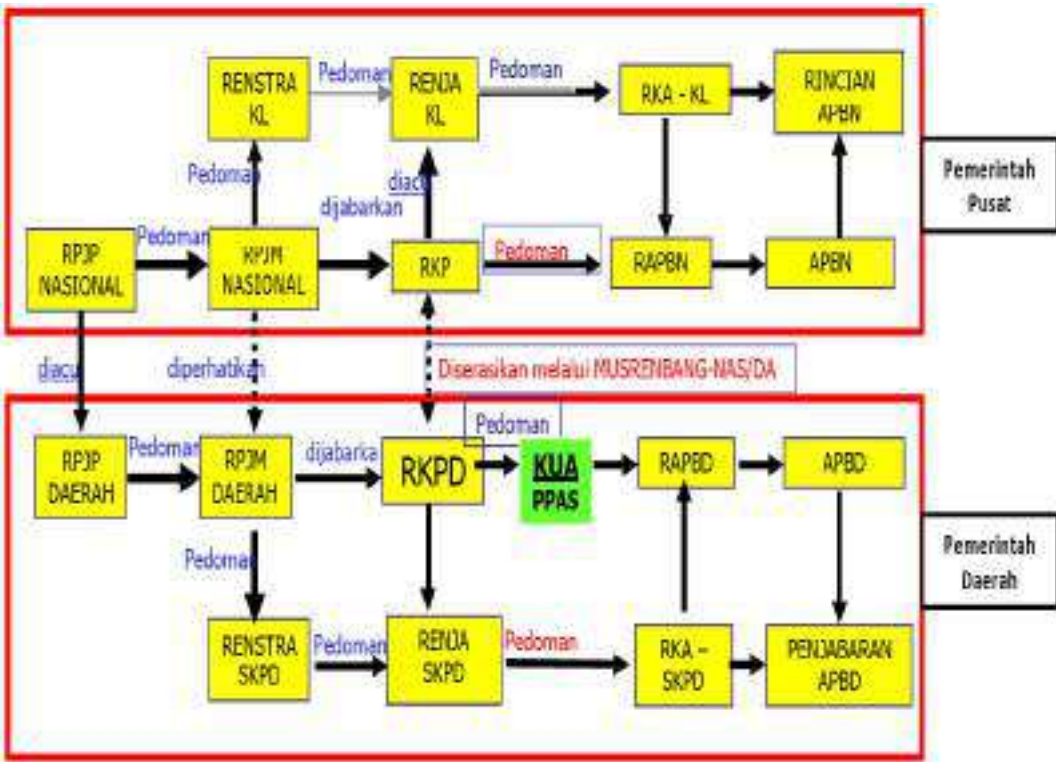
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra Perangkat Daerah, (4) RKPD dan (5) Renja Perangkat Daerah. Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

RKPD menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah. Di samping itu RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta rujukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026.

Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1. berikut :

Gambar 1.1. Hubungan Keterkaitan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya



Mengacu pada Gambar 1.1. dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

- RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang.
- RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang didalamnya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.
- RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah.
- RKPD nantinya dijabarkan ke dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada Renja Perangkat Daerah.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 adalah agar tersusunnya

dokumen perencanaan periode satu tahun yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Tahun 2026 yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan kerangka operasional dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2026;
2. Memberikan arah bagi semua pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan tahun 2026;
3. Merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2026;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS serta RAPBD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Sistematika penulisan :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan

Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang, perlu dicantumkan.

1.3. Hubungan antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kab/kota

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian

target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

Telaahan hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan n.
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.4. Hasil Rakortek

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD kabupaten/kota.

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi

Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan tujuan/sasaran pembangunan 2 (dua) tahunan yang diambil dari dokumen RPD.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPD) tahun rencana.

BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan arah kebijakan pembangunan daerah.

BAB VI. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama

(IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. KONDISI UMUM DAERAH

Kabupaten Gunung Mas merupakan salah satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kapuas pada tahun 2002 berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180).

Gambaran umum kondisi Kabupaten Gunung Mas terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Keempat aspek tersebut merupakan hasil kinerja pembangunan di Kabupaten Gunung Mas oleh Pemerintah Daerah, swasta maupun masyarakat. Berikut ini gambaran umum Kabupaten Gunung Mas yang dilihat dari keempat aspek tersebut.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek Geografi dan Demografi bertujuan untuk memberikan gambaran dan hasil analisis dari aspek geografi mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan aspek demografi, menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kabupaten Gunung Mas.

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Pada posisi dan peran strategis daerah menjelaskan letak geografis dan batas wilayah serta fungsi dan kontribusi daerah terhadap wilayah sekitar atau wilayah yang lebih luas

1. Geografis

Wilayah administratif Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2024, memiliki total luas wilayah mencapai 9.317,115 km². Kecamatan Damang Batu memiliki luas terbesar, yakni 1.824,038 km² atau 19,6% dari total wilayah kabupaten, diikuti oleh Miri Manasa dengan 1.405,197 km² (15,1%). Kecamatan dengan luas terkecil adalah Rungan Barat, hanya 347,091 km² atau 3,7% dari luas kabupaten. Kurun, sebagai ibu kota Kabupaten Gunung Mas, mencakup 772,049 km² atau 8,3% dari total luas. Beberapa kecamatan lain seperti Tewah (9,2%) dan Rungan (10,5%) juga memiliki cakupan wilayah yang cukup besar. Data ini menunjukkan bahwa luas wilayah di Kabupaten Gunung Mas tidak merata, dengan beberapa kecamatan memiliki cakupan wilayah yang jauh lebih besar dibandingkan kecamatan lainnya:

Gambar 2.1

Peta Kabupaten Gunung Mas



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Gunung Mas 2025-2029

Tabel 2.1

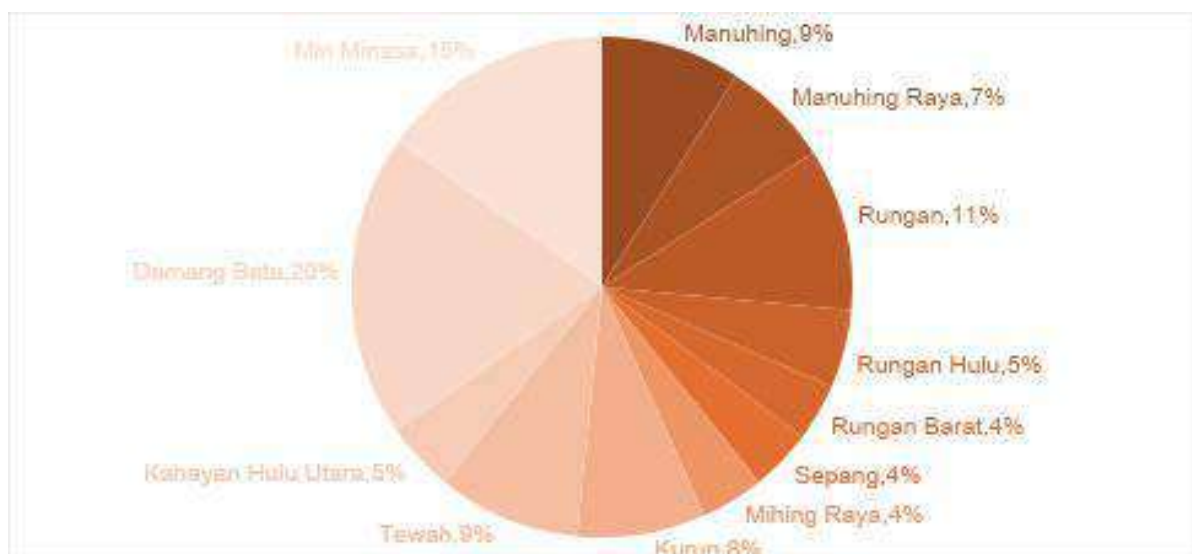
Data Wilayah Administratif Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Total Area (Km ²)	Persentase terhadap Luas Kabupaten /Kota
Manuhing	Tumbang Talaken	839,056	9
Manuhing Raya	Tehang	654,627	7
Rungan	Jakatan Raya	977,442	10,5
Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	468,570	5
Rungan Barat	Rabambang	347,091	3,7
Sepang	Sepang Simin	368,765	4
Mihing Raya	Kampuri	383,743	4,1
Kurun	Kuala Kurun	772,049	8,3
Tewah	Tewah	854,330	9,2
Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri	422,206	4,5
Damang Batu	Tumbang Marikoi	1.824,038	19,6
Miri Minasa	Tumbang Napoi	1.405,197	15,1
Gunung Mas		9.317,115	100

Sumber: BPS Kabupaten Gunung Mas, 2025

Gambar 2.2

Grafik Persentase Luas Kecamatan Terhadap Luas Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas, 2025

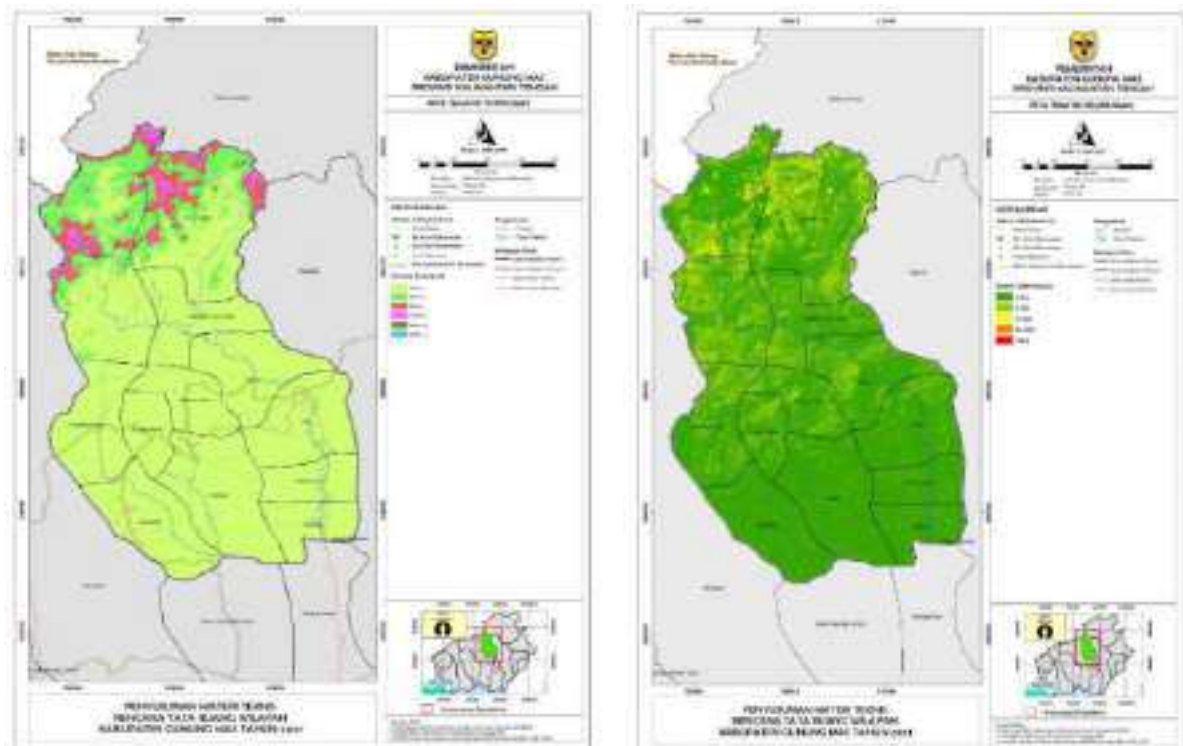
2. Topografi

Secara umum kondisi topografi di wilayah Kabupaten Gunung Mas yaitu:

1. Wilayah bagian utara merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100-500 meter dari permukaan air laut dan mempunyai tingkat kemiringan 8° - 15° serta mempunyai daerah pegunungan dengan tingkat kemiringan $\pm 15^{\circ}$ - 25° .
2. Wilayah bagian selatan terdiri dari dataran rendah dan rawa-rawa yang berpotensi mengalami banjir cukup besar pada musim-musim hujan, selain itu juga daerah Kabupaten Gunung Mas memiliki perairan yang meliputi danau, rawa-rawa dan ada empat jalur sungai yang masuk wilayah Kabupaten Gunung Mas yaitu Sungai Kahayan, Sungai Rungan, Sungai Manuhing dan Sungai Miri serta anak-anak sungai lainnya.

Gambar 2.3

Peta Topografi (Kiri) dan Peta Kelerenghan (Kanan)
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021



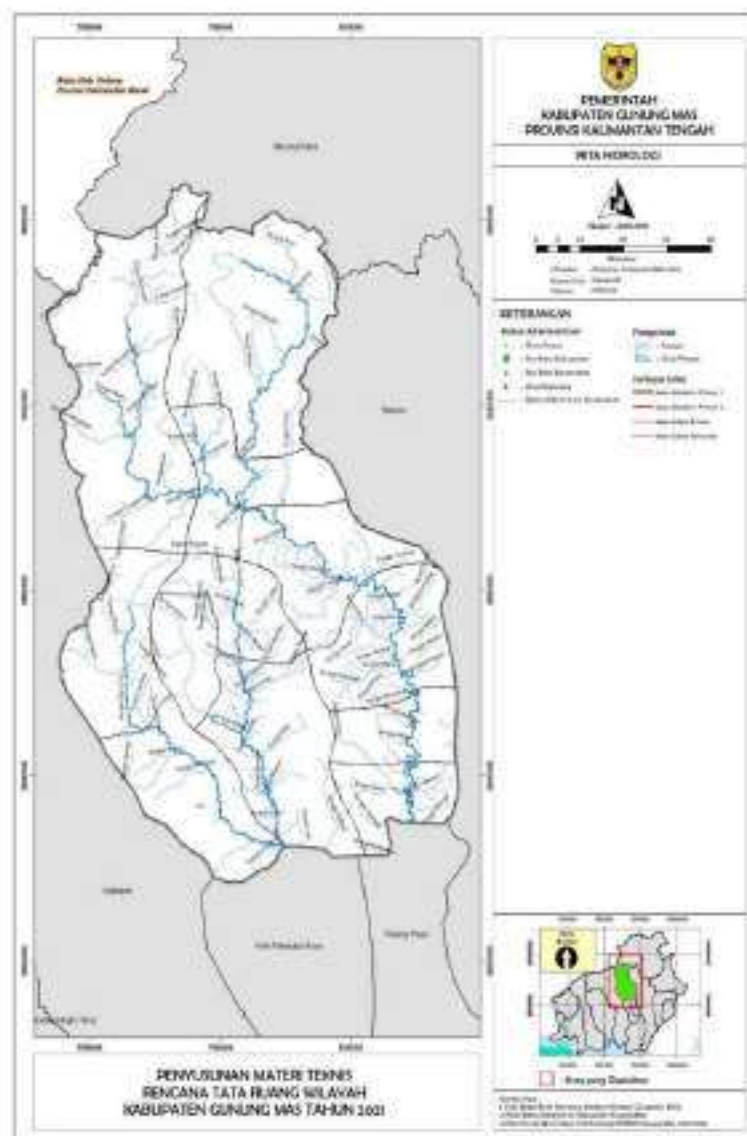
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Gunung Mas 2025-2029

Dilihat dari topografinya luas lahan di Wilayah Kabupaten Gunung Mas didominasi lahan dengan kondisi topografi 0-250 m seluas 768.761,62 Ha (82,28 %) dan interval 250-500 m seluas 102.173,68 Ha (10,94 %). Adapun kondisi kelerengan dominan dengan kelerengan 0-8% seluas 677.676,60 Ha (72,53 %) dan interval 212.153,52 Ha (22,71 %) yang tersebar diseluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Gunung Mas. Kondisi topografi, kondisi kontur dan kondisi kelerengan di wilayah Kabupaten Gunung Mas di tampilkan pada gambar di atas.

3. Hidrologi

Gunung Mas merupakan kabupaten yang sebagian wilayahnya bergantung pada pemanfaatan sungai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 39/PRT/1989 membagi Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dalam 6 satuan wilayah sungai. Di Kabupaten Gunung Mas terdapat 3 (tiga) cabang sungai yang langsung bermuara ke Sungai Kahayan, yaitu Sungai Rungan, Sungai Miri, dan Sungai Manuhing. Terdapat Sungai utama di Kabupaten Gunung Mas seperti pada tabel berikut :

Gambar 2.4
Peta Hidrologi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Gunung Mas 2025-2029

Pentingnya peranan sungai ini disebabkan oleh terbatasnya atau terganggunya prasarana perhubungan darat, disamping itu sebagian besar pemukiman penduduk masih berada di daerah pinggir sungai.

Tabel 2.2
Panjang Sungai Di Kabupaten Gunung Mas

No.	Nama Sungai	Panjang (km)
1	Manuhing	± 28,75
2	Rungan	± 86,25
3	Kahayan	± 600
4	Miri	-

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Gunung Mas 2025-2029

Hasil pengukuran status kualitas air sungai di Kabupaten Gunung Mas tahun 2020 dan 2021 yang diambil di beberapa titik sungai berdasarkan kriteria mutu air pada Peraturan Pemerintah 82/2001 kelas II didapatkan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indeks Polusi dan Kriteria Mutu Air Sungai di Gunung Mas

Nama Sungai	Titik Sampling	Indeks Polusi		Kriteria Mutu Air	
		2020	2021	2020	2021
Miri	Napoi	5.57	1.89	Cemar	Cemar
				Ringan	Ringan
	Desa Siruk	4.19	1.83	Cemar	Cemar
				Ringan	Ringan
	Tumbang Lapan	3.83	4.03	Cemar	Cemar
				Ringan	Ringan
Kahayan	Teluk Kanduri	2.91	1.56	Cemar	Cemar
				Ringan	Ringan
	Tewah	2.96	3.42	Cemar	Cemar
				Ringan	Ringan
	Sepang	2.92	4.31	Cemar	Cemar
				Sedang	Ringan
	Tumbang	3.43	2.48	Cemar	Cemar

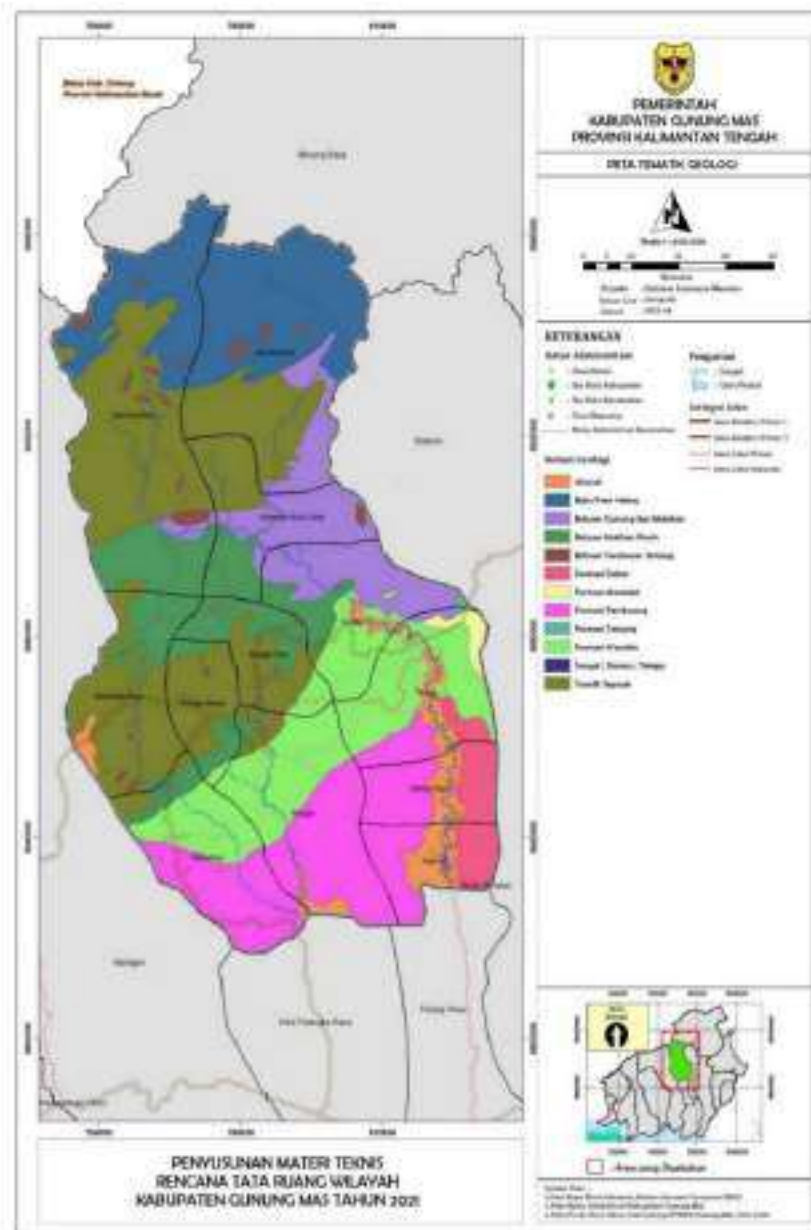
Nama Sungai	Titik Sampling	Indeks Polusi		Kriteria Mutu Air	
Manuhing	Talaken			Ringan	Ringan
	Luwuk Tukau	5.14	8.84	Cemar	Cemar
				Ringan	Sedang
	Takaras	4.38	2.01	Cemar	Cemar
				Ringan	Ringan
	Bereng Malaka	2.76	8.78	Cemar	Cemar
Rungan				Ringan	Sedang
	Guhung Rawai	4.14	7.09	Cemar	Cemar
				Ringan	Sedang
	Tumbang	3.08	8.77	Cemar	Cemar
	Rahuyan			Sedang	Sedang

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Gunung Mas 2025-2029

4. Geologi

Jenis tanah di wilayah Kabupaten Gunung Mas terdiri atas beberapa jenis tanah yaitu Podsolik Merah Kuning, Alluvial, Hydromorfik Kelabu, Alluvial Hydromorfik, Gley Humus dan Kompleks Regosol Podsolik. Jenis tanah yang dominan adalah tanah Podsolik Merah Kuning tersebar di bagian utara wilayah Gunung Mas dengan ketebalan ± 110 cm. Kemudian pada daerah-daerah pinggir sungai umumnya didominasi oleh tanah aluvial yang berasal dari endapan sungai dengan jenis tanah Aluvial Hydromorfik kelabu, tersebar dan dapat di jumpai di beberapa sungai/anak sungai di wilayah Gunung Mas yaitu Sungai Kahayan, Sungai Miri (anak Sungai Kahayan), Sungai Rungan dan Sungai Manuhing (anak Sungai Rungan).

Gambar 2.5
Peta Persebaran Geologi Kabupaten Gunung Mas 2021



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Gunung Mas 2025-2029

Kondisi Geologi Kabupaten Gunung Mas terdiri atas 11 (sebelas) formasi geologi diantaranya, yaitu :

- a. Formasi Tonalit Sepauk (*Kls*)

Formasi Tonalit Sepauk merupakan batuan granitan berkomposisi tonalit, diorit dan granodiorit hingga mozoit, yang berumur kurang lebih 8,7 juta tahun.

b. Formasi Batu Malihan Pinoh (*PzTRp*)

Formasi Malihan Pinoh merupakan batuan fillit, sekis, kuarsit dan ganes, yang secara umum berasal dari batu lumpur, dengan umur diperkirakan trias.

c. Formasi Endapan Aluvium (*Qa*)

Formasi endapan aluvium berasal dari batuan pasir kuarsa, kerikil, dan bongkah yang berasal dari batuan metamorf yang bersifat granit dan kuarsit lepas.

d. Formasi Batu Pasir Haloq (*Teh*)

Formasi batu pasir haloq terdiri atas batupasir kuarsa, batupasir sela kuarsa, batupasir kerikilan, jarang batulanau, batulumpur, batugamping.

e. Formasi Mentemoi (*Teme*)

Formasi Mentemoi terdiri atas batupasir pada bagian bawah dan batupasir arkosa pada bagian atas yang berbutir halus hingga kasar. Selain itu terdapat sisipan konglomerat kuarsa dan batu lempung. Formasi ini berumur eosen – oligosen.

f. Formasi Tanjung (*Tet*)

Formasi ini terdiri atas perselingan batu pasir, serpih, batu lanau dan konglomerat dan sebagian bersifat gampingan.

g. Formasi Warukin (*Tmw*)

Formasi ini terdiri atas batu pasir batu pasir tufan, gampingan, batu lanau, dan batu lempung. Formasi ini berumur kurang lebih Miosen.

h. Formasi Montalat (*Tomm*)

Formasi ini terdiri atas batu pasir kuarsa, gampingan, batu lanau, serpih dan batubara dan berumur Oligosen.

i. Formasi Terobosan Sintang (*Toms*)

Formasi ini merupakan terobosan korok dan rentas andesit dan basal dengan umur Miosen Awal.

j. Batuan Gunung Api Malasan (Tomv)

Formasi ini terdiri atas breksi gunung api, tuf, aglomerat, dan lava andesit. Formasi ini berumur Miosen Awal dan diendapkan di lingkungan litoral.

k. Formasi Dahor (TQd)

Formasi dahor terdiri atas batuan konglomerat coklat kehitaman, batupasir, batu lempung karbonan. Formasi ini diduga berumur Pliosen-Plistosen.

Tabel 2.4

Formasi Geologi di Kabupaten Gunung Mas

Formasi Geologi	Luas	Persen
Aluvial	36079.09	3.86
Batu Pasir Haloq	140231.47	15.01
Batuan Gunung Api Malahan	88496.09	9.47
Batuan Malihan Pinoh	104121.95	11.15
Batuan Terobosan Sintang	9539.62	1.02
Formasi Dahor	28335.47	3.03
Formasi Mentalat	5690.58	0.61
Formasi Pembuang	132004.5	14.13
Formasi Tanjung	901.71	0.1
Formasi Warukin	134124.09	14.36
Sungai / Danau / Telaga	3596.29	0.38
Tonalit Sepauk	251085.09	26.88
Jumlah	934205.95	100

Sumber : Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Gunung Mas

5. Kondisi Klimatologi

Kabupaten Gunung Mas memiliki iklim tropis dengan temperatur rata-rata di tahun 2024 sebesar 27,03°C hingga 28,30°C. Namun jika dilihat dari minimumnya, suhu di Kabupaten Gunung Mas sempat mencapai 21,50°C pada bulan Juni dan September. Sedangkan suhu

maksimum berada pada bulan September juga dengan maksimal suhu mencapai 35,70°C. Dari sisi kelembaban udara, di Kabupaten Gunung Mas secara rata-rata berada pada kelembaban 78,00%-87,00%.

Kecepatan angin di Gunung Mas secara umum berada pada rata-rata 2,00 knot dengan tekanan udara rata-rata berkisar antara 1.007,00 mbar hingga 1.010,20 mbar. Adapun curah hujan selama tahun 2024, tertinggi beradadi bulan Maret dengan jumlah curah hujan mencapai 488,00 mm/tahun dan jumlah hari hujan terbanyak selama 31 hari di bulan Agustus, Oktober dan Desember.

Tabel 2.5

Pengamatan Unsur Iklim di Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2024

Bulan	Rata-rata Suhu (°C)	Rata-rata Kelembaban (%)	Rata-rata Kecepatan Angin (knot)	Rata-rata Tekanan Udara (mbar)	Jml Curah Hujan (mm/thn)	Jml Hari Hujan (hari)
Januari	27,44	84,00	2,00	1.008,90	242,70	22
Februari	27,90	83,00	2,00	1.009,50	456,00	24
Maret	27,85	83,00	2,00	1.008,60	488,00	22
April	28,18	83,00	2,00	1.007,00	222,60	16
Mei	28,37	84,00	2,00	1.007,10	329,00	16
Juni	27,47	84,00	2,00	1.008,60	99,60	18
Juli	27,03	84,00	2,00	1.009,10	77,80	28
Agustus	27,40	81,00	2,00	1.010,20	120,80	31
September	28,30	78,00	2,00	1.009,60	154,20	30
Oktober	28,12	79,00	2,00	1.010,00	195,80	31
November	27,96	82,00	2,00	1.008,20	416,50	30
Desember	27,23	87,00	1,00	1.008,10	421,10	31

Sumber : Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2025

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Laporan Akhir Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas, yang kemudian dijabarkan lagi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Gunung Mas tahun 2014-2034 tanggal 12 Agustus 2014, wilayah Kabupaten Gunung Mas terbagi kedalam 3 (tiga) Satuan Wilayah Pengembangan (SWP). Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) adalah suatu konsep pengelompokan wilayah berdasarkan kesamaan karakteristik yang dilihat dari berbagai aspek. Tujuan pengelompokan ini adalah sebagai dasar dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar tercipta keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan dalam suatu wilayah dan antar wilayah pengembangan. Agar terwujud pola pelayanan yang terpadu dan pemerataan dalam hal pembangunan dan pengembangan wilayah, maka Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) di Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut:

1. SWP 1 dengan pusat pengembangan di Kota Kuala Kurun. Wilayah termasuk kedalam SWP ini adalah Kecamatan Tewah dan Kecamatan Mihing Raya dan Sepang, disamping sebagai pusat pelayanan kabupaten, juga berfungsi sebagai pusat pengembangan wilayah bagian tengah Provinsi Kalimantan Tengah. Fungsi SWP ini sebagai pusat pemerintahan skala kabupaten, perdagangan, pertanian, perkebunan dan pariwisata sejarah.
2. SWP 2 dengan pusat pengembangan di Kota Jakatan Raya. Wilayah termasuk kedalam SWP ini adalah Kecamatan Rungan Hulu, Rungan, Manuhing, Manuhing Hulu. Fungsi wilayah adalah sebagai wilayah kabupaten bagian barat, industri pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan.
3. SWP 3 dengan pusat pengembangan di Kota Tumbang Miri. Wilayah yang termasuk kedalam SWP ini adalah Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kecamatan Damang Batu dan Kecamatan Miri Manasa. Wilayah ini relatif memiliki sumberdaya alam yang sebagian diarahkan untuk menjadi fungsi lindung.

Adapun rincian pengembangan wilayah dan arah pengembangan sarana dan prasarana pendukung dan indikasi programnya sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.6
Rencana Sistem Pusat Kegiatan Wilayah

Hirarki Pelayanan	Pusat Pengembangan Kegiatan	Arahan Pengembangan Kegiatan Utama	Arahan Pengembangan Kegiatan Penunjang Utama	Arahan Pengembangan Sarana dan Prasarana
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Ibukota Kabupaten Gunung Mas (Kuala Kurun)	Pusat Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pendidikan	Pengembangan Jalan arteri primer
		Perekonomian jasa Kabupaten dan Regional	Kesehatan	Pengembangan prasarana lingkungan
		Pusat Distribusi dan Koleksi barang dan Jasa	Peribadahan	Pengembangan fasilitas perdagangan & jasa
		Pusat Jasa Pendukung Kegiatan Perekonomian (Pengolahan & Pemasaran)	Perdagangan/ Pemasaran	Pengembangan fasilitas Pendidikan & kesehatan
		Pusat Pengembangan Wilayah Bagian Tengah KALTENG	Permukiman	Pengembangan kawasan pariwisata
		Pariwisata	Optimalisasi Bandar Udara Kuala Kurun	
			Pertambangan	

Tabel 2.7
Rencana Sistem Pusat Kegiatan Lokal Tewah

Hirarki Pelayanan	Pusat Pengembangan Kegiatan	Arahan Pengembangan Kegiatan Utama	Arahan Pengembangan Kegiatan Penunjang Utama	Arahan Pengembangan Sarana dan Prasarana
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Tewah	Pusat pengembangan sekunder untuk menunjang pusat pelayanan kota Hirarki I (PKW)	Pelayanan Sosial	Pengembangan jalan Kolektor Primer
		Pusat permukiman Pedesaan di seluruh Kecamatan	Perumahan	Pengembangan & perbaikan jalan akses ke PPK
		Perdagangan dan jasa skala wilayah pengembangan	Pertanian	Pengembangan fasilitas lingkungan
			Perkebunan dan kehutanan	Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa
			Pertambangan	
			Industri	

Tabel 2.8
Rencana Sistem Pusat Kegiatan Lokal Tumbang Miri

Hirarki Pelayanan	Pusat Pengembangan Kegiatan	Arahan Pengembangan Kegiatan Utama	Arahan Pengembangan Kegiatan Penunjang Utama	Arahan Pengembangan Sarana dan Prasarana
	Tumbang Miri	Pemukiman pedesaan di seluruh Kecamatan	Pelayanan Sosial	Pengembangan jalan kolektor primer
		Pusat pengumpul hasil bumi	Perumahan	Pengembangan & perbaikan jalan akses ke PPK
		Industri pengolahan hasil-hasil pertanian	Pertanian	Pengembangan fasilitas lingkungan
		Distributor barang dan jasa skala regional	Perkebunan dan Kehutanan	Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa
			Industri	Pengembangan fasilitas pendidikan dan Kesehatan
			Pertambangan	Optimalisasi Pelabuhan Sungai
				Pengembangan industri

Tabel 2.9
Rencana Sistem Pusat Kegiatan Lokal Sepang Simin

Hirarki Pelayanan	Pusat Pengembangan Kegiatan	Arahan Pengembangan Kegiatan Utama	Arahan Pengembangan Kegiatan Penunjang Utama	Arahan Pengembangan Sarana dan Prasarana
Sepang Simin		Pusat pemukiman	Pelayanan Sosial	Pengembangan jalan kolektor primer
		Pemukiman pedesaan di seluruh Kecamatan	Perumahan	Pengembangan & perbaikan jalan akses ke PPK
		Pusat pengumpul hasil bumi	Pertanian	Pengembangan fasilitas lingkungan
		Industri pengolahan hasil pertanian	Perkebunan	Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa
		Distributor barang dan jasa skala regional	Kehutanan	Pengembangan fasilitas pendidikan dan Kesehatan
			Pertambangan	Pengembangan industri

Tabel 2.10
Rencana Sistem Pusat Kegiatan Lokal Jakatan Raya

Hirarki Pelayanan	Pusat Pengembangan Kegiatan	Arahan Pengembangan Kegiatan Utama	Arahan Pengembangan Kegiatan Penunjang Utama	Arahan Pengembangan Sarana dan Prasarana
Jakatan Raya		Pusat pengembangan sekunder untuk menunjang pusat pelayanan kota hirarki I (PKW)	Pelayanan Sosial	Pengembangan jalan arteri primer
		Pusat pemukiman pedesaan di seluruh kecamatan	Perumahan	Pengembangan dan perbaikan jalan akses ke PPK
		Perdagangan dan jasa skala wilayah pengembangan	Pertanian	Pengembangan fasilitas lingkungan
		Pusat pengumpul hasil bumi	Perkebunan dan kehutanan	Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa
		Industri pengolahan hasil-hasil pertanian	Industri	Pengembangan fasilitas pendidikan dan Kesehatan
		Distributor barang dan jasa skala regional	Pertambangan	Pengembangan industri
				Optimalisasi Pelabuhan sungai

Tabel 2.11

Rencana Sistem Pusat Kegiatan Lokal Tumbang Talaken

Hirarki Pelayanan	Pusat Pengembangan Kegiatan	Arahan Pengembangan Kegiatan Utama	Arahan Pengembangan Kegiatan Penunjang Utama	Arahan Pengembangan Sarana dan Prasarana
	Tumbang Talaken	Pusat pemukiman pedesaan di seluruh Kecamatan	Pelayanan Sosial	Pengembangan jalan arteri primer
		Perdagangan dan jasa skala wilayah pengembangan	Perumahan	Pengembangan & perbaikan jalan akses ke PPK
		Pusat pengumpul hasil bumi	Pertanian	Pengembangan fasilitas lingkungan
		Industri pengolahan hasil-hasil pertanian	Perkebunan dan kehutanan	Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa
		Distributor barang dan jasa skala regional	Industri	Pengembangan fasilitas pendidikan & Kesehatan
				Pengembangan industri

Sumber: Laporan Akhir RTRW Gunung Mas, 2014

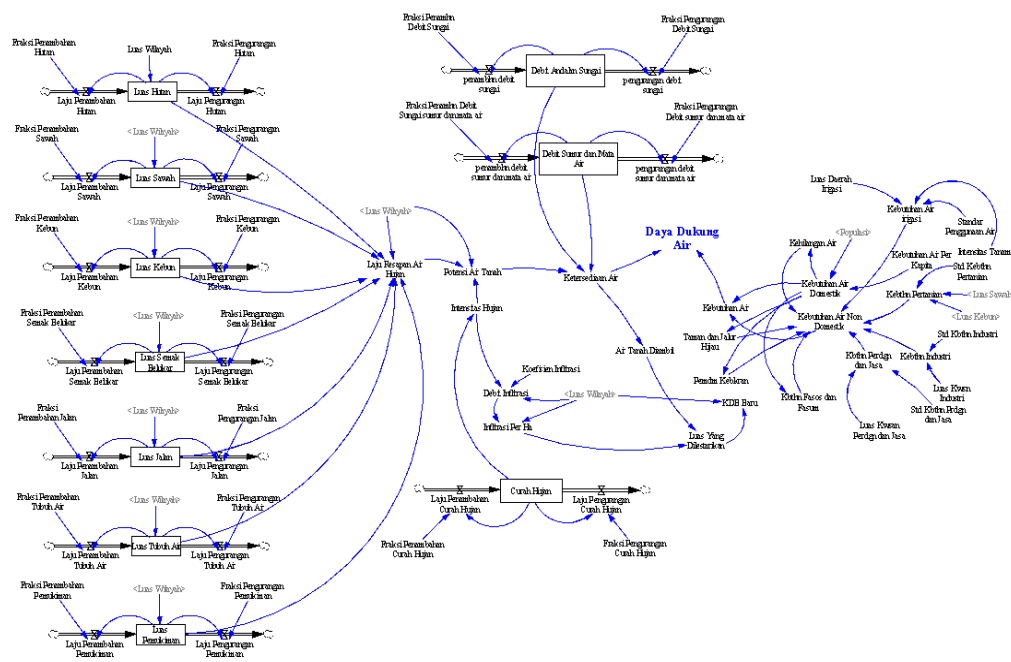
2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH) dilakukan untuk mengukur kemampuan suatu ekosistem dalam mendukung rangkaian aktivitas pembangunan dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada.

1. Daya Dukung Air

Gambar 2.6

Gambar Model Daya Dukung Air



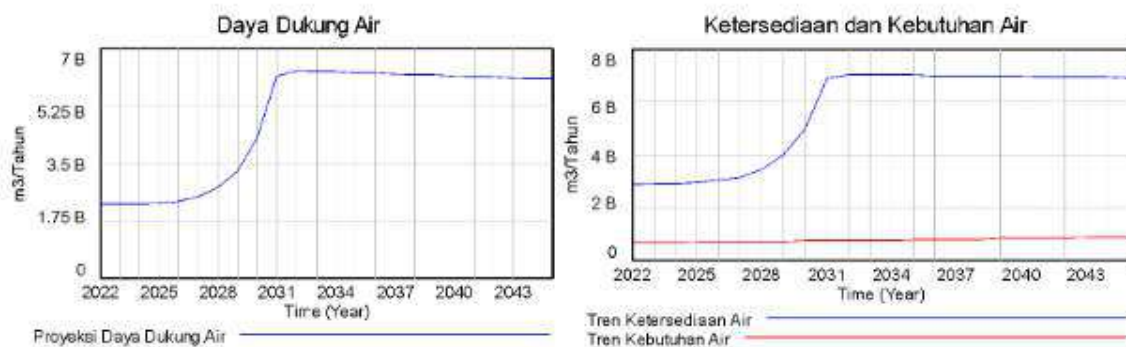
Sumber: Modifikasi dan pengembangan bersama KLHS Center Squad

Selain perhitungan juga dikembangkan model daya dukung air berdasarkan pemodelan sistem dinamis yang diintegrasikan dengan metode *euler*. Di dalam model tersebut dipertimbangkan ketersediaan air yang berasal dari potensi air tanah, debit andalan sungai, sumur dan mata air. Selain itu juga dipertimbangkan kebutuhan air yang berasal dari kebutuhan domestik dan non-domestik. Hasilnya didapat daya dukung air di Kabupaten Gunung Mas bernilai positif yang artinya ketersediaan air

masih melimpah sehingga masih memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai sumberdaya alam dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Gunung Mas. Hasil dari proyeksi ketersediaan dan kebutuhan air sampai dengan tahun 2045 seperti pada gambar di bawah juga menunjukkan ketersediaan air masih melimpah dalam memenuhi kebutuhan air baik dari domestik maupun non-domestik.

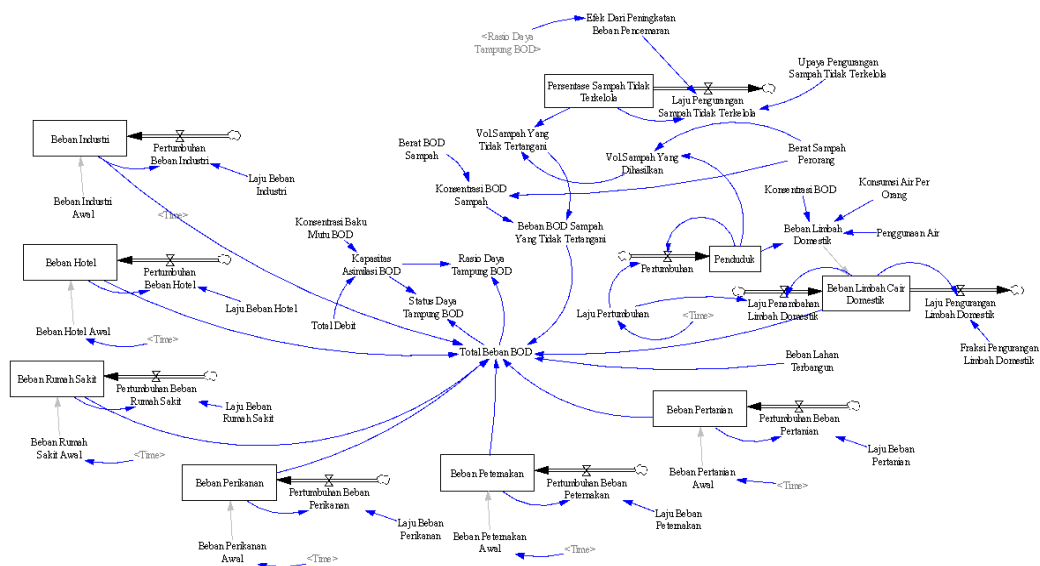
Gambar 2.7

Grafik Daya Dukung Air serta proyeksi ketersediaan dan kebutuhan air di Kabupaten Gunung Mas



2. Daya Tampung Beban Pencemaran

Gambar 2.8



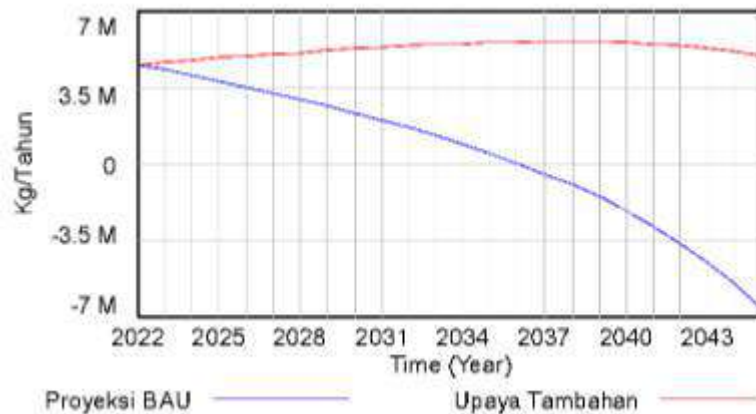
Sumber: Modifikasi dan pengembangan 22ersama KLHS Center Squad

Model daya tampung beban pencemaran dilakukan dengan permodelan sistem dinamik yang diintegrasikan dengan metode euler. Di dalam model tersebut dipertimbangkan sumber-sumber pencemar khususnya *Biological Oxygen Demand* (BOD) yang umumnya merupakan parameter yang selalu diukur dalam berbagai standar kualitas air. Sumber-sumber pencemaran tersebut antara lain dari sampah tidak terkelola, limbah domestik, perikanan, peternakan, perkebunan, rumah sakit, hotel dan industri. Dalam model tersebut masih terdapat data-data yang belum didapat yakni terkait industri, hotel dan rumah sakit sehingga masih diperlukan perbaikan dikemudian hari. Namun demikian dari data-data yang tersedia diharapkan sudah dapat menggambarkan daya tampung beban pencemaran di Kabupaten Gunung Mas. Berdasarkan data dan model yang disusun didapat beban pencemaran terbesar berasal dari sampah yang tidak tertangani dan limbah cair domestik. Selain itu hal yang perlu diperhatikan adalah peningkatan beban pencemaran dari

peternakan dimana peningkatan jumlah ternak tanpa adanya pengolahan limbah tentu akan meningkatkan debit BOD.

Gambar 2.9

Gambar Grafik Daya Tampung Beban Pencemaran

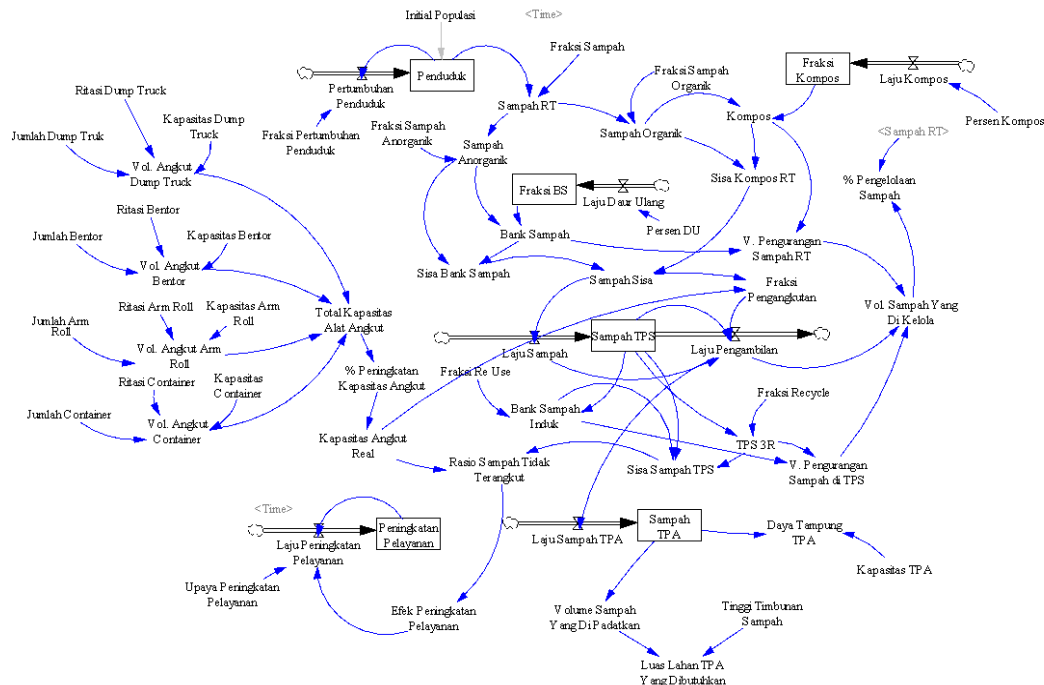


Proyeksi daya tampung beban pencemaran dari tahun 2022-2045 pada gambar di atas menunjukkan penurunan dimana nilai awal positif dan pada tahun 2036 diproyeksikan menjadi negatif akibat peningkatan penduduk dan sampah yang tidak terkelola serta industri lainnya. Dari hasil tersebut diperlukan upaya tambahan untuk menjaga daya tampung beban pencemaran tetap positif. Upaya tambahan yang diperlukan khususnya pada pengurangan sampah tidak terkelola sebesar 5%, pengurangan limbah domestik 3% dan penurunan laju beban peternakan sebesar 14%.

3. Pengelolaan Persampahan

Gambar 2.10

Gambar Model Pengelolaan Persampahan



Sumber: Modifikasi dan pengembangan bersama KLHS Center Squad

Model status pengelolaan persampahan dilakukan dengan permodelan sistem dinamik yang diintegrasikan dengan metode euler. Didalam model tersebut mempertimbangkan sampah yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga dengan mempertimbangkan pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Gunung Mas, pengelolaan sampah baik organik dan anorganik, kapasitas tempat pembuangan akhir, sisa sampah di tempat pembuangan sementara, serta kapasitas angkut sampah dalam melayani masyarakat. Dari hasil model tersebut, secara real infrastruktur pelayanan baik kapasitas TPA dan kapasitas angkut sampah masih jauh dibandingkan proyeksi sampah yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga seperti pada gambar di bawah. Hal ini terlihat dari grafik antara peningkatan sampah rumah tangga, kapasitas angkut dan kapasitas TPA

yang tersedia. Oleh karena itu diperlukan upaya tambahan dalam pengelolaan persampahan.

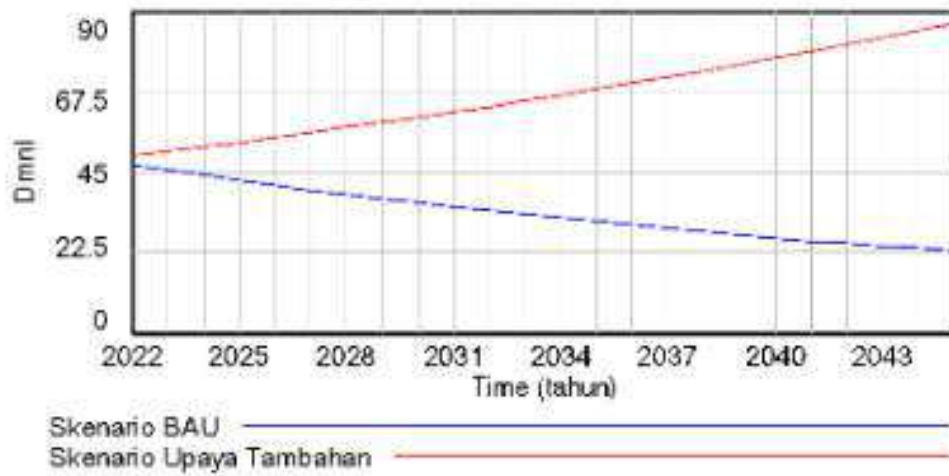
Gambar 2.11
Grafik Peningkatan Sampah Rumah Tangga, Kapasitas Angkut dan TPA



Gambar persentase pengelolaan persampahan menunjukkan sampah yang dikelola oleh kabupaten Gunung Mas, pada kondisi saat ini hanya sekitar 46% sampah yang dikelola oleh Kabupaten Gunung Mas dan diproyeksikan akan terus menurun seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan tidak adanya pengelolaan sampah organik dan anorganik. Dalam kasus ini untuk meningkatkan persentase pengelolaan sampah melebihi 80% diperlukan upaya tambahan berupa pemanfaatan kembali sampah anorganik dengan upaya 2% dan komposting sampah organik sebesar 3%. Selain itu dalam menurunkan rasio sampah tidak terangkut diperlukan peningkatan pelayanan dalam pengangkutan persampahan yang merata di Kabupaten Gunung Mas sebesar 20% seperti ditunjukkan pada gambar II.13 di bawah grafik rasio sampah tidak terangkut.

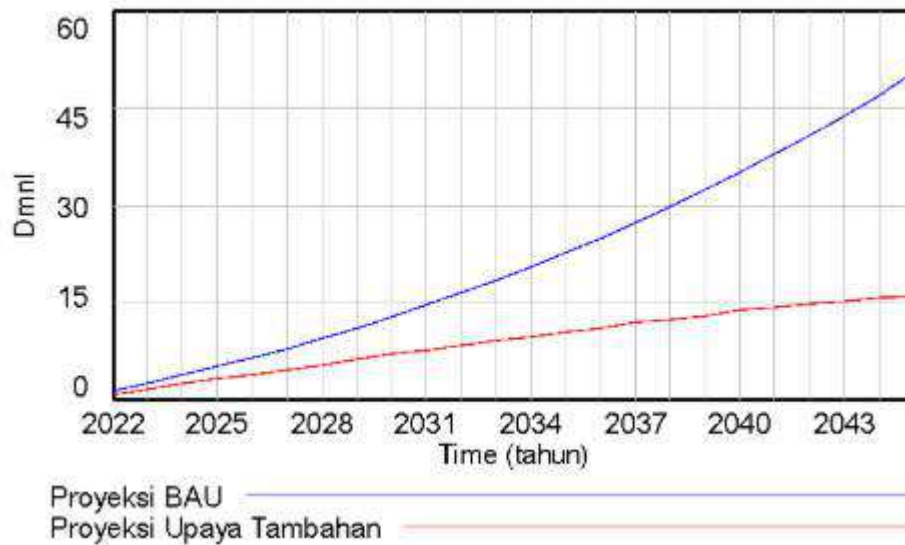
Gambar 2.12

Persentase Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Gunung Mas



Gambar 2.13

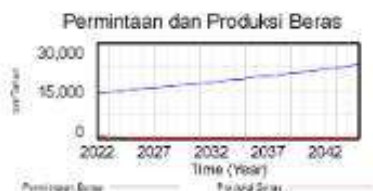
Grafik Rasio Sampah Tidak Terangkut



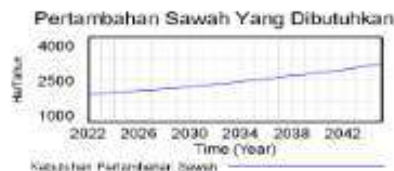
Penurunan produksi beras tersebut tentu akan mengakibatkan gap antara permintaan dan produksi beras semakin besar, sehingga kabupaten Gunung Mas bergantung dari produksi beras diluar kabupaten dengan jumlah yang besar seperti pada grafik antara produksi dan permintaan beras pada Gambar 6.11(a). Hal tersebut juga tercermin dari rasio daya dukung pangan dibawah satu seperti pada Gambar II.16. Untuk mengatasi hal tersebut secara keseluruhan diperlukan peningkatan produksi beras melalui pencetakan sawah pada tahap awal sebesar 1.947 ha/tahun dan terus meningkat. Upaya tambahan yang diperlukan untuk meningkatkan rasio daya dukung pangan minimal sebesar 42%, hal ini menggambarkan diperlukan usaha yang sangat besar dalam mengatasi masalah pangan yang ada di Kabupaten Gunung Mas. Dari hasil tersebut Kabupaten Gunung Mas yang memiliki daya dukung air yang tinggi dapat dimanfaatkan dalam mendukung daya dukung pangan.

Gambar 2.16

Grafik Daya Dukung Pangan



a) Grafik Gap antara produksi dan permintaan beras



b) Grafik laju pertambahan sawa yang diperlukan



c) Grafik Rasio Daya Dukung Pangan BAU dan Upaya Tambahan

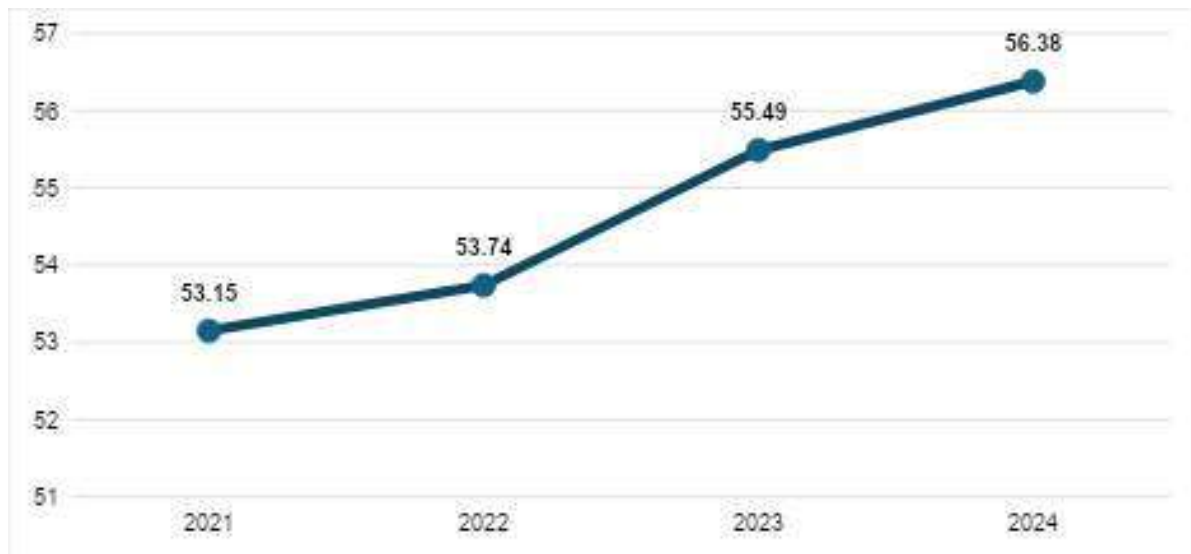
2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan secara menyeluruh, mulai dari tingkat nasional hingga individu, yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup baik secara jumlah maupun mutu, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Hal ini juga harus sejalan dengan nilai-nilai agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, guna menjamin kehidupan yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi memerlukan pendekatan sistemik lintas sektor, yang mencakup upaya peningkatan produksi pangan domestik, stabilisasi ketersediaan dan akses pangan di berbagai tingkatan, serta peningkatan kualitas konsumsi pangan yang didukung oleh infrastruktur yang memadai. Selain itu, kebijakan ekonomi makro yang stabil juga sangat dibutuhkan untuk menjamin kelancaran pasokan dan harga pangan.

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas tahun 2024 berada pada angka 56,38 dengan peringkat 462 secara nasional. Peringkat ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan besar yang harus diatasi di wilayah ini. Beberapa faktor yang kemungkinan besar mempengaruhi rendahnya indeks tersebut antara lain keterbatasan infrastruktur pendukung seperti jaringan transportasi dan distribusi pangan, rendahnya kapasitas produksi pertanian lokal, serta kurang optimalnya akses masyarakat terhadap pangan bergizi dan aman. Selain itu, tantangan geografis serta keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan lintas sektor juga dapat menjadi kendala dalam mewujudkan sistem pangan yang tangguh. Upaya perbaikan secara menyeluruh dan terintegrasi perlu dilakukan, baik dari sisi produksi, distribusi, konsumsi, maupun penguatan kelembagaan pangan di tingkat daerah.

Gambar 2.17

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2024



Sumber: Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2022-2025

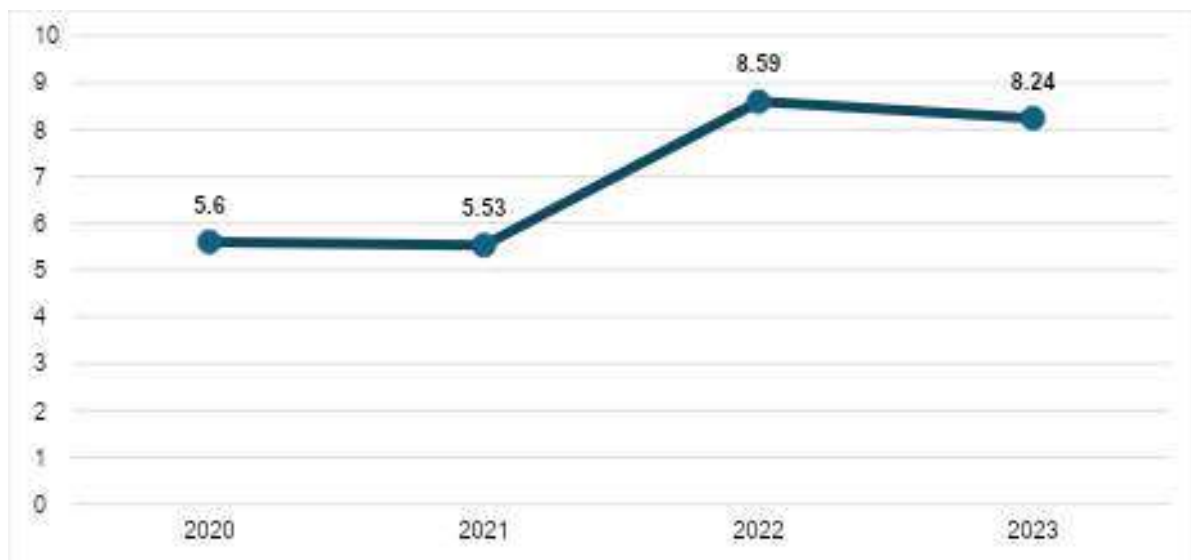
Prevalensi Ketidakcukupan Pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur persentase penduduk suatu wilayah yang diperkirakan tidak memperoleh asupan energi makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum harian. Indikator ini sangat bermanfaat dalam memantau kondisi ketahanan pangan dan gizi masyarakat, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan intervensi pemerintah untuk mengurangi kelaparan dan kekurangan gizi. Semakin rendah angka PoU, semakin baik pula kondisi ketahanan pangan suatu daerah karena menandakan bahwa lebih banyak penduduk yang telah mampu mengakses pangan yang cukup secara kuantitatif.

Capaian PoU di Kabupaten Gunung Mas menunjukkan tren yang kurang stabil dalam kurun waktu 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, prevalensi ketidakcukupan pangan tercatat sebesar 5,6% dan sedikit menurun menjadi 5,53% pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi peningkatan hingga mencapai 8,59%, sebelum akhirnya menurun menjadi 8,24% di tahun 2023. Kenaikan ini dipicu oleh gangguan

distribusi akibat kondisi geografis yang sulit dijangkau, ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah, serta rendahnya produktivitas pertanian lokal akibat keterbatasan sarana, teknologi, dan pendampingan. Selain itu, rendahnya daya beli masyarakat dan kurangnya edukasi gizi turut memperburuk akses dan konsumsi pangan yang cukup dan berkualitas. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi terintegrasi yang mencakup penguatan produksi lokal, perbaikan infrastruktur distribusi, serta peningkatan literasi pangan dan perlindungan sosial untuk menurunkan angka PoU secara berkelanjutan.

Gambar 2.18

Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2023



Sumber: BPS RI, 2024

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur kondisi lingkungan suatu wilayah secara keseluruhan. IKLH mencakup tiga komponen utama, yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Ketiga komponen ini mencerminkan kualitas sumber daya alam yang menjadi penopang kehidupan manusia. IKLH bermanfaat dalam

mengevaluasi efektivitas kebijakan lingkungan, memantau tren kualitas lingkungan dari waktu ke waktu, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan data IKLH Kabupaten Gunung Mas tahun 2020–2024, terlihat adanya variasi capaian dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, IKLH berada di angka 76, kemudian menurun menjadi 69,8 pada tahun 2021, dan terus mengalami sedikit penurunan hingga mencapai 68,82 di tahun 2022. Namun pada tahun 2023, terjadi sedikit peningkatan menjadi 70,58, sebelum kembali menurun ke angka 69,33 pada tahun 2024. Komponen yang paling stabil dan tinggi adalah Indeks Kualitas Udara, dengan peningkatan signifikan dari 89 (2020) menjadi 92,82 (2024). Sebaliknya, Indeks Kualitas Air menunjukkan tren penurunan, dari 46 (2020) menjadi 42,86 (2024), yang dapat menjadi perhatian khusus dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah ini. Indeks Kualitas Tutupan Lahan relatif stabil meski sedikit menurun di tahun 2023, lalu naik kembali di 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kualitas udara cukup baik dan tutupan lahan terjaga, tantangan utama terletak pada peningkatan kualitas air sebagai upaya menjaga keseimbangan ekologi secara keseluruhan.

Tabel 2.12

**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Gunung Mas,
Tahun 2020 – 2024**

Komponen IKLH	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air	46	50,00	46,67	50,00	42.86
Indeks Kualitas Udara	89	87,65	87,85	89,64	92.82
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	90	71,25	71,25	70,66	71.31
IKLH	76	69,8	68,82	70,58	69.33

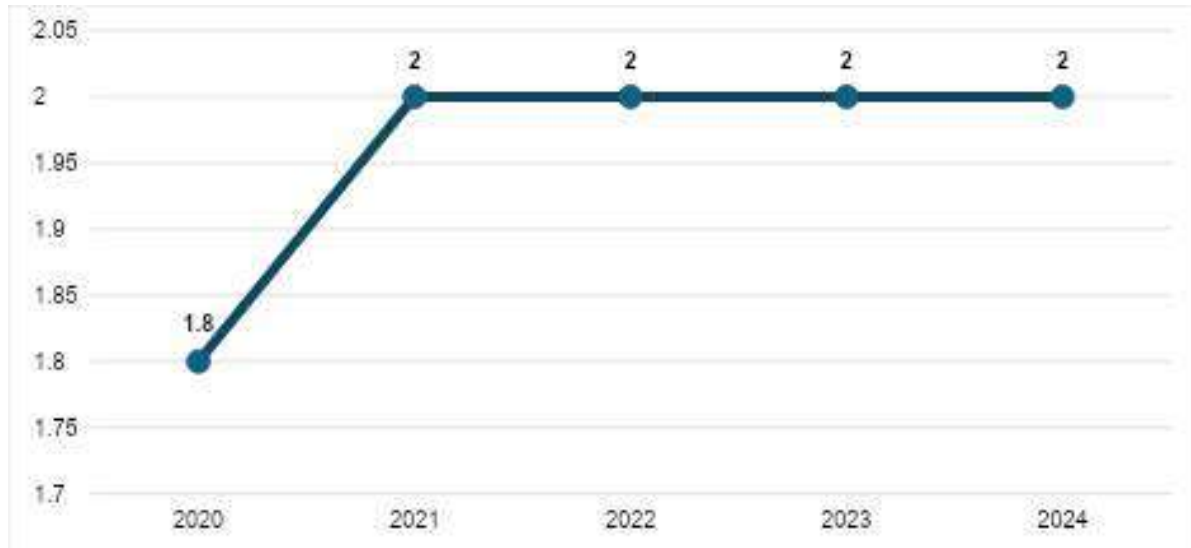
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan, 2025

Selain dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), kualitas lingkungan hidup juga dapat diukur melalui indikator akses

sanitasi aman oleh rumah tangga. Akses terhadap sanitasi yang layak dan aman merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah pencemaran lingkungan. Berdasarkan data di Kabupaten Gunung Mas tahun 2020–2024, proporsi rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman masih sangat rendah dan stagnan. Pada tahun 2020, angka ini berada di 1,8%, kemudian meningkat sedikit menjadi 2% pada tahun 2021, dan stagnan di angka tersebut hingga tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya perbaikan, namun peningkatan akses sanitasi aman masih sangat minim dalam lima tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan perlunya intervensi lebih serius, baik dalam bentuk infrastruktur maupun edukasi kepada masyarakat, agar standar sanitasi dapat ditingkatkan secara lebih merata dan berkelanjutan di wilayah ini.

Gambar 2.19

**Rumah Tangga mempunyai Akses Sanitasi Aman di
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (%)**



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2025

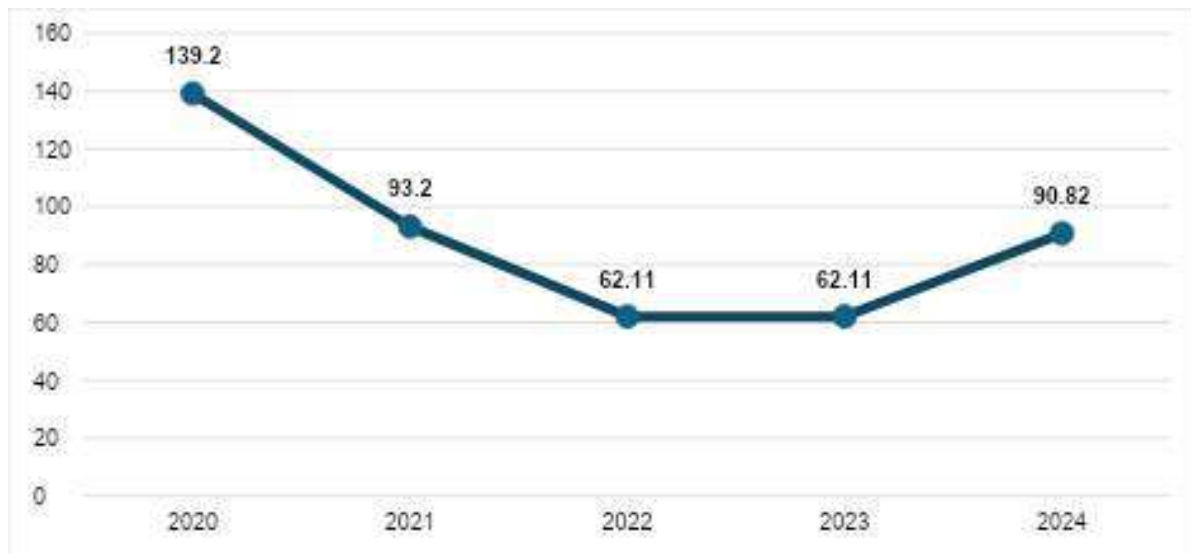
2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang dikembangkan oleh BNPB disusun berdasarkan tiga komponen utama, yaitu bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*). Bahaya dihitung berdasarkan kemungkinan kejadian suatu bencana secara spasial, frekuensi, dan kekuatannya, seperti gempa, banjir, dan letusan gunung api. Kerentanan mencakup aspek sosial, ekonomi, fisik, dan lingkungan yang membuat suatu wilayah rentan terhadap bencana. Sementara itu, kapasitas mencerminkan kemampuan daerah dalam menghadapi bencana, diukur melalui tujuh prioritas seperti kebijakan, perencanaan, sistem informasi, kesiapsiagaan, dan pemulihan.

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Kabupaten Gunung Mas tahun 2020–2024, terlihat adanya tren penurunan signifikan dari tahun 2020 (139,2) ke tahun 2022 (62,11), yang menunjukkan perbaikan dalam pengurangan risiko bencana, baik dari sisi mitigasi maupun kapasitas penanganan. Namun, pada tahun 2024 terjadi kenaikan kembali menjadi 90,82. Peningkatan ini bisa mengindikasikan adanya penurunan kapasitas daerah atau meningkatnya ancaman bencana yang belum diimbangi dengan strategi mitigasi yang cukup. Meskipun nilai tahun 2024 masih lebih rendah dibandingkan tahun 2020, tren ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kebijakan pengurangan risiko dan peningkatan kesiapsiagaan di tingkat lokal agar capaian positif di tahun-tahun sebelumnya dapat dipertahankan atau ditingkatkan.

Gambar 2.20

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024



Sumber: Inarisk, 2024

2.1.1.7 Demografi

Aspek demografi dalam pembangunan Kabupaten Gunung Mas mencakup analisis dan pemahaman karakteristik populasi yang berpengaruh pada perencanaan pembangunan. Penduduk sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan wilayah merupakan salah satu potensi internal yang cukup penting dalam pengembangan wilayah itu sendiri, dimana kualitas pengelolaan potensi dan kapasitas penduduk akan menentukan tingkat keberhasilan pembangunan daerah

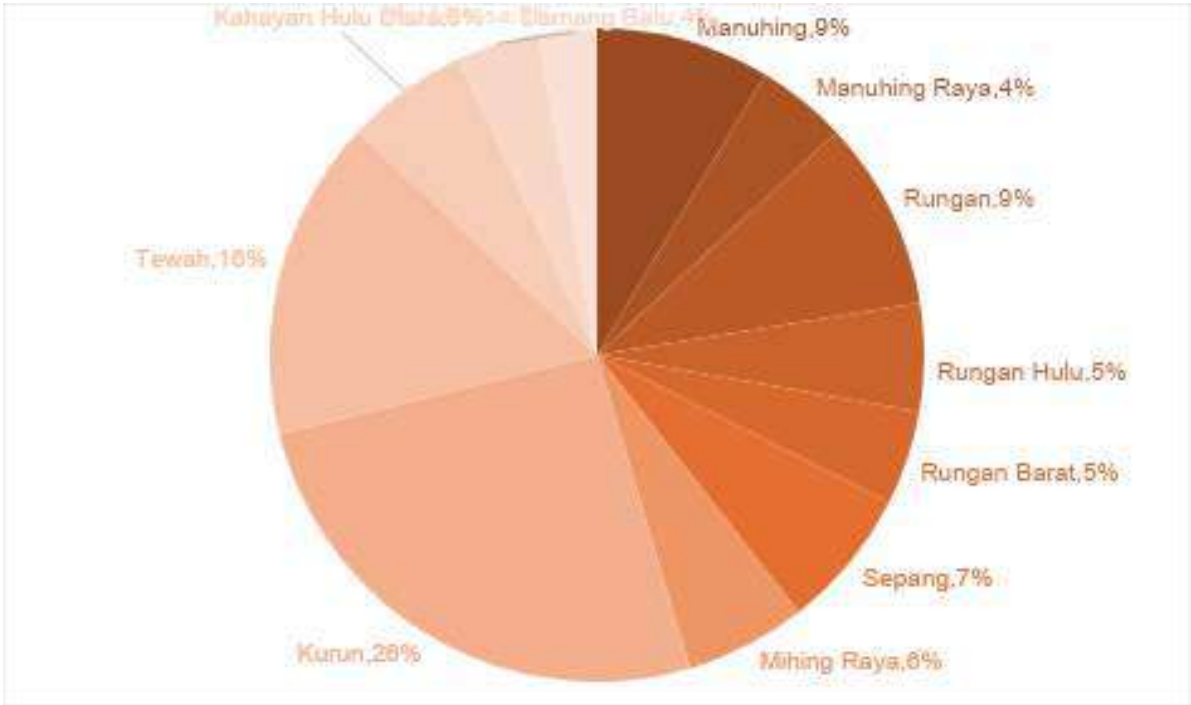
1. Kependudukan

Jumlah penduduk senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Terdapat beragam faktor yang menyebabkan perubahan jumlah penduduk. Misalnya, wabah penyakit atau epidemi, kelaparan, dan bencana alam. Di lain pihak, kestabilan wilayah, peningkatan gizi, dan kesehatan dapat mengakibatkan jumlah penduduk cenderung naik. Fenomena bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk dari waktu ke waktu dalam suatu wilayah tertentu sehingga gejala dinamika penduduk dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu kelahiran (fertilitas atau natalitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan penduduk (migrasi).

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan. Dengan kata lain bahwa sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu pembangunan sumberdaya manusia merupakan suatu keharusan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan di Kabupaten Gunung Mas. Sebagai input dalam setiap penyusunan rencana pembangunan, maka pengetahuan tentang data kondisi kependudukan eksisting di wilayah rencana sangat dibutuhkan.

Jumlah penduduk Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2024 berdasarkan data BPS mencapai 145,53 ribu jiwa, terdiri dari 76,40 ribu laki-laki dan 69,13 ribu perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 111. Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2023 ke 2024 tercatat sebesar 1,89%, menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk dalam satu tahun terakhir. Adapun kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Kurun (37,4 ribu jiwa), Kecamatan Tewah (23,07 ribu jiwa), Kecamatan Rungan (13,63 ribu jiwa), dan Kecamatan Manuhing (12,54 ribu jiwa), yang menempati posisi empat teratas dalam jumlah populasi di Kabupaten Gunung Mas.

Gambar 2.21
Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten
Gunung Mas Tahun 2024



Tabel 2.13
Jumlah, Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Persentase Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
1	Manuhing	12,54	8,61	2,86
2	Manuhing Raya	6,5	4,47	0,79
3	Rungan	13,63	9,37	1,58
4	Rungan Hulu	7,75	5,32	1,02
5	Rungan Barat	6,8	4,67	0,39
6	Sepang	10,16	6,98	3,23
7	Mihing Raya	8,73	6	3,23
8	Kurun	37,4	25,7	2,88

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Persentase Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
9	Tewah	23,07	15,85	1,24
10	Kahayan Hulu Utara	8,85	6,08	0,32
11	Damang Batu	5,93	4,07	2,13
12	Miri Minasa	4,2	2,89	0,32
Gunung Mas		145,534	100	1,95

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2025

2. Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Gunung Mas selalu naik setiap tahunnya. Pada tahun 2024 sebanyak 145,534 jiwa. Analisis kependudukan salah satu nya adalah piramida penduduk yang dilihat dari karakteristik umur. Piramida penduduk merupakan sebuah gambaran awal mengenai struktur kependudukan yang dilihat dari segi umur penduduk dan jenis kelamin untuk dianalisis mengenai produktivitas umur. Jika dilihat dari bentuk piramida penduduk Kabupaten Gunung Mas, menggambarkan sebagian besar penduduk Kabupaten Gunung Mas berada pada usia muda lebih dominan dibandingkan dengan orang-orang yang masuk dalam usia produktif. Jumlah penduduk usia muda perlu diikuti oleh upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas manusia melalui pendidikan dan kesehatan. di satu sisi pertumbuhan Penduduk ini merupakan modal dasar pembangunan yang cukup potensial, namun disisi lain juga mengandung permasalahan yang cukup krusial apabila pertumbuhannya tidak dikendalikan.

Tabel 2.14
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di
Kabupaten Gunung Mas (Ribu Jiwa) Tahun 2024

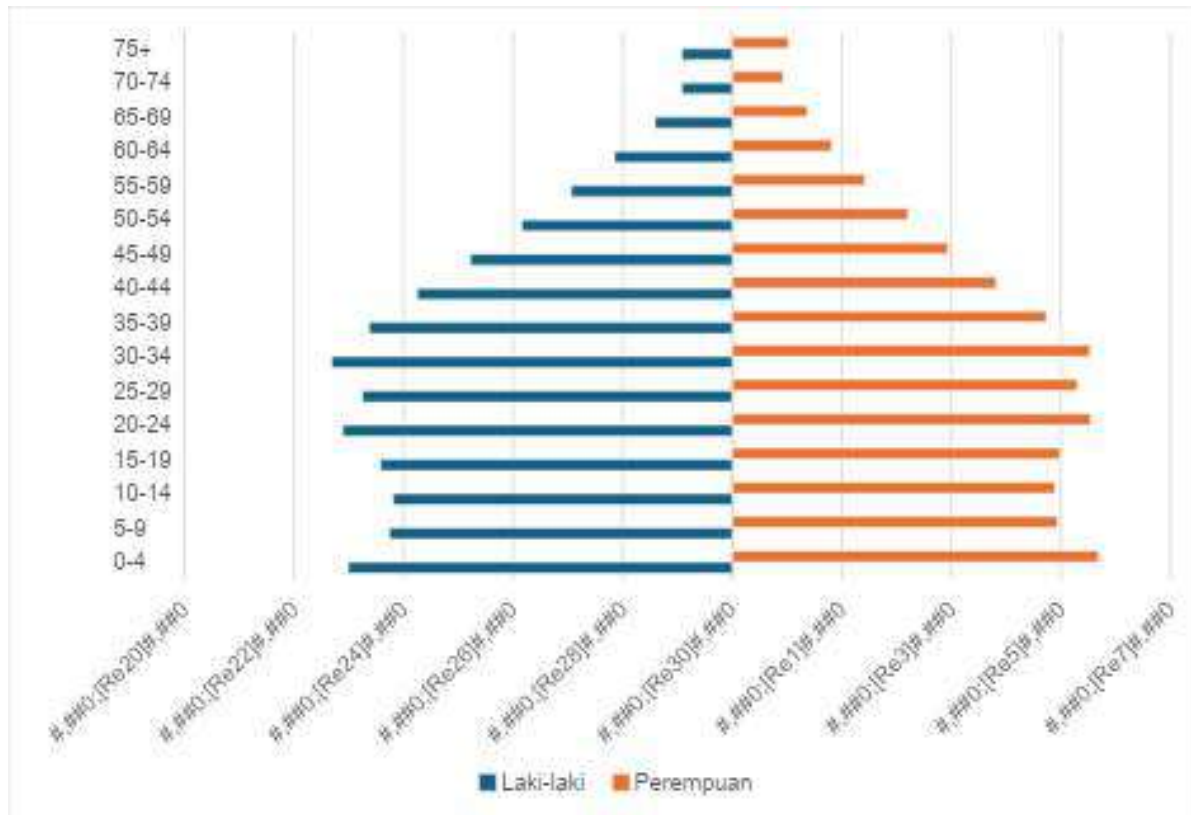
Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	7,01	6,69	13,7
5-9	6,26	5,94	12,2
10-14	6,19	5,89	12,07
15-19	6,42	5,98	12,4
20-24	7,11	6,54	13,66
25-29	6,75	6,3	13,05
30-34	7,31	6,53	13,84
35-39	6,63	5,73	12,36
40-44	5,75	4,82	10,57
45-49	4,78	3,94	8,72
50-54	3,84	3,21	7,05
55-59	2,94	2,42	5,36
60-64	2,15	1,82	3,97
65-69	1,41	1,37	2,78
70-74	0,92	0,93	1,86
75+	0,92	1,03	1,95
Kabupaten Gunung Mas	76,4	69,13	145,53

Sumber: BPS Kabupaten Gunung Mas, 2025

Salah satu langkah antisipasi untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang begitu cepat adalah menggugah kesadaran masyarakat dan sosialisasi secara berkelanjutan kepada keluarga usia produktif untuk lebih berpartisipasi secara aktif dalam pemantapan dan peningkatan program Keluarga Berencana (KB).

Gambar 2.22

Piramida Penduduk Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 (ribu jiwa)



Sumber: BPS Kabupaten Gunung Mas, 2025

3. Keberadaan Masyarakat Adat

Kabupaten Gunung Mas merupakan salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia, yang memiliki kekayaan budaya serta keberagaman masyarakat adat yang masih kuat menjaga tradisi dan kearifan lokal mereka. Keberadaan masyarakat adat di wilayah ini menjadi bagian penting dari identitas budaya daerah dan warisan bangsa. Beberapa kelompok masyarakat adat yang hidup di Kabupaten Gunung Mas dan memiliki keberagaman budaya serta tradisi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Suku Dayak Ngaju: Suku Dayak Ngaju merupakan kelompok etnis mayoritas di Kabupaten Gunung Mas. Mereka memiliki budaya yang kaya dan khas, terutama dalam hal bahasa, sistem kepercayaan (seperti Kaharingan), adat istiadat, serta seni tradisional seperti tari,

musik, dan kerajinan tangan. Kehidupan masyarakat Dayak Ngaju erat kaitannya dengan alam dan hutan, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem kepercayaan dan pola hidup mereka.

2. Suku Dayak Ot Danum: Suku ini juga merupakan bagian dari masyarakat Dayak yang mendiami wilayah Gunung Mas. Mereka memiliki dialek bahasa sendiri, serta berbagai tradisi unik seperti upacara adat dan teknik bercocok tanam tradisional. Suku Dayak Ot Danum dikenal dengan rumah betang (rumah panjang) sebagai bentuk tempat tinggal komunal yang mencerminkan nilai kebersamaan.
3. Suku Jawa dan Bali: Selain masyarakat Dayak, terdapat pula komunitas pendatang seperti suku Jawa dan Bali yang telah lama bermukim di Kabupaten Gunung Mas. Mereka datang melalui program transmigrasi dan membawa serta kebudayaan mereka sendiri, seperti dalam bentuk seni pertunjukan, adat istiadat, dan praktik keagamaan.
4. Suku-suku Minoritas Lainnya: Kabupaten Gunung Mas juga dihuni oleh kelompok etnis lain seperti suku Madura, Bugis, dan Banjar, yang meskipun jumlahnya tidak sebesar kelompok utama, turut menyumbangkan warna dalam keberagaman budaya daerah ini.

Masyarakat adat di Gunung Mas terus berupaya menjaga dan melestarikan nilai-nilai leluhur, termasuk dalam hal agama lokal (seperti Kaharingan), adat istiadat, sistem sosial tradisional, dan pengelolaan sumber daya alam secara arif. Keberadaan mereka menjadi pilar penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan budaya lokal.

Pemerintah daerah bersama dengan berbagai pihak telah melakukan berbagai langkah untuk mendukung hak-hak masyarakat adat, seperti pengakuan wilayah adat, pelestarian budaya, dan pemberdayaan ekonomi berbasis lokal. Namun demikian, tantangan seperti modernisasi, ekspansi perkebunan, penebangan hutan, dan perubahan iklim menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan hidup masyarakat adat. Oleh karena itu, perlu adanya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, yang melibatkan masyarakat adat sebagai subjek aktif dalam proses pembangunan, serta penghormatan terhadap hak-hak tradisional mereka.

4. Proyeksi Demografi Kabupaten Gunung Mas

Proyeksi penduduk merupakan perkiraan tentang bagaimana jumlah penduduk suatu wilayah akan berubah dari waktu ke waktu, berdasarkan tren demografis yang ada pada saat ini. Proyeksi penduduk juga merupakan upaya untuk memprediksi bagaimana struktur umur dan ukuran populasi suatu wilayah sehingga dapat dijadikan acuan penyusunan kebijakan khususnya dalam hal perencanaan kebijakan publik, infrastruktur, ekonomi, hingga pendidikan dan kesehatan.

Selama pelaksanaan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Gunung Mas hingga tahun 2030, diproyeksikan terjadi kenaikan jumlah penduduk secara bertahap hingga mencapai 161,46 ribu jiwa di tahun 203. Adapun rasio jenis kelamin mengalami penurunan namun masih di atas 100 yang mengindikasikan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Gunung Mas mengalami kenaikan sebagai dampak meningkatnya jumlah penduduk, namun dari sisi rasio ketergantungan, terjadi peningkatan ketergantungan antara usia non produktif terhadap penduduk usia produktif. Meskipun begitu, angka ketergantungan masih di bawah 50, yang mengindikasikan bahwa Kabupaten Gunung Mas berada pada jendela Bonus Demografi.

Kondisi ini perlu menjadi perhatian dan isu yang harus ditindaklanjuti sehingga perlu adanya program prioritas khusus dalam pemberdayaan SDM sehingga mampu mengakselerasi pencapaian pembangunan yang lebih baik. Bonus demografi juga bisa menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan baik. Sebagai salah satu contoh, kurangnya lapangan kerja dapat berakibat pada naiknya tingkat pengangguran. Selain itu, banyaknya penduduk usia produktif yang tidak dibarengi dengan naiknya kualitas sumber daya manusia, dapat mengakibatkan tingkat perekonomian masyarakat tidak mengalami eskalasi atau terjebak dalam kondisi *middle income trap*.

Tabel 2.15

Proyeksi Penduduk Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030

Indikator Proyeksi Penduduk	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)	148,23	150,94	153,61	156,26	158,87	161,46
Laki-laki	77,69	79,05	80,36	81,64	82,92	84,16
Perempuan	70,54	71,89	73,25	74,62	75,95	77,30
Rasio Jenis Kelamin	110,14	109,96	109,71	109,41	109,18	108,87
Kepadatan Penduduk	15,91	16,20	16,49	16,77	17,05	17,33
Rasio Ketergantungan	44,15	44,22	44,32	44,43	44,60	44,77
Kelompok Umur (Ribuan Jiwa)						
0-14	38,50	39,03	39,56	40,08	40,61	41,13
15-64	102,83	104,66	106,44	108,19	109,87	111,53
65+	6,90	7,25	7,61	7,99	8,39	8,80

Sumber: BPS Kalimantan Tengah, 2025, data diolah

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, ada beberapa Aspek pembangunan yang harus diperhatikan, yaitu aspek ekonomi dan sosial budaya. Pada aspek ekonomi, beberapa indikator yang umum digunakan untuk menganalisis keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta ketimpangan pendapatan.

Aspek sosial dan seni budaya terlihat dalam indikator bidang pendidikan dan kesehatan, antara lain angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), angka harapan hidup (AHH), angka kematian ibu melahirkan (AKI), balita gizi buruk, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), angka kemiskinan, selain itu Aspek kesejahteraan masyarakat berisi tentang capaian - capaian makro pembangunan yang mengindikasikan tentang kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat. Aspek ini terdiri atas fokus pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni

budaya dan olah raga dan sebagainya. Penjelasan terinci aspek kesejahteraan Masyarakat dapat dilihat dibawah ini:

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Indikator yang dipakai dalam mengukur pemerataan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi dan laju ekonomi. Indikator-indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Gunung Mas mengalami perubahan setiap tahunnya dalam periode 2020–2024. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 3,39%, yang dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 yang melanda secara global. Seiring dengan pemulihan ekonomi, pertumbuhan meningkat menjadi 5,09% pada 2021 dan terus naik secara signifikan menjadi 6,47% pada 2022, menunjukkan adanya perbaikan aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Namun, pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi sedikit melambat menjadi 4,25%, dan pada 2024 kembali mengalami kenaikan menjadi 4,48%. Meskipun mengalami perlambatan di beberapa tahun, tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunung Mas secara keseluruhan menunjukkan pergerakan positif seiring dengan upaya pemulihan dan pengembangan sektor ekonomi di daerah setempat.

Tabel 2.16

**Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten
Gunung Mas, Tahun 2020-2024**

Tahun	Harga Berlaku	Harga Konstan (2010=100)	Pertumbuhan Nyata (%)
2024	9761,7	4412,2	4,48
2023	8620	4222,9	4,25
2022	8135,3	4050,9	6,47
2021	7173,2	3804,7	5,09

Tahun	Harga Berlaku	Harga Konstan (2010=100)	Pertumbuhan Nyata (%)
2020	6275	3620,4	3,39

Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2025

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan berdasarkan harga berlaku, yaitu harga pada tahun penghitungan, serta harga konstan, yakni harga yang mengacu pada tahun dasar penghitungan. Kabupaten Gunung Mas memiliki perekonomian yang bergantung pada sektor pertanian, terutama subsektor perkebunan, karena karakteristik wilayahnya yang mendukung kegiatan tersebut. Meskipun pertumbuhan PDRB bersifat naik turun, secara tren terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Gunung Mas dalam Angka 2025, distribusi sektoral terhadap pembentukan PDRB atas harga berlaku tahun 2024 menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi penyumbang terbesar dengan 33,05%, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Sektor konstruksi juga berkontribusi cukup besar, yakni 12,63%, dan terus menunjukkan peran signifikan selama dua tahun terakhir.

Sementara itu, sektor pertambangan yang pada periode 2020–2022 memiliki kontribusi tinggi, seperti 13,69% pada 2020, terus mengalami penurunan hingga hanya 8,33% pada 2024. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya lokasi pertambangan emas di Gunung Mas, yang berdampak pada menurunnya kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian daerah. Menyadari bahwa sumber daya tambang semakin lama dapat habis, pemerintah daerah kini berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengajarkan praktik usaha pertanian, perikanan, dan peternakan sebagai alternatif sumber mata pencaharian agar masyarakat tidak lagi bergantung pada sektor pertambangan. Secara keseluruhan, distribusi PDRB Kabupaten Gunung Mas mencerminkan

dominasi sektor primer dan adanya pergeseran kontribusi antar sektor ekonomi yang perlu diantisipasi demi keberlanjutan ekonomi daerah.

Tabel 2.17

**Distribusi PDRB Kabupaten Gunung Mas Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024**

No	Sektor	2020	2021	2022	2023*	2024**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	29,2	30,86	29,56	31,69	33,05
2	Pertambangan/Penggalian	13,69	13,08	13,86	8,66	8,33
3	Industri Pengolahan	8,28	8,24	8,2	8,52	8,28
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,35	0,35	0,37	0,35
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05
6	Konstruksi	11,88	11,9	11,96	12,79	12,63
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,08	9,59	9,93	10,2	9,98
8	Transportasi dan Pergudangan	1,8	1,79	1,89	2,07	2,18
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,66	1,54	1,66	1,7	1,65
10	Informasi dan Komunikasi	1,23	1,34	1,39	1,44	1,35
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,53	0,52	0,56	0,6	0,57
12	Real Estate	2,96	2,83	2,76	2,9	2,69
13	Jasa Perusahaan	0,05	0,04	0,05	0,05	0,05
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan social Wajib	6,9	6,42	5,86	6,1	6,25
15	Jasa Pendidikan	7,79	7,37	7,79	8,39	8,24
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	3,5	3,8	3,84	4,16	4,03
17	Jasa Lainnya	0,29	0,27	0,27	0,3	0,29
Distribusi PDRB		100	100	100	100	100

Sumber : Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2025

2. Tingkat Kemiskinan

Angka kemiskinan merupakan indikator makro untuk melihat sejauh mana tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah. Kemiskinan merupakan kondisi dimana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan Kesehatan.

Angka Kemiskinan diukur berdasarkan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan (basic needs approach). Konsep ini mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality yang diterbitkan oleh Worldbank. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Selama periode 5 tahun ini garis kemiskinan cenderung meningkat/ naik tiap tahunnya, yang mana mempengaruhi juga jumlah Penduduk miskin tiap tahunnya yang ikut naik. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan - P1 merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan P2 memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Berdasarkan data tahun 2020–2024, garis kemiskinan di Kabupaten Gunung Mas mengalami kenaikan setiap tahunnya, dari Rp 438.881 pada

tahun 2020 menjadi Rp 562.332 pada tahun 2024. Seiring dengan itu, jumlah penduduk miskin juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, terdapat 5,78 ribu jiwa penduduk miskin dengan persentase 4,75%. Angka ini meningkat pada tahun 2021 menjadi 6,29 ribu jiwa dengan persentase 5,35%, yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang masih mempengaruhi perekonomian masyarakat. Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin kembali naik menjadi 6,70 ribu jiwa atau 5,64%, dengan garis kemiskinan meningkat menjadi Rp 479.550. Peningkatan ini dikarenakan kenaikan harga kebutuhan pokok serta tantangan dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin sedikit menurun menjadi 6,55 ribu jiwa dengan persentase 5,47%, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh perbaikan ekonomi dan bantuan sosial dari pemerintah. Namun, di tahun 2024, angka kemiskinan kembali meningkat menjadi 6,86 ribu jiwa, dengan persentase penduduk miskin naik menjadi 5,68%. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya garis kemiskinan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya, serta faktor ekonomi seperti kenaikan harga barang dan biaya hidup. Selain itu, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan pada tahun 2024 menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan tahun 2022, yang menandakan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin bertambah, tingkat ketimpangan ekonomi dan tingkat keparahan kemiskinan secara perlahan mulai berkurang.

Tabel 2.18

Tabel Garis Kemiskinan, Penduduk Miskin, P0, P1, dan P2 Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024

Tahun	Garis kemiskinan (Rp)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahannya Kemiskinan
2024	562.332	6,86	5,68	0,48	0,09
2023	526.341	6,55	5,47	0,49	0,06

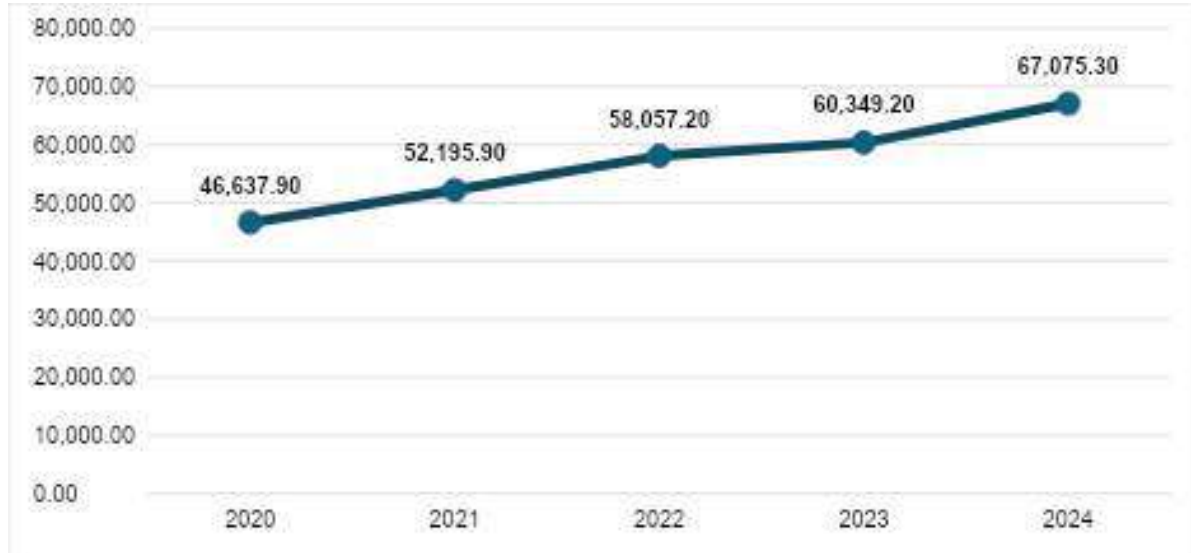
Tahun	Garis kemiskinan (Rp)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2022	479.550	6,70	5,64	0,99	0,26
2021	456.984	6,29	5,35	0,53	0,1
2020	438.881	5,78	4,75	0,75	0,21

Sumber : BPS Kabupaten Gunung Mas 2025

3. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan indikator makroekonomi yang digunakan untuk menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk di suatu wilayah, meskipun belum sepenuhnya mencerminkan distribusi pendapatan yang sesungguhnya. Di Kabupaten Gunung Mas, PDRB per kapita menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024, yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi daerah dan potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada 2020, PDRB per kapita tercatat sebesar 46.637,90 juta rupiah, kemudian mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga mencapai 67.075,30 juta rupiah pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perkembangan positif dalam aktivitas ekonomi di berbagai sektor, yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di Kabupaten Gunung Mas. Namun, untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai ketimpangan pendapatan dan distribusi ekonomi di wilayah tersebut.

Gambar 2.23
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kabupaten Gunung Mas, 2020-2024 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas dalam Angka 2025

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

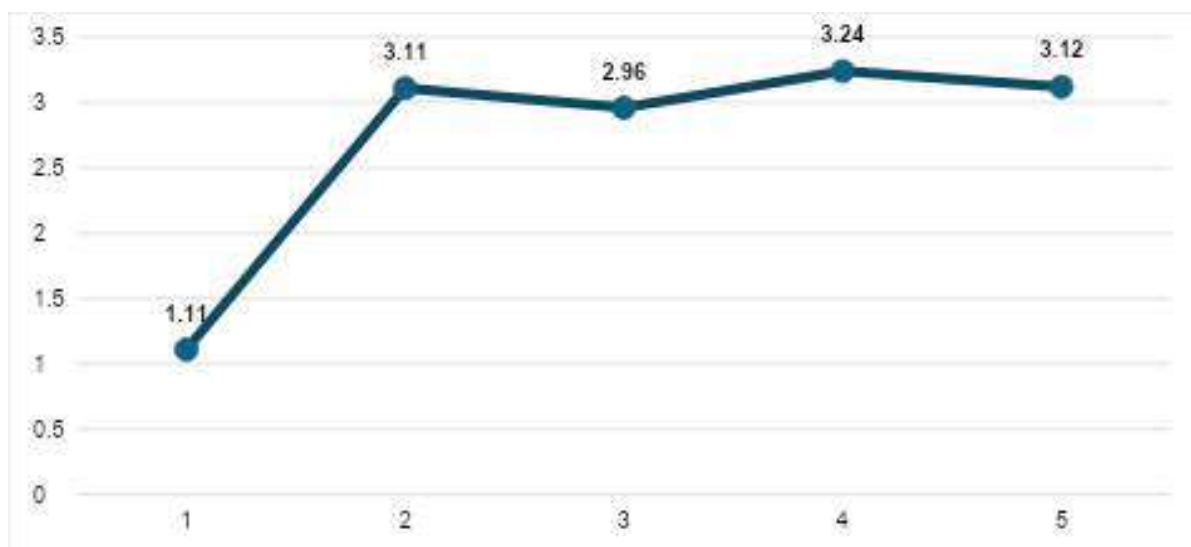
Ketenagakerjaan merupakan aspek penting dalam pembangunan daerah, karena secara langsung berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bidang ini mencerminkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menentukan tingkat pendapatan rumah tangga, yang menjadi faktor utama dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, penguatan sektor ketenagakerjaan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu indikator utama dalam menilai kondisi ketenagakerjaan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT digunakan untuk mengukur persentase penduduk usia kerja yang aktif mencari pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan. Indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai kesejahteraan ekonomi suatu wilayah, karena semakin rendah tingkat pengangguran umumnya mencerminkan adanya peningkatan dalam penyediaan lapangan kerja dan kestabilan ekonomi

masyarakat. Tingginya TPT sering kali menjadi indikator adanya ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan kerja, serta mencerminkan tantangan dalam hal kompetensi tenaga kerja dan keterbatasan akses terhadap pelatihan dan bimbingan usaha.

Di Kabupaten Gunung Mas, Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, TPT berada di angka 1,11%, namun meningkat tajam menjadi 3,11% pada tahun 2021, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 dan kebijakan pembatasan sosial. Pada 2022, angka ini sedikit membaik menjadi 2,96%, namun kembali naik menjadi 3,24% pada tahun 2023, sebelum akhirnya menurun sedikit ke 3,12% di tahun 2024. Perubahan ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya pemulihan ekonomi, tantangan dalam menciptakan kesempatan kerja yang memadai masih cukup besar dan memerlukan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Gambar 2.24
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2020 – 2024



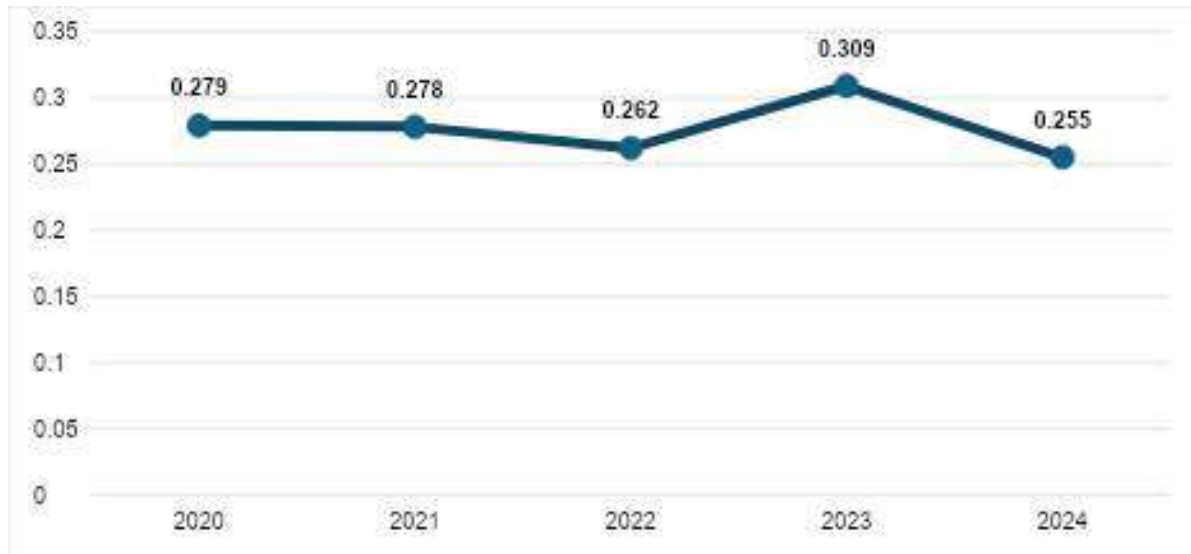
Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2025

5. Indeks Gini

Indeks Gini adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Nilai indeks ini berkisar antara 0 hingga 1, di mana angka 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama), sedangkan angka 1 menunjukkan ketimpangan yang sangat tinggi (seluruh pendapatan hanya dimiliki oleh satu orang atau kelompok). Indeks Gini menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai kesejahteraan ekonomi masyarakat, karena semakin rendah nilai indeks tersebut, semakin merata distribusi pendapatan di wilayah tersebut, yang berarti kesejahteraan masyarakat secara umum lebih baik dan kesenjangan ekonomi lebih kecil.

Di Kabupaten Gunung Mas, capaian Indeks Gini selama periode 2020–2024 menunjukkan adanya fluktuasi. Pada tahun 2020, indeks tercatat sebesar 0,279, kemudian sedikit menurun ke 0,278 pada tahun 2021, dan terus menurun hingga mencapai titik terendah yaitu 0,262 pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 terjadi lonjakan signifikan ke angka 0,309, sebelum akhirnya kembali menurun menjadi 0,255 di tahun 2024. Kenaikan tajam pada 2023 dapat mengindikasikan adanya ketimpangan pendapatan yang meningkat pada tahun tersebut yang dipengaruhi oleh ketidakseimbangan dalam pemulihan ekonomi pascapandemi, di mana sebagian kelompok masyarakat lebih cepat pulih dibandingkan kelompok lainnya. Penurunan indeks pada tahun 2024 menjadi sinyal positif bahwa kebijakan pemerataan ekonomi atau bantuan sosial mulai menunjukkan dampaknya terhadap pengurangan kesenjangan.

Gambar 2.25
Indeks Gini Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Gunung Mas, 2025

6. IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Mengutip isi Human Development Report (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Dimensi panjang umur dan sehat diukur melalui Angka Harapan Hidup. Dimensi pengetahuan diukur melalui Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Dimensi kehidupan yang layak diukur melalui Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gunung Mas menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020-2024, meskipun masih berada dalam kategori sedang dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Kalimantan Tengah. Pada 2020, IPM Kabupaten Gunung Mas tercatat sebesar 72,00, kemudian mengalami peningkatan setiap tahunnya

hingga mencapai 73,88 pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam berbagai indikator pembangunan manusia, termasuk umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran per kapita masyarakat. Meskipun demikian, capaian ini masih berada di bawah beberapa kabupaten lain di Kalimantan Tengah, sehingga perlu adanya upaya lebih lanjut untuk mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dari sisi indikator penyusun, umur harapan hidup meningkat dari 72,99 tahun pada 2020 menjadi 73,58 tahun pada 2024, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam sektor kesehatan. Harapan lama sekolah juga mengalami peningkatan dari 11,78 tahun pada 2020 menjadi 12,1 tahun pada 2024, menunjukkan semakin banyaknya peluang pendidikan bagi generasi muda. Begitu pula dengan rata-rata lama sekolah yang naik dari 9,14 tahun menjadi 9,37 tahun, menandakan bahwa masyarakat Kabupaten Gunung Mas semakin lama mengenyam pendidikan formal. Selain itu, pengeluaran per kapita terus meningkat, dari Rp 10.793 pada 2020 menjadi Rp 11.902 pada 2024, yang menunjukkan daya beli masyarakat semakin membaik. Secara keseluruhan, peningkatan IPM Kabupaten Gunung Mas mencerminkan adanya perkembangan positif dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, meskipun masih diperlukan kebijakan yang lebih strategis untuk mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Tabel 2.19

**Capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten
Gunung Mas Tahun 2020-2024**

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Umur Harapan Hidup (Tahun)	72,99	73,04	73,09	73,31	73,58
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11,78	11,9	11,91	12,05	12,10
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,14	9,18	9,24	9,25	9,37

Pengeluaran per Kapita (000 Rp/Kapita)	10.793	10.809	10.990	11462	11902
IPM	72,00	72,22	72,50	73,18	73,88

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2025

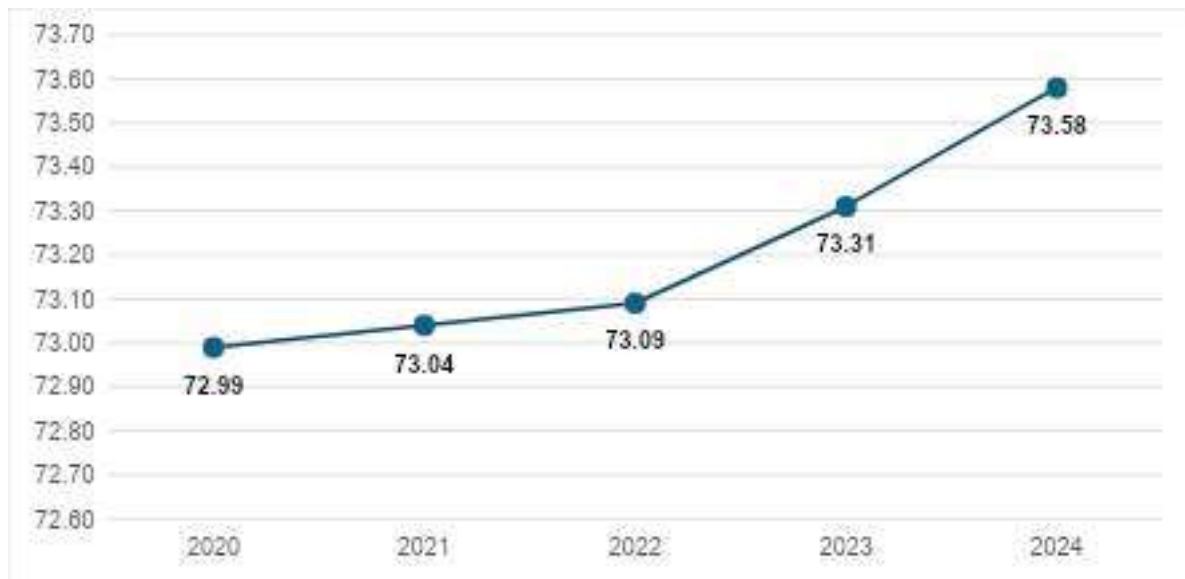
2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat sehingga capaian positifnya sangat mengindikasikan perkembangan fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah.

Angka Harapan Hidup (AHH) atau Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2020, dari 72,99 tahun menjadi 73,58 tahun. Artinya, bayi yang lahir pada tahun 2024 diperkirakan memiliki harapan hidup hingga usia 73-74 tahun, dengan asumsi pola kesehatan dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam layanan kesehatan, pola hidup yang lebih baik, serta kesadaran masyarakat dan akses yang lebih luas terhadap fasilitas kesehatan di Kabupaten Gunung Mas.

Gambar 2.26

Usia Harapan Hidup Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2025

Selama periode 2020–2024, indikator pembangunan kesehatan di Kabupaten Gunung Mas menunjukkan berbagai perbaikan signifikan. Angka kematian ibu menurun dari 117 menjadi 110 per 100.000 kelahiran hidup, dan angka kematian bayi juga turun dari 7 menjadi 4,9 per 1.000 kelahiran hidup. Prevalensi stunting mengalami penurunan drastis dari 22,87 persen di tahun 2020 menjadi 10,39 persen di tahun 2024, mencerminkan peningkatan intervensi gizi dan kesehatan anak. Sementara itu, angka gizi buruk tetap rendah, meski meningkat dari 0,074 persen (2022) menjadi 2 persen (2023 dan 2024). Total Fertility Rate (TFR) sedikit menurun dari 2,57 menjadi 2,34, yang sejalan dengan peningkatan Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) dari 74,22 persen menjadi 72,03 persen meskipun sempat fluktuatif. Selain itu, unmet need (kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi) menurun drastis dari 16,1 persen menjadi 5,25 persen, dan pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) meningkat hampir 10 kali lipat dari 2,57 persen menjadi 23,20 persen. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan kemajuan nyata dalam layanan kesehatan ibu dan anak, pengendalian

kelahiran, serta penurunan beban gizi buruk di Kabupaten Gunung Mas. Tren perbaikan ini mencerminkan efektivitas kebijakan intervensi pemerintah daerah di sektor kesehatan, meskipun masih diperlukan perhatian khusus terhadap stabilitas angka gizi buruk dan upaya menjaga konsistensi cakupan pelayanan kesehatan di tahun-tahun mendatang.

Tabel 2.20
Indikator Pembangunan Kesehatan Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2020 – 2024

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Ibu (Per 100.000 LH)	117	183	135	175	110
Angka Kematian Bayi (per 1.000 LH)	7	11	5	5,3	4,9
Prevalensi Stunting (%)	22,87	20,6	18,34	16,37	10,39
Angka Gizi Buruk (%)	1	1.03	0,074	2	2
Total Fertility Rate (TFR) (%)	2,57	2,57	2,42	2,34	2,34
Modern Contraceptive Prevalence Rate(mCPR) (%)	74,22	84	57,85	73,37	72,03
Unmet Need (%)	16,1	8,57	17,13	6,50	5,25
Perserta Pengguna MKJP (%)	2,57	16	8,8	29,60	23,20

Sumber : Dinas Kesehatan dan Dinas P2KBP3A Kabupaten Gunung Mas, 2024

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan berkualitas memperlihatkan kondisi pendidikan masyarakat yang berperan sentral dalam peningkatan kualitas hidup manusia serta mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat. Pendidikan dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia dari segi ilmu pengetahuan. Indikator pendidikan yang menjadi unsur pembentuk IPM adalah rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah

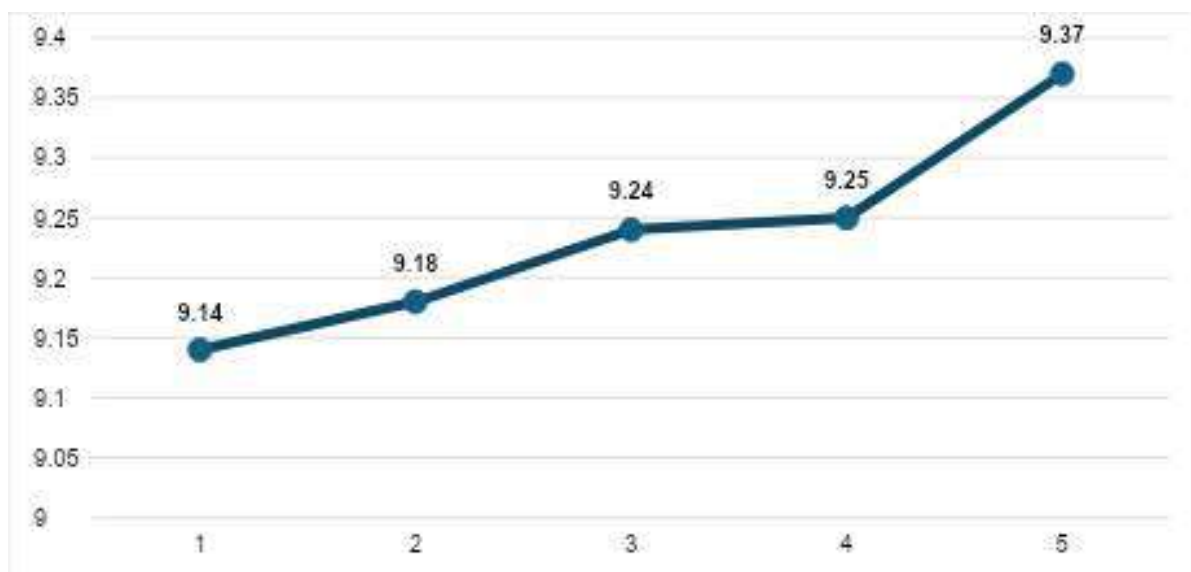
1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Adapun cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun, proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan ini mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

Rata-rata lama sekolah (RLS) di Kabupaten Gunung Mas menunjukkan tren positif, dengan peningkatan dari 9,14 tahun pada 2020 menjadi 9,37 tahun pada 2024. Angka ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata, penduduk Kabupaten Gunung Mas telah mengenyam pendidikan selama 9,37 tahun, setara dengan kelas 3 SMP semester 1. Peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam akses dan kesempatan pendidikan bagi masyarakat, sebagaimana ditunjukkan dalam data berikut.

Gambar 2.27

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024



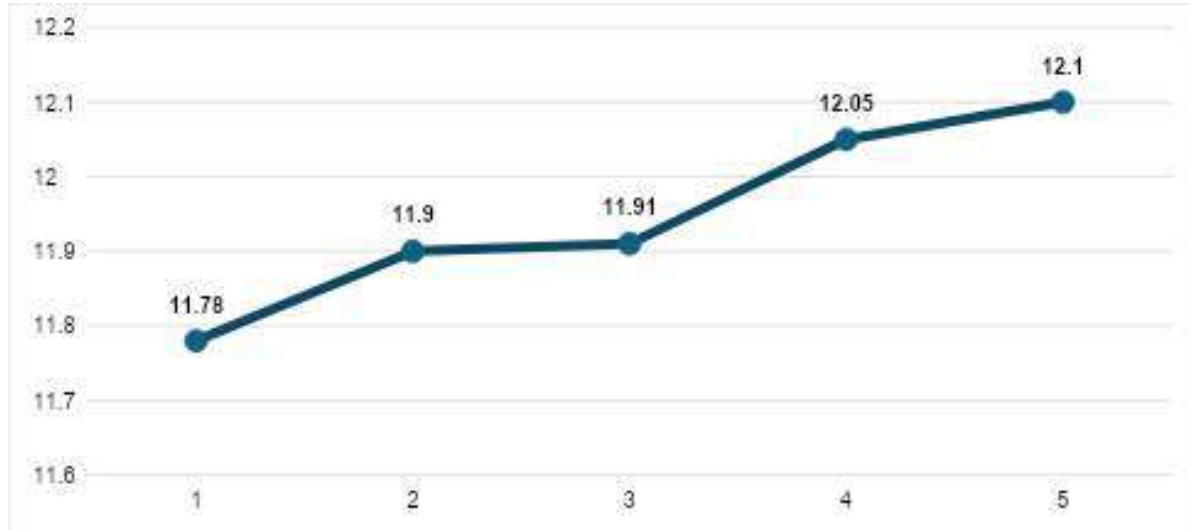
Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2025

2. Harapan Lama Sekolah

Selain Rata-rata Lama Sekolah (RLS), indikator lain yang memperlihatkan kualitas pendidikan suatu wilayah adalah harapan lama sekolah. Indikator Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang menggantikan indikator sebelumnya yaitu Angka Melek Huruf yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh). HLS ini dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Berdasarkan data di bawah, Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2024 mencapai 12,1 tahun. Hal ini berarti bahwa seseorang yang berusia 7 tahun ke atas memiliki peluang untuk menempuh pendidikan hingga setara dengan jenjang pendidikan menengah atas (SMA/SMK). Tingginya angka HLS ini mencerminkan harapan masyarakat terhadap akses pendidikan yang lebih baik. Namun, untuk mewujudkan harapan tersebut, diperlukan peningkatan fasilitas pendidikan yang memadai guna mendukung kualitas pembelajaran dan meningkatkan daya saing individu di Kabupaten Gunung Mas.

Gambar 2.28
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2025

3. Indeks Pendidikan

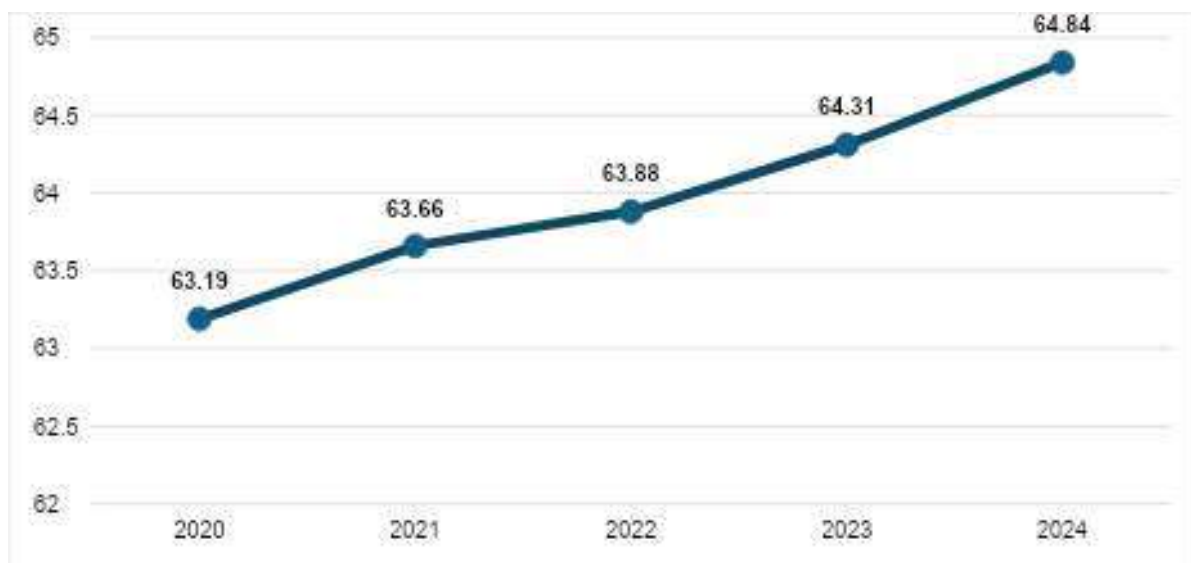
Pendidikan merupakan syarat utama yang harus ditempuh seseorang untuk dapat memasuki pasar kerja. Pendidikan yang diperoleh baik dari sekolah maupun dari luar sekolah akan memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan, sehingga akan memudahkan penempatan seorang karyawan sesuai dengan kecakapannya. Tingkat pendidikan yang dimiliki seorang karyawan akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan tindakan dalam menghadapi suatu permasalahan yang timbul khususnya dalam masalah pekerjaan. Orang yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada umumnya lebih cepat mengatasi masalah yang dihadapi, daripada orang yang tingkat pendidikannya lebih rendah

Indeks pendidikan merupakan hasil perhitungan dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Adapun pencapaian indeks pendidikan di Kabupaten Gunung Mas menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sepanjang tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, indeks pendidikan berada di angka 63,19 dan meningkat menjadi 63,66 pada 2021. Kenaikan terus berlanjut di tahun 2022 dengan capaian 63,88, kemudian naik ke

64,31 pada 2023, dan mencapai titik tertinggi dalam lima tahun terakhir di angka 64,84 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan serta meningkatkan kualitas pembelajaran, meskipun masih dibutuhkan strategi lanjutan untuk mempercepat akselerasi kualitas pendidikan yang merata di seluruh wilayah.

Gambar 2.29

Indeks Pendidikan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024



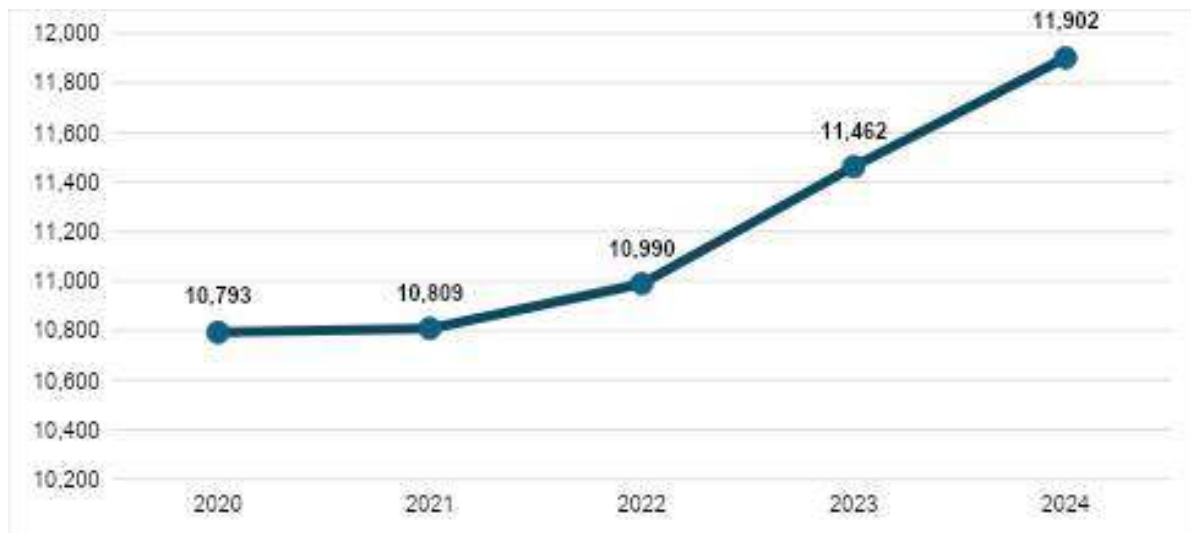
Sumber: BPS Kabupaten Gunung Mas (data diolah), 2025

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial merupakan kunci dalam membangun masyarakat yang tangguh dan inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Salah satu indikator untuk menilai efektivitas perlindungan sosial, khususnya bantuan sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, adalah peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Dalam hal ini, pengeluaran rata-rata per kapita mencerminkan total biaya konsumsi seluruh anggota rumah tangga selama satu bulan—baik yang berasal dari pembelian, pemberian, maupun produksi sendiri—dibagi dengan jumlah

anggota rumah tangga. Di Kabupaten Gunung Mas, pengeluaran per kapita disesuaikan menunjukkan tren peningkatan dari Rp10.793 ribu/kapita/tahun pada tahun 2020, menjadi Rp11.902 ribu/kapita/tahun pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan adanya peningkatan daya beli masyarakat, yang juga dapat mencerminkan perbaikan kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Gunung Mas.

Gambar 2.30
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu/Kapita/Tahun)
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Gunung Mas, 2025

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita juga dapat mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi rumah tangga semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan

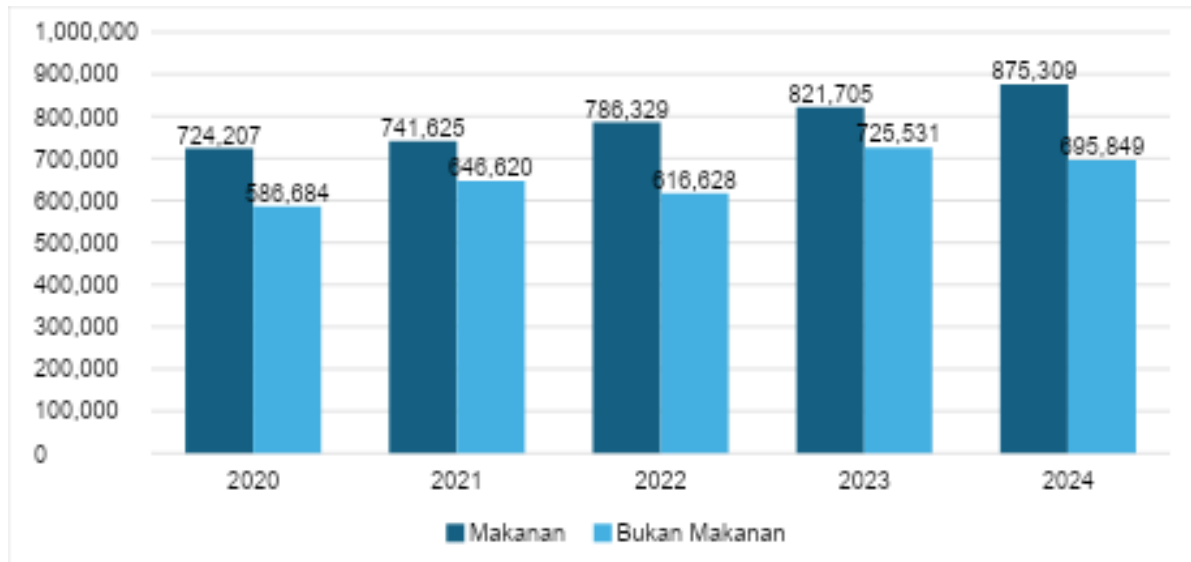
rokok. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Penduduk Kabupaten Gunung Mas rata-rata memiliki pendapatan yang memungkinkan mereka untuk mengalokasikan pengeluaran di atas 500.000 rupiah per bulan. Seiring dengan meningkatnya pendapatan, konsumsi baik untuk makanan maupun non-makanan juga mengalami peningkatan. Berdasarkan data tahun 2020-2024, pengeluaran konsumsi per kapita untuk makanan terus mengalami kenaikan dari Rp 724.207 pada 2020 menjadi Rp 875.309 pada 2024. Sementara itu, pengeluaran untuk non-makanan juga meningkat dari Rp 586.684 pada 2020 menjadi Rp 695.849 pada 2024. Meskipun pengeluaran untuk makanan masih lebih tinggi dibandingkan dengan non-makanan, tren ini menunjukkan adanya peningkatan daya beli masyarakat, termasuk untuk kebutuhan di luar makanan.

Selain itu, meskipun nominal pengeluaran untuk makanan lebih besar, porsi konsumsi non-makanan menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Kabupaten Gunung Mas mulai mengalokasikan pendapatan mereka untuk kebutuhan lain di luar makanan, seperti perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa, pakaian, barang tahan lama, pajak dan asuransi, serta keperluan pesta dan upacara. Pergeseran ini mencerminkan adanya peningkatan kesejahteraan dan perubahan pola konsumsi masyarakat menuju standar hidup yang lebih baik seiring pertumbuhan ekonomi daerah.

Gambar 2.31

Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Untuk Makanan dan Bukan Makanan di Kabupaten Gunung Mas tahun 2020-2024



Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2025

Tabel 2.21

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Menurut Kelompok Makanan dan Bukan Makanan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Makanan	724.207	741.625	786.329	821.705	875.309
Bukan Makanan	586.684	646.620	616.628	725.531	695.849
Proporsi (%)					
Makanan	55,24	53,42	56,05	53,11	55,71
Bukan Makanan	44,75	46,58	43,95	46,89	44,29

Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2025

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Kesejahteraan sosial budaya merujuk pada kondisi kesejahteraan yang mencakup aspek-aspek sosial dan budaya dalam suatu masyarakat.

Kondisi ini melibatkan kesejahteraan dan pemberdayaan individu dalam konteks norma-norma, nilai-nilai, dan struktur sosial budaya. Pembangunan jangka menengah daerah tentu saja menjadi salah satu titik vital bagi perwujudan harmonisasi kesejahteraan masyarakat. Pendekatan kesejahteraan sosial budaya menekankan pentingnya memahami dan mempertimbangkan faktor-faktor budaya dalam merancang kebijakan dan program-program kesejahteraan. Ini mencerminkan pengakuan bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial dan budaya.

Masyarakat yang berkebudayaan maju ditandai dengan upaya pelestarian, pengembangan, dan pewarisan nilai-nilai budaya lokal yang berkelanjutan. Di Kabupaten Gunung Mas, indikator pembangunan kebudayaan selama tahun 2020–2024 menunjukkan dinamika yang menarik. Jumlah budaya daerah yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya mengalami penurunan signifikan, dari 20 budaya pada tahun 2020 dan 2021, menjadi hanya 2 pada tahun 2024. Sebaliknya, jumlah kesenian daerah dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan menunjukkan tren peningkatan yang sangat pesat, dari 28 pada tahun 2021 menjadi 229 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penetapan formal warisan budaya menurun, namun upaya pelestarian kekayaan budaya lokal justru meningkat tajam, menandakan perhatian yang lebih besar terhadap keberlangsungan ekspresi budaya masyarakat.

Tabel 2.22

**Indikator Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2020-2024**

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat budaya daerah yang sudah ditetapkan menjadi warisan budaya	20	20	11	11	2
Jumlah kesenian daerah dan Warisan	NA	28	43	45	229

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan					

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas, 2025

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Pada arah pembangunan ini menjelaskan tentang peningkatan ketangguhan individu, keluarga dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan, termasuk pengarusutamaan gender.

Pengarusutamaan gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender perlu menjadi perhatian dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Kesenjangan dan keadilan gender dapat terjadi apabila porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, pelecehan dan tindakan salah lainnya.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender dalam suatu negara atau wilayah. IPG dirancang untuk memberikan gambaran tentang perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam beberapa dimensi kunci, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi.

Tabel 2.23

**Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2023**

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	2020	2021	2022	2023
Indek Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	88,2	88,22	89,15	89,29
Indeks Pembangunan Gender (IPG) (%)	92,34	92,09	92,18	92,61

Sumber: BPS dan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Mas, 2024

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengenyam pendidikan tinggi dan mempunyai keahlian serta menguasai teknologi yang dibutuhkan di dunia kerja. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumber

daya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah.

Angka beban ketergantungan (dependency ratio) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Angka beban ketergantungan yang semakin mengecil dapat menggambarkan adanya kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Pada tahun 2024, angka beban ketergantungan di Kabupaten Gunung Mas tercatat sebesar 47,03, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 44,15. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif masih menanggung beban sekitar 47 penduduk tidak produktif, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun. Penurunan angka ketergantungan ini mengindikasikan adanya pergeseran demografi yang berpotensi meningkatkan produktivitas ekonomi, karena proporsi penduduk usia kerja yang lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang bergantung pada mereka. Hal ini memberikan peluang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat jika diimbangi dengan kebijakan yang mendukung peningkatan keterampilan dan kesempatan kerja bagi penduduk usia produktif.

Tabel 2.24

Rasio Ketergantungan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penduduk usia <15 tahun	36,4	36,6	37,1	37,4	37,97
Jumlah penduduk usia >64 tahun	5,5	5,9	6,46	6,28	6,59
Jumlah penduduk usia tidak produktif	41,9	42,5	43,56	43,68	44,56
Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	90,2	95,78	98,76	99,09	100,98
Rasio ketergantungan	46,45	49,99	46,09	44,15	47,03

Sumber: BPS Kabupaten Gunung Mas, 2021-2025 (data diolah)

2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Arah pembangunan Kabupaten Gunung Mas dalam mewujudkan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi difokuskan sebagai pendorong utama untuk menjaga sekaligus mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi unggulan daerah. Inovasi diposisikan tidak hanya sebagai pelengkap, melainkan sebagai fondasi dalam memperkuat struktur ekonomi daerah secara jangka menengah maupun panjang. Melalui pemanfaatan teknologi tepat guna serta penguatan ekosistem riset dan pengembangan, Kabupaten Gunung Mas diharapkan mampu meningkatkan efisiensi produksi, memperluas nilai tambah, serta mendorong transformasi ekonomi daerah menuju model yang lebih modern dan berdaya saing.

Dalam kerangka akselerasi pembangunan ekonomi daerah, strategi berbasis hilirisasi menjadi langkah penting yang diambil Kabupaten Gunung Mas, khususnya dengan mengembangkan potensi unggulan lokal. Hilirisasi, sebagai proses pengolahan sumber daya menjadi produk bernilai lebih tinggi, diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan nilai tambah dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Dengan adanya hilirisasi, komoditas-komoditas

lokal tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi diolah menjadi produk jadi atau setengah jadi yang memiliki pasar lebih luas dan nilai ekonomi lebih tinggi. Hal ini membuka peluang pertumbuhan industri lokal, memperluas lapangan kerja, serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan data kontribusi sektor terhadap PDRB Kabupaten Gunung Mas, sektor Industri Pengolahan pada tahun 2020 tercatat sebesar 8,28% dan tetap pada angka yang sama di tahun 2024, menunjukkan kestabilan meskipun sempat naik turun di tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami sedikit penurunan dari 1,66% pada 2020 menjadi 1,65% pada 2024. Secara umum, kedua sektor menunjukkan kontribusi yang relatif stabil dengan fluktuasi ringan selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.25

Rasio PDRB Industri Pengolahan dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024

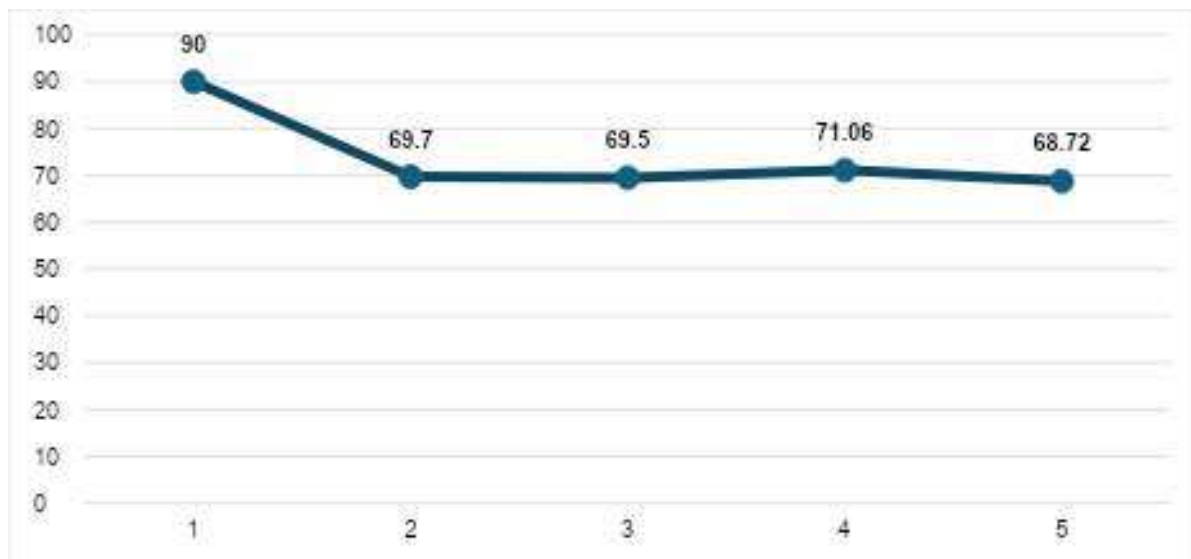
Sektor	2020	2021	2022	2023*	2024**
Industri Pengolahan	8,28	8,24	8,2	8,52	8,28
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,66	1,54	1,66	1,7	1,65

Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Gunung Mas juga menunjukkan dinamika yang menarik. TPAK pada tahun 2020 tercatat sebesar 90%, namun mengalami penurunan drastis menjadi 69,7% di tahun 2021 dan sedikit menurun lagi menjadi 69,5% pada 2022. Tahun 2023 mencatat kenaikan menjadi 71,06%, namun pada 2024 kembali menurun ke angka 68,72%. TPAK merupakan indikator yang menggambarkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif di pasar tenaga kerja, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Fluktuasi TPAK ini menunjukkan adanya perubahan dalam dinamika

angkatan kerja, baik dari sisi minat untuk bekerja, peluang kerja yang tersedia, maupun faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan sosial yang memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi.

Gambar 2.32
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2020-2024



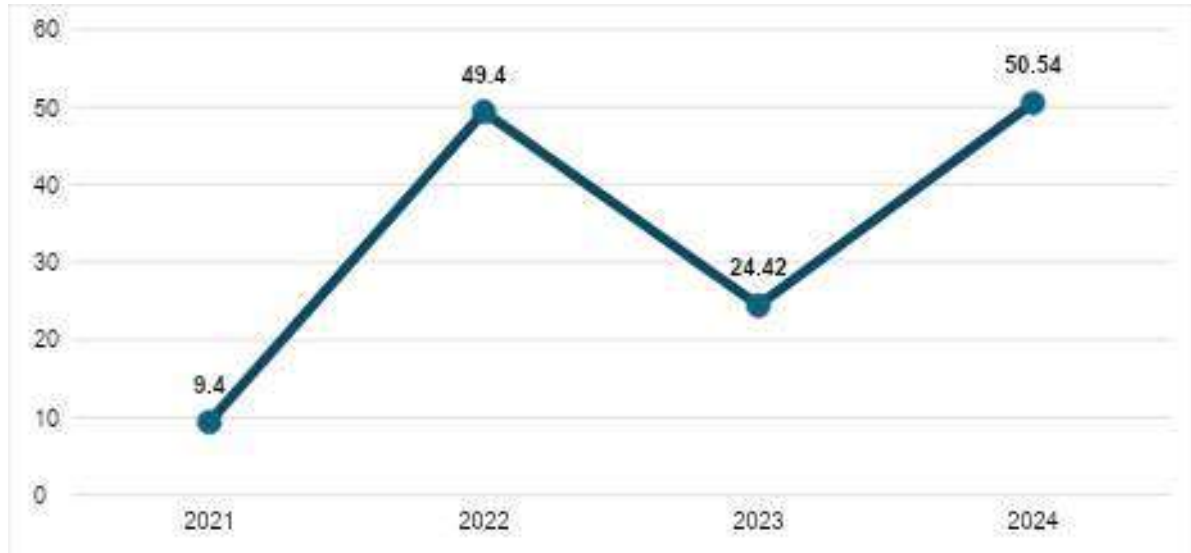
Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2025

Inovasi daerah merupakan salah satu kunci untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan memanfaatkan potensi lokal dan melibatkan masyarakat, inovasi dapat menjadi alat efektif untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan data Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas, capaian tahun 2021 sebesar 9,4 dan tahun 2023 sebesar 24,42 masih tergolong kurang inovatif. Namun, capaian tersebut meningkat signifikan pada tahun 2022 sebesar 49,4 dan kembali naik pada tahun 2024 menjadi 50,54 yang masuk dalam kategori inovatif. Perbedaan capaian ini menunjukkan bahwa tingkat inovasi daerah sangat dipengaruhi oleh keberlanjutan kebijakan, komitmen pemerintah daerah, serta efektivitas kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku

usaha. Kenaikan capaian di tahun 2022 dan 2024 menunjukkan adanya penguatan perencanaan inovasi dan implementasi program yang lebih terarah.

Gambar 2.33

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2024



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2022-2025

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan ekonomi hijau dan biru di Kabupaten Gunung Mas terus didorong dalam kerangka pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hal ini tercermin dari aktivitas sektor ekonomi berbasis sumber daya alam, khususnya pada kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sektor ini mengalami pergerakan yang dinamis sepanjang tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, pertumbuhan mencapai 3,42 persen, meningkat di tahun-tahun berikutnya dengan capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 7,21 persen. Namun, pada tahun 2024 terjadi perlambatan dengan hanya mencapai 2,18 persen.

Meskipun mengalami perlambatan pada sisi pertumbuhan, kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kabupaten Gunung Mas justru

mengalami peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, kontribusinya sebesar 29,20 persen dan terus meningkat hingga mencapai 33,05 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi sektor andalan dalam struktur ekonomi daerah. Kenaikan kontribusi ini mengindikasikan adanya penguatan sektor primer dalam perekonomian lokal, meskipun pertumbuhan tahunan tidak selalu tinggi. Penurunan pertumbuhan pada 2024 dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti cuaca ekstrem atau ketidakstabilan harga komoditas, namun sektor ini tetap memberikan fondasi kuat dalam mendukung ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 2.26
Capaian Perekonomian Sektor Pertanian Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	3,42	4,97	5,21	7,21	2,18
Kontribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	29,20	30,86	29,56	31,69	33,05

Sumber: BPS Kabupaten Gunung Mas, 2025

2.1.3.4 Transformasi Digital

Transformasi digital memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah, karena mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan, serta memperkuat daya saing di era global. Melalui penerapan teknologi digital, sistem administrasi pemerintahan dapat menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di sektor ekonomi, digitalisasi membuka peluang besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

untuk berkembang melalui platform e-commerce, layanan keuangan digital (fintech), dan berbagai inovasi teknologi. Selain itu, penguatan infrastruktur digital juga berperan penting dalam mempercepat konektivitas antarwilayah yang mendukung distribusi informasi, barang, dan jasa. Dalam sektor pendidikan dan kesehatan, transformasi digital memungkinkan masyarakat mengakses layanan berkualitas secara lebih luas, seperti melalui pembelajaran daring dan layanan kesehatan berbasis teknologi (telemedicine). Penerapan pembangunan berbasis digital juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam dan mendorong solusi yang ramah lingkungan.

Bagi Kabupaten Gunung Mas, transformasi digital menjadi kunci dalam menjawab tantangan pembangunan di daerah. Melalui digitalisasi, potensi wilayah dapat dioptimalkan, pelayanan publik diperbaiki, serta akses masyarakat terhadap informasi, pendidikan, dan layanan kesehatan dapat diperluas. Hal ini akan mendorong inklusi sosial dan ekonomi, serta memperkuat posisi daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan adaptif di era digital.

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global dalam perwujudan pembangunan daerah akan mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok secara global. Hasil dari arah pembangunan ini dapat terlihat pada beberapa indikator seperti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) maupun ekspor barang dan jasa yang diindikasikan melalui net ekspor barang dan jasa dari PDRB menurut pengeluaran.

Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas, kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tetap menjadi pendorong utama dalam struktur ekonomi daerah dengan andil yang cukup besar, yaitu mencapai 45,49 persen pada tahun 2024, meskipun sedikit menurun dibandingkan tahun 2020 yang berada di angka 50,13

persen. Sementara itu, Net Ekspor Barang dan Jasa masih menunjukkan kontribusi negatif terhadap PDRB, meskipun membaik dari -21,02 persen di tahun 2020 menjadi -7,64 persen pada tahun 2024. Dari sisi pertumbuhan, PMTB sempat mengalami kontraksi pada masa pandemi di tahun 2020 sebesar -1,82 persen, namun bangkit signifikan hingga tumbuh 10,04 persen pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan pulihnya aktivitas pembangunan infrastruktur dan investasi setelah terdampak pandemi, meskipun perbaikan pada sektor ekspor masih berlangsung secara bertahap.

Tabel 2.27

**Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Net Ekspor Barang dan Jasa
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024**

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)					
a. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-1,82	3,96	2,19	4,16	10,04
b. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
Distribusi PDRB (%)					
a. Pembentukan Modal Tetap Bruto	50,13	48,44	44,98	46,15	45,49
b. Net Ekspor Barang dan Jasa	-21,02	-14,03	-8,01	-8,10	-7,64

Sumber: BPS Kabupaten Gunung Mas, 2025

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

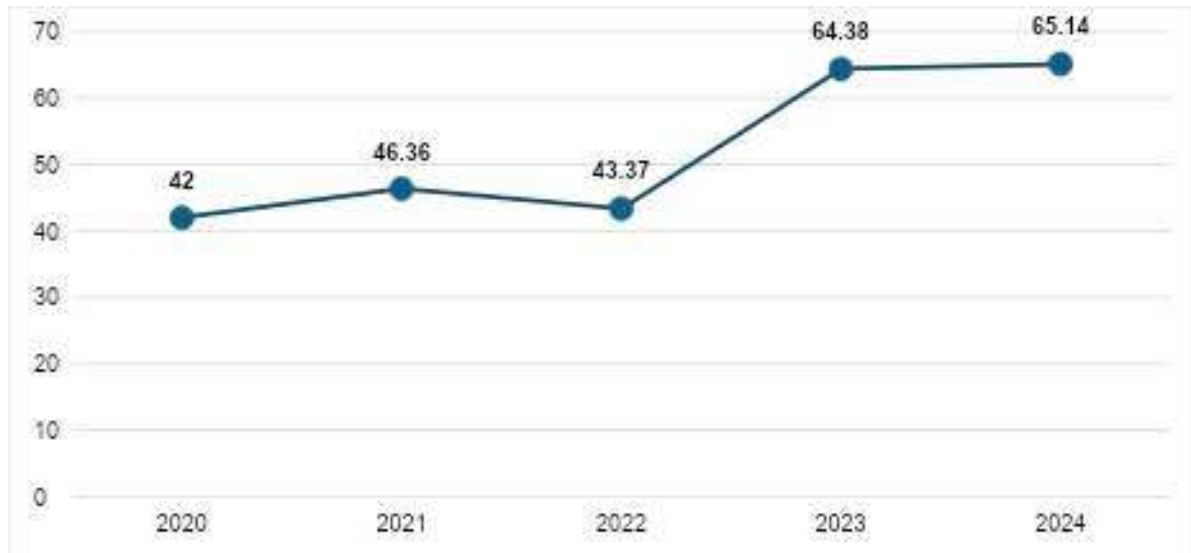
Pengembangan wilayah baik perkotaan dan perdesaan menjadi salah satu upaya pemerataan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas. Pembangunan perkotaan sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju sekaligus menjadi kota yang inklusif dan berkelanjutan, serta pembangunan perdesaan mandiri yang memiliki keunggulan pada potensi

daerah perlu diperhatikan secara seksama dalam pembangunan periode saat ini.

Salah satu indikator untuk melihat pembangunan perkotaan maupun perdesaan adalah indeks kualitas infrastruktur. Indikator ini akan melihat sejauh mana ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, dan fasilitas umum lainnya dalam mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan. Di Kabupaten Gunung Mas, pencapaian indeks kualitas infrastruktur dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, indeks kualitas infrastruktur berada pada angka 42, kemudian meningkat menjadi 46,36 di tahun 2021. Namun, sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022 menjadi 43,37 sebelum akhirnya melonjak tajam di tahun 2023 dan 2024 masing-masing mencapai 64,38 dan 65,14.

Peningkatan tajam yang terjadi sejak tahun 2023 mencerminkan keberhasilan kebijakan pembangunan infrastruktur yang mulai menyentuh kebutuhan masyarakat secara merata, baik di kawasan terpadu perkotaan maupun wilayah pedesaan yang sebelumnya terisolasi. Hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat konektivitas dan meningkatkan akses layanan dasar yang berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur yang terus membaik ini diharapkan menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat daya saing wilayah, serta menciptakan ruang hidup yang lebih layak dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Gunung Mas.

Gambar 2.34
Indeks Kualitas Infrastruktur Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas, 2025

Pada tahun 2023, panjang jalan dengan permukaan teraspal di Kabupaten Gunung Mas tercatat sepanjang 274,863 km. Jika ditinjau dari kondisi jalan, terdapat 237,506 km jalan dalam kondisi baik, 9,691 km dalam kondisi sedang, 94,3 km dalam kondisi rusak, dan 2,483 km dalam kondisi rusak berat. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan panjang jalan dengan permukaan aspal yang juga diiringi dengan peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik, yakni mencapai 283,339 km. Sementara itu, jalan dalam kondisi rusak tercatat tetap sebesar 2,483 km, namun terjadi lonjakan signifikan pada panjang jalan dengan kondisi rusak berat yang mencapai 480,474 km. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun capaian infrastruktur jalan dalam kondisi baik meningkat, masih terdapat tantangan besar terkait perawatan dan peningkatan kualitas jalan yang rusak berat.

Tabel 2.28

**Panjang Jalan (km) Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024**

Keadaan Jalan	2020	2021	2022	2023	2024
Jenis Permukaan Jalan					
Aspal	226,752	231,16	259,928	274,863	283,339
Kerikil	101,578	366,03	135,092	126,293	119,078
Tanah	408,712	2,970	339,477	332,711	331,560
Tidak Dirinci	-	-	4,495	4,495	5,015
Jumlah	738,992	738,99	738,99	738,99	738,99
Kondisi Jalan					
Baik	187,157	184,9	218,759	237,506	245,726
Sedang	82,787	113,06	11,029	9,691	10,309
Rusak	260,553	286,44	2,283	2,483	2,483
Rusak Berat	208,495	154,59	506,921	489,282	480,474
Jumlah	738,992	738,99	738,992	738,992	738,992

Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam Angka, 2020-2025

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam mendukung kebijakan pro-stabilitas, pro-pertumbuhan dan pro-pemerataan. Stabilitas ekonomi makro juga merupakan fondasi utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan wilayah. Dengan kondisi ekonomi yang stabil, ditandai oleh inflasi yang terkendali, nilai tukar yang relatif stabil, serta defisit fiskal dan neraca perdagangan yang terkelola dengan baik, pemerintah memiliki ruang yang lebih luas untuk merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan secara konsisten dan berkelanjutan. Stabilitas ini menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan investor, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif mencerminkan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, serta didasarkan pada pertukaran informasi yang terbuka, transparan, dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui implementasi reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Upaya tersebut tercermin dari meningkatnya capaian Indeks Reformasi Birokrasi, yaitu sebesar 51,66 pada tahun 2022 dan naik menjadi 54,77 pada tahun 2023 dengan kategori CC. Selain itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga menunjukkan tren positif, dari 81,66 pada tahun 2023 menjadi 83,93 pada tahun 2024. Namun demikian, terdapat penurunan pada nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari 62,14 pada tahun 2023 menjadi 61,63 pada tahun 2024. Sementara itu, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2022 tercatat sebesar 1,96 dan menjadi perhatian dalam mendorong digitalisasi pelayanan publik yang lebih optimal.

Tabel 2.29
Capaian Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Reformasi Birokrasi	60	50,01	51,66 (CC)	54,77 (CC)	
Nilai SAKIP	B	B	B	B (62,14)	B (61,63)
Indeks SPBE			1,96		
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,53	84,25 (baik)	81,06 (Baik)	81,66 (baik)	83,93 (sangat Baik)
Indeks Integritas Nasional	NA	74,5	71,34		
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	

Sumber: Setda dan Badan Kesbangpol Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2025

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Dalam pelaksanaan pembangunan, pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia. Sedangkan pembangunan demokrasi diarahkan pada terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat

Tabel 2.30
Kondisi Kemanan dan Ketertiban di Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda (%)	50	4,00%	16,66%		
Persentase penyelesaian tindak pidana (%)	91,2	43,03%	107,89%	84,76%	72,41%

Sumber: BPS dan Satpol PP Kabupaten Gunung Mas, 2021-2024

2.1.4.3 Ketangguhan Pemerintah Daerah

Ketangguhan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan dapat dilihat dari meningkatnya daya saing daerah. Daya saing daerah merupakan kemampuan suatu wilayah untuk bersaing dengan wilayah lain dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, inovasi, dan investasi. Hal ini melibatkan berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, regulasi, ketersediaan sumber daya alam, tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, serta infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi. Salah satu indikator yang cukup komprehensif dalam melihat daya saing daerah adalah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Gunung Mas menunjukkan tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir, dari 2,55 pada tahun 2022 menjadi 3,27 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam berbagai aspek pembangunan daerah, khususnya pada pilar institusi yang menjadi pilar dengan capaian tertinggi selama dua tahun terakhir, yaitu sebesar 4,07 pada tahun 2023 dan naik menjadi 4,34 pada tahun 2024. Sebelumnya, pada tahun 2022, pilar dengan capaian tertinggi adalah dinamisme bisnis dengan nilai 5, yang menunjukkan kekuatan sektor usaha dan iklim bisnis yang kondusif saat

itu. Namun demikian, pilar sistem kapabilitas inovasi konsisten menjadi yang terendah sepanjang tahun 2022 hingga 2024 dengan nilai berturut-turut sebesar 0,54; 0,67; dan 0,64. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun tata kelola dan sektor bisnis mengalami kemajuan, kapasitas daerah dalam menghasilkan dan mengelola inovasi masih perlu mendapatkan perhatian serius agar daya saing daerah dapat meningkat secara lebih merata dan berkelanjutan.

Tabel 2.31

**Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Gunung Mas dan Pilar
Penyusunnya Tahun 2022-2024**

Nilai Indeks	2022	2023	2024
Pilar Institusi	4,21	4,07	4,34
Pilar Infrastruktur	2,35	1,41	2,29
Pilar Adopsi TIK	2,4	3,55	3,94
Pilar Stabilitas Ekonomi Makro	2,79	3,51	3,67
Pilar Kesehatan	3,85	3,89	3,83
Pilar Keterampilan	3,07	3,37	4,1
Pilar Pasar Produk	2,37	2,45	3,28
Pilar Pasar Tenaga Kerja	2,4	2,95	2,9
Pilar Sistem Keuangan	1,37	0,42	2,78
Pilar Ukuran Pasar	0,25	3,7	3,72
Pilar Dinamisme Bisnis	5	1,52	3,71
Pilar Kapabilitas Inovasi	0,54	0,67	0,64
Indeks Daya Saing Daerah	2,55	2,63	3,27

Sumber: BRIN, 2025

2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah merupakan Indikator Kinerja Kunci yang menjadi ukuran keberhasilan melaksanakan program pembangunan setiap urusan pemerintahan daerah. Adapun kinerja setiap

urusan pemerintahan daerah Kabupaten Gunung Mas dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32
Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2020-2024

Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR					
1. Pendidikan					
Angka melek huruf (%)	100	99,4	99,82%	99,84	99,84
Angka Partisipasi Kasar					
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	90	57,78	100	31,03	33,74
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	116	112,21	112,24 / 112	109,65	100
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)	101	89,23	81,74 / 82,24	94,71	100
Angka Partisipasi Murni					
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	100	99,12	99,98 / 97,86	99,79	100
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	84,78	79,12	80,20 / 81,28	81,5	100
Perbandingan Siswa dan Guru SD/Mts	1:12	1 : 11,1	1 : 10	1 : 10	1 : 10
Angka Partisipasi Sekolah (%)	108	99,73	102	98,49	98,26
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD)	1 : 130	1 : 130	1 : 20	1 : 115	1 : 74
SMP/MTs					
Perbandingan siswa dan guru SMP/Mts	1:11	1 : 11,04	1 : 10	1 : 11	1 : 11
Angka Partisipasi Sekolah (%)	102	95,23	102	100	100
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP	1 : 130	1 : 125	1 : 130	1 : 120	
Pendidikan Menengah					
Rasio siswa terhadap guru	1 : 20	1 : 11	1 : 20	1 : 20	1.20
Angka Partisipasi Sekolah (%)	55	61,92	65	62,13	60,61
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	50	55	60	60	
Fasilitas Pendidikan					
Persentase SD/MI yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	27,5	22	32		
Persentase SMP/Mts yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	35	40	45		
Angka Harapan Lama Sekolah	12,41	11,90	11,91	12.05	

Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata Lama Sekolah	9,26	9,18	9,24	9,25	9,37
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV					
Guru SD/SDLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	83	87	1278 Guru		1871
Guru SMP/SMPLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	94	95	595 Guru		790
Angka Kelulusan					
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100	100
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100	100	100	100	100
2. Kesehatan					
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	72,99	73,04	73,09	73,31	73,58
Angka Kematian Ibu (Per 100.000 LH)	117	183	135	175	110
Angka Kematian Bayi (per 1.000 LH)	7	11	5	5,3	4,9
Angka Stunting (%)	22,87	20,6	18,34	16,37	10,39
Angka Gizi Buruk (%)	1	1.03	0,074	2	2
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan (%)	100	100	100	100	100
Persentase anggaran Kesehatan terhadap APBD (%)	11,16	13,38	10	10	10
Persentase Puskesmas Terakreditasi (%)	100	100	100	100	100
Persentase Rumah Sakit Terakreditasi (%)	100	100	50	50	100
Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) pada FKTP (%)	61,69	62,15	62,9	41,55	65
Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) pada Pada RS Milik Pemerintah Daerah (%)	66,18	45,06	65	59,25	66,19
Persentase cakupan kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	77,23	65,52	89,18	100	100
Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksinasi Esensial (%)	94,12	90	94	95	95
Rasio Dokter Spesialis (per 100.000 penduduk)	9	11	9	10	9,8
Rasio Dokter (per 100.000 penduduk)	28	35	38	20	28,0
Rasio Dokter Gigi (per 100.000 penduduk)	2	1	1	1	1
Rasio Perawat (per 100.000 penduduk)	332	332	455	294	343,7
Rasio Bidan (per 100.000 penduduk)	185	191	259	222	205,8
Rasio Tenaga Kesehatan Masyarakat (per 100.000 penduduk)	7	13	16	7	14,7
Rasio Tenaga Sanitasi Lingkungan (per 100.000 penduduk)	10	9	12	8	9,8
Rasio Nutrisonis (per 100.000 penduduk)	19	26	28	24	25,2
Rasio Tenaga Apoteker dan /atau Tenaga	20	30	41	18	23,8

Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Teknis Kefarmasian (per 100.000 penduduk)					
Rasio Ahli Teknologi Laboratorium medik (per 100.000 penduduk)	21	25	35	18	29,4
Persentase Sarana air minum yang memenuhi syarat (%)	38,10	97,5	36,6	46,15	2,2
Persentase keluarga dengan akses sanitasi yang layak (%)	89,36	88,76	92,64	90,3	94,0
Persentase desa yang melaksanakan STBM (%)	100	100	100	100	100
Persentase desa /kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	47,24	47,24	48,03	50,39	50,4
Jumlah Rumah Tangga yang ber - PHBSS (rumah tangga)	4495	2393	14133	5204	
Pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	84,06	92,84	94,81	99,79	100
Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin (%)	30	31,06	57,1	70	80,10
Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir (%)	91,93	100,28	100	100	100
Pelayanan Kesehatan Balita (%)	74,21	82,96	86,84	89,16	99,79
pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (%)	77,66	56,2	87,93	98,22	98,49
Pelayanan kesehatan pada usia produktif (%)	30,49	50,6	86,64	100	100
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (%)	78,59	50,57	95,78	93,75	93,94
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%)	46,06	76,39	100	100	100
Pelayanan kesehatan Penderita Diabeter Melitus (%)	238,89	102,86	100	100	100
Pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) (%)	125,56	119,77	100	100	100
Pelayanan kesehatan orang terduga TB (%)	78,53	55	52,16	86,06	91,49
Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV (%)	52,55	63	75,67	98,76	91,12
Angka kesakitan akibat Demam Berdarah Dengue (DBD) (per 100.000 penduduk)	34	9	11,76	195	102
Angka kesakitan API (<i>Annual Parasite Incidence</i>) Malaria (per 1.000 penduduk)	0,19	0,14	0,059	0,08	0,017
Jumlah kasus kronis filariasis (kasus)	0	0	0	0	0
Persentase kejadian Luar Biasa (KLB)	0	100	0,19	0	0
Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	86,61	55,9	77,2	62,2	61,2
Persentase Penerapan KTR (%)	59	70,58	65	0	99
Jumlah fasyankes yang memiliki pengelolaan Limbah medis sesuai standar (unit)	2 RS dan 17 PUSKESM	2 RS dan 17 PUSKESM	1 RS & 17 Puskesm	2 RS dan 17 PUSKESM	2 RS dan 17 PUSKESM

Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
	AS	AS	as)	AS	AS
Cakupan kunjungan rawat jalan (%)	15,35	25,3	9,51	12,99	45,7
Cakupan kunjungan rawat inap (%)	1,79	1,6	2,85	1,3	3,4
Jumlah RSUD kabupaten / kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya sebesar 90% (minimal 4 spesialis dasar wajib) (unit)	1 RSUD	1 RSUD	1 RSUD	1 RSUD	1 RSUD
Angka Kematian umum / Gross Death Rate (GDR) di RS (per 1.000 pasien keluar)	18,23	35,47	25,63	21,66	22,96
Angka Kematian Murni /Nett Death Rate (NDR) di RS (per 1.000 pasien keluar)	3,4	19,61	9	7,09	7,82
Tingkat Keterisian Tempat Tidur /Bed Occupation Rate (BOR) di RS (%)	15,72	35,47	25,60	25,84	36,12
Angka Penggunaan Tempat Tidur / Bed Turn Over (BTO) (kali)	26,55	35	29	26	38,48
Tenggang Perputaran Tempat Tidur / Turn Of Interval (TOI) di RS (hari)	11,59	7	9	10,41	6,08
Rata - rata lama pasien dirawat / Avarage Length of Stay (ALOS) di RS (hari)	3,17	3	2	2,63	2,44
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
Luas Wilayah Produktif (Juta Ha)	0,565	0,565	0,565	0,565	0,565
Luas Wilayah Kebanjiran (Ha)	20	20	20	20	20
Luas Wilayah Perkotaan (Ha)	7,492	7,506	7,520	7,530	7,530
Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	37,75	39,18	30,24	33,63	34,65
Rasio Saluran Irigasi yang Berfungsi Optimal	78	75,33	87,23	72,02	73,2
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	55,6	61,47%	57,12	57,97	58,65
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Persatuan Penduduk	23,37	0%	0,43	3,33	2,90
Persentase penanganan sampah (%)	20	8%	72,7	16,66	64,50
Rasio Rumah Layak Huni	33,65	40,50	74,97	91,79	92,04
Pemukiman Layak Huni (Ha)	7.100	7524	7524	7524	7.500
Panjang Jalan Dilalui Roda 4 (Km)	737.935	689	689,492	689,492	689,492
Rasio Jalan Dalam Kondisi Baik (%)	27	25,32	30,24	33,63	34,65
Rasio Jembatan Dalam Kondisi Baik (%)	6	7	8,5/40,6 3%	26,38	9,21
Jumlah Desa Yang Terhubung Dengan Kecamatan	3 desa	3 Desa	3 Desa	3	3
Jumlah Desa yang Dialiri Air Bersih	3 desa	3 Desa	6 Desa	3	3
Persentase Sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) Dalam Kondisi Baik (%)	20	25%	78,91	83	84,20
Persentase desa yg terhubung dg jalan pusat kecamatan dalam kondisi baik	55	60	65	70	75
Rasio elektrifikasi	77,19	76,97%	76,1	88,43	95,55
4. Perumahan dan Pemukiman					

Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (jiwa)	14.844	18.000	18.076	19.100	20.460
Rumah Tangga mempunyai akses sanitasi Layak (%)	39	82,2	57,12	57,97	58,65
Rumah Tangga mempunyai akses sanitasi Aman (%)	1,8	2	2	2	2
Rumah Layak Huni (unit)	26,241	61	74,97/22 .233	27.220	27.296
Persentase Desa yang memiliki Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak Huni (%)	27,50	32,50	33,00	35,00	37,50
Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan (%)	0,81	0,01	0,01	0,01	0,01
Ruang Terbuka Hijau (RTH) (%)	0,98	0,03	0,03	0,03	0,03
Persentase Taman/RTH Kota Dengan Kriteria Terbaik	15	15	15	15	15
RT mempunyai akses air minum jaringan perpipaan (%)	19,65	19,83	34,77	35,07	36,21
RT mempunyai akses air minum bukan jaringan perpipaan (%)	55,08	67,54	65,23	58,61	58,61
5. Ketertiban dan Ketentraman Umum					
Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP (kegiatan)	2 kegiatan	2 KEGIATAN (98,34%)	1 KEGIATAN (50%)	2 kegiatan	1 kegiatan
Kegiatan Pembinaan politik daerah (kegiatan)	1 kegiatan	3 KEGIATAN (97,92%)	1 KEGIATAN (33,33%)	1 kegiatan	1 kegiatan
Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda (%)	50	4,00%	16,66%		
Persentase penyelesaian tindak pidana (%)	91,2	43,03%	107,89%	84,76%	72,41%
jumlah tindak pidana	55	91	124	151	174
6. Sosial					
PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	58,13	78,81%	78,34	99,79	100
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)	2,5	2,6%	4,5	100,00	81,42
B. Fokus Layanan Urusan Wajib Non-Dasar					
1. Ketenagakerjaan					
Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	90	69,70%	69,53	71,60	68,72
Tingkat pengangguran terbuka (%)	1,11	3,11 / 1,13	2,96	3,24	3,12
Jumlah lulusan S1/S2/S3 (orang)	1.402	1.412	1.084	864	2.496
Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	98,92	98,93	76,17	98,92	98,93
2. Pemberdayaan Perempuan dan					

Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Perlindungan Anak					
Indek Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	89,33	88,2	89,15	89,29	
Indeks Pembangunan Gender (IPG) (%)	92,34	92,09	92,18	92,61	
iBangga	na	51	data belum publish	59,76	62
Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif Gender (%)	na	39	2,58	68,42	100,00
Indeks Perlindungan Anak (IPA) (%)	na	60	59,78	59,78	
Capaian Kabupaten Layak Anak (skor)	na	283,30	214,55		
Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	na	100	100	100	100
Rasio KDRT (%)	na	0,015	0,005	0,007	0,006
Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	100	100	100	100	100
3. Ketahanan Pangan					
Regulasi Ketahanan Pangan (Dokumen)	1	1	0	1	0
4. Pertanian					
Persentase Pembebasan Tanah yang Diselesaikan Tepat Waktu	65	0	33,33	100	85
jumlah Pengusulan Sertifikat Milik Pemerintah Daerah Tahun (sertifikat)	29	61	38	35	14
Jumlah sertifikat yang diterbitkan tahun bagi masyarakat Miskin tepat waktu (sertifikat)	28	0	0	0	5250
Jumlah desa lokasi Prona (desa)	20	27	11	14	16
5. Lingkungan Hidup					
Jumlah duta lingkungan (orang)	2	0	0	0	-
Jumlah adiwiyata (sekolah)	11	0	9	9	0
Pencemaran status mutu air (%)	32,5	43,33	46,67	50	Indeks kualitas air (ika) 42.86
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (%)	85	240	22	100	100
Penegakan Hukum Lingkungan (%)	100	100	Tidak ada Kasus Lingkun gan (100)	100	Tidak ada Kasus Lingkunga n (100)
Persentase Perusahaan /Wajib Usaha yang	80	47,39	14	95	14

Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Menerapkan Aturan Penanganan Limbah (%)					
Persentase Standar Baku Mutu Udara (%)	85	89,45	87,85	89,64	92,82
Status pencemaran air sungai (Indeks Kualitas Air)	65	50	46,67	50	42,86
Status pencemaran udara (Indeks Kualitas Udara)	93,25	87,53%	87,85%	89,64	92,82
Tutupan Lahan (Indeks Kualitas Tutupan Lahan)	66,5	71%	71,25%	70,66	71,31
6. Kependudukan dan Catatan Sipil					
Ketersediaan data base kependudukan skala Kabupaten	Tersedia	tersedia (Aplikasi SIAK)	tersedia (Aplikasi SIAK)	tersedia (Aplikasi SIAK)	tersedia (Aplikasi SIAK)
Persentase keluarga yang memiliki Akta perkawinan (%)	26,39	8,60%	45,24%	25,58	27,79%
persentase jumlah Penduduk dengan KK Nasional	65,43	61%	99,71%	98,84	98,30%
Persentase jumlah penduduk yang memiliki KTP Elektronik (e-KTP) (%)	78,56	96%	90,65%	94,27	96,40%
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
Jumlah Desa yang diperbaharui Profil Desanya	114	114	114	114	114
Jumlah Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan yang dapat difasilitasi	72	12	72	72	72
Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	1	0 (tidak dilaksanakan terkait PPKM/ Covid -19)	0 (tidak dilaksanakan terkait PPKM/ Covid -19)	1	0
Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terlatih	373	0	373	373	373
Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses TTG	5	0	5	7	8
8. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera					
Total Fertility Rate (TFR) (%)		2,57	2,42	2,34	2,34
Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) (%)		84	57,85	73,37	72,03
Unmet Need (%)		8,57	17,13	6,50	5,25
Perserta Pengguna MKJP (%)		16	8,8	29,60	23,20
Cakupan keluarga punya balita dan anak memahami dan melaksanakan pengasuhan		50	15,8	30,78	114

Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
dan pembinaan tumbuh kembang (PKB) (%)					
Prevalensi Stunting (%)		20	18,34	16,37	12,90
Cakupan Remaja dalam pusat Informasi dan Konseling (BKR dan PIK-R) (%)		30	30 (30/12*100=250)	3,91	30
kelompok BKL yang terbina		1	40	51	52
Cakupan Akseptor KB Anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKA) (%)		49	70	82	74
Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%)		2	2,58	1,93	2,265
9. Perhubungan					
Jumlah Bandara (buah)	1	1	1	1	1
10. Komunikasi dan Informatika					
Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat kecamatan (%)	17	0	20	25	25
cakupan layanan telekomunikasi (Km2)	4.508	55	5.000	9.744	9.900
persentase penduduk yang menggunakan HP / telepon (%)	75,57	83,69	78,41	82,38	81,76
Proporsi rumah tangga dengan akses internet (%)	42,86	53,87	62,44	75,42	74,32
proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi (%)	72,57	7%	9,88%	17,97	17,97
11. Koperasi dan UMKM					
Koperasi Aktif (%)	65	90	88	89	89,24
Jumlah UMKM (unit)	2.985	3.059	3.227	3.663	5.237
Jumlah Industri (industri)	325	325	371	439	417
Jumlah Pasar Desa/Kecamatan (desa/kelurahan)	4	4	4	3	3
Persentase Koperasi Yang Modal dan SHU Meningkat (%)	36	8	8,08	6,18	6,02
Persentase UMKM Yang Modal dan Omzet Meningkat (%)	67,5	67,5	70	73	73,2
12. Penanaman Modal					
Jumlah Investor PMDN dan PMA (investor)	55	60	62	62	62
Persentase Pengajuan perizinan dan non perizinan yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)	80	80	80	100	100
Lamanya hari proses perizinan (hari)	9	9	9	8	7
Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	83	81,24	85	85,25	83,93
Persentase penyelesaian penanganan pengaduan (%)	100	100	100	100	100
Nilai Investasi Daerah (Triliun Rp.)	5,2	5,3	0,267	1,172	1,208

Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi (%)	15	10%	25%	33,78	5,86
13. Kepemudaan dan Olahraga					
Jumlah Klub Olahraga (buah)	2	31	14	2	2
Jumlah Gedung Olahraga (Unit)	1	-	3	10	10
Jumlah Organisasi Pemuda (buah)	86	68	43	116	116
Jumlah Organisasi Olahraga (buah)	1	-	1	18	17
Jumlah Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta) (unit)	1	-	-	-	-
Jumlah Lapangan Olahraga (Buah)	211	-	148	291	291
Jumlah mendali (buah)	98	94	0	32	8
14. Statistik					
Buku "Gunung Mas dalam Angka"	ada	Ada	Ada (BPS)	Ada	Ada
Buku "PDRB Kabupaten Gunung Mas"	ada	Ada	Ada (BPS)	Ada	Ada
tersedianya Sistem data dan Statistik yang terintegrasi	ada	Ada	Ada (SIDAT)	Ada (sidat)	Ada (sidat)
15. Persandian					
Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah (%)			12,11	77	60,83
16. Kebudayaan					
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (kali)	3	1	3	5	5
Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya (buah)	1	1	1	1	1
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Budaya yang dilestarikan (buah)	25	25	25	25	25
Jumlah Grup Kesenian (Buah)	26	28	33	26	26
Jumlah Gedung Kesenian (Unit)	1	1	1	1	1
Jumlah penghargaan kebudayaan (Buah)	3	0	0	4	4
17. Perpustakaan					
Jumlah perpustakaan daerah	1	1	1	1	1
Jumlah Perpustakaan umum	40	40	1	1	1
Jumlah perpustakaan sekolah :					
- . SD/MI	166		77	104	104
- . SMP/MTs	56		38	52	52
- . SMA/MA	13		13	15	15
Jumlah perpustakaan desa/kelurahan	50	50	50	50	50
Jumlah perpustakaan rumah ibadah	1	0	--	0	0
Jumlah anggota	1.600	143	52	460	309
Jumah pengunjung	4.500	365	2.072	2.199	4
Jumlah koleksi bahan perpustakaan	32.000	36.554	30.424	31.324	33.024

Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
18. Kearsipan					
Pengelolaan arsip secara baku :					
a. Umum	110	120	120	130	130
b. Pemerintahan	110	120	110	125	125
c. Politik	75	85	75	95	95
d. Keamanan dan ketertiban	75	85	75	90	90
e. Kesejahteraan rakyat	65	75	95	90	90
f. Perekonomian	85	95	85	100	100
g. Pekerjaan umum	95	105	115	110	110
h. Pengawasan	105	115	100	120	120
i. Kepegawaian	105	105	115	120	120
j. Keuangan	120	135	130	140	140
C.Fokus Layanan Urusan Pilihan					
1. Pariwisata					
Kunjungan Wisata (Jiwa)	11.000	10.524	19.689	14.000	14.000
Jumlah objek wisata daerah (buah)	27	28	20	29	29
PDRB Sektor Pariwisata (%)	14,5%	1	6,48	18,5	18,5
PDRB Sektor Pariwisata (Milyar Rp.)	30	1	1,17		
2. Pertanian					
Persentase PDRB Sektor Pertanian (%)	33,5	30,88	29,56	31,69	33,05
PDRB Sektor Pertanian (dalam Milyar Rp.)	1.982,68	2 215,3	2.404,5	2.731,100	3.226,100
Produksi komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura :					
a. Padi (ton)	2.775	2.540	3.064	560,7	756,93
- Padi Sawah (Ton)	1.556	1.240	340	237,6	159,43
- Padi Ladang (Ton)	1.219	1.300	2.724	323,1	597,50
b. Jagung (Ton)	1.470	895	400	258	321,00
c. Ubi Kayu (ton)	156,00	2.090	177	137,5	194,81
Tanaman Hortikultura :					
a. Cabe Rawit (Ton)	16	207,4	42,0	23,4	5,89
b. Kacang Panjang (ton)	6	176	50	30,88	10,25
c. Durian (Ton)	255	355	395	223	220,00
d. Pisang (ton)	6	450	20	26	30,00
e. Rambutan (Ton)	10	75	18	20	22,00
f. Nenas (Ton)	11	500	40	44	46,00
Produktivitas Komoditi Tanaman Pangan Dan Hortikultura					
a. Padi (kwintal/Ha)	23	33	52	52	
- Padi Sawah (kwintal/Ha)	25	31	32	32	35,00
- Padi Ladang (kwintal/Ha)	21	2	20	20	20,00
b. Jagung (kwintal/Ha)	30	32	35	40	40,00
c. Ubi Kayu (kwintal/Ha)	32	38	39	39	39,00
Tanaman Hortikultura :					

Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
a. Cabe Rawit (kwintal/Ha)	5	6,1	6,0	11,0	9,00
b. Kacang Panjang (kwintal/Ha)	1	3	1	11	9,00
c. Durian (kwintal/Ha)	44	48	68	11	12,00
d. Pisang (kwintal/Ha)	29	30	125	6	7,00
e. Rambutan (kwintal/Ha)	5	6	60	80	26,00
f. Nenas (kwintal/Ha)	76	100	230	0,2	0,28
luas Pengembangan Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura					
a. Padi (Ha)	1.059	1.225	302	200,3	387,25
- Padi Sawah (Ha)	457	570	109	38,3	22,50
- Padi Ladang (Ha)	602	655	193	162	364,75
b. Jagung (Ha)	500	300	100	208,8	80,25
c. Ubi Kayu (Ha)	50	57	46	43	49,95
Tanaman Hortikultura :					
a. Cabe Rawit (Ha)	33	37	30	20,1	16,80
b. Kacang Panjang (Ha)	61	69	50	40,45	24,80
c. Durian (Ha)	59	74	95	165	5,27
d. Pisang (Ha)	2	15	11	375 (Rumpun)	0,33
e. Rambutan (Ha)	19	25	30	120 (Pohon)	1,02
f. Nenas (Ha)	2	5	6	52 (Rumpun)	0,34
Populasi Ternak					
Sapi (ekor)	4.919	4.960	4.340	4.386	4.471
Kerbau (ekor)	198	176	196	193	278
Kambing (ekor)	530	539	551	554	554
Babi (ekor)	39.463	14.807	15.205	15.375	18.651
Ayam Buras (Ekor)	86.894	86.186	87.429	88.561	88.784
Ayam Ras Pedaging (ekor)	101.485	102.439	108.642	109.740	112.546
Ayam Ras Petelur (ekor)	8.510	18.998	24.746	25.020	28.758
Itik (ekor)	3.241	3.479	3.940	4.485	5.693
Produksi Ternak					
Sapi (Ton)	98	108	110	110.310	111,56
kerbau (Ton)	5	5.3	6	6.995	5,69
Kambing (ton)	1,1	1.1	1	1.300	1,25
Babi (Ton)	255	377.899	380	417.327	410,33
Ayam Buras (ton)	49	50	55	55.693	58,74
Ayam Ras Pedaging (Ton)	426	459	461	462.410	488,78
itik (ton)	2	3	4	4.182	1,34
Produksi Telur					
Ayam Buras (ton)	31	31	33,10	33.388,00	35,46
Ayam petelur (ton)	16.55	65.83	69,73	43.877,00	71,78

Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengembangan/ Perluasan Area Perkebunan					
Karet (Ha)	68.378	68.388	68,38	68	68,422
Kelapa Sawit (Ha)	72.760	72.780	72,78	75	72,961
Produksi Komoditi Perkebunan					
karet (Ton)	20.263	20.276	20,28	20,32	20,330
Kelapa Sawit tbs (ton)	100.334	102.127	107,87	108,93	102,614
Produktivitas Komoditi Perkebunan					
Karet (Ton/Ha)	0.30	0,30	0,48	0,32	0.33
Kelapa Sawit (Ton /Ha)	1,45	1,65	1,44	1,59	1,64
3. Kehutanan					
Hutan Rakyat dan Lahan Terbuka Hijau (Ha)	2750	0	urusan provinsi	urusan provinsi	urusan provinsi
Pembangunan KPHP (unit)	1	0	urusan provinsi	urusan provinsi	urusan provinsi
Pembangunan TAHURA	1	1	1	1	1
Pembangunan Hutan Desa dan HKM (Unit)	1	0	urusan provinsi	urusan provinsi	urusan provinsi
Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat /HTR (unit)	1	0	urusan provinsi	urusan provinsi	urusan provinsi
Luas Kawasan Tahura yang Tertata dan Terjaga Kelestariannya (Ha)	12	103,03	103,03	37,65	30 Ha
5. Perdagangan					
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	8.95	9,59*	9,93**	10,20	9,98
6. Perindustrian					
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	10.50	8,24	8,20	8,52	8,28
Pertumbuhan Industri (%)	50	70	-0,02		8,95
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (jumlah)	300	140	12 KELOMP OK		50
7. Kelautan dan Perikanan					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)	5.200,63	1.022,70	1.320,98	1.255,17	1.312,95
Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat (Kg)	41,4	29,30	31,40	32,00	34,30
Peningkatan produksi benih ikan (ribek) ekor	165.757	87.539	173.240	141.517	105.800
Peningkatan produksi hasil pengolahan (ton)	30,1	20,66	28,3	27	33,018
8. Transmigrasi					
Persentase ketersediaan dan terkelolanya prasarana dan sarana di kawasan transmigrasi (%)	93,22	75,7	75	75	75

Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
9. Penanggulangan Bencana					
Terbangunnya budaya sadar bencana (kelompok)	4	4	15	25	25
meningkatnya rapid respon (waktu kecepatan ke tempat bencana/jam) (Jam)	2	2	1,5	2	2
Meningkatnya tingkat pemulihan pasca bencana non manusia (%)	100	100	100	100	100
10. Energi dan Sumber Daya Mineral					
Kontribusi sektor pertambangan dari PNBPD dan PAD (Rp)	658.350.000.000	381.200.000.000		746	
Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%)	79,54	97,64	91,29	88,43	99,22
jumlah Desa Berlistrik (desa)	108	127	104	111	127
D. Urusan Penunjang					
1. Perencanaan Pembangunan					
Tersedianya Dokumen Perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)	Ada	Ada	ADA	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)	Ada	Ada	ADA	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen)	Ada	Ada	ADA	Ada	Ada
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (Dokumen)	Ada	Ada	ADA	Ada	Ada
Persentase kesesuaian antara muatan Renstra SKPD dengan RPJMD	Ada	Ada	ADA	Ada	Ada
Persentase kesesuaian antara muatan RKPD dengan muatan RPJMD (%)	100	98	100	100	100
Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab (RTRWK) dan turunannya (%)	100	100	100	100	100
2. Keuangan					
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	
Indeks Persepsi Korupsi	NA	Data Belum Tersedia	34	2,9	
Survei penilaian Integritas (%)		74,5	71,34	71,34	
3. Reformasi Birokrasi					
Nilai Reformasi Birokrasi	62,5	50,01	51,66 (CC)	54,77 (CC)	
Nilai SAKIP	--	---	61,78 (B	62,14	B (61,63)

Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
			= baik)		
Level Kapabilitas	Level 3	Level 2	Level 2 (2,43)	level 3	level 3
Level Maturitas	Level 3	Level 2	Level 3 (3,019)	level 3	level 3
IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	82,45 (baik)	84,25 (baik)	81,06 (baik)	81,66 (baik)	83,93 (sangat Baik)
Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB	B	B	B	B

Dikutip dari berbagai sumber di lingkup pemerintahan Kabupaten Gunung Mas, 2025

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERJALAN RKPD TAHUN 2024

Berikut realisasi hasil evaluasi program dan kegiatan berjalan RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran tabel dibawah ini :

FORMULIR 5

FORMULIR 5

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPJMD/RESTRAN)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2024 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			I		II		III		IV				V				VI		VII		VIII													
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1.01.02.2.01.37	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan			179	orang	119,000,000.00			0	orang	0.00			0	orang	0.00		0	orang	0.00		0.00	%	0.00	%	0.00	%			DINAS PENDIDIKAN, KEPERUMUDAAN DAN OLAH RAGA			
1.01.02.2.01.38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			1	dokumen	333,885,120.00			1	dokumen	39,930,000.00	104,828,000.00	1	Kegiatan	358,435,000.00	107.35	%	358,435,000.00	91.01	%	358,435,000.00	91.01	%	358,435,000.00	91.01	%	358,435,000.00	91.01	%	358,435,000.00		DINAS PENDIDIKAN, KEPERUMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1.01.02.2.01.41	Saluran Komunitas Belajar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang terbentuk			1	komunitas	254,768,941.00			0	komunitas	0.00			1	Kegiatan	206,485,000.00	81.05	%	206,485,000.00	91.01	%	206,485,000.00	91.01	%	206,485,000.00	91.01	%	206,485,000.00	91.01	%	206,485,000.00		DINAS PENDIDIKAN, KEPERUMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.01.02.2.01.43	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk penguasaan kurikulum, keprofesionalan, kekompetensi, kekinerja, dan inovasi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk penguasaan kurikulum, keprofesionalan, kekompetensi, kekinerja, dan inovasi			1	kegiatan	484,722,070.00			0	kegiatan	0.00			1	Kegiatan	390,288,000.00	80.52	%	390,288,000.00	91.01	%	390,288,000.00	91.01	%	390,288,000.00	91.01	%	390,288,000.00	91.01	%	390,288,000.00		DINAS PENDIDIKAN, KEPERUMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.01.02.2.01.46	Pengadaan Perangkat Lunak Pendidikan	Jumlah Perangkat Lunak Pendidikan yang Tersedia			1333	paket	2,034,685,530.00			1	paket	16,950,444.00	19,777,044.00	1	Kegiatan	199,990,000.00	100.17	%	199,990,000.00	91.01	%	199,990,000.00	91.01	%	199,990,000.00	91.01	%	199,990,000.00	91.01	%	199,990,000.00		DINAS PENDIDIKAN, KEPERUMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1.01.02.2.01.47	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Berambah			2	ruang	557,736,160.00			2	ruang	13,950,000.00	13,950,000.00	7	ruang	578,225,600.00	103.67	%	578,225,600.00	91.01	%	578,225,600.00	91.01	%	578,225,600.00	91.01	%	578,225,600.00	91.01	%	578,225,600.00		DINAS PENDIDIKAN, KEPERUMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1.01.02.2.01.48	Rehabilitasi Gedung/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Gedung/Berat			3	unit	533,980,500.00			3	unit	17,950,000.00	17,950,000.00	2	ruang	530,319,500.00	99.94	%	530,319,500.00	91.01	%	530,319,500.00	91.01	%	530,319,500.00	91.01	%	530,319,500.00	91.01	%	530,319,500.00		DINAS PENDIDIKAN, KEPERUMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1.01.02.2.01.49	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan			174	orang	320,629,000.00			0	orang	0.00			1	Kegiatan	258,870,800.00	80.74	%	258,870,800.00	91.01	%	258,870,800.00	91.01	%	258,870,800.00	91.01	%	258,870,800.00	91.01	%	258,870,800.00		DINAS PENDIDIKAN, KEPERUMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.01.02.2.01.50	Penyenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar			236	Satuan Pendidikan	482,668,832.00			1	Satuan Pendidikan	473,400,880.00	473,400,880.00	1	Kegiatan	478,723,980.00	99.18	%	478,723,980.00	91.01	%	478,723,980.00	91.01	%	478,723,980.00	91.01	%	478,723,980.00	91.01	%	478,723,980.00		DINAS PENDIDIKAN, KEPERUMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1.01.02.2.01.51	Rehabilitasi Gedung/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Gedung/Berat			2	ruang	3,007,859,000.00			4	ruang	331,286,767.00	331,286,767.00	12	paket	4,094,000,167.00	136.11	%	4,094,000,167.00	91.01	%	4,094,000,167.00	91.01	%	4,094,000,167.00	91.01	%	4,094,000,167.00	91.01	%	4,094,000,167.00		DINAS PENDIDIKAN, KEPERUMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya APK dan APM SMP					21,642,020,675.00	100	%				54,265,636,922.00	%	0.00	%							20,815,413,481.00	38.36	%	20,815,413,481.00	91.01	%	42,457,434,157.00	91.01	%	42,457,434,157.00		DINAS PENDIDIKAN, KEPERUMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun			2	Unit	1,170,000,000.00			2	Unit	116,617,000.00	139,317,000.00	3	paket	1,161,617,000.00	99.26	%	1,161,617,000.00	91.01	%	1,161,617,000.00	91.01	%	1,161,617,000.00	91.01	%	1,161,617,000.00	91.01	%	1,161,617,000.00		DINAS PENDIDIKAN, KEPERUMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun			2	ruang	1,220,629,000.00			0	ruang	52,364,000.00	8	paket	52,364,000.00	98.83	%	1,206,336,700.00	91.01	%	2,870,625,200.00	91.01	%	2,870,625,200.00	91.01	%	2,870,625,200.00	91.01	%	2,870,625,200.00		DINAS PENDIDIKAN, KEPERUMUDAAN DAN OLAH RAGA		
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun			2	ruang	656,032,000.00			0	ruang	0.00			4	Ruang	414,695,825.00	63.02	%	414,695,825.00	91.01	%	2,047,813,025.00	91.01	%	2,047,813,025.00	91.01	%	2,047,813,025.00	91.01	%	2,047,813,025.00		DINAS PENDIDIKAN, KEPERUMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perputakaan Sekolah	Jumlah Perputakaan Sekolah yang Telah Dibangun			2	ruang	936,645,000.00			0	ruang	164,450,995.00	3	paket	164,450,995.00	60.14	%	563,263,419.00	91.01	%	563,263,419.00	91.01	%	563,263,419.00	91.01	%	563,263,419.00	91.01	%	563,263,419.00		DINAS PENDIDIKAN, KEPERUMUDAAN DAN OLAH RAGA		
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				ruang	2,102,757,200.00			0	ruang	99,955,500.00	11	paket	99,955,500.00	95.79	%	2,014,182,950.00	91.01	%	5,478,891,050.00	91.01	%	5,478,891,050.00	91.01	%	5,478,891,050.00	91.01	%	5,478,891,050.00		DINAS PENDIDIKAN, KEPERUMUDAAN DAN OLAH RAGA		
1.01.02.2.02.07	Pembangunan Ruang Seta Guru/Aula	Jumlah Ruang Seta Guru/Aula yang Telah Dibangun			2	ruang	445,000,000.00			0	ruang	33,309,300.00	6	paket	33,309,300.00	48.06	%	215,784,000.00	91.01	%	215,784,000.00	91.01	%	215,784,000.00	91.01	%	215,784,000.00	91.01	%	215,784,000.00		DINAS PENDIDIKAN, KEPERUMUDAAN DAN OLAH RAGA		
1.01.02.2.02.09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pengapa Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Pengapa Sekolah yang Telah Dibangun			1	Unit	1,000,000,000.00			0	Unit	3,845,560.00	5	Ruang	987,961,000.00	98.80	%	987,961,000.00	91.01	%	987,961,000.00	91.01	%	987,961,000.00	91.01	%	987,961,000.00	91.01	%	987,961,000.00		DINAS PENDIDIKAN, KEPERUMUDAAN DAN OLAH RAGA		
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			2	Unit	1,000,000,787.00			0	Unit	3,845,560.00	9	paket	3,845,560.00	91.36	%	550,897,910.00	91.01	%	1,273,731,300.00	91.01	%	1,273,731,300.00	91.01	%	1,273,731,300.00	91.01	%	1,273,731,300.00		DINAS PENDIDIKAN, KEPERUMUDAAN DAN OLAH RAGA		
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Gedung/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Gedung/Berat			3	ruang	2,624,072,000.00			0	ruang	99,856,000.00	10	paket	179,206,000.00	5	ruang	2,991,073,000.00	113.99	%	2,991,073,000.00	91.01	%	5,872,202,300.00	91.01	%	5,872,202,300.00	91.01	%	5,872,202,300.00		DINAS PENDIDIKAN, KEPERUMUDAAN DAN OLAH RAGA		
1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Gedung/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Gedung/Berat			2	ruang	216,299,161.00			0	ruang	0.00			2	Ruang	209,901,000.00	97.04	%	209,901,000.00	91.01	%	209,901,000.00	91.01	%	209,901,000.00	91.01	%	209,901,000.00	91.01	%	209,901,000.00		DINAS PENDIDIKAN, KEPERUMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Gedung/Berat Perputakaan Sekolah	Jumlah Perputakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Gedung/Berat			1	ruang	1,334,753,000.00			0	ruang	0.00			0	ruang	0.00	0.00	%	0.00	91.01	%	1,123,731,000.00	91.01	%	1,123,731,000.00	91.01	%	1,123,731,000.00	91.01	%	1,123,731,000.00		DINAS PENDIDIKAN, KEPERUMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Gedung/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Gedung/Berat			2	ruang	1,433,062,000.00			0	ruang	99,888,900.00	8	paket	99,822,000.00	4	ruang	1,185,608,900.00	82.73	%	1,185,608,900.00	91.01	%	1,185,608,900.00	91.01	%	1,185,608,900.00	91.01	%	1,185,608,900.00		DINAS PENDIDIKAN, KEPERUMUDAAN DAN OLAH RAGA		
1.01.02.2.02.21	Rehabilitasi Gedung/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pengapa Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Pengapa Sekolah yang Telah Direhabilitasi Gedung/Berat			1	Unit	400,000,000.00			0	Unit	0.00	0	Unit	0.00	98.87	%	395,470,000.00	91.01	%	395,470,000.00	91.01	%	395,470,000.00	91.01	%	395,470,000.00	91.01	%	395,470,000.00		DINAS PENDIDIKAN, KEPERUMUDAAN DAN OLAH RAGA		
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Gedung/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Gedung/Berat			3	Unit	822,861,000.00</																											

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPJMD/REKSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2024 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																						
			I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X																																																																																												
			K	6	K	7	K	8	K	9	K	10	K	11	K	12	K	13	K	14	K	15	K	16	K	17		K	18	K	19	K	20	K	21	K	22	K	23	K	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
1.01.02.2.04.18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Mengikuti Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		70.168.000,00	5	Orang	187.516.140,00		Orang	0,00	0	Orang	0,00		1	Kegiatan	175.064.000,00	93,36	%	175.064.000,00	91,01	%	245.232.000,00					DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																																																																																					
1.01.02.2.04.27	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			1	Dokumen	220.978.062,00		Dokumen	0,00	0	Dokumen	0,00		1	Kegiatan	196.164.430,00	88,77	%	196.164.430,00	91,01	%	196.164.430,00					DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																																																																																					
1.01.02.2.04.28	Supervisi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan supervisi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan			1	Dokumen	209.940.829,00		Dokumen	0,00	0	Dokumen	0,00		1	Kegiatan	47.849.340,00	22,79	%	47.849.340,00	91,01	%	47.849.340,00					DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																																																																																					
1.01.02.2.04.36	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			1	Paket	102.568.124,00		Paket	0,00	0	Paket	0,00		1	Paket	93.772.490,00	91,42	%	93.772.490,00	91,01	%	93.772.490,00					DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																																																																																					
01.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	(1) Angka Partisipasi Sekolah; (2) Kompetensi Literasi; (3) Kompetensi Numerasi; (4) Proportio Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B ; (5) Tingkat pertumbuhan pendidik Paud di dan Di Iv; (6) Nilai Kemandirian; (7) Nilai Kebelakangan; dan (8) Nilai Industri			100	%	1.190.151.085,00		%			%		138.794.118,00		2.297.628.155,00	193,05	%	2.297.628.155,00	91,01	%	2.297.628.155,00					DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																																																																																						
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terpenuhi/nyai(1) Angka Partisipasi Sekolah; (2) Kompetensi Literasi; (3) Kompetensi Numerasi; (4) Proportio Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B ; (5) Tingkat pertumbuhan pendidik Paud di dan Di Iv; (6) Nilai Kemandirian; (7) Nilai Kebelakangan; dan (8) Nilai Industri			100	%	1.190.151.085,00		%			%		138.794.118,00		2.297.628.155,00	193,05	%	2.297.628.155,00	91,01	%	2.297.628.155,00					DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																																																																																						
1.01.04.2.01.01	Penelitian dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1	Dokumen	284.615.930,00		Dokumen	372.932.235,00	1	Dokumen	372.932.235,00		1	kegiatan	372.932.235,00	131,03	%	372.932.235,00	91,01	%	372.932.235,00					DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																																																																																					
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendidikan/kegiatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendidikan/kegiatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1	Laporan	905.538.155,00		Laporan	313.141.368,00	1	Laporan	313.141.368,00	138.794.118,00	2	kegiatan	1.924.695.920,00	212,55	%	1.924.695.920,00	91,01	%	1.924.695.920,00					DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																																																																																					
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGK KEPEMUDAAN	Jumlah Pemuda Berprestasi, Terampil dan Tertahsil	100%	4.760.574.283,00	10	orang	1.631.601.229,00	orang	0,00	orang	0,00	0,00	0,00	2.030.968.847,00	124,48	%	2.030.968.847,00	91,01	%	4.198.396.799,00	88,19	%					DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																																																																																						
2.19.02.2.01	Pengajaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Pemuda Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wiraswasta Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan KMP dan Peringatan Hal Besar Nasional di Kabupaten Gunung Mas; Jumlah Pemuda/Anggota Drum Band Yang Tertahil ; Jumlah Pemuda Kader/ Anggota Pasdikbra Tk Kabupaten Yang Tertahil; Jumlah Pemuda Kader/ Anggota Pasdikbra Tk Kabupaten Yang Terpilih; Jumlah Pemuda Kader/ Anggota Pasdikbra Tk Provinsi Yang Terpilih; Jumlah Pelaksanaan Kegiatan KEPMA Kabupaten Gunung Mas di Kabupaten Raya		708.429.800,00	6	kegiatan	1.201.403.329,00	kegiatan	0,00	kegiatan	0,00	0,00	0,00	1.297.067.445,00	107,96	%	1.297.067.445,00	91,01	%	2.095.507.245,00									DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																																																																																				
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya SANG Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang mengikuti Pelatihan Kapasitas Daya SANG			50	Orang	100.000.000,00		Orang	0,00	0	Orang	0,00		1	Kegiatan	105.965.290,00	105,97	%	105.965.290,00	91,01	%	105.965.290,00					DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																																																																																					
2.19.02.2.01.04	Pemerataan Hak Seta Pemuda Melalui Peningkatan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penguasaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminasi, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Kapasitas Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terampil Melalui Peningkatan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penguasaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminasi, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Kapasitas Program Strategis Kepemudaan		2.100.000,00	10	Orang	250.070.000,00	Orang	0,00	1	Orang	219.079.000,00			1	Kegiatan	250.070.000,00	100,00	%	250.070.000,00	91,01	%	252.170.000,00					DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																																																																																					
2.19.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota			1	Dokumen	161.905.600,00		Dokumen	4.960.000,00				1	Kegiatan	234.346.908,00	144,74	%	234.346.908,00	91,01	%	234.346.908,00					DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																																																																																						
2.19.02.2.01.06	Pembinaan Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berprestasi dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berprestasi dan/atau Berprestasi Penilaian Penghargaan		708.439.800,00	5	Orang	305.875.939,00	Orang	0,00	1	Orang	269.108.000,00			1	Kegiatan	292.913.469,00	95,76	%	292.913.469,00	91,01	%	1.003.363.299,00					DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																																																																																					
2.19.02.2.01.08	Pengembangan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Mengikuti Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan			20	Orang	383.551.750,00		Orang	1	Orang	0,00			1	Kegiatan	413.771.778,00	107,88	%	413.771.778,00	91,01	%	413.771.778,00					DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																																																																																					
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Jumlah Dokumen Data Informasi berupa Buku Laporan		548.595.552,00	1	buku	430.197.900,00	buku	0,00	buku	0,00	0,00				733.901.402,00	170,60	%	733.901.402,00	91,01	%	1.282.496.954,00					DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																																																																																						
2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengembangan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terlatih/asi Kemitraan dengan Dunia Usaha		312.133.152,00	5	Orang	305.197.900,00	Orang	0,00	1	Orang	209.580.362,00			1	Kegiatan	573.901.402,00	188,04	%	573.901.402,00	91,01	%	886.054.554,00					DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																																																																																					
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan			0	Dokumen	125.000.000,00		Dokumen	1	Dokumen	125.000.000,00			1	Kegiatan	160.000.000,00	128,00	%	160.000.000,00	91,01	%	160.000.000,00					DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																																																																																					
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANG KEOLAHRAHAN		100%	4.760.574.283,00	-	-	6.000.448.605,00	-	0,00	-	-	-	65.007.000,00			8.409.784.990,00	140,15	%	8.409.784.990,00	91,01	%	9.556.613.990,00	200,75	%			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																																																																																						
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Mengikuti Kejuruan Daerah Kabupaten/Kota		-	2.100.000,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	RDIVDI	0,00	0,00	91,01	%	2.100.000,00								DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																																																																																					
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terawat/berfungsi		2.100.000,00	2	unit	0,00	unit	0,00	unit	0,00	0,00			RDIVDI	0,00	0,00	91,01	%	2.100.000,00								DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																																																																																					
2.19.03.2.02.01	Penyenggaraan Kejuruan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prestasi Olahragaragwan Berbakat		341.676.800,00	1	kegiatan	1.366.050.300,00	kegiatan	0,00	kegiatan	0,00	0,00			1	Kegiatan	2.351.662.368,00	172,15	%	2.351.662.368,00	91,01	%	2.692.738.168,00					DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																																																																																					
2.19.03.2.02.02	Penyenggaraan Kejuruan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuruan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		104.634.400,00	1	Dokumen	561.640.500,00	Dokumen	0,00	1	Dokumen	280.000,00			1	Kegiatan	999.906.400,00	178,03	%	999.906.400,00	91,01	%	1.104.540.800,00					DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																																																																																					
2.19.03.2.03.01	Partisipasi dan Kelukutan dalam Penyelenggaraan Kejuruan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuruan		236.442.400,00	50	Orang	804.499.800,00	Orang	0,00	1	Orang	0,00			1	Kegiatan	1.351.755.968,00	168,04	%	1.351.755.968,00	91,01	%	1.588.198.368,00					DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																																																																																					
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		-	-	-	1.603.900.144,00	-	-	-	-	-	-	19.208.000,00			1.351.755.968,00	84,28	%	1.351.755.968,00	91,01	%	1.351.755.968,00					DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																																																																																						
2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah yang Diselisi	Jumlah Atlet Daerah yang Diselisi			50	Orang	913.242.198,00		Orang	396.546.050,00			19.208.000,00	1	Kegiatan	469.086.050,00	91,40	%	469.086.050,00	91,01	%	469.086.050,00					DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																																																																																						
2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)			1	Pelatsa	157.434.436,00	0	Pelatsa	20.000.000,00				1	Kegiatan	2																																																																																																	

Kode	Uraian/Bidang Usan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPJMD-RESTRAN)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RPJMD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2024 (Tahun n-1) atau RKPd yang Dievaluasi saat ini		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			K		K		K		I		II		III		IV		K		K		K		K								
			6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14 = 7 + 13	Rp	15 = 14 / 6 x100%										
1.02.01.02.07.02	Pengadaan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1	unit	825.081.712,00				1	unit	36.293.000,00			36.293.000,00	4,40	%		36.293.000,00	91,01	%	Rp	36.293.000,00		DINAS KESEHATAN				
1.02.01.02.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				100	unit	0,00										0,00	0,00	%		0,00	91,01	%		0,00		DINAS KESEHATAN			
1.02.01.02.07.06	Pengadaan Perlengkapan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perlengkapan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2	unit	20.000.000,00						0,00			20.000.000,00	100,00	%		20.000.000,00	91,01	%		20.000.000,00		DINAS KESEHATAN				
1.02.01.02.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6	unit	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00	%		0,00	91,01	%		0,00		DINAS KESEHATAN			
1.02.01.02.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4	unit	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00	%		0,00	91,01	%		0,00		DINAS KESEHATAN			
1.02.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.054.163.546,00	-	%	2.036.376.755,00		%	346.952.926,00		%		866.191.641,00			1.188.896.723,00	58,38	%		1.188.896.723,00	91,01	%		2.243.060.292,00		DINAS KESEHATAN			
1.02.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1	laporan	0,00				1	laporan					0,00	0,00	0,00	%		0,00	91,01	%		0,00		DINAS KESEHATAN		
1.02.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			457.830.569,00	1	laporan	413.772.480,00			laporan	80.597.835,00	1	laporan	180.463.206,00	1	kantor, RS, puskesmas dan pelayanan	304.279.477,00	97,90	%		405.088.469,00	91,01	%		862.913.028,00		DINAS KESEHATAN			
1.02.01.02.08.03	Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			29.217.050,00	2	laporan	71.299.185,00			laporan	600.000,00	80	laporan	44.610.000,00	5	unit	75.435.000,00	80			120.640.000,00	91,01	%		149.857.050,00		DINAS KESEHATAN			
1.02.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			567.115.940,00	1	laporan	1.551.305.090,00			laporan	265.655.091,00	50	laporan	346.786.064,00	50	jasa	486.477.164,00	42,75	%		663.168.264,00	91,01	%		1.230.284.204,00		DINAS KESEHATAN			
1.02.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Usan Pemerintahan Daerah	Presentase sarana dan prasarana kesehatan dalam kondisi baik			966.089.620,00	70	%	995.616.643,00		%	107.220.500,00		%		613.734.946,00			1.071.864.968,00	107,66	%		1.071.864.968,00	91,01	%		2.037.954.588,00		DINAS KESEHATAN			
1.02.01.02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Disediakan dan dibebaskan Pajaknya	Jumlah Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Disediakan dan dibebaskan Pajaknya			41.152.000,00	1	Unit	80.403.851,00		Unit	0,00	Unit	0,00	Unit	0,00			23.568.400,00	95,79	%		77.018.400,00	91,01	%		118.170.400,00		DINAS KESEHATAN			
1.02.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan dan dibebaskan Pajak dan Perizinannya			821.378.620,00	25	Unit	808.034.157,00		Unit	134.570.500,00	3	Unit	192.453.660,00	3	Unit	455.924.546,00	25			833.994.560,00	103,21	%		833.994.560,00	91,01	%		1.655.973.138,00		DINAS KESEHATAN
1.02.01.02.09.03	Pemeliharaan/Himbunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan/Dirubuhkan			303.569.000,00	3	Unit	107.180.635,00		Unit	22.650.000,00	3	Unit	71.460.000,00			134.352.000,00	150,08	%			160.852.000,00	91,01	%		264.411.000,00		DINAS KESEHATAN			
1.02.02.1.13.02	Penataan Organisasi							0,00	-									0,00	0,00	0,00	%		0,00	91,01	%		0,00		DINAS KESEHATAN		
1.02.02.1.13.02	Penataan Organisasi							0,00	-									0,00	0,00	0,00	%		0,00	91,01	%		0,00		DINAS KESEHATAN		
1.02.02.1.13.02	Penataan Organisasi							0,00	-									0,00	0,00	0,00	%		0,00	91,01	%		0,00		DINAS KESEHATAN		
1.02.02.1.13.02	Penataan Organisasi							0,00	-									0,00	0,00	0,00	%		0,00	91,01	%		0,00		DINAS KESEHATAN		
1.02.02.1.13.02	Penataan Organisasi							0,00	-									0,00	0,00	0,00	%		0,00	91,01	%		0,00		DINAS KESEHATAN		
1.02.02.1.13.02	Penataan Organisasi							0,00	-									0,00	0,00	0,00	%		0,00	91,01	%		0,00		DINAS KESEHATAN		
1.02.02.1.13.02	Penataan Organisasi							0,00	-									0,00	0,00	0,00	%		0,00	91,01	%		0,00		DINAS KESEHATAN		
1.02.02.1.13.02	Penataan Organisasi							0,00	-									0,00	0,00	0,00	%		0,00	91,01	%		0,00		DINAS KESEHATAN		
1.02.02.1.13.02	Penataan Organisasi							0,00	-									0,00	0,00	0,00	%		0,00	91,01	%		0,00		DINAS KESEHATAN		
1.02.02.1.13.02	Penataan Organisasi							0,00	-									0,00	0,00	0,00	%		0,00	91,01	%		0,00		DINAS KESEHATAN		
1.02.02.1.13.02	Penataan Organisasi							0,00	-									0,00	0,00	0,00	%		0,00	91,01	%		0,00		DINAS KESEHATAN		
1.02.02.1.13.02	Penataan Organisasi							0,00	-									0,00	0,00	0,00	%		0,00	91,01	%		0,00		DINAS KESEHATAN		
1.02.02.1.13.02	Penataan Organisasi							0,00	-									0,00	0,00	0,00	%		0,00	91,01	%		0,00		DINAS KESEHATAN		
1.02.02.1.13.02	Penataan Organisasi							0,00	-									0,00	0,00	0,00	%		0,00	91,01	%		0,00		DINAS KESEHATAN		
1.02.02.1.13.02	Penataan Organisasi							0,00	-									0,00	0,00	0,00	%		0,00	91,01	%		0,00		DINAS KESEHATAN		
1.02.02.1.13.02	Penataan Organisasi							0,00	-									0,00	0,00	0,00	%		0,00	91,01	%		0,00		DINAS KESEHATAN		
1.02.02.1.13.02	Penataan Organisasi							0,00	-									0,00	0,00	0,00	%		0,00	91,01	%		0,00		DINAS KESEHATAN		
1.02.02.1.13.02	Penataan Organisasi							0,00	-									0,00	0,00	0,00	%		0,00	91,01	%		0,00		DINAS KESEHATAN		
1.02.02.1.13.02	Penataan Organisasi							0,00	-									0,00	0,00	0,00	%		0,00	91,01	%		0,00		DINAS KESEHATAN		
1.02.02.1.13.02	Penataan Organisasi							0,00	-									0,00	0,00	0,00	%		0,00	91,01	%		0,00		DINAS KESEHATAN		
1.02.02.1.13.02	Penataan Organisasi							0,00	-									0,00	0,00	0,00	%		0,00	91,01	%		0,00		DINAS KESEHATAN		
1.02.02.1.13.02	Penataan Organisasi							0,00	-									0,00	0,00	0,00	%		0,00	91,01	%		0,00		DINAS KESEHATAN		
1.02.02.1.13.02	Penataan Organisasi							0,00	-									0,00	0,00	0,00	%		0,00	91,01	%		0,00		DINAS KESEHATAN		
1.02.02.1.13.02	Penataan Organisasi							0,00	-									0,00	0,00	0,00	%		0,00	91,01	%		0,00		DINAS KESEHATAN		
1.02.02.1.13.02	Penataan Organisasi							0,00	-									0,00	0,00	0,00	%		0,00	91,01	%		0,00		DINAS KESEHATAN		
1.02.02.1.13.02	Penataan Organisasi							0,00	-									0,00	0,00	0,00	%		0,00	91,01	%		0,00		DINAS KESEHATAN		
1.02.02.1.13.02	Penataan Organisasi							0,00	-									0,00	0,00	0,00	%		0,00	91,01	%		0,00		DINAS KESEHATAN		
1.02.02.1.13.02	Penataan Organisasi							0,00	-									0,00	0,00	0,00	%		0,00	91,01	%		0,00		DINAS KESEHATAN		
1.02.02.1.13.02	Penataan Organisasi							0,00	-									0,00	0,00												

Kode	Uraian/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPJMD/RESTRAT)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Tahun 2024 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini	Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						I			II			III			IV										
						K	6	Rp	K	7	Rp	K	8	Rp	K	9	Rp					K	10	Rp	K
1.02.03.02	Pencapaian Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	815,995,223.00	-	-	-	455,196,285.00	-	-	0.00	-	-	367,871,803.00	0.00	0.00	%	0.00	91.01	%	815,995,223.00	DINAS KESEHATAN			
1.02.03.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasilitas)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasilitas)	815,995,223.00	30	orang	455,196,285.00	orang	0.00	5	orang	150,519,848.00	5	orang	367,871,803.00	0.00	0.00	%	0.00	91.01	%	815,995,223.00	DINAS KESEHATAN			
1.02.03.02.03	Pembiayaan dan Penguasaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembiayaan dan Penguasaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0.00	1	Dokumen	0.00	-	-	1	Dokumen	0.00	-	-	-	0.00	0.00	%	0.00	91.01	%	0.00	DINAS KESEHATAN			
1.02.03.02.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	656,797,866.00	-	-	-	976,330,430.00	-	-	11,994,000.00	-	-	658,277,684.00	0.00	0.00	%	0.00	91.01	%	656,797,866.00	DINAS KESEHATAN			
1.02.03.02.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Mutu dan Kompetensinya	656,797,866.00	50	Org	976,330,430.00	Org	11,994,000.00	30	Org	337,070,500.00	7	orang	658,277,684.00	0.00	0.00	%	0.00	91.01	%	656,797,866.00	DINAS KESEHATAN			
01.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-	313,581,000.00	-	-	-	50,000,000.00	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	%	0.00	91.01	%	0.00	DINAS KESEHATAN			
1.02.04.01	Pemberian Isin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penguasaan serta Tindak Lanjut Penguasaan Persediaan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	132,686,000.00	15	Dokumen	50,000,000.00	Dokumen	0.00	15	Dokumen	12,665,000.00	3	dokumen	40,855,000.00	0.00	0.00	%	0.00	91.01	%	132,686,000.00	DINAS KESEHATAN			
1.02.04.03	Penerbitan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Isin Produk, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penguasaan serta Tindak Lanjut Penguasaan Penerbitan Sertifikat Lahir Higien Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	98,243,500.00	-	-	99,228,000.00	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	%	0.00	91.01	%	98,243,500.00	DINAS KESEHATAN			
1.02.04.03.01	Pengendalian dan Penguasaan serta Tindak Lanjut Penguasaan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Isin Produk, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penguasaan serta Tindak Lanjut Penguasaan Penerbitan Sertifikat Lahir Higien Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	98,243,500.00	100	Dokumen	99,228,000.00	Dokumen	0.00	-	Dokumen	28,999,500.00	-	-	52,904,500.00	0.00	0.00	%	0.00	91.01	%	98,243,500.00	DINAS KESEHATAN			
1.02.04.04	Penerbitan Sertifikat Lahir Higien Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	%	0.00	91.01	%	0.00	DINAS KESEHATAN			
1.02.04.04.01	Pengendalian dan Penguasaan serta Tindak Lanjut Penguasaan Penerbitan Sertifikat Lahir Higien Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penguasaan serta Tindak Lanjut Penguasaan Penerbitan Sertifikat Lahir Higien Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	1	Dokumen	0.00	-	-	-	Dokumen	-	-	-	-	0.00	0.00	%	0.00	91.01	%	0.00	DINAS KESEHATAN			
1.02.04.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-	164,353,000.00	-	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-	0.00	0.00	%	0.00	91.01	%	0.00	DINAS KESEHATAN			
1.02.04.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Penguasaan serta Tindak Lanjut Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Produk dan Sarana Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Diikuti Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pemeriksaan	0.00	50	unit	164,353,000.00	unit	0.00	28	unit	108,227,300.00	28	unit	141,868,700.00	0.00	0.00	%	0.00	91.01	%	0.00	DINAS KESEHATAN			
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	4	6,707,718,210.00	-	-	-	729,773,645.00	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	%	0.00	91.01	%	1,227,311,988.00	18.30	DINAS KESEHATAN		
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Penan serta Masyarakat dan Linkas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	526,659,188.00	-	-	-	511,991,457.00	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	%	0.00	91.01	%	526,659,188.00	DINAS KESEHATAN			
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Udaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	526,659,188.00	3	Dokumen	511,991,457.00	Dokumen	0.00	3	Dokumen	290,623,100.00	1	dokumen	339,395,558.00	0.00	0.00	%	0.00	91.01	%	526,659,188.00	DINAS KESEHATAN			
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promosi Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	500,500,800.00	-	-	-	217,782,188.00	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	%	0.00	91.01	%	500,500,800.00	DINAS KESEHATAN			
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	500,500,800.00	5	Dokumen	217,782,188.00	Dokumen	0.00	5	Dokumen	27,438,400.00	1	dokumen	68,183,300.00	0.00	0.00	%	0.00	91.01	%	500,500,800.00	DINAS KESEHATAN			
01.02	URUSAN KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	%	0.00	91.01	%	0.00	DINAS KESEHATAN			
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	80%	41,133,601,778.00	-	-	-	48,833,223,704.00	-	-	2,318,455,950.00	-	-	-	26,610,415,191.00	54.49	%	26,610,415,191.00	91.01	%	67,734,016,969.00	RSUD KUALA KURUN			
1.02.01.2.01	Pencabutan, Pengangsuran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	177,562,773.00	-	-	-	244,068,335.00	-	-	0.00	-	-	156,068,335.00	64.04	%	156,068,335.00	91.01	%	333,571,108.00	RSUD KUALA KURUN				
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Pencapaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pencapaian Perangkat Daerah	64,845,335.00	10	Dokumen	143,487,380.00	Dokumen	0.00	-	Dokumen	60,719,077.00	-	-	143,427,635.00	99.96	%	143,427,635.00	91.01	%	208,272,870.00	RSUD KUALA KURUN				
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,557,500.00	1	Dokumen	3,424,630.00	Dokumen	0.00	-	Dokumen	828,800.00	-	-	3,382,800.00	98.78	%	3,382,800.00	91.01	%	6,320,300.00	RSUD KUALA KURUN				
1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Penjabaran RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penjabaran RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Penjabaran RKA-SKPD	2,500,000.00	1	dokumen	3,330,600.00	dokumen	0.00	-	dokumen	0.00	-	-	3,500,700.00	99.15	%	3,500,700.00	91.01	%	6,400,700.00	RSUD KUALA KURUN				
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1,298,000.00	1	dokumen	1,545,000.00	dokumen	0.00	-	dokumen	1,532,500.00	-	-	1,532,500.00	99.19	%	1,532,500.00	91.01	%	2,830,500.00	RSUD KUALA KURUN				
1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Penjabaran DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penjabaran DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Penjabaran DPA-SKPD	1,700,000.00	1	dokumen	1,423,400.00	dokumen	0.00	-	dokumen	0.00	-	-	1,413,700.00	99.32	%	1,413,700.00	91.01	%	3,113,700.00	RSUD KUALA KURUN				
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	2,184,000.00	1	laporan	2,850,200.00	laporan	0.00	-	laporan	1,251,000.00	-	-	2,811,000.00	98.62	%	2,811,000.00	91.01	%	4,995,000.00	RSUD KUALA KURUN				
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	13,378,479,900.00	-	-	-	29,947,207,212.00	8	-	1,876,085,946.00	-	-	-	24,420,323,552.00	81.54	%	24,420,323,552.00	91.01	%	37,798,803,452.00	RSUD KUALA KURUN			
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Memerika Gaji dan Tunjangan ASN	13,378,479,900.00	272	Orang/bulan	29,947,207,212.00	8	Orang/bulan	1,876,085,946.00	-	Orang/bulan	13,173,954,257.00	-	-	24,420,323,552.00	81.54	%	24,420,323,552.00	91.01	%	37,798,803,452.00	RSUD KUALA KURUN			
1.02.01.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Daerah	-	-	364,203,394.00	-	-	-	123,465,360.00	06	-	107,478,916.00	-	-	98,976,166.00	80.08	%	98,976,166.00	91.01	%	483,079,560.00	RSUD KUALA KURUN				
1.02.01.2.02.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	364,203,394.00	11	Orang	123,465,360.00	11	Orang	107,478,916.00	Orang	43,911,944.00	-	-	98,976,166.00	80.08	%	98,976,166.00	91.01	%	483,079,560.00	RSUD KUALA KURUN				
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	291,472,000.00	-	-	-	926,456,358.00	10	-	37,489,100.00	-	-	533,490,590.00	57.58	%	533,490,590.00	91.01	%	824,962,590.00	RSUD KUALA KURUN				
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Didisalkan	269,672,000.00	1	Paket	337,296,360.00	0.25	Paket	24,897,000.00	Paket	159,844,000.00	-	-	337,238,000.00	99.98	%	337,238,000.00	91.01	%	626,910,000.00	RSUD KUALA KURUN				
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Didisalkan	1,800,000.00	1	dokumen	4,968,000.00	1	dokumen	450,000.00	dokumen	900,000.00	-	-	1,800,000.00	96.23	%	1,800,000.00	91.01	%	3,600,000.00	RSUD KUALA KURUN				
1.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Didisalkan	0.00	1	Paket	18,845,755.00	1	Paket	0.00	Paket	-	-	-	19,9											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPJMD/REKSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RPJMD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/Tahun 2024 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dianggarkan saat ini												Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			K		Rp		K		Rp		I				II				III				IV				K		Rp		K		Rp		24 = 7 x12			25 = 14 / 6 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1.03.10.2.01.43	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya			613,273,807.00	732	Km	500,000,000.00	0.00																									DINAS PEKERJAAN UMUM					
1.03.10.2.01.46	Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan			985,000,000.00	1	Km	985,000,000.00	0.00																									DINAS PEKERJAAN UMUM					
01.03.11	PROGRAM PENGEMASANAN JASA KONSTRUKSI		100%	4,534,895,846.00		935,161,533.00	1	Dokumen	1,148,818,860.00			72,045,398.00																						DINAS PEKERJAAN UMUM					
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pemeliharaan Tenaga Terampil Konstruksi				78,156,320.00	-	-	207,766,067.00	0.00																										DINAS PEKERJAAN UMUM				
1.03.11.2.01.16	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Asisten vanis Diklat	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Asisten vanis Diklat			78,156,320.00	30	Orang	207,766,067.00	0.00	26	Orang	82,219,500.00	26								231,625,100.00	30	Orang	139,785,130.00	67.28	%	139,785,130.00	91.01	%	217,939,450.00					DINAS PEKERJAAN UMUM				
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				812,562,232.00	-	-	847,970,471.00	64,320,398.00																									DINAS PEKERJAAN UMUM					
1.03.11.2.02.12	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Didistribikan	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Didistribikan			268,278,486.00	1	perangkat pendukung	39,095,434.00	1	Kegiatan	440,000.00	1	perangkat pendukung	39,003,000.00	0							231,625,100.00	1	Perangkat	77,851,000.00	199.33	%	77,851,000.00	91.01	%	366,129,486.00				DINAS PEKERJAAN UMUM				
1.03.12.2.02.13	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Didistribikan			307,440,660.00	2	Dokumen	210,701,146.00	2	Unit	14,110,110.00	1	Dokumen	50,816,650.00	0							291,292,594.00	2	Dokumen	179,546,486.00	85.21	%	179,546,486.00	91.01	%	486,985,151.00				DINAS PEKERJAAN UMUM				
1.03.11.2.02.14	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAK	Jumlah Pengelola SIPJAK yang Ditingkatkan Kapasitasnya			37,123,100.00	2	Orang	22,219,500.00	0	Orang	0.00	0	Orang	1,828,000.00	2							24,533,967.00	2	Orang	34,380,400.00	110.42	%	34,380,400.00	91.01	%	63,656,967.00				DINAS PEKERJAAN UMUM				
1.03.11.2.02.15	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Diperkirakan			179,659,981.00	1	layanan informasi	35,175,831.00	1	Dokumen	49,770,288.00	1	layanan informasi	5,907,000.00	0							182,080,951.00	1	layanan inform	34,380,400.00	97.74	%	34,380,400.00	91.01	%	214,040,381.00				DINAS PEKERJAAN UMUM				
1.03.11.2.04	Pengawasan Terbit Uraha, Terbit Penyelenggaraan dan Terbit Pemantauan Jasa Konstruksi				44,502,981.00	-	-	85,082,022.00	7,725,000.00																									DINAS PEKERJAAN UMUM					
1.03.11.2.04.04	Pengawasan dan Evaluasi Terbit Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pelayanan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Terbit Penyelenggaraan			44,502,981.00	1	paket pelayanan	85,082,022.00	1	Kegiatan	7,725,000.00		paket pelayanan		0							109,867,223.00	14	Paket Pelayanan	83,629,450.00	98.29	%	83,629,450.00	91.01	%	128,132,431.00				DINAS PEKERJAAN UMUM				
01.03.12	PROGRAM PENYELENGKARAAN PENATAAN RUANG		100%	5,702,953,428.00		#REF!	-	-	690,000,000.00			46,704,364.00																						DINAS PEKERJAAN UMUM					
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRT) Kabupaten/Kota				741,417,810.00	-	-	450,000,000.00	0.00																										DINAS PEKERJAAN UMUM				
1.03.12.2.01.03	Pelaksanaan Penetapan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat penetapan substansi RTRW Kabupaten/Kota			741,417,810.00	1	Dokumen	250,000,000.00	0.00			Dokumen	0.00																						DINAS PEKERJAAN UMUM				
1.03.12.2.01.08	Pelaksanaan Fasilitas RDRR Kabupaten/Kota	Jumlah persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitas				1	Dokumen	100,000,000.00	0.00	1	Dokumen	95,204,684.00	0																						DINAS PEKERJAAN UMUM				
1.03.12.2.01.11	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota				1	Dokumen	100,000,000.00	0.00			Dokumen																							DINAS PEKERJAAN UMUM				
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				50,372,100.00	-	-	50,000,000.00	6,437,100.00																										DINAS PEKERJAAN UMUM				
1.03.12.2.02.06	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan			50,372,100.00	2	orang	50,000,000.00	2	Dokumen	6,437,100.00	2	orang	52,013,314.00	104.03	%																			DINAS PEKERJAAN UMUM				
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				299,550,950.00	-	-	100,000,000.00	7,105,000.00																										DINAS PEKERJAAN UMUM				
1.03.12.2.03.03	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang			299,550,950.00	1	Dokumen	50,000,000.00	30	Dokumen	7,105,000.00		Dokumen	27,078,000.00	0																				DINAS PEKERJAAN UMUM				
1.03.12.2.03.04	Pelaksanaan Penetapan Kawasan Kegiatan Pemukiman Ruang	Jumlah Taperan Penetapan KAPRI sesuai dengan ketentuan waktu atau hasil				1	layanan	50,000,000.00	22,992,000.00	4	Layanan	41,320,900.00	54.64	%																					DINAS PEKERJAAN UMUM				
01.04	URUSAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN																																						
1.04.02	PROGRAM PENGEMASANAN PERUMAHAN		100%	512,046,794.00		174,995,533.00	-	-	113,394,693.00			44,272,008.00																							DINAS PEKERJAAN UMUM				
1.04.02.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				174,995,533.00	-	-	37,358,856.00	11,288,008.00																											DINAS PEKERJAAN UMUM			
1.04.02.01.09	Koordinasi Pemukiman di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			174,995,533.00	1	Dokumen	57,358,856.00	1	Dokumen	11,288,008.00		Dokumen	18,719,800.00	0																					DINAS PEKERJAAN UMUM			
1.04.02.02	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota																																						
1.04.02.02.06	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana																																						
1.04.02.02.06.03	Pewadahan dan Rehabilitasi dan Pengembangan Pemukiman				231,195,816.00	-	-	56,035,747.00	32,983,920.00																											DINAS PEKERJAAN UMUM			
01.04.03	PROGRAM KAWASAN PEMUKIMAN		100%	9,976,892,394.00		375,696,516.00	-	-	1,698,469,314.00			0.00																								DINAS PEKERJAAN UMUM			
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh dengan Lupa di Daerah 35 Kecamatan				144,500,700.00	-	-	1,698,469,314.00	0.00																											DINAS PEKERJAAN UMUM			
1.04.03.2.04.02	Pelaksanaan Rumah Total Layak Huni yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Total Layak Huni yang Diperbaiki			144,500,700.00	70	unit rumah	1,698,469,314.00	0.00	unit rumah	26,122,400.00	39																								DINAS PEKERJAAN UMUM			
01.04.05	PRODIRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM		100%	32,652,709,116.00		12,520,048,923.00	-	-	17,604,826,098.00			495,482,792.00																								DINAS PEKERJAAN UMUM			
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Pemukiman				12,520,048,923.00	-	-	17,604,826,098.00	495,482,792.00																											DINAS PEKERJAAN UMUM			
1.04.05.2.01.01	Pencapaian Perencanaan PSU Pemukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Pemukiman			95,494,100.00	1	Dokumen	110,013,473.00	1	Dokumen	33,276,000.00	1	Dokumen	64,9																									

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPJMD/REKSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2024 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 x13		15 = 14 / 6 x100%					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1.05.02.2.02.010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			0.00	10	laporan	287.013.980.00			0.00							244.903.508.00	85.33	%	244.903.508.00	91.01	%	244.903.508.00		SATPOL PP
1.05.02.2.02.011	Penerangan Atas Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penerangan Atas Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			10	laporan	16.044.560.00											80.029.800.00	498.80	%	80.029.800.00	91.01	%	80.029.800.00		SATPOL PP
1.05.02.2.02.012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			12	laporan	34.467.158.00											26.286.550.00	76.27	%	26.286.550.00	91.01	%	26.286.550.00		SATPOL PP
01.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		100%	513.337.131.00			366.795.853.00	-	-	268.409.800.00			4.709.250.00	-	-		227.252.381.00	84.67	%	227.252.381.00	91.01	%	594.048.234.00	115.72	SATPOL PP	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah informasi rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan terasor inovatif sedimen 3.000.000.00			0.00	8	orang	4.709.250.00			0.00			orang			18.649.800.00	RdVdV	%	18.649.800.00	91.01	%	385.445.653.00		SATPOL PP	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Laporan Pelaksanaan Kegiatan					366.795.853.00	1	laporan	268.409.800.00			6.00				208.602.581.00	77.72	%	208.602.581.00	91.01	%	575.396.434.00		SATPOL PP	
1.05.03.2.02.16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana					366.795.853.00	1	kawasan	268.409.800.00			0.00				208.602.581.00	RdVdV	%	208.602.581.00	91.01	%	575.396.434.00		SATPOL PP	
1.05.03.2.02.17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kegiatan pusat pengendalian operasi (gudang) dengan Mekanisme Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan terasor inovatif sedimen 3.000.000.00			12	laporan	268.409.800.00										208.602.581.00	77.72	%	208.602.581.00	91.01	%	208.602.581.00		SATPOL PP	
01.05.04	PROGRAM PENGELOMPOKAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBANGKARAN DAN PENGELOMPOKAN NON KEBANGKARAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%	20.545.777.630.00			1.603.485.692.00	100	%	891.868.490.00			259.949.112.00	%			1.037.104.920.00	105.63	%	1.037.104.920.00	91.01	%	2.640.590.612.00	12.85	SATPOL PP	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Penanganan, Penyelamatan, dan Penanganan Bahaya Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Kegiatan					1.603.485.692.00	1	laporan	891.868.490.00			259.949.112.00				1.037.104.920.00	105.63	%	1.037.104.920.00	91.01	%	2.640.590.612.00		SATPOL PP	
1.05.04.2.01.09	Penyenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah/Beberapa, antar Lembaga, dan Koordinasi dalam Pencegahan, Pengendalian, Penanganan, Penanganan, dan Penanganan dalam Pencegahan, Pengendalian, Penanganan, dan Penanganan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Pengendalian, Penanganan, dan Penanganan dalam Pencegahan, Pengendalian, Penanganan, dan Penanganan			12	dokumen	891.868.490.00						259.949.112.00				1.037.104.920.00	105.63	%	1.037.104.920.00	91.01	%	2.640.590.612.00		SATPOL PP	
81			100%	19.531.742.228.00			3.459.976.652.00			1.399.913.707.00			781.884.581.00				2.456.882.597.00	175.50	%	2.456.882.597.00	91.01	%	5.913.999.249.00	30.29	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Dengan Sajian 3 Dokumen				5	dokumen	50.659.244.00					dokumen				0.00	0.00	%	0.00	91.01	%	0.00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan				5	dokumen	50.659.244.00					3	dokumen	12.909.825.00		0.00	0.00	%	0.00	91.01	%	0.00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
1.05.01.2.01.02	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah				2		6.960.502.00									160.034.292.00	2.299.18	%	160.034.292.00	91.01	%	160.034.292.00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
1.05.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				3	laporan	6.960.502.00				1	laporan	3.220.000.00	1		160.034.292.00	2.299.18	%	160.034.292.00	91.01	%	160.034.292.00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan				30	%	214.250.492.00					%				330.986.104.00	154.49	%	330.986.104.00	91.01	%	330.986.104.00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisialkan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisialkan				7	paket	5.302.025.00									17.489.500.00	329.69	%	17.489.500.00	91.01	%	17.489.500.00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Perabotan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perabotan Rumah Tangga yang Didisialkan				20	paket	19.495.980.00	18	Jenis	3.297.310.00						57.884.625.00	294.24	%	57.884.625.00	91.01	%	76.432.725.00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Didisialkan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Didisialkan			0.00	5	paket	36.106.000.00	4	Paket	2.308.000.00						76.207.600.00	211.07	%	76.207.600.00	91.01	%	76.207.600.00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengendalian	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengendalian				4	paket	29.995.748.00	3	Jenis	4.305.500.00						179.912.379.00	599.71	%	179.912.379.00	91.01	%	198.716.139.00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan					37.710.750.00	100	%	37.710.750.00			0.00	%			737.352.564.00	1.656.81	%	737.352.564.00	91.01	%	737.352.564.00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Perabotan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perabotan dan Mesin Lainnya yang Didisialkan				10	Unit	39.710.750.00	7	Unit	0.00			7	Unit	38.699.900.00	7	730.752.564.00	7	737.352.564.00	91.01	%	737.352.564.00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan					891.054.942.00	90	%	891.054.942.00			7.657.777.00	%			769.042.177.00	86.31	%	769.042.177.00	91.01	%	897.783.106.00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12	Laporan	7.400.000.00	1	Jenis	2.500.000.00	1	Laporan	1.500.000.00	1		22.340.000.00	337.73	%	24.992.000.00	91.01	%	34.992.000.00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Didisialkan				4	Laporan	481.948.740.00	8	Orang	64.451.028.00	8	Laporan	208.485.872.00	8		653.741.951.00	8	744.050.177.00	8	744.050.177.00	91.01	%	838.409.285.00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan					34.439.550.00	100	%	34.439.550.00			459.465.460.00	%			459.465.460.00	232.90	%	459.465.460.00	91.01	%	599.965.350.00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Kendaran	Jumlah Kendaran Perawatan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan				12	Unit	51.526.903.00	1	Unit	13.829.000.00	1	Unit	14.232.000.00	1		123.825.550.00	240.31	%	123.825.550.00	91.01	%	154.058.040.00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dipelihara Pajak dan Perawatan				14	Unit	115.710.564.00	13	Unit	17.060.550.00	13	Unit	16.620.000.00			245.770.560.00	212.40	%	245.770.560.00	91.01	%	318.385.460.00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Perabotan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perabotan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5	unit	14.794.524.00	4	Jenis	3.550.000.00	4	unit	1.600.000.00	4		50.595.250.00	341.99	%	50.595.250.00	91.01	%	66.143.250.00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Didisialkan/Rehabilitasi				1	unit	15.245.788.00	1	Jenis	0.00	1	unit	25.699.100.00	1		39.274.100.00	257.61	%	39.274.100.00	91.01	%	51.378.600.00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
08.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	%	3.902.062.166.00					3.902.062.166.00			%				9.864.194.709.00	252.79	%	9.864.194.709.00	91.01	%	9.864.194.709.00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan					3.381.983.687.00	28	orang	3.381.983.687.00			460.194.544.00				8.020.787.530.00	237.16	%	8.020.787.530.00	91.01	%	10.699.031.581.00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				30	Orang/bulan	3.381.983.687.00	27	Orang	460.194.544.00	27	Orang/bulan	1.463.206.154.00	24		7.154.213.921.00	24	8.020.787.530.0							

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPJMD/PRENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2)		Realisasi Kinerja Pada Tahunrun 2024												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	14 = 7 + 13	15 = 14 / 6 x100%		
0.01.02.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etnika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelengkapan Pemerintahan, Perwakilan dan Parata Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etnika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelengkapan Pemerintahan, Perwakilan dan Parata Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	40,181,146.00	20	25,000,000.00	9	Partisipatif	0.00	9	K	Rp	9	K	Rp	9	K	Rp	417.57	%	104,392,680.00	91.01	%	144,373,826.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
0.01.03.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etnika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelengkapan Pemerintahan, Perwakilan dan Parata Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etnika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelengkapan Pemerintahan, Perwakilan dan Parata Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	904,742,079.00	100	orang	32,289,691,892.00	9	Partasipatif	5,626,800.00	9	orang	31,447,288,790.00	18	48,986,052,146.00	18	48,245,022,142.00	152.51	%	49,245,022,142.00	91.01	%	50,048,704,221.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
0.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pembinaan LSM di daerah Persentase pembinaan terhadap Omas, LSM dan OKP adat (dengan Satuan%)	1,076,950,160.00	363,449,834.00	100	%	580,496,640.00	15,822,000.00	%	943,350,438.00	162.51	%	943,350,438.00	91.01	%	1,296,800,252.00	120.41	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
0.01.04.2.01	Penemuan Kegiatan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah laporan penemuan kegiatan teknis dan pemantauan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (Dengan Satuan Orang)	363,449,834.00	40	Laporan	580,496,640.00	15,822,000.00	Laporan	943,350,438.00	162.51	%	943,350,438.00	91.01	%	1,296,800,252.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
0.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Segitiga Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Segitiga Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	200,047,390.00	100	Orang	325,500,800.00	40	Orang	15,822,000.00	40	Orang	5,926,800.00	4	490,115,066.00	4	617,887,966.00	189.83	%	617,887,966.00	91.01	%	817,936,356.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
0.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Segitiga Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Segitiga Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	153,402,424.00	20	laporan	254,998,840.00	12	Kecamatan	0.00	12	kecamatan	5,189,490.00	6	220,961,177.00	6	325,462,472.00	127.63	%	325,462,472.00	91.01	%	478,964,896.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
0.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1. Persentase cakupan wilayah pembinaan ketahanan sosial budaya dan politik; 2.Persentase cakupan wilayah pembinaan ketahanan sosial budaya dan ekonomi; 3. Persentase jumlah masyarakat yang terdeteksi dan kualifikasi pencegahan penyelebaran narkoba; Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (Dengan Satuan%)	2,311,395,240.00	1,195,041,382.00	100	%	408,734,844.00	61,856,880.00	%	1,922,586,711.00	479.77	%	1,922,586,711.00	91.01	%	3,117,628,103.00	134.89	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
0.01.05.2.01	Perumutan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen perumutan kebijakan teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (Dengan Satuan 10100 Orang)	1,195,041,382.00	10100	orang	400,734,844.00	61,856,880.00	orang	1,922,586,711.00	479.77	%	1,922,586,711.00	91.01	%	3,117,628,103.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
0.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyelebaran Narkoba, Fasilitas Ketahanan Umat Bangsa dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah kegiatan di masyarakat dalam pembinaan ketahanan sosial budaya dan keamanan umat bangsa serta fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyelebaran narkoba	1,060,529,892.00	1200	orang	299,999,796.00	12	Kecamatan	57,886,880.00	6	kecamatan	139,992,850.00	12	1,618,818,814.00	12	1,684,818,814.00	961.60	%	1,684,818,814.00	91.01	%	2,746,343,556.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
0.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyelebaran Narkoba, Fasilitas Ketahanan Umat Bangsa dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyelebaran Narkoba, Fasilitas Ketahanan Umat Bangsa dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	134,511,500.00	100	Orang	100,735,048.00	40	Orang	4,770,000.00	40	Orang	35,095,000.00	40	220,961,177.00	40	237,773,047.00	238.04	%	237,773,047.00	91.01	%	372,284,547.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
0.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi terjadinya gangguan keamanan yang terdeteksi (Dengan Satuan%)	2,347,108,580.00	887,434,478.00	90	%	646,397,723.00	64,728,467.00	%	1,481,995,977.00	229.21	%	1,481,995,977.00	91.01	%	2,369,030,455.00	100.93	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
0.01.06.2.01	Perumutan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kecepatan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi gangguan keamanan	887,434,478.00	100	%	646,397,723.00	64,728,467.00	%	1,481,995,977.00	229.21	%	1,481,995,977.00	91.01	%	2,369,030,455.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
0.01.06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Dns, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelengkapan Bidang Kewaspadaan, serta Pemantauan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Dns, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelengkapan Bidang Kewaspadaan, serta Pemantauan Konflik di Daerah yang Disusun	92,580,890.00	12	Dokumen	72,150,416.00	4	Dokumen	1,985,235.00	4	Dokumen	41,406,900.00	4	138,395,165.00	4	203,929,914.00	282.61	%	203,929,914.00	91.01	%	296,510,804.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
0.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Dns, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelengkapan Bidang Kewaspadaan, serta Pemantauan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Dns, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelengkapan Bidang Kewaspadaan, serta Pemantauan Konflik di Daerah yang Disusun	414,422,440.00	100	orang	157,840,500.00	4	Laporan	37,972,132.00	4	orang	56,220,400.00	4	504,256,239.00	4	602,715,539.00	381.85	%	602,715,539.00	91.01	%	1,017,138,279.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
0.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kesejahteraan Dns, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelengkapan Bidang Kewaspadaan, serta Pemantauan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kesejahteraan Dns, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelengkapan Bidang Kewaspadaan, serta Pemantauan Konflik di Daerah	50,762,280.00	100	orang	25,000,284.00	4	Stakeholder s	9,516,100.00	4	orang	130,416,179.00	8	146,741,529.00	8	146,741,529.00	586.96	%	146,741,529.00	91.01	%	187,503,809.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
0.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kesejahteraan Dns, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelengkapan Bidang Kewaspadaan, serta Pemantauan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kesejahteraan Dns, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelengkapan Bidang Kewaspadaan, serta Pemantauan Konflik di Daerah	95,453,698.00	12	Laporan	35,000,324.00	1	Laporan	6,555,000.00	1	Laporan	9,896,400.00	4	79,301,500.00	4	84,508,700.00	241.45	%	84,508,700.00	91.01	%	179,962,388.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
0.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	234,214,870.00	12	dokumen	356,397,193.00	1	Tahun	8,700,000.00	1	tahun	21,900,000.00	12	332,108,945.00	12	443,700,295.00	124.50	%	443,700,295.00	91.01	%	677,935,365.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
01.05.01	PROGRAM PENKUALIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	17,767,987,518.00	-	-	8,044,446,378.00	685,115,170.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	3,405,391,927.00	-	-	138,899,378.00	6,315,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,862,700.00	20	dokumen	2,897,140.00	20	dokumen	1,059,200.00	20	dokumen	2,856,000.00	20	4,515,200.00	20	2,856,000.00	99.96	%	2,856,000.00	91.01	%	243,128,700.00	BPBD	
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2,269,800.00	40	dokumen	4,697,520.00	40	dokumen	4,656,000.00	40	dokumen	4,696,000.00	40	9,352,000.00	40	4,696,000.00	99.97	%	4,696,000.00	91.01	%	6,990,800.00	BPBD	
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2,269,800.00	40	dokumen	4,697,520.00	40	dokumen	0.00	0	dokumen	0.00	0	12,499,000.00	40	7,807,000.00	166.19	%	7,807,000.00	91.01	%	10,096,800.00	BPBD	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	11,117,800.00	12	laporan	96,492,500.00	12	laporan	6,100.00	6	laporan	168,909,734.00	175.05	168,909,734.00	175.05	168,909,734.00	91.01	%	187,002,534.00	91.01	%	187,002,534.00	BPBD	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	3,911,180,238.00	-	-	3,486,772,040.00	225,542,721.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Kas dan Tunjangan ASN	Jumlah Kas dan Tunjangan ASN	3,911,180,238.00	44	orang/bulan	3,486,772,040.00	20	orang	225,542,721.00	41	orang/bulan	1,918,425,899.00	41	orang	3,724,985,456.00	106.83	%	3,724,985,456.00	91.01	%	7,836,065,691.00	BPBD		
1.05.01.2.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Meresika Gaji dan Tunjangan ASN	1,937,788,296.00	-	-	245,349,220.00	14,128,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakan Dinas beserta Alat Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Alat Kelengkapannya	51,589,500.00	58	paket	51,589,500.00	20	stetl	14,128,000.00	56	paket	49,840,000.00	103.04	67,528,000.00	58	paket	53,400,000.00	103.04	%	53,400,000.00	91.01	%	186,989,500.00	BPBD
1.05.01.2.05.11	Biayaban Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Biayaban Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2,600,000.00	19	orang	193,523,320.00	5	orang	0.00	19	orang	188,014,566.00	117.26	226,377,622.00	19	orang	226,934,566.00	91.01	%	226,934,566.00	91.01	%	253,534,566.00	BPBD
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2,928,182,292.00	-	-	1,666,157,895.00	203,843,425.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisainkan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisainkan	639,158,120.00	3	paket	5,874,120.00	4	jenis	956,000.00	3	paket	2,829,900.00	3	paket	7,458,500.00	99.99	%	5,873,000.00	91.01	%	645,031,720.00	BPBD		
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Perabotan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perabotan dan Perlengkapan Kantor yang Didisainkan	27,041,000.00	5	paket	69,881,864.00	5	paket	35,750,000.00	5	paket	230,015,687.00	290.87	239,015,687.00	5	paket	203,265,687.00	91.01	%	203,265,687.00	91.01	%	230,265,687.00	BPBD
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Didisainkan	80,600,300.00	4	paket	46,769,968.00	4	paket	10,799,500.00	4	paket	19,958,000.00	4	paket	41,191,900.00	101.03	%	41,191,900.00	91.01	%	131,782,700.00	BPBD		
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengoperasian alat Didisainkan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengoperasian alat Didisainkan	60,464,300.00	3	paket	25,774,200.00	3	paket	2,664,000.00	3	paket	30,677,200.00	3	paket	32,073,400.00	124.44	%	32,073,400.00	91.01	%	92,537,700.00	BPBD		
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Didisainkan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Didisainkan	30,472,200.00	1.46	dokumen	11,182,140.00	1.46	dokumen	2,700,000.00	730	dokumen	5,400,000.00	99.27	19,200,000.00	1.460	dokumen	11,100,000.00	91.01	%	11,100,000.00	91.01	%	41,572,200.00	BPBD
1.05.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material yang Didisainkan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Didisainkan	0.00	1	paket	29,953,085.00	1	paket	0.00	1	paket	17,785,000.00	99.38	17,785,000.00	1	paket	17,785,000.00	91.01	%	17,785,000.00	91.01	%	17,785,000.00	BPBD
1.05.01.2.06.09	Pengembangan Rapor Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Rapor Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10,800,000.00	12	bulan	402,503,000.00	12	bulan	150,873,929.00	6	bulan	267,009,097.00	12	bulan	592,535,990.00	147.21	%	592,535,990.00	91.01	%	603,336,960.00	BPBD		
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah	-	1,014,582,713.00	-	-	479,028,573.00	116,377,628.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	526,839,385.00	1	laporan	7,000,000.00	2	jenis	0.00	1	laporan	3,500,000.00	1	laporan	13,050,000.00	100.00	%	7,000,000.00	91.01	%	533,839,385.00	BPBD		
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didisainkan	42,300,509.00	3	laporan	71,641,000.00	3	laporan	20,719,118.00	3	laporan	78,938,496.00	79.94	50,934,857.00	3	laporan	50,934,857.00	91.01	%	93,236,366.00	BPBD			
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Didisainkan	495,923,665.00	2	laporan	406,312,570.00	4	jenis	106,158,510.00	2	laporan	166,697,078.00	2	laporan	680,594,334.00	78.45	%	320,314,128.00	91.01	%	816,237,793.00	BPBD		
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah	-	615,611,246.00	-	-	288,597,046.00	118,908,196.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.05.01.2.09																								

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPJMD-RESTRAN)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RPJMD Kabupaten Tahun Lalu Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Tahun 2024 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			I		II		III			IV																			
			Rp		Rp		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp								
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24 = 7 x13		25 = 14 / 6 x100%						
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			Rp		Rp		Rp																					
1.05.03.2.04.08	Bimbingan Teknis Pesca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan Intan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebahutan Pascabencana (JITUPASBA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (RRP)							12	orang	481,439,832.00				6	orang	28,112,410.00			34,712,410.00	12	orang	42,214,010.00	98.45 %	42,214,010.00	91.01 %	42,214,010.00		BPBD
1.05.03.2.04.10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (RRP) Kabupaten/Kota yang ditetapkan							2	kegiatan	438,560,632.00				1	kegiatan	182,269,934.00			624,964,162.00	2	kegiatan	414,232,354.00	94.45 %	414,232,354.00	91.01 %	414,232,354.00		BPBD
01.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	100%	9,999,971,375.00	2,113,250,284.00	-	-	1,567,261,532.00			16,052,000.00	-								1,238,852,566.00	79.55 %	1,238,852,566.00	91.01 %	3,352,102,850.00	33.52	BPBD			
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahaya dan Bencana Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-						892,295,990.00	-	-	1,054,637,113.00									654,794,250.00	62.53 %	654,794,250.00	91.81 %	1,551,090,200.00		BPBD			
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapagaian Petugas Piset dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						675,213,550.00	1	laporan	39,388,400.00	114	desa	0.00	0	laporan	0.00			42,465,000.00	1	laporan	3,935,000.00	9.99 %	3,935,000.00	91.01 %	675,146,550.00		BPBD
1.05.04.2.01.08	Pengendalian Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIP)	Jumlah Desakelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIP) yang Rilis di Secara Perilaku atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berdasarkan dan Real Time yang Dimilik Oleh Desakelurahan Setiap Tahunnya						92,405,000.00	13	desakelurahan	540,258,200.00	1.1	lembar	0.00	7	desakelurahan	51,490,000.00			622,366,000.00	13	Desak Kel.	84,165,000.00	15.98 %	84,165,000.00	91.01 %	176,570,000.00		BPBD
1.05.04.2.01.17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Tertentu						124,617,400.00	25	unit	256,756,875.00	120	hari	0.00	25	unit	255,483,750.00			504,843,750.00	25	unit	449,388,750.00	175.03 %	449,388,750.00	91.01 %	574,066,150.00		BPBD
1.05.04.2.01.18	Penyenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah, Bebanan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						217,233,638.00	2	dokumen				0	dokumen	0.00				410,792,500.00	2	dokumen	121,305,500.00	55.84 %	121,305,500.00	91.01 %	121,305,500.00		BPBD
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-						1,220,954,334.00	-	-	903,714,419.00									580,058,316.00	115.16 %	580,058,316.00	91.01 %	1,801,012,850.00		BPBD			
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya						821,478,132.00	170	orang	152,375,100.00	165	orang	0	orang	98,744,000.00				282,567,327.00	170	orang	185,816,316.00	96.59 %	185,816,316.00	91.01 %	1,007,294,448.00		BPBD
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Peminaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desakelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Kesiapan Kebakaran Lindungan (SKKL) Setiap Tahunnya						399,476,200.00	25	desakelurahan	311,339,003.00	25	kelompok masyarakat	16,052,000.00		desakelurahan	245,990,000.00			609,712,000.00	25	Desak Kel.	394,242,000.00	126.63 %	394,242,000.00	91.01 %	793,718,202.00		BPBD
01.06	URUSAN SOSIAL																												
01.06.01	PROGRAM PENJAJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penetapan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor Tersusunnya Dokumen RKADPA dan DPDA Dinas Sosial	100%	16,038,458,590.00	7,674,132,065.00	100 %	%	4,460,324,597.00			581,492,110.00	%	1,722,031,472.00							5,013,576,685.00	112.40 %	5,013,576,685.00	91.81 %	12,087,708,750.00	75.37	DINAS SOSIAL			
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						172,928,891.00	4	Jenis	25,413,680.00			2,974,800.00	Jenis	6,208,050.00				41,517,570.00	163.37 %	41,517,570.00	91.81 %	214,446,461.00		DINAS SOSIAL			
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Dokumen RKA-SKPD						90,984,626.00	138	dokumen	13,700,840.00	3	Jenis	2,974,800.00	dokumen	1,915,400.00				15,370,200.00	112.18 %	15,370,200.00	91.01 %	106,354,826.00		DINAS SOSIAL			
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD						81,944,265.00	36	laporan	11,712,840.00	7	Jenis	0.00	laporan	4,292,650.00				26,147,370.00	223.24 %	26,147,370.00	91.01 %	108,091,635.00		DINAS SOSIAL			
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan						4,988,894,746.00	25	orang	3,290,192,378.00			482,131,637.00	orang	1,018,965,625.00				3,127,899,070.00	96.07 %	3,127,899,070.00	91.01 %	8,036,793,616.00		DINAS SOSIAL			
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN						2,407,855,688.00	25	Orang	2,449,571,268.00	24	Orang	473,655,517.00	Orang	1,029,358,651.00				3,097,725,598.00	96.33 %	3,097,725,598.00	91.01 %	7,559,616,292.00		DINAS SOSIAL			
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2,400,999,050.00	1	laporan	1,990,000.00	12	Dokumen	8,466,066.00	laporan	1,989,700.00				1,989,700.00	99.98 %	1,989,700.00	91.01 %	2,452,988,750.00		DINAS SOSIAL			
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Pengawasan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan/Semester SKPD						36,620,420.00	12	laporan				8,679,944.00	laporan	8,679,944.00				41,906,514.00	12		28,188,774.00	72.99 %	28,188,774.00	91.01 %	28,188,774.00		DINAS SOSIAL
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						2,533,500.00	12	laporan	1,916,000.00			0.00	laporan	1,916,000.00				1,915,800.00	99.99 %	1,915,800.00	91.01 %	4,449,300.00		DINAS SOSIAL			
1.06.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						2,533,500.00	12	laporan	1,916,000.00	4	Dokumen	0.00	laporan	1,916,000.00				1,915,800.00	99.99 %	1,915,800.00	91.01 %	4,449,300.00		DINAS SOSIAL			
1.06.01.2.05	Administrasi Kewaspadaan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakuan Dinas Beresita Akibat Kelangkaannya	0.00	37	orang	31,932,140.00					0.00			orang	0.00					14,060,000.00	44.03 %	14,060,000.00	91.01 %	14,060,000.00		DINAS SOSIAL			
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakuan Dinas beserta Akibat Kelangkaannya	Jumlah Paket Pakuan Dinas beserta Akibat Kelangkaannya						0.00	37	staf	14,374,500.00	23	Staf	0.00						54,723,000.00	24		14,060,000.00	97.81 %	14,060,000.00	91.81 %	14,060,000.00		DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Penanggulangan-Urban	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Penanggulangan-Urban						0.00	4	orang	17,557,640.00	4	Kali	0.00	orang	0.00				3,000,000.00	1		0.00	0.00 %	0.00	91.01 %	0.00		DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06	Administrasi Urutan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Kebersihan Urutan Yang di Sedikan						980,454,648.00	8	paket	354,006,199.00			36,683,100.00	paket	300,000.00				513,376,828.00	145.02 %	513,376,828.00	91.01 %	1,493,831,476.00		DINAS SOSIAL			
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didanai	Jumlah Paket Kebersihan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didanai						3,980,000.00	8	paket	3,984,000.00	5	Jenis	1,200,000.00	paket	900,000.00				3,940,000.00	98.90 %	3,940,000.00	91.01 %	13,930,000.00		DINAS SOSIAL			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Didanai						624,568,524.00	30	paket	43,122,339.00	40	Jenis	0.00	paket	2,280,000.00				253,385,700.00	40		56,716,000.00	110.22 %	672,088,524.00		DINAS SOSIAL		
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan yang Didanai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Didanai						23,315,500.00	3	paket	11,348,000.00	6	Jenis	300,000.00	paket	0.00				47,530,000.00	161.66 %	18,345,100.00	91.01 %	41,660,600.00		DINAS SOSIAL			
1.06.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Didanai	0.00	7	paket	30,020,860.00	127	Kali	35,183,100.00					paket	3,323,850.00	11			6,195,000.00	20.64 %	6,195,000.00	91.01 %	6,195,000.00		DINAS SOSIAL				
1.06.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						327,590,624.00	144	laporan	295,533,000.00	11	Jenis	0.00	laporan	388,961,248.00	127			437,366,728.00	154.71 %	437,366,728.00	91.01 %	759,957,362.00					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPJMD/REKSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2024 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
			6		7		8		9		10		11		12				13		14 = 7 x 12		15 = 14 / 6 x 100%				
			K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%			K	Rp	K	%	K	Rp			
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemukiman Sosial Standar Gizi Minimal Kewenangan KabupatenKota Penyediaan Pemukiman Penyediaan Sandang Pemberian Layanan Rujukan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial KabupatenKota		399,881,096.00	100	%	163,117,520.00		18,006,066.00		%	45,840,744.00			173,287,553.00	106.23	%	173,287,553.00	91.01	%	573,168,649.00			DINAS SOSIAL			
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Pemukiman	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemukiman Sosial dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan KabupatenKota		239,296,296.00	100	orang	62,886,800.00	50	Bungkus	9,100,000.00	orang	37,103,000.00			62,298,000.00	99.09	%	62,298,000.00	91.01	%	301,594,296.00			DINAS SOSIAL			
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan perlengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun Kewenangan KabupatenKota		103,066,800.00	25	Orang	30,855,900.00	50	Pasang Kal	440,000.00	Orang	0.00			29,817,500.00	96.63	%	29,817,500.00	91.01	%	132,884,300.00			DINAS SOSIAL			
1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perlengkapan Kesehatan di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perlengkapan di Luar Panti Sosial Kewenangan KabupatenKota		0.00	20	orang	13,262,400.00	10	Betal	0.00	orang	0.00			13,010,000.00	98.10	%	13,010,000.00	91.01	%	13,010,000.00			DINAS SOSIAL			
1.06.04.2.02.14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial KabupatenKota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial KabupatenKota		57,518,000.00	9	dokumen	56,130,420.00	1	Orang	8,466,066.00	dokumen	8,737,744.00			68,162,053.00	121.44	%	68,162,053.00	91.01	%	125,680,053.00			DINAS SOSIAL			
01.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pemenuhan Jumlah Data Fakir Miskin Yang Akurat		3,846,515,051.00	100	%	1,262,088,156.00		89,400,000.00		%	399,976,036.00			1,414,515,490.00	112.08	%	1,414,515,490.00	91.01	%	1,550,246,490.00			40.30	DINAS SOSIAL		
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah KabupatenKota	Tertindakannya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah KabupatenKota		135,730,000.00	35000	orang	1,262,088,156.00		89,400,000.00		orang	399,976,036.00			1,414,515,490.00	112.08	%	1,414,515,490.00	91.01	%	1,550,246,490.00			DINAS SOSIAL			
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah KabupatenKota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah KabupatenKota		135,730,000.00	35000	orang	1,237,169,756.00	35000	121	Jiwa Kal	64,635,000.00	orang	391,256,016.00			436,754,200.00	110.38	%	1,365,600,490.00	91.01	%	1,501,330,490.00			DINAS SOSIAL		
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah KabupatenKota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin KabupatenKota		0.00	24	keluarga	24,918,400.00	24	Orang	24,765,000.00	keluarga	8,720,000.00			44,145,000.00	196.30	%	48,915,000.00	91.01	%	48,915,000.00			DINAS SOSIAL			
01.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Pemenuhan Tersapainya Sasaran Yang Memeroleh Bantuan		1,231,464,750.00	100%		332,731,522.00	100	%	239,386,700.00	0.00	%			238,188,100.00	99.50	%	238,188,100.00	91.01	%	576,963,622.00			46.36	DINAS SOSIAL		
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial KabupatenKota	Terselenggaranya Orang yang Mendapatkan Pemukiman 3x1 Dalam Masa Tanggap Darurat (Pengusiran) Kewenangan KabupatenKota		359,181,761.00	100	%	119,460,000.00		0.00		%	27,040,400.00			119,376,700.00	99.93	%	119,376,700.00	91.01	%	288,558,461.00			DINAS SOSIAL			
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemukiman 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengusiran) Kewenangan KabupatenKota		169,181,761.00	600	Orang	119,460,000.00	11	Orang	0.00	Orang	27,040,400.00			43,930,500.00	600		119,376,700.00	99.93	%	119,376,700.00	91.01	%	288,558,461.00			DINAS SOSIAL
1.06.06.2.02	Penyenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana KabupatenKota	Jumlah SDM Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Yang Mendapatkan Penanganan Kapasitas		163,531,761.00	12	orang	119,926,700.00		0.00		orang	43,040,400.00			118,811,400.00	99.07	%	118,811,400.00	91.01	%	282,343,161.00			DINAS SOSIAL			
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan KabupatenKota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan KabupatenKota		163,531,761.00	11	Orang	119,926,700.00	750	Paket	0.00	Orang	43,040,400.00			118,811,400.00	99.07	%	118,811,400.00	91.01	%	282,343,161.00			DINAS SOSIAL			
02.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA														0.00	91.01	%	0.00									
02.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Capaian program tenaga kerja yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya			100	%	99,483,150.00				%	158,250,402.00			164,188,102.00	165.04	%	164,188,102.00	91.01	%	164,188,102.00			DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM			
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK)			1	kegiatan	99,483,150.00				kegiatan	158,250,402.00			164,188,102.00	165.04	%	164,188,102.00	91.01	%	164,188,102.00			DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM			
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Mikro			1	dokumen	99,483,150.00				dokumen	158,250,402.00	1	dokumen	164,188,102.00	1	dokumen	164,188,102.00	165.04	%	164,188,102.00			DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM			
2.07.02.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Persiapan yang mampu menyusun RTK Mikro			2	orang	0.00				orang	0.00			0.00	101.01	%	0.00	91.01	%	0.00			DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM			
02.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatkan pengetahuan dan pelatihan bagi pencari kerja		100%	832,353,643.00		207,705,140.00	100	%	284,553,290.00	100	%	74,595,100.00	%	304,392,890.00			537,731,280.00	188.97	%	537,731,280.00	91.01	%	745,436,420.00	89.56	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan		207,705,140.00	1	kegiatan	284,553,290.00	1	kegiatan	74,595,100.00	kegiatan	304,392,890.00			537,731,280.00	188.97	%	537,731,280.00	91.01	%	745,436,420.00			DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM			
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kader Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun		207,705,140.00	20	orang	284,553,290.00	25	orang	74,595,100.00	orang	304,392,890.00	20	orang	323,954,590.00	20	orang	537,731,280.00	188.97	%	537,731,280.00	91.01	%	745,436,420.00			DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM
02.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-		100%	494,233,994.00		258,685,141.00	-	-	0.00	100	%	49,681,841.00	-	0.00			504,693,210.00	101.01	%	504,693,210.00	91.01	%	763,378,351.00	154.46	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah KabupatenKota	-		258,685,141.00	-	-	0.00	1	kegiatan	49,681,841.00	-	0.00		-	0.00			0.00	101.01	%	0.00			258,685,141.00			DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan		258,685,141.00	75	orang	0.00	102	orang	49,681,841.00	orang	0.00			0.00	101.01	%	0.00	91.01	%	258,685,141.00			DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM			
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-		-	-	-	0.00			-	-	0.00			0.00	101.01	%	0.00	91.01	%	0.00			DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM			
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja			30	orang	0.00				orang	0.00			0.00	101.01	%	0.00	91.01	%	0.00			DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM			
		Pemberitan Perjanjian MTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah KabupatenKota													504,693,210.00	101.01	%	504,693,210.00	91.01	%	504,693,210.00			DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perjanjian MTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah KabupatenKota													117,275,437.00	101.01	%	117,275,437.00	91.01	%	117,275,437.00			DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM			
02.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pelaksanaan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial		100%	863,416,707.00		323,627,552.00	100	%	177,145,220.00	5	perusahaan	61,108,366.00	%	282,816,213.00			387,417,773.00	218.70	%	387,417,773.00	91.01	%	711,046,325.00	82.35	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM	
2.07.05.2.01	Penghasilan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah KabupatenKota	Pemberdayaan sarana kesejahteraan pekerja		323,627,552.00	1	kegiatan	48,756,530.00	100	%	31,415,700.00	kegiatan	0.00			177,204,059.00	356.14	%	177,204,059.00	91.01	%	500,831,611.00			DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM			
2.07.05.2.01.01	Penghasilan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Penghasilan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WUPK Online			10	perusahaan	0.00				perusahaan	0.00			0.00	101.01	%	0.00	91.01	%	0.00			DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM			
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama			5	perusahaan	0.00				perusahaan	0.00			0.00	101.01	%	0.00	91.01	%	0.00			DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM			
2.07.05.2.01.03	Pengelolaan Persediaan dan Informasi Sarana H (PP/PS, Struktur Skala Upah, dan LKS Bupot) dan Pelajar yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengusutan	Jumlah Data dan Informasi Sarana H (PP/PS, Struktur Skala Upah, dan LKS Bupot) dan Pelajar yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengusutan		323,627,552.00	5	laporan	49,756,530.00	1	laporan	31,415,700.00	laporan	0.00	5	laporan	163,827,429.00	5	laporan	177,204,059.00	356.14	%	177,204,059.00	91.01</					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPJMD/REKSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Tahun 2024 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x100%					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	%	Rp				
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Tersusunnya perencanaan dan terkoordinasinya program pembinaan dan pengembangan UKM	95%	3,055,042,245.00		132,379,318.00	95	%	403,000,000.00	95	%	31,886,066.00		46,551,700.00		528,829,315.00	131.22	%	528,829,315.00	91.01	%	661,208,633.00	21.64	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM		
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Koordinasi, Komunikasi, Persiapan, Pengawasan, Kolaborasi dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terklasifikannya kegiatan pendataan dan pembinaan UMKM				132,379,318.00	1	kegiatan	403,000,000.00	1	kegiatan	31,886,066.00		46,551,700.00		528,829,315.00	131.22	%	528,829,315.00	91.01	%	661,208,633.00		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM		
2.17.07.2.01.04	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UMKM				132,379,318.00	1	unit usaha	403,000,000.00	500	UMKM	31,886,066.00		46,551,700.00	1	unit usaha	370,158,615.00	0.00	%	370,158,615.00	91.01	%	370,158,615.00		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM	
2.17.07.2.01.05	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewasustaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				40	orang	0.00					orang	0.00		0.00	0.00	%	0.00	91.01	%	0.00		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM		
3.32	URUSAN TRANSMIGRASI																									
3.32.01	PROGRAM PENJUALAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	100%	23,196,224,601.00		5,038,481,709.00	95	%	8,499,010,452.00	95	%	1,450,889,905.00		3,179,517,104.00		11,341,915,098.00	133.45	%	11,341,915,098.00	91.01	%	16,380,396,801.00	70.62	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM		
3.32.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan dokumen perencanaan dan penganggaran				18,147,700.00	4	dokumen	38,146,272.00	95	%	2,121,000.00		dokumen	3,990,000.00		58,470,544.00	153.28	%	58,470,544.00	91.01	%	76,618,244.00		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM	
3.32.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5	dokumen	27,609,890.00					dokumen	1,875,400.00	5	dokumen	24,682,100.00	136.86	%	37,785,944.00	91.01	%	37,785,944.00		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM	
3.32.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6,857,900.00	1	dokumen	3,205,642.00	1	dokumen	0.00		dokumen	0.00	1	dokumen	3,047,800.00	194.15	%	6,223,700.00	91.01	%	13,081,600.00		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM
3.32.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2,966,600.00	1	dokumen	3,090,020.00	1	dokumen	0.00		dokumen	0.00	1	dokumen	5,991,100.00	193.89	%	5,991,100.00	91.01	%	8,957,700.00		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM
3.32.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				6,207,000.00	1	dokumen	2,122,120.00	1	dokumen	2,121,000.00		dokumen	2,114,600.00	1	dokumen	4,235,600.00	199.59	%	4,235,600.00	91.01	%	10,442,800.00		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM
3.32.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2,116,200.00	1	dokumen	2,118,600.00	1	dokumen	0.00		dokumen	0.00	1	dokumen	4,234,200.00	199.86	%	4,234,200.00	91.01	%	6,350,400.00		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM
3.32.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan dokumen administrasi keuangan				3,312,886,010.00	3	dokumen	4,926,351,698.00	95	%	643,573,349.00		dokumen	2,493,257,521.00		8,162,173,883.00	165.68	%	8,162,173,883.00	91.01	%	11,475,039,893.00		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM	
3.32.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3,118,311,944.00	74	orang/bulan	4,833,263,892.00	33	ASN	618,703,051.00		orang/bulan	2,454,765,916.00	74	orang	7,102,975,336.00	164.61	%	7,955,897,926.00	91.01	%	11,074,211,870.00		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM
3.32.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				117,120,942.00	1	dokumen	58,287,856.00	1	dokumen	16,405,632.00		dokumen	32,843,528.00	1	laporan	155,331,416.00	266.49	%	155,331,416.00	91.01	%	272,452,358.00		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM
3.32.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				5,764,200.00	1	dokumen	2,915,130.00	2	dokumen	0.00		dokumen	0.00	1	laporan	5,764,200.00	197.73	%	5,764,200.00	91.01	%	11,528,400.00		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM
3.32.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				71,866,924.00	1	dokumen	31,884,820.00	1	dokumen	8,466,066.00		dokumen	5,648,077.00	1	laporan	45,180,341.00	141.70	%	45,180,341.00	91.01	%	116,847,265.00		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM
3.32.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan administrasi kepegawaian				33,000,000.00	1	laporan	327,238,591.00	95	%	37,956,367.00		laporan	61,647,635.00		0.00	0.00	%	0.00	91.01	%	33,000,000.00		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM	
3.32.01.2.05.02	Pengadaan Paketan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Paketan Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1	paket	0.00					paket	0.00		0.00	0.00	%	0.00	91.01	%	0.00		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM		
3.32.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				33,000,000.00	10	orang	60,020,460.00	10	orang	37,956,367.00		orang	61,647,635.00	10	orang	175,019,002.00	262.75	%	181,350,402.00	91.01	%	214,350,402.00		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM
3.32.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan dokumen administrasi umum				1,094,352,634.00	5	laporan	936,646,559.00	95	%	171,157,730.00		laporan	363,840,262.00		1,375,010,547.00	256.22	%	1,375,010,547.00	91.01	%	2,469,363,181.00		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM	
3.32.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				13,382,800.00	1	paket	7,028,520.00	11	jenis	1,783,200.00		paket	3,349,200.00	1	paket	11,017,274.00	197.19	%	13,859,274.00	91.01	%	27,241,874.00		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM
3.32.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				62,896,700.00	1	paket	31,468,500.00	2	jenis	7,773,000.00		paket	7,553,000.00	1	paket	54,749,200.00	199.48	%	62,772,900.00	91.01	%	125,669,600.00		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM
3.32.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				19,320,000.00	5	dokumen	11,258,730.00	5	jenis	2,415,000.00		dokumen	5,730,000.00	5	dokumen	19,055,000.00	214.23	%	24,120,000.00	91.01	%	43,440,000.00		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM
3.32.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				165,781,200.00	1	paket	113,050,089.00	60	jenis	20,405,100.00		paket	47,516,269.00	1	paket	158,844,340.00	159.16	%	179,931,655.00	91.01	%	345,712,855.00		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM
3.32.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				832,972,134.00	1	laporan	373,839,720.00	166	kali	138,781,430.00		laporan	299,691,664.00	1	laporan	1,094,186,718.00	292.73	%	1,094,326,718.00	91.01	%	1,927,298,852.00		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM
3.32.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan barang				24,700,000.00	1	paket	56,832,000.00	95	%	8,455,856.00		paket	56,760,000.00		127,325,156.00	224.04	%	127,325,156.00	91.01	%	152,025,156.00		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM	
3.32.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2	unit	0.00					unit	0.00		51,800,000.00	0.00	%	51,800,000.00	91.01	%	51,800,000.00		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM		
3.32.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				24,700,000.00	4	unit	56,832,000.00	1	unit	8,455,856.00		unit	56,760,000.00	5	unit	75,525,156.00	132.89	%	75,525,156.00	91.01	%	100,225,156.00		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM
3.32.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan jasa penunjang				356,122,658.00	22	laporan	2,265,570,128.00	95	%	560,824,653.00		laporan	148,583,236.00		1,107,272,574.00	48.79	%	1,107,272,574.00	91.01	%	1,463,395,233.00		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM	
3.32.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2,350,000.00	1	laporan	3,300,000.00	2	jenis	690,000.00		laporan	1,400,000.00	1	laporan	4,390,000.00	169.39	%	5,590,000.00	91.01	%	7,940,000.		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPJMD/REKSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2024 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini	Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
						I		II		III		IV		V																			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																
3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian	Terselenggaranya kegiatan satuan pemukiman																														DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM	
3.32.04.2.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina																														DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM	
02.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																															DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
02.08.02	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	92,7 %	1.613.515.100.00	1.173.896.116.00	5	%	805.000.000.00			375.000.000.00			%	805.000.000.00			937.346.373.00	116.44	%	937.346.373.00	91.01	%	2.111.242.489.00		130.85						DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Partisipasi lembaga dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)						536.620.716.00	38	PD	80.000.000.00			0.00		PD	80.000.000.00			79.802.172.00	99.75	%	79.802.172.00	91.01	%	616.422.888.00							DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penusunan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penusunan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota						536.620.716.00	1	dokumen	80.000.000.00		1	keg	0.00	dokumen	0.00			79.802.172.00	99.75	%	79.802.172.00	91.01	%	616.422.888.00							DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota							33	perangkat daerah	0.00					perangkat daerah	80.000.000.00	1	kegiatan	49.424.400.00			0.00	91.01	%	0.00							DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peran Serta Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan						212.275.400.00	94.45	indeks	50.000.000.00			0.00		indeks	50.000.000.00			82.544.201.00	165.09	%	82.544.201.00	91.01	%	294.819.601.00							DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota							1	dokumen	0.00					dokumen	0.00			0.00	91.01	%	0.00	91.01	%	0.00							DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota						212.275.400.00	1	Organisasi	50.000.000.00		2	kec	0.00	Organisasi	50.000.000.00			82.544.201.00	165.09	%	82.544.201.00	91.01	%	294.819.601.00							DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						425.000.000.00	1	lembaga	675.000.000.00			375.000.000.00		lembaga	675.000.000.00			775.000.000.00	114.81	%	775.000.000.00	91.01	%	1.200.000.000.00							DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan						425.000.000.00	4	lembaga	675.000.000.00		4	Organisasi	375.000.000.00	lembaga	675.000.000.00			775.000.000.00	114.81	%	775.000.000.00	91.01	%	1.200.000.000.00							DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
02.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	99%	580.000.000.00	132.046.688.00	100	%	25.000.000.00			7.939.566.00			%	25.000.000.00			30.087.557.00	120.35	%	30.087.557.00	91.01	%	162.134.245.00		27.95						DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Pengaduan Bagi Perempuan Korban Kekerasan						132.046.688.00	100	%	25.000.000.00			%	25.000.000.00			30.087.557.00	120.35	%	30.087.557.00	91.01	%	162.134.245.00								DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan						132.046.688.00	7	orang	25.000.000.00		1	Dokumen	7.939.566.00	orang	25.000.000.00			30.087.557.00	120.35	%	30.087.557.00	91.01	%	162.134.245.00							DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
02.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		2.208.207.910.00	323.293.148.00	90.45	%	79.029.530.00			5.468.544.00			%	79.029.530.00			82.617.000.00	104.54	%	82.617.000.00	91.01	%	405.913.148.00		18.38						DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak						323.293.148.00	2	dokumen	79.029.530.00			5.468.544.00		dokumen	79.029.530.00			82.617.000.00	104.54	%	82.617.000.00	91.01	%	405.913.148.00							DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia						173.527.728.00	1	dokumen	79.029.530.00		10	Keluarga	5.468.544.00	dokumen	79.029.530.00			82.617.000.00	104.54	%	82.617.000.00	91.01	%	256.144.728.00							DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak						149.765.420.00	90	orang	0.00		12	Kec	0.00	orang	0.00			0.00	91.01	%	0.00	91.01	%	149.765.420.00							DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota							90	orang	0.00					orang	0.00			0.00	91.01	%	0.00	91.01	%	0.00							DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
02.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak							1	dokumen	106.190.440.00					dokumen	106.190.440.00			115.328.588.00	108.61	%	115.328.588.00	91.01	%	115.328.588.00							DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data	Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data							1	dokumen	106.190.440.00					dokumen	106.190.440.00			115.328.588.00	108.61	%	115.328.588.00	91.01	%	115.328.588.00							DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia							2	dokumen	106.190.440.00					dokumen	106.190.440.00			115.328.588.00	108.61	%	115.328.588.00	91.01	%	115.328.588.00							DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
02.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian Kabupaten Layak Anak							1000	skor	150.000.000.00					skor	150.000.000.00			164.449.625.00	109.63	%	164.449.625.00	91.01	%	164.449.625.00							DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak							1	dokumen	150.000.000.00					dokumen	150.000.000.00			164.449.625.00	109.63	%	164.449.625.00	91.01	%	164.449.625.00							DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.02.03	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota															79.086.628.00			0.00	91.01	%	0.00	91.01	%	0.00							DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							1	dokumen	150.000.000.00					dokumen	150.000.000.00			164.449.625.00	109.63	%	164.449.625.00	91.01	%	164.449.625.00							DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
02.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Anak (IPA) Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	2.051.888.680.00	304.109.151.00	69.87	100	Indeks persen	102.145.220.00					10.072.566.00		Indeks persen	102.145.220.00			159.567.735.00	156.22	%	159.567.735.00	91.01	%	483.676.836.00		22.60					DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah							1	kegiatan	25.000.000.00					kegiatan	25.000.000.00			66.094.803.00	264.38	%	66.094.803										

Kode	Usuran/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPJMD/RENTJRA)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2023 (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2024 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini	Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
						I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII														
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
2.14	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyelidid Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	Tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Terlabasanya FPKZPA di Tingkat Kecamatan se Kabupaten Gunung Mas													20.731.800,00			0,00	0,00%			0,00	91,01	%								DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2.14.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	24.365.154.153,00		8	dokumen	7.043.946.967,00		835.364.810,00		dokumen	5.604.773.362,00		5.559.740.027,00	78,93	%	5.559.740.027,00	91,01	%	5.559.740.027,00	22,82										DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		107.655.712,00	8	Dokumen	54.355.625,00	0,00		Dokumen	54.355.625,00		58.046.844,00	106,79	%	58.046.844,00	91,01	%	58.046.844,00	165,702.556,00													DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.14.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2.090.000,00	2	Dokumen	2.090.000,00			Dokumen	2.090.000,00		2.004.000,00		1.785.000,00	85,41	%	1.785.000,00	91,01	%	1.785.000,00	1.785.000,00											DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.14.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1.974.000,00	2	dokumen	1.974.000,00			dokumen	1.974.000,00				1.475.000,00	74,72	%	1.475.000,00	91,01	%	1.475.000,00	1.475.000,00											DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.14.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		2.308.000,00	20	Dokumen	2.308.000,00			Dokumen	2.308.000,00		3.414.000,00		2.304.200,00	99,84	%	2.304.200,00	91,01	%	2.304.200,00	2.304.200,00											DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.14.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1.945.000,00	20	Dokumen	1.945.000,00			Dokumen	1.945.000,00				1.945.000,00	100,00	%	1.945.000,00	91,01	%	1.945.000,00	1.945.000,00											DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD		46.038.625,00	15	laporan	46.038.625,00			laporan	46.038.625,00		38.677.644,00		50.537.644,00	109,77	%	50.537.644,00	91,01	%	50.537.644,00	50.537.644,00											DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.521.905.973,00	3	dokumen	4.159.731.999,00		669.989.186,00	dokumen	4.159.731.999,00		4.051.735.184,00	97,40	%	4.051.735.184,00	91,01	%	4.051.735.184,00	7.573.641.157,00													DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		3.421.040.302,00	47	orang/bulan	4.101.541.559,00	12	Bulan	653.583.548,00		orang/bulan	4.101.541.559,00	15	bulan	6.690.221.342,00	4.044.091.140,00	98,60	%	4.044.091.140,00	91,01	%	7.465.131.441,00										DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.14.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		30.525.236,00	1	laporan	30.045.220,00	1	Dok	8.466.072,00		laporan	30.045.220,00		34.167.264,00		6.644.044,00	22,11	%	6.644.044,00	91,01	%	43.169.280,00										DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.14.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		64.340.436,00	10	laporan	28.145.220,00	2	Semester	7.939.566,00		laporan	28.145.220,00		28.523.220,00		1.000.000,00	3,55	%	1.000.000,00	91,01	%	65.340.436,00										DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		128.781.593,00	2	paket	128.572.220,00	0,00		paket	128.572.220,00		81.920.000,00	63,72	%	81.920.000,00	91,01	%	81.920.000,00	210.701.593,00													DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.14.01.2.05.02	Pengadaan Pakatan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakatan Dinas beserta Atribut Kelengkapan		103.591.950,00	110	paket	97.033.980,00	65	Stel	0,00		paket	97.033.980,00		138.933.000,00		81.920.000,00	84,42	%	81.920.000,00	91,01	%	185.511.950,00										DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.14.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		31.538.643,00	8	Orang	31.538.240,00	4	Orang	0,00		Orang	31.538.240,00		10.750.000,00		14.202.500,00	45,03	%	14.202.500,00	91,01	%	39.392.143,00										DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		927.165.498,00	12	5	laporan Paket	569.246.984,00		90.253.610,00		laporan Paket	569.246.984,00		684.264.199,00	120,21	%	684.264.199,00	91,01	%	1.611.429.658,00													DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		6.998.200,00	1	paket	6.998.200,00	12	bulan	0,00		paket	6.998.200,00		15.033.500,00		6.696.000,00	95,68	%	6.696.000,00	91,01	%	60.930.475,00										DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		18.000.000,00	1	paket	18.000.000,00	12	bulan	0,00		paket	18.000.000,00		14.918.100,00		15.687.000,00	87,15	%	15.687.000,00	91,01	%	74.407.500,00										DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		7.176.000,00	4	dokumen	7.176.000,00	4	Jenis	0,00		dokumen	7.176.000,00		9.300.000,00		6.720.000,00	93,65	%	6.720.000,00	91,01	%	20.160.000,00										DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.14.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		49.999.644,00	1	paket	49.999.644,00	41	Jenis	15.806.176,00		paket	49.999.644,00		100.376.678,00		39.049.000,00	78,10	%	39.049.000,00	91,01	%	162.672.555,00										DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		487.073.140,00	12	laporan	487.073.140,00	12	bulan	74.447.432,00		laporan	487.073.140,00		1.031.046.190,00		616.112.199,00	126,49	%	616.112.199,00	91,01	%	1.293.258.728,00										DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah		1.421.291.636,00	7	unit	1.421.291.636,00	0,00		unit	130.047.600,00		129.200.000,00	9,09	%	129.200.000,00	91,01	%	129.200.000,00	222.094.000,00													DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.14.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		107.892.000,00	1	Unit	107.892.000,00	0,00		Unit	107.892.000,00		99.600.000,00	0,00	0,00	%	0,00	91,01	%	0,00													DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan											51.572.200,00		99.600.000,00	0,00%		99.600.000,00	91,01	%	99.600.000,00											DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan											52.840.000,00		0,00	91,03	%	0,00															DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.14.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		22.155.600,00	11	Unit	22.155.600,00	0,00		Unit	22.155.600,00		151.900.000,00		29.600.000,00	133,60	%	29.600.000,00	91,01	%	122.404.000,00													DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah		284.703.500,00	4	laporan	284.703																											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPJMD/REKSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2024 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
									I			II			III			IV															
			K	6	Rp	K	7	Rp	K	8	Rp	K	9	Rp	K	10	Rp	K	11	Rp	K	12	Rp	K	13	Rp		K	14 = 7 +13	Rp	15 = 14 / 6 x100%		
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk							1	dokumen	26,000,000.00														580,000.00	2.23	%	580,000.00	91.01	%	580,000.00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.02.2.01.23	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berekencana)							12	kegiatan	26,000,000.00														580,000.00	2.23	%	580,000.00	91.01	%	580,000.00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pencetakan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah							209,097,596.00	1	dokumen	354,385,660.00		88,666,066.00											269,639,984.00	76.09	%	269,639,984.00	91.01	%	478,737,579.00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan						128,362,596.00	0	dokumen	121,585,660.00	4	kal	8,466,066.00											39,839,984.00	32.77	%	39,839,984.00	91.01	%	168,202,579.00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.02.2.02.09	Pembiinan dan Penguasaan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembiinan dan Penguasaan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga						78,335,000.00	0	laporan	0.00	12	Kec	31,400,000.00											0.00	NDIV00	%	0.00	91.01	%	78,335,000.00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga						2,400,000.00	0	laporan	100,800,000.00	23	Faskes	30,800,000.00											97,800,000.00	97.02	%	97,800,000.00	91.01	%	100,200,000.00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB						0.00	0	dokumen	132,000,000.00	12	buku Penyuluh KB	18,000,000.00											132,000,000.00	100.00	%	132,000,000.00	91.01	%	132,000,000.00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.03	PROGRAM PEMBIANAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Indeks Pembangunan Keluarga (Banglep)	2.39%	16,640,901,508.00		2,807,061,139.00	60.13	Indeks	3,479,655,520.00					516,342,994.00										3,137,199,208.00	90.16	%	3,137,199,208.00	91.01	%	5,944,260,347.00	35.72	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal							1,246,757,720.00	1	dokumen	1,339,950,000.00		165,980,256.00											1,259,059,222.00	93.66	%	1,259,059,222.00	91.01	%	2,501,816,942.00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Pengendalian Program KKBPK						2,349,000.00	2	Laporan	140,000,000.00	8	Keg	0.00											134,109,386.00	95.79	%	134,109,386.00	91.01	%	136,358,386.00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.03.2.01.10	Pengabdian Operasional dan Sarana di Bala Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengabdian Operasional dan Sarana di Bala Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berekencana)						22,200,000.00	12	Laporan	595,200,000.00	2	Kali	0.00											584,719,816.00	98.24	%	584,719,816.00	91.01	%	606,919,816.00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.03.2.01.11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Miniloka)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berekencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Miniloka)						61,425,000.00	12	Laporan	180,000,000.00	3	jenis	0.00											173,892,600.00	96.61	%	173,892,600.00	91.01	%	235,318,600.00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.03.2.01.12	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berekencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang						184,236,000.00	3	dokumen	150,000,000.00	12	Kec	0.00											149,980,000.00	99.99	%	149,980,000.00	91.01	%	334,216,000.00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.03.2.01.13	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berekencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan						448,097,300.00	1	dokumen	74,750,000.00	12	Kec	165,980,256.00											71,240,700.00	95.31	%	71,240,700.00	91.01	%	519,338,000.00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.03.2.01.14	Advokasi Program Bangsa kencana oleh peja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berekencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja						528,549,420.00	30	Organisasi	200,000,000.00	2	kal	0.00											141,116,720.00	70.56	%	141,116,720.00	91.01	%	669,666,140.00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Perugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya Pembiinan PKB, PLKB dan IMP						1,560,303,419.00	1	laporan	916,863,520.00			225,876,056.00											785,261,574.00	85.65	%	785,261,574.00	91.01	%	2,345,564,993.00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)						0.00	254	orang	384,000,000.00	12	laporan	149,676,056.00											381,000,000.00	99.22	%	381,000,000.00	91.01	%	381,000,000.00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.03.2.02.05	Pembiinan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembiinan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berekencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB						609,600,000.00	127	organisasi	0.00	127	PKB/PLKB	76,200,000.00											0.00	NDIV00	%	0.00	91.01	%	609,600,000.00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan/Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk petugas Keluarga Berekencana/Penyuluh Lapangan/KB																							0.00	NDIV00		0.00	91.01		0.00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.03.2.02.06	Penyuluhan Keluarga Berekencana/PLKB/KB	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berekencana) untuk Petugas Keluarga Berekencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berekencana (PKB/PLKB)						532,863,520.00	1	laporan	532,863,520.00			296,524,674.00											404,261,574.00	75.87	%	404,261,574.00	91.01	%	404,261,574.00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB						836,823,068.00	20	laporan	184,592,000.00			34,339,562.00											120,738,722.00	66.41	%	120,738,722.00	91.01	%	957,961,790.00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Temasuk Jaringan dan Jeringannya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Temasuk Jaringan dan Jeringannya						47,272,640.00	20	laporan	43,000,000.00	18	taskes	7,629,516.00											42,587,440.00	99.04	%	42,587,440.00	91.01	%	89,860,080.00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.03.2.03.03	Penggerakan Kesetiaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesetiaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)						244,396,070.00	175	orang	78,592,000.00	153	Akseptor	0.00											78,151,282.00	99.44	%	78,151,282.00	91.01	%	322,547,352.00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.03.2.03.08	Pembiinan Pelayanan Keluarga Berekencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Temasuk Jaringan dan Jeringannya	Jumlah Laporan Hasil Pembiinan Pelayanan Keluarga Berekencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Temasuk Jaringan dan Jeringannya						442,392,880.00	4	laporan	18,000,000.00	8	Kali	4,428,896.00											17,947,317.00	99.71	%	17,947,317.00	91.01	%	460,340,197.00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak						102,781,478.00	4	laporan	45,000,000.00	8	Kali	22,261,150.00											67,040,580.00	148.98	%	67,040,580.00	91.01	%	169,802,058.00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembiinan Kesehatan Ber-KB	Terlaksananya Peran Serta Institusi Masyarakat Pedesaan (MIP)						942,509,636.00	23	kampung KB	1,038,250,000.00			90,147,120.00											976,139,690.00	94.02	%	976,139,690.00	91.01	%	1,918,648,326.00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB						0.00	0	dokumen	3,750,000.00	23	Kampung KB	0.00											3,677,000.00	98.05	%	3,677,000.00	91.01	%	3,677,000.00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Uraian/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPJMD/RESTRAT)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RPJMD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2024 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			6		7		8		I			II			III			IV			14 = 7 x12		15 = 14 / 6 x100%						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kec/Desa	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
2.14.04.2.01.18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKb, BKb, BKb, PKb, PKb-R dan Usaha Persekitaran Pendukung Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKb, BKb, BKb, PKb, PKb-R dan Usaha Persekitaran Pendukung Keluarga Akseptor (UPPKA) yang terdote		608,833,600.00	20	unit	300,000,000.00		381	TPK	Kec/Desa		0.00		unit	300,000,000.00			647,340,000.00		298,000,000.00	99.36	%	298,000,000.00	91.01	%	903.913,600.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.14.04.2.01.19	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKb, BKb, BKb, PKb, PKb-R dan Usaha Persekitaran Pendukung Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKb, BKb, BKb, PKb, PKb-R dan Usaha Persekitaran Pendukung Keluarga Akseptor (UPPKA)		60,557,536.00	150	orang	117,110,802.00		1	kegiatan		11,742,966.00		orang	117,110,802.00				245,185,101.00		164,952,646.00	140.85	%	164,952,646.00	91.01	%	245,510,182.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.14.04.2.01.21	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKb, BKb, BKb, PKb, PKb-R dan Usaha Persekitaran Pendukung Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKb, BKb, BKb, PKb, PKb-R dan Usaha Persekitaran Pendukung Keluarga Akseptor (UPPKA)		0.00	60	laporan	40,347,414.00		6	kal		0.00		laporan	40,347,414.00				137,858,144.00		27,446,240.00	68.02	%	27,446,240.00	91.01	%	27,446,240.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.14.04.2.01.26	Penyediaan Biaya Operasional bag Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKb, BKb, BKb, PKb, PKb-R dan Usaha Persekitaran Pendukung Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKb, BKb, BKb, PKb, PKb-R dan Usaha Persekitaran Pendukung Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan		127	kelompok	36,996,024.00								kelompok	36,996,024.00				797,415,290.00		27,613,290.00	74.64	%	27,613,290.00	91.01	%	27,613,290.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Peminatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan		12	laporan	800,100,000.00								laporan	800,100,000.00				798,210,000.00		798,210,000.00	99.76	%	798,210,000.00	91.01	%	798,210,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.14.04.2.02.06	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Bersiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kehlahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Bersiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kehlahiran, Baduta/Balita)		10	Laporan	381,000,000.00								Laporan	381,000,000.00				113,400,000.00		380,100,000.00	99.76	%	380,100,000.00	91.01	%	380,100,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.14.04.2.02.06	Pendampingan Keluarga Bersiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kehlahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Bersiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kehlahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan		10	Laporan	418,100,000.00								Laporan	418,100,000.00				124,740,000.00		418,110,000.00	99.76	%	418,110,000.00	91.01	%	418,110,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
02.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																												
02.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KESALATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah Keteresediaan Pangan Utama		100	%	0.00								%	0.00														
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan dan Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	0.00								-	0.00														
2.09.02.2.02.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kompleksitas Pangan Lokal	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kompleksitas Pangan Lokal		2	unit	0.00								unit	0.00														
02.09.03	PROGRAM PENINGKATAN AN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penersentase Keteresediaan Energi dan Protein Per Kapita	9	3,380,873,466.00	100	%	604,408,924.00		4	triwulan		7,939,566.00		%	431,514,963.00						242,590,064.00	40.13	%	242,590,064.00	91.01	%	432,573,189.00	12.79	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyusunan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Informasi Pendukung Kompleksitas Pangan Lokal		18	Buku	7,939,566.00								-	0.00						63,534,864.00	114.72	%	63,534,864.00	91.01	%	253,597,989.00		
2.09.03.2.01.10	Pengembangan Kelayakan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelayakan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota		12	unit	0.00								unit	0.00														
2.09.03.2.01.12	Informasi Harga Pangan Tingkat Produksi dan Konsumsi wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Harga Pangan Tingkat Produksi dan Konsumsi wilayah Kabupaten/Kota		15	laporan	58,384,620.00								laporan	58,384,620.00						63,534,864.00	114.72	%	63,534,864.00	91.01	%	63,534,864.00		
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keselamatan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-		-	-	963,448,529.00								-	13,808,100.00														
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemertahan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemertahan Kabupaten/Kota		50	ton	363,448,529.00								ton	13,808,100.00						80,631,700.00	22.19	%	80,631,700.00	91.01	%	80,631,700.00		
2.09.03.2.02.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan PerKapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-		0.00	-	185,575,775.00								-	417,706,863.00						80,631,700.00	22.19	%	80,631,700.00	91.01	%	80,631,700.00		
2.09.03.2.04.02	Penyediaan Masyarakat dalam Pengembangan Komunitas Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Komunitas Masyarakat dalam Pengembangan Komunitas Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		0.00	0	laporan	185,575,775.00		10	buku		0.00		laporan	417,706,863.00						80,631,700.00	53.02	%	80,631,700.00	91.01	%	98,383,500.00		
02.09.04	PROGRAM PENANGANAN KEAMANAN PANGAN	Penersentase Pemertahan Daerah	90%	262,151,061.00	100	%	84,218,736.00							26,067,466.00							156,869,244.00	183.03	%	156,869,244.00	91.01	%	241,079,980.00	91.98	
2.09.04.2.02	Penanganan Keawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		84,218,736.00	-	-	85,708,870.00							-	86,250,086.00						156,869,244.00	183.03	%	156,869,244.00	91.01	%	241,079,980.00		
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyusunan Cadangan Pangan pada Kawasan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyusunan Cadangan Pangan pada Kawasan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		1.00	dokumen	33,661,050.00		10.00						dokumen	53,720,036.00						83,447,600.00	247.91	%	83,447,600.00	91.01	%	167,658,336.00		
2.09.04.2.02.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Keawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan keawanan pangan dan gizi kabupaten/kota		1	laporan	52,047,820.00								laporan	32,330,050.00						73,421,644.00	141.07	%	73,421,644.00	91.01	%	73,421,644.00		
02.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Penersentase sampel aman pangan segar		96.00	%	73,316,505.00								%	91,507,850.00														
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengujian kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		-	-	73,316,505.00								-	0.00														
2.09.05.2.01.09	Pengujian kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen pengujian kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		1	dokumen	73,316,505.00								dokumen	91,507,850.00						91,507,850.00	124.81	%	91,507,850.00	91.01	%	91,507,850.00		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUATAN DAN PERIKANAN																												
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH ARAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai akumulabilitas perangkat daerah	100%	20,935,761,569.90	BB >70%	5,634,998,302.00		BB >70%		peringkat		5,628,096,044.00		BB >70%	%	890,744,924.00					5,861,396,921.00	108.02	%	5,861,396,921.00	91.01	%	11,374,388,723.00	54.34	
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penersentase pemertahan jenis dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah		89,989,072.00	100	%	84,145,063.00		100	%		19,517,132.00		%	115,250,510.00						66,159,938.00	78.62	%	66,159,938.00	91.01	%	156,140,010.00		
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		42,000,036.00	4	dokumen	36,667,880.00					11,051,066.00		dokumen	46,149,080.00						10,930,544.00	29.81	%	10,930,544.00	91.01	%	52,930,580.00		
3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		47,869,036.00	0	laporan	47,477,183.00							laporan	69,101,430.00						56,220,394.00	116.31	%	56,220,394.00	91.01	%	103,209,430.00		
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penersentase pemertahan jenis laporan keuangan perangkat daerah		3,451,674,146.00	100	%	4,144,372,385.00		100	%		651,923,989.00		%	5,410,140,060.00						4,377,262,101.00	105.62	%	4,377,262,101.00	91.01	%	7,828,938,206.00		
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		3,343,360,646.00	35	orang/bulan	4,084,418,250.00		12	Bulan		3,391,491,457.00		orang/bulan	5,320,111,569.00						4,336,381,163.00	106.17	%	4,3					

Kode	Uraian/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten Kota pada periode tahun terakhir dengan RKPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPJMD/REKSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2024 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
			6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14 / 6 x100%													
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkaran Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Gerakan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	-	-	105,069,942.00	-	167,637,660.00	-	-	32,893,186.00	-	-	141,644,442.00	-	-	162,512,788.00	96.94	%	162,512,788.00	91.01	%	267,582,730.00	-	-	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGKAN										
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Terseksi	-	-	105,069,942.00	30	dokumen	167,637,660.00	-	-	26,993,186.00	dokumen	-	-	162,512,788.00	96.94	%	162,512,788.00	91.01	%	267,582,730.00	-	-	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGKAN										
3.25.03.2.01.02	Penyediaan Piasana Usaha Perikanan	Jumlah Piasana Usaha Perikanan Terseksi yang Terseksi	-	-	0.00	5	unit	0.00	-	-	5,900,000.00	unit	-	-	0.00	0.00	%	0.00	0.01	%	0.00	-	-	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGKAN										
3.25.03.2.02	Pembinaan Usaha Perikanan Terseksi yang Terseksi	Jumlah Piasana Usaha Perikanan Terseksi yang Terseksi	-	-	-	-	-	62,947,480.00	-	-	-	-	19,711,300.00	-	-	48,975,650.00	77.80	%	48,975,650.00	91.01	%	48,975,650.00	-	-	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGKAN									
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Usaha Perikanan	Jumlah Piasana Usaha Perikanan Terseksi yang Meringkang Kemitraan	-	-	0.00	25	orang	62,947,480.00	-	-	5,900,000.00	orang	-	-	48,975,650.00	77.80	%	48,975,650.00	91.01	%	48,975,650.00	-	-	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGKAN										
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produk Perikanan Budidaya	90%	-	18,962,755,864.00	1900	ton/tahun	1,712,909,289.00	4	triwulan	222,152,654.00	ton/tahun	-	-	1,626,145,593.00	94.93	%	1,626,145,593.00	91.01	%	4,706,276,414.00	-	-	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGKAN										
3.25.04.2.02	Pembinaan Usaha Perikanan Budidaya	Jumlah Produk Perikanan Budidaya	90%	-	18,962,755,864.00	3	%	241,866,639.00	-	-	37,670,964.00	%	-	-	210,346,926.00	86.99	%	210,346,926.00	91.01	%	478,208,859.00	-	-	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGKAN										
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Usaha Perikanan Budidaya	Jumlah Kelompok Usaha Perikanan Budidaya yang Mengikuti Pembinaan Kemitraan	-	-	0.00	2	kelompok	21,322,399.00	-	-	37,670,964.00	kelompok	-	-	19,937,000.00	90.50	%	19,937,000.00	91.01	%	19,937,000.00	-	-	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGKAN										
3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya	Jumlah Kelompok Usaha yang Mendapatkan Bantuan Pembiayaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	-	-	12,507,300.00	2	kelompok	171,386,480.00	-	-	37,670,964.00	kelompok	-	-	190,408,926.00	111.10	%	190,408,926.00	91.01	%	203,316,826.00	-	-	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGKAN										
3.25.04.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pembiayaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang Mendapatkan Bantuan Pembiayaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	-	-	12,507,300.00	2	kelompok	49,097,760.00	-	-	37,670,964.00	kelompok	-	-	0.00	0.00	%	0.00	0.01	%	0.00	-	-	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGKAN										
3.25.04.2.04	Pengelolaan Usaha Perikanan Budidaya	Jumlah Produk Perikanan Budidaya	90%	-	18,962,755,864.00	0.4	Ha	1,471,102,650.00	-	-	184,581,690.00	Ha	-	-	1,415,799,667.00	96.24	%	1,415,799,667.00	91.01	%	4,228,067,555.00	-	-	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGKAN										
3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Budidaya	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan Budidaya	90%	-	18,962,755,864.00	20	dokumen	96,109,620.00	-	-	15,076,066.00	dokumen	-	-	99,661,944.00	103.73	%	99,661,944.00	91.01	%	203,769,725.00	-	-	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGKAN										
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Piasana Usaha Perikanan Budidaya	Jumlah Piasana Usaha Perikanan Budidaya	90%	-	18,962,755,864.00	3	unit	240,201,640.00	-	-	15,076,066.00	unit	-	-	215,528,842.00	90.46	%	215,528,842.00	91.01	%	791,738,980.00	-	-	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGKAN										
3.25.04.2.04.03	Pengelolaan Usaha Perikanan Budidaya	Jumlah Piasana Usaha Perikanan Budidaya	90%	-	18,962,755,864.00	4	unit	766,676,300.00	-	-	150,248,492.00	unit	-	-	715,931,035.00	90.50	%	715,931,035.00	91.01	%	2,322,961,981.00	-	-	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGKAN										
3.25.04.2.04.04	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pembiayaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Piasana Usaha Perikanan Budidaya	90%	-	18,962,755,864.00	0.4	Ha	369,116,590.00	-	-	23,235,000.00	Ha	-	-	382,902,700.00	103.73	%	382,902,700.00	91.01	%	904,055,869.00	-	-	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGKAN										
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Perikanan Budidaya	90%	-	550,803,332.00	37	ton/tahun	206,310,270.00	4	triwulan	22,132,132.00	ton/tahun	-	-	257,387,788.00	124.76	%	257,387,788.00	91.01	%	506,086,976.00	-	-	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGKAN										
3.25.06.2.01	Pemeriksaan Tenda Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Produk Perikanan Budidaya	90%	-	550,803,332.00	-	-	79,190,340.00	-	-	22,132,132.00	-	-	110,307,188.00	139.29	%	110,307,188.00	91.01	%	245,538,995.00	-	-	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGKAN											
3.25.06.2.01.01	Pemeriksaan Tenda Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Produk Perikanan Budidaya	90%	-	550,803,332.00	30	dokumen	79,190,340.00	-	-	22,132,132.00	dokumen	-	-	110,307,188.00	139.29	%	110,307,188.00	91.01	%	245,538,995.00	-	-	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGKAN										
3.25.06.2.01.02	Pemeriksaan Tenda Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Produk Perikanan Budidaya	90%	-	550,803,332.00	-	-	127,119,930.00	-	-	0.00	-	-	73,004,525.00	-	-	147,080,600.00	115.70	%	147,080,600.00	91.01	%	260,544,975.00	-	-	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGKAN								
3.25.06.2.03.01	Pemeriksaan Tenda Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Produk Perikanan Budidaya	90%	-	550,803,332.00	30	ton	127,119,930.00	-	-	0.00	ton	-	-	149,170,225.00	-	-	147,080,600.00	115.70	%	147,080,600.00	91.01	%	260,544,975.00	-	-	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGKAN							
3.25.06.2.03.02	Pemeriksaan Tenda Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Produk Perikanan Budidaya	90%	-	550,803,332.00	10	petak usaha	0.00	-	-	0.00	petak usaha	-	-	0.00	0.00	%	0.00	0.01	%	0.00	-	-	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGKAN										
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																																	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertindakannya Pelayanan Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	90%	-	36,302,062,502.00	7,196,601,041.00	90	%	8,763,771,409.00	-	-	1,359,003,055.00	%	-	-	21,894,251,872.00	249.83	%	21,894,251,872.00	91.01	%	29,090,652,913.00	-	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP									
2.11.01.2.01	Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	90%	-	36,302,062,502.00	415,364,938.00	-	-	1,923,610,948.00	-	-	109,433,336.00	-	-	908,032,716.00	-	-	2,546,377,978.00	132.37	%	2,546,377,978.00	91.01	%	2,961,742,916.00	-	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP							
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	90%	-	36,302,062,502.00	415,364,938.00	7	Laporan	1,923,610,948.00	7	Laporan	109,433,336.00	Laporan	-	-	908,032,716.00	100	-	-	-	-	-	-	2,546,377,978.00	132.37	%	91.01	%	2,961,742,916.00	-	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	90%	-	36,302,062,502.00	415,364,938.00	-	-	1,923,610,948.00	-	-	109,433,336.00	-	-	908,032,716.00	-	-	2,546,377,978.00	132.37	%	2,546,377,978.00	91.01	%	2,961,742,916.00	-	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP							
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90%	-	36,302,062,502.00	4,790,645,102.00	50	Orang/tahun	5,543,381,751.00	50	Orang	935,278,705.00	Orang/tahun	-	-	14,611,419,142.00	263.58	%	14,611,419,142.00	91.01	%	19,402,064,244.00	-	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP									
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	90%	-	36,302,062,502.00	415,364,938.00	-	-	1,923,610,948.00	-	-	109,433,336.00	-	-	908,032,716.00	-	-	2,546,377,978.00	132.37	%	2,546,377,978.00	91.01	%	2,961,742,916.00	-	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP							
2.11.01.2.03.06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	90%	-	36,302,062,502.00	415,364,938.00	1	Laporan	29,685,200.00	1	Laporan	9,260,400.00	Laporan	-	-	149,209,800.00	102.64	%	149,209,800.00	91.01	%	208,436,300.00	-	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP									
2.11.01.2.06	Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	90%	-	36,302,062,502.00	415,364,938.00	-	-	1,923,610,948.00	-	-	109,433,336.00	-	-	908,032,716.00	-	-	2,546,377,978.00	132.37	%	2,546,377,978.00	91.01	%	2,961,742,916.00	-	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP							
2.11.01.2.06.02	Pengelolaan Pakan Dinas beserta Akibat Kelangkaannya	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Akibat Kelangkaannya	90%	-	36,302,062,502.00	50	sat	33,124,500.00	50	sat	33,124,500.00	Paket	-	-	226,639,500.00	174.04	%	226,639,500.00	91.01	%	226,639,500.00	-	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP										
2.11.01.2.06.05	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	90%	-	36,302,062,502.00	3	orang	186,372,865.00	3	orang	19,940,000.00	orang	-	-	244,3																			

Kode	Uraian/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPJMD/REKSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Tahun 2024 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			I		II		III		IV		24 = 7 + 23		25 = 14 / 6 x100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	90%	Rp 365,388,502.00	90	K	34,450,717.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Kode	Uraian/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPJMD/RESTRAT)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RPJMD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2024 (Tahun n-1) atau RKPD yang dievaluasi saat ini		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			6		7		8		9		10		11		12		13		14 + 7 + 12		15 + 14 + 6 x 100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2.12.01.2.06.10	Pemenuhan Ansig Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Pemenuhan Ansig Dinamis pada SKPD			0,00	5	Dokumen	7.000.936,00	44	Dokumen	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPJMD/REKSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2024 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
			I		II		III		IV																													
			K	6	Rp	K	7	Rp	K	8	Rp	K	10	Rp	K	11	Rp	K	12	Rp	K	13	Rp	14 = 7 + 13			Rp	15 = 14 / 6 x100%										
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat			458,394,800.00																														DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			10,891,150.00	12	laporan	4,840,000.00	405	lembar	3,020,000.00		laporan	17,218,150.00	605/30		17,218,150.00	10	Laporan	4,800,000.00	99.17	%	4,800,000.00	91.01	%	15,691,150.00								DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didistribikan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didistribikan			182,079,606.00	12	laporan	79,393,250.00	3	Jenis	17,933,702.00		laporan	290,107,878.00	7		309,984,674.00	11	Laporan	76,800,992.00	96.73	%	76,800,992.00	91.01	%	258,871,598.00								DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Penastaban dan Perleengkapan Kantor yang Didistribikan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penastaban dan Perleengkapan Kantor yang Didistribikan			308,355,424.00	11	laporan	67,813,857.00	11	Jenis	12,664,044.00		laporan	172,287,666.00	33		186,807,666.00	11	Laporan	38,440,000.00	96.68	%	38,440,000.00	91.03	%	148,795,424.00								DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Didistribikan			535,077,620.00	11	laporan	318,760,120.00	14	Jenis	59,755,634.00		laporan	1,037,487,938.00	40		1,132,369,838.00	10	Laporan	337,768,340.00	105.96	%	337,768,340.00	91.01	%	872,845,960.00								DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat			186,168,100.00	20	%	114,933,640.00			0.00		%	283,639,167.00			103,963,421.00	90.46	%	103,963,421.00	91.01	%	290,131,521.00											DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Peranginan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Peranginan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			155,148,100.00	113	unit	89,938,259.00	10	unit	0.00		unit	233,604,667.00	14		246,580,667.00	8	Unit	83,014,421.00	92.30	%	83,014,421.00	91.01	%	238,162,521.00								DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			31,020,000.00	2	unit	24,995,381.00	2	Gedung	0.00		unit	50,034,500.00	4		51,834,500.00	2	Gedung	20,949,000.00	83.81	%	20,949,000.00	91.01	%	51,569,000.00								DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				
2.16.01.2.13	Penataan Organisasi	Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat			1,000,000.00	20	%	1,000,000.00			0.00		%	18,210,000.00			1,000,000.00	100.00	%	1,000,000.00	91.01	%	2,000,000.00											DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				
2.16.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			1,000,000.00	1	Dokumen	1,000,000.00	1	Dokumen	0.00		Dokumen	18,210,000.00	3		18,210,000.00	1	Dokumen	1,000,000.00	100.00	%	1,000,000.00	91.01	%	2,000,000.00								DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Sasaran Layanan Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik	100%		11,692,873,234.00	4,421,099,325.00	20	%	2,856,436,548.00																											DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah				4,421,099,325.00	20	%	2,856,436,548.00																											DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				46,917,870.00	12		dokumen		175,439,323.00	30		konten		0.00		dokumen		382,593,365.00	758																DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				478,725,223.00	12		dokumen		469,897,395.00	300		layangan		77,836,952.00		dokumen		1,007,104,396.00																	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.16.02.2.01.12	Penyenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Komunikasi Komunitas	Jumlah Dokumen Komunikasi dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendemonstrasikan Informasi Program atau Kebijakan				3,865,900,480.00	16		dokumen		2,211,099,830.00	12		Media		48,538,430.00		dokumen		6,374,507,017.00	51																DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pelayanan Publik yang sudah terintegrasi, Persentase Akses Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SOP yang terintegrasi	100%		12,471,901,073.00	3,939,815,815.00	20	%	3,758,409,354.00	100	%																										DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sub Domain yang Dikelola, Persentase Jaringan Internet dan Intranet yang dikelola				2,273,552,018.00	20	%	3,195,324,935.00	100	%																										DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.16.03.2.01.02	Penastaban dan Pengembangan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penastaban dan Pengembangan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				0.00	3		dokumen		62,126,128.00					0.00		dokumen		47,524,349.00																	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.16.03.2.01.03	Penyenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				2,273,552,018.00	12		unit		3,133,198,807.00	10		16K		47,693,250.00		unit		5,175,835,408.00	37																DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun, Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik				1,666,263,796.00	20	%	563,084,419.00																												DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.16.03.2.02.01	Penastaban dan Pengembangan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penastaban dan Pengembangan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				0.00	3		dokumen		35,657,748.00					0.00		dokumen		44,217,200.00	1	Dokumen	31,058,200.00	87.10	%	31,058,200.00	91.01	%	31,058,200.00									DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik				25,780,700.00	2		dokumen		40,496,700.00	2.75		Pusat data		0.00		dokumen		52,646,900.00	0	Index SPBE	30,511,000.00	75.34	%	30,511,000.00	91.03	%	56,291,700.00								DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				340,620,863.00	2		unit		145,405,360.00	2/4		Aplikasi		22,576,176.00		unit		600,798,115.00	2.25																DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				412,212,720.00	2		unit		111,903,709.00	1		Aplikasi		2,765,700.00		unit		506,080,120.00	2.25																DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.16.03.2.02.08	Penyenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				147,712,200.00	2		layanan		41,533,572.00	1		Aplikasi		0.00		layanan		160,182,400.00	3																DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				739,937,313.00	2		dokumen		188,087,330.00	1		Lokasi		16,761,066.00		dokumen		897,662,340.00	435/4																DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan	100%		1,769,679,250.00	251,105,582.00	100	%	149,405,290.00																												DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.20.02.2.01	Penyenggaraan Statistik Sektor di Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Statistik Sektor yang terintegrasi				251,105,582.00	80	%	149,405,290.00																												DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor				169,616,064.00	30		dokumen		89,994,570.00	42		Eksemplar		17,149,466.00		dokumen		244,123,112.00	367/26																DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektor dari BPS	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektor dari BPS				81,489,518.00	60		orang		0.00	10		Eksemplar		2,175,400.00		orang																				

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPJMD/RESTRAT)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2024 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini	Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						I		II		III		IV						K	Rp	K	Rp	%	%		Rp	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD		84.423.024,00	3	Dokumen	2.125.000,00	1	Dokumen	0,00		Dokumen	3.400.000,00			5.525.000,00	25	Buku	2.125.000,00	100,00	%	2.125.000,00	91,01	%	86.548.024,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1	Laporan	1.700.000,00					Laporan	2.125.000,00			1.700.000,00	10	Buku	4.357.600,00	256,33	%	4.357.600,00	91,01	%	4.357.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang tepat waktu		3.258.921.791,00	100	%	2.479.323.928,00			411.891.813,00		%	2.492.664.122,00			2.315.772.724,00	93,40	%	2.315.772.724,00	91,01	%	5.574.694.515,00			DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		3.136.530.461,00	21	orang/bulan	2.474.845.928,00	14	bulan	411.891.813,00		orang/bulan	2.486.486.122,00			4.041.980.604,00	21	Orang	2.311.294.724,00	93,39	%	2.311.294.724,00	91,01	%	5.447.825.185,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		54.622.906,00	1	Laporan	1.700.000,00	1	Dokumen	0,00		Laporan	3.400.000,00			3.400.000,00	20	Buku	1.700.000,00	100,00	%	1.700.000,00	91,01	%	56.322.906,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		67.768.424,00	1	Laporan	2.778.000,00	1	Dokumen	0,00		Laporan	2.778.000,00			2.778.000,00	30	Buku	2.778.000,00	100,00	%	2.778.000,00	91,01	%	70.546.424,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan barang milik daerah semester dan akhir tahun		425.000,00	2	dokumen	1.700.000,00			0,00		dokumen	3.780.000,00			1.700.000,00	100,00	%	1.700.000,00	91,01	%	2.125.000,00			DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		425.000,00	2	Laporan	1.700.000,00	1	Dokumen	0,00		Laporan	3.780.000,00			3.780.000,00	30	Buku	1.700.000,00	100,00	%	1.700.000,00	91,01	%	2.125.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian dinas ASN dan PTY yang menyeluruh dan berkualitas		148.157.642,00	100	%	178.894.500,00			8.744.000,00		%	147.453.954,00			185.222.535,00	103,54	%	185.222.535,00	91,01	%	334.380.177,00			DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Aksesori Kepegawaiannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Aksesori Kepegawaiannya		89.226.280,00	2	paket	91.652.500,00			0,00		paket	41.385.000,00			78.075.000,00	120	Stel	87.120.000,00	95,05	%	87.120.000,00	91,01	%	176.346.280,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		59.931.362,00	13	orang	87.242.000,00			8.744.000,00		orang	106.068.954,00			113.139.701,00	13	Orang/Kali	98.102.535,00	112,45	%	98.102.535,00	91,01	%	158.033.897,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan mutu penyedia barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan administrasi umum perangkat daerah		1.227.814.042,00	100	%	457.642.965,00			22.849.000,00		%	414.970.420,00			685.885.465,00	149,87	%	685.885.465,00	91,01	%	1.913.699.507,00			DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4.787.000,00	1	Paket	4.481.750,00	1	Paket	0,00		Paket	3.507.000,00			4.185.000,00	1.313.000,00	29,30	%	1.313.000,00	91,01	%	6.080.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		525.149.350,00	1	Paket	107.323.000,00	1	Paket	0,00		Paket	89.506.560,00			191.526.560,00	164.205.000,00	153,00	%	164.205.000,00	91,01	%	689.354.350,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2.403.500,00	1	Paket	21.230.000,00	1	Paket	1.995.000,00		Paket	11.780.000,00			32.957.500,00	21.147.500,00	99,61	%	21.147.500,00	91,01	%	23.551.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		24.775.000,00	4	dokumen	6.299.700,00	1	Paket	0,00		dokumen	6.495.000,00			10.530.000,00	913	Eksemplar	5.640.000,00	89,53	%	5.640.000,00	91,01	%	30.415.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		147.827.330,00	1	Paket	68.107.190,00	1	Paket	0,00		Paket	64.721.800,00			85.408.700,00	50.055.900,00	73,50	%	50.055.900,00	91,01	%	197.882.230,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2.18.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		17.480.000,00	4	Laporan	14.272.000,00	1	Paket	0,00		Laporan	6.412.000,00			15.742.000,00	24.378.600,00	170,61	%	24.378.600,00	91,01	%	41.858.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		443.040.962,00	79	Laporan	218.986.200,00	1	Paket	20.854.000,00		Laporan	232.548.060,00			423.410.754,00	79	Kali	404.209.643,00	184,58	%	404.209.643,00	91,01	%	847.250.805,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.10	Penatausahaan Ansat Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Ansat Dinamis pada SKPD			1	dokumen	16.943.125,00					dokumen	0,00			14.935.822,00	88,15	%	14.935.822,00	91,01	%	14.935.822,00			DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah yang dilakukan paket pengadaan yang tepat waktu		0,00	1	jenis	1.500.000,003,00			0,00		jenis	513.024.500,00			1.981.773.000,00	132,12	%	1.981.773.000,00	91,01	%	1.981.773.000,00			DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0,00	1	unit	0,00	1	unit	0,00		unit	513.024.500,00			513.024.500,00	0,00	%DIV0%	0,00	91,01	%	0,00			DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			2	unit	0,00					unit	0,00			0,00	%DIV0%	0,00	91,01	%	0,00			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1	unit	1.500.000,003,00				0,00		unit	0,00			1.166.564.000,00	1.981.773.000,00	132,12	%	1.981.773.000,00	91,01	%	1.981.773.000,00			DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa penunjang ususan SKPD		642.628.986,00	100	%	360.152.820,00			121.269.379,00		%	467.342.902,00			403.597.131,00	112,06	%	403.597.131,00	91,01	%	1.040.226.117,00			DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4.800.000,00	1	Laporan	2.400.000,00	1	Tahun	0,00		Laporan	2.400.000,00			3.600.000,00	2.400.000,00	100,00	%	2.400.000,00	91,01	%	7.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		66.589.146,00	2	Laporan	67.750.500,00	1	Tahun	57.595.371,00		Laporan	109.590.848,00			138.797.381,00	56.708.323,00	83,70	%	56.708.323,00	91,01	%	123.297.469,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		19.290.000,00	3	Laporan	33.978.100,00	1	Tahun	1.400.000,00		Laporan	24.760.000,00			34.100.100,00	14.250.000,00	41,94	%	14.250.000,00	91,01	%	33.540.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		551.949.840,00	11	Laporan	256.024.320,00	1	Tahun	62.744.008,00		Laporan	330.592.054,00			538.995.754,00	330.238.808,00	128,99	%	330.238.808,00	91,01	%	882.188.648,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan mutu unit barang milik daerah (BMD) yang terpelihara dengan baik		326.228.700,00	100	%	287.904.727,00			9.375.000,00		%	124.259.730,00			165.703.275,00	57,55	%	165.703.275,00	91,01	%	491.931.975,00			DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Peranginan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Peranginan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		14326.																						

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPJMD/RESTRAT)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2024 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			I		II		III		IV		20		21		22		23		24 + 7 + 23		25 = 14 / 6 x100%											
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Tersedianya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu		796,912,098.00	1	Tahun	570,138,900.00			56,810,326.00			Tahun	504,565,899.00							473,375,081.00	83.03	%	473,375,081.00	91.01	%	1,270,287,140.00				DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.04.2.01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko	421,490,806.00	20	pelaku usaha	314,122,540.00		1	Dokumen	9,820,000.00			pelaku usaha	247,686,572.00								258,842,528.00	82.40	%	258,842,528.00	91.01	%	680,333,334.00				DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berbasis Risiko																					210,656,679.00									DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.04.2.01.07	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berbasis Risiko	265,374,820.00	4	pelaku usaha	83,495,820.00		1	Dokumen	16,932,130.00			pelaku usaha	167,700,479.00								183,267,829.00	166.43	%	138,961,109.00	91.01	%	404,335,938.00				DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.08	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	110,046,424.00	25	kegiatan usaha	172,521,540.00				30,058,196.00			kegiatan usaha	89,178,808.00								0.00	%	0.00	91.01	%	110,046,424.00					DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100%	2,309,072,665.00			756,989,464.00	90	%	537,604,440.00				16,405,632.00	%	991,150,940.00						528,010,128.00	98.22	%	528,010,128.00	91.01	%	1,284,999,592.00		55.65		DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Peringkat Mutu Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal yang berkualitas		756,989,464.00	100	%	537,604,440.00			16,405,632.00				991,150,940.00								528,010,128.00	98.22	%	528,010,128.00	91.01	%	1,284,999,592.00				DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05.2.01.04	Penyelesaian Pemecatan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Pemecatan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	71,887,000.00	8	kegiatan usaha	114,043,800.00		1	Dokumen	16,405,632.00			kegiatan usaha	121,058,752.00								112,766,040.00	98.88	%	112,766,040.00	91.01	%	184,653,040.00				DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berbasis Risiko dan Pengawasan	406,507,828.00	217	pelaku usaha	272,789,440.00		1	Dokumen	0.00			pelaku usaha	396,000,488.00								292,444,088.00	107.21	%	292,444,088.00	91.01	%	698,951,516.00				DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05.2.01.06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Telah Diawasi dan Diawasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dan Pelaku	278,594,636.00	14	kegiatan usaha	150,771,200.00		1	Dokumen	0.00			kegiatan usaha	74,091,700.00								122,800,000.00	81.45	%	122,800,000.00	91.01	%	401,394,636.00				DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan data dan sistem informasi	90%	751,751,108.00			178,254,922.00	90	%	63,178,820.00				8,466,066.00	%	58,390,308.00						48,814,044.00	77.26	%	48,814,044.00	91.01	%	227,068,966.00		30.21		DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Peringkat mutu data LAPAS yang akurat dan sistematis		178,254,922.00	100	%	63,178,820.00			8,466,066.00				58,390,308.00								48,814,044.00	77.26	%	48,814,044.00	91.01	%	227,068,966.00				DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06.2.01.02	Pengalokasian, Pengayun dan Pemantauan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Perizinan Berbasis Risiko	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Perizinan Berbasis Risiko yang Terintegrasi secara Elektronik yang Didat, Diag dan Dimanfaatkan	178,254,922.00	3	Dokumen	63,178,820.00		1	Dokumen	8,466,066.00			Dokumen	58,390,308.00								48,814,044.00	77.26	%	48,814,044.00	91.01	%	227,068,966.00				DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																															DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01	PROGRAM PENGUANGAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	90%	20,433,694,948.00			4,955,118,552.00	90	%	4,967,223,617.00				6,486,762,804.00								4,873,891,087.00	98.12	%	4,873,891,087.00	91.01	%	9,828,018,639.00		48.10		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan, dan perencanaan serta laporan anggaran tepat waktu		315,479,654.00	90	%	230,553,811.00			23,442,876.00				273,124,732.00								234,618,975.00	101.76	%	234,618,975.00	91.01	%	550,098,629.00				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		64,917,380.00	6	dokumen	93,517,091.00		6	dokumen	5,293,044.00			dokumen	96,182,508.00							101,115,501.00	108.13	%	101,115,501.00	91.01	%	166,032,881.00				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	200,562,274.00	6	laporan	137,038,420.00		6	dokumen	18,149,832.00			laporan	176,942,224.00								133,503,474.00	97.42	%	133,503,474.00	91.01	%	384,065,748.00				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah		2,854,746,791.00	90	%	3,194,889,862.00			400,896,480.00				4,546,270,526.00								3,385,006,321.00	105.95	%	3,385,006,321.00	91.01	%	6,238,752,072.00				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaj dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaj dan Tunjangan ASN	2,836,082,071.00	30	orang/bulan	3,180,726,978.00		30	orang	400,896,480.00			orang/bulan	4,527,323,517.00								3,371,407,921.00	105.99	%	3,371,407,921.00	91.01	%	6,207,488,629.00				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10,956,090.00	1	laporan	14,162,884.00		1	dokumen	0.00			laporan	11,406,002.00								13,598,400.00	96.01	%	13,598,400.00	91.01	%	24,554,490.00				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.02.08	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7,707,590.00	12	dokumen	0.00		12	laporan	0.00			dokumen	0.00										0.00	91.01	%	7,707,590.00					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah		19,184,120.00	90	%	7,566,481.00			840,000.00				10,474,814.00								18,080,000.00	238.95	%	18,080,000.00	91.01	%	37,264,120.00				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.02.05	Reklasifikasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Reklasifikasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	19,184,120.00	1	laporan	7,566,481.00		1	dokumen	840,000.00			laporan	10,474,814.00								18,080,000.00	238.95	%	18,080,000.00	91.01	%	37,264,120.00				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.03.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah		131,111,230.00	90	%	347,736,910.00			28,953,720.00				490,357,919.00								355,487,883.00	102.22	%	355,487,883.00	91.01	%	488,599,113.00				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.05.02	Pengelolaan Pakan Dinas beserta Jabat Kematangan	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Jabat Kematangan		77,977,500.00	30	paket	71,337,940.00			0.00			paket	76,500,000.00								76,500,000.00	98.11	%	76,500,000.00	91.01	%	76,500,000.00				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1,375,000.00	2	dokumen	57,537,500.00		2	dokumen	11,558,098.00			dokumen	63,975,516.00								66,831,588.00	116.56	%	66,831,588.00	91.01	%	68,206,588.00				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	109,486,230.00	2	dokumen	84,723,160.00		2	dokumen	17,395,632.00			dokumen	131,760,224.00								72,745,622.00	85.86	%	72,745,622.00	91.01	%	182,231,862.00				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Penyusunan Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Penyusunan Undangan	20,250,000.00	13	orang	127,737,560.00		13	orang	0.00			orang	188,122,079.00																		

Kode	Uraian/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPJMD/REKSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Tahun 2024 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			I		II		III		IV		24 = 7 +13		25 = 14 / 6 x100%																	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
2.23.02.2.02.01	Sosialisai Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lulus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan		14.901.400,00	4	lokus	69.022.708,00	10	desa	15.657.500,00																				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.02.02	Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Memiliki Keunggulan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inkusi Sosial di Tempat-Tempat Umum yang Memiliki Keunggulan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	1	perpustakaan	0,00	1	perpustakaan	73.810.736,00																					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.02.03	Pembinaan Penghimpunan Gerakan Budaya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghimpunan Gerakan Budaya			3	orang																								DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inkusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inkusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Didokumentasikan		66.064.250,00	4	perpustakaan	144.644.993,00	1	kegiatan	46.656.844,00																				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kompetisi		94.521.700,00	5	orang	108.033.212,00	1	kegiatan	9.455.444,00																				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNJO	pelesterian koleksi nasional dan naskah kuno		582.622.470,00		58.675.165,00	90	%	38.999.715,00																					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah kuno yang dilestarikan			90	%	0,00																							DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.03.2.01.01	Penyusunan Peta Seta Masyarakat dalam Penyempurnaan, Pemetaan, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyempurnaan, Pemetaan, dan Pendaftaran Naskah Kuno			30	orang	0,00																							DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang dilestarikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang dilestarikan		58.675.165,00	100	%	38.999.715,00																							DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan		43.092.725,00	100	eksemplar	0,00	1	tahun	1.748.800,00																				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.03.2.02.02	Pengadaan dan Penyalangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Didukung Pengadaan dan Penyalangan		15.582.440,00	100	eksemplar	38.999.715,00	1	tahun	3.340.400,00																				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																													DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			90	%	0,00																							DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	tercapainya pemeliharaan barang milik daerah			90	%	0,00																							DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direnovasi			1	unit	0,00																							DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	pengelolaan arsip	90%	862.579.516,00		76.339.660,00	90	%	478.189.193,00																					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Perseentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku		577.588.244,00	90	%	430.810.193,00																							DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Didokumentasikan		436.133.888,00	300	berkas	190.687.096,00	1	kegiatan	77.119.686,00																				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diakumulasi dan Didokumentasikan		320.547.743,00	300	berkas	15.776.484,00	1	tahun	3.950.000,00																				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Keunggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Keunggulan Kabupaten/Kota		45.639.346,00	10	laporan	220.346.583,00	1	kegiatan	64.183.811,00																				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Perseentase Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		146.286.599,00	100	%	47.379.030,00																							DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.02.02	Aktus, Pengalihan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Aktus, Pengalihan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		65.104.758,00	200	arsip	47.379.030,00	1	tahun	30.132.406,00																				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Perseentase Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			100	%	0,00																							DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKS	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKS			200	pengguna	0,00																							DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					90	%	14.842.675,00																						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.03.2.01	Pemenuhan Arsip Dilindungi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Perseentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku dan terata				90	%	14.842.675,00																						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.03.2.01.01	Pemenuhan Arsip Dilindungi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Pemenuhan Arsip yang Dilakukan Pemenuhan, Pemetaan dan Pelaksanaan Pemenuhan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		150	arsip	14.842.675,00																								DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																													DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	-	5.980.343.326,00							-	4.907.801.116,00																DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	-	13.566.400,00							-	2.068.000,00																DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA
2.22.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi		1	dokumen	4.134.100,00							dokumen	2.068.000,00																DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA
2.22.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi		10	dokumen	4.134.100,00							dokumen	2.165.015.955,00	10	dokumen	3.965.000,00													DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA
2.22.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi		10	dokumen	2.650.100,00							dokumen	2.078.725.528,00	10	dokumen	2.650.000,00													DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA
2.22.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi		10	dokumen	2.650.100,00							dokumen	86.290.327,00	10	dokumen	2.185.000,00													DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	-	4.508.846.699,00							-	2.384.898.218,00																DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		12	orang/bulan	4.331.619.729,00							orang/bulan	2.078.725.528,00	12	bulan	3.353.433.014,00													DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA
2.22.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		5	dokumen	0,00							dokumen	105.162.690,00																DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA
2.22.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi		6	laporan	4.954.650,00							laporan	0,00	6	laporan	4.954.650,00													DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA
2.22.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD		0	laporan	172.271.320,00							laporan	0,00	1	tahun	77.379.564,00													DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	-	43.177.120,00							-	0,00																DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA
2.22.01.2.05.02	Pengadaan Paketan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Paketan Dinas beserta Atribut Kelengkapan		36	paket	0,00							paket	0,00																DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA
2.22.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																												

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPJMD/REKSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RPJMD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2024 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
			6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 x 12		15 = 14 / 6 x100%													
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			1	objek	835.875.772,00	0,00	-	-	2.384.275.772,00	0,00	-	-	1.132.882.500,00			2.666.279.434,00	111,83	%	2.666.279.434,00	91,01	%								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA			
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemertabatan Objek Penemuan Tradisi Budaya, Penyeleksiakan dan Pemertabatan	Jumlah Objek Penemuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemertabatan			1	objek	835.875.772,00				objek	72.882.500,00	1	objek	636.587.430,00	1	Objek	815.875.534,00	97,84	%	815.875.534,00	91,01	%								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA			
2.22.02.2.02.03	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Prasarana Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Prasarana Tradisional		0,00	2	laporan	1.550.400.000,00	0,00			laporan	1.060.000.000,00	2	laporan	1.550.399.900,00	2	Lpr	1.850.399.900,00	119,35	%	1.850.399.900,00	91,01	%								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA			
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	29 orang	2.121.937.568,00	-	-	298.084.025,00	0,00		0,00	-	15.520.000,00			883.538.272,00	768,37	%	883.538.272,00	91,01	%	1.181.622.297,00	56,69	%								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA			
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pembinaan dan Pelatihan			-	-	298.084.025,00	0,00		0,00	-	15.520.000,00			883.538.272,00	768,37	%	883.538.272,00	91,01	%	1.181.622.297,00											DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA		
2.22.03.2.01.01	Penelitian Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pembinaan dan Pelatihan		0,00	80	Orang	65.177.367,00	0,00		0,00	Orang	0,00	80	orang	66.903.642,00	80	Org	81.203.342,00	124,59	%	81.203.342,00	91,01	%									DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA		
2.22.03.2.01.03	Pengujian Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Dinyatakan Kapasitasnya		298.084.025,00	7	lembaga	49.811.730,00	0,00	1	Kegiatan		lembaga	15.520.000,00	7	lembaga	49.811.730,00	7	Lbg	802.334.930,00	1.610,73	%	802.334.930,00	91,01	%								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA		
2.22.04	PROGRAM PEMERINTAHAN SELAMAH	-	57 buah	961.231.750,00	-	-	217.576.947,00	22.000.000,00		0,00	-	103.927.141,00			230.647.369,00	106,61	%	230.647.369,00	91,01	%	413.662.489,00	42,83	%									DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA		
2.22.04.2.01	Pembinaan Segajah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Segajah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		181.935.128,00	-	-	217.576.947,00	22.000.000,00		0,00	-	103.927.141,00			230.647.369,00	106,61	%	230.647.369,00	91,01	%	413.662.489,00											DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA		
2.22.04.2.01.01	Pemertabatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Segajah Lokal Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Segajah Lokal Provinsi dan Kabupaten/Kota		20	orang		30.098.500,00	0,00		0,00	orang	0,00	20	orang	49.811.730,00	20	Org	30.098.000,00	100,00	%	30.098.000,00	91,01	%									DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA		
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Segajah Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Segajah yang Dapat Diakses Masyarakat		181.035.120,00	1	Dokumen	187.472.447,00	22.000.000,00	1	Dokumen		Dokumen	103.927.141,00	1	Dok	149.162.474,00	1	Dok	200.549.369,00	106,98	%	200.549.369,00	91,01	%									DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	19 buah	3.174.203.950,00	-	-	717.338.044,00	0,00		0,00	-	259.538.633,00			741.250.327,00	103,33	%	741.250.327,00	91,01	%	1.628.006.672,00	48,14	%									DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA		
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peningkat Kabupaten/Kota	-		109.876.740,00	-	-	172.842.893,00	0,00		0,00	-	8.375.000,00			194.263.139,00	112,39	%	194.263.139,00	91,01	%	304.139.879,00											DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA		
2.22.05.2.01.01	Pembentukan Objek Diduga Cagar Budaya yang Ditetapkan	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Ditetapkan		109.876.740,00	10	Objek	56.440.000,00	0,00	4	Objek		Objek	8.375.000,00	10	Objek	48.285.544,00	10	Objek	65.148.144,00	115,43	%	65.148.144,00	91,02	%									DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA	
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan			4	objek	116.402.893,00	0,00		0,00	-	0,00	4	objek	39.991.500,00	4	Objek	129.114.995,00	110,92	%	129.114.995,00	91,01	%										DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peningkat Kabupaten/Kota	-		676.873.696,00	-	-	544.495.151,00	0,00		0,00	-	251.163.633,00			546.987.188,00	100,46	%	546.987.188,00	91,01	%	1.223.890.793,00											DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA		
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi		676.873.696,00	15	Objek	294.495.531,00	0,00	14	Objek		Objek	251.163.633,00	15	Objek	152.153.688,00	102,71	%	302.470.188,00	102,71	%	546.987.188,00	91,01	%									DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA	
2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan			3	objek	249.999.620,00	0,00		0,00	-	0,00	3	objek	244.517.000,00	97,81	%	244.517.000,00	91,01	%	244.517.000,00												DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	-	1	580.043.815,00	-	-	33.949.978,00	0,00		0,00	-	33.442.420,00			0,00	0,00	%	0,00	91,01	%	0,00	0,00	%									DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA		
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-		0,00	-	-	33.949.978,00	0,00		0,00	-	33.442.420,00			0,00	0,00	%	0,00	91,03	%	0,00	0,00	%									DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA		
2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara		0,00	2	Unit	25.159.975,00	0,00	1	Unit		Unit	33.442.420,00	2	unit	210.000,00	2	Unit	16.270.000,00	64,67	%	16.270.000,00	91,01	%									DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA	
2.22.06.2.01.05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi			1	unit	0,00	0,00		0,00		unit	0,00					RDIV01	%	0,00	91,01	%											DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARAWISATA	-																RDIV01	%	0,00	91,01	%										DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA		
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	35 dok	27.741.534.015,00	-	-	5.481.283.029,00	0,00		0,00	-	5.535.000,00						RDIV01	%	0,00	91,01	%											DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA	
3.26.01.2.01	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-					14.790.000,00	0,00		0,00	-	0,00						RDIV01	%	0,00	91,01	%											DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA	
3.26.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD		0,00	10	laporan	0,00	0,00	15	Dokumen		laporan	0,00	10	Lpr	21.009.000,00	RDIV01	%	21.009.000,00	91,01	%	21.009.000,00											DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA	
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		884.988.689,00	-	-	0,00	0,00		100.574.033,00								RDIV01	%	0,00	91,01	%											DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA	
3.26.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		14.095.000,00	1	tahun dokumen	0,00	0,00	5	Media		1.265.000,00						RDIV01	%	2.183.000,00	91,03	%	15.278.000,00											DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA
3.26.02	PROGRAM PENGINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARAWISATA	-	46.543 orang	9.364.642.209,00	-	-	3.696.802.146,00	0,00		43.855.110,00								0,00	0,00	%	0,00	91,01	%										DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA	
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Mengelola Daya Tarik Wisata yang Berdaya Sains		119.808.000,00	1	sub kegiatan	138.194.637,00	0,00		7.641.000,00		sub kegiatan	90.800.895,00					0,00	0,00	%	0,00	91,01	%										DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA	
3.26.02.2.01.05	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Unggulan Pengembangan (Restoran, Bersejarah, Pemertabatan, Revitalisasi)	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Rencana Pengembangan (Restoran, Bersejarah, Pemertabatan, Revitalisasi)		119.808.000,00	12	lokasi	12.322.977,00	0,00	1	Kegiatan		7.641.000,00			lokasi	35.731.995,00	2	Lks	12.273.910,00	99,60	%	12.273.910,01												

Kode	Uraian/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPJMD/REKSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2024 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			I		II		III		IV		RKPD Kabupaten yang dievaluasi		RKPD Kabupaten s/d Tahun 2024		RKPD Tahun 2024 (%)		RKPD Tahun 2024 (%)												
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
3.27.01.2.06.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		63,574,207.00	3	laporan	107,280,000.00	1	Tahun	14,658,651.00		laporan	42,700,979.00		75,079,631.00	12	Bulan	105,443,372.00	98.29	%	105,443,372.00	91.01	%	169,017,579.00				DINAS PERTANTAN	
3.27.01.2.06.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		447,461,380.00	1	laporan	333,836,765.00	1	Tahun	62,774,772.00		laporan	61,126,000.00		287,863,784.00	1	Tahun	405,936,184.00	121.60	%	405,936,184.00	91.01	%	853,397,564.00				DINAS PERTANTAN	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah			254,085,250.00	-	-	927,153,200.00			136,212,412.00		-	198,369,533.00					0.00	%	0.00	%	0.00	91.01	%	254,085,250.00				DINAS PERTANTAN
3.27.01.2.09.01	Penghasilan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan yang Dipelebara dan Dibayarkan Pemerintah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perorangan Dinas yang Dipelebara dan Dibayarkan Pemerintah		344,530,500.00	25	unit	295,456,300.00	1	Tahun	42,542,412.00		unit	70,636,975.00				25	Unit	278,825,692.00	94.37	%	278,825,692.00	91.01	%	443,356,192.00				DINAS PERTANTAN
3.27.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Persewaan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelebara dan Dibayarkan Pemerintah		49,282,700.00	1	unit	60,000,000.00			89,920,000.00		unit	116,846,658.00		305,662,882.00	1	Unit	489,302,892.00	81.55	%	489,302,892.00	91.03	%	538,585,642.00				DINAS PERTANTAN	
3.27.01.2.09.05	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelebara		50,772,000.00	20	unit	31,696,900.00	1	Tahun	9,760,000.00		unit	10,666,320.00		25,709,000.00	1	Tahun	43,984,000.00	138.67	%	43,984,000.00	91.03	%	84,238,000.00				DINAS PERTANTAN	
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelebara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelebara/Direhabilitasi		-	1	unit	0.00			0.00		unit	0.00		RDIVOL	%	0.00	304,932,200.00	RDIVOL	%	304,932,200.00	91.03	%	304,932,200.00				DINAS PERTANTAN	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANTAN			90%	35,555,017,770.00		2,057,168,060.00	-	-	138,917,240.00		-	514,256,034.00		0.00	%	0.00	0.00	%	0.00	%	0.00	91.03	%	2,057,168,060.00	5.79			DINAS PERTANTAN
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertantern			1,205,628,376.90	-	-	2,725,837,495.00			128,917,340.00		-	289,127,348.00		0.00	%	0.00	0.00	%	0.00	%	0.00	91.03	%	1,205,628,376.90				DINAS PERTANTAN
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Petantern Sesuai Dengan Kondisi Komoditas dan Spesifik Lokasi	Jumlah Penggunaan Sarana Pendukung Petantern Sesuai Dengan Kondisi Komoditas dan Spesifik Lokasi		361,419,882.00	1	laporan	2,305,837,495.00	1	Paket	131,762,440.00		laporan	173,382,514.00		1,009,895,922.00	12	Kecamatan	2,923,544,896.00	126.79	%	2,923,544,896.00	91.03	%	3,284,964,778.00				DINAS PERTANTAN	
3.27.02.2.01.02	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Petantern	Jumlah Penggunaan Sarana Pendukung Petantern		-	1	laporan	420,000,000.00			115,744,834.00		laporan	115,744,834.00		521,825,034.00	2	Moditas Pang	607,410,500.00	144.62	%	607,410,500.00	91.03	%	607,410,500.00				DINAS PERTANTAN	
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hujan Pakan Ternak yang Sumbervna dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			851,539,684.00	-	-	13,184,588,971.00			84,263,000.00		-	225,128,686.00					12,543,576,400.00	95.14	%	12,543,576,400.00	91.03	%	13,395,116,984.00				DINAS PERTANTAN	
3.27.02.2.06.02	Pengadaan Hujan Pakan Ternak yang Sumbervna dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hujan Pakan Ternak yang Sumbervna dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		49,283,030.00	0	ton	999,998,072.00	1	Paket	53,633,000.00		ton	129,420,200.00		518,574,400.00	1	Ton	659,360,400.00	RDIVOL	%	659,360,400.00	91.03	%	659,360,400.00				DINAS PERTANTAN	
3.27.02.2.06.03	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbervna dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Bibit ternak yang sumbervna dari daerah kabupaten/kota lain		-	10000	ekor	12,184,580,999.00			56,768,468.00		ekor	95,705,000.00		-	%	0.00	0.00	%	0.00	%	0.00	91.03	%	-				DINAS PERTANTAN
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANTAN			90%	35,555,017,770.00		5,495,072,651.00	-	-	197,355,196.00		-	369,614,034.00		0.00	%	0.00	0.00	%	0.00	%	0.00	91.03	%	5,495,072,651.00	15.46			DINAS PERTANTAN
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertantern			917,290,925.00	-	-	416,700,580.00			91,250,186.00		-	72,679,000.00		0.00	%	0.00	0.00	%	0.00	%	0.00	91.03	%	917,290,925.00				DINAS PERTANTAN
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Petantern Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Petantern Lainnya		166,437,625.00	1	laporan	416,700,580.00	1	Tahun	62,681,396.00		laporan	0.00		203,687,096.00	3	Kelompok	499,836,896.00	119.95	%	499,836,896.00	91.03	%	666,274,521.00				DINAS PERTANTAN	
3.27.03.2.01.05	Pengadaan Lahan Petantern Pangan Berkelanjutan/P2B, Kawasan Petantern Pangan Berkelanjutan/KPB dan Lahan Cadangan Petantern Pangan Berkelanjutan/CPB yang dikelola	Lahan Petantern Pangan Berkelanjutan/P2B, Kawasan Petantern Pangan Berkelanjutan/KPB dan Lahan Cadangan Petantern Pangan Berkelanjutan/CPB yang dikelola		-	1	Dokumen	0.00			72,679,400.00		Dokumen	72,679,400.00				RDIVOL	%	0.00	%	0.00	91.03	%	-				DINAS PERTANTAN	
3.27.03.2.02	Pengembangan Prasarana Pertantern			2,625,097,744.00	-	-	9,136,743,860.00			106,105,000.00		-	286,934,634.00		0.00	%	0.00	0.00	%	0.00	%	0.00	91.03	%	2,625,097,744.00				DINAS PERTANTAN
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		1,866,621,044.00	4	unit	3,272,013,600.00		Km	0.00		unit	11,203,000.00		278,787,202.00	5	Unit	1,295,153,902.00	101.82	%	1,295,153,902.00	91.03	%	3,261,774,846.00				DINAS PERTANTAN	
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Petantern Lainnya	Jumlah Prasarana Petantern Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelebara		658,476,700.00	4	unit	7,798,925,260.00		Km	106,105,000.00		unit	257,444,634.00		7,788,302,314.00	12	Unit	7,099,943,343.00	93.04	%	7,099,943,343.00	91.03	%	7,758,420,043.00				DINAS PERTANTAN	
3.27.03.2.02.15	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Benar	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dioperasikan secara teratur		-	1	unit	65,905,000.00			28,067,000.00		unit	28,067,000.00		65,905,000.00	1	Unit	65,905,000.00	100.00	%	65,905,000.00	91.03	%	65,905,000.00				DINAS PERTANTAN	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			90%	4,051,196,915.00		693,721,442.00	-	-	716,110,901.00			34,053,260.00		130,736,900.00			0.00	%	0.00	%	0.00	91.03	%	693,721,442.00	17.32			DINAS PERTANTAN
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan,Penusutan dan Pembukaan Daerah Penyakit Hewan Menular dalam daerah Kabupaten/Kota			638,793,542.00	-	-	616,110,921.00			34,053,260.00		-	126,933,500.00		0.00	%	0.00	0.00	%	0.00	%	0.00	91.03	%	638,793,542.00				DINAS PERTANTAN
3.27.04.2.01.04	Pembinaan Masyarakat dalam Pencegahan Penyakit Hewan Menular	Jumlah kader zoonosis		306,386,776.00	1	orang	317,110,121.00	1	Kegiatan	33,073,260.00		orang	35,238,500.00		140,142,120.00	10	Kecamatan	285,429,198.00	90.01	%	285,429,198.00	91.03	%	593,815,974.00				DINAS PERTANTAN	
3.27.04.2.01.08	Pembinaan Penyulu Hewan Menular dari Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyulu atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dari zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		352,406,766.00	3	laporan	299,000,800.00	1	Kegiatan	480,000.00		laporan	91,595,000.00		208,339,100.00	7	Kecamatan	253,554,000.00	84.80	%	253,554,000.00	91.03	%	585,960,766.00				DINAS PERTANTAN	
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			0.00	-	-	0.00			0.00		-	0.00		0.00	%	RDIVOL	%	0.00	%	0.00	91.03	%	-				DINAS PERTANTAN	
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner		0.00	1	laporan	0.00	1	Kegiatan	0.00		laporan	0.00		RDIVOL	%	0.00	0.00	%	0.00	%	0.00	91.03	%	-				DINAS PERTANTAN
3.27.04.2.04	Pewagaan dan Pengawasan Penyehatan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			0.00	-	-	99,999,980.00			5,320,700.00		-	3,803,400.00		0.00	%	0.00	0.00	%	0.00	%	0.00	91.03	%	-				DINAS PERTANTAN
3.27.04.2.04.08	Pengikatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan dan Keagihan ternak	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesehatan dan keselamatan ternak		0.00	1	orang	62,038,960.00	3	Komoditas	5,320,700.00		orang	3,803,400.00		49,662,360.00	1	Kecamatan	59,777,760.00	96.36	%	59,777,760.00	91.03	%	59,777,760.00				DINAS PERTANTAN	
3.27.04.2.04.10	Pengawasan Unit Usaha Produk Ternak	Jumlah unit usaha produk ternak yang diawasi terhadap pemrosesan cara yang baik		0.00	1	unit usaha	37,961,020.00			0.00		unit usaha	28,631,500.00		33,791,550.00	1	Kecamatan	33,791,550.00	89.02	%	33,791,550.00	91.03	%	33,791,550.00				DINAS PERTANTAN	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANTAN			90%	1,515,217,984.00		324,035,288.00	-	-	21,																			

Kode	Uraian/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPJMD/REINSTRAT)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Tahun 2024 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			6		7		8		9		10		11		12		13		14 n + 7 + 23		15 = 14 / 6 x 100%				
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3.3.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-	-	-	3.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
3.3.01.2.13.01	Pengembangan Kolaborasi dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengembangan Kolaborasi dan Analisis Jabatan	-	-	0	Dokumen	3.800.000,00	-	0	Dokumen	3.600.000,00	3.600.000,00	0	Dokumen	3.600.000,00	94.74	%	3.600.000,00	91.01	%	3.600.000,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3.3.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah temuan pendirian baru/ekspansi yang tidak memenuhi standar	10 buah	1.268.124.260,00	321.122.827,00	80	%	85.188.580,00	40	Dokumen	20.977.518,00	1	kegiatan	38.418.318,00	38.418.318,00	45.10	%	38.418.318,00	91.01	%	359.540.345,00	28.35	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3.3.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minat G. 8 dan C untuk Pemroses dan Pemakai Luncuran Minit 8 Teras	Tertarikannya Pengendalian dan Penerbitan Pedagang Minuman Berakumulasi serta Minat Minat Izin	321.122.827,00	40	%	85.188.580,00	40	Dokumen	20.977.518,00	40	izin	38.418.318,00	38.418.318,00	45.10	%	38.418.318,00	91.01	%	359.540.345,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
3.3.02.2.05.01	Facilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Berakumulasi G. 8 dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengantar dan Pemangku Lapangan Minuman Berakumulasi G. 8 dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	321.122.827,00	50	Dokumen	85.188.580,00	40	Dokumen	20.977.518,00	40	izin	38.418.318,00	38.418.318,00	45.10	%	38.418.318,00	91.01	%	359.540.345,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
3.3.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meskipun Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 kali	2.080.100.150,00	662.723.784,00	-	-	731.211.060,00	8	laporan	0,00	15	peserta	79.835.008,00	79.835.008,00	10.92	%	79.835.008,00	91.01	%	742.558.792,00	35.70	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3.3.04.2.01	Meskipun Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	56.950.000,00	1	laporan	21.910.100,00	8	laporan	0,00	1	kegiatan	14.962.200,00	14.962.200,00	68.29	%	14.962.200,00	91.01	%	71.012.200,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
3.3.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	56.950.000,00	1	laporan	21.910.100,00	8	laporan	0,00	1	laporan	14.962.200,00	14.962.200,00	68.29	%	14.962.200,00	91.01	%	71.012.200,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
3.3.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar dan Kabupaten Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	208.005.074,00	1	laporan	80.495.260,00	8	laporan	0,00	1	kegiatan	64.872.808,00	64.872.808,00	9.52	%	64.872.808,00	91.01	%	671.546.592,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
3.3.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Operasi Pasar Regular dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	389.668.730,00	12	laporan	600.577.600,00	8	laporan	0,00	12	laporan	30.174.686,00	30.174.686,00	5.02	%	30.174.686,00	91.01	%	428.843.406,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
3.3.04.2.02.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	0,00	-	-	28.048.100,00	6	Dokumen	0,00	2	kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.01	%	0,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.3.04.2.03.01	Pemantauan Ketersediaan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Ketersediaan Legalitas Dokumen Perizinan	22.542.100,00	6	Dokumen	22.542.100,00	6	Dokumen	0,00	6	Dokumen	0,00	-	IVALUEI	0,00	-	IVALUEI	0,00	0,00	91.01	%	0,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.3.04.2.03.03	Pengawasan Pengawasan dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengembangan Penyaluran dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	5.506.000,00	12	laporan	5.506.000,00	12	laporan	0,00	12	laporan	0,00	-	IVALUEI	0,00	-	IVALUEI	0,00	0,00	91.01	%	0,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.3.06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINGKUNGAN KONSUMEN	-	90%	2.773.146.824,00	532.060.614,00	-	-	340.375.834,00	2	kegiatan	164.915.023,00	164.915.023,00	48.45	%	164.915.023,00	91.01	%	696.975.637,00	25.13	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					
3.3.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	532.060.614,00	-	-	340.375.834,00	2	kegiatan	164.915.023,00	164.915.023,00	48.45	%	164.915.023,00	164.915.023,00	48.45	%	164.915.023,00	91.01	%	696.975.637,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
3.3.06.2.01.01	Pengawasan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Penimbangan Lainnya	350.013.318,00	0	unit	191.382.560,00	0	unit	17.402.712,00	0	unit	113.366.923,00	113.366.923,00	59.24	%	113.366.923,00	91.01	%	463.380.241,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
3.3.06.2.01.02	Pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	182.047.296,00	0	orang	148.993.274,00	12	Kecamatan	24.154.506,00	0	orang	51.548.100,00	51.548.100,00	34.60	%	51.548.100,00	91.01	%	233.595.396,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
3.3.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DAERAH NEGERI	-	0,00	-	-	257.714.135,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3.3.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	0,00	-	-	257.714.135,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3.3.07.2.01.05	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	0,00	0	UMKM	257.714.135,00	0	UMKM	0,00	0	UMKM	110.088.200,00	110.088.200,00	42.72	%	110.088.200,00	91.01	%	110.088.200,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
3.3.1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	90%	16.554.168.621,00	4.210.896.254,00	-	-	522.468.354,00	90	%	64.740.999,00	-	357.680.142,00	362.854.142,00	69.45	%	362.854.142,00	91.01	%	4.573.710.396,00	27.63	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
3.3.1.01.2.01	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	36.448.665,00	-	-	3.687.200,00	0	1	kegiatan	3.687.200,00	100,00	0	kegiatan	3.687.200,00	3.687.200,00	100,00	%	3.687.200,00	91.01	%	34.136.865,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3.3.1.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	2	Laporan	3.687.200,00	1	Laporan	0,00	2	Laporan	3.687.200,00	3.687.200,00	100,00	%	3.687.200,00	91.01	%	3.687.200,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
3.3.1.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.373.226.840,00	-	-	5.174.000,00	0	2	kegiatan	5.174.000,00	100,00	0	kegiatan	5.174.000,00	5.174.000,00	100,00	%	5.174.000,00	91.01	%	2.378.402.940,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3.3.1.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	5.103.400,00	2	laporan	2.634.000,00	1	laporan	0,00	2	Laporan	0,00	2	Laporan	2.634.000,00	100,00	%	2.634.000,00	91.01	%	7.737.400,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3.3.1.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.387.100,00	12	Dokumen	2.540.000,00	12	Dokumen	0,00	12	Dokumen	0,00	12	Dokumen	2.540.000,00	100,00	%	2.540.000,00	91.01	%	12.927.300,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3.3.1.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	33.434.100,00	0	0	kegiatan	38.056.400,00	116,61	%	38.056.400,00	38.056.400,00	116,61	%	38.056.400,00	91.01	%	38.056.400,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
3.3.1.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD	23.622.500,00	12	laporan	19.527.700,00	12	laporan	19.527.700,00	12	laporan	19.527.700,00	19.527.700,00	82,18	%	19.527.700,00	91.01	%	19.527.700,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
3.3.1.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.174.000,00	2	laporan	17.353.700,00	0	2	laporan	17.353.700,00	798,24	%	17.353.700,00	17.353.700,00	798,24	%	17.353.700,00	91.01	%	17.353.700,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
3.3.1.01.2.03.06	Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah pada SKPD	2.174.000,00	12	laporan	2.174.000,00	12	laporan	2.174.000,00	12	laporan	2.174.000,00	2.174.000,00	29,00	%	2.174.000,00	91.01	%	2.174.000,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
3.3.1.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	42.000.000,00	-	-	37.835.000,00	1	kegiatan	37.835.000,00	100,00	0	kegiatan	37.835.000,00	37.835.000,00	100,00	%	37.835.000,00	91.01	%	79.835.000,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
3.3.1.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Alengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Alengkapannya	35.250.000,00	23	paket	37.835.000,00	55	stok	0,00	37	orang	37.835.000,00	37.835.000,00	100,00	%	37.835.000,00	91.01	%	73.085.000,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
3.3.1.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	779.549.996,00	-	-	80.826.207,00	0	0	kegiatan	42.520.000,00	52,61	%	42.520.000,00	42.520.000,00	52,61	%	42.520.000,00	91.01	%						

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPJMD/RESTRAT)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RPJMD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2024 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		Rp		24 = 7 +13				
			6		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		24 = 7 +13		25 = 14 / 6 x100%				
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pemahaman Dokumen Perubahan DPA-SKPD			21,097,280.00	1	Dokumen	7,572,000.00		1	Dokumen	0.00	0	Dokumen	976,500.00		8,548,500.00				99.96	%	7,569,000.00	91.01	%	28,666,280.00		SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD			876,636,645.00	12	Laporan	268,329,616.00	2	Dokumen	22,239,900.00	20	Laporan	123,535,638.00		412,062,035.00		267,864,538.00		99.83	%	267,864,538.00	91.01	%	1,144,503,183.00		SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah			8,629,263,337.00	3	Laporan	10,655,173,143.00	3	Laporan	1,468,041,374.00	11	Laporan	5,398,580,846.00		0.00	0.00	0.00				0.00	%	0.00	0.00	%	8,629,263,337.00		SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			8,427,721,701.00	89	Orang/bulan	10,635,668,663.00	93	Orang	1,468,041,374.00	8993	Orang/bulan	5,399,866,946.00		16,562,861,506.00		10,412,271,096.00		97.90	%	10,412,271,096.00	91.01	%	18,829,983,297.00		SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.01.2.02.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			114,264,316.00	1	Laporan	7,752,240.00	1	Laporan	0.00	0	Laporan	0.00		7,727,800.00		7,727,800.00		99.69	%	7,727,800.00	91.01	%	123,962,036.00		SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			86,277,500.00	1	Laporan	7,752,240.00	2	Laporan	0.00	4	Laporan	7,713,900.00		15,466,140.00		7,713,900.00		99.51	%	7,713,900.00	91.01	%	93,991,400.00		SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah pengadministrasian barang milik daerah pada perangkat daerah			275,064,015.00	3	Laporan	66,390,700.00	3	Kegiatan	7,430,000.00	11	Laporan	16,542,400.00		0.00	0.00	0.00				0.00	%	0.00	0.00	%	275,064,015.00		SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			66,717,000.00	3	Dokumen	25,000,000.00	1	Laporan	5,190,000.00	373	Dokumen	3,136,500.00		48,737,800.00		21,466,116.00		85.87	%	21,466,116.00	91.01	%	88,186,116.00		SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Goodwill Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			120,422,315.00	1	Laporan	14,975,400.00	1	Laporan	2,240,000.00	4	Laporan	0.00		15,260,200.00		13,252,316.00		88.49	%	13,252,316.00	91.01	%	133,674,631.00		SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.01.2.03.06	Pertastuasahan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pertastuasahan Barang Milik Daerah pada SKPD			87,928,700.00	1	Laporan	26,415,300.00	10	Jenis	0.00	4	Laporan	13,407,400.00		90,246,700.00		23,831,100.00		90.22	%	23,831,100.00	91.01	%	111,759,800.00		SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah			691,649,121.00	12	bulan	311,544,498.00	3	Dokumen	0.00	3	Dokumen	79,690,100.00		0.00	0.00	0.00				0.00	%	0.00	0.00	%	691,649,121.00		SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakelan Dinas Berserta Akibat Kelengkapanjasa	Jumlah Paket Pakelan Dinas berserta Akibat Kelengkapanjasa			113,750,000.00	1	paket	110,763,135.00	204	Snit	0.00	1	paket	0.00		237,165,000.00		237,165,000.00		214.12	%	237,165,000.00	91.01	%	360,915,000.00		SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengidatn Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengidatn Administrasi Kepegawaian			134,532,250.00	1	Dokumen	17,381,268.00	3	Dokumen	0.00	1	Dokumen	6,192,800.00		25,938,500.00		17,381,100.00		100.00	%	17,381,100.00	91.01	%	211,913,361.00		SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			309,470,430.00	1	Dokumen	4,995,000.00	3	Laporan	0.00	1	Dokumen	2,497,500.00		7,482,500.00		4,995,000.00		100.00	%	4,995,000.00	91.01	%	364,485,430.00		SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.01.2.05.10	Sosialisai Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisai Peraturan Perundang-Undangan			7,396,400.00	40	orang	28,998,455.00	40	Peserta	0.00	40	orang	0.00		28,998,315.00		-		0.00	%	-	91.01	%	-		SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.01.2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			0.00	15	orang	149,806,640.00	40	Peserta	0.00	15	orang	71,000,000.00		147,125,000.00		207,125,000.00		138.26	%	207,125,000.00	91.01	%	207,125,000.00		SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pengadministrasian data perangkat daerah			10,803,623,337.00	9	Laporan	5,392,051,603.00	1	Kegiatan	935,852,516.00	202	Laporan	2,313,177,990.00		0.00	0.00	0.00				0.00	%	0.00	0.00	%	10,803,623,337.00		SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didistribusikan			37,400,000.00	1	paket	33,590,800.00	350	Item	0.00	1/9	paket	17,060,000.00		59,263,500.00		33,400,000.00		99.43	%	33,400,000.00	91.01	%	70,800,000.00		SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Penilaian dan Peningkatan Kantor	Jumlah Paket Penilaian dan Peningkatan Kantor yang Didistribusikan			1,146,368,450.00	2	paket	1,198,888,203.00	12	Jenis	38,000,000.00	2/9	paket	149,022,250.00		1,770,230,949.00		2,333,962,600.00		194.68	%	2,333,962,600.00	91.01	%	3,474,333,052.00		SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Didistribusikan			688,718,312.00	2	paket	1,267,167,054.00	3	Jenis	414,055,000.00	2/9	paket	733,375,525.00		1,066,645,825.00		1,684,645,825.00		132.95	%	1,684,645,825.00	91.01	%	2,246,364,137.00		SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Didistribusikan			2,599,066,300.00	2	paket	88,105,854.00	2	Laporan	13,680,000.00	2/9	paket	32,602,200.00		1,027,807,600.00		92,865,300.00		105.40	%	92,865,300.00	91.01	%	2,693,931,600.00		SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Didistribusikan			376,163,000.00	4	Dokumen	145,521,000.00	4	SKH	0.00	4/9	Dokumen	72,644,400.00		254,617,650.00		145,503,000.00		99.99	%	145,503,000.00	91.01	%	521,666,000.00		SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Didistribusikan			710,554,100.00	3	paket	180,668,742.00	2	Jenis	21,933,400.00	3/9	paket	19,944,575.00		39,719,375.00		150,503,000.00		21.98	%	39,719,375.00	91.01	%	750,275,475.00		SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			1,286,902,244.00	1	Laporan	450,000,000.00	9	Jenis	51,958,500.00	10	Laporan	59,127,000.00		565,452,000.00		609,390,500.00		135.42	%	609,390,500.00	91.01	%	1,896,292,744.00		SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			3,880,514,369.00	120	Laporan	1,987,576,900.00	40	Kegiatan	395,007,416.00	129	Laporan	1,211,015,540.00		3,024,627,751.00		3,024,627,751.00		152.68	%	3,024,627,751.00	91.01	%	6,915,542,540.00		SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			210,536,540.00	1	Dokumen	40,532,620.00	1	Dokumen	1,217,700.00	1/9	Dokumen	18,386,100.00		58,918,700.00		18,386,100.00		46.36	%	18,386,100.00	91.01	%	238,922,840.00		SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintahan daerah			564,000,000.00	2	Kegiatan	647,836,404.00	1	Unit	893,600,000.00	9/4	Kegiatan	0.00		0.00	0.00	0.00				0.00	%	0.00	0.00	%	564,000,000.00		SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaran Perantara	Jumlah Unit Kendaran Perantara Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Didistribusikan			0.00	1	Unit	325,936,404.00	1/2	Unit	0.00	0.00	0.00			852,369,000.00		1,742,800,000.00		934.71	%	1,742,800,000.00	91.01	%	1,742,800,000.00		SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Didistribusikan			0.00	8	Unit	321,900,000.00	8	Unit	185,800,000.00	8/2	Unit	0.00		737,528,000.00		1,518,000,000.00		471.58	%	1,518,000,000.00	91.01	%	1,518,000,000.00		SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah			2,838,411,349.00	3	Laporan	3,520,882,740.00	3	Kegiatan	181,930,923.00	26	Laporan	1,685,523,878.00		0.00	0.00	0.00				0.00	%	0.00</					

Kode	Uraian/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPJMD/RESTRAT)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RPJMD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2024 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini	Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						I		II		III		IV				V		VI									
						9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x100%									
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
4.01.02.2.03	Facilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah ketersediaan produk hukum dan peningkatan pemahaman hukum dan bantuan hukum		868,995,983.00	40	produk hukum	515,024,756.00	1	Tahun	148,586,762.00	120	produk hukum	226,492,650.00				0.00	%	0.00	%	0.00	%	868,995,983.00	Rp	SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.02.2.03.01	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		492,090,838.00	40	Dokumen	114,718,256.00	80	Produk Hukum Daerah	41,431,780.00	40	Produk Hukum Daerah	70,125,342.00	212,378,388.00	185.13	%	212,378,388.00	91.01	%	704,469,206.00		SEKRETARIAT DAERAH					
4.01.02.2.03.02	Facilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum		232,061,224.00	4	kasus	216,319,160.00	2	Laporan	42,432,820.00	40	Produk Hukum Daerah	72,686,400.00	258,279,121.00	119.40	%	258,279,121.00	91.01	%	490,330,345.00		SEKRETARIAT DAERAH					
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		144,853,941.00	40	Dokumen	183,987,340.00	40	Produk Hukum	64,722,162.00	40	Produk Hukum Daerah	83,680,908.00	190,400,708.00	103.49	%	190,400,708.00	91.01	%	335,254,649.00		SEKRETARIAT DAERAH					
4.01.02.2.04	Facilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah kerjasama dalam daerah		235,993,069.00	1	Kegiatan	111,932,140.00	1	Kegiatan	7,930,380.00	1/1	Kegiatan	31,590,500.00		0.00	%	0.00	0.00	%	0.00	%	235,993,069.00		SEKRETARIAT DAERAH			
4.01.02.2.04.01	Facilitasi Kerja Sama Dalam Nagari	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Kerja Sama Dalam Nagari		235,993,069.00	1	Dokumen	111,932,140.00	1	Facilitasi	7,930,380.00	1/1	Facilitasi	31,590,500.00	144,283,033.00	128.90	%	144,283,033.00	91.01	%	380,278,102.00		SEKRETARIAT DAERAH					
04.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		100%	13,093,491,620.00			2,832,568,526.00	98	%	1,763,638,604.00	100	%	439,338,034.00	100	%	665,988,959.00		0.00	%	0.00	0.00	%	2,832,568,526.00		SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya kebijakan dan peningkatan dalam perekonomian kabupaten		1,059,990,523.00	95	%	393,475,494.00			9	Dokumen	89,362,006.00	8	%	197,823,709.00		0.00	%	0.00	0.00	%	0.00	%	1,059,990,523.00		SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		0.00	2	Dokumen	146,290,824.00			1	Laporan	9,432,600.00	2	Dokumen	68,428,600.00	193,745,000.00	132.44	%	193,745,000.00	91.01	%	193,745,000.00		SEKRETARIAT DAERAH			
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		1,059,990,523.00	6	Laporan	247,184,670.00			9	Kegiatan	79,929,406.00	6	Laporan	129,393,600.00	265,457,400.00	107.39	%	265,457,400.00	91.01	%	1,325,447,923.00		SEKRETARIAT DAERAH			
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi serta program dan kerjasama pembangunan daerah		443,742,189.00	95	%	453,309,332.00			3	Laporan	86,043,060.00	2	%	118,124,088.00		0.00	%	0.00	0.00	%	0.00	%	443,742,189.00		SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.03.2.02.01	Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah		227,394,629.00	1	Dokumen	380,463,312.00	1	Kegiatan	86,043,000.00	1	Dokumen	101,816,288.00	245,068,288.00	64.41	%	245,068,288.00	91.01	%	472,462,921.00		SEKRETARIAT DAERAH					
4.01.03.2.02.02	Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		216,347,560.00	1	Laporan	72,846,000.00	4	Laporan	0.00	1	Laporan	16,307,800.00	140,174,488.00	87,358,100.00	119.92	%	87,358,100.00	91.01	%	303,705,660.00		SEKRETARIAT DAERAH				
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa dan Sumberdaya Aparatur yang memiliki kompetensi		1,328,835,814.00	97	%	828,214,978.00	1	Tahun	226,520,000.00	155/14	%	297,243,571.00		0.00	%	0.00	0.00	%	0.00	0.00	%	0.00	%	1,328,835,814.00		SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		395,956,457.00	150	Dokumen	218,257,267.00	140	Paket	43,141,707.00	150	Dokumen	96,122,727.00	266,974,286.00	122.32	%	266,974,286.00	91.01	%	662,930,743.00		SEKRETARIAT DAERAH					
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		369,115,227.00	5	Dokumen	139,222,000.00	4	Laporan	69,844,799.00	5	Dokumen	39,571,400.00	186,547,150.00	133.99	%	186,547,150.00	91.01	%	545,722,377.00		SEKRETARIAT DAERAH					
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		573,709,130.00	14	Orang	470,735,711.00	3	Laporan	113,534,462.00	14	Orang	161,547,444.00	444,751,655.00	94.48	%	444,751,655.00	91.01	%	1,018,455,785.00		SEKRETARIAT DAERAH					
4.01.03.2.04	Pemantauan kebijakan sumberdaya Lintas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan kebijakan sumberdaya Lintas Daerah		0.00	90	%	76,639,800.00	1	Laporan	37,410,000.00	1	%	52,801,600.00		0.00	%	0.00	0.00	%	0.00	0.00	%	0.00	%	0.00		SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Ar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Usan Energi dan Ar, Pekerjaan Umum dan Pendetan Ruang, Perencanaan, Bakuat dan Kelelahan Pemukiman, Perencanaan		0.00	1	Dokumen	76,639,800.00	1	Laporan	37,410,000.00	1	Dokumen	52,801,600.00	87,109,300.00	113.66	%	87,109,300.00	91.01	%	87,109,300.00		SEKRETARIAT DAERAH					
04.02	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH																										
04.02.01	PROGRAM PENGUKUHAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	107,605,633,389.00			34,582,561,317.00	-	-	22,776,363,273.00			4,493,358,933.00	-											SEKRETARIAT DPRD		
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		79,960,700.00	-	-	52,022,942.00	100	%	0.00			-	0.00			0.00	0.00	%	0.00	0.00	%	79,960,700.00		SEKRETARIAT DPRD		
4.02.01.2.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		79,960,700.00	-	-	52,022,942.00	100	%	0.00			-	0.00			0.00	0.00	%	0.00	0.00	%	79,960,700.00		SEKRETARIAT DPRD		
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		23,060,100.00	5	Dokumen	30,141,393.00			5	Dokumen	0.00			0.00	4	Dokumen	27,584,000.00	4						SEKRETARIAT DPRD		
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		15,387,400.00	2	Dokumen	6,692,244.00			15	Dokumen	0.00			0.00	2		6,490,000.00	96.98	%	6,490,000.00	91.01	%	21,877,400.00		SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		22,443,700.00	2	Dokumen	6,692,220.00			15	Dokumen	0.00			0.00	2		7,834,000.00	118.32	%	7,834,000.00	91.01	%	29,577,700.00		SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		10,309,500.00	2	Dokumen	8,568,085.00			10	Dokumen	0.00			0.00	2		8,813,000.00	102.86	%	8,813,000.00	91.01	%	19,122,500.00		SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		2,773,546,837.00	-	-	2,899,667,915.00	25	Orang/ASN		338,202,877.00			-	0.00			0.00	0.00	%	0.00	0.00	%	2,773,546,837.00		SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaj dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaj dan Tunjangan ASN		2,773,546,837.00	25	Orang/butan	2,899,667,915.00	25	Orang/ASN		338,202,877.00			Orang/butan		25	Orang/ASN	2,244,511,891.00	25						SEKRETARIAT DPRD		
4.02.01.2.02.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Attribut Katering/laupannya		259,328,030.00	-	-	320,691,460.00	100	%		73,204,920.00			-	0.00			0.00	0.00	%	0.00	0.00	%	259,328,030.00		SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.02.03	Pengadaan Pakan Dinas beserta Attribut Katering/laupannya	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Attribut Katering/laupannya		259,328,030.00	-	-	320,691,460.00	100	%		73,204,920.00			-	0.00			0.00	0.00	%	0.00	0.00	%	259,328,030.00		SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.02.05	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Pemerintah Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Pemerintah Undangan		64,980,000.00	3	Paket	151,115,400.00			3	Paket/Jenis	0.00			0.00	3	Paket	141,650,000.00	93.74	%	141,650,000.00	91.01	%	206,630,000.00		SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Pemerintah Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Pemerintah Undangan		190,348,030.00	25	orang	169,576,560.00	25	orang/ASN		73,204,920.00			24	Orang	309,492,964.00	180.15	%	309,492,964.00	91.01	%	499,840,964.00		SEKRETARIAT DPRD			
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Attribut Katering/laupannya		2,546,678,890.00	-	-	3,268,637,138.00	100	%		370,687,515.00			-	0.00			0.00	0.00	%	0.00	0.00	%	2,546,678,890.00		SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bang																									

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPJMD/REKSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2024 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini	Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						I		II		III		IV															
						6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp					12	Rp	13	Rp	14 = 7 + 13	15 = 14 / 6 x100%
5.5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			178.315,672.00	12	Laporan	129.212.293.00	12	Laporan	21,091,654.00		Laporan	171,820,190.00	16	Laporan	212,362,790.00	12	Laporan	125,276,088.00	96.95	%	125,276,088.00	91.01	%	303,591,760.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usunan Pemerintahan Daerah	Persebaran Capaian Kebutuhan Penunjang Usunan Pemerintahan Daerah	596,543,118.00	100	%	519,638,367.00		38,907,465.00	%	982,093,168.00				0.00	%	0.00	91.01	%	596,543,118.00						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH		
5.5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Penorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakajnya	Jumlah Kendaraan Penorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakajnya	77,867,494.00	1	Unit	59,029,278.00	1	Unit	11,664,938.00	Unit	99,815,313.00	2	Unit	104,615,313.00	1	Unit	79,423,650.00	134.55	%	79,423,650.00	91.01	%	157,091,104.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	385,777,700.00	21	Unit	235,800,136.00	21	Unit	25,036,527.00	Unit	306,977,627.00	42	Unit	347,123,627.00	21	Unit	163,295,570.00	69.25	%	163,295,570.00	91.01	%	549,073,270.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	67,004,914.00	25	Unit	52,332,174.00	25	Unit	0.00	Unit	41,150,000.00	50	Unit	78,565,000.00	25	Unit	68,615,000.00	131.11	%	68,615,000.00	91.01	%	135,619,914.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	66,093,090.00	2	Unit	172,476,779.00	2	Unit	2,206,000.00	Unit	534,145,228.00	4	Unit	598,365,228.00	2	Unit	90,689,000.00	52.58	%	90,689,000.00	91.01	%	156,782,050.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rasio Dokumen Perencanaan daerah dan perangkat daerah yang selasai tepat waktu	100%	7,793,756,873.00	1,929,637,163.00	100	%	1,764,764,315.00	100	%	136,895,738.00	%	2,082,300,265.00				0.00	%	0.00	91.01	%	1,929,637,163.00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rasio Dokumen Perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah yang selasai tepat waktu	1,588,166,290.00	8	Dokumen	1,438,378,987.00	1	Dokumen	90,912,140.00	Dokumen	1,762,688,833.00				0.00	%	0.00	91.01	%	1,588,166,290.00					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH		
5.5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Pemecahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	984,660,340.00	3	Dokumen	519,862,118.00	3	Dokumen	50,291,140.00	Dokumen	658,680,051.00	5	Dokumen	896,780,891.00	3	Dokumen	611,364,237.00	117.60	%	611,364,237.00	91.01	%	1,596,024,577.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.5.01.02.2.01.02	Koordinasi Pemeliharaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Dokumen Kebijakan Lainnya	44,163,800.00	2	Dokumen	44,863,133.00	2	Dokumen	0.00	Dokumen	43,670,000.00	1	Dokumen	43,670,000.00	2	Dokumen	39,807,800.00	88.73	%	39,807,800.00	91.01	%	63,971,600.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	54,716,600.00	2	Berita Acara	26,554,708.00	2	Berita Acara	0.00	Berita Acara	52,454,068.00	3	Berita Acara	52,454,068.00	2	Berita Acara	16,989,850.00	63.98	%	16,989,850.00	91.01	%	71,706,450.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	50,370,800.00	2	Berita Acara	26,554,708.00	2	Berita Acara	0.00	Berita Acara	58,699,950.00	4	Berita Acara	58,699,950.00	2	Berita Acara	23,097,450.00	86.98	%	23,097,450.00	91.01	%	73,468,250.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	67,761,700.00	2	Berita Acara	100,099,960.00	2	Berita Acara	0.00	Berita Acara	94,234,250.00	4	Berita Acara	94,234,250.00	2	Berita Acara	48,735,900.00	48.69	%	48,735,900.00	91.01	%	116,497,600.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.5.01.02.2.01.06	Penyajian Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	90,136,000.00	1,128	Usulan	61,966,100.00	1,128	Usulan	40,621,000.00	Usulan	81,819,400.00	2,228	Usulan	81,819,400.00	1,128	Usulan	39,498,400.00	63.74	%	39,498,400.00	91.01	%	129,634,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Pendataan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Dintapkan (RPJDP/RPMD/RKPD)	296,397,090.00	2	Dokumen	658,478,260.00	2	Dokumen	0.00	Dokumen	773,141,114.00	3	Dokumen	793,577,814.00	2	Dokumen	546,881,570.00	83.05	%	546,881,570.00	91.01	%	843,718,620.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	179,254,353.00	95	%	83,946,403.00		11,406,766.00	%	66,350,804.00				0.00	%	0.00	91.01	%	179,254,353.00						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH		
5.5.01.02.2.02.02	Pembarisan dan Pembarahan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pembarisan Data dan Informasi	179,254,353.00	205	Orang	83,946,403.00	205	Orang	11,406,766.00	Orang	66,350,804.00	405	Orang	74,567,304.00	205	Orang	345,654,142.00	411.76	%	345,654,142.00	91.01	%	524,908,493.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.5.01.02.2.02.05	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota													7,221,100.00			rdhivui		0.00	91.01	%	0.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH		
5.5.01.02.2.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-Rata Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah	390,933,938.00	95	%	229,140,760.00		34,576,832.00	%	278,495,116.00				0.00	%	0.00	91.01	%	390,933,938.00						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH		
5.5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	154,409,250.00	6	Laporan	134,693,540.00	6	Laporan	18,171,200.00	Laporan	105,238,950.00	8	Laporan	107,811,650.00	6	Laporan	84,626,550.00	62.83	%	84,626,550.00	91.01	%	239,039,800.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkaita Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	235,623,780.00	3	laporan	94,440,220.00	3	Dokumen	16,405,632.00	laporan	147,621,766.00	5	Laporan	156,101,566.00	3	Laporan	80,541,738.00	85.28	%	80,541,738.00	91.01	%	316,165,518.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terwujudnya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas		100	%	13,298,165.00		0.00	%	7,221,100.00				0.00	%	0.00	91.01	%	0.00						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH		
5.5.01.02.2.04.01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola		2	Dokumen	13,298,165.00	2	Dokumen	0.00	Dokumen	7,221,100.00	3	Dokumen	24,087,300.00	2	Dokumen	51,525,900.00	387.47	%	51,525,900.00	91.01	%	51,525,900.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERKONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Cakupan wilayah pembangunan infrastruktur perdesaan, 2. Tersedianya dokumen penusunan kebijakan, perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar, 3. Rata-rata capaian kinerja dokumen renstra OPD bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam, 4. Persentase pembangunan infrastruktur yang terkendali, 5. Rata-rata capaian kinerja dokumen renstra OPD bidang sosial budaya.	95%	7,228,187,906.00	2,187,031,743.00	98	%	1,536,896,371.00		211,894,609.00	%	1,586,366,864.00			0.00	%	0.00	91.01	%	2,187,031,743.00						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rata-rata capaian kinerja dokumen renstra OPD bidang sosial budaya.	712,611,601.00	95	%	632,406,676.00		211,894,609.00	%	679,994,115.00				0.00	%	0.00	91.01	%	712,611,601.00							BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinerkonisasi Renstra/Renga dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	230,536,860.00	6	Laporan	189,128,192.00	6	Laporan	32,604,432.00	Laporan	247,266,672.00	10	Laporan	284,350,854.00	6	Laporan	185,829,770.00	98.15	%	185,829,770.00	91.01	%	416,366,630.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinerkonisasi Renstra/Renga dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	482,074,741.00	6	Laporan	443,078,484.00	6	Laporan	68,749,214.00	Laporan	432,727,443.00	11	Laporan	567,533,699.00	6	Laporan	381,138,797.00	86.02	%	381,138,797.00	91.01	%	863,213,538.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tersusunnya dokumen penusunan kebijakan perencanaan perekonomian, sumber daya alam dan lingkungan hidup	471,930,594.00	95	%	454,991,625.00		66,699,832.00	%	408,849,087.00				0.00	%	0.00	91.01	%	471,930,594.00							BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinerkonisasi Renstra/Renga dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	213,228,041.00	0	Laporan	295,503,609.00	3	Laporan	41,438,766.00	Laporan	243,894,852.00	4	Laporan	328,500,562.00	3	Laporan	190,392,444.00	64.43	%	190,392,444.00	91.01	%	403,620,485.00			BADAN PERENCANA	

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPJMD/REKSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2024 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			I		II		III		IV																						
			K	6	Rp	K	7	Rp	K	8	Rp	K	9	Rp	K	10	Rp	K	11	Rp	K	12	Rp	K	13		Rp		14 + 7 + 13	Rp	15 + 14 + 6 + 1300
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pemenuhan Dokumen DPA-SKPD				0,00	1	Dokumen	6.016.992,00	1	Dokumen	2.437.500,00	1	Dokumen	4.635.000,00							5.775.000,00	95,98	%	5.775.000,00	91,01	%	5.775.000,00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pemenuhan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0,00	1	Dokumen	5.994.348,00	0	Dokumen	0,00		Dokumen	0,00							0,00	0,00	%	0,00	91,01	%	0,00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD		9.501.500,00		3	Dokumen	5.724.251,00	0	Dokumen	0,00	Dokumen	2.906.800,00								3.552.000,00	62,05	%	3.552.000,00	91,01	%	13.453.500,00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.251.973.890,00		-	-	4.645.906.921,00			590.242.076,00	-	2.614.501.239,00								0,00	0,00	%	0,00	91,01	%	4.251.973.890,00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		4.164.700.678,00		43	Orang/bulan	4.625.164.570,00	43	Orang	599.214.576,00	Orang/bulan	2.609.958.039,00								4.393.607.293,00	94,91	%	4.393.607.293,00	91,01	%	8.558.307.971,00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.02.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pemenuhan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		14.185.900,00		1	Laporan	5.589.539,00	0	Laporan	0,00	Laporan	0,00								3.435.000,00	61,45	%	3.435.000,00	91,01	%	17.620.900,00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD		86.565.602,00		1	Laporan	7.669.506,00	1	Laporan	780.000,00	Laporan	2.761.400,00								6.676.000,00	87,05	%	6.676.000,00	91,01	%	93.241.602,00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		5.220.000,00		12	Dokumen	3.483.306,00	12	Dokumen	247.500,00	Dokumen	1.781.600,00								2.531.600,00	72,68	%	2.531.600,00	91,01	%	7.736.800,00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			351.741.916,00		-	-	225.505.550,00			26.158.781,00	-	176.238.000,00								0,00	0,00	%	0,00	91,01	%	351.741.916,00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakikan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakikan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		148.824.100,00		1	Paket	93.822.750,00	1	Paket	0,00	Paket	81.128.790,00								81.128.790,00	86,47	%	81.128.790,00	91,01	%	229.952.890,00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		202.516.516,00		12	Orang	131.682.800,00	12	Orang	26.158.781,00	Orang	95.109.210,00								114.575.067,00	87,01	%	114.575.067,00	91,01	%	317.491.983,00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.364.999.540,00		-	-	1.786.533.381,00			78.424.040,00	-	450.489.731,00								0,00	0,00	%	0,00	91,01	%	1.364.999.540,00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		41.492.900,00		1	Paket	18.988.528,00	1	Paket	6.778.000,00	Paket	8.005.000,00								18.898.000,00	99,32	%	18.898.000,00	91,01	%	60.350.900,00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Perlengkapan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlengkapan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan		63.710.590,00		1	Paket	469.887.076,00	1	Paket	0,00	Paket	48.405.250,00								152.094.450,00	32,37	%	152.094.450,00	91,01	%	770.895.440,00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		61.791.000,00		1	Paket	44.998.286,00	1	Paket	0,00	Paket	20.812.000,00								44.803.000,00	99,57	%	44.803.000,00	91,01	%	126.584.900,00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggantian yang Disediakan		37.640.800,00		2	Paket	20.530.671,00	2	Jenis	0,00	Paket	6.165.000,00								20.481.500,00	99,76	%	20.481.500,00	91,01	%	58.122.300,00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		38.280.000,00		6	Dokumen	18.388.500,00	6	Bahan	4.090.000,00	Dokumen	9.180.000,00								18.360.000,00	99,85	%	18.360.000,00	91,01	%	56.840.000,00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		0,00		1	Paket	0,00	1	Paket	0,00	Paket	0,00								0,00	0,00	%	0,00	91,01	%	0,00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.06.08	Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		0,00		1	Laporan	36.028.380,00	18	%	6.037.000,00	Laporan	19.762.000,00								32.777.900,00	90,98	%	32.777.900,00	91,01	%	32.777.900,00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		547.293.859,00		10	Laporan	370.561.900,00	10	Stakeholder	61.029.040,00	Laporan	338.080.481,00								775.809.345,00	209,36	%	775.809.345,00	91,01	%	1.322.902.204,00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Aspek Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Aspek Dinamis pada SKPD		0,00	1.5E+07	dokumen	807.132.040,00	1	dokumen	0,00	dokumen	0,00									802.530.000,00	99,43	%	802.530.000,00	91,01	%	802.530.000,00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.67	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			749.000.000,00		-	-	15.447.569.905,00			0,00	-	9.706.153.328,00								0,00	0,00	%	0,00	91,01	%	749.000.000,00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		749.000.000,00		12	Unit	15.447.569.905,00	12	Unit	0,00	Unit	9.706.153.328,00								15.337.202.000,00	99,29	%	15.337.202.000,00	91,01	%	16.086.202.000,00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0,00	3	Unit	0,00	3	Jenis	0,00	Unit	0,00									0,00	0,00	%	0,00	91,01	%	0,00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.064.492.647,00		-	-	647.007.953,00			150.369.724,00	-	265.377.551,00								0,00	0,00	%	0,00	91,01	%	1.064.492.647,00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		28.822.100,00		1	Laporan	8.924.400,00	612	tembol	0,00	Laporan	3.900.000,00								7.122.000,00	79,80	%	7.122.000,00	91,01	%	35.944.100,00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		420.748.969,00		8	Laporan	277.846,00	8	Rekening	45.631.432,00	Laporan	89.792.423,00								248.611.010,00	89,48	%	248.611.010,00	91,01	%	699.359.979,00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		624.921.598,00		2	Laporan	360.235.053,00	2	Jenis	104.738.292,00	Laporan	171.665.128,00								196.393.128,00	54,52	%	196.393.128,00	91,01	%	821.314.726,00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.373.094.500,00		-	-	803.504.693,00			186.307.135,00	-	505.205.960,00								0,00	0,00	%	0,00	91,01	%	1.373.094.500,00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan pemenuhan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan diberikan Pajak dan Pemenuhan		707.023.000,00		30	Unit	433.123.851,00	30	Unit	122.439.635,00	Unit	297.265.560,00								509.758.860,00	117,15	%	509.758.860,00	91,01	%	1.218.791.860,00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan/Rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan/Rehabilitasi		666.071.500,00		4	Unit	368.380.842,00	4	Gedung	63.867.500,00	Unit	207.940.400,00								381.456.200,00	103,55	%	381.456.20							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPJMD-RESTRAN)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RPJMD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2024 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			I		II		III		IV		K		K		K		K		24 = 7 +13		24 = 14 / 6 x100%						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
5.02.02.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		0,00	100	orang	142.685.404,00	100	orang	95.070.100,00		orang	39.419.477,00				58.671.677,00	41,12	%	58.671.677,00	91,01	%	58.671.677,00	100	%	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.04	Pemenuhan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				-	-	190.925.733.630,00		-	245.000.000,00		-	25.016.923.655,00				0,00	0,00	%	0,00	91,01	%	60.853.729.241,00	100	%	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.04.09	Analisis Perencanaan dan Penyusunan Rencana Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyusunan Rencana Keuangan		1	Laporan	186.175.733.630,00	1	Laporan	245.000.000,00		Laporan	24.514.458.855,00					210.965.961.857,00	113,32	%	210.965.961.857,00	91,01	%	271.599.597.238,00	100	%	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendukung	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendukung		1	Laporan	4.750.000.000,00	1	Laporan	0,00		Laporan	102.465.000,00					196.967.042,00	4,15	%	196.967.042,00	91,01	%	416.900.902,00	100	%	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah - Urusan Keuangan Daerah			-	-	200.540.046,00	-	12.029.366,00	-	102.747.888,00		-	175.867.988,00				0,00	0,00	%	0,00	91,01	%	638.625.251,00	100	%	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Urusan Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		4	Dokumen	200.540.046,00	1	paket	12.029.366,00		Dokumen	102.747.888,00					175.867.988,00	87,70	%	175.867.988,00	91,01	%	814.693.239,00	100	%	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.03	PROGRAM PENGLOLAAN BARANG MILK DAERAH							62.209.932,00		210.654.827,00							0,00	0,00	%	0,00	91,01	%	2.282.617.863,00	100	%	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milk Daerah				-	-	860.468.784,00	-	62.209.932,00	-	210.654.827,00		-	210.654.827,00			0,00	0,00	%	0,00	91,01	%	2.282.617.863,00	100	%	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun		1	Dokumen	64.031.000,00	1	Pemoran	0,00		Dokumen	8.681.950,00					38.258.984,00	59,01	%	38.258.984,00	91,01	%	914.240.613,00	100	%	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milk Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milk Daerah		5	Dokumen	17.092.439,00	5	Jenis	0,00		Dokumen	0,00					12.670.494,00	74,13	%	12.670.494,00	91,01	%	117.929.894,00	100	%	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.03.2.01.05	Pemenuhan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Pemenuhan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		1	Laporan	106.773.428,00	1	Dokumen	18.334.632,00		Laporan	45.469.932,00					53.309.932,00	49,93	%	53.309.932,00	91,01	%	114.272.210,00	100	%	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milk Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milk Daerah		1	Laporan	0,00	1	Laporan	0,00		Laporan	0,00					0,00	0,00	%	0,00	91,01	%	256.299.039,00	100	%	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milk Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milk Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milk Daerah		1	Laporan	109.216.594,00	1	Laporan	7.220.700,00		Laporan	5.961.800,00					25.808.684,00	23,63	%	25.808.684,00	91,01	%	48.348.334,00	100	%	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.03.2.01.09	Pemenuhan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milk Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemenuhan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milk Daerah		38	Laporan	301.101.333,00	39	Perangkat Daerah	2.085.700,00		Laporan	47.955.713,00					339.152.948,00	112,64	%	339.152.948,00	91,01	%	734.171.705,00	100	%	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemeliharaan, Pemenuhan, dan Penghapusan Barang Milk Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemeliharaan, Pemenuhan, dan Penghapusan Barang Milk Daerah		5	Dokumen	114.979.215,00	5	Jenis	6.236.700,00		Dokumen	37.002.208,00					116.410.606,00	101,24	%	116.410.606,00	91,01	%	227.807.156,00	100	%	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milk Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah		1	Laporan	63.561.648,00	1	Laporan	1.325.000,00		Laporan	7.650.000,00					12.470.000,00	19,62	%	12.470.000,00	91,01	%	95.288.800,00	100	%	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah	Jumlah Laporan Barang Milk Daerah yang Disusun		1	Laporan	82.913.112,00	1	Laporan	26.507.200,00		Laporan	57.733.224,00					59.704.234,00	72,01	%	59.704.234,00	91,01	%	75.999.234,00	100	%	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.03	BADAN PENDAPATAN DAERAH																0,00	0,00	%	0,00	91,01	%	0,00	100	%	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				100%		32.143.973.103,00	5.658.158.463,00	100	%	8.917.902.853,00	25	%	2.044.515.330,00	%	3.288.640.264,00		0,00	0,00	%	0,00	91,01	%	5.658.158.463,00	100	%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.03.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang terdistribusi		6	Jenis	140.802.714,00	16	%	22.070.200,00		Jenis	99.682.095,00					0,00	0,00	%	0,00	91,01	%	71.128.680,00	100	%	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.03.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4	Dokumen	62.631.738,00	1	Dokumen	3.550.800,00		Dokumen	51.198.930,00					124.296.920,00	198,46	%	124.296.920,00	91,01	%	137.495.820,00	100	%	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.03.01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0	Dokumen	4.939.500,00	0	Dokumen	0,00		Dokumen	0,00	2	Dokumen	4.939.320,00	3	Dokumen	9.878.640,00	199,99	%	9.878.640,00	91,01	%	18.348.420,00	100	%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.03.01.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0	Dokumen	4.717.500,00	0	Dokumen	0,00		Dokumen	0,00	3	Dokumen	9.429.460,00	3	Dokumen	9.429.460,00	199,88	%	9.429.460,00	91,01	%	15.974.020,00	100	%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.03.01.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2	Dokumen	4.939.500,00	2	Dokumen	4.939.320,00		Dokumen	9.878.640,00	3	Dokumen	9.878.640,00	3	Dokumen	9.878.640,00	199,99	%	9.878.640,00	91,01	%	18.458.840,00	100	%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.03.01.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0	Dokumen	0,00	0	Dokumen	0,00		Dokumen	0,00	3	Dokumen	8.616.720,00	3	Dokumen	8.616.720,00	199,99	%	8.616.720,00	91,01	%	15.380.730,00	100	%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.03.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD		5	Laporan	59.265.900,00	5	Laporan	13.580.080,00		Laporan	43.543.845,00	10	Laporan	138.846.625,00	10	Laporan	118.065.925,00	199,21	%	118.065.925,00	91,01	%	131.265.925,00	100	%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.03.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																0,00	0,00	%	0,00	91,01	%	0,00	100	%	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.03.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Mengikuti Gaji dan Tunjangan ASN		35	Orang	7.096.012.118,00	36	Orang	1.660.168.108,00		Orang	6.571.370.509,00	70	Orang	9.508.787.182,00	134,71	%	9.508.787.182,00	191,03	%	9.508.787.182,00	91,03	%	17.750.900.855,00	100	%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.03.01.02.02	Pelaksanaan Pemenuhan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pemenuhan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan SKPD		24	Dokumen	12.555.864,00	24	Dokumen	48.779.584,00		Dokumen	16.663.338,00	48	Dokumen	226.557.662,00	228,40	%	226.557.662,00	91,01	%	289.203.608,00	100	%	2.205.571.028,00	100	%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.03.01.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2	Laporan	5.288.040,00	0	Laporan	0,00		Laporan	5.287.800,00	4	Laporan	10.575.600,00	4	Laporan	10.575.600,00	199,99	%	10.575.600,00	91,01	%	22.159.040,00	100	%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.03.01.02.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/Semesteran SKPD		0	Laporan	4.730.500,00	0	Laporan	0,00		Laporan	0,00	4	Laporan	8.546.760,00	4	Laporan	8.546.760,00	199,99	%	8.546.760,00	91,01	%	17.613.960,00	100	%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.03.01.03	Administrasi Barang Milk Daerah pada Perangkat Daerah yang harus disusun	Jumlah Jenis Administrasi BMD pada Perangkat Daerah yang harus disusun		2	Jenis	6.896.430,00	0	%	0,00		Jenis	4.631.970,00					0,00	0,00	%	0,00	91,01	%	4.631.700,00	100	%	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.03.01.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milk Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milk Daerah SKPD		2	Dokumen	2.264.400,00	0	Dokumen																			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPJMD/REKSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2024 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini	Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						I		II		III		IV		V		VI													
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp				
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		86,070,336.00	4	Laporan	51,288,420.00	4	Laporan	10,754,044.00				7	Laporan	81,153,308.00	8	Laporan	97,213,308.00	189.54	%	97,213,308.00	91.01	%	183,263,644.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH		
05.03	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																			0.00	%	0.00	91.01	%	0.00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
05.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	100%	24,478,969,470.00			5,998,061,923.00	-	-	5,722,066,012.00	100	%	858,576,511.00	-		7,430,294,921.00				0.00	%	0.00	91.01	%	5,998,061,923.00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		129,045,900.00	-	-	59,957,672.00	12	Dokumen	30,380,100.00				-		139,868,900.00				0.00	%	0.00	91.01	%	129,045,900.00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		52,970,700.00	2	Dokumen	10,654,668.00	2	Dokumen	4,824,400.00				Dokumen	25,188,100.00	2	Dokumen	27,175,600.00	2	Dokumen	56,485,100.00	530.14	%	56,485,100.00	91.01	%	109,495,800.00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		12,193,600.00	1	Dokumen	7,088,561.00	2	Dokumen	5,058,000.00				Dokumen	13,144,000.00	2	Dokumen	13,144,000.00	2	Dokumen	7,086,000.00	99.96	%	7,086,000.00	91.01	%	19,279,600.00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		12,189,700.00	1	Dokumen	7,088,561.00	2	Dokumen	0.00				Dokumen	14,944,800.00	2	Dokumen	22,408,200.00	2	Dokumen	10,940,400.00	154.34	%	10,940,400.00	91.01	%	23,130,100.00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		12,177,400.00	1	Dokumen	7,088,561.00	2	Dokumen	5,988,300.00				Dokumen	13,074,300.00	2	Dokumen	15,061,800.00	2	Dokumen	11,070,000.00	156.17	%	11,070,000.00	91.01	%	23,247,400.00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		14,035,000.00	1	Dokumen	7,426,481.00	2	Dokumen	0.00				Dokumen	13,437,300.00	2	Dokumen	15,282,300.00	2	Dokumen	12,525,900.00	168.67	%	12,525,900.00	91.01	%	26,560,900.00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD		25,479,500.00	1	Laporan	20,610,840.00	2	Dokumen	14,509,400.00				Laporan	60,080,400.00	2	Dokumen	65,351,200.00	2	Dokumen	66,310,200.00	321.72	%	66,310,200.00	91.01	%	91,789,700.00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		2,568,169,114.00	-	-	3,927,008,144.00	95	%	369,226,904.00				-		4,443,169,703.00				0.00	%	0.00	91.01	%	2,568,169,114.00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		2,370,246,030.00	25	orang/bulan	3,894,709,624.00	21	Pegawai	343,559,172.00				orang/bulan	4,301,912,375.00	21	Pegawai	5,265,711,053.00	21	Pegawai	3,532,303,084.00	90.69	%	3,532,303,084.00	91.01	%	5,902,549,114.00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		14,886,000.00	2	Laporan	7,992,000.00	1	Dokumen	0.00				Laporan	12,900,000.00	1	Dokumen	12,900,000.00	1	Dokumen	7,989,600.00	99.97	%	7,989,600.00	91.01	%	22,895,600.00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		91,185,960.00	12	Laporan	12,496,600.00	12	Laporan	13,722,666.00				Laporan	64,229,764.00	12	Laporan	66,891,964.00	12	Laporan	16,689,300.00	133.55	%	16,689,300.00	91.01	%	107,875,260.00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		91,871,124.00	12	Dokumen	11,809,920.00	12	Dokumen	11,945,066.00				Dokumen	64,127,564.00	12	Dokumen	66,097,064.00	12	Dokumen	16,404,900.00	138.91	%	16,404,900.00	91.01	%	108,276,024.00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-		20,713,390.00	-	-	11,870,780.00	1	Laporan	1,890,000.00				-		25,184,900.00				0.00	%	0.00	91.01	%	20,713,390.00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5.03.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		20,713,390.00	12	Laporan	11,870,780.00	1	Laporan	1,890,000.00				Laporan	25,184,900.00	1	Laporan	26,785,100.00	1	Laporan	13,442,500.00	113.24	%	13,442,500.00	91.01	%	34,195,800.00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		631,214,794.00	-	-	426,312,010.00	95	%	126,844,122.00				-		638,364,798.00				0.00	%	0.00	91.01	%	631,214,794.00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakelan Dinas beserta Akibat Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Akibat Kelengkapannya			55	Paket	30,000,000.00							Paket	0.00			55	paket	84,060,000.00	280.20	%	84,060,000.00	91.01	%	84,060,000.00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		185,241,640.00	3	Dokumen	96,076,140.00	54	stel	0.00				Dokumen	252,366,802.00	3	Kegiatan	276,885,220.00	3	Kegiatan	95,793,018.00	99.71	%	95,793,018.00	91.01	%	281,034,658.00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		86,243,514.00	2	Dokumen	179,873,170.00	3	Kegiatan	76,934,513.00				Dokumen	189,194,260.00	1	Dokumen	214,507,150.00	1	Dokumen	181,772,258.00	101.06	%	181,772,258.00	91.01	%	268,015,772.00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		254,094,775.00	2	Dokumen	120,362,700.00	3	Dokumen	12,153,400.00				Dokumen	198,803,736.00	3	Dokumen	242,927,958.00	3	Dokumen	141,240,449.00	117.35	%	141,240,449.00	91.01	%	395,335,224.00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													12	Dokumen	121,532,105.00	12	Dokumen	72,739,335.00	91.01	%	72,739,335.00	91.01	%	72,739,335.00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		1,106,546,713.00	-	-	547,895,766.00	95	%	139,085,975.00				-		1,062,544,061.00				0.00	%	0.00	91.01	%	1,106,546,713.00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisialkan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisialkan		15,592,625.00	0	Paket	8,592,500.00	4	Paket	2,211,900.00				Paket	15,584,900.00	4	Paket	15,584,900.00	4	Paket	8,586,000.00	99.92	%	8,586,000.00	91.01	%	24,178,625.00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Didisialkan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Didisialkan		18,724,800.00	4	Paket	10,860,000.00	5	Paket	1,982,000.00				Paket	21,417,000.00	5	Paket	23,981,000.00	5	Paket	10,852,000.00	99.93	%	10,852,000.00	91.01	%	29,578,800.00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Didisialkan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Didisialkan		123,820,700.00	2	Paket	51,980,000.00	12	Paket	10,803,000.00				Paket	72,786,500.00	12	Paket	77,751,500.00	12	Paket	51,941,500.00	99.93	%	51,941,500.00	91.01	%	175,762,200.00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Didisialkan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Didisialkan		9,975,000.00	24	Dokumen	5,175,000.00	12	Dokumen	1,275,000.00				Dokumen	7,650,000.00	12	Dokumen	8,925,000.00	12	Dokumen	5,100,000.00	98.55	%	5,100,000.00	91.01	%	15,075,000.00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material yang Didisialkan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Didisialkan		191,616,100.00	24	Paket	124,374,066.00	4	Paket	0.00				Paket	264,059,300.00	4	Paket	303,589,300.00	4	Paket	123,998,500.00	9							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPJMD/RESTRAT)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RPJMD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2024 (Tahun n-1) atau RKPD yang dievaluasi saat ini		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp				
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengabdian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengabdian ASN			313,623,989.00	3	Dokumen	100,388,340.00	1	Dokumen	48,817,039.00		Dokumen	239,639,131.00	1	Dokumen	239,639,131.00	1	Dokumen	140,185,311.00	139.64	%	140,185,311.00	91.01	%	453,809,300.00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitas Pengabdian PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengabdian PNS dan PPPK			306,100,900.00	3	Dokumen	642,264,200.00	2	Kegiatan	1,974,000.00		Dokumen	326,536,132.00	2	Dokumen	466,708,149.00	2	Dokumen	455,179,458.00	70.87	%	455,179,458.00	91.01	%	761,280,358.00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			223,217,647.00	30	Dokumen	138,324,000.00	20	Dokumen	15,959,317.00		Dokumen	130,286,489.00	20	Dokumen	150,786,389.00	20	Dokumen	108,835,514.00	78.68	%	108,835,514.00	91.01	%	332,053,161.00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.02.2.01.11	Pengabdian Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Data Kepegawaian			365,247,921.00	3	Dokumen	75,171,200.00	2	Dokumen	25,131,781.00		Dokumen	116,602,990.00	2	Dokumen	146,571,818.00	2	Dokumen	90,699,733.00	114.56	%	90,699,733.00	91.01	%	255,947,654.00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-			910,420,715.00	-	-	603,895,680.00	90	%	90,824,030.00		-	862,548,056.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	91.01	%	910,420,715.00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5.03.02.2.02.01	Pengabdian Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah			139,619,826.00	50	Dokumen	53,453,900.00	20	Dokumen	25,647,766.00		Dokumen	99,916,000.00	20	Dokumen	104,644,000.00	20	Dokumen	53,338,647.00	99.78	%	53,338,647.00	91.01	%	192,958,473.00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.02.2.02.02	Pengabdian Kenakan Pangkat ASN	Jumlah Pengabdian Kenakan Pangkat ASN			174,811,882.00	230	Dokumen	151,143,640.00	200	Dokumen	20,663,898.00		Dokumen	219,118,435.00	200	Dokumen	254,499,031.00	200	Dokumen	175,841,451.00	116.34	%	175,841,451.00	91.01	%	350,653,333.00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.02.2.02.03	Pengabdian Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Promosi ASN			595,989,007.00	5	Dokumen	399,288,140.00	2	Dokumen	44,512,366.00		Dokumen	543,513,621.00	2	Dokumen	599,695,047.00	2	Dokumen	382,997,251.00	95.92	%	382,997,251.00	91.01	%	978,986,258.00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-			1,653,151,934.00	-	%	551,303,845.00	95	%	180,003,138.00		%	858,955,640.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	91.01	%	1,653,151,934.00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya			247,380,768.00	55	Orang	105,039,800.00	20	Orang	108,925,007.00		Orang	461,337,041.00	20	Orang	492,212,641.00	20	Orang	490,246,525.00	466.72	%	490,246,525.00	91.01	%	737,627,293.00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.02.2.03.04	Pengabdian Pendidikan Layutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Layutan			1,279,309,766.00	5	Orang	380,542,848.00	9	Orang	47,493,833.00		Orang	215,566,459.00	9	Orang	241,182,601.00	9	Orang	251,655,018.00	66.13	%	251,655,018.00	91.01	%	1,530,964,784.00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diskat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diskat			119,071,900.00	5	Dokumen	44,215,200.00	1	Kegiatan	23,584,300.00		Dokumen	120,262,000.00	1	Kegiatan	126,168,000.00	1	Kegiatan	87,784,882.00	198.54	%	87,784,882.00	91.01	%	206,856,792.00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.02.2.03.14	Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir			7,389,500.00	5	Orang	21,505,997.00	4	Orang	0.00		Orang	61,759,540.00	4	Orang	61,759,540.00	4	Orang	218,969,164.00	1,018.18	%	218,969,164.00	91.01	%	226,358,664.00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-			282,571,213.00	-	-	129,426,200.00			39,024,935.00		-	184,260,729.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	91.01	%	282,571,213.00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5.03.02.2.04.04	Pengabdian Pembinaan Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan			44,387,400.00	56	Orang	35,196,000.00	50	Orang	14,504,923.00		Orang	34,333,223.00	50	Orang	54,341,291.00	50	Orang	33,538,518.00	95.29	%	33,538,518.00	91.01	%	77,905,918.00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Disiplin			114,388,500.00	5	Orang	43,115,800.00	3	Orang	16,121,446.00		Orang	81,727,142.00	3	Orang	91,857,542.00	3	Orang	49,887,800.00	115.71	%	49,887,800.00	91.01	%	164,276,300.00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.02.2.04.08	Pengabdian Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengabdian Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			123,815,313.00	5	Laporan	51,114,400.00	3	Laporan	8,398,566.00		Laporan	68,190,364.00	3	Laporan	72,503,464.00	3	Laporan	49,555,000.00	96.95	%	49,555,000.00	91.01	%	173,370,313.00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
05.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	150 Orang		12,664,652,072.00			919,813,120.00	100	%	49,683,568.00		-	1,632,280,710.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	91.01	%	919,813,120.00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-			919,813,120.00	-	-	1,560,563,900.00	2	Kegiatan	49,683,568.00		-	1,632,280,710.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	91.01	%	919,813,120.00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5.04.02.2.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pendidikan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Praktekaban, serta Jabatan Fungsional yang Disertifikasi	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pendidikan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Praktekaban, serta Jabatan Fungsional yang Disertifikasi			919,813,120.00	50	Dokumen	1,560,563,900.00	2	Kegiatan	49,683,568.00		Dokumen	1,632,280,710.00	3 dan 2	Laporan dan Kegiatan	2,452,401,884.00	3 dan 2	Laporan dan Kegiatan	1,326,507,800.00	85.55	%	1,326,507,800.00	91.01	%	2,246,320,920.00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
06.01	INSPEKTORAT	-																								0.00		INSPEKTORAT	
06.01.01	PROGRAM PENJUALANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	100%		36,122,314,612.00			7,625,626,439.00	-	-	11,259,700,710.00	100	%	2,934,010,482.00					0.00	0.00	0.00	0.00	91.01	%	7,625,626,439.00		INSPEKTORAT		
6.01.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANTARAN, DAN EVALUASI KINERJA PENGANTAR DAERAH	-			69,234,724.00	-	-	57,016,496.00	3	Laporan	8,466,066.00		-	280,000.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	91.01	%	69,234,724.00		INSPEKTORAT		
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mntir Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Mntir Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mntir Realisasi Kinerja SKPD			69,234,724.00	5	Laporan	57,016,496.00	3	Laporan	8,466,066.00		Laporan	280,000.00		Laporan	34,105,998.00	5	Laporan	30,656,216.00	53.77	%	30,656,216.00	91.01	%	99,890,940.00		INSPEKTORAT	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Pengantar Daerah	-			4,289,278,865.00	-	-	5,040,965,909.00	100	%	800,955,408.00		-	2,812,439,133.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	91.01	%	4,289,278,865.00		INSPEKTORAT		
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			4,156,987,481.00	42	orang/tahun	6,003,951,492.00	1	Tahun	792,429,342.00		orang/tahun	2,800,471,945.00	42	Orang/Bulan	5,505,947,309.00	91.70	%	5,505,847,309.00	91.01	%	5,505,847,309.00	91.01	%	9,702,734,770.00		INSPEKTORAT	
6.01.01.2.02.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			92,391,424.00	5	Laporan	45,115,416.00	1	Laporan	8,466,066.00		Laporan	12,968,088.00	5	Laporan	14,368,088.00	31.85	%	14,368,088.00	91.01	%	14,368,088.00	91.01	%	106,759,512.00		INSPEKTORAT	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Pengantar Daerah	-			653,334,964.00	-	-	1,275,228,620.00	100	%	353,061,552.00		-	327,902,518.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	91.01	%	653,334,964.00		INSPEKTORAT		
6.01																													

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	RPJMD Kabupaten Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPJMD/REINSTR)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RPJMD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2024 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			6		7		8		9		10		11		12		13		14 n = 7 + 3		15 = 14 / 6 x 100%							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
6.01.03.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengembangan dan Fasilitas Pemukiman	-	-	69,544,200.00	-	-	-	130,952,085.00	1	Kegiatan	525,000.00	-	-	6,675,000.00	-	-	2	Rekomendasi	47,635,400.00	36.38	%	47,635,400.00	91.01	%	117,179,600.00	INSPEKTORAT		
6.01.03.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengembangan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengembangan yang Disusun	-	69,544,200.00	2	rekomendasi	130,952,085.00	1	Laporan	525,000.00	rekomendasi	6,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	Rekomendasi	47,635,400.00	0.00	%	47,635,400.00	91.01	%	69,544,200.00	INSPEKTORAT	
6.01.03.02	Pendampingan dan Asistensi	-	404,408,525.00	-	555,772,258.00	3	Kegiatan	42,163,400.00	-	-	194,088,160.00	-	-	-	-	-	38	Rekomendasi	87,688,818.00	85.94	%	87,688,818.00	91.01	%	404,408,525.00	INSPEKTORAT		
6.01.03.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	38	perangkat daerah	102,153,780.00	1	Kegiatan	6,889,100.00	0.00	0.00	23,215,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38	Rekomendasi	87,688,818.00	85.94	%	87,688,818.00	91.01	%	133,333,063.00	INSPEKTORAT		
6.01.03.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	38	perangkat daerah	120,252,565.00	1	Kegiatan	28,534,042.00	0.00	0.00	28,534,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38	Rekomendasi	284,742,400.00	236.79	%	284,742,400.00	91.01	%	593,507,960.00	INSPEKTORAT		
6.01.03.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pengolahan dan Pemrosesan Keluaran	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pengolahan dan Pemrosesan Keluaran	0.00	3	Kegiatan	333,366,923.00	1	Kegiatan	35,274,300.00	0.00	0.00	142,239,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	Kegiatan	425,062,801.00	127.51	%	425,062,801.00	91.01	%	425,062,801.00	INSPEKTORAT		
07.01	KECAMATAN KURUN		100%	20,193,418,295.00	5,217,887,230.00	100	%	4,079,593,858.00	%	580,497,402.00	%	5,727,004,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,217,887,226.00	KECAMATAN KURUN	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Anggaran Penyusunan Dokumen Perencanaan	20,268,000.00	9	Dokumen	32,808,466.00	5	Dokumen	7,156,900.00	Dokumen	18,783,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,268,000.00	KECAMATAN KURUN	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,982,800.00	1	Dokumen	4,052,224.00	1	Dokumen	1,998,700.00	Dokumen	1,998,700.00	1	Dokumen	4,029,900.00	99.45	%	4,029,900.00	91.01	%	4,029,900.00	91.01	%	4,029,900.00	91.01	%	8,012,700.00	KECAMATAN KURUN	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,997,600.00	1	Dokumen	3,217,668.00	1	Dokumen	0.00	Dokumen	1,516,800.00	1	Dokumen	3,189,000.00	99.11	%	3,189,000.00	91.01	%	3,189,000.00	91.01	%	3,189,000.00	91.01	%	6,186,600.00	KECAMATAN KURUN	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3,982,800.00	1	Dokumen	3,627,668.00	1	Dokumen	1,999,200.00	Dokumen	5,626,200.00	1	Dokumen	3,627,000.00	99.71	%	3,627,000.00	91.01	%	3,627,000.00	91.01	%	3,627,000.00	91.01	%	7,609,600.00	KECAMATAN KURUN	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2,997,600.00	1	Dokumen	3,217,668.00	1	Dokumen	0.00	Dokumen	1,517,600.00	1	Dokumen	3,189,000.00	99.11	%	3,189,000.00	91.01	%	3,189,000.00	91.01	%	3,189,000.00	91.01	%	6,186,600.00	KECAMATAN KURUN	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	6,307,200.00	5	Laporan	18,663,238.00	3	Dokumen	3,159,000.00	Laporan	8,123,800.00	5	Laporan	4,964,800.00	26.57	%	4,964,800.00	91.01	%	4,964,800.00	91.01	%	4,964,800.00	91.01	%	11,272,000.00	KECAMATAN KURUN	
7.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Anggaran Keuangan Perangkat Daerah	2,855,978,295.00	4	dokumen	3,082,632,881.00	%	404,477,475.00	dokumen	4,346,957,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855,978,295.00	KECAMATAN KURUN	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2,818,285,207.00	30	orang/bulan	3,078,430,675.00	35	orang	401,304,068.00	orang/bulan	4,337,394,068.00	30	orang	5,043,632,878.00	97.21	%	5,043,632,878.00	91.01	%	5,043,632,878.00	91.01	%	5,043,632,878.00	91.01	%	5,808,840,765.00	KECAMATAN KURUN	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45,000.00	1	dokumen	750,000.00	0.00	0.00	204,000.00	1	Dokumen	249,000.00	1	Dokumen	144,900.00	19.32	%	144,900.00	91.01	%	144,900.00	91.01	%	144,900.00	91.01	%	60,364,000.00	KECAMATAN KURUN
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6,257,300.00	1	Laporan	3,127,980.00	1	Dokumen	3,136,800.00	Laporan	6,264,200.00	1	Laporan	6,264,200.00	99.98	%	6,264,200.00	91.01	%	6,264,200.00	91.01	%	6,264,200.00	91.01	%	9,384,700.00	KECAMATAN KURUN	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	70,479,724.00	1	laporan	2,284,380.00	0.00	0.00	2,195,402.00	1	Laporan	2,195,402.00	17	laporan	4,479,600.00	99.99	%	4,479,600.00	91.01	%	4,479,600.00	91.01	%	4,479,600.00	91.01	%	72,763,924.00	KECAMATAN KURUN
7.01.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Anggaran Pengadaan Pakiahan Dinas dan Kebutuhan Bimtek	111,540,000.00	2	Laporan	51,879,200.00	%	0.00	Laporan	70,506,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,540,000.00	KECAMATAN KURUN	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaihan Dinas Berserta Akibat Kelangkaannya	Jumlah Paket Pakaihan Dinas berserta Akibat Kelangkaannya	76,240,000.00	1	paket	32,167,000.00	0.00	0.00	53,306,600.00	2	paket	53,306,600.00	2	paket	53,306,600.00	96.83	%	53,306,600.00	91.01	%	53,306,600.00	91.01	%	53,306,600.00	91.01	%	136,800.00	KECAMATAN KURUN
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	330,209,965.00	4	orang	19,711,400.00	0.00	0.00	17,200,000.00	5	orang	17,200,000.00	4	orang/hari	20,000,000.00	101.46	%	20,000,000.00	91.01	%	20,000,000.00	91.01	%	20,000,000.00	91.01	%	330,209,965.00	KECAMATAN KURUN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Anggaran Kebutuhan Administrasi Umum Kantor Tersebut	702,609,692.00	5	Laporan	341,448,639.00	%	77,829,903.00	Laporan	509,085,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,609,692.00	KECAMATAN KURUN	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Didisposisikan	310,209,000.00	5	paket	129,759,589.00	3	tahun	28,228,132.00	paket	184,970,616.00	5	paket	210,019,718.00	12	bulan	120,672,188.00	93.00	%	120,672,188.00	91.01	%	120,672,188.00	91.01	%	430,881,253.00	KECAMATAN KURUN	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Didisposisikan	44,128,100.00	2	jenis	16,236,750.00	0.00	0.00	22,363,800.00	10	paket	22,363,800.00	10	paket	26,336,500.00	100.00	%	26,336,500.00	91.01	%	26,336,500.00	91.01	%	26,336,500.00	91.01	%	60,364,000.00	KECAMATAN KURUN
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan yang Didisposisikan	16,450,000.00	1	dokumen	4,928,600.00	3	jenis	1,230,000.00	dokumen	6,150,000.00	1	paket	8,610,000.00	3	jenis	4,920,000.00	99.87	%	4,920,000.00	91.01	%	4,920,000.00	91.01	%	21,370,000.00	KECAMATAN KURUN	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Didisposisikan	0.00	1	paket	23,812,500.00	0.00	0.00	22,628,000.00	1	paket	46,428,000.00	1	paket	23,800,000.00	99.95	%	23,800,000.00	91.01	%	23,800,000.00	91.01	%	23,800,000.00	91.01	%	23,800,000.00	KECAMATAN KURUN
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	331,822,527.00	2	Laporan	166,717,200.00	2	jenis	28,318,771.00	Laporan	272,972,911.00	2	Laporan	331,194,567.00	2	jenis	272,835,979.00	103.65	%	272,835,979.00	91.01	%	272,835,979.00	91.01	%	604,686,506.00	KECAMATAN KURUN	
7.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penyusunan Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Anggaran belanja pengadaan	543,175,000.00	2	Unit	109,598,070.00	%	0.00	Unit	130,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,175,000.00	KECAMATAN KURUN	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Didisposisikan	37,600,000.00	8	unit	109,598,070.00	0.00	0.00	130,380,000.00	8	unit	130,380,000.00	8	unit	109,380,000.00	99.80	%	109,380,000.00	91.01	%	109,380,000.00	91.01	%	146,960,000.00	KECAMATAN KURUN			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penyusunan Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Anggaran Penyediaan Jasa Penyusunan Urusan Pemerintahan Daerah	532,215,821.00	3	laporan	52,743,492.00	%	84,735,492.00	laporan	339,175,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,215,821.00	KECAMATAN KURUN	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Survei Menyewa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Survei Menyewa	16,000.00	1	laporan	5,000,000.00	1	laporan	1,250,000.00	Laporan	7,500,000.00	1	Laporan	8,750,000.00	1	jenis	5,000,000.00	100.00	%	5,000,000.00	91.01	%	5,000,000.00	91.01	%	21,000,000.00	KECAMATAN KURUN	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didisposisikan	108,638,705.00	1	Laporan	48,000,000.00	3	tahun	7,614,262.00	Laporan	71,899,425.00	2	Laporan	60,704,626.00	12	bulan	60,704,626.00	126.47	%	60,704,626.00	91.01	%	60,704,626.00	91.01	%	169,543,331.00	KECAMATAN KURUN	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Didisposisikan	407,377,236.00	2	Laporan	175,074,971.00	3	tahun	43,116,830.00	Laporan	259,176,384.00	2	Laporan	305,142,784.00	12	bulan	176,514,164.00	100.82	%	176,514,164.00	91.01	%	176,514,164.00	91.01	%	583,899,380.00	KECAMATAN KURUN	
7.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penyusunan Urusan Pemerintahan dan Mesin Kantor serta Honorarium PTT	Tersedianya Anggaran untuk Pemeliharaan Kenderaan Dinas, Alat dan Mesin Kantor serta Honorarium PTT	454,282,280.00	3	Laporan	198,374,571.00	%	27,623,566.00	Laporan	259,341,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,282,280.00	KECAMATAN KURUN	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pengkondisian Perawatan Dinas atau Kenderaan Dinas	Jumlah Dokumen Pengeluaran Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan yang Didisposisikan dan dibayarkan PTT	323,628,282.00	9	unit	17,573,566.00	9	unit	146,239,674.00	9	unit	146,239,674.00	9	unit	114,705,974.00	13	unit	104,137,944.00	103.62	%	104,137,944.00	91.01	%	104,137,944.00	91.01	%	427,766,226.00	KECAMATAN KURUN
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan dan Perawatan Perawatan	Jumlah Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	40,385,000.00	2	unit	78,363,615.00	2	unit	5,600,000.00	unit	89,321,800.00	2	unit	112,841,500.00	2	unit	89,408,500.00	114.09	%	89,408,500.00	91.01	%	89,408,500.00	91.01	%	179,793,500.00	KECAMATAN KURUN	
7.01.01.2.09.03	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51,330,																									

Kode	Uraian/Bidang Usutan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPJMD/REKSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RPJMD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Tahun 2024 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
			I		II		III		IV																							
			6		7		8		9		10		11		12		13															
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1	laporan	1.800.000,00			1	laporan	2.900.000,00	1	laporan	3.350.000,00	100,00	%	1.800.000,00	91.01	%	1.800.000,00									KELURAHAN KURUN		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			2	laporan	6.720.000,00			2	laporan	9.416.074,00	12	laporan	11.993.490,00	146,16	%	9.821.990,00	91.01	%	9.821.990,00									KELURAHAN KURUN		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1	laporan	6.521.672,00			3	laporan	9.046.500,00	12	laporan	10.040.250,00	153,95	%	7.712.500,00	91.01	%	7.712.500,00									KELURAHAN KURUN		
7.01.01.2.09.04	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usutan Pemerintahan Daerah	Terkelirannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usutan Pemerintahan Daerah			3	laporan	33.198.566,00				laporan	65.176.500,00				0,00	0,00	%	0,00	91.01	%	0,00								KELURAHAN KURUN		
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pakai Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan dan Dibayarkan Pakainya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan dan Dibayarkan Pakainya			1	unit	4.187.808,00				unit	6.187.000,00	1	unit	4.150.000,00	99,10	%	4.150.000,00	91.01	%	4.150.000,00									KELURAHAN KURUN		
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Lainnya			12	unit	9.595.839,00			12	unit	13.795.000,00	12	unit	16.470.000,00	99,31	%	9.530.000,00	91.01	%	9.530.000,00									KELURAHAN KURUN		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi			1	unit	19.374.911,00				unit	49.194.500,00	1	unit	49.194.500,00	100,00	%	19.374.500,00	91.01	%	19.374.500,00									KELURAHAN KURUN		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			100	%	390.880.906,00				%	420.026.500,00				0,00	0,00	%	0,00	91.01	%	0,00									KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJUR	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersedianya Anggaran Kegiatan MUSREMBANG KELURAHAN,IDENTIF RT dan RW, KADER POSYANDU Balita,BKB dan PAUD,Remaja,Posbindu,Poslansia dan KPM, Kegiatan Stunting			100	%	331.701.493,00				%	377.153.500,00				0,00	0,00	%	0,00	91.01	%	0,00									KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJUR	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			1	lembaga ke masyarakat	3.058.050,00				lembaga ke masyarakat	2.750.000,00	1	laporan	2.750.000,00	97,12	%	2.970.000,00	91.01	%	2.970.000,00									KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJUR		
7.01.03.2.02.03	Peningkatan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			13	pekerjaan sosial	326.643.443,00				pekerjaan sosial	374.403.500,00	6	emas	508.497,000	12	bulan	306.766.000,00	93,94	%	306.766.000,00									KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJUR		
7.01.03.2.03.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tersedianya Anggaran untuk Lembaga/Organisasi Masyarakat Kelurahan Identif Jaka Kabun			100	%	55.179.413,00				%	42.873.000,00	2	laporan	56.761.000,00	121,50	%	77.823.850,00	91.01	%	77.823.850,00									KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJUR		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENGAH	Presentase Program Usutan Pemerintahan Kabupaten Kota			100	%	249.119.094,00				%	308.915.942,00				0,00	0,00	%	0,00	91.01	%	0,00									KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJUR	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakatan Dinas beserta Atribut Kelengkapan,Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan Pegawai			100	%	51.812.510,00				%	39.565.050,00				0,00	0,00	%	0,00	91.01	%	0,00									KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJUR	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakatan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakatan Dinas beserta Atribut Kelengkapan			5	paket	32.728.360,00				paket	39.565.050,00	5	paket	39.565.050,00	87,40	%	28.605.050,00	91.01	%	28.605.050,00									KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJUR		
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			4	orang	19.084.160,00				orang	0,00			2	orang	7.000.000,00	36,68	%	7.000.000,00	91.01	%	7.000.000,00									KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJUR
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Anggaran untuk Bahan Logistik Kantor, Cetakan dan Penggandaan, Bahan Baku dan Perundang undangan,serta Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100	%	90.919.600,00				%	113.298.798,00				0,00	0,00	%	0,00	91.01	%	0,00									KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJUR	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			10	paket	39.802.649,00				paket	38.161.100,00	10	paket	52.926.100,00	96,83	%	34.666.500,00	91.01	%	34.666.500,00									KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJUR		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2	paket	11.976.601,00				paket	9.749.800,00	2	paket	11.499.800,00	100,42	%	12.026.900,00	91.01	%	12.026.900,00									KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJUR		
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			4	dokumen	2.484.000,00				dokumen	2.475.000,00	3	paket	3.570.000,00	74,28	%	1.846.000,00	91.01	%	1.846.000,00									KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJUR		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			30	laporan	66.656.400,00				laporan	62.912.898,00	2	laporan	65.292.998,00	137,91	%	64.342.482,00	91.01	%	64.342.482,00									KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJUR		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usutan Pemerintah Daerah	Tersedianya Anggaran Pengadaan Barang Milik Daerah untuk Penunjang Usutan Pemerintahan Daerah			100	%	38.822.250,00				%	114.626.700,00				0,00	0,00	%	0,00	91.01	%	0,00									KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJUR	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			6	unit	38.822.250,00				unit	114.626.700,00	6	unit	114.626.700,00	99,87	%	38.772.700,00	91.01	%	38.772.700,00									KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJUR		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usutan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Anggaran untuk penyediaan Jasa Surat menyurat/Bahan, Jasa Komunikasi,Unit dan Air,Jasa Pelayanan Umum Kantor			100	%	13.790.997,00				%	15.888.894,00				0,00	0,00	%	0,00	91.01	%	0,00									KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJUR	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12	laporan	1.790.000,00				laporan	2.180.000,00	12	laporan	2.610.000,00	128,57	%	2.290.000,00	91.01	%	2.290.000,00									KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJUR		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12	laporan	7.710.000,00				laporan	7.655.264,00	12	laporan	9.689.394,00	98,71	%	7.077.764,00	91.01	%	7.077.764,00									KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJUR		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12	laporan	4.803.997,00				laporan	6.063.500,00	12	bulan	4.809.000,00	99,54	%	4.809.000,00	91.01	%	4.809.000,00									KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJUR		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usutan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya Jumlah Perlatan Kantor dan Bangunan Lainnya			100	%	47.813.687,00				%	25.536.500,00				0,00	0,00	%	0,00	91.01	%	0,00									KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJUR	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pakai Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan dan Dibayarkan Pakainya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan dan Dibayarkan Pakainya			1	unit	4.187.808,00				unit	5.171.500,00	1	unit	6.221.500,00	99,96	%	4.186.000,00	91.01	%	4.186.000,00									KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJUR		
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Lainnya			6	unit	11.655.494,00				unit	12.540.000,00	6	unit	12.540.000,00	99,97	%	13.600.000,00	91.01	%	13.600.000,00									KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJUR		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi			1	unit	30.022.385,00				unit	7.825.000,00	1	unit	32.050.000,00	108,52	%	32.580.000,00	91.01	%	32.580.000,00									KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJUR		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENGAH	Presentase Program Penunjang Usutan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota			88%	%	15.518.461.373,00				%	439.853.003,00				0,00	0,00	%	0,00	91.01	%	0,00									KECAMATAN TEWAH	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			24,99%	%	43.000.713,00				%	9.115.544,00				0,00	0,00	%	0,00	91.01	%	0,00									KECAMATAN TEWAH	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6.770.500,00	2	dokumen	31.896.406,00	0		dokumen	280.000,00			dokumen	6.692.244,00	2	dokumen	6.692.244,00	25,34	%	8.072.244,00	91.01	%	14.842.744,00	</						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan (output)	Tahun RPJMD Kabupaten Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPJMD/REKSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2024 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini	Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						I		II		III		IV		V		VI									
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disiapkan	243,483,084.00	12	laporan	230,813,235.00	7	orang	59,120,262.00		laporan	128,293,696.00	7	orang	186,221,296.00	246,695,896.00	106.88	%	246,695,896.00	91.01	%	490,178,980.00	KECAMATAN TEWAH		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154,435,000.00	99	%	145,033,087.00	7.12	%	8,793,700.00		%	37,883,300.00		0.00	%	0.00	0.00	0.00	%	0.00	91.01	%	154,435,000.00	KECAMATAN TEWAH	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perangas Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya	Jumlah Kendaraan Perangas Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya	69,531,500.00	2	Unit	36,113,537.00	2	Unit	3,667,700.00		Unit	14,281,600.00	3	Unit	26,481,600.00	3	Unit	47,106,700.00	130.44	%	47,106,700.00	91.01	%	116,638,200.00	KECAMATAN TEWAH
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya	57,002,500.00	2	Unit	49,993,890.00	3	Unit	3,350,000.00		Unit	20,309,700.00	3	Unit	25,159,700.00	3	Unit	55,342,700.00	110.70	%	55,342,700.00	91.01	%	112,345,200.00	KECAMATAN TEWAH
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7,889,000.00	6	Unit	9,325,887.00	4	Unit	1,776,000.00		Unit	3,290,000.00	14	Unit	9,140,000.00	14	Unit	14,770,000.00	158.38	%	14,770,000.00	91.03	%	22,489,000.00	KECAMATAN TEWAH
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	20,302,000.00	2	Unit	49,599,773.00	0	Unit	0.00		Unit	0.00	3	Unit	27,686,000.00	3	Unit	67,421,000.00	135.93	%	67,421,000.00	91.01	%	87,623,000.00	KECAMATAN TEWAH
97.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	98%	4,048,738,002.00	293,133,900.00	98	%	295,720,862.00	07.02	%	58,477,300.00		%	14,033,400.00		0.00	0.00	0.00	%	0.00	91.01	%	293,133,900.00	KECAMATAN TEWAH	
7.01.03.2.01	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	49,877,700.00	98	%	90,072,234.00	21.04	%	14,977,600.00		%	14,033,400.00		0.00	%	0.00	0.00	0.00	%	0.00	91.01	%	49,877,700.00	KECAMATAN TEWAH	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	29,328,400.00	2	lembaga ke masyarakat	18,618,921.00	1	kegiatan	10,217,600.00		lembaga ke masyarakat	10,773,400.00	2	kegiatan	10,773,400.00	99.11	%	18,453,400.00	91.01	%	18,453,400.00	91.01	%	47,781,800.00	KECAMATAN TEWAH
7.01.03.2.01.02	Sikarokasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sikarokasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	17,807,300.00	5	dokumen	17,985,531.00	3	kali	3,485,000.00		dokumen	600,000.00	7	kali	2,525,000.00	7	kali	14,176,400.00	79.82	%	14,176,400.00	91.01	%	31,963,700.00	KECAMATAN TEWAH
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0.00	2	laporan	53,467,782.00	1	kegiatan	1,295,000.00		laporan	2,660,000.00	2	kegiatan	29,805,300.00	2	kegiatan	36,035,300.00	67.40	%	36,035,300.00	91.01	%	36,035,300.00	KECAMATAN TEWAH
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	0.00	98	%	205,648,628.00	4.99	%	13,320,000.00		%	0.00		0.00	%	0.00	0.00	0.00	%	0.00	91.01	%	0.00	KECAMATAN TEWAH	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diorganisir	0.00	4	lembaga ke masyarakat	205,648,628.00	1	kegiatan	13,320,000.00		lembaga ke masyarakat	0.00	5	kegiatan	132,257,000.00	5	kegiatan	197,057,500.00	95.82	%	197,057,500.00	91.01	%	197,057,500.00	KECAMATAN TEWAH
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																	ADHIVO	0.00	%	0.00	91.03	%	0.00	KECAMATAN TEWAH
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan												1	kegiatan	2,649,500.00	ADHIVO	2,649,500.00	91.03	%	2,649,500.00	91.03	%	2,649,500.00	KECAMATAN TEWAH
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun												0	0	222,086,600.00	ADHIVO	222,086,600.00	91.03	%	222,086,600.00	91.03	%	222,086,600.00	KECAMATAN TEWAH
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												6	Kegiatan	185,519,200.00	6	Kegiatan	387,983,500.00	ADHIVO	387,983,500.00	91.01	%	387,983,500.00	KECAMATAN TEWAH
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi												6	Kali	1,751,500.00	6	Kali	3,311,500.00	ADHIVO	3,311,500.00	91.03	%	3,311,500.00	KECAMATAN TEWAH
97.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	98%	4,540,000.00	0.00	99	%	72,761,800.00	50	%	1,185,000.00		%	0.00		0.00	0.00	0.00	%	0.00	91.01	%	0.00	KECAMATAN TEWAH	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pemangkas Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pemangkas Kepala Daerah	0.00	99	%	72,761,800.00	50	%	1,185,000.00		%	0.00		0.00	%	0.00	0.00	0.00	%	0.00	91.01	%	0.00	KECAMATAN TEWAH	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Meningkatkan Penguasaan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Peningkatan dan Pemeliharaan Ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Meningkatkan Penguasaan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Peningkatan dan Pemeliharaan Ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0.00	45	orang	72,761,800.00	1	kegiatan	1,185,000.00		orang	0.00	2	kegiatan	80,774,250.00	2	kegiatan	80,774,250.00	111.01	%	80,774,250.00	91.01	%	80,774,250.00	KECAMATAN TEWAH
97.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	98%	604,159,260.00	113,964,272.00	98	%	219,461,481.00	15.46	%	26,097,498.00		%	76,338,120.00		0.00	0.00	0.00	%	0.00	91.01	%	113,964,272.00	KECAMATAN TEWAH	
7.01.06.2.01	Facilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	113,964,272.00	98	%	219,461,481.00	15.46	%	26,097,498.00		%	76,338,120.00		0.00	%	0.00	0.00	0.00	%	0.00	91.01	%	113,964,272.00	KECAMATAN TEWAH	
7.01.06.2.01.02	Facilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Didisialisasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18,615,018.00	12	dokumen	66,087,269.00	3	Desa	8,867,766.00		dokumen	32,105,188.00	15	Desa	51,231,788.00	15	Desa	65,773,188.00	99.52	%	65,773,188.00	91.01	%	84,388,206.00	KECAMATAN TEWAH
7.01.06.2.01.03	Facilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Penyelenggaraan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Didisialisasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Penyelenggaraan Aset Desa	29,141,200.00	12	dokumen	50,009,361.00	3	Desa	570,600.00		dokumen	362,000.00	15	Desa	5,702,000.00	15	Desa	62,177,000.00	124.33	%	62,177,000.00	91.01	%	101,318,200.00	KECAMATAN TEWAH
7.01.06.2.01.11	Facilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	34,957,336.00	12	dokumen	65,609,600.00	3	Laporan	8,193,066.00		dokumen	24,870,488.00	12	Laporan	34,223,788.00	12	Laporan	48,870,088.00	74.49	%	48,870,088.00	91.01	%	83,827,424.00	KECAMATAN TEWAH
7.01.06.2.01.16	Facilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	17,489,533.00	12	dokumen	37,755,803.00	0	Desa	8,466,066.00		dokumen	18,981,444.00	15	Desa	29,341,244.00	15	Desa	42,596,044.00	112.82	%	42,596,044.00	91.01	%	60,064,562.00	KECAMATAN TEWAH
97.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	98	%	616,760,384.00		%	3,164,200.00		%	0.00		%	0.00		0.00	0.00	0.00	%	0.00	91.03	%	0.00	KECAMATAN TEWAH	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																ADHIVO	0.00	%	0.00	91.01	%	0.00	KECAMATAN TEWAH
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun																ADHIVO	0.00	%	0.00	91.01	%	0.00	KECAMATAN TEWAH
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																ADHIVO	0.00	%	0.00	91.01	%	0.00	KECAMATAN TEWAH
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi																ADHIVO	0.00	%	0.00	91.01	%	0.00	KECAMATAN TEWAH
97.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	98	%	233,239,616.00		%	0.00		%	0.00		%	0.00		0.00	0.00	0.00	%	0.00	91.01	%	0.00	KECAMATAN TEWAH	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	98	%	26,967,240.00		%	0.00		%	0.00		%	0.00		0.00	0.00	0.00	%	0.00	91.01	%	0.00	KECAMATAN TEWAH	
7.01.01																									

Kode	Uraian/Bidang Usunan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	RPJMD Kabupaten Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPJMD/REINSTR)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RPJMD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2024 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			I		II		III		IV		K		K		K		K		20 = 14 / 6 x100%					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usunan Pemerintah Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			278,853,434.00	3	Kegiatan	189,339,788.00	49,098,396.00	147,134,400.00					0.00	%	0.00	%	91.01	%	278,853,434.00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4,540,000.00	250	laporan	2,500,000.00		0.00	laporan	0.00	450	Lembar	2,500,000.00	450	Lembar	12,451,300.00	498.05	%	12,451,300.00	91.01	%	17,091,300.00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		19,499,300.00	3	laporan	18,698,468.00		0.00	laporan	0.00	3	Jenis	6,390,710.00	3	Jenis	55,816,905.00	298.67	%	55,816,905.00	91.01	%	75,316,255.00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		254,714,084.00	6	laporan	168,151,320.00		49,098,396.00	147,134,400.00	9	Orang	246,224,000.00	9	Orang	234,290,100.00	139.33	%	234,290,100.00	91.01	%	489,004,184.00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usunan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional dan peralatan kantor dan Bangunan		154,807,134.00	4	Kegiatan	114,097,132.00		8,320,000.00	Kegiatan	0.00					0.00	%	0.00	%	91.01	%	154,807,134.00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan		11,146,880.00	1	Unit	24,322,051.00		2,160,000.00	Unit	0.00	1	Unit	10,462,000.00	1	Unit	23,266,800.00	95.66	%	23,266,800.00	91.01	%	34,413,080.00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan		99,816,134.00	5	Unit	58,015,935.00		6,160,000.00	Unit	0.00	7	Unit	21,460,000.00	7	Unit	55,382,700.00	95.46	%	55,382,700.00	91.01	%	155,186,834.00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		43,844,000.00	25	Unit	20,000,989.00		0.00	Unit	0.00	20	Unit	3,120,000.00	20	Unit	8,120,000.00	40.60	%	8,120,000.00	91.01	%	53,964,000.00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan/Direhabilitasi			3	unit	11,758,457.00			Unit	0.00	3	Kegiatan		3	Kegiatan	21,000,000.00	178.59	%	21,000,000.00	91.01	%	21,000,000.00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		40,329,810.00	100	%	272,072,856.00		10,507,096.00	%	0.00					0.00	%	0.00	%	91.01	%	40,329,810.00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
7.01.03.2.01	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Terpegulunya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		27,149,810.00	100	%	64,223,430.00		10,507,096.00	%	0.00					0.00	%	0.00	%	91.01	%	27,149,810.00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		27,149,810.00	1	lembaga ke-masyarakat	23,546,931.00		10,507,096.00	lembaga ke-masyarakat	0.00	1	kegiatan		1	kegiatan	7,507,730.00	31.88	%	7,507,730.00	91.01	%	34,657,546.00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			3	laporan	40,676,499.00			laporan	0.00	3	Kegiatan		3	Kegiatan				91.01	%		KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																				91.01	%		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																				91.01	%		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																				91.01	%		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																				91.01	%		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Festival Budaya, MTQ, Festival Taniak, Kegiatan PKK, Porsiklat, Lomba Desa, dan Lomba Desa lainnya		13,180,000.00	7	Kegiatan	207,849,426.00		0.00	Kegiatan	0.00					0.00	%	0.00	%	91.01	%	13,180,000.00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
7.01.03.2.03.01	Penyenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		0.00	3	lembaga ke-masyarakat	155,350,338.00		0.00	lembaga ke-masyarakat	0.00	3	Kegiatan		3	Kegiatan	160,479,204.00	103.30	%	160,479,204.00	91.01	%	160,479,204.00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		13,180,000.00	1	lembaga ke-masyarakat	52,499,088.00		0.00	lembaga ke-masyarakat	0.00	3	Jenis	47,375,000.00	3	Jenis	47,375,000.00	90.24	%	47,375,000.00	91.01	%	60,555,000.00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	100%	229,995,900.00			156,426,207.00		0.00	Kegiatan	0.00					0.00	%	0.00	%	91.01	%	0.00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
7.01.05.2.01	Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan P a s k i b r a n H U T R i . BMD ASN d a n terdistribusinya Rapat Kerja Camat/Kades/Lurah, BPMD dan Damang/Kepaladad		0.00	3	Kegiatan	156,426,207.00		0.00	Kegiatan	0.00					0.00	%	0.00	%	91.01	%	0.00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Meningkatkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Meningkatkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia		0.00	60	orang	117,163,087.00		0.00	orang	0.00	2	Kegiatan	98,488,447.00	2	Kegiatan	98,488,447.00	84.06	%	98,488,447.00	91.01	%	98,488,447.00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
7.01.05.2.01.02	Facilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		0.00	5	orang	28,626,240.00		0.00	orang	0.00	5	Orang							91.01	%		KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		0.00	1	dokumen	10,636,880.00		0.00	dokumen	0.00	1	Kegiatan							91.01	%		KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
07.01.06	PROGRAM PEMBIANAN DAN PENGANGKATAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Pembinaan dan Pengangkatan Pemertintahan Desa	100%	887,220,160.00			129,771,872.00		0.00	desa	21,300,000.00					0.00	%	0.00	%	91.01	%	129,771,872.00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
7.01.06.2.01	Facilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terpasilainya Pembinaan Pemerintahan Desa		129,771,872.00	4	Kegiatan	101,332,839.00		0.00	Kegiatan	21,300,000.00					0.00	%	0.00	%	91.01	%	129,771,872.00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
7.01.06.2.01.02	Facilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Disiapkan dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		64,713,800.00	1	dokumen	15,334,400.00		0.00	dokumen	0.00	11	Desa			0.00	%	0.00	%	91.01	%	64,713,800.00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
7.01.06.2.01.03	Facilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Penyelenggaraan Asat Desa	Jumlah Dokumen yang Disiapkan dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Penyelenggaraan Asat Desa		65,058,072.00	11	dokumen	68,747,339.00		0.00	dokumen	21,300,000.00	11	Desa	35,500,000.00	11	Desa	45,846,228.00	66.69	%	45,846,228.00	91.01	%	110,904,298.00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
7.01.06.2.01.06	Facilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			4	dokumen	11,500,800.00		0.00	dokumen	0.00	4	Desa			0.00	%	0.00	%	91.01	%	0.00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
7.01.06.2.01.11	Facilitas Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketahanan Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketahanan Umum			1	dokumen	5,750,400.00		0.00	dokumen	0.00	12	Desa/Kat			0.00	%	0.00	%	91.01	%	0.00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan			3	kegiatan	488,976,648.00			kegiatan	0.00					0.00	%	0.00	%	91.01	%	0.00	KELURAHAN TUMBANG MIRI	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			3	kegiatan	488,976,648.00			kegiatan	0.00					0.00	%	0.00	%	91.01	%	0.00	KELURAHAN TUMBANG MIRI	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			1	lembaga ke-masyarakat	3,443,154.00			lembaga ke-masyarakat	0.00					0.00	%	0.00	%	91.01	%	0.00	KELURAHAN TUMBANG MIRI	
7.01.03.2.02.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Tersedia			1	unit	286,960,040.00			unit	0.00					0.00	%	0.00	%	91.01	%	0.00	KELURAHAN TUMBANG MIRI	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemas dan Ormes yang Melaksanakan Pemberdayaan Kelurahan			9	Pemas Ormes	196,567,449.00			Pemas Ormes	0.00					0.00	%	0.00	%	91.01	%	0.00	KELURAHAN TUMBANG MIRI	
07.01.01	PROGRAM PERKUJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	laksananya pelayanan administrasi umum penunjang perangkat Daerah			4	kegiatan	111,023,352.00			kegiatan	0.00					0.00	%	0.00	%	91.01	%	0.00	KELURAHAN TUMBANG MIRI	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Perencanaan Bangunan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor,Barang Cetak dan Pengendalian, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			4	kegiatan	74,297,397.00																	

Kode	Uraian/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPJMD/RESTRAT)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2024 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penunjang Jawab
			6	Rp	7	Rp	8	9	10		11		12		13		14 = 7 x 13		15 = 14 / 6 x 100%									
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp					
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0.00	2	Laporan	18.168.000,00	1	Dokumen			0.00				0.00	0.00	%	0.00	0.00	%	0.00	KECAMATAN SEPANG					
7.01.01.2.04	Administrasi Pengadaan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersedianya data Pemenuhan Asli Daerah Tingkat Kecamatan		9,200,000.00	4	Dokumen	7,062,942.00	100	%	Dokumen	6,875,000.00					0.00	0.00	%	0.00	0.00	%	0.00	KECAMATAN SEPANG					
7.01.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Rekrutasi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Rekrutasi Daerah		9,200,000.00	4	Dokumen	7,062,942.00	1	Dokumen	Dokumen	6,875,000.00	6	Kegiatan	6,875,000.00	4	Dokumen	6,875,000.00	97.34	%	6,875,000.00	91.01	%	16,075,000.00	KECAMATAN SEPANG				
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lancarnya pelayanan administrasi umum penunjang perangkat daerah		200,526,382.00	99	%	319,004,564.00	100	%	%	162,066,542.00					0.00	0.00	%	0.00	0.00	%	200,526,382.00	KECAMATAN SEPANG					
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		5,725,000.00	0	paket	9,947,000.00	1	tahun	paket	4,890,000.00	1	Kegiatan	5,945,000.00	2	Paket	9,945,000.00	99.98	%	9,945,000.00	91.01	%	15,670,000.00	KECAMATAN SEPANG				
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		40,714,000.00	1	paket	39,130,614.00	1	tahun	paket	77,480,500.00	5	Kegiatan	38,772,500.00	1	Paket	98,468,000.00	99.93	%	98,468,000.00	91.01	%	139,182,000.00	KECAMATAN SEPANG				
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengaplikasian	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengaplikasian yang Disediakan		10,614,600.00	1	paket	2,600,000.00	1	tahun	paket	1,300,000.00	1	Kegiatan	2,600,000.00			3,184,000.00	122.46	%	3,184,000.00	91.01	%	13,898,600.00	KECAMATAN SEPANG				
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		0.00	1	paket	39,381,950.00	1	tahun	paket	19,703,000.00	10	Kegiatan	39,523,300.00	4	Kegiatan	39,523,300.00	99.99	%	39,523,300.00	91.01	%	39,523,300.00	KECAMATAN SEPANG				
7.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		975,000.00	5	Laporan	2,500,000.00	1	tahun	Laporan	1,380,000.00	1	Kegiatan	2,485,000.00			2,485,000.00	99.40	%	2,485,000.00	91.01	%	3,460,000.00	KECAMATAN SEPANG				
7.01.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		142,437,782.00	111	Laporan	165,300,000.00	1	tahun	Laporan	57,313,042.00	8	Kegiatan	138,092,797.00	7	Laporan	165,152,797.00	99.91	%	165,152,797.00	91.01	%	307,590,579.00	KECAMATAN SEPANG				
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang kegiatan pada kantor Kecamatan sepang		9,137,500.00	100	%	9,137,500.00			%	9,000,000.00					0.00	0.00	%	0.00	0.00	%	0.00	KECAMATAN SEPANG					
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Perlatan dan Mebel Lainnya	Jumlah Unit Perlatan dan Mebel Lainnya yang Disediakan		9,137,500.00	4	unit	9,137,500.00			unit	9,000,000.00	1	Paket	59,010,000.00	4	Unit	59,010,000.00	644.39	%	59,010,000.00	91.01	%	59,010,000.00	KECAMATAN SEPANG				
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan SOPD		271,068,884.00	100	%	217,085,140.00	100	%	%	117,808,500.00					0.00	0.00	%	0.00	0.00	%	271,068,884.00	KECAMATAN SEPANG					
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Survei Menyangkut	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Survei Menyangkut		3,320,000.00	150	Laporan	5,150,000.00	1	tahun	Laporan	2,510,000.00	0.00	1	Kegiatan	2,514,000.00			2,514,000.00	49.98	%	2,514,000.00	91.01	%	5,594,000.00	KECAMATAN SEPANG			
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		20,256,386.00	12	Laporan	13,800,000.00	1	tahun	Laporan	4,420,392.00	8	Bulan	11,442,552.00	6	Laporan	12,444,452.00	90.18	%	12,444,452.00	91.01	%	32,700,840.00	KECAMATAN SEPANG				
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Perlatan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Perlatan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan		20,050,000.00	12	Laporan	4,318,600.00	1	tahun	Laporan	0.00						4,269,600.00	98.87	%	4,269,600.00	91.01	%	24,319,600.00	KECAMATAN SEPANG				
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		227,432,496.00	36	Laporan	193,816,540.00	11	Bulan	Laporan	113,388,108.00	9	Kegiatan	238,160,229.00	7	Laporan	272,931,608.00	140.82	%	272,931,608.00	91.01	%	500,364,104.00	KECAMATAN SEPANG				
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional dan bangunan gedung kantor/bangunan lainnya		12,630,086.00	100	%	106,650,000.00	100	%	%	43,926,000.00					0.00	0.00	%	0.00	0.00	%	12,630,086.00	KECAMATAN SEPANG					
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan dan dibarengkan Pakainya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan dan dibarengkan Pakainya		3,381,084.00	1	unit	43,440,829.00	5	unit	unit	19,547,000.00	10	Kegiatan	37,472,500.00	2	Kegiatan	41,187,500.00	94.81	%	41,187,500.00	91.01	%	44,568,584.00	KECAMATAN SEPANG				
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibarengkan Pakainya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibarengkan Pakainya		9,249,002.00	0	unit	63,209,174.00	5	unit	unit	24,379,500.00	10	Kegiatan	54,575,000.00	2	Kegiatan	58,203,000.00	92.08	%	58,203,000.00	91.01	%	67,492,002.00	KECAMATAN SEPANG				
7.01.02	PROGRAM PENYELANGKARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	362,728,565.00			13,712,955.00	100	%	%	9,540,400.00					0.00	0.00	%	0.00	0.00	%	13,712,955.00	KECAMATAN SEPANG					
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Penyediaan pelayanan di tingkat Kecamatan	100%	8,133,000.00			8,133,000.00				3,980,400.00					0.00	0.00	%	0.00	0.00	%	0.00	KECAMATAN SEPANG					
7.01.02.2.01.02	Pengelolaan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Pengingat Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	8,133,000.00			8,133,000.00			dokumen	3,980,400.00	1	Kegiatan	6,850,800.00	6	Laporan	8,091,800.00	99.49	%	8,091,800.00	91.01	%	8,091,800.00	KECAMATAN SEPANG				
7.01.02.2.02	Penyenggaraan Usuan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah yang Ada di Kecamatan	Terseleenggaranya pelayanan administrasi yang terpadu di Kecamatan		18,675,518.00	1	kegiatan	5,579,955.00	1	kegiatan	kegiatan	5,560,000.00					0.00	0.00	%	0.00	0.00	%	18,675,518.00	KECAMATAN SEPANG					
7.01.02.2.02.03	Pengelolaan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Pengingat Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		18,675,518.00	8	Laporan	5,579,955.00	1	kegiatan	Laporan	5,560,000.00	1	Kegiatan	5,560,000.00	6	Laporan	5,560,000.00	99.64	%	5,560,000.00	91.01	%	24,236,518.00	KECAMATAN SEPANG				
7.01.03	PROGRAM PENYELANGKARAAN USUAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Usuan Pemerintahan Umum	100%	390,930,495.00			100,927,112.00	100	%	%	2,968,500.00					0.00	0.00	%	0.00	0.00	%	0.00	KECAMATAN SEPANG					
7.01.03.2.01	Penyenggaraan Usuan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penunjang kegiatan paksiwa dan pembinaan daerah		100,927,112.00	2	kegiatan	100,927,112.00			kegiatan	2,968,500.00					0.00	0.00	%	0.00	0.00	%	0.00	KECAMATAN SEPANG					
7.01.03.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Meningkatkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemertahanan Ketahanan Nasional Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Meningkatkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemertahanan Ketahanan Nasional Republik Indonesia		0.00	35	orang	94,956,350.00	3	kegiatan	orang	0.00	1	Kegiatan	94,865,500.00			94,865,500.00	99.90	%	94,865,500.00	91.01	%	94,865,500.00	KECAMATAN SEPANG				
7.01.03.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		0.00	1	dokumen	5,930,762.00	1	Kegiatan	dokumen	2,968,500.00	1	Kegiatan	2,968,500.00	1	Dokumen	5,933,500.00	99.98	%	5,933,500.00	91.01	%	5,933,500.00	KECAMATAN SEPANG				
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	1,176,597,596.00			74,037,600.00	100	%	%	27,334,500.00					0.00	0.00	%	0.00	0.00	%	83,647,566.00	KECAMATAN SEPANG					
7.01.06.2.01	fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan data administrasi desa yang akurat		83,647,566.00	100	%	74,037,600.00	3	Kegiatan	%	27,334,500.00					0.00	0.00	%	0.00	0.00	%	83,647,566.00	KECAMATAN SEPANG					
7.01.06.2.01.03	fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Disiapkan dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		16,858,518.00	18	dokumen	45,000,000.00	1	Kegiatan	dokumen	21,300,000.00	9	Kegiatan	31,950,000.00	7	Kegiatan	39,050,000.00	86.78	%	39,050,000.00	91.01	%	55,908,518.00	KECAMATAN SEPANG				
7.01.06.2.01.11	fasilitas Penyelenggaraan Keterlaksanaan dan Keterlaksanaan Usuan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Keterlaksanaan dan Keterlaksanaan Usuan		64,119,048.00	4	dokumen	6,030,000.00	1	Kegiatan	dokumen	6,034,500.00	1	Kegiatan	6,034,500.00	4	Dokumen	6,034,500.00	99.98	%	6,034,500.00	91.01	%	70,152,548.00	KECAMATAN SEPANG				
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		2,670,000.00	6	Laporan	23,001,000.00	1	Kegiatan	Laporan	0.00					0.00	0.00	%	0.00	0.00	%	2,670,000.00	KECAMATAN SEPANG					

Kode	Usuran/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPJMD/REKSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2024 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			I		II		III		IV		K		K		K		K		24 = 14 / 6 x100%		25 = 14 / 6 x100%									
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				310,130,901.00	1	Tahun	2,355,670,356.00	100	%	310,130,901.00	Tahun	3,502,719,042.00							0.00	%	0.00	%	91.01	%	310,130,901.00		KECAMATAN MANUHUNG	
7.01.01.2.02.01	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				310,130,901.00	24	orang/bulan	2,353,479,219.00	1	Tahun	310,130,901.00	orang/bulan	3,387,910,348.00							3,387,910,348.00	143.95	%	3,387,910,348.00	91.01	%	3,698,042,249.00		KECAMATAN MANUHUNG	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1	laporan	2,191,087.00				laporan	45,000.00							45,000.00	2.05	%	45,000.00	91.01	%	45,000.00		KECAMATAN MANUHUNG	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tercapainya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kantor Kecamatan Manuhung				0.00	1	Kegiatan	12,913,897.00	1	Dokumen	0.00	Kegiatan	101,744,797.00							0.00	0.00	%	0.00	91.01	%	0.00		KECAMATAN MANUHUNG	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0.00	4	laporan	12,913,897.00	1	Dokumen	0.00	laporan	13,018,897.00							13,018,897.00	100.81	%	13,018,897.00	91.01	%	13,018,897.00		KECAMATAN MANUHUNG	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Pengadaan Pakiaen Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				18,000,000.00	2	Paket/Kegiatan	45,566,630.00	2	Kegiatan	0.00	Paket/Kegiatan	53,012,950.00							0.00	0.00	%	0.00	91.01	%	18,000,000.00		KECAMATAN MANUHUNG	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakiaen Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakiaen Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				18,000,000.00	29	paket	25,912,950.00	1	Kegiatan	0.00	paket	35,712,950.00							35,712,950.00	137.82	%	35,712,950.00	91.01	%	53,712,950.00		KECAMATAN MANUHUNG	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				93,720,000.00	5	orang	23,653,680.00	1	kegiatan	0.00	orang	17,300,000.00							17,300,000.00	73.14	%	17,300,000.00	91.01	%	111,020,000.00		KECAMATAN MANUHUNG	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan/Material dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				81,951,000.00	1	Tahun	508,976,083.00			0.00	Tahun	437,256,871.00							0.00	0.00	%	0.00	91.01	%	81,951,000.00		KECAMATAN MANUHUNG	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0.00	1	paket	12,115,200.00	1	Tahun	0.00	paket	0.00							0.00	0.00	%	0.00	91.01	%	0.00		KECAMATAN MANUHUNG	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0.00	1	paket	148,075,034.00	1	Tahun	0.00	paket	0.00							0.00	0.00	%	0.00	91.01	%	0.00		KECAMATAN MANUHUNG	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				81,951,000.00	3	paket	93,741,448.00	1	Tahun	0.00	paket	110,000,000.00							110,000,000.00	119.90	%	110,000,000.00	91.01	%	191,951,000.00		KECAMATAN MANUHUNG	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0.00	1	paket	7,393,266.00	1	Tahun	0.00	paket	7,393,266.00							7,393,266.00	100.00	%	7,393,266.00	91.01	%	7,393,266.00		KECAMATAN MANUHUNG	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0.00	1	paket	49,670,835.00	1	Tahun	0.00	paket	2,200,000.00							2,200,000.00	4.43	%	2,200,000.00	91.01	%	2,200,000.00		KECAMATAN MANUHUNG	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500	laporan	199,980,300.00	1	Tahun	0.00	laporan	317,663,605.00								317,663,605.00	158.85	%	317,663,605.00	91.01	%	317,663,605.00		KECAMATAN MANUHUNG	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Mobil Kantor Kecamatan Manuhung dan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				93,720,000.00	2	paket	56,943,000.00			0.00	paket	81,011,163.00							0.00	0.00	%	0.00	91.01	%	93,720,000.00		KECAMATAN MANUHUNG	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0.00	1	unit	59,381,163.00	2	unit	0.00	unit	59,381,163.00							59,381,163.00	168.23	%	59,381,163.00	91.01	%	59,381,163.00		KECAMATAN MANUHUNG	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mobil	Jumlah Paket Mobil yang Disediakan				4	unit	21,645,000.00				0.00	unit	21,630,000.00							21,630,000.00	99.93	%	21,630,000.00	91.01	%	21,630,000.00		KECAMATAN MANUHUNG	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				60,636,813.00	1	Tahun	250,381,760.00	100	%	56,896,813.00	Tahun	347,428,864.00							0.00	0.00	%	0.00	91.01	%	60,636,813.00		KECAMATAN MANUHUNG	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0.00	55	laporan	34,277,228.00	1	Tahun	0.00	laporan	34,277,228.00							34,277,228.00	125.01	%	34,277,228.00	91.01	%	34,277,228.00		KECAMATAN MANUHUNG	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0.00	6	laporan	222,861,760.00	11	Bulan	0.00	laporan	313,150,836.00							313,150,836.00	140.51	%	313,150,836.00	91.01	%	313,150,836.00		KECAMATAN MANUHUNG	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pakaj Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				32,454,000.00	1	Tahun	126,709,502.00			0.00	Tahun	246,796,764.00							0.00	0.00	%	0.00	91.01	%	32,454,000.00		KECAMATAN MANUHUNG	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pakaj Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan dan Dibayarkan Pakajnya				32,454,000.00	14	unit	118,722,542.00			0.00	unit	223,641,764.00							223,641,764.00	189.15	%	223,641,764.00	91.01	%	254,096,764.00		KECAMATAN MANUHUNG	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0.00	9	unit	6,476,959.00			0.00	unit	23,155,000.00							23,155,000.00	272.15	%	23,155,000.00	91.01	%	23,155,000.00		KECAMATAN MANUHUNG	
7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Tercapainya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah				1	laporan	3,733,600.00				0.00	laporan	36,557,036.00							0.00	0.00	%	0.00	91.01	%	0.00		KECAMATAN MANUHUNG	
7.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah				1	Dokumen	3,733,600.00					Dokumen	36,557,036.00							36,557,036.00	979.14	%	36,557,036.00	91.01	%	36,557,036.00		KECAMATAN MANUHUNG	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0.00	100	%	58,311,817.00	100	%	0.00			0.00	%	4,197,500.00							0.00	0.00	%	0.00	91.01	%	0.00		KECAMATAN MANUHUNG	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0.00	2	kegiatan	58,311,817.00	2	kegiatan	0.00	kegiatan	4,197,500.00							0.00	0.00	%	0.00	91.01	%	0.00		KECAMATAN MANUHUNG	
7.01.02.2.01.02	Penyediaan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0.00	1	Dokumen	58,311,817.00	2	kegiatan	0.00	Dokumen	4,197,500.00							4,197,500.00	7.20	%	4,197,500.00	91.01	%	4,197,500.00		KECAMATAN MANUHUNG	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	3,378,004,121.00					170,791,800.00	100	%	142,002,929.00	100	%	17,084,700.00							0.00	0.00	%	0.00	91.01	%	170,791,800.00		KECAMATAN MANUHUNG
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan Manuhung				20,492,600.00	1	Kegiatan	15,722,762.00	1	Kegiatan	0.00	Kegiatan	17,084,700.00							0.00	0.00	%	0.00	91.01	%	20,492,600.00		KECAMATAN MANUHUNG	
7.01.03.2.01.01	Penyediaan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				20,492,600.00	12	lembaga ke masyarakat	15,722,762.00	1	Kegiatan	0.00	lembaga ke masyarakat	17,084,700.00							17,084,700.00	108.66	%	17,084,700.00	91.01	%	37,577,300.00		KECAMATAN MANUHUNG	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Manuhung				123,123,000.00	3	Kegiatan	126,280,167																					

Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPJMD/REKSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RPJMD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2024 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13			15 = 14 / 6 x100%					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp				
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan		6.412.800,00	2	paket	14.394.600,00	2	Jenis	1.400.000,00		paket	5.380.000,00		K	21	Rp	2	K	22	Rp	99.99	%	14.393.000,00	91.01	%	20.805.800,00
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		36.031.000,00	18	paket	26.041.219,00	12	Jenis	9.492.200,00		paket	12.937.800,00				25	Jenis	25.957.600,00	99.68	%	25.957.600,00	91.01	%	61.988.600,00		
7.01.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		205.849.400,00	50	Laporan	145.863.900,00		Laporan	21.390.700,00		Laporan	67.658.604,00				38	Laporan	216.754.704,00	144.63	%	216.754.704,00	91.01	%	422.654.324,00		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Meubel Kantor Kecamatan Milihra Raya		75.372.460,00	3	Jenis	52.810.968,00		Jenis	0,00		Jenis	52.650,000,00						0,00	%	0,00	91.01	%	75.372.460,00			
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		75.372.460,00	4	unit	52.810.968,00		Jenis	0,00		unit	52.650,000,00						99,70	%	52.650,000,00	91.01	%	128.022.460,00			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Materi, Rekening Air, Listrik, Woli dan Honor PTT		579.625.170,00	5	Jenis	203.150.610,00		%	6.050,000,00		Jenis	104.943.788,00						0,00	%	0,00	91.01	%	579.625.170,00			
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		6.500,000,00	240	lembar	3.300,000,00		Jenis	1.200,000,00		lembar	1.900,000,00				240	lbr	3.300,000,00	100,00	%	3.300,000,00	91.01	%	9.800,000,00		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		14.598,000,00	3	Laporan	25.121,000,00		3	Rekening	2.520,000,00		Laporan	19.055,000,00				3	Rekening	50.495,500,00	173,40	%	50.495,500,00	91.01	%	65.091,300,00	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		548.390.770,00	10	Laporan	170.729.610,00		Orang	0,00		Laporan	84.138.788,00				5	Orang	199.408.488,00	116,80	%	199.408.488,00	91.01	%	747.798.258,00		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang dan jasa pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan gedung Kantor Kecamatan Mhng Raya dan kendaraan dinas		150.940.801,00	12	Jenis	147.388.681,00		Unit	37.216,500,00		Jenis	70.516.700,00						0,00	%	0,00	91.01	%	150.940.801,00			
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan dan dibayarkan Pakainya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan dan dibayarkan Pakainya		88.632,000,00	7	Unit	96.495.273,00		1	Unit	11.251,000,00		Unit	27.421,000,00			7	Unit	103.844,000,00	107,62	%	103.844,000,00	91.01	%	192.476,000,00		
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Diperbaiki		4.400,000,00	100	unit	12.487,500,00					unit	12.450,000,00						0,00	%	0,00	91.01	%	0,00			
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperbaiki		1.400,000,00	8	unit	18.275,208,00		5	Jenis	9.032,000,00			10.515,000,00			5	Jenis	33.805,000,00	184,98	%	33.805,000,00	91.01	%	38.205,000,00		
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Prasarana Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Prasarana Lainnya yang Disediakan/Rehabilitasi		57.930.801,00	20	unit	20.130.700,00		6	Jenis	16.933,500,00		Jenis	38.876,000,00			6	Jenis	38.876,000,00	193,12	%	38.876,000,00	91.01	%	96.806,801,00		
7.01.01.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100%	3.254.395.209,00			219.378.700,00	100	%	162.371.956,00	100	%	7.554.300,00						0,00	%	0,00	91.01	%	219.378.700,00			
7.01.03.0.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa		12.762.200,00	6	Laporan	10.040.150,00		5	Kegiatan	7.554.300,00		Laporan	10.002,000,00					0,00	%	0,00	91.01	%	12.762.200,00			
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		12.762.200,00	0	lembaga ke masyarakat	10.040.150,00		5	Jenis	7.554.300,00		lembaga ke masyarakat	10.002,000,00			5	Jenis	10.002,000,00	99,62	%	10.002,000,00	91.01	%	22.704.200,00		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tersedianya Barang dan Jasa Kegiatan Festival Budaya, Pameran, Festival Tradisi dan Pelestarian		0,00	18	Jenis	152.331.806,00			Kegiatan	0,00		Jenis	0,00					0,00	%	0,00	91.01	%	0,00			
7.01.03.2.03.01	Penyenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditenggarakan		0,00	6	lembaga ke masyarakat	131.877,835,00		Jenis	0,00		lembaga ke masyarakat	0,00				7	Jenis	120.021,750,00	91,01	%	120.021,750,00	91.01	%	120.021,750,00		
7.01.03.2.03.04	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		0,00	1	Laporan	20.453.971,00		Jenis	0,00		Laporan	0,00						20.328.848,00	99,38	%	20.328.848,00	91.01	%	20.328.848,00		
7.01.01.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	100%	453.695.400,00			80.590.700,00	100	%	174.372.681,00		%	8.155.200,00						0,00	%	0,00	91.01	%	80.590.700,00			
7.01.05.0.01	Penyenggaraan Usuan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Usuan Berjalan dan Jasa Kegiatan Raker, Lomba Desa, Pramuka dan Padatira		33.047.400,00	-	-	174.372.681,00		Kegiatan	5.004.600,00		-	8.155.200,00						0,00	%	0,00	91.01	%	33.047.400,00			
7.01.05.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Meningkatkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Meningkatkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		0,00	10	Orang	16.641.168,00			Orang	0,00		Orang	0,00					16.336.900,00	98,17	%	16.336.900,00	91.01	%	16.336.900,00		
7.01.05.2.01.02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		47.543.300,00	24	Orang	22.526.980,00		Jenis	0,00		Orang	0,00				19	Jenis	21.708.885,00	96,37	%	21.708.885,00	91.01	%	69.252.885,00		
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Perilaku dan Ketahanan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perilaku dan Ketahanan Bangsa		0,00	20	Orang	74.463.462,00		Jenis	0,00		Orang	0,00				11	Jenis	74.361.850,00	99,86	%	74.361.850,00	91.01	%	74.361.850,00		
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Ketahanan Antirasis dan Intoleransi, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Secara Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Ketahanan Antar Suku dan Golongan Lainnya Secara Nasional		0,00	24	Orang	60.741.071,00		2	Jenis	5.004.600,00		Orang	8.155.200,00			8	Jenis	44.837.400,00	73,82	%	44.837.400,00	91.01	%	44.837.400,00		
7.01.01.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAJARAN PEMERINTAHAN DESA	Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100%	453.695.400,00			170.332.986,00		%	0,00		%	43.796.994,00						0,00	%	0,00	91.01	%	47.392.600,00			
7.01.06.0.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersedianya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		47.392.600,00	100	%	170.332.986,00		%	0,00		%	43.796.994,00						0,00	%	0,00	91.01	%	47.392.600,00			
7.01.06.2.01.02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Disediakan dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		0,00	0	Dokumen	67.828.860,00		orang	0,00		Dokumen	27.388.496,00				2	Orang	70.232.196,00	103,54	%	70.232.196,00	91.01	%	70.232.196,00		
7.01.06.2.01.03	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Disediakan dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		42.772.600,00	5	Dokumen	67.909.016,00			Orang	0,00		Dokumen	3.153,000,00			5	Orang	57.193,000,00	84,22	%	57.193,000,00	91.01	%	99.965,600,00		
7.01.06.2.01.16	Facilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		4.650.000,00	6	Dokumen	34.585.110,00		orang	0,00		Dokumen	13.255.498,00				1	Orang	35.453.198,00	102,51	%	35.453.198,00	91.01	%	40.073.198,00		
7.01.01.3	KELURAHAN KAMPURI	Persentase Capaian Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	%			218.000,000,00			%	37.660,000,00								0,00	%	0,00	91.01	%	0,00			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersedianya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan Kampuri		5	Jenis	218.000,000,00			Jenis	37.660,000,00			0,00						0,00	%	0,00	91.01	%	0,00			
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		15	Lembaga Ke masyarakat	4.500,000,00			Lembaga Ke masyarakat	0,00			0,00						0,00	%	0,00	91.01					

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPJMD/REKSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RPJMD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2024 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini	Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						I		II		III		IV		V		VI		VII								
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		147,445,914.00	40	Paket	66,326,314.00	41	Paket	34,206,800.00	Paket	51,090,160.00	40	Paket	162,920,185.00	40	Paket	130,384,527.00	196.58	%	130,384,527.00	91.01	%	277,830,441.00		KECAMATAN RUNGAN HULU
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		5,620,000.00	3	Paket	2,800,000.00	1	Paket	2,000,000.00	Paket	410,000.00	3	Paket	2,763,200.00	3	Paket	2,660,000.00	96.00	%	2,660,000.00	91.01	%	8,280,000.00		KECAMATAN RUNGAN HULU
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		82,619,518.00	1	Paket	712,250.00	0	Paket	0.00	Paket	0.00	1	Paket	2,211,370.00	1	Paket	712,000.00	99.96	%	712,000.00	91.01	%	83,331,518.00		KECAMATAN RUNGAN HULU
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		56,490,130.00	100	Laporan	169,954,000.00	30	Laporan	10,810,600.00	Laporan	97,941,608.00	100	Laporan	304,231,799.00	100	Laporan	247,654,630.00	145.72	%	247,654,630.00	91.01	%	306,084,760.00		KECAMATAN RUNGAN HULU
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		69,190,000.00	100	%	267,243,916.00	2	Unit	96,932,000.00	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.01	%	69,190,000.00		KECAMATAN RUNGAN HULU
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		108,114,000.00	2	Unit	108,114,000.00		Unit	0.00	0.00	4	Unit	41,736,000.00	38.60	%	41,736,000.00	91.01	%	41,736,000.00	91.01	%	41,736,000.00		KECAMATAN RUNGAN HULU	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terselangnya pengadaan peralatan untuk pemeliharaan peralatan gedung kantor		0.00	2	Unit	159,129,916.00	2	Unit	96,932,000.00	Unit	0.00	4	Unit	163,823,290.00	4	Unit	37,737,000.00	23.71	%	37,737,000.00	91.01	%	37,737,000.00		KECAMATAN RUNGAN HULU
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa		212,542,113.00	100	%	3,130,000.00		%	154,088,022.00	%	294,095,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.01	%	212,542,113.00		KECAMATAN RUNGAN HULU
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa		20,425,518.00	4	Laporan	3,130,000.00	4	Laporan	1,000,000.00	Laporan	1,000,000.00	4	Laporan	3,000,000.00	4	Laporan	2,300,000.00	73.48	%	2,300,000.00	91.01	%	22,725,518.00		KECAMATAN RUNGAN HULU
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		27,000,000.00	7	Laporan	10,944,000.00	8	Laporan	1,000,000.00	Laporan	3,000,000.00	7	Laporan	16,690,000.00	7	Laporan	8,415,000.00	76.89	%	8,415,000.00	91.01	%	35,415,000.00		KECAMATAN RUNGAN HULU
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		165,116,595.00	12	Laporan	466,068,740.00	12	Laporan	136,417,122.00	Laporan	290,095,992.00	12	Laporan	978,970,958.00	12	Laporan	464,716,981.00	99.58	%	464,716,981.00	91.01	%	629,833,576.00		KECAMATAN RUNGAN HULU
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dihayati Pajalnya		37,841,404.00	100	%	92,470,300.00		0.00	%	15,303,733.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.01	%	37,841,404.00		KECAMATAN RUNGAN HULU
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dihayati Pajalnya	Jumlah Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dihayati Pajalnya		37,841,404.00	15	Unit	92,470,300.00	15	Unit	16,170,900.00	Unit	15,303,733.00	15	Unit	103,483,133.00	15	Unit	70,031,524.00	75.73	%	70,031,524.00	91.01	%	107,872,929.00		KECAMATAN RUNGAN HULU
07.01.02	PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Masyarakat untuk kegiatan sosial pembangunan terus ditingkatkan		70,851,436.00	95	%	12,917,034.00	95	%	0.00	%	6,971,260.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.01	%	70,851,436.00	20.81	KECAMATAN RUNGAN HULU
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	0.00	0.00	0.00	91.01	%			KECAMATAN RUNGAN HULU	
	Koordinasi Sinergi Penceranaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Tingkat Kecamatan																	0.00	0.00	0.00	91.01	%			KECAMATAN RUNGAN HULU	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		23,996,000.00	95	%	12,917,034.00		0.00	5,998,760.00	%	6,971,260.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.01	%	23,996,000.00		KECAMATAN RUNGAN HULU
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		23,996,000.00	3	Dokumen	12,917,034.00	3	Dokumen	5,998,760.00	Dokumen	6,971,260.00	3	Dokumen	30,716,350.00	3	Dokumen	31,693,241.00	245.36	%	31,693,241.00	91.01	%	55,648,241.00		KECAMATAN RUNGAN HULU
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Persepsi masyarakat dapat peran serta dalam pembangunan		178,574,000.00	95	%	6,329,425.00	6	%	30,760,425.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.01	%	178,574,000.00	4.54	KECAMATAN RUNGAN HULU
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan		2,635,800.00	95	%	6,329,425.00		0.00	6,329,425.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.01	%	2,635,800.00		KECAMATAN RUNGAN HULU
7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan		2,635,800.00	100	Unit	6,329,425.00	0	Unit	0.00	Unit	6,329,425.00	100	Unit	12,094,036.00	100	Unit	6,329,425.00	100.00	%	6,329,425.00	91.01	%	8,965,225.00		KECAMATAN RUNGAN HULU
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Peraturan Kapas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		24,234,777.00	95	%	10,969,430.00		0.00	0.00	%	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.01	%	24,234,777.00		KECAMATAN RUNGAN HULU
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Rungan Hulu		24,234,777.00	95	%	10,969,430.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.01	%	24,234,777.00		KECAMATAN RUNGAN HULU
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		24,234,777.00	5	Laporan	10,969,430.00	0	Laporan	0.00	Laporan	0.00	5	Laporan	10,777,000.00	5	Laporan	10,825,430.00	98.69	%	10,825,430.00	91.01	%	35,060,207.00		KECAMATAN RUNGAN HULU
7.01.05	PROGRAM PENYELANGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai peraturan kepala daerah		258,291,866.00	0	%	0.00	0	%	0.00	%	13,875,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.01	%	0.00	0.00	KECAMATAN RUNGAN HULU
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengembangan Pancasila		258,291,866.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	13,875,000.00	25	Orang	481,148,315.00	25	Orang	240,068,597.00	92.94	%	240,068,597.00	91.01	%	240,068,597.00		KECAMATAN RUNGAN HULU
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengembangan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengembangan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia		258,291,866.00	0	Orang	0.00	0	Orang	0.00	Orang	13,875,000.00	25	Orang	481,148,315.00	25	Orang	240,068,597.00	92.94	%	240,068,597.00	91.01	%	240,068,597.00		KECAMATAN RUNGAN HULU
	KELURAHAN TUMBANG RAHAYAN																	0.00	0.00	0.00	91.01	%	0.00		KELURAHAN TUMBANG RAHAYAN	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																	0.00	0.00	0.00	91.01	%	0.00		KELURAHAN TUMBANG RAHAYAN	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																	0.00	0.00	0.00	91.01	%	0.00		KELURAHAN TUMBANG RAHAYAN	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Tersedia		472,957,035.00	3	Unit	200,000,000.00		0.00	0.00	Unit	473,065,160.00	3	Unit	198,563,220.00	99.28	%	198,563,220.00	91.01	%	198,563,220.00	91.01	%	198,563,220.00		KELURAHAN TUMBANG RAHAYAN
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		472,957,035.00	3	Pokmas/Ormas	272,957,035.00		0.00	0.00	Pokmas/Ormas	387,028,222.00	3	Pokmas/Ormas	287,827,378.00	105.45	%	287,827,378.00	91.01	%	287,827,378.00	91.01				

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPJMD/REKSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2024 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			I		II		III		IV		24 = 7 + 13		25 = 14 + 100%										
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Pemerintah/Unduhan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Pemerintah/Unduhan			2	orang	90.467.050,00			0	orang	51.249.095,00			89.995.715,00	99,48	%	89.995.715,00	91,01	%	89.995.715,00		KECAMATAN DAMANG BATU
7.01.01.2.06	Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Terakompleksnya Ketidakhadiran/keperluan Dinas dalam melaksanakan Tugas	258.136.046,00	5	Laporan	715.187.726,00	0	Orang	0,00	Laporan	237.538.700,00			0,00	0,00	91,01	%	258.136.046,00			KECAMATAN DAMANG BATU		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.626.960,00	7	Paket	0,00	0	Paket	0,00	Paket				0,00	0,00	91,01	%	5.626.960,00			KECAMATAN DAMANG BATU		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0,00	1	Paket	173.072.976,00	0	Paket	0,00	Paket	59.750.000,00			202.500.000,00	117,00	%	202.500.000,00	91,01	%	202.500.000,00		KECAMATAN DAMANG BATU	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.889.200,00	5	Paket	15.330.000,00	0	Paket	0,00	Paket	7.164.500,00			7.666.000,00	50,00	%	7.666.000,00	91,01	%	10.554.200,00		KECAMATAN DAMANG BATU	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	62.709.686,00	2	Paket	54.860.000,00	0	Paket	0,00	Paket	14.225.000,00			27.500.000,00	50,13	%	27.500.000,00	91,01	%	90.209.686,00		KECAMATAN DAMANG BATU	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6.951.000,00	2	Paket	6.332.000,00	0	Paket	0,00	Paket	3.062.800,00			8.332.000,00	100,00	%	8.332.000,00	91,01	%	15.263.000,00		KECAMATAN DAMANG BATU	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0,00	3	Paket	175.251.150,00	0	Paket	0,00	Paket	24.243.000,00			204.563.650,00	116,73	%	204.563.650,00	91,01	%	204.563.650,00		KECAMATAN DAMANG BATU	
7.01.01.2.06.08	Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan	0,00	5	Laporan	15.330.000,00	0	Laporan	0,00	Laporan	6.387.500,00			15.330.000,00	100,00	%	15.330.000,00	91,01	%	15.330.000,00		KECAMATAN DAMANG BATU	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129.702.900,00	60	Laporan	273.011.600,00	0	Laporan	0,00	Laporan	129.870.400,00			326.076.162,00	119,44	%	326.076.162,00	91,01	%	455.779.062,00		KECAMATAN DAMANG BATU	
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Aang Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Aang Dinamis pada SKPD	1.500.000,00	5	Dokumen	0,00	0	Dokumen	0,00	Dokumen				0,00	0,00	91,01	%	1.500.000,00			KECAMATAN DAMANG BATU		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terseleksi dan terdapatnya Penunjang sebagai pendukung kelancaran kerja	55.406.408,00	3	Unit	45.510.000,00	0	Sub Kegiatan	0,00	Unit	0,00			0,00	0,00	91,01	%	55.406.408,00			KECAMATAN DAMANG BATU		
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0,00	2	Unit	45.510.000,00	0	Unit	0,00	Unit	36.293.000,00			36.293.000,00	79,75	%	36.293.000,00	91,01	%	36.293.000,00		KECAMATAN DAMANG BATU	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0,00	1	Unit	0,00	0	Unit	0,00	Unit				0,00	0,00	91,01	%	0,00			KECAMATAN DAMANG BATU		
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6.650.000,00	1	Unit	0,00	0	Unit	0,00	Unit				0,00	0,00	91,01	%	6.650.000,00			KECAMATAN DAMANG BATU		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Aset yang dimiliki Kecamatan dan Kelurahan secara berkala	171.876.223,00	105	Laporan	322.123.072,00	0	Sub Kegiatan	0,00	Laporan	170.264.712,00			0,00	0,00	91,01	%	171.876.223,00			KECAMATAN DAMANG BATU		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Sarut Menyurut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sarut Menyurut	1.590.000,00	100	Laporan	12.958.602,00	0	Laporan	0,00	Laporan	6.474.750,00			12.958.602,00	100,00	%	12.958.602,00	91,01	%	14.546.602,00		KECAMATAN DAMANG BATU	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0,00	2	Laporan	15.450.000,00	0	Laporan	0,00	Laporan	6.400.000,00			15.450.000,00	100,00	%	15.450.000,00	91,01	%	15.450.000,00		KECAMATAN DAMANG BATU	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	170.286.223,00	3	Laporan	293.714.470,00	0	Laporan	0,00	Laporan	157.389.962,00			314.786.110,00	107,17	%	314.786.110,00	91,01	%	485.071.333,00		KECAMATAN DAMANG BATU	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Aset yang dimiliki Kecamatan dan Kelurahan secara berkala	64.617.018,00	18	Unit	90.633.900,00	0	Sub Kegiatan	0,00	Unit	41.696.000,00			0,00	0,00	91,01	%	64.617.018,00			KECAMATAN DAMANG BATU		
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan dan dibagikan Pakainya	0,00	8	Unit	0,00	0	Unit	0,00	Unit				0,00	0,00	91,01	%	0,00			KECAMATAN DAMANG BATU		
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibagikan Pakainya	0,00	1	Unit	3.654.900,00	0	Unit	0,00	Unit	0,00			3.648.800,00	99,83	%	3.648.800,00	91,01	%	3.648.800,00		KECAMATAN DAMANG BATU	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19.955.518,00	6	Unit	86.975.000,00	0	Unit	0,00	Unit	45.308.500,00			86.969.696,00	99,99	%	86.969.696,00	91,01	%	106.925.214,00		KECAMATAN DAMANG BATU	
		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Berpenumpang														91,01							
		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Beroda Dua														91,01							
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dikelola	30.255.000,00	9	Unit	0,00	0	Unit	0,00	Unit				0,00	0,00	91,01	%	30.255.000,00			KECAMATAN DAMANG BATU		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diprofilkan/Rehabilitasi	14.408.500,00	2	Unit	0,00	0	Unit	0,00	Unit				0,00	0,00	91,01	%	14.408.500,00			KECAMATAN DAMANG BATU		
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diprofilkan/Rehabilitasi		1	Unit	0,00	0	Unit	0,00	Unit				0,00	0,00	91,01	%	0,00			KECAMATAN DAMANG BATU		
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan dan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan	100%	209.912.900,00		89.713.018,00	98	%	0	Kegiatan	0,00	%		0,00	0,00	91,01	%	89.713.018,00	42,74		KECAMATAN DAMANG BATU		
7.01.02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Bersinergi dan Terkelola Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			89.713.018,00	3	Laporan	0,00	0	Sub Kegiatan	0,00	Laporan		0,00	0,00	91,01	%	89.713.018,00			KECAMATAN DAMANG BATU		
7.01.02.01.01	Koordinasi/Sinergi Pemencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pemencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			89.713.018,00	1	Laporan	0,00	0	Laporan	0,00			0,00	0,00	91,01	%	89.713.018,00			KECAMATAN DAMANG BATU		
7.01.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			0,00	3	Dokumen	0,00	0	Dokumen	0,00			0,00	0,00	91,01	%	0,00			KECAMATAN DAMANG BATU		
7.01.02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Damang Batu			2	Laporan	0,00	0	Sub Kegiatan	0,00	Laporan			0,00	0,00	91,01	%	0,00			KECAMATAN DAMANG BATU		
7.01.02.02.01	Pencapaian Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pencapaian Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			1	Dokumen		0,00	0	Dokumen	0,00			0,00	0,00	91,01	%	0,00			KECAMATAN DAMANG BATU		
7.01.02.02.02	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			1	Laporan		0,00	0	Laporan	0,00			0,00	0,00	91,01	%	0,00			KECAMATAN DAMANG BATU		
7.01.02.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1	Laporan		0,00	0	Laporan	0,00			0,00	0,00	91,01	%	0,00			KECAMATAN DAMANG BATU		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terseleenggaranya Kegiatan Urusan Pelayanan Perizinan, Nopertizinan dan Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat			1	Laporan	0,00	0	Sub Kegiatan	0,00	Laporan			0,00	0,00	91,01	%	0,00			KECAMATAN DAMANG BATU		
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan dan Nopertizinan	Jumlah Dokumen Non Perizinan dan Nopertizinan yang Dilaksanakan			1	Dokumen		0,00	0	Dokumen	0,00			0,00	0,00	91,01	%	0,00			KECAMATAN DAMANG BATU		
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nopertizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nopertizinan pada Urusan Pemerintahan			1	Laporan		0,00	0	Laporan	0,00			0,00	0,00	91,01	%	0,00			KECAMATAN DAMANG BATU		
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase daerah bawahan yang dibina; Persentase pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan yang terbin;Persentase keikutsertaan dalam kegiatan budaya; Persentase sarana dan prasarana kelurahan terbangun dan tersedia; Persentase dalam pemberdayaan masyarakat	100%	4.845.426.441,00		285.593.434,00	98	%		56.749.427,00	0			%		29.335.427,00					KECAMATAN DAMANG BATU		
7.01.03.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Pemencanaan Pembangunan Perdesaan dan pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Damang Batu			53.650.034,00	3	Laporan	56.749.427,00	0	Sub Kegiatan	0,00	Laporan		29.335									

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPJMD/REKSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RPJMD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2024 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I				II				III				IV				V			K	Rp	K	Rp	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			-	-	409,297,101.00			K	9	Rp			K	20	Rp	K	21	Rp			K	22	Rp			K	23	Rp			K	24 = 7 +23	Rp			K	25 = 14 + 6 x100%	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		1	lembaga kemasyarakatan	19,091,535.00										56,604,700.00										0.00	%	0.00	%	0.00	91.01	%	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPJMD/RESTRAT)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RPJMD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2024 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X						XI		XII																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dengan berbagai analisis yang telah dijabarkan pada bab gambaran umum daerah maka dalam perumusan permasalahan pembangunan daerah, dapat identifikasi faktor-faktor yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, maka diidentifikasi permasalahan pokok yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Gunung Mas masih belum merata, sehingga mempengaruhi kualitas hidup masyarakat di beberapa wilayah. Beberapa daerah di pusat kota dan wilayah yang lebih mudah diakses cenderung mendapatkan perhatian lebih dalam hal pembangunan infrastruktur, sementara daerah-daerah di pedalaman dan pegunungan seringkali terabaikan. Hal ini berdampak pada ketimpangan dalam akses terhadap fasilitas dasar seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan akses terhadap pelayanan Pendidikan dan kesehatan serta perhubungan. Berdasarkan data tahun 2024, kondisi panjang jalan di Kabupaten Gunung Mas didominasi oleh jalan yang berada dalam kondisi rusak berat, yaitu sebesar 65% dari total panjang jalan. Sementara itu, jalan yang berada dalam kondisi baik hanya mencakup 33%, dan sisanya sebanyak 2% berada dalam kondisi sedang. Persentase ini menunjukkan bahwa sebagian besar infrastruktur jalan di daerah ini masih memerlukan perhatian serius dan peningkatan kualitas, khususnya untuk memperbaiki jalan yang rusak berat demi mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat secara optimal.

Kemudian berdasarkan data BPS, pada tahun 2024, panjang jalan di Kabupaten Gunung Mas didominasi oleh jalan dengan permukaan tanah, yaitu sepanjang 331.560 kilometer, yang menunjukkan bahwa sebagian besar infrastruktur jalan masih berupa jalan tidak beraspal. Jalan dengan

permukaan aspal menempati urutan kedua dengan panjang 283.339 kilometer, mencerminkan adanya pembangunan jalan permanen yang cukup signifikan. Sementara itu, jalan berpermukaan kerikil memiliki panjang 119.078 kilometer, dan jenis permukaan lainnya hanya mencakup 5.015 kilometer. Data ini menggambarkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam pembangunan jalan beraspal, masih banyak jalan yang perlu ditingkatkan kualitas permukaannya untuk mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat secara berkelanjutan.

Selain itu, aksesibilitas antar wilayah kabupaten juga menjadi salah satu masalah utama yang perlu segera diselesaikan. Beberapa ruas jalan yang menghubungkan antar desa atau kecamatan masih dalam kondisi yang kurang memadai, bahkan sebagian di antaranya terputus saat musim hujan. Hal ini menghambat mobilitas penduduk dan distribusi barang serta jasa, yang berkontribusi pada ketimpangan ekonomi di wilayah-wilayah yang lebih sulit dijangkau. Dalam jangka panjang, masalah aksesibilitas ini dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Gunung Mas. Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih terfokus dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur secara lebih adil dan merata. Pemerintah daerah perlu memperhatikan kebutuhan infrastruktur di daerah-daerah yang kurang berkembang, dengan mengutamakan pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang dapat menghubungkan wilayah yang terisolasi. Dengan peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas yang lebih baik, diharapkan dapat tercipta pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup yang lebih adil bagi seluruh masyarakat Kabupaten Gunung Mas.

2. Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup

Pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Gunung Mas hingga saat ini masih belum optimal. Meskipun memiliki potensi alam yang melimpah, baik dalam sektor kehutanan, pertanian, maupun pariwisata, pengelolaannya sering kali tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kelestarian alam. Aktivitas eksploitasi sumber daya

alam yang tidak terkendali, seperti pembalakan liar dan konversi lahan, turut memperburuk kualitas lingkungan. Hal ini menyebabkan kerusakan ekosistem, berkurangnya daya dukung alam, dan berisiko pada bencana alam seperti longsor dan banjir. Di sisi lain, pengelolaan sampah dan limbah juga menjadi masalah serius di Kabupaten Gunung Mas. Masyarakat yang masih belum sepenuhnya sadar akan pentingnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, ditambah dengan keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan limbah yang memadai, memperburuk kondisi kebersihan dan kesehatan lingkungan. Pengelolaan sampah yang tidak terstruktur ini mencemari sungai, tanah, dan udara, serta merusak kualitas hidup masyarakat sekitar. Tanpa adanya sistem yang baik dalam pengelolaan sampah, masalah lingkungan ini akan terus berkembang dan semakin sulit untuk diatasi. Hal ini terlihat pada indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2024 (69,33) yang mengalami penurunan jika dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 70,58. Melihat lebih dalam penurunan IKLH ini disebabkan adanya penurunan pada indeks kualitas air ditahun 2024 yang menurun menjadi 42,86 jika dibandingkan capaian 2023 (50) dan indeks kualitas udara ditahun 2024 menjadi 82,82 padahal pada tahun 2023 mencapai 89,64.

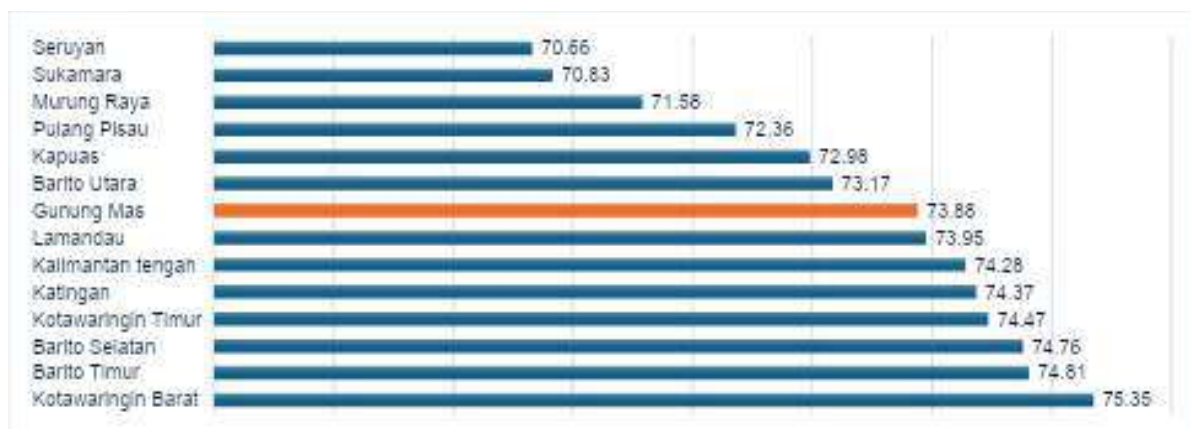
Dengan permasalahan ini, kedepannya perlu adanya upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Program edukasi lingkungan yang lebih intensif, peningkatan fasilitas pengelolaan sampah, serta penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan adalah langkah-langkah yang sangat penting. Dengan pengelolaan yang lebih baik dan kesadaran yang tinggi akan pentingnya pelestarian alam, Kabupaten Gunung Mas bisa mengoptimalkan potensi sumber daya alamnya tanpa merusak lingkungan untuk generasi yang akan datang.

3. Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM

Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Gunung Mas masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan hasilnya belum optimal. Meskipun sejumlah program pendidikan dan pelatihan telah dilaksanakan, masih banyak warga yang tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya fasilitas pendidikan yang berkualitas, kurangnya akses ke pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program tersebut. Akibatnya, banyak generasi muda yang terhambat untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal. Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gunung Mas mencapai angka 73,88, menempatkannya di posisi menengah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Tengah. Nilai IPM ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Gunung Mas cukup baik, mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Meskipun masih berada di bawah beberapa kabupaten seperti Kotawaringin Barat (75,35) dan Barito Timur (74,81), IPM Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah ditahun 2024 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar 2.35

IPM Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

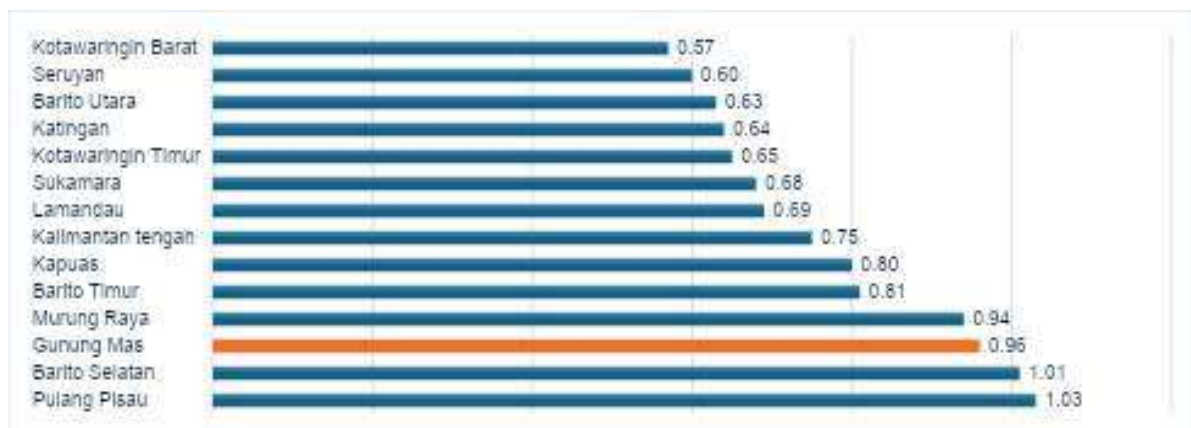


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Pada tahun 2024, laju pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gunung Mas tercatat sebesar 0,96%, jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi maupun kabupaten lain, Gunung Mas menempati posisi ketiga tertinggi setelah Barito Selatan (1,01%) dan Pulang Pisau (1,03%). Hal ini mengindikasikan masih perlu adanya peningkatan pertumbuhan IPM Kabupaten Gunung Mas dengan peningkatan pada bidang Pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak masyarakat Kabupaten gunung Mas.

Gambar 2.36

**Pertumbuhan IPM Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2024**



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

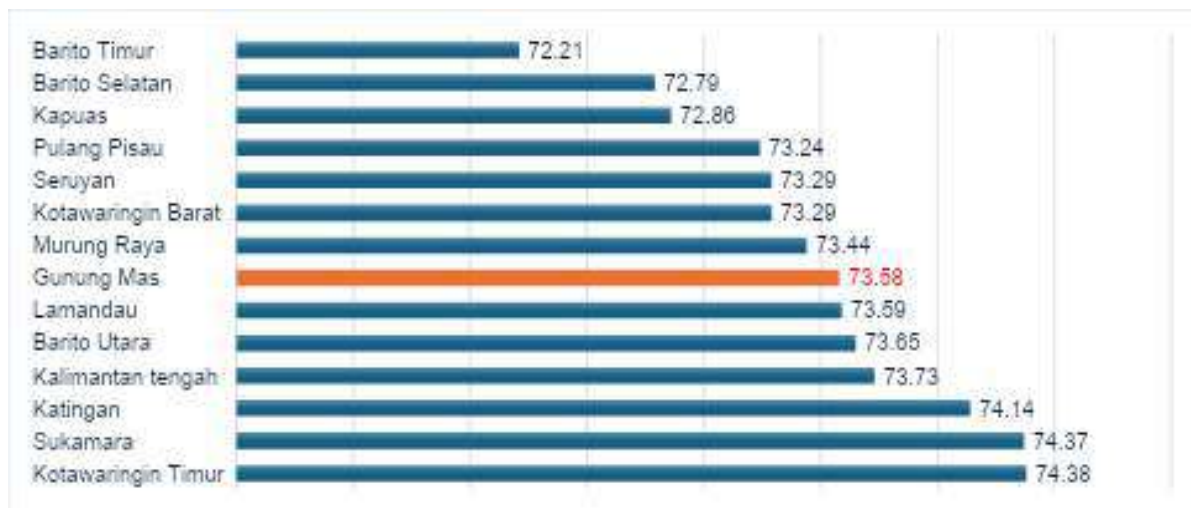
Berdasarkan data capaian salah satu indikator komposit IPM yaitu rata-rata lama sekolah pada tahun 2024 Kabupaten Gunung Mas mencapai 9,37 tahun, yang menunjukkan angka ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata, penduduk Kabupaten Gunung Mas telah mengenyam pendidikan selama 9,37 tahun, setara dengan kelas 3 SMP semester 1. Hal ini mengindikasikan kualitas Tingkat Pendidikan Masyarakat Gunung Mas relative masih rendah.

Kemudian pada bidang kesehatan, pada tahun 2024 usia harapan hidup di Kabupaten Gunung Mas tercatat sebesar 73,58 tahun, capaian ini menempatkan Gunung Mas pada posisi menengah di antara kabupaten

lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah, masih di bawah rata-rata provinsi yang berada di angka 73,73 tahun dan masih dibawah capaian Kabupaten Lamandau, seperti yang terlihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar 2.37

**Usia harapan Hidup Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2024**



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Belum optimalnya kualitas kesehatan Masyarakat Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat juga dari angka gizi buruk yang mengalami peningkatan ditahun 2023 dan 2024. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan gizi buruk di Kabupaten Gunung mas masih belum optimal, yang pastinya hal ini mempengaruhi kualitas dan daya saing Masyarakat terutama terkait dengan kesehatan. Kemudian penilaian indeks daya saing daerah Kabupaten Gunung Mas pada pilar kesehatan ditahun 2024 (3,83) juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian 2023 (3,89). Selanjutnya kondisi kesehatan yang belum optimal juga terlihat pada angka kematian umum ditahun 2024 mengalami peningkatan hingga mencapai 22,94 jika dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 21,66. Kemudian pada angka kematian murni juga mengalami peningkatan ditahun 2024 yang mencapai 7,82 jika dibandingkan capaian tahun 2023 yang mencapai 7,09.

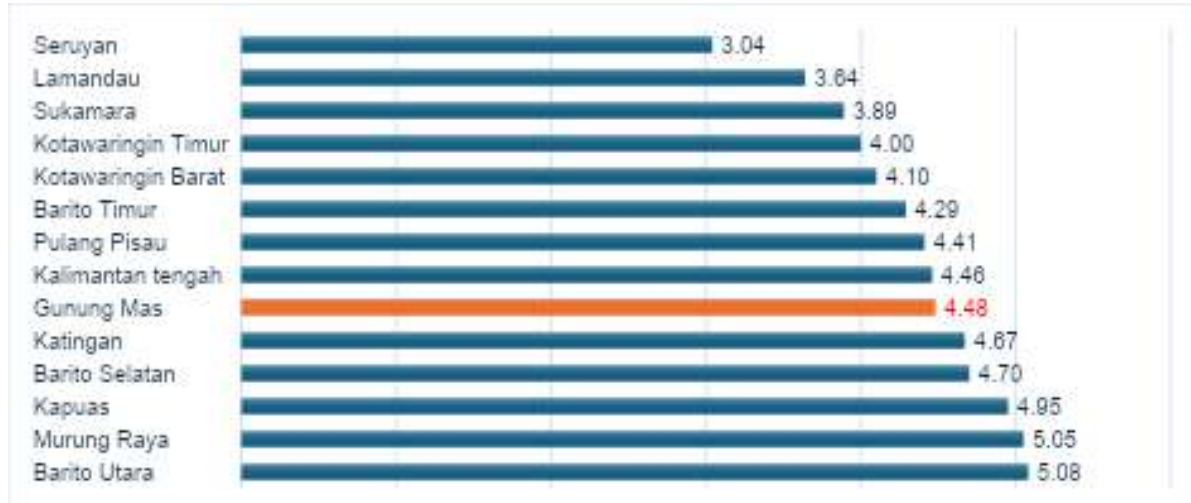
Selain itu capaian SPM pada bidang kesehatan juga beberapa belum mencapai 100 persen.

Menindaklanjuti permasalahan pembangunan SDM di bidang pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Gunung Mas, diperlukan serangkaian kebijakan dan program yang terintegrasi dan berkelanjutan. Di sektor pendidikan, fokus utama adalah pemerataan kualitas melalui peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan ketersediaan fasilitas belajar yang memadai di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil. Program afirmasi untuk menarik dan mempertahankan guru berkualitas di daerah sulit, pelatihan berkelanjutan yang relevan dengan perkembangan zaman, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat menjadi prioritas. Selain itu, perluasan akses pendidikan berkualitas pada jenjang menengah dan kejuruan yang sesuai dengan potensi daerah juga krusial. Di sektor kesehatan, upaya tindak lanjut meliputi peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, terutama di wilayah yang sulit dijangkau, melalui penguatan fasilitas kesehatan primer dan penambahan tenaga kesehatan yang kompeten dan merata distribusinya. Program pencegahan penyakit dan promosi kesehatan yang efektif, peningkatan gizi masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kesehatan juga menjadi bagian penting dari solusi. Sinergi lintas sektor, termasuk dengan pihak swasta dan organisasi masyarakat, serta alokasi anggaran yang memadai dan tepat sasaran menjadi kunci keberhasilan tindak lanjut permasalahan pembangunan SDM di Kabupaten Gunung Mas.

4. Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah

Pengembangan perekonomian di sektor unggulan Kabupaten Gunung Mas masih belum berjalan optimal meskipun daerah ini memiliki potensi alam yang cukup besar. Sektor-sektor seperti pertanian, perkebunan, dan pariwisata seharusnya dapat menjadi penggerak utama ekonomi lokal, namun belum dikelola secara maksimal.

Gambar 3.38
Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2024

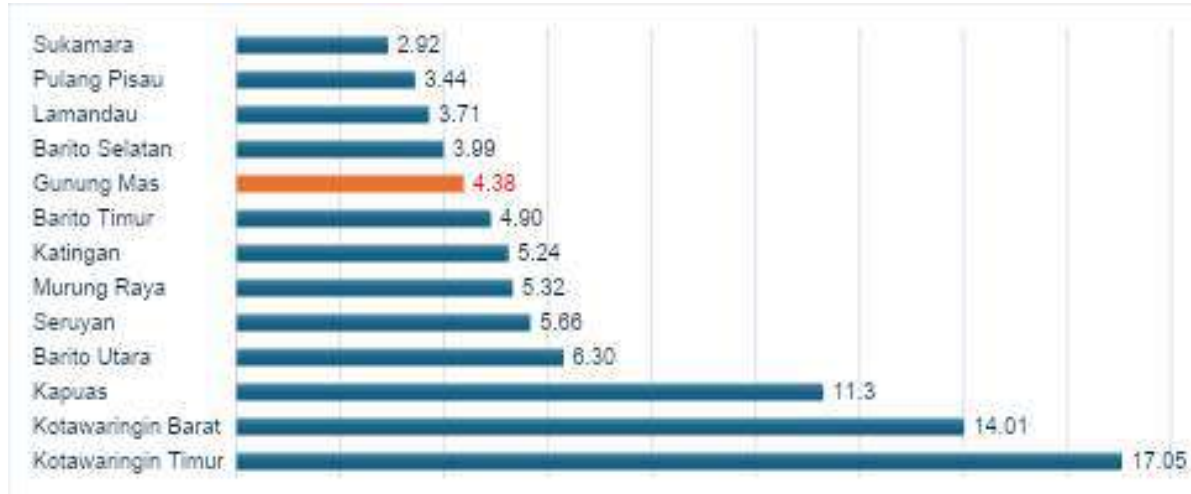


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Pada tahun 2024, laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gunung Mas mencapai 4,48%, pertumbuhan ekonomi ini menempatkan Gunung Mas pada posisi menengah jika dibandingkan dengan kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah. Capaian ini mencerminkan adanya pergerakan ekonomi yang cukup stabil, yang kemungkinan didorong oleh sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian, kehutanan, atau pertambangan. Meskipun belum termasuk daerah dengan pertumbuhan tertinggi seperti Barito Utara dan Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas menunjukkan potensi positif untuk terus berkembang melalui peningkatan investasi, produktivitas, dan daya saing ekonomi daerah.

Gambar 3.39

Kontribusi PDRB Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

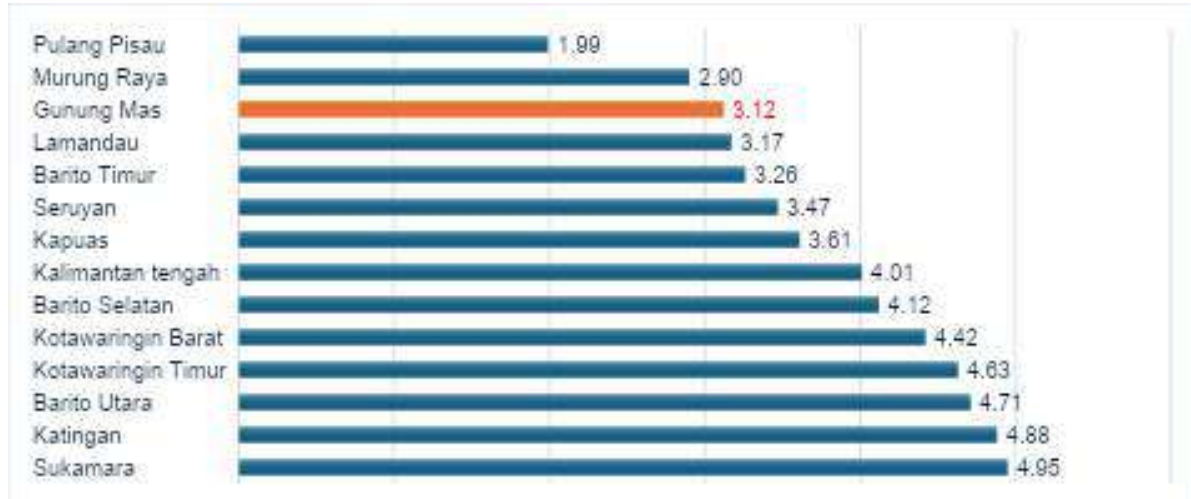
Pada tahun 2024, kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gunung Mas terhadap total PDRB Provinsi Kalimantan Tengah tercatat sebesar 4,38%. Angka ini menempatkan Gunung Mas di posisi menengah ke bawah dibandingkan kabupaten lain di Kalimantan Tengah. Meskipun belum menjadi kontributor utama seperti Kotawaringin Timur (17,05%) atau Kotawaringin Barat (14,01%), kontribusi Gunung Mas tetap signifikan dan menunjukkan adanya peran aktif dalam mendorong perekonomian daerah. Hal ini mencerminkan potensi ekonomi yang dimiliki, terutama dari sektor-sektor sumber daya alam dan kegiatan ekonomi lokal yang terus berkembang. Dengan penguatan sektor strategis dan peningkatan investasi, kontribusi PDRB Gunung Mas ke depannya masih berpeluang untuk ditingkatkan.

Potensi hasil bumi seperti kopi, karet, dan rempah-rempah yang bisa menjadi komoditas unggulan daerah belum diolah secara efisien, sehingga belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Begitu juga dengan sektor pariwisata yang memiliki berbagai destinasi alam menarik, namun belum terkelola dengan baik sehingga tidak bisa menarik banyak wisatawan

yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Selain itu, kurangnya akses terhadap teknologi dan pelatihan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Kabupaten Gunung Mas juga menjadi penghambat dalam mengembangkan sektor-sektor unggulan. Banyak petani dan pelaku usaha yang masih mengandalkan cara-cara tradisional dalam menjalankan usaha, yang menyebabkan hasil yang diperoleh tidak maksimal. Ditambah lagi, terbatasnya jaringan distribusi dan pemasaran yang menghubungkan produk-produk unggulan dengan pasar yang lebih luas, membuat produk-produk lokal sulit bersaing dengan produk dari daerah lain. Hal ini menyebabkan potensi ekonomi daerah belum bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten secara keseluruhan.

Untuk mendorong pengembangan perekonomian sektor unggulan, diperlukan upaya yang lebih terencana dan terintegrasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Program-program peningkatan kapasitas bagi para pelaku usaha, seperti pelatihan manajemen, teknologi pertanian, dan pengembangan produk olahan, sangat penting untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Pemerintah juga perlu membangun infrastruktur yang mendukung distribusi hasil produk unggulan, serta mempromosikan potensi pariwisata dengan lebih agresif untuk menarik investor dan wisatawan. Dengan langkah-langkah tersebut, sektor unggulan Kabupaten Gunung Mas bisa berkembang lebih optimal, memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat, dan turut berkontribusi pada kesejahteraan daerah.

Gambar 3.40
Tingkat pengangguran Terbuka Kabupaten
se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

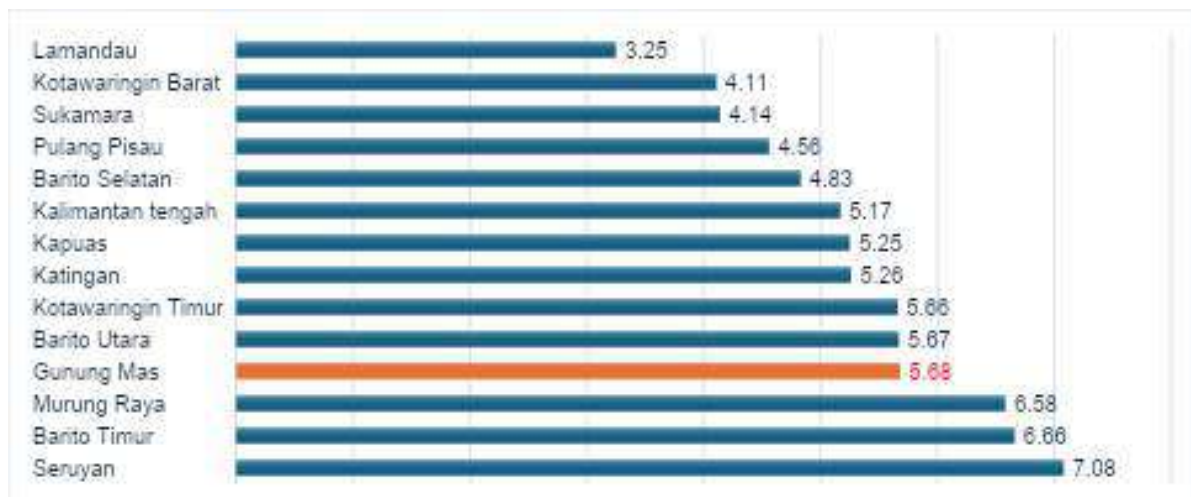
Pada tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Gunung Mas tercatat sebesar 3,12%, menempatkan daerah ini dalam kategori menengah jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar di Provinsi Kalimantan Tengah. Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam penyediaan lapangan kerja, Hal ini mencerminkan perlunya upaya yang berkelanjutan dari pemerintah daerah dalam mendorong penciptaan lapangan kerja baru, pelatihan keterampilan tenaga kerja, serta peningkatan daya saing ekonomi lokal guna menekan angka pengangguran.

5. Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan

Kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gunung Mas masih jauh dari optimal, meskipun berbagai program pembangunan telah dilaksanakan. Ketimpangan sosial dan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan sangat terlihat, di mana sebagian besar penduduk di daerah terpencil masih hidup dalam kondisi kurang memadai. Keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan layak menjadikan

upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya berhasil. Selain itu, rendahnya pendapatan masyarakat akibat terbatasnya lapangan pekerjaan yang memadai turut memperburuk keadaan ini.

Gambar 3.41
Tingkat Kemiskinan Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2024

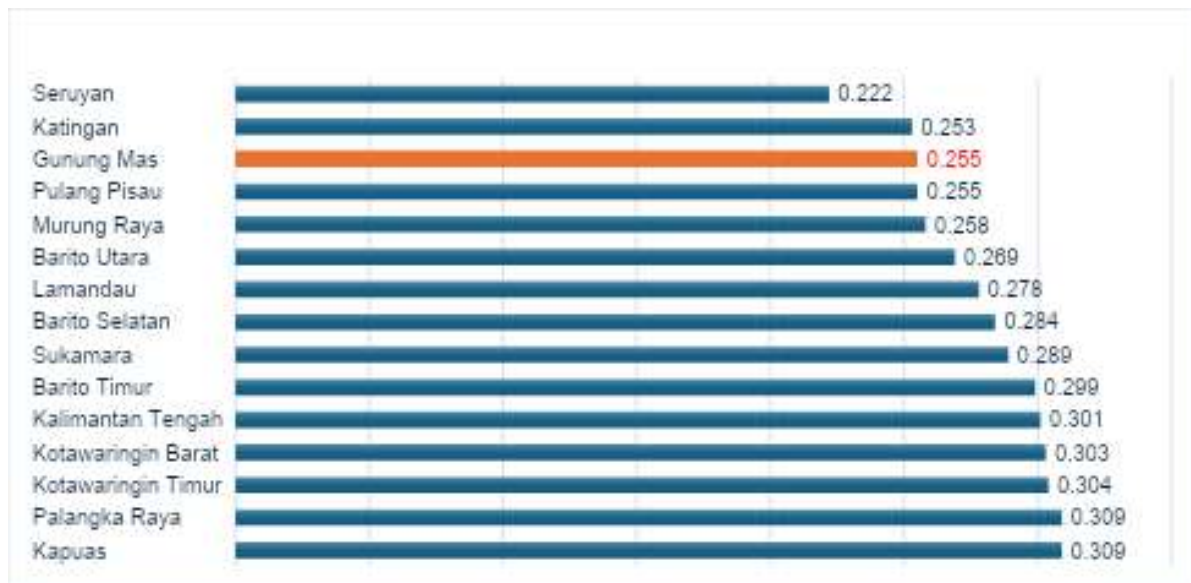


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Gunung Mas tercatat sebesar 5,68%, menempatkannya di posisi menengah ke atas dibandingkan dengan kabupaten sekitar di Provinsi Kalimantan Tengah. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi yang berada di kisaran 5,17%, dan juga lebih tinggi dibanding beberapa daerah seperti Lamandau (3,25%) dan Kotawaringin Barat (4,11%). Hal ini mencerminkan bahwa meskipun telah terjadi berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, Gunung Mas masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Diperlukan kebijakan yang lebih terarah, seperti penguatan program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar untuk menurunkan angka kemiskinan di tahun-tahun mendatang.

Gambar 2.42

Indeks Gini Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Pada tahun 2024, nilai Indeks Gini di Kabupaten Gunung Mas tercatat sebesar 0,255, menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang relatif rendah. Namun jika dibandingkan dengan Kabupaten Katingan yang memiliki Indeks Gini sebesar 0,253, Gunung Mas masih menunjukkan ketimpangan yang sedikit lebih tinggi. Angka ini mengindikasikan bahwa kesenjangan ekonomi di Gunung Mas masih perlu diturunkan, sehingga diperlukan penguatan kebijakan inklusif agar pemerataan kesejahteraan dapat terus ditingkatkan dan ketimpangan sosial-ekonomi dapat diminimalkan.

Permasalahan kesenjangan/ketimpangan ini disebabkan oleh pekerja lokal yang belum mendapatkan harga yang adil untuk produknya, sementara akses ke pasar yang lebih luas terbatas. Selain itu, tingginya biaya produksi dan keterbatasan dalam teknologi pertanian membuat Masyarakat kesulitan untuk meningkatkan hasil pertanian secara signifikan. Oleh karena itu, kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat semakin lebar, sehingga menciptakan ketidaksetaraan dalam kualitas hidup. Untuk mencapai kesejahteraan yang berkualitas dan berkeadilan, dibutuhkan

kebijakan pembangunan yang lebih merata dan inklusif. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas harus lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat, baik melalui peningkatan akses terhadap pendidikan yang lebih berkualitas, layanan kesehatan yang lebih terjangkau, maupun penyediaan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Selain itu, program-program yang mendukung ekonomi lokal, seperti bantuan untuk pengembangan UMKM dan peningkatan kualitas produk lokal, perlu diperkuat. Dengan pendekatan yang lebih holistik dan berkeadilan, diharapkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gunung Mas dapat tercapai secara lebih merata dan berkelanjutan.

6. Belum optimalnya penyelenggaraan dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik

Penyelenggaraan dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Gunung Mas masih belum optimal, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memperbaiki sistem pemerintahan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat. Banyak kebijakan yang diterapkan tanpa melibatkan partisipasi publik secara luas, sehingga masyarakat merasa kurang dilibatkan dalam proses perencanaan dan evaluasi program pembangunan. Permasalahan ini dapat dilihat pada nilai akuntabilitas Kabupaten Gunung Mas ditahun 2024 yang mencapai 61,63 (B) mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 62,14 dengan kategori B. Kemudian pada indeks reformasi birokrasi pada tahun 2023 mencapai 54,77 yang terpantau menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 60. Selain itu, masih terdapat permasalahan dalam hal akuntabilitas dan efisiensi birokrasi pemerintahan. Proses administratif yang lambat dan tumpang tindihnya regulasi sering kali menghambat kelancaran pelayanan publik. Kinerja aparatur sipil negara (ASN) yang kurang maksimal juga menjadi kendala dalam menjalankan program-program yang telah ditetapkan. Beberapa pejabat daerah kurang memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip tata kelola

pemerintahan yang baik, sehingga menyebabkan pemborosan anggaran dan rendahnya kualitas pelayanan publik. Untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kabupaten Gunung Mas, perlu ada reformasi birokrasi yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan kapasitas dan integritas ASN. Selanjutnya pada sisi keamanan, berdasarkan data angka kriminalitas yang ditangani datahun 2024 mencapai 72,41, capaian ini mengalami penurunan jika dibandingkan capaian ditahun 2023 sebesar 84,76. Dengan ini Pemerintah daerah harus mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemerintahan, serta memastikan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi program. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelayanan publik harus lebih ditingkatkan agar lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang baik akan tercapai, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah.

2.4 HASIL RAKORTEK

Berikut hasil RAKORTEK dapat dilihat pada lampiran dibawah ini :



PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari **Kamis**, Tanggal **17** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	MUHAMAD ANSORI, S.T., M.T	197410052002121005	Analisis Bangunan dan Perumahan	BAPPERIDA PROV KALTENG
2	JUNAIDI	197303211998031009	KASI PLP AIR MINUM	DINAS PUPR PROV KALTENG
3	EDDY KUSNADI	198211262011011001	PENYEKHATAN LINGKUNGAN AHLI MUDA	DINAS PUPR KAB GUNUNG MAS
4	HARDEDE	198412252024211001	PERENCANA AHLI PERTAMA	BAPPERIDA KAB GUNUNG MAS

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	%	36	34.50
2.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	Hektar	143897	509.31
3.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Kasus	38	-
4.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah	Provinsi	38	-
5.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Penyelesaian Materi Teknis RTRW	Materi Teknis	107	-
6.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Penetapan RTRW	Perda/Perk ada	52	1



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 17 April 2025
Jam : 8:49:57 AM

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
7.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Penyelesaian Materi Teknis RDTR	Materi Teknis	159	1
8.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Penetapan RDTR	Perda/Perk ada	133	1
9.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	%	36	34.50
10.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	Hektar	143897	509.31
11.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Kasus	38	-
12.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah	Provinsi	38	-
13.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Penyelesaian Materi Teknis RTRW	Materi Teknis	107	-
14.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Penetapan RTRW	Perda/Perk ada	52	1
15.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Penyelesaian Materi Teknis RDTR	Materi Teknis	159	1
16.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Penetapan RDTR	Perda/Perk ada	133	1

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	0.25
Catatan Pembahasan : Lokasi DI Sekata Tewah					
2.	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	0.25
Catatan Pembahasan : Lokasi daerah irigasi Sekata Tewah dan Gohong Rawai					



b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

1. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
1.	1.03.03.2.01.00 28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	2	02.12.05 Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu Ke Hilir
Catatan Pembahasan : Lokasi Kelurahan Tehang						
2.	1.03.03.2.01.00 32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	100	02.12.05 Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu Ke Hilir
Catatan Pembahasan : Lokasi Desa Upon Batu						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
1.	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung Pangan	147000	Hektar

2. OUTCOME: Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	1.03.12.2.01.00 10	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1
Catatan Pembahasan : Lokasi Kelurahan Tewah					
2.	1.03.12.2.01.00 11	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1
Catatan Pembahasan : Revisi RTRW					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
		NIHIL				
Catatan Pembahasan :						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
	NIHIL			

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	2
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	2
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	8
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	3
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	4
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	2
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	1

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari **Kamis**, Tanggal **17** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- 1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
- 2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
- 3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
- 4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Yohanna Endang S, ST.,MT	197102071997032002	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Tengah
2	Donny Pranajaya, ST	197810102006041015	Kepala Bidang Pertanahan	Disperkimtan Provinsi Kalimantan Tengah
3	Hardede, S.P	198412252024211001	Perencana Ahli Pertama	BAPPERIDA Kabupaten Gunung Mas
4	Jutia Rianus, S.STP	199706092020081003	Analisis Pemerintahan Umum dan Otda	Sekretariat daerah Kabupaten Gunung Mas

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	Jumlah bidang tanah yang didistribusi	Bidang Tanah	197650	50
2.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	Kepala Keluarga	124000	50

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

- 1. OUTCOME: Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	1
Catatan Pembahasan : Akan dianggarkan pada Renja/Ranhir Tahun 2026 dengan pagu anggaran Rp. 15.000.000 dan berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kab. Gunung Mas					
2.	2.10.06.2.01.0006	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	Berita Acara	1



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 17 April 2025
Jam : 12:03:13 PM

Catatan Pembahasan : Akan dianggarkan pada Renja/Ranhir Tahun 2026 dengan pagu anggaran Rp. 15.000.000 dan berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kab. Gunung Mas

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
		NIHIL				
Catatan Pembahasan :						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
	NIHIL			

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	1
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	2
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	1
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	2
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	0
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari **Rabu**, Tanggal **16** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Novarina	197511102008012020	Perencana Ahli Muda	Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah
2	ISNAWATI, SP	197402202006042013	Kepala UPT BPPBTPH Prov.Kalteng	Dinas TPHP Prov.Kalteng
3	IKA TARANTINA DEWI	198003012005022009	Perencana Ahli Muda	Dinas Perkebunan Prov.Kalteng
4	Siti Aminah, S.TP	198101312010012013	Perencana Ahli Muda	Dinas Pertanian Kab.Gunung Mas

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Jagung	Ton	22704470	258
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Padi	Ton	57534326	562
3.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai	Ton	3084276	24
4.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah	Ton	2000158	-
5.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa	Ton	2890917	-
6.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao	Ton	633290	-



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 16 April 2025
Jam : 3:01:43 PM

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
7.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi)	Ton	5109804	1059450
8.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Telur	Ton	7044963	77390
9.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Produksi Pertanian	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Ha	16422126.32	1239

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Meningkatkan Produksi Pertanian

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.		NIHIL			
Catatan Pembahasan :					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

1. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
1.	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	1	02.10.07 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya 02.10.10 Pengembangan Pangan Hewani 02.10.11 Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati
Catatan Pembahasan : Kegiatan dilaksanakan berupa bantuan saprodi, pengadaan alsintan Dukungan TPHP Provinsi berupa kegiatan alsintan prapanen dimana kabupaten harus menyiapkan proposal						
2.	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	1	02.10.07 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya 02.10.10 Pengembangan Pangan Hewani 02.10.11 Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati
Catatan Pembahasan : Kegiatan dilaksanakan berupa bantuan saprodi, pengadaan alsintan Dukungan TPHP Provinsi berupa kegiatan alsintan prapanen dimana kabupaten harus menyiapkan proposal						



3.	3.27.02.2.01.00 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	1	02.10.07 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya 02.10.10 Pengembangan Pangan Hewani 02.10.11 Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati
Catatan Pembahasan : Kegiatan dilaksanakan berupa bantuan saprodi, pengadaan alsintan Dukungan TPHP Provinsi berupa kegiatan alsintan prapanen dimana kabupaten harus menyiapkan proposal						
4.	3.27.02.2.01.00 03	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	1.5	02.10.07 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya 02.10.10 Pengembangan Pangan Hewani 02.10.11 Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati
Catatan Pembahasan : a. Komoditas bawang merah masih suplai dari luar daerah b. Komoditas kelapa masih spot2 kecil, dan produksi untuk kelapa muda serta belum ada budidaya, Target tahun 2026 menjadi 54 ton c. Komoditas kakao belum ada budidaya d. Target produksi daging semula 1.059.450 ton diubah menjadi 1.110.02 ton h. Target produksi jagung menjadi 352 ton di tahun 2026 i. Target produksi padi menjadi 860 ton di tahun 2026 k. Target produksi telur menjadi 107,5 ton di tahun 2026 j. Target produksi cabai menjadi 19 ton di tahun 2026						
5.	3.27.02.2.01.00 03	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	1.5	02.10.07 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya 02.10.10 Pengembangan Pangan Hewani 02.10.11 Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati
Catatan Pembahasan : a. Komoditas bawang merah masih suplai dari luar daerah b. Komoditas kelapa masih spot2 kecil, dan produksi untuk kelapa muda serta belum ada budidaya, Target tahun 2026 menjadi 54 ton c. Komoditas kakao belum ada budidaya d. Target produksi daging semula 1.059.450 ton diubah menjadi 1.110.02 ton h. Target produksi jagung menjadi 352 ton di tahun 2026 i. Target produksi padi menjadi 860 ton di tahun 2026 k. Target produksi telur menjadi 107,5 ton di tahun 2026 j. Target produksi cabai menjadi 19 ton di tahun 2026						



6.	3.27.02.2.01.00 03	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	1.5	02.10.07 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya 02.10.10 Pengembangan Pangan Hewani 02.10.11 Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati
Catatan Pembahasan : a. Komoditas bawang merah masih suplai dari luar daerah b. Komoditas kelapa masih spot2 kecil, dan produksi untuk kelapa muda serta belum ada budidaya, Target tahun 2026 menjadi 54 ton c. Komoditas kakao belum ada budidaya d. Target produksi daging semula 1.059.450 ton diubah menjadi 1.110.02 ton h. Target produksi jagung menjadi 352 ton di tahun 2026 i. Target produksi padi menjadi 860 ton di tahun 2026 k. Target produksi telur menjadi 107,5 ton di tahun 2026 j. Target produksi cabai menjadi 19 ton di tahun 2026						

2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
1.	3.27.03.2.01.00 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	1	02.10.07 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya 02.10.10 Pengembangan Pangan Hewani 02.10.11 Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati
Catatan Pembahasan : Kegiatan gerakan pekarangan pangan lestari (P2L), yang merupakan program Kementan dengan lokus lokasi stunting Gerakan tanam berupa pembagian bibit (cabai, terong) untuk penanganan inflasi						
2.	3.27.03.2.01.00 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	1	02.10.07 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya 02.10.10 Pengembangan Pangan Hewani 02.10.11 Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati
Catatan Pembahasan : Kegiatan gerakan pekarangan pangan lestari (P2L), yang merupakan program Kementan dengan lokus lokasi stunting Gerakan tanam berupa pembagian bibit (cabai, terong) untuk penanganan inflasi						



3.	3.27.03.2.01.00 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	1	02.10.07 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya 02.10.10 Pengembangan Pangan Hewani 02.10.11 Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati
Catatan Pembahasan : Kegiatan gerakan pekarangan pangan lestari (P2L), yang merupakan program Kementan dengan lokus lokasi stunting Gerakan tanam berupa pembagian bibit (cabai, terong) untuk penanganan inflasi						
4.	3.27.03.2.01.00 05	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	250	02.10.07 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya 02.10.10 Pengembangan Pangan Hewani 02.10.11 Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati
Catatan Pembahasan : LP2B seluas 1.298 ha, dimana masih dalam proses pembahasan dengan DPRD						
5.	3.27.03.2.01.00 05	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	250	02.10.07 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya 02.10.10 Pengembangan Pangan Hewani 02.10.11 Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati
Catatan Pembahasan : LP2B seluas 1.298 ha, dimana masih dalam proses pembahasan dengan DPRD						
6.	3.27.03.2.01.00 05	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	250	02.10.07 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya 02.10.10 Pengembangan Pangan Hewani 02.10.11 Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati
Catatan Pembahasan : LP2B seluas 1.298 ha, dimana masih dalam proses pembahasan dengan DPRD						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 16 April 2025
Jam : 3:01:43 PM

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
1.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Saprodi mendukung peningkatan produksi pertanian	177079180	Unit
2.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO)	825	Unit
3.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Kawasan Padi	2100000	Ha
4.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Kawasan Jagung	1000000	Ha
5.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Kawasan Aneka Cabai	14788	Ha
6.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Kawasan Padi Kaya Gizi (Blofortifikasi)	50000	Ha
7.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Kawasan Bawang Merah	6514	Ha
8.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Kawasan Kelapa	30202	Ha
9.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Kawasan Kakao	17187	Ha
10.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Bantuan Ternak Ruminansia Perah	910	Ekor
11.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Bantuan Ternak Ruminansia Potong	5000	Ekor
12.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Bantuan Ternak Unggas	640000	Ekor
13.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Bantuan Ternak Lainnya	3250	Ekor
14.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Rekomendasi Perlindungan LP2B dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian	279	Rekomendasi
15.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan	34177	Unit
16.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Hortikultura	10800	Unit
17.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Perkebunan	1258	Unit
18.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Peternakan	2980	Unit
19.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	800	Unit
20.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	125	Unit
21.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	4840	Unit
22.	KEMENTERIAN PERTANIAN	-Sarana Pengolahan Hortikultura	63	Unit
23.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Prasarana Pengolahan Hortikultura	88	Unit
24.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	188	Unit

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	1
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	9
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	2
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	0
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	4
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	24

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari **Rabu**, Tanggal **16** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	MULYONO, SP. M.Si	197212302006041013	PERENCANA AHLI MUDA	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALTENG
2	RUBIE, SP	197910212008011012	PERENCANA AHLI PERTAMA	BAPPERIDA PROVINSI KALTENG
3	EIGH MANTO, S.Pi. M.Si	197909102005011009	KEPALA DINAS	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB GUNUNG MAS

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya ketahanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	90	90
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya ketahanan pangan	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023	%	50	32
3.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	94.5	90
4.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya ketahanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	15.6	20

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Meningkatkan ketahanan pangan

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.09.03.2.01.00 07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	30



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 16 April 2025
Jam : 1:18:44 PM

Catatan Pembahasan : Apabila anggaran tersedia akan di alokasikan sebesar Rp. 60.000.000 kegiatan B2SA lokus di stunting					
2.	2.09.03.2.01.00 08	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	laporan	4
Catatan Pembahasan : Apabila tersedia anggaran akan di alokasikan sebesar Rp. 200.000.000 untuk kegiatan Gelar Pangan Murah (GPM) bersubsidi					

2. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.09.04.2.02.00 02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1
Catatan Pembahasan : Pengadaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Kabupaten					
2.	2.09.04.2.02.00 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan	1
Catatan Pembahasan : Dilaksanakan di daerah rentan rawan pangan berdasarkan hasil analisis peta FSVA prioritas 1-3					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
		N I H I L				
Catatan Pembahasan :						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
1.	BADAN PANGAN NASIONAL	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	39	Kebijakan
2.	BADAN PANGAN NASIONAL	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	39	Data
3.	BADAN PANGAN NASIONAL	Data Situasi Konsumsi Pangan	1	Data
4.	BADAN PANGAN NASIONAL	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	2400	Produk

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	1
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	4
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	2
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	4
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	0
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	4

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Pangan pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari **Rabu**, Tanggal **16** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Tri Minarni, ST., M.Si	198810092010012001	Perencana Ahli Muda	Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah
2	Tifa Trikarini, ST	198211282009032001	Perencana Ahli Muda	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
3	Rambatomi, S.Pt	197411172005011009	Kabid PPKL	DLHKP Kab Gunung Mas
4	Hardede, SP	198412252024211001	Perencana Ahli Pertama	Bapperida Kab Gunung Mas

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	76.67	78.47
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	61	40
3.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Lingkungan Hidup Berkualitas	Proporsi Rumah Tangga dengan layanan pengumpulan sampah	Persentase	64	35
4.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	76.67	78.47
5.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	61	40
6.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan Hidup Berkualitas	Proporsi Rumah Tangga dengan layanan pengumpulan sampah	Persentase	64	35



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 16 April 2025
Jam : 3:24:06 PM

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Lingkungan Hidup Berkualitas

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.		NIHIL			
Catatan Pembahasan :					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

1. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
1.	2.11.03.2.01.00 07	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi	20	02.17.01 Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Danau
Catatan Pembahasan : - Target IKLH Kab. Gunung Mas tahun 2026 sebesar 78,47 poin. Sudah sesuai dengan SK Dirjen PPKL Nomor 129 Tahun 2024 - Titik pemantauan kualitas air sungai sebanyak 16 titik lokasi yaitu di sungai Kahayan, sungai Miri, sungai Rungan dan sungai Manuhing - Titik pemantauan udara sebanyak 4 titik lokasi - Pagu anggaran tahun 2026 sebesar 125 juta						
2.	2.11.03.2.01.00 12	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Paket	40	02.17.01 Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Danau
Catatan Pembahasan : - Jumlah contoh uji ada 40 paket terdiri dari 32 paket sampel air sungai dan 8 paket sampel udara - Dalam 1 tahun dilaksanakan pengambilan sampel 2 kali - Pengambilan sampel dilakukan oleh DLHKP Kab. Gunung Mas dan untuk pengujian parameter dilakukan oleh Lab Akreditasi - Pagu anggaran untuk tahun 2026 sebesar Rp 137.500.000,00						

2. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
1.	2.11.11.2.01.00 12	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton	3577	02.18.02 Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah Serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR
Catatan Pembahasan : - Target sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan tahun 2026 sebesar 3.577 ton - Pagu anggaran tahun 2026 diusulkan sebesar 8 M - Pagu sub kegiatan penanganan sampah melalui pengangkutan agar dipisahkan dari pagu sub kegiatan lain						
2.	2.11.11.2.01.00 16	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Persentase	23	02.18.02 Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah Serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR
Catatan Pembahasan : - Luas pelayanan pengumpulan sampah yang dilayani sebesar 23% mencakup 2 Kecamatan dari 12 Kecamatan yang ada di Kab. Gunung Mas yaitu Kec Kurun dan Kec Tewah - Pagu sub kegiatan penanganan sampah melalui pengumpulan sampah agar dipisahkan dari pagu sub kegiatan lain						



3.	2.11.11.2.01.00 17	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton	3577	02.18.01 Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan
Catatan Pembahasan : - Target penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah sebesar 3.577 ton						
4.	2.11.11.2.01.00 20	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPStkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton	9.8	02.18.02 Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah Serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR
Catatan Pembahasan : - Target penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPS Kab Gunung Mas sebesar 9,8 ton - TPA Kab. Gunung Mas disarankan menggunakan Sanitary Landfill atau Controlled Landfill - Pagu sub kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional agar dipisahkan dari pagu sub kegiatan lain - Kabupaten/Kota wajib menginput data pengelolaan sampah didalam aplikasi SIPSN dan IKPS yang merupakan Indikator Prioritas						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
	NIHIL			

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	2
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	3
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	2
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	0
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	6
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari **Kamis**, Tanggal **17** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	GOVINDA ARUNDHATI, S.Si., M.Si	198305292009032001	SURVEYOR PEMETAAN AHLI MUDA	BAPPERIDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2	WAWAN GUNAWAN, S.T, M.Eng	197110281997031007	JF TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	DINAS PERKIMTAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
3	IKHLAS, S.T	197811282006041004	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA	BAPPERIDA KABUPATEN GUNUNG MAS
4	PITRA ASI, S.T., M.A.P	197702012006042024	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI MUDA	DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	68.6	55.78

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.		NIHIL			
Catatan Pembahasan :					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

1. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
1.	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	20	06.06.01 Fasilitas Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 17 April 2025
Jam : 9:02:10 AM

Catatan Pembahasan : Telah dianggarkan Pagu Rp. 632.206.180,- dengan target 20 unit, dengan anggaran perunit Rp. 20.000.000,-						
Jumlah RTLH di Kabupaten Gunung Mas berjumlah 2.340 Unit.						
2.	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit	0	06.06.01 Fasilitas Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU
Catatan Pembahasan : 1. Belum menganggarkan karena keterbatasan anggaran dan belum ada usulan dari kepala desa dan lurah.						
2. Kabupaten Gunung Mas telah membuat PERBUP GUNUNG MAS Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni.						
3. PERBUP untuk pembangunan baru belum ada.						

2. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
1.	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi	0	06.06.01 Fasilitas Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU
Catatan Pembahasan : Tidak dianggarkan.						
2.	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	11	06.06.01 Fasilitas Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU
Catatan Pembahasan : 1. Telah dianggarkan Pagu Rp. 10.000.000.000,- dengan target 11 lokasi, di 12 Kecamatan Kabupaten Gunung Mas.						
2. Lokasi berada di Perumahan dan Permukiman.						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
1.	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	68	%

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	1
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	1
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	2
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	0
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	4
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	1

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.



PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari **Kamis**, Tanggal **17** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Yoseph Yulian, S.IP., M.A	198007312009031001	Perencana Ahli Muda	Bapperida Provinsi Kalteng
2	Sandra Cipta, S.Tr	198106392006041007	Kabid Perhubungan	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas
3	Tiana Audya Putri, S.AN	199702182020122013	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah
4	Muhammad Ridha	199804212020121007	Pengelola Pelayanan Operasional	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah
5	Supriati, SE	197806142010012011	Kasubbag Keuangan dan Aset Perencanaan	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Kabupaten/Kota	Rasio	0.67	0.67
2.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	99.99	99.99
3.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Kabupaten/Kota	Rasio	0.67	0.67



NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
4.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	99.99	99.99

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.15.02.2.02.00 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	0
Catatan Pembahasan : Dishub Provinsi : 1. Untuk dapat menganggarkan sub kegiatan untuk mendukung peningkatan konektivitas transportasi dan peningkatan keselamatan di daerah yang mendukung outcome nasional 2. Dalam mendukung indikator kinerja urusan outcome nasional untuk dapat menyiapkan data dukung, realisasi dari target yang telah disampaikan. 3. Untuk Pengusulan anggaran dapat disesuaikan dengan pemuktahiran Kepmendagri Nomenklatur Sub Kegiatan yang sesuai 4. Perlunya dukungan anggaran untuk penyediaan perlengkapan jalan dan urusan perhubungan dalam rangka pemenuhan fasilitas keselamatan jalan. 5. Untuk segera menyusun studi kebutuhan perlengkapan jalan ruas jalan kabupaten Dishub Kabupaten: 1. Perlunya sinkronisasi data provinsi, kabupaten dalam pemenuhan perlengkapan jalan 2. Perlunya forum LLAJ tingkat Provinsi bersinergi dengan Kabupaten 3. Sub kegiatan akan disesuaikan dengan nomeklatur yang terbaru dalam hal perlengkapan jalan untuk anggaran masih melekat di sub kegiatan Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas					
2.	2.15.02.2.03.00 11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	0
Catatan Pembahasan : Dishub Provinsi : 1. untuk dapat menganggarkan sub kegiatan untuk mendukung peningkatan konektivitas transportasi dan peningkatan keselamatan di daerah yang mendukung outcome nasional 2. Dalam mendukung indikator kinerja urusan outcome nasional untuk dapat menyiapkan data dukung, realisasi dari target yang telah disampaikan. 3. Untuk Pengusulan anggaran dapat disesuaikan dengan pemuktahiran Kepmendagri Nomenklatur Sub Kegiatan yang sesuai 4. Perlunya dukungan anggaran yang disesuaikan dengan demand dan kebutuhan 5. Untuk segera menyusun studi kebutuhan angkutan umum yang menjadi satu kesatuan dengan TATRALOK Dishub Kabupaten: 1. Perlunya Push and Pull angkutan umum agar keberadaan terminal sesuai peruntukannya					

2. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.15.03.2.13.00 03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	0
Catatan Pembahasan : Dishub Provinsi : 1. untuk dapat menganggarkan sub kegiatan untuk mendukung peningkatan konektivitas transportasi dan peningkatan keselamatan di daerah yang mendukung outcome nasional 2. Dalam mendukung indikator kinerja urusan outcome nasional untuk dapat menyiapkan data dukung, realisasi dari target yang telah disampaikan. 3. Untuk Pengusulan anggaran dapat disesuaikan dengan pemuktahiran Kepmendagri Nomenklatur Sub Kegiatan yang sesuai 4. Perlunya dukungan anggaran yang disesuaikan dengan demand dan kebutuhan 5. Untuk segera menyusun studi kebutuhan angkutan umum yang menjadi satu kesatuan dengan TATRALOK Dishub Kabupaten: 1. Perlunya Push and Pull angkutan umum agar keberadaan pelabuhan sungai dan danau sesuai peruntukannya 2. Pada Kabupaten Gunung Mas pelabuhan sungai milik Pemerintah Daerah tidak beroperasi karena masyarakat lebih memilih akses jalur darat					
2.	2.15.03.2.13.00 11	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Unit	0



Catatan Pembahasan : Dishub Provinsi : 1. Untuk dapat menganggarkan sub kegiatan untuk mendukung peningkatan konektivitas transportasi dan peningkatan keselamatan di daerah yang mendukung outcome nasional
2. Dalam mendukung indikator kinerja urusan outcome nasional untuk dapat menyiapkan data dukung, realisasi dari target yang telah disampaikan.
3. Untuk Pengusulan anggaran dapat disesuaikan dengan pemuktahiran Kepmendagri Nomenklatur Sub Kegiatan yang sesuai
4. Perlunya dukungan anggaran untuk pemenuhan fasilitas pendukung pelabuhan dalam pelayanan masyarakat yang disesuaikan dengan demand dan kebutuhan
Dishub Kabupaten :
1. Sub kegiatan akan disesuaikan dengan peruntukan (pengadaan fasilitas keselamatan dan pelayanan lainnya)

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
		NIHIL				
Catatan Pembahasan :						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
	NIHIL			

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	2
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	2
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	2
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	4
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	0
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari **Kamis**, Tanggal **17** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Clara Monissa, ST., M.Si	198306092015032001	Penata Ruang Ahli Pertama	Bapperida Prov. Kalteng
2	Lisa Teresia, Amd	199105162022032004	Pengolah Data dan Informasi	Diskominfosantik Prov. Kalteng
3	Restiasih Pratiwi	199106212019032017	Staf TIK	Diskominfosantik Prov. Kalteng
4	Neneng Rahayu	198008062009032008	Perencana Ahli Muda	Bapperida Kabupaten Gunung Mas
5	Roy Lerry Susanto, S.T	198010032009031002	Perencana Ahli Muda	Diskominfosantik Kabupaten Gunung Mas

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	Nilai tingkat kematangan layanan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi	Level	2	1
2.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	Nilai tingkat kematangan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Level	2	1
3.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	Nilai tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE di Pemerintah Provinsi	Level	2	1
4.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	Peningkatan implementasi inovasi Provinsi Cerdas	Persentase	20	-
5.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai	72	35.30
6.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	Nilai tingkat kematangan layanan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi	Level	2	1
7.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	Nilai tingkat kematangan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Level	2	1



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 17 April 2025
Jam : 1:24:21 PM

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
8.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	Nilai tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE di Pemerintah Provinsi	Level	2	1
9.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	Peningkatan implementasi inovasi Provinsi Cerdas	Persentase	20	-
10.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai	72	35.30

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.16.02.2.01.00 17	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	2
Catatan Pembahasan : Sepakat					
2.	2.16.02.2.01.00 21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	26
Catatan Pembahasan : - Rp. 172.044.593 adalah pagu anggaran media siaran radio. kontrak media berbayar meliputi media cetak sebanyak 5 dan online sebanyak 20 sebesar Rp. 2,7 Milyar. - untuk tahun 2026 pagu anggaran sama sebesar Rp. 2,7 M					

2. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.16.03.2.02.00 34	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	1
Catatan Pembahasan : sepakat					
2.	2.16.03.2.02.00 38	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Dokumen	0
Catatan Pembahasan : Sepakat					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

1. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
1.	2.16.02.2.01.00 16	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi	Laporan	0	07.10.04 Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas
Catatan Pembahasan : sepakat (KI bukan kewenangan/tidak ada di Kabupaten)						
2.	2.16.02.2.01.00 19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	0	07.10.04 Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas



Catatan Pembahasan : Sepakat

2. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
1.	2.16.03.2.02.00 25	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	1	07.10.04 Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas
Catatan Pembahasan : untuk sub kegiatan ini agar dapat dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000,-						
2.	2.16.03.2.02.00 36	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	28	07.10.04 Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas
Catatan Pembahasan : jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang disediakan oleh Kominfo Gunung Mas sebanyak 26 Perangkat Daerah dan 2 Kecamatan						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
	NIHIL			

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	2
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	5
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	2
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	4
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	4
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari **Kamis**, Tanggal **17** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Lisa Teresia, A.Md.	199105162022032004	Pengolah Data & Informasi	Dinas Kominfosantik Provinsi Kalimantan Tengah
2	Ahi Malani, A.Md.	197926092008012021	Pengolah Data Informasi	Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah
3	Roy Lerry Susanto, S.T.	198010032009031002	JF. Perencana Ahli Muda	Diskominfosantik Kabupaten Gunung Mas
4	Neneng Rahayu	198008062009032008	JF. Perencana Ahli Muda	Bapperida Kabupaten Gunung Mas

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2.6	2,6

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	%	50
Catatan Pembahasan : - untuk sub kegiatan ini agar dapat dianggarkan pagunya Rp. 200.000.000,-, mengingat data statistik sektoral yang dikumpulkan dan publish di portal satu data daerah wajib memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk termasuk pembinaan statistik sektoral/sosialisasi/bimtek/workshop					
2.	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	%	90
Catatan Pembahasan : sepakat					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 17 April 2025
Jam : 12:34:40 PM

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
		NIHIL				
Catatan Pembahasan :						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
	NIHIL			

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	1
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	1
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	1
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	2
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	0
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Statistik pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari **Kamis**, Tanggal **17** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	FEBRIYAN USMAN RIJALI, S.T.	198002102010011008	PERENCANA AHLI MUDA	BAPPERIDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2	Tuti Sulistyowatie	196803261993032010	Sekretaris	Diskominfoantik Prov. Kalteng
3	ROY LERRY SUSANTO, ST	198010032009031002	JF. PERENCANA AHLI MUDA	DISKOMINFOSANTIK KAB. GUMAS

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	%	40	15
2.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	%	40	15

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah	2
Catatan Pembahasan : Target kegiatan sepakat 2 perangkat daerah (Diskominfoantik Kab. Gumus dan Setda Kab. Gumus) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 22.806.548 (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah). Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah Target daerah sepakat berada diangka 15%, karena hasil verifikasi dari BSSN masih dalam kategori rendah.					
2.	2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	Dokumen	2



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 17 April 2025
Jam : 11:31:42 AM

Catatan Pembahasan : Target kegiatan sepakat 2 dokumen (PerBub dan SK) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah)

Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah
Target daerah sepakat berada diangka 15%, karena hasil verifikasi dari BSSN masih dalam kategori rendah.

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
		NIHIL				
Catatan Pembahasan :						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
1.	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	Pembinaan Kematangan Keamanan Siber Sektor Administrasi Pemerintahan: Pemerintah Daerah	14	Daerah
2.	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	Penguatan Ekosistem Keamanan Siber dan Sandi pada Provinsi Baru	4	Daerah

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	2
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	1
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	1
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	2
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	0
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	2

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Persandian pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.



PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari **Selasa**, Tanggal **15** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	ISRANOR, S.Sos, MM	197601082000031001	Perencana Ahli Muda	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
2	YURI DARTATI, S.Kep,M.Kes	198907042015032003	Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
3	SANURANG SANUPATTI, S.Kep,Ns	198906242019031006	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
4	KRIS NATALIA, S.STP, MIP	198912272010102001	Analisis Perencanaan	Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah
5	MARKUS TAPPANG, S.K.M	197711272000031004	Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Aset	Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas
6	IKHLAS, S.T	197811282006041004	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Bapperida Kabupaten Gunung Mas

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	109	109
2.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	98.7	100
3.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.	Kab/Kota	19	
4.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Presentasi puskesmas terakreditasi paripurna	%	28	23,53



NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
5.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Angka Kematian Balita	Per 100.000 Kelahiran Hidup	13.80	13,8
6.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	Persentase	17.5	14
7.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Presentase lanjut usia yang mandiri	Persentase	77	77
8.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	Persentase	1.4	0,30
9.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Pravelensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	Persentase	11.4	12,4
10.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	Persentase	70	70
11.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Persentase kab/kota yang memiliki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar	Persentase	30	10
12.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna	Persentase	45	50
13.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar	Persentase	22	10
14.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Persentase	71	80



NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
15.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	Persentase	46	50
16.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	Persentase	23.4	23
17.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	Kabupaten/ Kota	100	1
18.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	Persentase	55	25
19.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Insidensi Tuberkulosis	Kasus	252	252

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Kesehatan Untuk Semua

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.		NIHIL			
Catatan Pembahasan :					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
1.	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	1	04.15.02 Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses



Catatan Pembahasan : Dinkes Kabupaten Gunung Mas: - RS Paripurna RS Kuala Kurun (DPA sendiri), belum paripurna RS Pratama Tumbang Talaken (1 DPA dengan Dinkes) - Puskesmas yang terakreditasi paripurna sebesar 23,5% - Jumlah bed RS Kuala Kurun 59, RS Pratama Tumbang Talaken 5 Dinkes Provinsi : - Belum terisinya target indikator : 1. Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna 2. Presentasi puskesmas terakreditasi paripurna - Yang akan disesuaikan target indikator : 1. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta. 2. Pravelensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun 3. Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun - Pastikan ada penganggaran pada sub kegiatan ini - Perlu ditinjau kembali atas masa berlaku sertifikat akreditasi dan penurunan akreditasi dengan adanya review kelas						
2.	1.02.02.2.01.00 23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	2	04.11.01 Penurunan Kematian Ibu dan Anak 04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.11.04 Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 04.13.01 Penuntasan TBC 04.13.02 Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer
Catatan Pembahasan : Dinkes Kabupaten Gunung Mas: - Kegiatan berupa BMHP, obat-obatan, PKG, instalasi farmasi - Ada dari DAK non fisik Dinkes Provinsi : - Pastikan penguatan rencana kebutuhan dan monev serta penyediaan instalasi farmasi dan penyimpanannya di fasyankes sesuai standar						
3.	1.02.02.2.01.00 23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	2	04.11.01 Penurunan Kematian Ibu dan Anak 04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.11.04 Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 04.13.01 Penuntasan TBC 04.13.02 Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer
Catatan Pembahasan : Dinkes Kabupaten Gunung Mas: - Kegiatan berupa BMHP, obat-obatan, PKG, instalasi farmasi - Ada dari DAK non fisik Dinkes Provinsi : - Pastikan penguatan rencana kebutuhan dan monev serta penyediaan instalasi farmasi dan penyimpanannya di fasyankes sesuai standar						



4.	1.02.02.2.01.00 23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	2	04.11.01 Penurunan Kematian Ibu dan Anak 04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.11.04 Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 04.13.01 Penuntasan TBC 04.13.02 Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer
Catatan Pembahasan : Dinkes Kabupaten Gunung Mas: - Kegiatan berupa BMHP, obat-obatan, PKG, instalasi farmasi - Ada dari DAK non fisik Dinkes Provinsi : - Pastikan penguatan rencana kebutuhan dan monev serta penyediaan instalasi farmasi dan penyimpanannya di fasyankes sesuai standar						
5.	1.02.02.2.01.00 23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	2	04.11.01 Penurunan Kematian Ibu dan Anak 04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.11.04 Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 04.13.01 Penuntasan TBC 04.13.02 Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer
Catatan Pembahasan : Dinkes Kabupaten Gunung Mas: - Kegiatan berupa BMHP, obat-obatan, PKG, instalasi farmasi - Ada dari DAK non fisik Dinkes Provinsi : - Pastikan penguatan rencana kebutuhan dan monev serta penyediaan instalasi farmasi dan penyimpanannya di fasyankes sesuai standar						



6.	1.02.02.2.01.00 23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	2	04.11.01 Penurunan Kematian Ibu dan Anak 04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.11.04 Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 04.13.01 Penuntasan TBC 04.13.02 Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer
Catatan Pembahasan : Dinkes Kabupaten Gunung Mas: - Kegiatan berupa BMHP, obat-obatan, PKG, instalasi farmasi - Ada dari DAK non fisik Dinkes Provinsi : - Pastikan penguatan rencana kebutuhan dan monev serta penyediaan instalasi farmasi dan penyimpanannya di fasyankes sesuai standar						
7.	1.02.02.2.01.00 23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	2	04.11.01 Penurunan Kematian Ibu dan Anak 04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.11.04 Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 04.13.01 Penuntasan TBC 04.13.02 Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer
Catatan Pembahasan : Dinkes Kabupaten Gunung Mas: - Kegiatan berupa BMHP, obat-obatan, PKG, instalasi farmasi - Ada dari DAK non fisik Dinkes Provinsi : - Pastikan penguatan rencana kebutuhan dan monev serta penyediaan instalasi farmasi dan penyimpanannya di fasyankes sesuai standar						
8.	1.02.02.2.02.00 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	4	04.13.01 Penuntasan TBC 04.13.02 Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis



Catatan Pembahasan : Dinkes Kabupaten Gunung Mas: - Sumber dana DAK dan DAU - Untuk TBC dan kusta sudah diakomodir Dinkes Provinsi : - Pastikan untuk kegiatan menular keswa ada dianggarkan - Tunda Salur BOK Dinas Kesehatan Kab/Kota (berlaku mulai salur tahap II Tahun Anggaran 2025) Kriteria: a. Pelaporan kematian ibu dan balita oleh Puskesmas dan RS paling sedikit 90%; b. Pelaporan pemeriksaan kesehatan gratis oleh Puskesmas paling sedikit 90%; dan c. Pelaporan skrining TBC secara real time oleh Puskesmas dan RS paling sedikit 90% dan capaian penemuan kasus TBC paling sedikit 30% dari target sasaran kabupaten/kota. Batas Waktu: a. Laporan bulan Januari s.d bulan Juni, paling lambat dilaporkan tanggal 5 Juli tahun berjalan, sebagai syarat salur tahap dan b. Laporan bulan Juli s.d bulan Desember, paling lambat dilaporkan tanggal 5 Januari tahun berikutnya, sebagai syarat salur tahap 1						
9.	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	4	04.13.01 Penuntasan TBC 04.13.02 Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis
Catatan Pembahasan : Dinkes Kabupaten Gunung Mas: - Sumber dana DAK dan DAU - Untuk TBC dan kusta sudah diakomodir Dinkes Provinsi : - Pastikan untuk kegiatan menular keswa ada dianggarkan - Tunda Salur BOK Dinas Kesehatan Kab/Kota (berlaku mulai salur tahap II Tahun Anggaran 2025) Kriteria: a. Pelaporan kematian ibu dan balita oleh Puskesmas dan RS paling sedikit 90%; b. Pelaporan pemeriksaan kesehatan gratis oleh Puskesmas paling sedikit 90%; dan c. Pelaporan skrining TBC secara real time oleh Puskesmas dan RS paling sedikit 90% dan capaian penemuan kasus TBC paling sedikit 30% dari target sasaran kabupaten/kota. Batas Waktu: a. Laporan bulan Januari s.d bulan Juni, paling lambat dilaporkan tanggal 5 Juli tahun berjalan, sebagai syarat salur tahap dan b. Laporan bulan Juli s.d bulan Desember, paling lambat dilaporkan tanggal 5 Januari tahun berikutnya, sebagai syarat salur tahap 1						
10.	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	4	04.11.01 Penurunan Kematian Ibu dan Anak 04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.11.04 Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer
Catatan Pembahasan : Dinkes Kabupaten Gunung Mas: - Operasional JKN dan UHC pembayaran iuran - Tidak menadang status dari peserta sehingga semua masyarakat Kab. Gunung Mas terbiayai JKN nya - Jumlah peserta JKN 136.280 Dinkes Provinsi : - Pastikan Penyediaan alokasi anggaran untuk kontribusi iuran PBI sesuai kapasitas fiskal dan bantuan iuran untuk PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 3 - Adanya koordinasi lintas OPD dalam pemutakhiran data PBI						



11.	1.02.02.2.02.00 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	4	04.11.01 Penurunan Kematian Ibu dan Anak 04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.11.04 Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer
Catatan Pembahasan : Dinkes Kabupaten Gunung Mas: - Operasional JKN dan UHC pembayaran iuran - Tidak menadang status dari peserta sehingga semua masyarakat Kab. Gunung Mas terbiayai JKN nya - Jumlah peserta JKN 136.280 Dinkes Provinsi : - Pastikan Penyediaan alokasi anggaran untuk kontribusi iuran PBI sesuai kapasitas fiskal dan bantuan iuran untuk PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 3 - Adanya koordinasi lintas OPD dalam pemutakhiran data PBI						
12.	1.02.02.2.02.00 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	4	04.11.01 Penurunan Kematian Ibu dan Anak 04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.11.04 Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer
Catatan Pembahasan : Dinkes Kabupaten Gunung Mas: - Operasional JKN dan UHC pembayaran iuran - Tidak menadang status dari peserta sehingga semua masyarakat Kab. Gunung Mas terbiayai JKN nya - Jumlah peserta JKN 136.280 Dinkes Provinsi : - Pastikan Penyediaan alokasi anggaran untuk kontribusi iuran PBI sesuai kapasitas fiskal dan bantuan iuran untuk PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 3 - Adanya koordinasi lintas OPD dalam pemutakhiran data PBI						
13.	1.02.02.2.02.00 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	4	04.11.01 Penurunan Kematian Ibu dan Anak 04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.11.04 Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer
Catatan Pembahasan : Dinkes Kabupaten Gunung Mas: - Operasional JKN dan UHC pembayaran iuran - Tidak menadang status dari peserta sehingga semua masyarakat Kab. Gunung Mas terbiayai JKN nya - Jumlah peserta JKN 136.280 Dinkes Provinsi : - Pastikan Penyediaan alokasi anggaran untuk kontribusi iuran PBI sesuai kapasitas fiskal dan bantuan iuran untuk PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 3 - Adanya koordinasi lintas OPD dalam pemutakhiran data PBI						



14.	1.02.02.2.02.00 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	4	04.11.01 Penurunan Kematian Ibu dan Anak 04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.11.04 Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer
Catatan Pembahasan : Dinkes Kabupaten Gunung Mas: - Kegiatan berupa penganggaran dari dana DAK non fisik puskesmas dan mengikuti menu dari pusat Dinkes Provinsi : - Pastikan adanya penguatan PONEC dan PONEK serta pencatatan pelaporan melalui Kematian Ibu dan Anak AMPSR dan bimtek Labkesmas realisasi yang masih rendah di Kalteng, mohon untuk menjadi perhatian bersama agar tertib pelaporan						
15.	1.02.02.2.02.00 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	4	04.11.01 Penurunan Kematian Ibu dan Anak 04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.11.04 Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer
Catatan Pembahasan : Dinkes Kabupaten Gunung Mas: - Kegiatan berupa penganggaran dari dana DAK non fisik puskesmas dan mengikuti menu dari pusat Dinkes Provinsi : - Pastikan adanya penguatan PONEC dan PONEK serta pencatatan pelaporan melalui Kematian Ibu dan Anak AMPSR dan bimtek Labkesmas realisasi yang masih rendah di Kalteng, mohon untuk menjadi perhatian bersama agar tertib pelaporan						
16.	1.02.02.2.02.00 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	4	04.11.01 Penurunan Kematian Ibu dan Anak 04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.11.04 Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer
Catatan Pembahasan : Dinkes Kabupaten Gunung Mas: - Kegiatan berupa penganggaran dari dana DAK non fisik puskesmas dan mengikuti menu dari pusat Dinkes Provinsi : - Pastikan adanya penguatan PONEC dan PONEK serta pencatatan pelaporan melalui Kematian Ibu dan Anak AMPSR dan bimtek Labkesmas realisasi yang masih rendah di Kalteng, mohon untuk menjadi perhatian bersama agar tertib pelaporan						



17.	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	4	04.11.01 Penurunan Kematian Ibu dan Anak 04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.11.04 Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer
Catatan Pembahasan : Dinkes Kabupaten Gunung Mas: - Kegiatan berupa penganggaran dari dana DAK non fisik puskesmas dan mengikuti menu dari pusat Dinkes Provinsi : - Pastikan adanya penguatan PONEC dan PONEK serta pencatatan pelaporan melalui Kematian Ibu dan Anak AMPSR dan bimtek Labkesmas realisasi yang masih rendah di Kalteng, mohon untuk menjadi perhatian bersama agar tertibÂ pelaporan						

2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
1.	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	30	04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer 04.15.02 Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses 04.15.03 Produksi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
Catatan Pembahasan : Dinkes Kabupaten Gunung Mas: Pendidikan dan pelatihan yang bersumber dari dana DAK dan DAU, mencakup seluruh program kesehatan termasuk pelatihan kader kesehatan dan sudah melakukan MOU dengan Bapelkes Provinsi Kalimantan Tengah Dinkes Provinsi : Dalam pemenuhan SDM (kuantitas dan kompetensi) di layanan primer, konsep Dan sistem layanan primer kedepan adalah penguatan layanan primer sampai tingkat desa / kelurahan, mohon dukungan kepada provinsi dan kab/kota untuk: a. Pemenuhan SDM Kesehatan sampai tingkat desa (2 nakes) Dan 2 kader b. Melakukan pemetaan nakes di tingkat desa/ kelurahan c. Membentuk sistem jejaring tempat peningkatan kapasitas nakes (evaluasi BOK 2024, banyak kegiatan pelatihan tidak terserap karena terkendala ketersediaanÂ tempat)						



2.	1.02.03.2.02.00 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	30	04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer 04.15.02 Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses 04.15.03 Produksi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
Catatan Pembahasan : Dinkes Kabupaten Gunung Mas: Pendidikan dan pelatihan yang bersumber dari dana DAK dan DAU, mencakup seluruh program kesehatan termasuk pelatihan kader kesehatan dan sudah melakukan MOU dengan Bapelkes Provinsi Kalimantan Tengah Dinkes Provinsi : Dalam pemenuhan SDM (kuantitas dan kompetensi) di layanan primer, konsep Dan sistem layanan primer kedepan adalah penguatan layanan primer sampai tingkat desa / kelurahan, mohon dukungan kepada provinsi dan kab/kota untuk: a. Pemenuhan SDM Kesehatan sampai tingkat desa (2 nakes) Dan 2 kader b. Melakukan pemetaan nakes di tingkat desa/ kelurahan c. Membentuk sistem jejaring tempat peningkatan kapasitas nakes (evaluasi BOK 2024, banyak kegiatan pelatihan tidak terserap karena terkendala ketersediaanÂ tempat)						
3.	1.02.03.2.02.00 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	30	04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer 04.15.02 Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses 04.15.03 Produksi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
Catatan Pembahasan : Dinkes Kabupaten Gunung Mas: Pendidikan dan pelatihan yang bersumber dari dana DAK dan DAU, mencakup seluruh program kesehatan termasuk pelatihan kader kesehatan dan sudah melakukan MOU dengan Bapelkes Provinsi Kalimantan Tengah Dinkes Provinsi : Dalam pemenuhan SDM (kuantitas dan kompetensi) di layanan primer, konsep Dan sistem layanan primer kedepan adalah penguatan layanan primer sampai tingkat desa / kelurahan, mohon dukungan kepada provinsi dan kab/kota untuk: a. Pemenuhan SDM Kesehatan sampai tingkat desa (2 nakes) Dan 2 kader b. Melakukan pemetaan nakes di tingkat desa/ kelurahan c. Membentuk sistem jejaring tempat peningkatan kapasitas nakes (evaluasi BOK 2024, banyak kegiatan pelatihan tidak terserap karena terkendala ketersediaanÂ tempat)						



4.	1.02.03.2.02.00 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	30	04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer 04.15.02 Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses 04.15.03 Produksi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
Catatan Pembahasan : Dinkes Kabupaten Gunung Mas: Pendidikan dan pelatihan yang bersumber dari dana DAK dan DAU, mencakup seluruh program kesehatan termasuk pelatihan kader kesehatan dan sudah melakukan MOU dengan Bapelkes Provinsi Kalimantan Tengah Dinkes Provinsi : Dalam pemenuhan SDM (kuantitas dan kompetensi) di layanan primer, konsep Dan sistem layanan primer kedepan adalah penguatan layanan primer sampai tingkat desa / kelurahan, mohon dukungan kepada provinsi dan kab/kota untuk: a. Pemenuhan SDM Kesehatan sampai tingkat desa (2 nakes) Dan 2 kader b. Melakukan pemetaan nakes di tingkat desa/ kelurahan c. Membentuk sistem jejaring tempat peningkatan kapasitas nakes (evaluasi BOK 2024, banyak kegiatan pelatihan tidak terserap karena terkendala ketersediaanÂ tempat)						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
1.	KEMENTERIAN KESEHATAN	Penduduk Penerima Bantuan Iuran PBI JKN	96800000	Orang
2.	KEMENTERIAN KESEHATAN	Peserta PBPU dan BP penerima kontribusi bantuan iuran	49603175	Orang
3.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QAA.061.Masyarakat mendapatkan layanan Pencegahan dan Pengendalian TBC	172370	Orang
4.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QAH.061.Layanan Penemuan Aktif TBC	68	Layanan
5.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QMA.061.Data dan Informasi TBC	2	Dokumen
6.	KEMENTERIAN KESEHATAN	RAB.062.Bahan Pencegahan dan Pengendalian TBC	1	Paket
7.	KEMENTERIAN KESEHATAN	SCM.061.Tenaga Kesehatan Terlatih Pencegahan dan Pengendalian TBC	30	Orang
8.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UAE.061.Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Program Pencegahan dan Pengendalian TBC	3	Laporan
9.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UBA.061.Daerah Mendapat Pembinaan Program P2 TBC di Daerah	47	Provinsi/Kab/Kota
10.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QAH.033.Layanan Surveilans dan deteksi dini Kusta dan Frambusia	119	Layanan
11.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QMA.033.Data dan Informasi Kusta dan Frambusia	1	Layanan
12.	KEMENTERIAN KESEHATAN	RCB.033.Pemeliharaan Sistem Informasi Kusta dan Frambusia	1	Paket
13.	KEMENTERIAN KESEHATAN	RAB.033.Layanan Surveilans dan deteksi dini Kusta dan Frambusia	6	Paket
14.	KEMENTERIAN KESEHATAN	SCM.033.Tenaga Kesehatan Terlatih Pencegahan dan Pengendalian Kusta dan Frambusia	60	Orang
15.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UAE.033.Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Program Pencegahan dan Pengendalian Kusta dan Frambusia	18	Provinsi/Kab/Kota
16.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UBA.033.Daerah mendapat Pembinaan Program Kusta dan Frambusia di Daerah	20	Provinsi/Kab/Kota
17.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QAA.001 Orang yang mendapatkan Layanan Konseling Upaya Berhenti Merokok	105000	Orang
18.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QAA.003 Pendayagunaan Dokter Spesialis	670	Orang
19.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QAA.004 Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua	20	Orang



NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
20.	KEMENTERIAN KESEHATAN	PEH.001.Promosi Informasi Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	33	Kegiatan
21.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QKA.005. Layanan Surveilans Gizi dan Kesehatan Keluarga	66	Laporan
22.	KEMENTERIAN KESEHATAN	PEH.001. Promosi Informasi Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	33	Kegiatan
23.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QAH.001 Layanan UBM	11	Layanan
24.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QAA.001 Orang yang mendapatkan Layanan Konseling Upaya Berhenti Merokok	105000	Orang
25.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QMA.001 Penyediaan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi Penyelenggaraan Layanan Upaya Berhenti Merokok	1	Layanan
26.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QMA.006 Penyediaan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi Kawasan Tanpa Rokok	1	Layanan
27.	KEMENTERIAN KESEHATAN	SCM.001 Pelatihan Konseling Upaya Berhenti Merokok	30	Orang
28.	KEMENTERIAN KESEHATAN	SCM.006 Pelatihan Penerapan dan Penegakan KTR	100	Orang
29.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UAE.001 Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Penyelenggaraan Upaya Berhenti Merokok	2	Laporan
30.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UBA.001 Fasilitasi dan Pembinaan Layanan Upaya Berhenti Merokok	33	Daerah
31.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QAH.003 Layanan Deteksi Dini Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	6	Layanan
32.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QMA.003 Media Komunikasi Informasi Edukasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	1	Layanan
33.	KEMENTERIAN KESEHATAN	SCM.003 Tenaga Kesehatan Terlatih Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	30	Orang
34.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UAE.003 Laporan Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	3	Laporan
35.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UBA.003 Daerah yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	5	Daerah
36.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QAA.002 Orang yang Mendapatkan Deteksi Dini FR Diabetes Melitus dan Obesitas	20000	Orang
37.	KEMENTERIAN KESEHATAN	RAB.001 Alat dan Bahan Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Diabetes Melitus dan Gangguan Metabolik	150	Paket
38.	KEMENTERIAN KESEHATAN	PFA.U02 NSPK Penyehatan Lingkungan Kategori II (HS-29)	6	Paket
39.	KEMENTERIAN KESEHATAN	PFA.U02 NSPK Penyehatan Lingkungan Kategori II (HS-29)	16	Paket
40.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QAH.001 Pelayanan Publik Bidang Penyehatan Lingkungan (HS-29)	38	Layanan
41.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QMA.001 Media KIE Implementasi 5 Pilar STBM (HS-29)	1	Dokumen
42.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QMA.002 Media KIE Implementasi Kualitas Air Minum Rumah Tangga yang Memenuhi Standar (HS-29)	2	Dokumen
43.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QMA.003 Media KIE Implementasi Kabupaten Kota Sehat (HS-29)	1	Dokumen
44.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QMA.004 Media KIE Implementasi Penyehatan Kualitas Udara Dalam Ruang di Pemukiman/Rumah Tangga Daerah	1	Dokumen
45.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QMA.005 Media KIE Implementasi Fasyankes yang Memenuhi Syarat Kesehatan Lingkungan (HS-29)	1	Dokumen
46.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QMA.006 Media KIE Implementasi TPP Memenuhi Syarat (HS-29)	1	Dokumen
47.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QMA.007 Media KIE Implementasi TFU Memenuhi Syarat (HS-29)	1	Dokumen
48.	KEMENTERIAN KESEHATAN	RAB.001 Paket Sarana Pengawasan TPP	2	Paket
49.	KEMENTERIAN KESEHATAN	RCB.001 Pemeliharaan Sistem Informasi Bidang Kesehatan Lingkungan (HS-29)	9	Paket
50.	KEMENTERIAN KESEHATAN	SCM.001 Tenaga Terlatih Pengawasan Kualitas Air Minum (HS-29)	48	Orang
51.	KEMENTERIAN KESEHATAN	SCM.002 Tenaga Terlatih Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat (HS-29)	500	Orang



NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
52.	KEMENTERIAN KESEHATAN	SCM.003 Tenaga Terlatih Implementasi Fasyankes yang Memenuhi Syarat Kesehatan Lingkungan (HS-29)	30	Orang
53.	KEMENTERIAN KESEHATAN	SCM.004 Tenaga Terlatih Implementasi TPP Memenuhi Syarat (HS-29)	25	Orang
54.	KEMENTERIAN KESEHATAN	SCM.005 Tenaga Terlatih Implementasi TFU Memenuhi Syarat (HS-29)	500	Orang
55.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UAE.001 Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyehatan Lingkungan (HS-29)	10	Laporan
56.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UBA.001 Daerah Mendapat Fasilitas dan Pembinaan Implementasi 5 Pilar STBM (HS-29)	38	Provinsi/Kab/Kot a
57.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UBA.002 Daerah Mendapat Fasilitas dan Pembinaan Implementasi Kualitas Air Minum	38	Provinsi/Kab/Kot a
58.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UBA.003 Daerah Mendapat Fasilitas dan Pembinaan Implementasi Kabupaten Kota Sehat (HS-29)	38	Provinsi/Kab/Kot a
59.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UBA.004 Daerah Mendapat Fasilitas dan Pembinaan Implementasi Fasyankes yang Memenuhi Syarat Kesehatan Lingkungan (HS-29)	38	Provinsi/Kab/Kot a
60.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UBA.005 Daerah Mendapat Fasilitas dan Pembinaan terkait Pengawasan TPP (HS-29)	38	Provinsi/Kab/Kot a
61.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UBA.006 Daerah Mendapat Fasilitas dan Pembinaan dalam Capaian Target Pengawasan TFU (HS-29)	38	Provinsi/Kab/Kot a
62.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UBA.007 Daerah Mendapat Fasilitas dan Pembinaan dalam Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Kesehatan dan Kebencanaan Lingkungan (Sudah diusulkan untuk diubah pada revisi renja menjadi Daerah Mendapat Fasilitas dan Pembinaan dalam Penyehatan Kualitas Udara (HS-29) namun nomenklatur belum dapat disesuaikan)	38	Provinsi/Kab/Kot a
63.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QAA.061.Masyarakat mendapatkan layanan Pencegahan dan Pengendalian TBC	172370	Orang
64.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QAH.061.Layanan Penemuan Aktif TBC	68	Layanan
65.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QAH.061.Layanan Penemuan Aktif TBC	2	Dokumen
66.	KEMENTERIAN KESEHATAN	RAB.062.Bahan Pencegahan dan Pengendalian TBC	31	Paket
67.	KEMENTERIAN KESEHATAN	RCB.061.Pemeliharaan Sistem Informasi TBC	1	Paket
68.	KEMENTERIAN KESEHATAN	SCM.061.Tenaga Kesehatan Terlatih Pencegahan dan Pengendalian TBC	30	Orang
69.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UAE.061.Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Program Pencegahan dan Pengendalian TBC	3	Laporan
70.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UBA.061.Daerah Mendapat Pembinaan Program P2 TBC di Daerah	47	Provinsi/Kab/Kot a
71.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QAH.033.Layanan Surveilans dan deteksi dini Kusta dan Frambusia	119	Layanan
72.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QMA.033.Data dan Informasi Kusta dan Frambusia	1	Layanan
73.	KEMENTERIAN KESEHATAN	RCB.033.Pemeliharaan Sistem Informasi Kusta dan Frambusia	1	Paket
74.	KEMENTERIAN KESEHATAN	RAB.033.Layanan Surveilans dan deteksi dini Kusta dan Frambusia	6	Paket
75.	KEMENTERIAN KESEHATAN	SCM.033.Tenaga Kesehatan Terlatih Pencegahan dan Pengendalian Kusta dan Frambusia	60	Orang
76.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UAE.033.Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Program Pencegahan dan Pengendalian Kusta dan Frambusia	18	Provinsi/Kab/Kot a
77.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UBA.033.Daerah mendapat Pembinaan Program Kusta dan Frambusia di Daerah	20	Provinsi/Kab/Kot a
78.	KEMENTERIAN KESEHATAN	PDE.001.Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	45	%
79.	KEMENTERIAN KESEHATAN	PDE.001.Rumah Sakit Terakreditasi paripurna	45	%
80.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UAE.004.Pemantauan dan Monev Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Pemantauan Wilayah Setempat	43	Laporan
81.	KEMENTERIAN KESEHATAN	PEA.001.Koordinasi Terkait Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahi	79	kegiatan



NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
82.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UAE.003.Pemantauan dan Evaluasi Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Pembinaan Anak Usia Sekolah dan Remaja	38	Laporan
83.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UBA.004.Pembinaan terkait Kesehatan Usia Reproduksi dan Lansia	38	Daerah
84.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UAE.001.Pemantauan dan Evaluasi Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Baru Lahir	38	Laporan
85.	KEMENTERIAN KESEHATAN	RAB.001.Media KIE Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Ibu dan Bayi Baru Lahir	2782038	Buku
86.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UAE.002.Pemantauan dan Evaluasi Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita	38	Laporan
87.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UBA.001.Pembinaan terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir	139	Daerah
88.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UBA.002.Pembinaan Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita	73	Daerah
89.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QKA.005.Layanan Surveilans Gizi dan Kesehatan Keluarga	66	Laporan

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	1
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	19
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	2
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	0
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	6
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	89

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.



PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari **Selasa**, Tanggal **15** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	ARNICE ATERIANA, S.Pt., MT	197309262000032007	Penelaah Teknis Kebijakan	BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Tengah
2	DESSY KATHERINA,S.Pd	199010172015032001	Perencana Ahli Muda	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
3	NENENG RAHAYU	198008062009032008	Perencana Ahli Muda	BAPPERIDA Kabupaten Gunung Mas
4	EVELLYN, SP	197108082006042024	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Keluarga	1500000	80
2.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ASN dan NON ASN yang Mengikuti Sertifikasi	Orang	6850	68
3.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang Mengikuti Proses Akreditasi	Lembaga	2261	1
4.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Persentase	71.01	90
5.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100
6.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100
7.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 15 April 2025
Jam : 1:28:45 PM

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
8.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100
9.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100
10.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Keluarga	1500000	80
11.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ASN dan NON ASN yang Mengikuti Sertifikasi	Orang	6850	68
12.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang Mengikuti Proses Akreditasi	Lembaga	2261	1
13.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Persentase	71.01	90
14.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100
15.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100
16.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100
17.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100



NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
18.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	1
Catatan Pembahasan : Kab. : Untuk LKS Lansia Prov.: Untuk LKS yang ada di Kab agar dimasukkan datanya ke Dinsos Prov. (Bidang Rehsos) untuk memudahkan kalau ada bantuan dari Prov.					
2.	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	133
Catatan Pembahasan : Khusus untuk PSM, 81 org sdh sertifikasi dan yang belum 52 org					

2. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0
Catatan Pembahasan : Prov : Agar dimasukkan dalam Renja 2026 (target dan pagu anggaran) tetapi harus disiapkan proposal terlebih dahulu untuk usulan					
2.	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	350
Catatan Pembahasan : Untuk penanganan stunting (ibu hamil, menyusui dan balita)					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
		NIHIL				
Catatan Pembahasan :						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
	NIHIL			



C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1. Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	2
2. Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3. Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	9
4. Jumlah Program yang Mendukung	:	2
5. Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	4
6. Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	0
7. Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari **Rabu**, Tanggal **16** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	MARINIE SIWUH	197803192009032001	Kasubbag Penyusunan Program	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah
2	ANDREY, SE., M.Si	197702072009031003	Perencana Ahli Muda	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi & UKM Kabupaten Gunung Mas
3	NENENG RAHAYU	198008062009032008	Perencana Ahli Muda	Bapperida Kabupaten Gunung Mas
4	YUNIKE RAYA	197306032006042016	Analisis Perencanaan dan Kerjasama	Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1.12	0.005
2.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	Update dan pengumpulan Data UMKM	Persentase	15	1
3.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	Proporsi Jumlah UKM	Persentase	3.15	1
4.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	Rasio Kewirausahaan	Persentase	3.24	0.5



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 16 April 2025
Jam : 1:45:11 PM

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
5.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi	Persentase	8.90	4.5
6.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi	Persentase	10	2

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.17.07.2.01.00 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	25
Catatan Pembahasan : disepakati bahwa untuk target adalah 25 dan untuk pagu akan diusulkan pada Renja tahun 2026					
2.	2.17.07.2.01.00 15	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	20
Catatan Pembahasan : disepakati bahwa untuk target adalah 20 dan untuk pagu akan diusulkan pada Renja tahun 2026					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
1.	2.17.06.2.01.00 03	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	16	03.03.01 Pengembangan Koperasi Sektor Produksi
Catatan Pembahasan : disepakati bahwa untuk target adalah 16 dan untuk pagu akan diusulkan pada Renja tahun 2026						
2.	2.17.06.2.01.00 09	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	28	03.03.01 Pengembangan Koperasi Sektor Produksi
Catatan Pembahasan : disepakati bahwa untuk target adalah 28 dan untuk pagu akan diusulkan pada Renja tahun 2026						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
1.	KEMENTERIAN KOPERASI	Fasilitasi Kemitraan Koperasi Dalam Program Makan Bergizi Gratis	10	Koperasi
2.	KEMENTERIAN KOPERASI	Fasilitasi Potensi Usaha Koperasi Sektor Agromaritim	20	Koperasi
3.	KEMENTERIAN KOPERASI	Pendampingan Produksi Koperasi Sektor Agromaritim	37	Koperasi
4.	KEMENTERIAN KOPERASI	Pendampingan Revitalisasi Koperasi	25	Koperasi
5.	KEMENTERIAN KOPERASI	Fasilitasi dan Pembinaan Peran Koperasi dalam Distribusi	30	Koperasi



NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
6.	KEMENTERIAN KOPERASI	Fasilitasi Sosialisasi Pembentukan Koperasi dari Kelompok Strategis	100	Orang
7.	KEMENTERIAN KOPERASI	Fasilitasi Potensi Usaha Koperasi Sektor Aneka Usaha	15	Koperasi
8.	KEMENTERIAN KOPERASI	Pendampingan Produksi Koperasi Sektor Aneka Usaha	10	Koperasi
9.	KEMENTERIAN KOPERASI	Layanan Dana Bergulir dan Inkubator bagi Koperasi	10	Koperasi
10.	KEMENTERIAN KOPERASI	Pelatihan Intensif Bootcamp dan Magang Bagi Pengurus dan Pengelola Koperasi	25	Orang
11.	KEMENTERIAN KOPERASI	Layanan Penguatan Literasi Perkoperasian	3	Kegiatan
12.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Sistem Informasi Kementerian UMKM	1	Layanan
13.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Pemanfaatan SIDT oleh Daerah	1	Layanan
14.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Fasilitasi Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Usaha Mikro	5000	UMKM
15.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Produk bagi Usaha Mikro	10150	Produk
16.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro Berbasis Kompetensi	324	UMKM
17.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Pembinaan Peningkatan Hilirisasi Produksi Usaha Mikro	240	UMKM
18.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Fasilitasi Perluasan Akses Pasar/ Promosi bagi Usaha Mikro	200	UMKM
19.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Pendampingan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro	7750	UMKM
20.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Usaha Mikro	250	Orang
21.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga PLUT	12	Lembaga
22.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Fasilitasi dan Pendampingan Peningkatan Manajemen Mutu Produk bagi Usaha Kecil	135	UKM
23.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Pengembangan Sarana dan/atau Prasarana Produksi bagi Usaha Kecil	10	Unit
24.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Fasilitasi dan Pembinaan Peningkatan Digitalisasi bagi Usaha Kecil	150	UMKM
25.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Fasilitasi dan Pembinaan Akses Pembiayaan bagi Usaha Kecil/Sentra	180	UMKM
26.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Fasilitasi dan Pembinaan Investasi, Fiskal, dan Pajak bagi Usaha Kecil	175	UMKM
27.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Fasilitasi dan Pembinaan Penguatan Kemitraan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar	135	UMKM
28.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Layanan Advokasi dan Pendampingan Hukum bagi Usaha Kecil	150	Orang
29.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Fasilitasi dan Pembinaan Pengembangan Ekosistem Kewirausahaan	520	Orang
30.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Pembinaan Lembaga Inkubator	5	Lembaga
31.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Layanan Pembinaan Inkubasi Startup dan Global Startup Hub	19	Unit
32.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Fasilitasi dan Pembinaan bagi Wirausaha dan Pendamping	625	Orang
33.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Sistem Informasi Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan	1	Sistem Informasi

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	1
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	6
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	2
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	2
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	2
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	33

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari **Rabu**, Tanggal **16** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Drs. YOYO, M.Si.	196905301990031006	KABID EKONOMI SDA DAN KERJASAMA	BAPPERIDA PROVINSI KALTENG
2	ANTUNG ARIF MAULANA, S.Sos.	198905202020121010	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DPMPTSP PROVINSI KALTENG
3	PANJUNG KITTIE UDA,S.E.,M.Si	197703182007011006	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	DPMPTSP KAB. GUNUNG MAS
4	IKHLAS, S.T.	197811282006041004	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	BAPPERIDA KAB. GUNUNG MAS

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	triliun rupiah	2175	0.916

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha.	8



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 16 April 2025
Jam : 2:13:38 PM

Catatan Pembahasan : Forum Rakortekrenbang antara DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah, Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, DPMPTSP Kab. Gunung Mas dan Bapperida Kab. Gunung Mas telah bersama-sama melakukan pembahasan dan menyepakati atas target kinerja dan Sub Kegiatan pendukung. Adapun hasil pembahasan sebagai berikut:

1. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menyampaikan Surat melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM No : 47/A.10/B.5/2025 tanggal 12 Februari 2025 terkait Penyampaian Target Realisasi Investasi dan telah menetapkan bahwa Target Nilai Realisasi Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 25,93
2. Berdasarkan hal tersebut DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah telah menyampaikan surat No : 570 / 111 /B.IV/DPMPTSP-2025 tanggal 24 Februari 2025, Hal : Target Realisasi Investasi Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, yang mana surat tersebut juga menjadi dasar untuk pengisian target tahun
3. DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas capaian Realisasi Penanaman Modal DPMPTSP Kab. Gunung Mas tahun
4. Target Nilai Realisasi Penanaman Modal DPMPTSP Kab. Gunung Mas tahun 2026 yang diinput pada aplikasi E-Rakortek telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah, yakni sebesar Rp. 0,916
5. Untuk mendukung pencapaian tersebut didukung dengan Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal dan Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya. Sub Kegiatan tersebut telah mendukung Outcome Prioritas Pencapaian Target Realisasi Investasi Nasional Tahun
6. Target Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya tahun 2026 DPMPTSP Kab. Gunung Mas sebanyak 8 Kegiatan Usaha dengan pagu indikatif sebesar Rp. 126.030.
7. Berdasarkan keterangan dari DPMPTSP Kab. Gunung Mas untuk Tahun 2024 tidak terdapat kendala yang signifikan dan dapat
8. Adapun untuk Target Nilai Realisasi Penanaman Modal secara nasional Tahun 2026 adalah Rp. 2.175,26 T.

2.	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	14

Catatan Pembahasan : Forum Rakortekrenbang antara DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah, Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, DPMPTSP Kab. Gunung Mas dan Bapperida Kab. Gunung Mas telah bersama-sama melakukan pembahasan dan menyepakati atas target kinerja dan Sub Kegiatan pendukung. Adapun hasil pembahasan sebagai berikut:

1. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menyampaikan Surat melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM No : 47/A.10/B.5/2025 tanggal 12 Februari 2025 terkait Penyampaian Target Realisasi Investasi dan telah menetapkan bahwa Target Nilai Realisasi Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 25,93
2. Berdasarkan hal tersebut DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah telah menyampaikan surat No : 570 / 111 /B.IV/DPMPTSP-2025 tanggal 24 Februari 2025, Hal : Target Realisasi Investasi Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, yang mana surat tersebut juga menjadi dasar untuk pengisian target tahun
3. DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas capaian Realisasi Penanaman Modal DPMPTSP Kab. Gunung Mas tahun
4. Target Nilai Realisasi Penanaman Modal DPMPTSP Kab. Gunung Mas tahun 2026 yang diinput pada aplikasi E-Rakortek telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah, yakni sebesar Rp. 0,916
5. Untuk mendukung pencapaian tersebut didukung dengan Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal dan Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya. Sub Kegiatan tersebut telah mendukung Outcome Prioritas Pencapaian Target Realisasi Investasi Nasional Tahun
6. Target Sub Kegiatan Pengawasan tahun 2026 DPMPTSP Kab. Gunung Mas sebanyak 14 Kegiatan Usaha dengan pagu indikatif sebesar Rp. 90.538.
7. Berdasarkan keterangan dari DPMPTSP Kab. Gunung Mas untuk Tahun 2024 tidak terdapat kendala yang signifikan dan dapat
8. Adapun untuk Target Nilai Realisasi Penanaman Modal secara nasional Tahun 2026 adalah Rp. 2.175,26 T.

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
		NIHIL				

Catatan Pembahasan :

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
	NIHIL			



C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	1
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	1
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	1
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	2
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	0
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari **Rabu**, Tanggal **16** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	MEIYORI SINTHIA VINI, S.T	197905232008032003	JFT	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI KALTENG
2	SEKAR ANGGRAESIH, S.Pi	196905281996032005	PERENCANA AHLI MUDA	BAPPERIDA PROVINSI KALTENG
3	IKHLAS, S.T	197811282006041004	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA	BAPPERIDA KAB GUNUNG MAS
4	SUPERVISI BUDI, S. HUT	197505242006041007	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN	BAPPERIDA KAB GUNUNG MAS

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Rp	880.0	0.264
2.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	Kontribusi ekspor produk industri non migas terhadap total ekspor	Persentase	71	

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	3.31.02.2.01.00 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1
Catatan Pembahasan : di usulkan di RENJA 2026 Sebesar Rp. 25.000.000					
2.	3.31.02.2.01.00 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	2
Catatan Pembahasan : Sepakat					

2. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 16 April 2025
Jam : 1:15:31 PM

1.	3.31.03.2.01.00 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	1
Catatan Pembahasan : Sepakat					
2.	3.31.03.2.01.00 04	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	1
Catatan Pembahasan : di usulkan di RENJA 2026 Sebesar Rp. 25.000.000					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
		N I H I L				
Catatan Pembahasan :						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
1.	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	Industri yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi dan ekspor sektor Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	4	Industri
2.	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	Industri yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi dan ekspor sektor Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan	2	Industri
3.	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	Industri yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi dan ekspor sektor Elektronika dan Telematika	3	Industri
4.	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	Industri yang Terfasilitasi Dalam Rangka Peningkatan Investasi dan Ekspor Sektor Industri Logam	2	Industri

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	1
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	2
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	2
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	4
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	0
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	4

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari **Rabu**, Tanggal **16** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	MEIYORI SINTHIA VINI, S.T	197905232008032003	JFT	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI KALTENG
2	LUQMAN ALHAKIM, S.P., M.Si	196912191996031003	PERENCANA AHLI MADYA	BAPPERIDA PROVINSI KALTENG
3	IKHLAS, S.T	197811282006041004	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA	BAPPERIDA KAB GUNUNG MAS
4	SUPERVISI BUDI, S. HUT	197505242006041007	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KAB GUNUNG MAS

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	Pertumbuhan Ekspor Barang Provinsi	Persentase	7.1	2.75
2.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	Pertumbuhan Total Perdagangan dengan Provinsi Lainnya	Persentase	5	2.5

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Laporan	1
Catatan Pembahasan : di usulkan di RENJA 2026 Sebesar Rp. 50.000.000					
2.	3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	0
Catatan Pembahasan : Kabupaten Gunung Mas tidak memiliki instansi penerbit SKA					

2. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 16 April 2025
Jam : 1:08:16 PM

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	3.30.05.2.01.00 02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	1
Catatan Pembahasan : di usulkan di RENJA 2026 Sebesar Rp. 50.000.000					
2.	3.30.05.2.01.00 04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	2
Catatan Pembahasan : di usulkan di RENJA 2026 Sebesar Rp. 50.000.000					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
		N I H I L				
Catatan Pembahasan :						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
1.	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Fasilitasi Penerbitan Dokumen Ketentuan Asal (DKA) dan Skema Ketentuan Asal Barang Ekspor	850000	Badan Usaha
2.	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Kerjasama Kelembagaan Ekspor	1	Kesepakatan
3.	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Layanan Inquiry dan Temu	200	Badan Usaha
4.	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Export Center Surabaya & Export Center Makassar	900	Badan Usaha
5.	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Business Matching pada Pameran Pangan Nusa	38	Daerah
6.	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Pembinaan Pengelolaan Depo Gerai Maritim	1	Lembaga
7.	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Pembinaan Terkait Perdagangan Antar Pulau dan Perbatasan	130	Lembaga
8.	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Market Intelligence	76	Rekomendasi

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	1
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	2
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	2
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	4
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	0
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	8

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari **Selasa**, Tanggal **15** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Yudi Darma S.Sn	198106102011011003	Kepala Bidang Pelestarian Cagar Budaya Permuseuman dan Registrasi Data	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Gunung Mas
2	HENDRO, SH., MH.	196910041991031003	Perencana Ahli Muda	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Gunung Mas
3	YUNANAE EKA ASI ILAS, S.T., M.T.	197401142003122002	PERENCANA AHLI MUDA	BAPPERIDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Jumlah devisa sektor pariwisata	Rp	220000000000	1.990.000.000
2.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Perjalanan	1176000000	30.000
3.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Rasio PDB Pariwisata	%	4.7	0.13

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Meningkatkan Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Orang	30

Catatan Pembahasan : Akan dilaksanakan peningkatan SDM Pokdarwis



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 15 April 2025
Jam : 2:40:06 PM

2.	3.26.02.2.03.00 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	1
Catatan Pembahasan : Sepakat					
2. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	3.26.04.2.02.00 09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen	1
Catatan Pembahasan : Akan dibuat dokumen Rencana Aksi pengembangan Ekonomi Kreatif					
2.	3.26.04.2.02.00 12	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Lembaga	1
Catatan Pembahasan : Akan dilaksanakan penguatan Dekranasda Kabupaten Gunung Mas					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

1. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						
NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
1.	3.26.02.2.01.00 06	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Lokasi	3	03.05.01 Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur Yogyakarta Prambanan
Catatan Pembahasan : Akan ditetapkan 3 lokasi DTW unggulan di Kab Gunung Mas						
2.	3.26.02.2.01.00 09	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	03.05.05 Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok Gili Tramena
Catatan Pembahasan : Belum merencanakan untuk penganggaran perencanaan dan perancangan daya tarik wisata unggulan						
3.	3.26.02.2.03.00 01	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Lokasi	0	03.05.08 Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba
Catatan Pembahasan : Sudah ditetapkan di tahun - tahun yang lalu						
4.	3.26.02.2.03.00 02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	0	03.05.10 Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo
Catatan Pembahasan : Sudah tersedia dokumen perencanaan destinasi pariwisata Kabupaten						
2. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL						
NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
1.	3.26.04.2.01.00 01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Unit	0	03.05.01 Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur Yogyakarta Prambanan
Catatan Pembahasan : Belum ada penetapan Kota Kreatif						



2.	3.26.04.2.02.00 02	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen	1	03.05.05 Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok Gili Tramena
Catatan Pembahasan : Akan direncanakan pembuatan dokumen pendidikan ekonomi kreatif di tahun 2026						
3.	3.26.04.2.02.00 16	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Dokumen	0	03.05.08 Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba
Catatan Pembahasan : Belum merencanakan untuk pembuatan dokumen strategis ekonomi kreatif daerah						
4.	3.26.04.2.02.00 22	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Produk	0	03.05.10 Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo
Catatan Pembahasan : Belum direncanakan untuk kegiatan pencatatan HAKI di Kab Gunung Mas						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
1.	KEMENTERIAN PARIWISATA	PEA.001 Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata	2	Kegiatan
2.	KEMENTERIAN PARIWISATA	PEA.002 Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN)	1	Kegiatan
3.	KEMENTERIAN PARIWISATA	PEA.003 Koordinasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas	5	Kegiatan
4.	KEMENTERIAN PARIWISATA	PBP.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Nasional Terpadu (ITMP) Ekstensi Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (BYP)	1	Rekomendasi
5.	KEMENTERIAN PARIWISATA	PBP.002 Penyusunan Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Nasional Terpadu (ITMP) Ekstensi Labuan Bajo-Flores (LBF)	1	Rekomendasi
6.	KEMENTERIAN PARIWISATA	QDC.001 Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I	325	Orang
7.	KEMENTERIAN PARIWISATA	PFA.001 NSPK Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I	2	Pedoman
8.	KEMENTERIAN PARIWISATA	PEA.001 Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I	12	Kegiatan
9.	KEMENTERIAN PARIWISATA	PEA.001 Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II	8	Kegiatan
10.	KEMENTERIAN PARIWISATA	PFA.001 NSPK Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II	2	Pedoman
11.	KEMENTERIAN PARIWISATA	QDC.001 Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II	240	Orang
12.	KEMENTERIAN PARIWISATA	QDC.001 Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200	Orang
13.	KEMENTERIAN PARIWISATA	PEA.001 Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata	24	Kegiatan
14.	KEMENTERIAN PARIWISATA	PEA.001 Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata	13	Kegiatan
15.	KEMENTERIAN PARIWISATA	PEA.002 Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata	13	Kegiatan
16.	KEMENTERIAN PARIWISATA	PFA.001 NSPK Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata	4	Pedoman
17.	KEMENTERIAN PARIWISATA	AFA.001 NSPK Industri Pariwisata	1	Pedoman
18.	KEMENTERIAN PARIWISATA	QDI.001 Rantai Pasok Industri Pariwisata	40	Industri
19.	KEMENTERIAN PARIWISATA	QDI.002 Tranformasi Digital Industri Pariwisata	5	Industri
20.	KEMENTERIAN PARIWISATA	AEA.001 Koordinasi Jejaring Lintas Sektor Industri Pariwisata	1	Kegiatan



NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
21.	KEMENTERIAN PARIWISATA	ABB.001 Rekomendasi Kebijakan Investasi Pariwisata	1	Rekomendasi
22.	KEMENTERIAN PARIWISATA	BDI.001 Dukungan Teknis dan Pendampingan Investasi Pariwisata	30	Industri
23.	KEMENTERIAN PARIWISATA	QDI.001 Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Realisasi Investasi Pariwisata	90	Industri
24.	KEMENTERIAN PARIWISATA	PEH.001 Promosi Investasi Pariwisata	3	Promosi
25.	KEMENTERIAN PARIWISATA	AFA.001 Penyusunan NSPK Usaha Pariwisata Berkelanjutan	3	Dokumen
26.	KEMENTERIAN PARIWISATA	QDH.001 Pendampingan, Kemitraan dan Insentif Industri Pariwisata Berkelanjutan	30	Badan Usaha
27.	KEMENTERIAN PARIWISATA	PEA.001 Koordinasi Penerapan Usaha Pariwisata Berkelanjutan	1	Kegiatan
28.	KEMENTERIAN PARIWISATA	QDH.001 Fasilitasi Akses Permodalan Usaha Pariwisata	75	Badan Usaha
29.	KEMENTERIAN PARIWISATA	QDH.002 Pengembangan Akses Pasar Usaha Pariwisata	75	Badan Usaha

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	1
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	3
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	2
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	4
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	8
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	29

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari **Selasa**, Tanggal **15** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	ETTY APRILYA, S.T., M.Si	198704102010012002	SEKRETARIS	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2	KRISTRIANTONI, SE., M.A.P	197612252007011011	KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GUNUNG MAS
3	IKHLAS, ST	197811282006041004	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA	BAPPERIDA KABUPATEN GUNUNG MAS
4	FREDY DARINTON, S.T.	198102252010011005	KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPERIDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
	NIHIL					

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

- OUTCOME: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PENATAAN DESA

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Unit	2

Catatan Pembahasan : Pagu akan dianggarkan pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 40.000.000,- pengadaan laptop sebanyak 2 unit untuk desa tertinggal.

2. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	1

Catatan Pembahasan : 1. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa di 25 Desa (Monitoring dan Evaluasi).
2. Pelatihan Peningkatan Kapasitas BUM Desa.



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 15 April 2025
Jam : 2:54:00 PM

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
		NIHIL				
Catatan Pembahasan :						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
	NIHIL			

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	2
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	0
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	2
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	2
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	0
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari **Selasa**, Tanggal **15** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	ELSYE KUSUMAWATI, S.T., M.Eng.	198208142006042010	Perencana Ahli Muda	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah
2	RICKY YULANDA, S.T.	198006232010011010	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
3	VERY SANDY, S.Sos.	197602092007011006	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
	NIHIL					

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

- OUTCOME: Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.12.02.2.03.00 01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	2
Catatan Pembahasan : Sub Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk akan dianggarkan T.A. 2026.					
2.	2.12.02.2.03.00 03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan	1
Catatan Pembahasan : Target Sub Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk berubah menjadi 1 laporan					

2. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 15 April 2025
Jam : 12:22:30 PM

1.	2.12.03.2.02.00 02	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Laporan	2
Catatan Pembahasan : Sub Kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota akan dilaksanakan di T.A. 2026.					
2.	2.12.03.2.02.00 06	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	1
Catatan Pembahasan : Target Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil berubah menjadi 1 laporan					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
		NIHIL				
Catatan Pembahasan :						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
	NIHIL			

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	1
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	0
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	2
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	4
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	0
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari **Selasa**, Tanggal **15** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	AKWILA TRIFENA A. AWAN, S.STP., M.AP	199311132016092001	Penelaah Teknis Kebijakan	Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah
2	JUNDY ARDIANSON, S.Hut	197503062006041012	kasubbag Penyusunan Program	BPB-BK Provinsi Kalteng
3	CHELSI NATASYA NARANG, S.PSi	199903222022032003	Penelaah Teknis Kebijakan	Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah
4	SALAMPAK HARIS	196808171989111002	Kepala	Satpol PP Kabupaten Gunung Mas
5	ROSIANA LORENDA	199611162022022001	Analisis Perencanaan Anggaran	Bapperinda Kabupaten Gunung Mas
6	RYAN ABDUL MALIK	199702022022021001	ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	BPBD Kabupaten Gunung Mas

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Nilai	76	70
2.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Nilai	75	70
3.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Nilai	75	70



NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
4.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Nilai	76	70
5.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Nilai	75	70
6.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Nilai	75	70

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	1.05.03.2.02.00 27	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	0.00
Catatan Pembahasan : PD Provinsi: RPB sudah disusun oleh Pemkab Gunung Mas dengan Periodesasi 2024-2029 Pemkab Gunung Mas Sudah dilegalkan					
2.	1.05.03.2.04.00 05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	1.00
Catatan Pembahasan : PD Provinsi : 1. Agar mengalokasikan anggaran untuk kegiatan dimaksud. 2. Untuk disesuaikan lagi dengan Renja Perangkat daerah terkait penganggaran dan targetnya. Pemkab Gunung Mas: 1. akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketersediaan anggaran.					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
		NIHIL				
Catatan Pembahasan :						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
	NIHIL			

2. OUTCOME: Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM



NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	1.05.02.2.01.00 15	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	laporan	4.00
Catatan Pembahasan : PD Provinsi target dimaksud adalah 4 laporan per triwulan Pemkab Gunung Mas: Target akan disesuaikan.					
2.	1.05.02.2.02.00 11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	4.00
Catatan Pembahasan : PD Provinsi target dimaksud adalah 4 laporan per triwulan Pemkab Gunung Mas: Target akan disesuaikan.					

2. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	1.05.04.2.01.00 13	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0.00
Catatan Pembahasan : PD Provinsi Menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran Pemkab Gunung Mas: Belum bisa dianggarkan karena keterbatasan anggaran.					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
		NIHIL				
Catatan Pembahasan :						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
	NIHIL			

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	2
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	2
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	3
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	3
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	5
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	0
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari **Selasa**, Tanggal **15** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	LIFRINA	197602162005012008	Analisis Perencanaan	Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah
2	ANDRI	198312112010011014	Perencana Ahli Muda	Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
3	MANTIKEI, S.E	198403142009031004	Perencana Ahli Muda	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gunung Mas
4	IKHLAS, S.T	197811282006041004	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Bapperida Kabupaten Gunung Mas

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	100	85.52
2.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	99.66
3.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100	99.66
4.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	73.19	-



NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
5.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Iklim Keamanan SMP	Nilai	72.70	73.93
6.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	73.55	69.47
7.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	72.31	73.37
8.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	63.90	58.81
9.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	62.06	62.22
10.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Iklim Keamanan SD	Nilai	76.72	70.64
11.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	65.05	54.49
12.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	58.37	50.24
13.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	71.13	65.83
14.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	63.83	60.55



NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
15.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	63.38	52.38
16.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	%	73.14	49.45

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	1.01.02.2.01.00 39	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	1
Catatan Pembahasan : Akan dianggarkan dalam Ranhir/Renja 2026					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
1.	1.01.02.2.02.00 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	0	04.01.04 Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah
Catatan Pembahasan : Bantuan untuk peserta didik dianggarkan berupa perlengkapan peserta didik yang masuk pada sub kegiatan pengadaan perlengkapan peserta didik						
2.	1.01.02.2.02.00 60	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	0	04.04.02 Restrukturisasi Kewenangan Pengelolaan Guru Meliputi Formasi, Rekrutmen, Pengangkatan dan Penempatan, Mobilitas, Pembinaan Karier Profesional (E.G. Pelatihan, In Service Training), Perlindungan Hukum, dan Kesejahteraan Berbasis Kinerja
Catatan Pembahasan : Kegiatan sejenis sudah dianggarkan pada sub kegiatan lain yang terkait dengan peningkatan kompetensi tenaga pendidik						
3.	1.01.02.2.03.00 40	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0	04.01.01 Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
Catatan Pembahasan : Jumlah satuan PAUD Negeri dan Swasta di Kabupaten Gunung Mas sudah memenuhi untuk mendukung pencapaian angka partisipasi usia 5 tahun sampai 6 tahun						



4.	1.01.02.2.04.00 10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	0	04.01.04 Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah
Catatan Pembahasan : Bantuan untuk peserta didik dianggapkan berupa perlengkapan peserta didik yang masuk pada sub kegiatan pengadaan perlengkapan peserta didik						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
1.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Akreditasi Lembaga	130653	Lembaga
2.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Bahan Kebijakan Hasil Asesmen Pendidikan	6	Rekomendasi
3.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Bahan Kebijakan Isu Strategis Pendidikan	16	Rekomendasi
4.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Bahan Kebijakan Kurikulum yang esensial	10	Rekomendasi
5.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Bahan Kebijakan Perbukuan yang Dikembangkan	1	Rekomendasi
6.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Buku Pendidikan yang Disusun, Dikembangkan dan Dinilai	2200	Rekomendasi
7.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang mendapatkan Bimtek Pendidikan Kepemimpinan	5824	Orang
8.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Guru Dikdas yang difasilitasi kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran	182	Orang
9.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Guru Dikmen dan Diksus yang difasilitasi kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran	1081	Orang
10.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Guru kejuruan yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja	3036	Orang
11.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	1560	Orang
12.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal yang difasilitasi kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran	2000	Orang
13.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Guru TK/TKLB Non-ASN yang Menerima Tunjangan Profesi	137215	Orang
14.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Guru yang difasilitasi proses Sertifikasi	666933	Orang
15.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja	14	Rekomendasi
16.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Kemitraan antara Satuan Pendidikan Vokasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri	166	Kesepakatan
17.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Komunitas Literasi yang difasilitasi dan diapresiasi	100	Kelompok Masyarakat
18.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan	1424	Lembaga
19.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Manajemen Talenta yang dikembangkan untuk Menjaring Minat, Bakat dan Prestasi	18150	Orang
20.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Model Kurikulum yang adaptif dan kontekstual	289	Rekomendasi
21.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Penataan Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal	38	Provinsi
22.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Pengawasan Pemanfaatan Buku Di Satuan Pendidikan	105	Lembaga
23.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Pengguna Layanan Platform Teknologi Pendidikan Terintegrasi yang di Bina	105000	Orang
24.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi	2754	Lembaga
25.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Penutur bahasa terbina	8619	Orang
26.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Peserta didik yang difasilitasi karir belajar untuk pengembangan prestasi	800	Orang
27.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Peserta Pengujian Pendidikan yang Terlayani	772000	Orang
28.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Prasarana Pendukung Pembelajaran (BB/BPPMPV)	7	Unit
29.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Sarana Pendukung Pembelajaran (BB/BPPMPV)	7	Paket
30.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan Dunia kerja	105	Kesepakatan



NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
31.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Satuan Pendidikan Vokasi Yang Selaras Dengan Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri	25	Lembaga
32.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Satuan Pendidikan yang di kembangkan prestasinya dalam kerangka MTN	550	Lembaga
33.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Asesmen	540948	Lembaga
34.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 SDM Perbukuan yang Terbina	125	Orang
35.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Sistem Informasi Asesmen	1	Sistem Informasi
36.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Sistem Informasi Kurikulum	1	Sistem Informasi
37.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Sistem Informasi Perbukuan	1	Data
38.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Sistem Informasi Standar dan Kebijakan Pendidikan	1	Sistem Informasi
39.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Siswa SD/Paket A Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	10360614	Orang
40.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Tim Pengembang Kurikulum yang berkompeten	140	Orang
41.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	002 Guru Dikdas Non-ASN yang Menerima Tunjangan Profesi	428773	Orang
42.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	002 Guru Dikdas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	3220	Orang
43.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	002 Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal yang difasilitasi Kualifikasi S1/DIV	1470	Orang
44.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	002 Komunitas Penggerak Literasi Terbina	1256	Lembaga
45.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	002 Komunitas Sastra yang difasilitasi dan diapresiasi	100	Kelompok Masyarakat
46.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	002 Penataan Guru Dikdas	38	Provinsi
47.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	002 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri	3033	Orang
48.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	002 Penutur bahasa teruji	143648	Orang
49.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	002 Perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual	616	Rekomendasi
50.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	002 Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Sains, Riset, Teknologi, dan Inovasi	6448	Orang
51.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	002 Produk Kamus dan Pedoman Kebahasaan	88	Dokumen
52.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	002 Rapor Pendidikan yang dikembangkan	4	Rekomendasi
53.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	002 Sistem Informasi Pengelolaan Pengujian	1	Sistem Informasi
54.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	002 Siswa SMP/Paket B Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	4369968	Orang
55.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	002 Soal yang Dikembangkan	19340	Rekomendasi
56.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	003 Generasi muda terbina program literasi	19045	Orang
57.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	003 Guru Dikmen dan Dikus yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	4100	Orang
58.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	003 Guru Dikmen Non-ASN yang Menerima Tunjangan Profesi	215474	Orang
59.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	003 Model Asesmen Pendidikan	5	Rekomendasi
60.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	003 Penataan Guru Dikmen dan Dikus	38	Provinsi
61.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	003 Pengawas Sekolah yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	1500	Orang
62.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	003 Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Seni, Budaya, dan Literasi	5786	Orang
63.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	003 Produk Penerjemahan	2507	Dokumen
64.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	003 Produk pengayaan pendukung literasi	300	Dokumen
65.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	003 Siswa SMA/Paket C Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	1935774	Orang
66.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	003 Standar Nasional Pendidikan yang Dikembangkan	10	Rekomendasi



NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
67.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	004 Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Memperoleh Penghargaan	262	Orang
68.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	004 Kepala Sekolah Non-ASN yang Menerima Tunjangan Profesi	72408	Orang
69.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	004 Kepala sekolah, Pengawas sekolah, dan Tenaga Kependidikan yang Memperoleh Penghargaan	180	Orang
70.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	004 Siswa SMK Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	1928271	Orang
71.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	005 Bantuan Pemerintah Untuk lembaga/Organisasi Penyelenggara Pendidikan	2935	Lembaga
72.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	005 Guru Dikdas yang Memperoleh Penghargaan	296	Orang
73.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	005 Guru TK/TKLB Non ASN yang Menerima Tunjangan Khusus	891	Orang
74.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	005 Layanan Penguatan Karakter Iklim Keamanan Satuan Pendidikan	4	Layanan
75.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	005 Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Vokasi dan Kewirausahaan	1691	Orang
76.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	005 Siswa Penerima Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)	5273	Orang
77.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	005 Tenaga Kependidikan yang mendapatkan bimtek pengembangan kompetensi	20000	Orang
78.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	006 Dokumen Hasil Pelaksanaan Tracer Study Pada Satuan Pendidikan Vokasi	1	Dokumen
79.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	006 Guru Dikdas Non ASN yang Menerima Tunjangan Khusus	23341	Orang
80.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	006 Guru Dikmen dan Diksus yang Memperoleh Penghargaan	376	Orang
81.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	006 Layanan Penguatan Karakter Inklusivitas Satuan Pendidikan	3	Layanan
82.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	006 Penataan kepala sekolah, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan	38	Provinsi
83.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	006 Peserta Didik yang dikembangkan Prestasinya Tahap Lanjut	229	Orang
84.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	007 Guru Dikmen Non ASN yang Menerima Tunjangan Khusus	4269	Orang
85.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	007 Peserta Didik yang mengikuti Pelatihan Ketalentaan	720	Orang
86.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	007 Platform Digital Pendidikan	5	Sistem Informasi
87.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	007 SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan	1178	Lembaga
88.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	008 Kepala Sekolah Non ASN yang menerima Tunjangan Khusus	391	Orang
89.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	008 Pemandu Talenta yang ditingkatkan Kapasitasnya	480	Orang
90.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	009 Guru TK/TKLB/Dikmas Non-ASN yang Menerima Insentif	30951	Orang
91.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	010 Guru Dikdas Non-ASN Yang Menerima Insentif	23344	Orang
92.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	010 Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah	134847	Orang
93.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	011 Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran	74014	Orang
94.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	011 Guru Dikdas yang mendapatkan bimtek pendampingan pembelajaran	4298	Orang
95.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	011 Guru Dikmen dan Diksus yang mendapatkan bimtek pendampingan pembelajaran	900	Orang
96.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	011 Guru Dikmen Non-ASN yang Menerima Insentif	2705	Orang
97.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	011 Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal yang mendapatkan bimtek pendampingan pembelajaran	850	Orang
98.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	011 Guru yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Literasi, Numerasi, dan Sains Teknologi	137144	Orang
99.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	022 SMK yang Melaksanakan Program UKS	72	Lembaga
100.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	040 Siswa SMK yang Tersertifikasi Terhadap Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja	100000	Orang



NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
101.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	041 Siswa SMK yang Mendapatkan Penguatan Persiapan Program Magang Luar Negeri	750	Orang
102.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	042 SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan	250	Lembaga
103.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	049 SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0	62	Lembaga
104.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	050 SMK yang Mendapatkan Pendampingan Peningkatan Mutu	72	Lembaga
105.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	051 SMK yang Mengembangkan Pengajaran Berbasis Pabrik (Teaching Factory)	450	Lembaga
106.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	103 Satuan PAUD yang mendapatkan Dukungan Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun	514	Lembaga
107.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	138 Satuan PAUD yang menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran yang berlaku	514	Lembaga
108.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	143 Satuan PAUD Menyelenggarakan Pendekatan Holistik Integratif	10000	Lembaga
109.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	145 Satuan PAUD yang melaksanakan program UKS	514	Lembaga
110.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	180 Satuan PAUD yang Mendapatkan Pendampingan Peningkatan Mutu	514	Lembaga
111.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	191 Satuan PAUD yang Direvitalisasi	14690	Lembaga
112.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	192 Unit Sekolah Baru Satuan PAUD yang Dibangun	77510	Lembaga
113.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	203 SD yang mendapatkan Dukungan Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun	514	Lembaga
114.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	231 SD yang Mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter	514	Lembaga
115.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	233 SD yang Melaksanakan Program UKS	514	Lembaga
116.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	238 SD Yang Menerapkan Kurikulum Yang Berlaku	514	Lembaga
117.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	280 SD yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu	514	Lembaga
118.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	291 SD yang Direvitalisasi	39920	Lembaga
119.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	292 Unit Sekolah Baru SD yang Dibangun	58640	Lembaga
120.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	313 SMP yang mendapatkan Dukungan Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun	514	Lembaga
121.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	331 SMP yang Mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter	514	Lembaga
122.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	333 SMP yang Melaksanakan Program UKS	514	Lembaga
123.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	338 SMP Yang Menerapkan Kurikulum yang berlaku	514	Lembaga
124.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	380 SMP yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu	514	Lembaga
125.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	391 SMP yang Direvitalisasi	10280	Lembaga
126.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	392 Unit Sekolah Baru SMP yang Dibangun	16040	Lembaga
127.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	405 SMA yang mendapatkan Dukungan Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun	74	Lembaga
128.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	431 SMA yang Mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter	74	Lembaga
129.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	433 SMA yang melaksanakan program UKS	74	Lembaga
130.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	438 SMA yang Menerapkan Kurikulum yang Berlaku	74	Lembaga
131.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	480 SMA yang Mendapatkan Pendampingan Peningkatan Mutu	74	Lembaga
132.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	491 SMA yang Direvitalisasi	3090	Lembaga
133.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	492 Unit Sekolah Baru SMA yang Dibangun	5470	Lembaga
134.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	503 Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Pembinaan Program Afirmasi	682	Lembaga
135.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	508 Satuan Pendidikan yang Mendapat Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	514	Lembaga
136.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	531 Lembaga Pendidikan Masyarakat yang mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter	514	Lembaga



NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
137.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	531 Satuan Pendidikan Khusus yang mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter	38	Lembaga
138.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	533 Satuan Pendidikan Khusus yang Melaksanakan Program UKS	38	Lembaga
139.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	538 Lembaga Pendidikan Masyarakat Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku	514	Lembaga
140.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	538 Satuan Pendidikan Khusus Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku	38	Lembaga
141.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	540 Sekolah Yang Menyelenggarakan Program Pendidikan Inklusif	38	Lembaga
142.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	580 Lembaga Pendidikan Masyarakat yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu	514	Lembaga
143.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	580 Satuan Pendidikan Khusus yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu	38	Lembaga
144.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	750 Satuan PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	417298	Lembaga

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	1
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	16
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	1
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	1
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	4
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	144

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari **Selasa**, Tanggal **15** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	DIAGUS, ST, M.Si	196908021993031012	Sekretaris	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah
2	HERU SETIAWAN, SP	197510162008021001	Perencana Ahli Muda	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah
3	AGUSTINE PETRIASI, SP	198108012010012009	Penelaah Teknis Kebijakan	Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah
4	ANDREY, S.E, M.Si	197702072009031003	Perencana Ahli Muda	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM Kab. Gunung Mas
5	ROSIANA LORENDA, S. IP	199611162022022011	Analisis Perencanaan Anggaran	Bapperida Kabupaten Gunung Mas

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	(%)	34.99	4.16
2.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	15389510	12000
3.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat	Orang	283168	5
4.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	(%)	34.99	4.16



NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
5.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	15389510	12000
6.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat	Orang	283168	5

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Meningkatkan kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.07.03.2.01.00 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	50
Catatan Pembahasan : Agar target dan pagu anggaran akan dihitung kembali					

2. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.07.05.2.01.00 01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	17
Catatan Pembahasan : Sub kegiatan agar dianggarkan, target dihitung kembali					
2.	2.07.05.2.02.00 05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	35709
Catatan Pembahasan : Capaian peserta yang terdaftar tahun 2024 sebesar 27.094 orang (60,70%), dan yang belum terdaftar sebesar 17.543 orang (39,30%) sehingga ditargetkan yang terdaftar tahun 2026 sebesar 80%. Agar pagu anggaran menyesuaikan target 35.709 orang. Indikator target daerah 80%					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
		N I H I L				
Catatan Pembahasan :						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
1.	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	15389510	Orang
2.	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	35	Persentase
3.	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	Pelatihan Vokasi bagi pencari kerja	283168	Orang
4.	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	Pengukuran produktivitas tenaga kerja	38	Dokumen



C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	2
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	3
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	2
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	3
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	0
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	4

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari **Selasa**, Tanggal **15** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	DIAGUS, ST, M.Si	196908021993031012	Sekretaris	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah
2	HERU SETIAWAN, SP	197510162008021001	Perencana Ahli Muda	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah
3	AGUSTINE PETRIASI, SP	198108012010012009	Penelaah Teknis Kebijakan	Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah
4	ANDREY, S.E, M.Si	197702072009031003	Perencana Ahli Muda	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM Kab. Gunung Mas
5	ROSIANA LORENDA, S. IP	196609191987061001	Analisis Perencanaan Anggaran	Bapperida Kabupaten Gunung Mas

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi	Persentase	45	3

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	3.32.03.2.01.0010	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	Orang	0
Catatan Pembahasan : Menyesuaikan kondisi dan kebutuhan daerah					
2.	3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi	1
Catatan Pembahasan : Pagu anggaran dan target dihitung kembali					

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kepala Keluarga	50



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 15 April 2025
Jam : 4:08:06 PM

Catatan Pembahasan : Tidak ada UPT Bina.
Pagu anggaran dan target menyesuaikan kawasan transmigrasi.

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
		NIHIL				
Catatan Pembahasan :						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
1.	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	51	Kegiatan
2.	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	Pengembangan Sumber Daya Manusia Transmigrasi	10	Orang
3.	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	Calon Transmigrasi yang Dilatih	400	Orang
4.	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	Fasilitasi Lembaga di Satuan Permukiman dan Pusat SKP pada Kawasan transmigrasi	50	Lembaga
5.	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	Fasilitasi Layanan Sosial Budaya kepada Masyarakat di Satuan Permukiman/Pusat SKP di Kawasan Transmigrasi	7008	Orang
6.	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	Fasilitasi Layanan Sosial Budaya kepada Masyarakat di Kawasan Transmigrasi	150	Orang
7.	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan	3	Kelompok Masyarakat
8.	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	Fasilitasi Alternatif Pembiayaan dan Manajemen Keuangan mendukung pengembangan produk unggulan kawasan transmigrasi	150	Orang
9.	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	1	Badan Usaha
10.	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	Fasilitasi Pengembangan Ekspor produk unggulan kawasan transmigrasi	1	Kesepakatan

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	1
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	1
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	2
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	3
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	0
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	10

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari **Selasa**, Tanggal **15** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Eri Sriwahyuni, SKM	198201052006042019	Penelaah Teknis Kebijakan	DP3APPKB Prov. Kalteng
2	M. Rachmani, S. Kom	198301012009011006	Penelaah Teknis Kebijakan	Bapperida Prov. Kalteng
3	dr. Rina Sauri, M.M	197709252005012012	Kepala Dinas	DP3AP2KB Kab. Gunung Mas
4	Agusiana	197908242009032006	Perencana Ahli Muda	DP3AP2KB Kab. Gunung Mas

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.421	0.555
2.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	Persentase ARG Daerah	%	7	2,2
3.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Nilai	701	501
4.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	72.33	55,10



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 15 April 2025
Jam : 4:42:27 PM

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
5.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	85	100
6.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	85	100
7.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92.11	92,49
8.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	601	501

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Meningkatkan Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.08.02.2.01.00 11	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	26
Catatan Pembahasan : - Kabupaten Gunung Mas akan menyesuaikan Sub Kegiatan dengan kesepakatan 26 Lembaga/OPD					
2.	2.08.02.2.02.00 09	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Orang	200
Catatan Pembahasan : - Kabupaten Gunung Mas akan menyesuaikan Sub Kegiatan dengan kesepakatan 200 Orang dengan menyesuaikan anggaran					

2. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.08.07.2.01.00 07	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	Kegiatan	1
Catatan Pembahasan : - Kabupaten Gunung Mas akan menyesuaikan Sub Kegiatan dengan kesepakatan 1 Kegiatan dengan menyesuaikan anggaran					
2.	2.08.07.2.02.00 13	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	10
Catatan Pembahasan : - Kabupaten Gunung Mas akan menyesuaikan Sub Kegiatan dengan kesepakatan 10 Orang dengan menyesuaikan anggaran					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)



NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
		NIHIL				
Catatan Pembahasan :						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
1.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Daerah yang diberikan bimtek dan supervisi pelaksanaan kebijakan PUG	38	Daerah
2.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Pelaksanaan Program Kesehatan dan Lingkungan yang Responsif Gender	6	Daerah
3.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	13	Daerah
4.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	6	Daerah
5.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Pengembangan Model DRPPA/RBI	38	Daerah
6.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Bidang Politik dan Hukum	4	Kegiatan
7.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kebijakan PUG bidang Sosial dan Budaya	6	Kegiatan
8.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG bidang Ekonomi	11	Kegiatan
9.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	SDM Pendamping Program Bidang Politik dan Hukum yang dilatih tentang KGPA	100	Orang
10.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	SDM Pendamping Program Bidang Sosial Budaya yang Dilatih tentang KGPA	162	Orang
11.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	SDM Pendamping Program Pemberdayaan Ekonomi yang dilatih tentang KGPPA	600	Orang
12.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rujukan akhir komprehensif	300	Orang
13.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PHA	38	Daerah
14.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan Penguatan Kesehatan Mental	38	Daerah
15.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak	3	Daerah
16.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Daerah yg diberikan bimtek dan Supervisi dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak Kondisi Khusus	10	Daerah
17.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang pelaksanaan kebijakan PKAK	17	Daerah
18.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Standardisasi dan Sertifikasi PUSPAGA yang Ramah Anak	20	Lembaga
19.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Standardisasi dan Sertifikasi Daycare Ramah Anak	15	Lembaga
20.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Standardisasi dan Sertifikasi Ruang Bermain Ramah Anak	15	Lembaga
21.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Anak dalam PHSIPA	18	Lembaga
22.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Standarisasi Lembaga Layanan Peningkatan Kualitas Anak dalam PHAKP	30	Lembaga
23.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Standarisasi Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak	10	Lembaga



NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
24.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Standarisasi Lembaga Pemberi Layanan Perlindungan Khusus Anak (UPTD PPA)	25	Lembaga
25.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	AMPK Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Tingkat Nasional	500	Orang
26.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Layanan KtPA terintegrasi Melalui SAPA 129	1	Layanan

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	1
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	8
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	2
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	4
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	0
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	26

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari **Selasa**, Tanggal **15** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Eri Sriwahyuni, SKM	198201052006042019	Penelaah Teknis Kebijakan	DP3APPKB Prov. Kalteng
2	M. Rachmani, S. Kom	198301012009011006	Penelaah Teknis Kebijakan	BAPPERIDA PROV. KALTENG
3	dr. Rina Sauri, M.M	197709252005012012	Kepala Dinas	DP3AP2KB Kab. Gunung Mas
4	Agusiana	197908242009032006	Perencana Ahli Muda	DP3AP2KB Kab. Gunung Mas

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	65.8	70,01
2.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	19	43
3.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2.11	2.29
4.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	85.3	76.32



NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
5.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	65.0	65,0
6.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persentase	10.9	8

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	3
Catatan Pembahasan : -Sepakat					
2.	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Unit	5
Catatan Pembahasan : - Kabupaten Gunung Mas akan menyesuaikan Sub Kegiatan dengan kesepakatan 5 Unit dengan menyesuaikan anggaran					

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan / Dokumen	1
Catatan Pembahasan : - Kabupaten Gunung Mas akan menyesuaikan Sub Kegiatan dengan kesepakatan 1 Laporan dengan menyesuaikan anggaran					
2.	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Kelompok	3
Catatan Pembahasan : - Kabupaten Gunung Mas akan menyesuaikan Sub Kegiatan dengan kesepakatan 3 Kelompok dengan menyesuaikan anggaran					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
		NIHIL				
Catatan Pembahasan :						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
	NIHIL			



C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1. Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	1
2. Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3. Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	6
4. Jumlah Program yang Mendukung	:	2
5. Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	4
6. Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	0
7. Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari **Selasa**, Tanggal **15** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	MANTIKEI, SE	198403142009031004	Perencana Ahli Muda	Disdikpora Kabupaten Gunung Mas
2	ENDRATOMO PAMBUDI, S.STP., M.AP.	198912182010101002	PERENCANA AHLI MUDA	BAPPERIDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
3	Jubel Kristiono Simanungkalit	198312062007011002	Perencana Ahli Pertama	Dispora Provinsi Kalimantan Tengah

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir	Persentase	77.55	77
2.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir	Persentase	5.91	5.95
3.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	67	51.50
4.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	Persentase Pemuda (16-30 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan	Persentase	23.79	23.79
5.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	Persentase	39.41	39.41



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 15 April 2025
Jam : 11:58:50 AM

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
6.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	Jumlah kampanye olahraga yang terselenggara setahun terakhir	Kegiatan	38	1
7.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/Internasional	Persentase	99	77
8.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang Berprestasi di Tingkat (Nasional)/Internasional	Persentase	79	79

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang	50
Catatan Pembahasan : sepakat					
2.	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Orang	1
Catatan Pembahasan : melalui KNPI Kabupaten					

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Lembaga	1
Catatan Pembahasan : sepakat					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

1. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
1.	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	49	04.09.03 Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga
Catatan Pembahasan : sepakat						



2.	2.19.03.2.03.00 09	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang	36	04.09.03 Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga
Catatan Pembahasan : sepakat						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
1.	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Pemuda yang terfasilitasi sebagai kader kewirausahaan	10000	Orang
2.	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Pemuda Disabilitas yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan	100	Orang
3.	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Sentra Kewirausahaan Pemuda yang Terfasilitasi Pengembangan Kewirausahaan	50	Lembaga
4.	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Organisasi Kepramukaan (Kwarnas/Saka/Sako) yang Terfasilitasi dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan	25	Lembaga
5.	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Organisasi Kepemudaan yang Terfasilitasi dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan	100	Lembaga
6.	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Fasillitasi Penyelenggaraan dan/atau Keikutsertaan pada Kompetisi Olahraga Junior/Pelajar Bertaraf Nasional dan Internasional	5000	Orang
7.	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Provinsi dengan Sentra Khusus Olahraga yang Terstandardisasi	3	Kegiatan
8.	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Kabupaten/Kota dengan PPLP yang terbentuk	10	Kegiatan
9.	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Talenta Sentra Olahragawan Muda Nasional yang Terbina	237	Orang
10.	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Talenta Sentra Keolahragaan yang Memperoleh Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan	1006	Orang
11.	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Talenta Potensial Olahraga yang Difasilitasi dalam Pengembangan Bakat pada Cabang Olahraga Unggulan Olimpiade dan Paralimpiade	99	Orang
12.	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Lembaga yang Terfasilitasi dalam Penyelenggaraan dan/ Keikutsertaan Pada Kompetisi Olahraga Junior/ Pelajar Bertaraf Nasional dan Internasional	57	Lembaga
13.	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Olahragawan Talenta Unggul yang terbina dalam Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional	678	Orang

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	1
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	8
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	2
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	3
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	2
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	13

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari **Selasa**, Tanggal **15** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- 1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
- 2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
- 3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
- 4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Arthur Mukkun, S.E., M.Si.	197008091993101001	Sekretaris	Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah
2	CHANDRA PUJI ASMARA S.T.,M.Eng	197706032003121007	KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	BAPPERIDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
3	Septiani, S.S.	197809282009032005	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas
4	Ikhlas, S.T.	197811282006041004	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Bapperida Kabupaten Gunung Mas

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	73.6	60
2.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	75.4	60
3.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	73.6	60
4.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	75.4	60

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Meningkatkan Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 15 April 2025
Jam : 3:09:16 PM

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.23.02.2.01.00 13	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	17
Catatan Pembahasan : Akan di anggarkan Rp. 75.000.000					
2.	2.23.02.2.01.00 14	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Eksemplar	100
Catatan Pembahasan : Sepakat dengan target dan pagu					

2. PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.23.03.2.01.00 03	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang	40
Catatan Pembahasan : Sepakat dengan target dan pagu					
2.	2.23.03.2.01.00 04	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar	0
Catatan Pembahasan : Belum ada nakah yang di mediakan					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
		NIHIL				
Catatan Pembahasan :						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
	NIHIL			

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	2
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	2
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	2
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	4
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	0
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari **Selasa**, Tanggal **15** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Arthur Mukkun, S.E., M.Si.	197008091993101001	Sekretaris	Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah
2	NUR HASANAH, S.Pd, M. Eng	197905162012122002	PERENCANA AHLI MUDA	BAPPERIDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
3	Septiani, S.S.	197809282009032005	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas
4	Ikhlas, S.T.	197811282006041004	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Bapperida Kabupaten Gunung Mas

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	70	65

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Meningkatkan Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.24.02.2.01.00 03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	27
Catatan Pembahasan : - Indikator Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah diganti menjadi 69 - Target berubah menjadi 27 laporan					
2.	2.24.02.2.03.00 01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	10
Catatan Pembahasan : Akan di anggarkan Rp. 40.000.000					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
		NIHIL				
Catatan Pembahasan :						



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 15 April 2025
Jam : 3:13:27 PM

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
	NIHIL			

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	1
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	1
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	1
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	2
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	0
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari **Selasa**, Tanggal **15** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- 1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- 2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- 3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- 4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Ebta Rianto Tjildon	199405162015031001	Pranata Komputer Mahir	Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah
2	Lisamson, S.Sos	196907272007011024	Perencana Ahli Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalteng
3	Agustini Pandang, S.Sos	197408292006041004	Analisis Keuangan Pusat & Daerah Ahli Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunung Mas

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	Indeks Demokrasi Indonesia	(%)	82.12	-
2.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	Indeks Kinerja Ormas	Nilai	68	-
3.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	Indeks Demokrasi Indonesia	(%)	82.12	-
4.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	Indeks Kinerja Ormas	Nilai	68	-
5.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	Indeks Demokrasi Indonesia	(%)	82.12	-
6.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	Indeks Kinerja Ormas	Nilai	68	-

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

- 1. OUTCOME: Meningkatkan Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 15 April 2025
Jam : 1:14:10 PM

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.		NIHIL			
Catatan Pembahasan :					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

1. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
1.	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	300	08.02.01 Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa

Catatan Pembahasan : Untuk Sub Kegiatan (8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik) dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000 dengan target 300 Orang.

Kegiatan ini meliputi :
1. Sosialisasi Pendidikan Politik kepada Masyarakat
2. Pendidikan Politik bagi Kader Partai Politik

Sedangkan Indikator Outcome Prioritas (Indeks Demokrasi Indonesia) untuk pengukurannya belum ada Petunjuk, Dasar Aturan untuk melakukan pengukuran capaian kinerja ditingkat kabupaten/kota sehingga Kabupaten/Kota masih belum bisa menentukan target daerah pada tahun 2026.

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
1.	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	200	08.02.01 Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa

Catatan Pembahasan : Untuk Sub Kegiatan (8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas,...) dianggarkan sebesar Rp. 314.955.100 dengan target 200 Orang.

Kegiatan ini meliputi,
- Dialog Silaturahmi Pemerintah Kabupaten dengan Ormas.
- Rapat Koordinasi dan Evaluasi Ormas se Kabupaten

Indikator Outcome Prioritas (Indeks Kinerja Ormas) untuk pengukurannya belum ada Petunjuk, Dasar Aturan untuk melakukan pengukuran capaian kinerja ditingkat kabupaten/kota sehingga Kabupaten/Kota masih belum bisa menentukan target daerah pada tahun 2026.

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
	NIHIL			



C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1. Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	3
2. Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3. Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	2
4. Jumlah Program yang Mendukung	:	2
5. Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	0
6. Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	2
7. Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari **Rabu**, Tanggal **16** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Eigh Manto, S.Pi., M.Si	197909102005011009	Kepala Dinas	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Gunung Mas
2	DIMAS SINGGIH	197812252010011003	PERENCANA AHLI MUDA	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng
3	TONIE, SE	198311232010011003	Perencana Ahli Pertama	Bapperida Provinsi Kalteng

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	25.85	37
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Produksi Garam	Ton	2500000	-
3.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	6470000	181
4.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	19380000	1360
5.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	%	83	80
6.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Kawasan konservasi daerah yang operasional	Ha	19100000	-



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 16 April 2025
Jam : 2:55:20 PM

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
7.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi materi teknis perairan pesisir yang disetujui MKP untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi	Dokumen	7	-

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.		NIHIL			
Catatan Pembahasan :					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

1. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
1.	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	30	02.10.09 Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)
Catatan Pembahasan : disetujui menyesuaikan anggaran yang tersedia di kab Gunung Mas						
2.	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	2	02.10.09 Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)
Catatan Pembahasan : menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran kab. Gunung Mas						
3.	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Unit	2	02.10.09 Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)
Catatan Pembahasan : menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran di Kab Gunung Mas						

2. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
1.	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	2	02.10.09 Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)
Catatan Pembahasan : menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang tersedia di kabupaten Gunung Mas						
2.	3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	1	02.10.09 Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)
Catatan Pembahasan : menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang tersedia di kabupaten Gunung Mas						
3.	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	3	02.10.09 Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)



Catatan Pembahasan : menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang tersedia di kabupaten Gunung Mas						
4.	3.25.05.2.01.00 12	Pengawasan Ekstraksi Garam	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	Pelaku Usaha	0	02.10.09 Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)
Catatan Pembahasan : Tidak ada produksi garam di wilayah provinsi kalimantan tengah						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
	NIHIL			

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	1
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	7
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	2
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	0
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	7
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari **Selasa**, Tanggal **15** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROVINSI KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Yudi Darma S.Sn	198106102011011003	Kepala Bidang Pelestarian Cagar Budaya Permuseuman dan Registrasi Data	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Gunung Mas
2	HENDRO, SH., MH.	196910041991031003	Perencana Ahli Muda	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah
3	YUNANAE EKA ASI ILAS	197401142003122002	Perencana Ahli Muda	Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton pertunjukan seni	%	71.67	11
2.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi tempat/peninggalan sejarah/warisan budaya bersifat kebendaan	%	8.74	10
3.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	1.76	1
4.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan atau menghadiri upacara adat dalam setahun terakhir	%	20.17	1.4



NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
5.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	65.50	8
6.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal (bahasa daerah atau budaya lokal) dan/atau ekskul kesenian	%	32.46	8
7.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan (dalam setahun terakhir)	%	0.31	0.00
8.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton pertunjukan seni	%	71.67	11
9.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi tempat/peninggalan sejarah/warisan budaya bersifat kebendaan	%	8.74	10
10.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	1.76	1
11.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan atau menghadiri upacara adat dalam setahun terakhir	%	20.17	1.4
12.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	65.50	8
13.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal (bahasa daerah atau budaya lokal) dan/atau ekskul kesenian	%	32.46	8



NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
14.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan (dalam setahun terakhir)	%	0.31	0.00

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.		NIHIL			
Catatan Pembahasan :					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

1. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
1.	2.22.02.2.01.00 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	15	08.02.03 Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan
Catatan Pembahasan : Akan dilakukan pengembangan kawasan Cagar Budaya dan kegiatan pelestarian Cagar Budaya. Termasuk monitoring dan penunjukan Juru Pelihara.						
2.	2.22.02.2.01.00 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	3	08.02.03 Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan
Catatan Pembahasan : Direncanakan akan pembinaan Lembaga dan/atau SDM kebudayaan						

2. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
1.	2.22.05.2.01.00 02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	4	08.02.03 Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan
Catatan Pembahasan : Akan dilaksanakan Sidang Penetapan Objek Cagar Budaya						
2.	2.22.05.2.02.00 02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	1	08.02.03 Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan
Catatan Pembahasan : Akan dilaksanakan kegiatan Pengembangan kawasan Cagar Budaya						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN



NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
1.	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN	Manajemen Talenta Nasional Bidang Seni Budaya Yang Dikembangkan	5640	Orang
2.	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kebudayaan Bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat	1000	Orang
3.	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN	Warisan Budaya Takbenda yang Diregistrasi Nasional dan Ditetapkan	286	Unit
4.	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN	Event Film, Musik dan Seni	3	Kegiatan
5.	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN	Masyarakat yang Mengapresiasi Museum, Galeri dan Cagar Budaya	302000	Orang
6.	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN	SDM Kebudayaan yang dibina	225	Orang

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	2
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	7
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	2
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	0
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	4
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	6

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang terintegrasi dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya. Integrasi ini bertujuan untuk memastikan sinkronisasi dan keselarasan rencana pembangunan dari tingkat Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Gunung Mas, hingga ke tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

Dalam implementasinya, RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 akan berpedoman dan mengacu pada:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2045
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029
7. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026

Bab ini menyajikan gambaran kondisi perekonomian Kabupaten Gunung Mas tahun 2025 dan proyeksi perekonomian tahun 2026. Informasi ini diperinci melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, yang merupakan hasil analisis statistik perekonomian daerah. Selain itu, bab ini juga akan membahas kinerja perekonomian daerah Kabupaten Gunung Mas, beserta dinamika faktor eksternal dan internal yang memengaruhinya.

Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2026 dapat dicapai sesuai

dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI NASIONAL

Arah kebijakan pembangunan nasional menjadi pedoman utama dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan. Ini juga memandu penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah. Pendekatan yang digunakan dalam proses ini meliputi aspek politik, teknokratik, partisipatif, *bottom-up*, dan *top-down*.

Keberhasilan pembangunan nasional diukur dari pencapaian seluruh sasaran, prioritas, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD. Implementasi nyata dari rencana ini oleh semua pemangku kepentingan menjadi kunci utama keberhasilan tersebut.

Sinkronisasi dan keselarasan rencana pembangunan pada setiap level hierarki menjadi sangat krusial. Salah satu dokumen acuan utama bagi RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 adalah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 di tingkat nasional. Dokumen RKP ini memuat penjabaran arah kebijakan, program, serta arahan dari Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemerintah pusat. Ini berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan prioritas dan sasaran pembangunan. Terwujudnya keselarasan dan sinkronisasi ini merupakan faktor kunci keberhasilan implementasi rencana pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Bagaimanapun juga, pencapaian target nasional sejatinya adalah akumulasi dari keberhasilan pembangunan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Gunung Mas.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2026 : ” **Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**”. Tema RKP 2026 adalah untuk memperkuat ketahanan domestik Indonesia terhadap berbagai tantangan global, sekaligus memastikan bahwa upaya pembangunan menghasilkan dampak nyata, merata, dan luas bagi seluruh rakyat Indonesia. Tema ini bertujuan untuk membangun fondasi yang kuat

bagi kemandirian nasional, khususnya di sektor-sektor kritis seperti pangan dan energi, sehingga mengurangi kerentanan terhadap faktor eksternal. Secara bersamaan, tema ini berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya efisien dan kompetitif, tetapi juga memberikan manfaat yang luas dan inklusif, memastikan tidak ada segmen masyarakat yang tertinggal. Tujuan ganda ini secara eksplisit dirancang untuk mendukung transformasi struktural yang diperlukan untuk mencapai visi "Indonesia Emas 2045".

Sebagai rencana tahunan pertama di bawah RPJMN 2025-2029, yang selaras dengan visi Presiden dan Wakil Presiden, tema dan prioritas RKP 2026 sebagian besar mempertahankan arah strategis luas dari rencana pembangunan nasional sebelumnya. Namun, RKP 2026 juga secara jelas mengintegrasikan program-program dan area penekanan spesifik yang menjadi ciri khas pemerintahan yang baru, seperti program "Makan Bergizi Gratis" (MBG) yang merupakan inisiatif unggulan. Hal ini menunjukkan upaya yang disengaja untuk memastikan kesinambungan dalam lintasan pembangunan nasional jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus menggabungkan dan mengoperasionalkan mandat spesifik, inovasi kebijakan, dan program unggulan dari kepemimpinan baru. Keseimbangan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas tata kelola, memastikan prediktabilitas kebijakan, dan membangun pencapaian masa lalu. Ada pun pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) Prioritas Nasional (PN) yang meliputi:

1. Prioritas Nasional 1
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.
2. Prioritas Nasional 2
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
3. Prioritas Nasional 3
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan

Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.

4. Prioritas Nasional 4
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
5. Prioritas Nasional 5
Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
6. Prioritas Nasional 6
Membangun dari Desa dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
7. Prioritas Nasional 7
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
8. Prioritas Nasional 8
Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Adapun fokus kebijakan makro tahun 2026 adalah:

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Stabilitas Makro
Pemerintah mengarahkan pertumbuhan ekonomi dengan menjaga keseimbangan antara konsumsi domestik, investasi, dan ekspor. Stabilitas inflasi dijaga untuk memastikan daya beli masyarakat tetap kuat. Kebijakan ini bertujuan menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi dunia usaha dan masyarakat, menghindari risiko makroekonomi yang dapat menghambat pertumbuhan.
2. Kebijakan Fiskal dan Optimalisasi Pendapatan Negara
Formulasi kebijakan fiskal dilakukan dengan memperkuat sistem perpajakan, memperluas basis pajak, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penerimaan negara. Pemerintah juga berupaya menekan ketergantungan terhadap utang melalui

optimalisasi belanja negara yang lebih produktif dan tepat sasaran. Selain itu, belanja negara difokuskan untuk mendukung program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Penguatan Investasi dan Sektor Industri

Upaya peningkatan investasi dilakukan dengan menciptakan regulasi yang lebih fleksibel, memberikan insentif bagi investor strategis, serta meningkatkan kemudahan berusaha di berbagai sektor. Hilirisasi industri menjadi prioritas utama guna meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sektor industri berbasis sumber daya alam, seperti energi, pertambangan, dan manufaktur, didorong untuk meningkatkan daya saing global melalui penerapan teknologi dan inovasi.

4. Peningkatan Ekspor dan Stabilitas Eksternal

Diversifikasi ekspor menjadi kunci untuk memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global dengan fokus pada industri manufaktur, produk agroindustri, dan teknologi berbasis inovasi. Selain itu, kebijakan perdagangan internasional yang lebih adaptif diterapkan guna menghadapi ketidakpastian global dan meningkatkan surplus neraca perdagangan yang berkelanjutan.

5. Pembangunan Infrastruktur dan Transformasi Ekonomi Hijau

Pemerintah melanjutkan pembangunan infrastruktur strategis, termasuk transportasi, energi, dan telekomunikasi, untuk meningkatkan konektivitas serta mempercepat distribusi barang dan jasa. Sejalan dengan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, investasi dalam energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidro semakin diprioritaskan guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Program ekonomi rendah karbon juga diperkuat melalui penerapan industri hijau dan insentif bagi perusahaan yang menerapkan praktik bisnis ramah lingkungan.

6. Penguatan SDM dan Perlindungan Sosial

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, serta peningkatan akses pendidikan

tinggi. Pemerintah juga memperluas cakupan jaminan sosial dengan memastikan layanan kesehatan yang lebih merata, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah. Program perlindungan sosial, seperti bantuan sosial dan subsidi yang lebih tepat sasaran, ditingkatkan untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

7. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Efisiensi birokrasi menjadi fokus utama melalui digitalisasi layanan publik, penyederhanaan regulasi, serta penerapan sistem administrasi berbasis teknologi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Pemerintah juga memperkuat pemberantasan korupsi melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta penguatan sistem pengawasan. Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperkuat untuk memastikan kebijakan pembangunan dapat diterapkan secara optimal di seluruh wilayah Indonesia.

3.1.2 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI PROVINSI

Tema RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 adalah **"Mendorong Inovasi Daerah dan Hilirisasi SDA Secara Berkelanjutan Demi Pertumbuhan Ekonomi yang Merata dan Inklusif"**. Arah kebijakan ekonomi daerah akan difokuskan pada upaya transformasi struktural dan peningkatan nilai tambah. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, tangguh, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2026 diarahkan untuk mencapai beberapa sasaran pembangunan krusial. Ini termasuk mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka, menurunkan Rasio Gini dan Tingkat Kemiskinan, serta mengurangi intensitas emisi gas rumah kaca. Seluruh target ini akan dicapai melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Jika target pertumbuhan ini berhasil terealisasi, diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan tingkat ketimpangan, dan pada akhirnya mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan.

3.1.3 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI KABUPATEN

3.1.3.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Tahun 2026

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dianalisis melalui indikator ekonomi makro dan perekonomian lokal. Penting untuk diingat bahwa ekonomi suatu daerah selalu terkait erat dengan perekonomian regional, nasional, dan bahkan global.

Ada beberapa faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah. Ini termasuk kebijakan pemerintah pusat terkait sektor moneter dan sektor riil. Selain itu, dinamika perekonomian global, seperti fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang asing, juga memiliki dampak signifikan. Capaian indikator ekonomi daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024	Target 2026
1.	IPM	Indeks	70.81	71.03	71.40	73.18	73.88	74,00
2.	Tingkat/ Angka kemiskinan	%	4.75	5.35	5.64	5.47	5.68	4.41
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2.49	3.11	2.96	3.24	3.12	3.73
4.	Indeks Gini (Gini Ratio)	-	0.279	0.278	0.262	0.309	0.255	0,274
5.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3.36	5,09 *	6,47**	4.25	4.48	5.2
6.	Pendapatan per Kapita	Ribu /Kapita /Tahun	11,238	10,809	10,990	11,462	11,920	

Sumber: BPS Kabupaten Gunung Mas, 2025

3.1.3.2 Tantangan dan Peluang Ekonomi Daerah Tahun 2026

Memasuki tahun 2026, perekonomian Kabupaten Gunung Mas akan dihadapkan pada dinamika global, nasional, dan regional yang kompleks, menghadirkan baik tantangan maupun peluang signifikan. Pemahaman mendalam terhadap kedua aspek ini krusial untuk perumusan kebijakan pembangunan yang efektif.

- 1. Tantangan Ekonomi
 - a. Salah satu tantangan utama adalah fluktuasi harga komoditas global, terutama sektor pertambangan dan perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonomi Kabupaten Gunung Mas.

Ketergantungan yang tinggi pada komoditas ini membuat daerah rentan terhadap perubahan harga di pasar internasional, yang bisa berdampak langsung pada pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh konflik geopolitik atau gejolak pasar finansial juga berpotensi memengaruhi investasi dan perdagangan.

- b. Keterbatasan infrastruktur dasar di beberapa wilayah masih menjadi hambatan dalam pengembangan sektor-sektor potensial, seperti pariwisata dan industri pengolahan.
 - c. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang belum merata, terutama dalam hal keterampilan teknis dan inovasi, juga menjadi tantangan dalam menciptakan nilai tambah ekonomi dan mendorong diversifikasi usaha.
 - d. Perubahan iklim yang berpotensi memengaruhi sektor pertanian dan perkebunan, memerlukan adaptasi dan mitigasi yang serius.
2. Peluang Ekonomi

- a. Di sisi lain, Kabupaten Gunung Mas memiliki peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sektor pertanian dan perkebunan tetap menjadi lokomotif dengan potensi hilirisasi yang belum tergarap optimal. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan nilai jual produk lokal.
- b. Potensi pariwisata alam dan budaya Kabupaten Gunung Mas juga sangat menjanjikan. Dengan pengelolaan yang tepat dan promosi yang gencar, sektor ini mampu menarik wisatawan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan aksesibilitas dan pengembangan sarana prasarana penunjang pariwisata akan mempercepat realisasi potensi ini.
- c. Selain itu, kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang mendorong pemerataan pembangunan dan investasi di daerah juga menjadi peluang. Pemanfaatan dana transfer dan program strategis nasional, seperti pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berpotensi menciptakan efek limpahan ekonomi, dapat dimaksimalkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur

dan pengembangan sektor-sektor prioritas di Kabupaten Gunung Mas.

- d. Peningkatan digitalisasi dan pemanfaatan teknologi juga membuka peluang bagi pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM.

Dengan menyadari tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, Kabupaten Gunung Mas dapat merumuskan strategi pembangunan yang adaptif dan proaktif guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tahun 2026.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, Dana Bagi Hasil serta Dana Alokasi Khusus.

Kapasitas fiskal daerah pada dasarnya akan tercermin dalam volume Rancangan APBD tahun 2026. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah).

Untuk **Pendapatan Daerah** akan bersumber dari :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-Lain Pendapatan Asli Daerah;
- 2) Pendapatan Transfer terdiri dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer Antar Daerah;

- 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Hibah, Dana Darurat, Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

Untuk **Belanja Daerah** akan diklasifikasikan atas :

- 1) Belanja operasi terinci atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial;
- 2) Belanja modal dirinci atas belanja modal;
- 3) Belanja tidak terduga dirinci atas belanja tidak terduga;
- 4) Belanja transfer dirinci atas belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Selanjutnya untuk **Pembiayaan Daerah** diklasifikasikan atas :

- 1) Penerimaan pembiayaan dirinci atas SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- 2) Pengeluaran pembiayaan dirinci atas pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah :
 - a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;

- b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
- d) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10%, termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- f) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten, sebesar 75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah kabupaten untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
- g) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam Peraturan Daerah.

- i) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
 - j) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
 - k) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
 - l) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan Alat Peralatan Pertahanan/Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia.
 - m) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
- 2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan

penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi :

- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima. Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.

b. Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Transfer Pemerintah Pusat

a) Dana perimbangan

1. Dana Transfer Umum

a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak, dan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

2. Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan :

a. DAK Fisik

b. DAK Non Fisik

b) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

c) Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan

ketentuan peraturan undang-undangan.

d) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Transfer Antar Daerah

a. Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

1) Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana

untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :

- a) Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten pada APBD Tahun Anggaran 2026;
 - b) Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi.
- Upaya optimalisasi peningkatan pendapatan daerah untuk meningkatkan APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan secara keseluruhan meningkatkan APBD Kabupaten Gunung Mas tahun 2025, diperlukan sejumlah strategi yang komprehensif dan terukur. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan :

1) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Pajak dan Retribusi:

- Penguatan sistem administrasi perpajakan:
Melakukan digitalisasi sistem perpajakan, mempermudah pembayaran pajak, dan meningkatkan transparansi.
- Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum:
Melakukan pengawasan secara berkala terhadap wajib pajak, memberikan sanksi tegas bagi penunggak pajak, dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan.
- Ekstensifikasi basis pajak: Menemukan sumber-sumber pendapatan baru yang belum tergarap secara optimal, seperti pajak potensial dari sektor UMKM dan pariwisata.

b) Pengembangan Sektor Unggulan Daerah:

- Pariwisata: Mengembangkan destinasi wisata baru, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mempromosikan potensi wisata daerah melalui berbagai media.

- Pertanian: Meningkatkan produktivitas pertanian, mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian, dan memperkuat pemasaran produk pertanian.
- c) Peningkatan Investasi:
- Penyederhanaan birokrasi perizinan: Mempermudah proses perizinan bagi investor, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
 - Promosi potensi investasi: Mengadakan kegiatan promosi investasi, baik di tingkat lokal maupun nasional.
- d) Pengelolaan Aset Daerah:
- Inventarisasi aset daerah: Melakukan pendataan dan penilaian aset daerah secara komprehensif.
 - Optimalisasi pemanfaatan aset: Memanfaatkan aset daerah secara produktif, misalnya melalui kerjasama dengan pihak ketiga atau pengembangan usaha sendiri.
- 2) Peningkatan Pendapatan Transfer
- a) Meningkatkan kinerja dalam pengelolaan dana transfer: Memastikan penggunaan dana transfer sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana, dan melaporkan penggunaan dana secara transparan.
- b) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran: Menyusun rencana pembangunan daerah yang realistis dan terukur, serta mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran.
- c) Memperkuat kerjasama dengan pemerintah pusat: Membangun hubungan yang baik dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk dana transfer.
- 3) Peningkatan Pendapatan Lain-lain
- a) Optimalisasi pendapatan dari hasil pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD): Meningkatkan kinerja BUMD, melakukan diversifikasi usaha, dan meningkatkan kontribusi BUMD terhadap PAD.
- b) Pengembangan potensi pendapatan dari sektor lain: Misalnya, pendapatan dari hasil pengelolaan hutan, perikanan, dan jasa lingkungan.

- 4) Penguatan Kelembagaan
 - a) Peningkatan kapasitas aparatur: Melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparatur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah.
 - b) Penguatan sistem pengendalian internal: Menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran.
 - c) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas: Melakukan publikasi laporan keuangan secara berkala, melibatkan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah, dan menerapkan prinsip-prinsip good governance.

Dengan menerapkan strategi-strategi di atas secara konsisten dan terukur, diharapkan dapat meningkatkan PAD Kabupaten Gunung Mas dan secara keseluruhan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2026 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Selanjutnya, dalam penggunaan APBD, Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki

manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Standar harga satuan regional tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, Pemerintah Daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut.

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur belanja daerah sebagaimana tercantum pada diuraikan sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi dirinci atas jenis :

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundangundangan, dan honorarium.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi :

- a) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD;
- c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan. Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2026.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan

mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan

penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- h) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

- i) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang

tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam

sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.

- c) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- f) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada :
 - 1. Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- g) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi :
 - 1) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;

- 2) pimpinan dan anggota DPRD; dan
- 3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah kabupaten yang bersangkutan.

- h) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan

dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- l) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut :

- 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.

- 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

- 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

- 4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- m) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan

n) Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka :

- 1) hadiah yang bersifat perlombaan;
- 2) penghargaan atas suatu prestasi;
- 3) beasiswa kepada masyarakat;
- 4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025 pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

4) Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2025 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.

Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025, harus terlebih dahulu dilakukan audit keuangan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Audit keuangan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi.

Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah.

Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2026 pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan

keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit :

- 1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- 2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- 3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :
 - a. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- 5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2026 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2026 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2026 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak

lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria :

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2026 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas :
 - a) belanja modal tanah;
 - b) belanja modal peralatan dan mesin;
 - c) belanja modal bangunan dan gedung;
 - d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e) Belanja modal aset tetap lainnya;
 - f) Belanja modal aset tidak berwujud.
3. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat

atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2026 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi :

- 1) bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi :

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- 3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis :

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari :

a) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten.

Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten sebesar 30%;
2. hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten sebesar 70%;
3. hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten sebesar 70%;
4. hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten sebesar 50%.

Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten yang bersangkutan sebesar 80%.

Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten dianggarkan secara bruto.

b) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada pemerintahan desa.

Pemerintah kabupaten menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten pada Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran alokasi dianggarkan secara bruto.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan

pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas :

- a) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
- b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten;
- c) bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten di luar wilayahnya;
- d) bantuan keuangan daerah kabupaten ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten kepada desa.

Pemerintah kabupaten harus mengalokasikan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten Tahun Anggaran 2026 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah kabupaten harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2026 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.3 Surplus dan Defisit

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD

diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.4 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah tersebut terdiri atas :

a) Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari :

1) SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2026 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari :

- a) pelampauan penerimaan PAD;
- b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e) penghematan belanja;
- f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4) Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk :

- 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- 2) Penyertaan Modal Daerah
- 3) Pembentukan Dana Cadangan
- 4) Pemberian Pinjaman Daerah
- 5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3.2.5 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2025 bersaldo nihil. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

3.3 KERANGKA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah.

Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan.

Kerangka APBD Kabupaten Gunung Mas dapat di rinci sesuai tabel berikut :

Tabel 3.2
Kerangka Pendapatan Daerah

No	Uraian	Realisasi 2023 (Juta Rupiah)	Realisasi 2024 (Juta Rupiah)	Baseline APBD 2025 (Juta Rupiah)	Proyeksi 2026 (Juta Rupiah)
4	Pendapatan Daerah	1.176.119	1.441.538	1.282.689	1.319.113
4.1	Pendapatan Asli Daerah	35.992	58.708	111.700	117.285
4.1.1	Pajak Daerah	11.889	19.378	82.243	86.355
4.1.2	Retribusi Daerah	5.824	3.942	19.165	20.123
4.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	81	3.942	3.137	3.293
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	18.198	30.445	7.155	7.512
4.2	Pendapatan Transfer	1.135.525	1.139.766	1.138.368	1.169.208
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.078.210	1.087.918	1.098.194	1.114.768
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	57.315	51.848	40.175	54.440
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	4.603	243.064	32.620	32.620
4.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan	4.603	243.064	32.620	32.620
6	Pembiayaan Daerah	135.547	135.547	69.103	61.476
6.1	Penerimaan Pembiayaan	135.547	135.547	69.103	61.476
TOTAL PENERIMAAN DAERAH		1.311.753	1.307.753	1.351.792	1.380.598

Tabel 3.3
Kerangka Belanja Daerah

No	Uraian	Realisasi 2023 (Juta Rupiah)	Realisasi 2024 (Juta Rupiah)	Baseline APBD 2025 (Juta Rupiah)	Proyeksi 2026 (Juta Rupiah)
5	Belanja Daerah	1.250.221	1.430.971	1.351.792	1.370.590
5.1	Belanja Operasi	796.281	777.974	907.039	922.689
5.1.1	Belanja Pegawai	412.033	506.018	569.483	575.178
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	335.530	398.461	319.820	300.564
5.1.4	Belanja Subsidi	0	19	36	0
5.1.5	Belanja Hibah	48.514	54.903	17.346	46.668
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	203	279	353	279
5.2	Belanja Modal	276.130	260.127	243.917	245.916
5.2.1	Belanja Tanah	360	359	231	233
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	41.301	61.532	44.810	35.341
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	62.576	49.167	35.538	35.830
5.2.4	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	169.522	143.030	158.467	169.602
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.666	2.161	3.560	3.590
5.2.6	Belanja Aset Lainnya	705	778	1.310	1.321
5.3	Belanja Tidak Terduga	212	212	11.250	11.312
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	212	212	11.250	11.312
5.4	Belanja Transfer	177.598	210.966	189.586	190.672
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	5.392	7.055	8.656	8.553
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	172.206	203.911	180.930	182.119
6	Pembiayaan Daerah	11.968	11.159	0	10.000
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	11.968	11.159	0	10.000
TOTAL PENGELUARAN DAERAH		1.262.189	1.442.130	1.351.792	1.380.590

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) Prioritas Nasional (PN) yang meliputi:

1. Prioritas Nasional 1
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.
2. Prioritas Nasional 2
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
3. Prioritas Nasional 3
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.
4. Prioritas Nasional 4
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
5. Prioritas Nasional 5
Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
6. Prioritas Nasional 6
Membangun dari Desa dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
7. Prioritas Nasional 7
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

8. Prioritas Nasional 8

Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Prioritas 1:

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan stabilitas ekonomi dalam mendukung Pembangunan.

2. Prioritas 2:

Mewujudkan pemanfaatan sumber daya lokal berbasis hilirisasi berlandaskan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru

3. Prioritas 3:

Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat

4. Prioritas 4:

Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing melalui pendidikan berkualitas yang inklusif, berkarakter Belom Bahadat, mudah diakses, dan terjangkau

5. Prioritas 5:

Mewujudkan pemerataan pembangunan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur dasar serta infrastruktur pendukung transformasi ekonomi

6. Prioritas 6:

Meningkatkan ketahanan ekologi untuk meningkatkan kualitas hidup Masyarakat

7. Prioritas 7:

Mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkualitas, inklusif, mudah diakses, dan terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah

8. Prioritas 8:

Meningkatkan kemajuan dan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap kebudayaan lokal pada berbagai aspek kehidupan guna mendukung kesejahteraan social

9. Prioritas 9:

Mewujudkan penguatan kelembagaan dan pelibatan masyarakat lokal dalam kehidupan sosial dan tata kelola pemerintahan

10. Prioritas 10:

Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasis inovasi dan digitalisasi

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Ada pun tema RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 adalah **“PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN”**. Dengan tema ini Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut:

1. Transformasi ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan yang dirasakan oleh masyarakat berbasis komoditas unggulan daerah (sektor Pertanian/Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan dan Pariwisata);
2. Menciptakan lapangan kerja melalui vokasi tenaga kerja, kemudahan berinvestasi/izin usaha, insentif berusaha;
3. BANSOS tepat sasaran dan pemenuhan SPM Sosial (pemanfaatan DTSEN dan sumber dana kolaborasi agar tidak tumpah tindih, Dana Desa);
4. Optimalisasi pertanian yang terintegrasi menuju Swasembada Pangan;
5. Optimalisasi akses Masyarakat terhadap layanan Pendidikan dan Kesehatan dengan memenuhi kebutuhan SPM (standar pelayanan minimal) Pendidikan, Kesehatan;
6. Terpenuhinya SPM air bersih, perumahan, sanitasi;
7. Penanganan stunting dan mendukung penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis;
8. Pengendalian inflasi dan stabilitas harga kebutuhan pokok;
9. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
10. Meningkatkan infrastuktur pelayanan publik;
11. Meningkatkan pelayanan publik dengan meningkatkan digitalisasi, transparan dan akuntabel.

Adapun 11 Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunung Mas tersebut sudah selaras dan berkesinambungan dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu :

- 1) Tanpa Kemiskinan
- 2) Tanpa Kelaparan
- 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- 4) Pendidikan berkualitas
- 5) Kesetaraan Gender
- 6) Air Bersih dan sanitasi layak
- 7) Energi bersih dan terjangkau
- 8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
- 9) Industri, inovasi dan infrastruktur
- 10) Berkurangnya kesenjangan
- 11) Kota dan komunikasi berkelanjutan

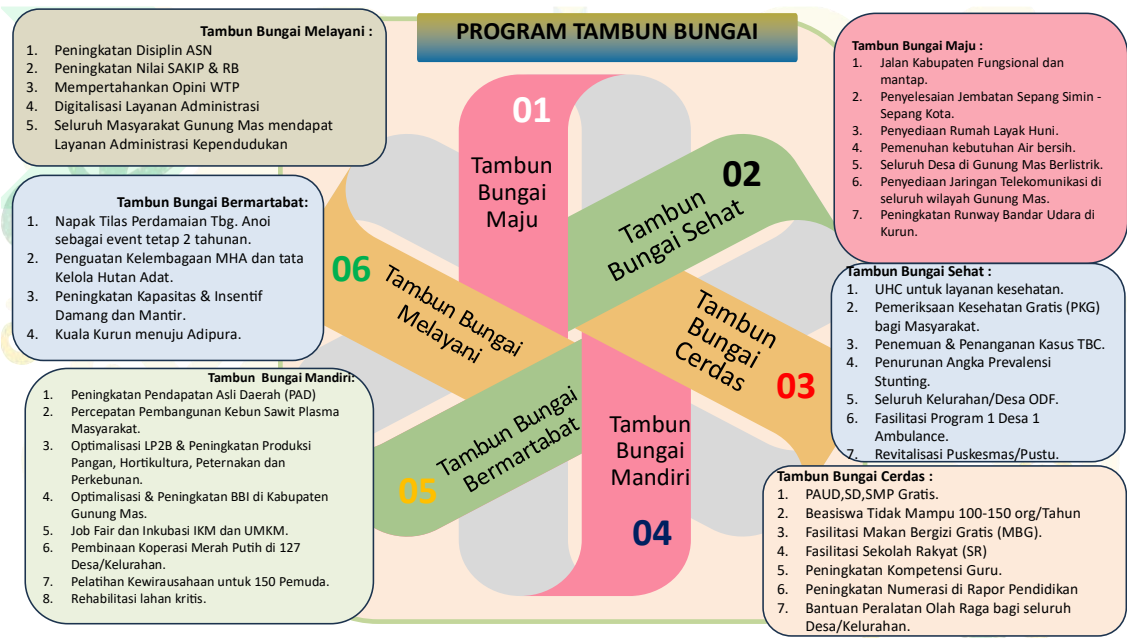
- 12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
- 13) Penanganan perubahan iklim
- 14) Ekosistem laut/air (Wilayah Gunung Mas tidak ada Laut)
- 15) Ekosistem daratan
- 16) Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh
- 17) Kemitraan untuk mencapai tujuan.

4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2026

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, Kepala Daerah terpilih Kabupaten Gunung Mas periode 2025-2029 telah mengusulkan sejumlah **kebijakan, program, dan kegiatan prioritas**. Rencananya, program-program ini akan diimplementasikan secara bertahap selama lima tahun masa jabatannya.

Secara lebih detail, inisiasi program prioritas ini akan dimulai pada tahun pertama periode menjabat, yaitu tahun 2026. Tahun ini merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Program prioritas Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 4.1
Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2025-2029



Kepala Daerah terpilih Kabupaten Gunung Mas periode 2025-2029 hadir dengan visi pembangunan yang kuat dan terukur, diwujudkan melalui serangkaian program prioritas strategis. Program-program ini dirancang berdasarkan analisis mendalam terhadap potensi dan tantangan daerah, serta aspirasi masyarakat. Ini adalah manifestasi nyata dari komitmen untuk membawa Kabupaten Gunung Mas menuju era kemajuan dan kesejahteraan yang lebih merata dan inklusif.

Rincian program prioritas Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 adalah:

1. TAMBUN BUNGA MAJU

1. Jalan Kabupaten Fungsional Dan Mantap
2. Penyelesaian Jembatan Sepang Simin - Sepang Kota
3. Penyediaan Rumah Layak Huni
4. Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih
5. Seluruh Desa Di Gunung Mas Berlistrik
6. Penyediaan Jaringan Telekomunikasi Di Seluruh Wilayah Gunung Mas
7. Peningkatan Runway Bandar Udara Di Kurun

2. TAMBUN BUNGA SEHAT

1. Universal Health Coverage (Uhc) Untuk Layanan Kesehatan
2. Pemeriksaan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat
3. Penemuan Dan Penanganan Kasus Tuberkulosis (Tbc)
4. Penurunan Angka Prevalensi Stunting
5. Seluruh Kelurahan/Desa Open Defecation Free (Odf)
6. Fasilitasi Program 1 Desa 1 Ambulans
7. Revitalisasi Puskesmas/Pustu

3. TAMBUN BUNGA CERDAS

1. Paud, Sd, Smp Gratis
2. Beasiswa Tidak Mampu 100-150 Orang/Tahun
3. Fasilitasi Makan Bergizi Gratis (Mbg)
4. Fasilitasi Sekolah Rakyat (Sr)
5. Peningkatan Kompetensi Guru
6. Peningkatan Numerasi Di Rapor Pendidikan
7. Bantuan Peralatan Olah Raga Bagi Seluruh Desa/Kelurahan

4. TAMBUN BUNGA MANDIRI

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad)
2. Percepatan Pembangunan Kebun Sawit Plasma Masyarakat
3. Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lp2b) Dan Peningkatan Produksi Pangan, Hortikultura, Peternakan Dan Perkebunan
4. Optimalisasi Dan Peningkatan Bbi Di Kabupaten Gunung Mas

5. Job Fair Dan Inkubasi Ikm Dan Umkm
6. Pembinaan Koperasi Merah Putih Di 127 Desa/Kelurahan
7. Pelatihan Kewirausahaan Untuk 150 Pemuda
8. Rehabilitasi Lahan Kritis
5. TAMBUN BUNGA BERMARTABAT
 1. Napak Tilas Perdamaian Tumbang Anoi Sebagai Event Tetap 2 Tahunan
 2. Penguatan Kelembagaan Mha Dan Tata Kelola Hutan Adat
 3. Peningkatan Kapasitas Dan Insentif Damang Dan Mantir
 4. Kuala Kurun Menuju Adipura
6. TAMBUN BUNGA MELAYANI
 1. Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara
 2. Peningkatan Nilai Sakip Dan Rb
 3. Mempertahankan Opini Wtp
 4. Digitalisasi Layanan Administrasi
 5. Seluruh Masyarakat Gunung Mas Mendapat Layanan Administrasi Kependudukan

Selain mengkaji hubungan antara tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan, penting juga untuk memahami kaitan antara prioritas pembangunan nasional tahun 2026, prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas pada tahun yang sama.

Integrasi ini bertujuan untuk menciptakan sinkronisasi dan keselarasan arah pembangunan dari pusat hingga daerah. Prioritas nasional memberikan panduan umum dan kerangka besar, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh provinsi sesuai dengan karakteristik dan potensinya, dan akhirnya diimplementasikan secara spesifik di tingkat kabupaten. Dengan demikian, setiap upaya pembangunan di daerah akan berkontribusi pada pencapaian tujuan nasional, menciptakan orkestrasi pembangunan yang harmonis.

Pencapaian sasaran pembangunan nasional sejatinya adalah akumulasi dari keberhasilan pembangunan di seluruh daerah. Dengan integrasi prioritas, daerah tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek aktif yang berkontribusi langsung pada target-target nasional, seperti penurunan kemiskinan, peningkatan daya saing, atau pemerataan infrastruktur. Ini mempercepat tercapainya agenda pembangunan nasional secara keseluruhan. Integrasi juga memungkinkan optimalisasi potensi dan karakteristik unik setiap daerah. Daerah dapat menerjemahkan prioritas nasional ke dalam

konteks lokal, mengembangkan sektor unggulan yang relevan, dan mengatasi tantangan spesifik.

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah	Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunung Mas	Program Prioritas
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Prioritas 4: Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing melalui pendidikan berkualitas yang inklusif, berkarakter Belom Bahadat, mudah diakses, dan terjangkau Prioritas 8: Meningkatkan kemajuan dan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap kebudayaan lokal pada berbagai aspek kehidupan guna mendukung kesejahteraan sosial	Prioritas 5: Optimalisasi akses Masyarakat terhadap layanan Pendidikan dan Kesehatan dengan memenuhi kebutuhan SPM (standar pelayanan minimal) Pendidikan, Kesehatan;	1 PAUD, SD, SMP GRATIS
			2 BEASISWA TIDAK MAMPU 100-150 ORANG/ TAHUN
			3 FASILITASI MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)
			4 FASILITASI SEKOLAH RAKYAT (SR)
			TAMBUN BUNGA CERDAS 5 PENINGKATAN KOMPETENSI GURU
			6 PENINGKATAN NUMERASI DI RAPOR PENDIDIKAN
			7 BANTUAN PERALATAN OLAH RAGA BAGI SELURUH DESA/ KELURAHAN
Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi	Prioritas 1: Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan stabilitas ekonomi dalam mendukung pembangunan	Prioritas 1: Transformasi ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan yang dirasakan oleh masyarakat berbasis komoditas unggulan daerah (sektor Pertanian/Perk ebanun,	1 PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
			2 PERCEPATAN PEMBANGUNAN KEBUN SAWIT PLASMA MASYARAKAT
			TAMBUN BUNGA MANDIRI 3 OPTIMALISASI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) DAN PENINGKATAN

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah	Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunung Mas	Program Prioritas
	Prioritas 6: Meningkatkan ketahanan ekologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Perhutanan, dan Pertambangan dan Pariwisata);	PRODUKSI PANGAN, HORTIKULTURA, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
		Prioritas 4: Optimalisasi pertanian yang terintegrasi menuju Swasembada Pangan;	4 OPTIMALISASI DAN PENINGKATAN BBI DI KABUPATEN GUNUNG MAS
			5 <i>JOB FAIR</i> DAN INKUBASI IKM DAN UMKM
			6 PEMBINAAN KOPERASI MERAH PUTIH DI 127 DESA/ KELURAHAN
			7 PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN UNTUK 150 PEMUDA
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Prioritas 5: Mewujudkan pemerataan pembangunan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur dasar serta infrastruktur pendukung transformasi ekonomi	Prioritas 6: Terpenuhinya SPM air bersih, perumahan, sanitasi;	1 JALAN KABUPATEN FUNGSIONAL DAN MANTAP
		Prioritas 10: Meningkatkan infrastuktur pelayanan publik;	2 PENYELESAIAN JEMBATAN SEPANG SIMIN - SEPANG KOTA
			3 PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI
			4 PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR BERSIH
			5 SELURUH DESA DI GUNUNG MAS BERLISTRIK
			6 PENYEDIAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI DI SELURUH WILAYAH GUNUNG MAS
			7 PENINGKATAN RUNWAY BANDAR UDARA DI KURUN
Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi	Prioritas 4: Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing melalui pendidikan berkualitas yang inklusif, berkarakter Belom Bahadat,	Prioritas 5: Optimalisasi akses Masyarakat terhadap layanan Pendidikan dan Kesehatan dengan memenuhi kebutuhan	1 <i>UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC)</i> UNTUK LAYANAN KESEHATAN
			2 PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS BAGI MASYARAKAT
			3 PENEMUAN DAN PENANGANAN

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah	Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunung Mas	Program Prioritas
olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	mudah diakses, dan terjangkau	SPM (standar pelayanan minimal) Pendidikan, Kesehatan;	KASUS TUBERKULOSIS (TBC)
	Prioritas 7: Mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkualitas, inklusif, mudah diakses, dan terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah	Prioritas 7: Penanganan stunting dan mendukung penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis;	4 PENURUNAN ANGKA PREVALENSI STUNTING
			5 SELURUH KELURAHAN/DES A OPEN DEFECATION FREE (ODF)
			6 FASILITASI PROGRAM 1 DESA 1 AMBULANS
			7 REVITALISASI PUSKESMAS/ PUSTU
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Prioritas 2: Mewujudkan pemanfaatan sumber daya lokal berbasis hilirisasi berlandaskan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru	Prioritas 1: Transformasi ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan yang dirasakan oleh masyarakat berbasis komoditas unggulan daerah (sektor Pertanian/Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan dan Pariwisata);	1 PERCEPATAN PEMBANGUNAN KEBUN SAWIT PLASMA MASYARAKAT
			2 OPTIMALISASI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) DAN PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN, HORTIKULTURA, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Prioritas 3: Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat	Prioritas 2: Menciptakan lapangan kerja melalui vokasi tenaga kerja, kemudahan berinvestasi/ izin usaha, insentif berusaha;	1 PAUD, SD, SMP GRATIS 2 BEASISWA TIDAK MAMPU 100-150 ORANG/TAHUN
	Prioritas 5: Mewujudkan pemerataan pembangunan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur dasar serta	Prioritas 3: BANSOS tepat sasaran dan pemenuhan SPM Sosial (pemanfaatan DTSEN dan sumber dana kolaborasi agar	1 PEMBINAAN KOPERASI MERAH PUTIH DI 127 DESA/ KELURAHAN

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah	Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunung Mas	Program Prioritas
	infrastruktur pendukung transformasi ekonomi	tidak tumpah tindih, Dana Desa);	2 PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN UNTUK 150 PEMUDA
		Prioritas 9: Pengendalian inflasi dan stabilitas harga kebutuhan pokok;	
Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Prioritas 9: Mewujudkan penguatan kelembagaan dan pelibatan masyarakat lokal dalam kehidupan sosial dan tata kelola pemerintahan	Prioritas 11: Meningkatkan pelayanan publik dengan meningkatkan digitalisasi;	1 PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA
	Prioritas 10: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasis inovasi dan digitalisasi		2 PENINGKATAN NILAI SAKIP DAN RB
			3 MEMPERTAHAN-KAN OPINI WTP
			4 DIGITALISASI LAYANAN ADMINISTRASI
			5 SELURUH MASYARAKAT GUNUNG MAS MENDAPAT LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
			1 NAPAK TILAS PERDAMAIAN TUMBANG ANOI SEBAGAI EVENT TETAP 2 TAHUNAN
			2 PENGUATAN KELEMBAGAAN MHA DAN TATA KELOLA HUTAN ADAT
Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Prioritas 6: Meningkatkan ketahanan ekologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Prioritas 9: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;	3 PENINGKATAN KAPASITAS DAN INSENTIF DAMANG DAN MANTIR
	Prioritas 8: Meningkatkan kemajuan dan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap kebudayaan lokal pada berbagai aspek kehidupan guna mendukung kesejahteraan sosial		4 KUALA KURUN MENUJU ADIPURA
			1 REHABILITASI LAHAN KRITIS

Untuk mencapai prioritas pembangunan tersebut sudah dirumuskan sasaran-sasaran yang perlu dilaksanakan agar capaian prioritas pembangunan dapat tercapai.

Tabel 4.2
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029

VISI:		“MEWUJUDKAN GUNUNG MAS YANG MAJU, BERKELANJUTAN, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN MANDIRI”.				
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN		
				Satuan	Baseline 2024	2026
MISI 1: Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terintegrasi dan Berkelanjutan	Tujuan 1. Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas		Indeks Infrastruktur	Poin	-	62,5
		Sasaran 1.1 Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan pemukiman masyarakat	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%		53,65
		Sasaran 1.2 Meningkatnya kapasitas dan kualitas aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah	Poin	80,12	81,75
		Sasaran 1.3 Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana pembangunan di seluruh wilayah	Persentase Desa Mandiri	%		2,63
	Tujuan 2: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		Penurunan Intensi tas Emisi GRK	%		74,64
		Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69,33	71,55

VISI:		“MEWUJUDKAN GUNUNG MAS YANG MAJU, BERKELANJUTAN, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN MANDIRI”.				
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN		
				Satuan	Baseline 2024	2026
		Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	Poin		121,85
MISI 2: Peningkatan Kualitas Pembangunan SDM yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing	Tujuan 3. Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73,88	74,64
		Sasaran 3.1 Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	64,84	66,72
		Sasaran 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	82,43	82,78
		Sasaran 3.3 Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender	Poin		0,47
		Sasaran 3.4 Meningkatnya pembangunan SDM yang berbudaya dan kehidupan yang berkualitas	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin		58,82
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		Poin		71.24	
MISI 3: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Tujuan 4: Meningkatkan pembangunan ekonomi wilayah yang berkeadilan dalam rangka mendukung transformasi ekonomi		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,48	5,20
			PDRB per kapita	Juta Rp/ Kapita	67,08	71,00
		Sasaran 4.1 Meningkatnya produktivitas	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Poin	69,36	71,24

VISI:		“MEWUJUDKAN GUNUNG MAS YANG MAJU, BERKELANJUTAN, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN MANDIRI”.				
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN		
				Satuan	Baseline 2024	2026
		sektor unggulan daerah				
		Sasaran 4.2 Meningkatnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan berbasis hilirisasi	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	2,18	6,52
		Sasaran 4.3. Meningkatnya daya saing perekonomian daerah	Kontribusi PDRB Kab, Gunung Mas terhadap PDRB Prov, Kalimantan Tengah*	%	1,54	3,03
	Tujuan 5: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat		Tingkat Kemiskinan	%	5,68	4,41
		Sasaran 5.1 Meningkatnya pemerataan ke sejahteraan masyarakat	Gini Rasio	Poin	0,309	0,274
		Sasaran 5.2 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja berkualitas	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,12	3,73
MISI 4: Peningkatan Reformasi Birokrasi	Tujuan 6. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin		62,00
			Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,27	3,43
		Sasaran 6.1 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Poin	61,63	64,42
		Sasaran 6.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Poin		81,70

VISI:		“MEWUJUDKAN GUNUNG MAS YANG MAJU, BERKELANJUTAN, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN MANDIRI”.				
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN		
				Satuan	Baseline 2024	2026
		berbasis teknologi informasi				
		Sasaran 6.3 Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan dan berkualitas	Indeks Integritas Nasional	Poin	73,51	75,67

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2026 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Gambar 4.2
Keselarasan Arah Pembangunan
antara Nasional dengan Kabupaten



Gambar 4.3
Keselarasan Arah Pembangunan
antara Provinsi dengan Kabupaten



Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya sebagai berikut :

1. Standart Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Kepala Daerah menggunakan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan dan outcome program, dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut :

a) Pendidikan

Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- pendidikan anak usia dini;

- pendidikan dasar; dan
- pendidikan kesetaraan

b) Kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- pelayanan kesehatan ibu hamil;
- pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- pelayanan kesehatan balita;
- pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

d) Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

e) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- pelayanan informasi rawan bencana;
- pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban bencana; dan
- pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban kebakaran

f) Bidang Sosial

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

2. Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pejabat sementara/pelaksana tugas kepala daerah bertugas untuk menetapkan Perkada tentang RKPD Tahun 2025.

4.3 KEGIATAN STRATEGIS TAHUN 2026

Kabupaten Gunung Mas, dengan kekayaan alamnya yang melimpah dan potensi sumber daya manusia yang besar, memiliki sejumlah kawasan strategis yang dapat menjadi motor penggerak pembangunan daerah. Kawasan-kawasan ini perlu dikembangkan secara terpadu dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa kawasan strategis di Kabupaten Gunung Mas yang memiliki potensi besar antara lain:

- a) Kawasan Perkotaan Kuala Kurun: Sebagai pusat pemerintahan dan bisnis, Kuala Kurun memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kota yang modern dan berkelanjutan. Dengan infrastruktur yang memadai dan tata ruang yang baik, kota ini dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
- b) Kawasan Pertanian: Kabupaten Gunung Mas memiliki lahan pertanian yang luas dan subur. Dengan pengembangan pertanian modern dan berbasis teknologi, sektor pertanian dapat menjadi sumber pendapatan utama bagi masyarakat.
- c) Kawasan Hutan: Hutan di Kabupaten Gunung Mas memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan ekowisata. Dengan pengelolaan yang baik, hutan dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan.
- d) Kawasan Pertambangan: Adanya potensi sumber daya mineral seperti emas dan timah membuat Kabupaten Gunung Mas memiliki potensi besar di sektor pertambangan. Namun, perlu dilakukan pengelolaan yang bertanggung jawab untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Gunung Mas merupakan kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan perencanaan yang matang, kerjasama yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi yang tepat, potensi Kabupaten Gunung Mas dapat dioptimalkan secara maksimal.

Dalam rangka optimalisasi potensi yang ada Kabupaten Gunung Mas, berikut beberapa kegiatan strategis yang menjadi fokus utama pada tahun 2026:

1. Sektor Pertanian

- Peningkatan Produktivitas: Melalui penerapan teknologi pertanian modern, penyediaan bibit unggul, dan pengembangan sistem irigasi.
- Diversifikasi Produk: Memperluas jenis komoditas pertanian, seperti buah-buahan, sayuran, dan tanaman obat.
- Pengembangan Agroindustri: Membangun pabrik pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk.

2. Sektor Pariwisata

- Pengembangan Destinasi Wisata Baru: Mengeksplorasi potensi wisata alam, budaya, dan sejarah yang unik.
- Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pariwisata: Membangun jalan, penginapan, dan fasilitas umum lainnya yang mendukung pariwisata.
- Promosi Pariwisata: Melakukan promosi secara intensif melalui berbagai media, baik online maupun offline.

3. Sektor Pendidikan

- Peningkatan Mutu Pendidikan: Melalui program pelatihan guru, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, serta pengembangan kurikulum yang relevan.
- Peningkatan Akses Pendidikan: Membangun sekolah-sekolah di daerah terpencil dan memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi.

4. Sektor Kesehatan

- Peningkatan Pelayanan Kesehatan: Melengkapi fasilitas kesehatan dengan peralatan medis yang modern dan meningkatkan jumlah tenaga kesehatan.
- Pencegahan Penyakit: Melakukan program imunisasi, penyuluhan kesehatan, dan pemberantasan penyakit menular.

5. Sektor Infrastruktur

- Peningkatan Kualitas Jalan: Memperbaiki dan membangun jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dan pemukiman.
- Pembangunan Jembatan: Membangun jembatan di daerah-daerah yang sulit dijangkau untuk meningkatkan aksesibilitas.
- Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum: Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih bagi masyarakat.

4.4 INOVASI DAERAH

Kabupaten Gunung Mas memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan maju. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan inovasi-inovasi yang dapat menjawab tantangan zaman dan memanfaatkan potensi daerah secara optimal.

Berikut beberapa ide inovasi tahun 2026:

1. Sektor Pertanian
 - Pertanian Presisi: Penerapan teknologi sensor dan analisis data untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk, air, dan pestisida.
 - Agroindustri: Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian yang bernilai tambah tinggi, seperti produk olahan buah-buahan, kopi, dan rempah-rempah.
 - Sistem Pertanian Berkelanjutan: Penerapan sistem pertanian yang ramah lingkungan, seperti pertanian organik dan agroforestri.
2. Sektor Pariwisata
 - Ecotourism: Pengembangan wisata berbasis alam yang berkelanjutan, seperti wisata alam, wisata budaya, dan wisata petualangan.
 - Homestay: Memanfaatkan potensi masyarakat lokal untuk menyediakan akomodasi bagi wisatawan.
 - Digital Marketing: Penggunaan media sosial dan platform digital lainnya untuk mempromosikan destinasi wisata di Kabupaten Gunung Mas.
3. Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
 - Smart City: Pengembangan infrastruktur TIK untuk mendukung layanan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.
 - E-Government: Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk mempermudah pelayanan publik.
 - Digitalisasi UMKM: Membantu UMKM dalam mengembangkan bisnis secara online.
4. Sektor Pendidikan
 - Pendidikan Vokasi: Pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
 - E-Learning: Penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.
 - Pendidikan Lingkungan: Menanamkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan sejak dini.
5. Sektor Kesehatan
 - Telemedicine: Penggunaan teknologi telekomunikasi untuk memberikan layanan kesehatan jarak jauh.

- Promosi Kesehatan: Melakukan kampanye kesehatan secara masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat.

6. Sektor Tata Ruang

- Rencana Tata Ruang yang Terintegrasi: Penyusunan rencana tata ruang yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.
- Pengembangan Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

7. Sektor Kelembagaan

- Open Government: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan melalui keterbukaan informasi publik.
- E-Budgeting: Penerapan sistem penganggaran berbasis elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran.
- Capacity Building: Peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) melalui pelatihan dan pengembangan.

Implementasi inovasi-inovasi tersebut dapat dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain:

1. Pelibatan Multipihak: Melibatkan seluruh stakeholder, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan inovasi.
2. Fokus pada Masalah Lokal: Mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dan mencari solusi inovatif yang sesuai dengan kondisi lokal.
3. Pemanfaatan Teknologi: Memanfaatkan teknologi yang ada untuk mempercepat proses inovasi dan meningkatkan efisiensi.
4. Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan inovasi untuk mengukur keberhasilan dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

Dengan menerapkan inovasi-inovasi tersebut, diharapkan Kabupaten Gunung Mas dapat menjadi daerah yang lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan.

4.5 USULAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN GUNUNG MAS

Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Gunung Mas merupakan wujud dari peran legislatif dalam perencanaan pembangunan daerah. Secara umum, ini adalah kajian permasalahan pembangunan wilayah yang berhasil dihimpun oleh DPRD melalui penyerapan aspirasi masyarakat. Hasil kajian ini kemudian diusulkan ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam bentuk program atau kegiatan.

Lebih dari sekadar identifikasi masalah, pokok-pokok pikiran DPRD juga mencakup pandangan dan pertimbangan strategis DPRD sebagai representasi rakyat daerah. Ini berkaitan erat dengan arah prioritas pembangunan dan rumusan usulan kebutuhan program atau kegiatan yang didasarkan pada skala prioritas rencana pembangunan. Oleh sebab itu, setiap usulan pokok-pokok pikiran DPRD yang diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah telah melalui penyelarasan linear dengan prioritas rencana pembangunan. Proses ini turut mempertimbangkan substansi dari dokumen perencanaan lain seperti RPJPN, RPJPD, RPJMN, RPJMD, dan RKP, demi memastikan koherensi pembangunan.

Dalam implementasinya, pokok-pokok pikiran DPRD diusulkan melalui SIPD DPRD dan paling lambat disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Gunung Mas seminggu sebelum pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026.

Berikut adalah pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Gunung Mas terkait dengan penyusunan RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026:

VALIDASI POKIR TAHUN 2026 di SIPD

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
1	1049865	22-01-2025	EVANDI	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Peningkatan Jalan Lingkungan Lokasi Kel. Tewah 200 M	Kec. Tewah, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Ditolak	ada duitnya	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	200	M	-	-	-
2	1049900	22-01-2025	EVANDI	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Peningkatan Jalan Lingkungan & Jembatan Kel Tumbang Miri 200 M	Kel. Tumbang Miri, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Ditolak	ada duitnya	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	200	M	-	-	-
3	1049915	22-01-2025	EVANDI	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Peningkatan Jalan Lingkup Kel. Tbg Napoi 150 M	Kel. Tbg Napoi, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Ditolak	ada duitnya	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	150	M	-	-	-
4	1049954	22-01-2025	EVANDI	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH)	Pergusuran Lahan Tempat Pemakaman Umum Kel. Tbg Napoi 10 Ha	Kel. Tbg Napoi , Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	10	Ha	-	-	-
5	1050026	22-01-2025	EVANDI	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN)	Pertunjukan/Promosi Seni Budaya oleh pelaku/peggiat Seni Budaya Kab.Gunung Mas, Ikut tampil di Pekan Kesenian Bali tahun 2026, Lokasi Sanggar Tari Tewah & Tbg. Miri 1 Kegiatan	Sanggar Tari Tewah & Tbg. Miri , Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Kegiatan	-	-	-
6	1050182	22-01-2025	EVANDI	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN)	Pengadaan Bibit ternak Sapi Lokasi Kel. Tewah 30 Ekor Dengan Dana Rp. 510.000.000	Kel. Tewah , Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Ditolak	REVISI POKIR	-	-	-	-	30	Ekor	-	-	-
7	1050198	22-01-2025	EVANDI	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN)	Pengadaan Bibit Ternak Sapi Lokasi Kec. Tbg Miri 15 Ekor Dengan Dana Rp. 205.000.000	Kec. Tbg Miri, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Ditolak	REVISI POKIR	-	-	-	-	15	Ekor	-	-	-
8	1050207	22-01-2025	EVANDI	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN)	Pengadaan Bibit ternak babi Lokasi Kec. Tewah 100 Ekor Dengan Dana Rp. 370.000.000	Kec. Tewah, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Ditolak	REVISI POKIR	-	-	-	-	100	Ekor	-	-	-
9	1050220	22-01-2025	EVANDI	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN)	Pengadaan Bibit ternak babi Lokasi Kec. Kahayan Hulu Utara 100 Ekor Dengan Dana Rp. 370.000.000	Kec. Kahayan Hulu Utara, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Ditolak	REVISI POKIR	-	-	-	-	100	Ekor	-	-	-
10	1050226	22-01-2025	EVANDI	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN)	Pengadaan Ternak babi Lokasi Kec. Miri Manasa 50 Ekor Dengan Dana Rp. 135.000.000	Kec. Miri Manasa, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Ditolak	REVISI POKIR	-	-	-	-	50	Ekor	-	-	-
11	1050244	22-01-2025	EVANDI	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN)	Pengadaan Ternak babi Lokasi Kec. Damang Batu 50 Ekor Dengan Dana Rp. 135.000.000	Kec. Damang Batu , Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Ditolak	REVISI POKIR	-	-	-	-	50	Ekor	-	-	-
12	1050271	22-01-2025	EVANDI	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT)	Pengadaan Motor Dinas Untuk Tenaga Medis Lokasi Kec. Damang Batu 1 Unit	Kec. Damang Batu , Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
13	1050286	22-01-2025	EVANDI	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN)	Pengadaan Motor Dinas Untuk Pengawas Pendidikan di Kecamatan Kahayan Hulu Utara Lokasi Tbg Miri 2 Unit	Tbg Miri , Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	2	Unit	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
14	1059046	24-01-2025	ESPRIADI	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Pembukaan Jalan Baru, Jl. LAIS Desa Takaras - Parempei (± 5 Km)	Desa Takaras - Parempei, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Ditolak	REVISI POKIR	-	-	-	-	5	KM	-	-	-
15	1083320	30-01-2025	RUSMILA	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Pembangunan Pembuatan Pondasi Gereja Kel. Sepang Simin Kec. Sepang Dengan Dana Rp. 500.000.000	Kel. Sepang Simin Kec. Sepang , Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Ditolak	REVISI POKIR	-	-	-	-	500	Juta	-	-	-
16	1083337	30-01-2025	RUSMILA	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN)	Bantuan Peningkatan Pembangunan TK Darma Wanita Desa Sepang Simin Kec. Sepang	Desa Sepang Simin Kec. Sepang, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
17	1083347	30-01-2025	RUSMILA	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN)	Bantuan 100 Ekor Ternak Babi Desa Tewai Baru Dengan Dana Rp. 200.000.000	Desa Tewai Baru, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Ditolak	REVISI POKIR	-	-	-	-	200	Juta	-	-	-
18	1083360	30-01-2025	RUSMILA	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Bantuan 100 Ekor Ternak Babi Desa Sepang Simin	Desa Sepang Simin, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
19	1083377	30-01-2025	RUSMILA	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN)	Bantuan 500 Ekor Ayam Kampung dan Pakan Desa HambawangTanjung Karitak Dengan Dana Rp. 200.000.000	Desa HambawangTanjung Karitak, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Ditolak	REVISI POKIR	-	-	-	-	200	Juta	-	-	-
20	1083395	30-01-2025	RUSMILA	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN)	Bantuan 50 Ekor Ternak Babi Desa Tumbang Miwan Dengan Dana Rp.100.000.000	Desa Tumbang Miwan, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Ditolak	REVISI POKIR	-	-	-	-	100	Juta	-	-	-
21	1083400	30-01-2025	RUSMILA	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN)	Bantuan 50 Ekor Ternak Babi Desa Tumbang Tambirah Dengan Dana Rp.100.000.000	Desa Tumbang Tambirah, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Ditolak	REVISI POKIR	-	-	-	-	100	Juta	-	-	-
22	1083410	30-01-2025	RUSMILA	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN)	Bantuan 50 Ekor Ternak Babi Desa Pematang Limau Dengan Dana Rp.100.000.000	Desa Pematang Limau, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Ditolak	REVISI POKIR	-	-	-	-	100	Juta	-	-	-
23	1083419	30-01-2025	RUSMILA	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN)	Bantuan 100 Ekor Ternak Babi Desa Sepang Kota Dengan Dana Rp.200.000.000	Desa Sepang Kota, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Ditolak	REVISI POKIR	-	-	-	-	200	Juta	-	-	-
24	1083426	30-01-2025	RUSMILA	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN)	Bantuan 100 Ekor Ternak Babi Desa Rabauh Dengan Dana Rp.200.000.000	Desa Rabauh, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Ditolak	REVISI POKIR	-	-	-	-	200	Juta	-	-	-
25	1083512	30-01-2025	RUSMILA	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	Bantuan Pembangunan Gereja Hambawang Desa Tanjung Karitak Kec. Sepang	Desa Tanjung Karitak Kec. Sepang, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
26	1088904	31-01-2025	LELIE	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Peningkatan Jalan Lingkungan RT 5 Kel.Tehang	Kel.Tehang, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	UNIT	-	-	-
27	1088914	31-01-2025	LELIE	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN)	Peningkatan Pembangunan Kantor SMPN-1 Manuhing Raya Kel. Tehang	Manuhing Raya Kel. Tehang, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	UNIT	-	-	-
28	1088921	31-01-2025	LELIE	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN)	Rehap Berat Atap SDN di Putat Durei	Putat Durei, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	UNIT	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
29	1088966	31-01-2025	LELIE	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	Pengadaan Kursi Gereja GKE Pintu Elok Tbg. Samui Dengan Dana Rp. 40.000.000	Tbg. Samui, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	-	Ditolak	REVISI POKIR	-	-	-	-	40	Juta	-	-	-
30	1088971	31-01-2025	LELIE	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	Pengadaan Kursi Gereja GKE Pandohop Tbg. Mantuhe Dengan Dana Rp. 30.000.000	Tbg. Mantuhe, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	-	Ditolak	REVISI POKIR	-	-	-	-	30	Juta	-	-	-
31	1088982	31-01-2025	LELIE	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	Rehap Balai Hindu Kaharingan Jalemu Raya	Jalemu Raya, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	UNIT	-	-	-
32	1088991	31-01-2025	LELIE	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN)	Peningkatan Jalan Usaha Tani Rabambang Kec. Rungan Barat Dengan Dana Rp. 250.000.000	Rabambang Kec. Rungan Barat, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Ditolak	REVISI POKIR	-	-	-	-	250	Juta	-	-	-
33	1088998	31-01-2025	LELIE	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN)	Peningkatan Jalan Usaha Tani Sei Antai Kec. Rungan Hulu Dengan Dana Rp. 250.000.000	Sei Antai Kec. Rungan Hulu, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Ditolak	REVISI POKIR	-	-	-	-	250	Juta	-	-	-
34	1089008	31-01-2025	LELIE	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Pengadaan Ternak Babi Luwang	Luwang, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Dikembalikan	DI PERBAIKI, HAPUS NILAI UANGNYA	-	-	-	-	1	UNIT	-	-	-
35	1089012	31-01-2025	LELIE	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Pengadaan Ternak Sapi Jahemun Kec. Rungan	Jahemun Kec. Rungan, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	UNIT	-	-	-
36	1089016	31-01-2025	LELIE	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Bibit Sawit Tbg. Oroi	Tbg. Oroi, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Dikembalikan	DI PERBAIKI, HAPUS NILAI UANGNYA	-	-	-	-	1	UNIT	-	-	-
37	1089279	31-01-2025	EVANDI	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Pengadaan Bibit ternak Sapi Lokasi Kel. Tewah 30 Ekor	Kel. Tewah , Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	30	Ekor	-	-	-
38	1089300	31-01-2025	EVANDI	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Pengadaan Bibit Ternak Sapi Lokasi Kec. Tbg Miri 15 Ekor	Kec. Tbg Miri , Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	15	Ekor	-	-	-
39	1089314	31-01-2025	EVANDI	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Pengadaan Bibit ternak babi Lokasi Kec. Tewah 100 Ekor	Kec. Tewah, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	100	Ekor	-	-	-
40	1089336	31-01-2025	EVANDI	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Pengadaan Bibit ternak babi Lokasi Kec. Kahayan Hulu Utara 100 Ekor	Kec. Kahayan Hulu Utara, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	100	Ekor	-	-	-
41	1089351	31-01-2025	EVANDI	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Pengadaan Ternak babi Lokasi Kec. Miri Manasa 50 Ekor	Kec. Miri Manasa, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	50	Ekor	-	-	-
42	1089365	31-01-2025	EVANDI	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Pengadaan Ternak babi Lokasi Kec. Damang Batu 50 Ekor	Kec. Damang Batu, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	50	Ekor	-	-	-
43	1089485	31-01-2025	RUSMILA	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Bantuan 100 Ekor Ternak Babi Desa Tewai Baru	Tewai Baru , Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
44	1089498	31-01-2025	RUSMILA	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Bantuan 100 Ekor Ternak Babi Desa Sepang Simin	Sepang Simin, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
45	1089506	31-01-2025	RUSMILA	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Bantuan 500 Ekor Ayam Kampung dan Pakan Desa HambawangTanjung Karitak	HambawangTanjung Karitak , Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
46	1089514	31-01-2025	RUSMILA	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Bantuan 50 Ekor Ternak Babi Desa Tumbang Miwan Dengan Dana Rp.100.000.000	Tumbang Miwan , Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Ditolak	REVISI POKIR	-	-	-	-	50	Ekor	-	-	-
47	1089521	31-01-2025	RUSMILA	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Bantuan 50 Ekor Ternak Babi Desa Tumbang Tambirah	Tumbang Tambirah, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
48	1089526	31-01-2025	RUSMILA	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Bantuan 50 Ekor Ternak Babi Desa Pematang Limau	Pematang Limau, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
49	1089535	31-01-2025	RUSMILA	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Bantuan 100 Ekor Ternak Babi Desa Sepang Kota	Sepang Kota , Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
50	1089546	31-01-2025	RUSMILA	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Bantuan 100 Ekor Ternak Babi Desa Rabauh	Rabauh, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
51	1104112	03-02-2025	ESPRIADI	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Pembukaan Jalan Baru, Jl. LAIS Desa Takaras - Parempel (± 5 Km)	Takaras - Parempel, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	5	KM	-	-	-
52	1104141	03-02-2025	RUSMILA	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	Bantuan Pembangunan Gereja GKE PANDOHOP Tbg Miwan	Tbg Miwan, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
53	1104179	03-02-2025	RAYANIATIE DJANGKAN	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Pembangunan Jembatan / Rehap Jembatan Kayu Di Tbg Hakau Kec. Kurun	Tbg Hakau Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
54	1104186	03-02-2025	RAYANIATIE DJANGKAN	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU))	Pembangunan Tahap I Gereja GKE Di Sepang Kota Kec. Sepang	Sepang Kota, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
55	1104194	03-02-2025	RAYANIATIE DJANGKAN	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Pembukaan Jalan Baru Tempat Pemukiman Kel. Kurun	Kel. Kurun, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
56	1104204	03-02-2025	RAYANIATIE DJANGKAN	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Cor Beton Jalan Lingkungan PIERRE TANDEAN III Kel. Tampang Tumbang Anjir Kec. Kurun	PIERRE TANDEAN III Kel. Tampang Tumbang Anjir Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
57	1104216	03-02-2025	RAYANIATIE DJANGKAN	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	Bantuan Pembangunan Gereja GBI Rock Kel. Tampang Tbg Anjir Kec. Kurun	Kel. Tampang Tbg Anjir Kec. Kurun , Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
58	1104226	03-02-2025	RAYANIATIE DJANGKAN	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	Bantuan Pembangunan Gereja GKE Pandohop Di Tbg Miwan	Tbg Miwan, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
59	1104239	03-02-2025	RAYANIATIE DJANGKAN	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	Bantuan Pembangunan Gereja TABERNAKEL KRISTUS PENOLONG (GTTK) Kel. Tampang Tbg Anjir Kec. Kurun	Kel. Tampang Tbg Anjir Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
60	1104248	03-02-2025	RAYANIATIE DJANGKAN	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN)	Pembangunan Rumah Dinas Guru SD Tbg Hakau Kel. Kurun Kec. Kurun	Tbg Hakau Kel. Kurun Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
61	1104263	03-02-2025	RUSMILA	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU))	Pembangunan Pembuatan Pondasi Gereja Kel. Sepang Simin Kec. Sepang	Kel. Sepang Simin Kec. Sepang, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
62	1106674	04-02-2025	RAYANIATIE DJANGKAN	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA)	Pengadaan Bibit Lele, Patin, Gurame dan Pakan Ikan 2026 Di Kuala Kurun	Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Ekor	-	-	-
63	1115149	05-02-2025	RUSMILA	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU))	Bantuan Pembangunan Aula Desa Atau Kantor Desa Sepang Kota	Sepang Kota, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
64	1115197	05-02-2025	RAYANIATIE DJANGKAN	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU))	Bantuan Pembangunan Aula Desa Atau Kantor Desa Di Sepang Kota	Sepang Kota , Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
65	1137054	10-02-2025	YULIUS AGAU	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Kelompok Ternak Sapi Kelurahan Sepang Simin	Kelurahan Sepang Simin, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	22	Ekor	-	-	-
66	1137070	10-02-2025	YULIUS AGAU	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Kelompok Ternak Babi HAPAKAT MANGKAR Desa Dahuyan Tambuk	Desa Dahuyan Tambuk, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	35	Ekor	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
67	1137110	10-02-2025	YULIUS AGAU	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	Bantuan untuk Gereja BETANIA FRESH ANDITING (BFA) Desa Tbg Empas	Desa Tumbang Empas, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
68	1137131	10-02-2025	YULIUS AGAU	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Cor Beton Jln Desa Hurung Bunut Kec. Kurun	Desa Hurung Bunut Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
69	1137156	10-02-2025	YULIUS AGAU	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Kelompok Ternak Babi Desa Tanjung Riu Kec. Kurun	Desa Tanjung Riu, Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	26	Ekor	-	-	-
70	1137196	10-02-2025	YULIUS AGAU	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Kelompok Ternak Ayam Petelur Kelurahan Kuala Kurun	Kelurahan Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	500	Ekor	-	-	-
71	1137228	10-02-2025	YULIUS AGAU	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN)	Pagar Dan Gapura SDN Tumbang Tariak	Desa Tumbang Tariak, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
72	1179894	15-02-2025	CICI SUSILA WATI	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Pengadaan anak Babi	Desa Bereng Jun Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Dikembalikan		-	-	-	-	100000000	Rupiah	-	-	-
73	1179958	15-02-2025	CICI SUSILA WATI	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Peningkatan Jalan Ujung Pata	Desa Ujung Pata, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	140000000	Rupiah	-	-	-
74	1179986	15-02-2025	CICI SUSILA WATI	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Pengadaan anak Babi	Tumbang Malahoi, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	50000000	Rupiah	-	-	-
75	1180344	15-02-2025	CICI SUSILA WATI	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN)	Pengeluaran Seni Sanggar Taringen Antang Perekasa di Jakarta	Di Desa Taringen, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	Dikembalikan	DI PERBAIKIN	-	-	-	-	110000000	Juta	-	-	-
76	1180371	15-02-2025	CICI SUSILA WATI	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN)	Pengadaan Anak Babi di Desa Tumbang Malahoi Kec. Rungan	Desa Tumbang Malahoi Kec. Rungan, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Dikembalikan		-	-	-	-	50000000	Juta	-	-	-
77	1184771	16-02-2025	CICI SUSILA WATI	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Pengecoran Jalan Saginting L=5 Meter, Panjang 200 Meter. di Desa Taringen Kec. Manuhing	Desa Taringen Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Dikembalikan		-	-	-	-	50000000	Juta	-	-	-
78	1184777	16-02-2025	CICI SUSILA WATI	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Pengecoran Jalan Sulain Sanen, Desa Taringen	Desa Taringen, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Dikembalikan		-	-	-	-	200000000	Juta	-	-	-
79	1184783	16-02-2025	CICI SUSILA WATI	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN)	Pagar Sekolah di SDN 1 Seantai, Kec. Rungan Hulu	Seantai, Kec. Rungan Hulu, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	Dikembalikan		-	-	-	-	200000000	Juta	-	-	-
80	1184791	16-02-2025	CICI SUSILA WATI	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN)	Rehap Kelas SD Negeri 1 Tumbang Mantuhe, Kec Manuhing Raya	Tumbang Mantuhe, Kec Manuhing Raya, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	Dikembalikan	DI PERBAIKIN	-	-	-	-	300000000	Juta	-	-	-
81	1187043	17-02-2025	CICI SUSILA WATI	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN)	Penggelaran Seni Sanggar Taringen Antang Perekasa, di Jakarta	Jakarta, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	Dikembalikan	DI PERBAIKIN	-	-	-	-	110000000	Juta	-	-	-
82	1187246	17-02-2025	TUAH	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU))	Pembangunan Aula Kec. Damang Batu Tahap II	Desa Tumbang Marikoi, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Dikembalikan		-	-	-	-	1	Unit	-	-	-
83	1187542	17-02-2025	TUAH	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Pembukaan Jalan baru +- 3 Km	Desa Tumbang Habaon Kecamatan Tewah, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Dikembalikan		-	-	-	-	1	Unit	-	-	-
84	1187572	17-02-2025	TUAH	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Pembukaan Jalan Baru +- 3 Km	Desa Tumbang Posu Kecamatan Damang Batu, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
85	1187594	17-02-2025	TUAH	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Pembukaan Jalan Baru +- 3 Km	Desa Dandang Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
86	1192706	17-02-2025	CICI SUSILA WATI	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	Bantuan Gereja GKE Desa Taringen	Desa Taringen, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	-	Dikembalikan	DI PERBAIKIN	-	-	-	-	100	Juta	-	-	-
87	1202003	18-02-2025	LELIE	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN)	Jalan Usaha Tani Kelurahan Rabambang	Kelurahan Rabambang, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	UNIT	-	-	-
88	1202038	18-02-2025	LELIE	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN)	Jalan Usaha Tani Tbg. Samui	Tbg. Samui, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	UNIT	-	-	-
89	1202072	18-02-2025	LELIE	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	Pengadaan Kursi Gereja GKE Pintu Elok Tbg. Samui	Tbg. Samui, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	UNIT	-	-	-
90	1202087	18-02-2025	LELIE	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN)	Kantor SDN Putat Durei	Putat Durei, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
91	1202116	18-02-2025	LELIE	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	Pengadaan Kursi Gereja GKE Pandohop Tbg. Mantuhe	Tbg. Mantuhe, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	UNIT	-	-	-
92	1202133	18-02-2025	LELIE	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN)	Jalan Usaha TANI Desa Sei Antai	Desa Sei Antai, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	UNIT	-	-	-
93	1202208	18-02-2025	LELIE	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	1 Unit Starlink untuk SMPN-1 RUNGAN HULU	RUNGAN HULU, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	UNIT	-	-	-
94	1202268	18-02-2025	LELIE	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	1 Unit Starlink untuk SMPN-2 RUNGAN HULU	RUNGAN HULU , Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	UNIT	-	-	-
95	1207615	19-02-2025	CARLES FRENKI	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN)	Pembangunan Pagar SDN Tewah 8	Tewah, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
96	1208635	19-02-2025	ELVI ESIE	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Kenari Kelurahan Tewah	Kelurahan Tewah, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	1	Unit	-	-	-
97	1212428	19-02-2025	CARLES FRENKI	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR)	DRAINASE TUGU SDN TEWAH SDN TEWAH 1	TEWAH, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	UNIT	-	-	-
98	1212724	19-02-2025	CARLES FRENKI	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU))	PENINGKATAN JALAN COR BETON JL. KENARI 1	JALAN KENARI 1, KEC. TEWAH, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	UNIT	-	-	-
99	1212819	19-02-2025	CARLES FRENKI	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU))	PENINGKATAN COR BETON JALAN GANG. MULIA KEC. TEWAH	JLN. GANG MULIA, KEC. TEWAH, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	UNIT	-	-	-
100	1213058	19-02-2025	CARLES FRENKI	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	BIBIT SAPI 10 EKOR DI DESA UPON BATU KEC. TEWAH	DESA UPON BATU, KEC. TEWAH, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	10	EKOR	-	-	-
101	1213122	19-02-2025	HERMANTO	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Jalan Lingkungan di Kelurahan Kurun 200 m	Kelurahan Kurun, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	200	m	-	-	-
102	1213180	19-02-2025	HERMANTO	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Jalan Lingkungan di Kelurahan Tampang Tumbang Anjir 200 m	Keluurahan Tampang Tumbang Anjir, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	200	m	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
103	1213335	19-02-2025	CARLES FRENKI	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Bibit Sapi 35 Ekor di desa Dandang Kec. Kahayan hulu utara	Desa Dandang, Kec. Kahayan Hulu Utara, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	35	ekor	-	-	-
104	1213430	19-02-2025	CARLES FRENKI	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Bibit Babi 30 Ekor di desa Sei Riang, Kec. Tewah	Desa Sei Riang, Kec. Tewah, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	30	ekor	-	-	-
105	1213492	19-02-2025	HERMANTO	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	Bantuan Rumah Ibadah (Gereja) di Kecamatan Kurun 2 Kegiatan	Kecamatan Kurun, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	2	Kegiatan	-	-	-
106	1213509	19-02-2025	CARLES FRENKI	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Bibit Babi 16 Ekor di desa Koro, Kec. Miri Manasa	Desa Koro, Kec. Miri Manasa , Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	16	Ekor	-	-	-
107	1213577	19-02-2025	CARLES FRENKI	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Bibit Babi 100 Ekor di Keluran Tewah	Kelurahan Tewah , Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	100	Ekor	-	-	-
108	1213644	19-02-2025	HERMANTO	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	Bantuan Rumah Ibadah (Gereja) di Kecamatan Mihing Raya 2 Kegiatan	Kecamatan Mihing Raya, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	2	Kegiatan	-	-	-
109	1213696	19-02-2025	HERMANTO	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	Bantuan Rumah Ibadah (Gereja) di Kecamatan Sepang 2 Kegiatan	Kecamatan Sepang, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	2	Kegiatan	-	-	-
110	1213772	19-02-2025	CARLES FRENKI	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	Bantuan Pastori desa Masukih, Kec. Miri Manasa	desa Masukih, Kec. Miri Manasa, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
111	1213808	19-02-2025	HERMANTO	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Bantuan Pengadaan Bibit Ternak di Kecamatan Kurun 100 Ekor	Kecamatan Kurun, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	100	Ekor	-	-	-
112	1213856	19-02-2025	HERMANTO	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Bantuan Pengadaan Bibit Ternak di Kecamatan Sepang 50 Ekor	Kecamatan Sepang, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	50	Ekor	-	-	-
113	1213861	19-02-2025	CARLES FRENKI	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	Bantuan Pastori di Desa Siruk, Kec. Miri Manasa	Desa Siruk, Kec. Miri Manasa, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
114	1213885	19-02-2025	HERMANTO	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Bantuan Pengadaan Bibit Ternak di Kecamatan Mihing Raya 50 Ekor	Kecamatan Mihing Raya, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	50	Ekor	-	-	-
115	1213923	19-02-2025	CARLES FRENKI	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	Bantuan Pembangunan Gereja GKE, Desa Tumbang Habaon, Kec.Tewah, Kab. Gunung Mas	Desa Tumbang Habaon, Kec.Tewah, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
116	1213956	19-02-2025	HERMANTO	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU))	Bantuan Peningkatan Bangunan Gereja di Kecamatan Kurun 1 Kegiatan	Kecamatan Kurun, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Kegiatan	-	-	-
117	1213961	19-02-2025	CARLES FRENKI	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	Pengadaan Meubeler SDN, Di desa Dandang, Kec. Kahayan Hulu Utara	Desa Dandang, Kec. Kahayan Hulu Utara, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
118	1213993	19-02-2025	HERMANTO	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU))	Bantuan Peningkatan Bangunan Gereja di Kecamatan Mihing Raya 1 Kegiatan	Kecamatan Mihing Raya, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Kegiatan	-	-	-
119	1220342	20-02-2025	ELVI ESIE	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Peningkatan Jalan Lingkungan Pasir Putih	Kelurahan Tewah, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
120	1220377	20-02-2025	ELVI ESIE	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Pasir Putih Kelurahan Tewah	Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
121	1220423	20-02-2025	ELVI ESIE	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN)	Pembuatan Pagar SMP 3 Tewah	Tumbang Lambaing Kelurahan Tewah, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
122	1220446	20-02-2025	ELVI ESIE	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN)	Pembangunan WC SDN 1 Tumbang Habaon	Desa Tumbang Habaon Kecamatan Tewah, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
123	1220455	20-02-2025	ELVI ESIE	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN)	Pembangunan WC SDN 1 Rangan Mihing	Desa Rangan Mihing Kecamatan Tewah, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
124	1220508	20-02-2025	ELVI ESIE	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN)	Pengadaan Bibit Babi Desa Dandang Sebanyak 50 Ekor	Desa Dandang Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	50	ekor	-	-	-
125	1220542	20-02-2025	ELVI ESIE	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN)	Pengadaan Bibit Babi Desa Pajangei	Desa Pajangei Kecamatan Tewah, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	30	ekor	-	-	-
126	1220568	20-02-2025	ELVI ESIE	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN)	Pengadaan Bibit Babi di Desa Teluk Lawah	Desa Teluk Lawah Kecamatan Tewah, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	30	ekor	-	-	-
127	1220589	20-02-2025	ELVI ESIE	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN)	Pembangunan Pagar TK Hentak Tewah	Kelurahan Tewah, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
128	1220615	20-02-2025	ELVI ESIE	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN)	Pembukaan Jalan Produksi Tani Kelurahan Tewah	Kelurahan Tewah, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
129	1220646	20-02-2025	ELVI ESIE	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN)	Pengadaan Bibit Babi di Kelurahan Tewah	Kelurahan Tewah, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	75	ekor	-	-	-
130	1329473	04-03-2025	DARWINSON CONCON	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	PENINGKATAN JALAN TEMANGGUNG JAYAKARTI	JALAN TEMANGGUNG JAYAKARTI, KUALA KURUN, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	JALUR	-	-	-
131	1329489	04-03-2025	DARWINSON CONCON	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	PENINGKATAN JALAN BELAKANG DINAS KESEHATAN	JALAN BELAKANG DINAS KESEHATAN, TAMPANG TUMBANG ANJIR, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	JALUR	-	-	-
132	1329511	04-03-2025	DARWINSON CONCON	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	PENINGKATAN JALAN EFRIDEL G. AKAR	JALAN EFRIDEL G. AKAR, KUALA KURUN SEBERANG, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	JALUR	-	-	-
133	1329529	04-03-2025	DARWINSON CONCON	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	PENINGKATAN JALAN Pdt.Ideng R. Nyaring	JALAN Pdt.Ideng R. Nyaring, Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	jalur	-	-	-
134	1329604	04-03-2025	DARWINSON CONCON	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN)	REHABILITASI KANTOR KORWIL PENGAWAS TK/SD	KUALA KURUN, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	UNIT	-	-	-
135	1329633	04-03-2025	DARWINSON CONCON	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU))	PEMABANGUNAN MASJID DESA TUMBANG MIWAN	TUMBANG MIWAN, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	UNIT	-	-	-
136	1329649	04-03-2025	DARWINSON CONCON	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU))	PEMBANGUNAN GKE TUMBANG LAMPAHUNG	TUMBANG LAMPAHUNG, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	UNIT	-	-	-
137	1329663	04-03-2025	DARWINSON CONCON	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU))	PEMBANGUNAN GKE KAMPURI(GKE MARAWEI)	KAMPURI, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	UNIT	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
138	1329683	04-03-2025	DARWINSON CONCON	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU))	PEMBANGUNAN GEREJA ROGATE DESA RANGAN TATE	RANGAN TATE, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	UNIT	-	-	-
139	1329703	04-03-2025	DARWINSON CONCON	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU))	PENATAAN HALAMAN PASTORI GKE SION KUALA KURUN	KUALA KURUN, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	UNIT	-	-	-
140	1329711	04-03-2025	DARWINSON CONCON	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU))	PEMBANGUNAN GEREJA GBI DESA TELUK NYATU	DESA TELUK NYATU, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	UNIT	-	-	-
141	1329724	04-03-2025	DARWINSON CONCON	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU))	PEMBANGUNAN GEREJA GBI KURUN HULU	KURUN HULU, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	UNIT	-	-	-
142	1330541	04-03-2025	SINGONG	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT)	Pengadaan Mobil Jenazah Untuk Gereja GKE di Tbg. Marikoi Kecamatan Damang Batu 1 Unit	Tbg. Marikoi Kecamatan Damang Batu, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
143	1330720	04-03-2025	SINGONG	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN)	Pembangunan Pagar dan Pintu Gerbang SMPN 1 Damang Batu di Tbg. Marikoi Kecamatan Damang Batu 1 Unit	Tbg. Marikoi Kecamatan Damang Batu, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	unit	-	-	-
144	1331103	04-03-2025	SINGONG	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN)	Pembangunan Pagar SMP Negeri 3 Tewah di Kecamatan Tewah 1 Unit	Kecamatan Tewah, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
145	1331483	04-03-2025	SINGONG	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	Pembangunan Pastori Gereja GKE Hatung di Tbg. Hatung Kecamatan Miri Manasa 1 Unit	Tbg. Hatung Kecamatan Miri Manasa, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
146	1331628	04-03-2025	SINGONG	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	Pembangunan Lanjutan Gereja GBI Tbg. Masukih di Kecamatan Miri Manasa 1 Unit	Tbg. Masukih Kecamatan Miri Manasa, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
147	1331717	04-03-2025	SINGONG	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Pengadaan Ternak Babi di Kecamatan Damang Batu 1 Jenis	Kecamatan Damang Batu, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Jenis	-	-	-
148	1331798	04-03-2025	SINGONG	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Pengadaan Ternak Ayam Bangkok di Kecamatan Miri Manasa 1 Jenis	Kecamatan Miri Manasa, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Jenis	-	-	-
149	1332762	04-03-2025	CICI SUSILA WATI	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN)	Pengadaan Anak Babi, Desa Bereng Jun, Kec. Manuhing	Desa Bereng Jun, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	100000000	Ekor	-	-	-
150	1332938	04-03-2025	CICI SUSILA WATI	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT)	Bantuan Gereja GKE, Desa Taringen	Desa Taringen, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	100	UNIT	-	-	-
151	1333016	04-03-2025	CICI SUSILA WATI	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Penyelenggaraan Seni Sanggar Taringen Antang Perekasa di Jakarta	Desa Taringen , Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	110000000	UNIT	-	-	-
152	1333108	04-03-2025	CICI SUSILA WATI	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA)	Usulan Bantuan Gereja Kaharap Jemaat GKE Tumbang Jalemu Kec. Manuhing	Tumbang Jalemu, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	140000000	UNIT	-	-	-
153	1333156	04-03-2025	CICI SUSILA WATI	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN)	Pengadaan Anak Babi	Tumbang Malahoi, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	50000000	UNIT	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
154	1333209	04-03-2025	CICI SUSILA WATI	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	Bantuan Gereja GPT Kristus Raja Damai, Tumbang Jutuh Kec.Rungan	Tumbang Jutuh , Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	200000000	UNIT	-	-	-
155	1333246	04-03-2025	CICI SUSILA WATI	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT)	Bantuan Gereja Pantekosta STA di Indonesia (GPDI), Tumbang Talaken	Tumbang Talaken, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	100000000	UNIT	-	-	-
156	1333297	04-03-2025	CICI SUSILA WATI	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	GPT Kristus Pengharapan, Tumbang Samui Kec.Manuhing Raya	Tumbang Samui Kec.Manuhing Raya, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	100000000	UNIT	-	-	-
157	1333390	04-03-2025	CICI SUSILA WATI	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Pengecoran Jalan Saginting L=5M, P=200M. Jalan Saginting Desa Taringen Kec. Manuhing	Desa Taringen, Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	500000000	UNIT	-	-	-
158	1333519	04-03-2025	CICI SUSILA WATI	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Pengecoran Jalan Sulain Sanen Desa Taringen	Desa Taringen, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	200000000	UNIT	-	-	-
159	1334043	04-03-2025	CICI SUSILA WATI	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN)	Pagar Sekolah di SDN 1 Seantai, Kec. Rungan Hulu	Seantai, Kec. Rungan Hulu, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	200000000	UNIT	-	-	-
160	1334102	04-03-2025	CICI SUSILA WATI	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN)	Rehap Kelas SDN 1, Tumbang Mantuhe.Kec, Manuhing Raya	Tumbang Mantuhe.Kec, Manuhing Raya, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	300000000	UNIT	-	-	-
161	1337400	04-03-2025	SINGONG	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT)	Pengadaan Mobil Ambulan di Desa Tanjung Karitak Kecamatan Sepang 1 Unit	Desa Tanjung Karitak Kecamatan Sepang , Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	1	Unit	-	-	-
162	1337519	04-03-2025	SINGONG	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT)	Pengadaan Laptop dan Komputer di Puskesmas Kurun Kecamatan Kurun 1 Paket	Kecamatan Kurun, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	1	Paket	-	-	-
163	1337933	04-03-2025	NOMI APRILIA	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Bantuan Ternak Kelurahan Kampuri Kec. Mihing Raya (Rp. 500.000.000)	Kelurahan Kampuri Kecamatan Mihing Raya, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Ditolak	ada duitnya	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Paket	-	-	-
164	1337985	04-03-2025	NOMI APRILIA	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU))	Penataan Halaman Kantor Kecamatan Kurun (Rp. 1.000.000.000)	Kecamatan Kurun, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Ditolak	ada duitnya	-	-	-	-	1	Kegiatan	-	-	-
165	1338000	04-03-2025	NOMI APRILIA	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU))	Pembuatan Aula Kelurahan, Kelurahan Kampuri Kec. Mihing Raya 8*10 m (Rp. 300.000.000)	Kelurahan Kampuri Kecamatan Mihing Raya, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Ditolak	ada duitnya	-	-	-	-	1	Kegiatan	-	-	-
166	1338013	04-03-2025	NOMI APRILIA	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU))	Rehab atap kantor Kelurahan, Kelurahan Kampuri Kecamatan Mihing Raya, Kab. Gunung Mas (Rp. 200.000.000)	Kelurahan Kampuri Kecamatan Mihing Raya, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Ditolak	ada duitnya	-	-	-	-	1	Kegiatan	-	-	-
167	1338367	04-03-2025	INDRA H. KIAJI	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Pembukaan Jalan Baru Gudang Setengah tembus Pasir Putih (Rp. 500.000.000)	Kecamatan Tewah, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Ditolak	ada duitnya	-	-	-	-	1	Jalur	-	-	-
168	1338406	04-03-2025	INDRA H. KIAJI	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Pembukaan Jalan Samping Masjid Teluk Lawah Kecamatan Tewah (Rp. 200.000.000)	Kecamatan Tewah, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Ditolak	ada duitnya	-	-	-	-	1	Jalur	-	-	-
169	1338455	04-03-2025	INDRA H. KIAJI	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Peningkatan Jalan Petran, Kecamatan Tewah Dapil III (Rp. 100.000.000)	Jalan Petran, Kecamatan Tewah, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Ditolak	ada duitnya	-	-	-	-	1	Jalur	-	-	-
170	1338468	04-03-2025	INDRA H. KIAJI	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Peningkatan Jalan Plat Murai Kecamatan Tewah Dapil III (Rp. 100.000.000)	Jalan Plat Murai, Kecamatan Tewah, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Ditolak	ada duitnya	-	-	-	-	1	Jalur	-	-	-
171	1338482	04-03-2025	INDRA H. KIAJI	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Pembukaan Jalan Saranoi dan Kapitin Raya Kecamatan Tewah Dapil III (Rp. 200.000.000)	Jalan Saranoi dan Jalan Kapitin Raya Kecamatan Tewah, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Ditolak	ada duitnya	-	-	-	-	1	Jalur	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
172	1338524	04-03-2025	INDRA H. KIAJI	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM)	Pembangunan DAM Air Bersih Desa Tbg. Masukih Kecamatan Miri Manasa (Rp. 200.000.000)	Tumbang Masukih Kecamatan Miri Manasa, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Ditolak	ada duitnya	-	-	-	-	1	Unit	-	-	-
173	1338539	04-03-2025	INDRA H. KIAJI	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	Pembangunan Gereja GBI Tumbang Masukih Kecamatan Miri Manasa (Rp. 150.000.000)	Tumbang Masukih Kecamatan Miri Manasa, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	-	Ditolak	ada duitnya	-	-	-	-	1	Unit	-	-	-
174	1342393	05-03-2025	ICEU PURNAMASARI	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT)	Pengadaan Mobil Ambulance Untuk Desa Tanjung Karitak di Kecamatan Sepang 1 Unit	Desa Tanjung Karitak Kecamatan Sepang, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
175	1342467	05-03-2025	ICEU PURNAMASARI	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT)	Pengadaan Laptop dan Komputer di Puskesmas Kurun Kecamatan Kurun 1 Jenis	Kecamatan Kurun, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Jenis	-	-	-
176	1342556	05-03-2025	ICEU PURNAMASARI	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	Lanjutan Pembangunan Pastori Parawel Kampuri di Kelurahan Kampuri Kecamatan Mihing Raya 1 Unit	Kelurahan Kampuri di Kecamatan Mihing Raya , Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
177	1342676	05-03-2025	ICEU PURNAMASARI	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU))	Pembangunan Pagar Kantor Camat Kurun di Kecamatan Kurun 1 Unit	Kecamatan Kurun, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
178	1342738	05-03-2025	ICEU PURNAMASARI	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN)	Pembangunan Ruang Kelas SD Negeri Tumbang Lampahung di Desa Tumbang Lampahung Kecamatan Kurun 1 Unit	Desa Tumbang Lampahung Kecamatan Kurun, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
179	1342785	05-03-2025	ICEU PURNAMASARI	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Lanjutan Pembangunan Jalan Desa Tbg. Lampahung di Desa Tbg. Lampahung Kecamatan Kurun 1 Jalur	Desa Tbg. Lampahung Kecamatan Kurun, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Jalur	-	-	-
180	1342829	05-03-2025	ICEU PURNAMASARI	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	Pengadaan Perlengkapan Ibadah Gereja GKE Tanjung Riu di Kecamatan Kurun 1 Paket	Kecamatan Kurun, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Paket	-	-	-
181	1345673	05-03-2025	HERBERT Y.ASIN	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Pembangunan cor beton jalan W. Siram Desa Tewang Pajangan 336x5 meter di Tewang Pajangan 1 paket	Tewang Pajangan, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	1	Paket	-	-	-
182	1375976	07-03-2025	ENDRA	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Pengadaan Bibit Ternak Babi, Kelurahan Tehang, Kec. Manuhing Raya, Kab. Gunung Mas	Kelurahan Tehang, Kec. Manuhing Raya, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	25	Ekor	-	-	-
183	1376045	07-03-2025	ENDRA	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Pengadaan Bibit Ternak Babi, di Kelurahan Jakatan Raya	Kelurahan Jakatan Raya, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	25	Ekor	-	-	-
184	1376224	07-03-2025	DONI SAPUTRA	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Bantuan Bibit Babi	Kelurahan Tbg Talaken, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	55	ekor	-	-	-
185	1376242	07-03-2025	DONI SAPUTRA	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Bantuan Bibit Babi	Desa Tumbang Jutuh, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	50	ekor	-	-	-
186	1376252	07-03-2025	DONI SAPUTRA	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Bantuan Bibit Babi	Desa Bereng Jun, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	50	ekor	-	-	-
187	1376270	07-03-2025	DONI SAPUTRA	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Bantuan Bibit Babi	Desa Tumbang Mantuhe, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	20	ekor	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
188	1376279	07-03-2025	DONI SAPUTRA	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Bantuan Bibit Babi	Desa Tumbang Samui, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	20	ekor	-	-	-
189	1376303	07-03-2025	DONI SAPUTRA	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA)	Bantuan Bibit Ikan	Desa Tumbang Malahoi, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	700	ekor	-	-	-
190	1376370	07-03-2025	DONI SAPUTRA	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN)	Crombok	SD 1 Sangal, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	20	unit	-	-	-
191	1376379	07-03-2025	ENDRA	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Pengadaan Bibit Ternak Babi, di Kelurahan Tumbang Rahuyan	Kelurahan Tumbang Rahuyan , Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	25	Ekor	-	-	-
192	1376396	07-03-2025	DONI SAPUTRA	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN)	Pengadaan Meubeller Guru dan Siswa	SD 1 Sangal, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	43	unit	-	-	-
193	1376408	07-03-2025	ENDRA	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Pengadaan Bibit Ternak Babi, di Desa Tumbang Kajuei	Desa Tumbang Kajuei, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	25	Ekor	-	-	-
194	1376410	07-03-2025	DONI SAPUTRA	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN)	Pengadaan Laptop	SMP 1 Rungan Hulu, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	10	unit	-	-	-
195	1376445	07-03-2025	ENDRA	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN)	Pengelolaan Cagar Budaya, di Desa Tumbang Baringei	Desa Tumbang Baringei, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
196	1376791	07-03-2025	ENDRA	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Peningkatan Jalan, di Desa Tumbang Baringei, Kec. Rungan	Desa Tumbang Baringei, Kec. Rungan, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Jalur	-	-	-
197	1376834	07-03-2025	ENDRA	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Rehab Lantai Jembatan Gantung Jalemo Gohong, di desa Jalemo Gohong	desa Jalemo Gohong, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
198	1376873	07-03-2025	ENDRA	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Peningkatan Jalan (Cor Beton) SMA 1 Rungan Barat, di Kelurahan Rabambang	Kelurahan Rabambang, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Jalur	-	-	-
199	1376907	07-03-2025	ENDRA	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Pembukaan Jalan Baru, di Kelurahan Jakatan Raya	Kelurahan Jakatan Raya, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	KM	-	-	-
200	1376946	07-03-2025	ENDRA	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Peningkatan Jalan Desa Tumbang Kajuei, di Desa Tumbnag Kajuei, Kec. Rungan	Desa Tumbnag Kajuei, Kec. Rungan , Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Jalur	-	-	-
201	1376978	07-03-2025	ENDRA	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU))	Pembangunan Gazebo di TPU, Desa Tumbang Bunut	Desa Tumbang Bunut, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
202	1377029	07-03-2025	ENDRA	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT)	Penataan Halaman dan Tempat Parkir UPT Puskesmas Tumbang Jutuh, Kelurahan Jakatan Raya	Kelurahan Jakatan Raya, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Kegiatan	-	-	-
203	1377086	07-03-2025	ENDRA	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT)	Pengadaan Sepeda Motor Dinas untuk UPT Puskesmas, Tumbang Rahuyan	Tumbang Rahuyan, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
204	1377112	07-03-2025	ENDRA	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT)	Pengdaan Sepeda Motor Dinas Untuk Pustu Tumbang Tuwe, Tumbang Tuwe	Tumbang Tuwe, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
205	1377762	07-03-2025	DONI SAPUTRA	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Pengadaan Bantuan 1 Paket Bibit Padi, Desa Tumbang Malahoi	Desa Tumbang Malahoi, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Paket	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
206	1604928	21-04-2025	BINARTHA	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Peningkatan jalan riam guhung karaha. Di tumbang mantuhe	tumbang Mantuhe, Kec. Manuhing Raya, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	jalur	-	-	-
207	1604941	21-04-2025	BINARTHA	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	Hibah untuk pembangunan masjid di desa Fajar harapan	FAJAR HARAPAN, KEC. MANUHING, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	kegiatan	-	-	-
208	1604948	21-04-2025	BINARTHA	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	Hibah untuk peningkatan pembangunan gedung gereja GPT desa Bereng Jun.	Desa Bereng Jun, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	KEGIATAN	-	-	-
209	1604958	21-04-2025	BINARTHA	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Pengadaan ternak babi	DAPIL II, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	50	ekor	-	-	-
210	1604973	21-04-2025	BINARTHA	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	PEMBELIAN BENIH/BIBIT SAWIT	DAPIL II, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	3000	BIBIT	-	-	-
211	1604987	21-04-2025	BINARTHA	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT)	WC Pustu di desa Balawan Mulya.	BELAWAN MULIA, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	UNIT	-	-	-
212	1604992	21-04-2025	BINARTHA	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN)	WC siswa SDN sepan	TBG SEPAN, KEC. MANUHING, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	UNIT	-	-	-
213	1604998	21-04-2025	BINARTHA	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN)	Cor beton jalan masuk SMAN 1 Manuhing	MANUHING, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	JALUR	-	-	-
214	1605006	21-04-2025	ELVI ESIE	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	Pembangunan Gereja GBI Tewah	Kecamatan Tewah, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	1	Kegiatan	-	-	-
215	1605010	21-04-2025	BINARTHA	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN)	Jalan produksi di kelurahan Talaken.	kelurahan Talaken., Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	JALUR	-	-	-
216	1605046	21-04-2025	BINARTHA	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN)	Pengadaan labtop SDN 1 talaken.	TUMBANG TALAKEN, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	4	UNIT	-	-	-
217	1605069	21-04-2025	SAHRIAH	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Pemeliharaan Badan jalan Poros	Desa Jalemu Masulan Kec. Rungan Barat, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	1	jalur	-	-	-
218	1605076	21-04-2025	BINARTHA	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN)	Pagar sekolah SDN 2 Talaken	SDN 2 Talaken, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	400	METER	-	-	-
219	1605089	21-04-2025	SAHRIAH	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	Bantuan Untuk Rumah Ibadah (Musolla)	Desa Tbg Jalemu Masulan, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	1	Kegiatan	-	-	-
220	1605100	21-04-2025	BINARTHA	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Peningkatan jalan lingkungan di kelurahan jakatan raya	kelurahan jakatan raya, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	JALUR	-	-	-
221	1605183	21-04-2025	HERDA	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	usulan bantuan bibit babi	kelurahan talaken , Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	50	ekor	-	-	-
222	1605199	21-04-2025	HERDA	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Pembuatan jembatan baru	Jalemu masulan , Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Ruas	-	-	-
223	1605214	21-04-2025	HERDA	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN)	Bantuan bibit sawit	Rungan hulu, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Paket	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
224	1605223	21-04-2025	SAHRIAH	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Pembukaan Badan Jalan Produksi Kelompok Tani Seikajang Desa Luwuk Kantor	Kecamatan Rungan, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	1	jalur	-	-	-
225	1605240	21-04-2025	SAHRIAH	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Pembukaan Badan Jalan Produksi kelompok Tani Desa Hantapang	Kec Rungan Hulu, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	1	jalur	-	-	-
226	1605254	21-04-2025	HERDA	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU))	Bantuan mobil jenazah	Rungan baringei, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	Unit	-	-	-
227	1605262	21-04-2025	SAHRIAH	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN)	Rehab Sekolah SDN Jalemu Kajue	Kec Rungan Barat, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	1	Kegiatan	-	-	-
228	1605269	21-04-2025	HERDA	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Cor beton	Tumbang langgah, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	357	meter	-	-	-
229	1605280	21-04-2025	SAHRIAH	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN)	Pengadaan Bibit Sawit	Kecamatan Rungan Hulu beserta Desa, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	1	Paket	-	-	-
230	1605317	21-04-2025	HERDA	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN)	let top,mubiler dan wc	SD JANGKANG, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	3	PAKET	-	-	-
231	1605327	21-04-2025	BINARTHA	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN)	Pengadaan 1 unit motor, laptop dan printer di korwil Rungan	Rungan, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	3	PAKET KEGIATAN	-	-	-
232	1605328	21-04-2025	SAHRIAH	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN)	bantuan Bibit babi	Kelurahan Tbg Rahuyan (Kec. Rungan Hulu), Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	50	ekor	-	-	-
233	1605338	21-04-2025	BINARTHA	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN)	Siring sekolah SMPN 2 Rungan Hulu	SMPN 2 Rungan Hulu, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	PAKET KEGIATAN	-	-	-
234	1605346	21-04-2025	BINARTHA	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN)	Jalan produksi di desa sei antai	desa sei antai, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	JALUR	-	-	-
235	1605358	21-04-2025	BINARTHA	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN)	Tiwah masal di desa ulek luwang.	desa ulek luwang. , Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	KEGIATAN	-	-	-
236	1605363	21-04-2025	SAHRIAH	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN)	Bantuan Ternak kambing	Desa Bangun Sari (Kec Manuhing), Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	20	ekor	-	-	-
237	1605380	21-04-2025	SAHRIAH	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN)	Pengadaan Mubiler Kursi Meja TK Tunas Manihang	Kec. Rungan Hulu, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	1	Kegiatan	-	-	-
238	1605398	21-04-2025	SAHRIAH	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR)	Pengadaan Penmabahan Pipa Air Baku	Kelurahan Tbg Rahuyan Kec. Rungan Hulu, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	1	Kegiatan	-	-	-
239	1605406	21-04-2025	SAHRIAH	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Bantuan UMKM	Desa Putat Durei dan Kelurahan Tewah, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	1	Kegiatan	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
240	1605416	21-04-2025	SAHRIAH	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM)	Bantuan Alat Bengkel	Tbg Rahuyan dan Kec. Rungan Hulu, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	1	Paket	-	-	-
241	1605423	21-04-2025	SAHRIAH	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH)	Pembangunan Kantor Damang	Kec. rungan Hulu, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	1	Kegiatan	-	-	-
242	1605441	21-04-2025	SAHRIAH	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN)	Rehab SDN 2 Tbg Rahuyan	Kec Rungan Hulu, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	1	Kegiatan	-	-	-
243	1605446	21-04-2025	SAHRIAH	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Bantuan Karang Taruna	Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	1	Kegiatan	-	-	-
244	1605540	21-04-2025	KAROLINA	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Pembangunan Gereja ASI Upon Batu tahap dua	Desa Upon Batu, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	300	Unit	-	-	-
245	1605570	21-04-2025	KAROLINA	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Pembangunan Gereja Sei Riang	Desa Sei Riang, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	200	Unit	-	-	-
246	1605611	21-04-2025	KAROLINA	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Bibit Babi Kelurahan Tewah	Kelurahan Tewah, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	200	Unit	-	-	-
247	1605625	21-04-2025	KAROLINA	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Pembangunan WC Sekolah Desa Kasintu	Desa Kasintu, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	50	Unit	-	-	-
248	1605647	21-04-2025	KAROLINA	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Pengurusan Jalan Makam Desa Tumbang Hampuroi	Desa Tumbang Hampuroi, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	100	Unit	-	-	-
249	1605660	21-04-2025	KAROLINA	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Bibit Babi Desa Rangan Mihing	Desa Rangan Mihing, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	50	Unit	-	-	-
250	1605671	21-04-2025	KAROLINA	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Corbeton jalan petahu Kelurahan Tewah	Kelurahan Tewah , Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	200	Unit	-	-	-
251	1605683	21-04-2025	KAROLINA	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Pengerasan jalan perkebunan desa batu nyiwuh	desa batu nyiwuh, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	100	Unit	-	-	-
252	1605698	21-04-2025	KAROLINA	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	corbeton jalan lingkungan Desa Tumbang Napoi	Desa Tumbang Napoi, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	200	Unit	-	-	-
253	1605724	21-04-2025	KAROLINA	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	corbeton jalan makam dan gorong gorong desa mangkuhung	desa mangkuhung , Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	200	Unit	-	-	-
254	1605741	21-04-2025	KAROLINA	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Bibit babi Kecamatan Tewah	Kecamatan Tewah , Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	400	Unit	-	-	-
255	1613188	22-04-2025	NENI YULIANI	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM)	AIR BERSIH UNTUK DESA2 DI KECAMATAN KURUN MIHING RAYA DAN SEPANG	DAPIL I KURUN, SEPANG, MIHING RAYA, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	KEGIATAN	-	-	-
256	1613202	22-04-2025	NENI YULIANI	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	BANTUAN BIBIT SAYURAN, TERNAK DAN BIBIT SAWIT	DAPIL I, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	3	KEGIATAN	-	-	-
257	1613212	22-04-2025	NENI YULIANI	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	PENGASPALAN JALAN KUALA KURUN - SEPANG SIMIN	DAPIL I, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	300	KM	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
258	1613216	22-04-2025	NENI YULIANI	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU))	PENATAAAN DALAM KOTA KUALA KURUN	KUALA KURUN, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	KEGIATAN	-	-	-
259	1613229	22-04-2025	NENI YULIANI	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU))	PENAMBAHAN JALUR LISTRIK PADA DESA PILANG MUNDUK - MENTAHA	DAPIL I, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	KEGIATAN	-	-	-
260	1613284	22-04-2025	SELSIUS APRIANUS	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	JALAN LINGKUNGAN MENUJU GEREJA GKE	KARITAK, , Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	KEGIATAN DILANJUTKAN KE SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	JALUR	-	-	-
261	1613292	22-04-2025	SELSIUS APRIANUS	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	JALAN LINGKUNGAN MENUJU GERAJA GPDI	KARITAK, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	KEGIATAN DILANJUTKAN KE SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	JALUR	-	-	-
262	1613299	22-04-2025	SELSIUS APRIANUS	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	PEMBUATAN 2 JEMBATAN DESA TUYUN	DESA TUYUN, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	KEGIATAN DILANJUTKAN KE SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	2	KEGIATAN	-	-	-
263	1613303	22-04-2025	SELSIUS APRIANUS	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	JALAN LINGKUNGAN MENUJU ARAH KUBURAN	TAMPANG TBG ANJIR, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	KEGIATAN DILANJUTKAN KE SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	JALUR	-	-	-
264	1613312	22-04-2025	SELSIUS APRIANUS	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN)	PEMBUATAN PAGAR SD- TBG EMPAS	TBG EMPAS, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	Validasi Mitra Bappeda	-	KEGIATAN DILANJUTKAN KE SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	500	M	-	-	-
265	1613315	22-04-2025	SELSIUS APRIANUS	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU))	PENGADAAN LAMPU JALAN GANG KEL. KAMPURI	KEL KAMPURI, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	KEGIATAN DILANJUTKAN KE SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	KEGIATAN	-	-	-
266	1613321	22-04-2025	SELSIUS APRIANUS	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU))	PEMBANGUNAN GEREJA OIKOMENE KEL. TAMPANG TBG ANJIR	KEL. TAMAPANG TBG ANJIR, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	KEGIATAN DILANJUTKAN KE SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	KEGITAN	-	-	-
267	1613323	22-04-2025	SELSIUS APRIANUS	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM)	PENGEBORAN AIR BERSIH DI TAMPANG TBG ANJIR	TAMPANG TBG ANJIR, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	KEGIATAN DILANJUTKAN KE SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	KEGIATAN	-	-	-
268	1613327	22-04-2025	SELSIUS APRIANUS	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	PEMBUATAN BOX CALFERT JALAN ARAH TANJUNG RIU	TANJUNG RIU, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	KEGIATAN DILANJUTKAN KE SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	PAKET KEGIATAN	-	-	-
269	1613333	22-04-2025	SELSIUS APRIANUS	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	PENOINGKATAN JALAN ARAH DAMANG GAMAN, DEKAT PUSKESMAS TAMPANG TBG ANJIR.	TAMAPANG TBG ANJIR, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	KEGIATAN DILANJUTKAN KE SKPD YANG DI TUJU	-	-	-	1	JALUR	-	-	-
270	1617708	23-04-2025	NOMI APRILIA	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Bantuan ternak Kelurahan Kampuri Kec. Mihiang raya	kel. kampuri kec. Mihiang raya, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-	Kegiatan dapat diajukan ke SKPD yang di Tuju	-	-	-	1	Kegiatan	-	-	-
271	1617712	23-04-2025	NOMI APRILIA	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU))	Penataan Halaman Kantor Kec. Kurun	Kec. Kurun , Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	Kegiatan dapat diajukan ke SKPD yang di Tuju	-	-	-	1	kegiatan	-	-	-
272	1617717	23-04-2025	NOMI APRILIA	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU))	Pembuatan aula Kelurahan di Kel. KAMPURI, Kec. Mihiang Raya	Kel. Kampuri, Kec. Mihiang Raya, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	Kegiatan dapat diajukan ke SKPD yang di Tuju	-	-	-	1	kegiatan	-	-	-
273	1617721	23-04-2025	NOMI APRILIA	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU))	Rehap kantor Kelurahan Kampuri,	Kel. Kampuri, kec. Mihiang Raya, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	Kegiatan dapat diajukan ke SKPD yang di Tuju	-	-	-	1	Kegiatan	-	-	-
274	1617745	23-04-2025	INDRA H. KIJAI	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Pembukaan jalan baru Gudang Setengah Tembus Pasir Putih	Kec. Tewah, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	Kegiatan dapat diajukan ke SKPD yang di Tuju	-	-	-	1	kegiatan	-	-	-
275	1617747	23-04-2025	INDRA H. KIJAI	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Pembukaan Jalan Samping Masjid Di Desa Teluk Lawah Kec. Tewah	Desa Teluk lawah, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	Kegiatan dapat diajukan ke SKPD yang di Tuju	-	-	-	1	kegiatan	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
276	1617754	23-04-2025	INDRA H. KIAJI	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	peningkatan jln petran	kec. tewah, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	Kegiatan dapat diajukan ke SKPD yang di Tuju	-	-	-	1	KEGIATAN	-	-	-
277	1617757	23-04-2025	INDRA H. KIAJI	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Peningkatan Jalan Plat Murai	jln. Plat Murai Kec. Tewah, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	Kegiatan dapat diajukan ke SKPD yang di Tuju	-	-	-	1	Kegiatan	-	-	-
278	1617759	23-04-2025	INDRA H. KIAJI	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Pembukaan jalan Saranoi dan Kapitin RAYA	kec. Tewah, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	Kegiatan dapat diajukan ke SKPD yang di Tuju	-	-	-	1	kegiatan	-	-	-
279	1617763	23-04-2025	INDRA H. KIAJI	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM)	Pembangunan DAM air Bersih Desa TBG MASUKIH, Kec. MIRI MANASA	Tbg Masukih, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Mitra Bappeda	-	Kegiatan dapat diajukan ke SKPD yang di Tuju	-	-	-	1	kegiatan	-	-	-
280	1617765	23-04-2025	INDRA H. KIAJI	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	Pembangunan Gereja GBI, Tbg Masukih Kec. Miri Manasa.	Tbg Masukih, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-	Kegiatan dapat diajukan ke SKPD yang di Tuju	-	-	-	1	unit	-	-	-

4.6 USULAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DARI KECAMATAN SE-KABUPATEN GUNUNG MAS

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 dilakukan dengan memegang teguh prinsip perencanaan *bottom-up*, sekaligus diselaraskan dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi seperti RPJPN, RPJMN, RPJPD, dan RPJMD.

Oleh karena itu, dalam proses ini, Kecamatan se-Kabupaten Gunung Mas memiliki hak penuh untuk berpartisipasi dengan memberikan usulan kebutuhan perencanaan pembangunan. Usulan ini diajukan dengan tetap mempertimbangkan garis besar prioritas pembangunan. Berikut adalah usulan perencanaan pembangunan dari Kecamatan se-Kabupaten Gunung Mas:

REKAP INPUT DU RKP DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2026

BIDANG PENDIDIKAN :

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
1	DIHING,SE	Pembangunan 3 Ruangan Baru SDN 1 Sepang Kota	Jalan Kartini RT.04/RW.01 Desa Sepang Kota, Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Sepang Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
2	DIHING,SE	Rehap Bangunan WC SDN 1 Sepang Kota	Jalan Kartini RT.04/RW.01 Desa Sepang Kota, Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Sepang Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
3	DIHING,SE	Pembuatan 1 Buah Lapangan Basket SMPN 2 Sepang	Jalan Kartini RT.04/RW.01 Desa Sepang Kota, Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Sepang Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
4	DIHING,SE	Pembangunan 4 Ruang WC Siswa SMPN 2 Sepang	Jalan Kartini RT.04/RW.01 Desa Sepang Kota, Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Sepang Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
5	JUANG	1.Pagar Beton Kantor Korwil 2.Box Culvert Jalan Masuk Kantor Korwil (1 buah) 3.Alat Bermain TK.Dharma Wanita (1 set) 4.Alat Bermain TK.Pembina (1 set) 5.Penambahan Ruangan Belajar (2 ruangan) 6.Penataan Halaman/Lapangan SDN-2 Sepang Simin (60m²)	Kelurahan Sepang Simin, Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Sepang Simin	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
6	SIGO	penambahan guru SDN Tewai Baru kurang 2 Orang	Desa Tewai Baru, Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Tewai Baru	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
7	SIGO	Penambahan Guru SMPN Satap 2 Sepang kurang 3 orang guru	Tewai Baru, Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Tewai Baru	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
8	SIGO	Penambahan Ruang Kelas SDN Tewai Baru dengan volume 3 ruang kelas	Desa Tewai Baru, Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Tewai Baru	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		diproses 1 ruang TA. 2025
9	SIGO	Penambahan Ruang Kelas SMPN Satap 2 Sepang dengan Volume 3 Ruang karena masih kurang	Desa Tewai Baru, Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Tewai Baru	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		diproses 1 ruang TA. 2025
10	LINSON	Pengadaan/Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN II Luwuk Andan Rabauh dengan Volume 1 Paket Peningkatan Fasilitas Tempat Guru	SDN II Rabauh Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Rabauh	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
11	MALIS IPPUN	Belum tersedianya Ruang Perpustakaan SDN-1 Tanjung karitak (Sarana dan prasarana) 4 m x 6 m	Jaln. Darwis RT 01, Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Tanjung Karitak	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
12	MALIS IPPUN	Belum Tersedianya Rumah Dinas Guru SDN-1 Tanjung Karitak (4 x 5 m) 2 Unit	Jln. Darwis RT 01, Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Tanjung Karitak	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
13	BRAHIM	gedung kantor SD yang ada di rasa kurang fasiitasnya terhadap guru /tenaga pendidik (kurang nyaman)	Desa Tampelas RT 02/RW 01, Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Tampelas	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
14	PRATUNAS, S.Sos (Pj.KADES)	Belum Ada Alat Komputer di SDN Tumbang Danau, Pada Saat Ujian Anak SD Harus ke Kampuri (SMK-MIHING RAYA), Melaksanakan Ujian dan Sangat Berbahaya di Jalan, dan mengeluarkan biaya tambahan	RT.002 Desa Tumbang Danau Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Tumbang Danau	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
15	INDRA LESMANA, S.AN	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN)	Jalan Pelajar RT/RW 001/001 Desa Rangan Tate, Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Rangan Tate	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
16	BENNY RIAN TO. A.Md	Rehab berat Ruang Kelas 2 ruang SDN-1 Tumbang Empas	RT.04/RW.01 Desa Tumbang Empas, Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Tumbang Empas	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
17	BENNY RIAN TO. A.Md	Rehab berat rumah Dinas Guru 3 Ruang SDN-1 Tumbang Empas	RT.04/RW.01 Desa Tumbang Empas, Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Tumbang Empas	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
18	BENNY RIAN TO. A.Md	Rehab 3 Ruang kelas PAUD/TK Cahaya Mentari 3 Desa Tumbang Empas	RT.04/RW.01 Desa Tumbang Empas, Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Tumbang Empas	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
19	BENNY RIAN TO. A.Md	Rehab 2 ruang kelas SMPN Satu Atap- 1 Mihing Raya	RT.04/RW.01, Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Tumbang Empas	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
20	BENNY RIAN TO. A.Md	1 paket Mobiler perlengkapan Ruang Kepala Sekolah SMPN Satu Atap-1 Mihing Raya	RT.04/RW.01, Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Tumbang Empas	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
21	BENNY RIAN TO. A.Md	120 unit Kursi Siswa SMPN Satu Atap-1 Mihing Raya	RT.04/RW.01, Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Tumbang Empas	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
22	JUNJUNG TUAH, S.Sos	Tidak tersedianya alat bermain untuk TK Sambelum	Jalan Lamiang, TK Sambelum, Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Kampuri	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
23	JUNJUNG TUAH, S.Sos	Belum tersedianya rumah dinas di SDN 2 Kampuri	Jalan Lamiang, SDN 2 Kampuri, Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Kampuri	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
24	JUNJUNG TUAH, S.Sos	Belum tersedianya ruang UKS dan ruang LAB, serta bangun baru ruang kelas sebanyak 3 unit dan ruang guru 1 unit	Jalan Lamiang, SDN 1 Kampuri, Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Kampuri	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
25	WILNA ELITA, M.Pd	Pembangunan pagar sekolah 85 Meter	TK Sinar Kasih, Jl. Temanggung Panji RT.10/RW.003, Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	Dana Pokir Dewan
26	WILNA ELITA, M.Pd	Pembangunan Gedung Baru TK. Batu Palangka Ruangan Kelompok B UK. 7 Meter X 12 meter Perkiraan senilai 200 Juta	TK. Batu Palangka , Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
27	WILNA ELITA, M.Pd	1. Peningkatan drainase antara Paud dengan lokasi SD Negeri -3 Kuala Kurun. 2. Rehabilitasi Berat Ruang Kelas pada Gedung "E" (diharapkan lanjutan dari dana aspirasi anggota DPRD Gumas) 3.Rehabilitasi berat ruang kelas pada gedung "I" dan "J". 4.Pembangunan ruang teknologi komunikasi dan informasi (TIK) lengkap dengan perabotnya. 5.Pembangunan WC/Toilet. 6.Pengadaan buku bacaan (cerita dan fiksi).	SDN 3 Kurun, Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
28	WILNA ELITA, M.Pd	1. Pagar Sekolah. (Lanjutan) 100 Meter perkiraan 200 Juta 2. Ruang belajar. 4 Ruangan perkiraan 380 juta 3. Penimbunan halaman Perkiraan 40 Juta	SDN- 4 Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		Dana Pokir Dewan
29	WILNA ELITA, M.Pd	1.Pembangunan Ruang Kelas Baru. (Prioritas), 3 (tiga) Lokasi 2.Penataan halaman/pasang paving, 50 m x 50 m dan 60 x 25 m 3.Pengadaan komputer, 50 Unit 4.Pengadaan LCD Proyektor untuk pembelajaran di kelas, 15 Buah 5.Pengadaan AC untuk ruang guru. 6. Pengadaan Buku-buku Untuk Literasi sekolah 8. Perumahan dinas Guru 2 (dua) unit	SMP Negeri - 1 Kurun, Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		Dana Pokir Dewan
30	DEDIYANTO	SDN-1 Desa Petak Bahandang Tidak Mempunyai Halaman Bermain untuk anak-anak, dimana Bangunan Sekolah langsung Menghadap KeBahu Jalan, Sehingga sangat Rawan untuk anak-anak Bermain, oleh karena itu Pihak Sekolah Minta untuk di Realokasi ke RT.003 Dimana Tanah Sudah Disediakan oleh Desa	Jalan Desa Petak Bahandang RT.006/RW.002, Kab. Gunung Mas	Kurun	Petak Bahandang	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		Menunggu Proses Pengurusan Kelengkapan Dokumen (surat, dll)
31	WILNA ELITA, M.Pd	1.Pembangunan Lapangan Bola Voli. 2.Pembangunan Lapangan Bola Basket.	SMKN - 1 Kurun, Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	Dana Provinsi
32	SETIAWAN KRISBIANTORO, A.Md	Bangunan Gedung SDN 1 Tumbang Miwan Kekurangan Ruangan akibat ruangan sebelumnya tidak layak sebanyak 6 ruangan	Desa Tumbang Miwan, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Miwan	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
33	AGUS SEFFENI, S.Sos	Penambahan Ruang Kelas Baru 3 Ruang SMPN-4 Kurun	Kel. TTA /RT 03 , Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Anjir	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
34	AGUS SEFFENI, S.Sos	Usulan Ruang UKS dan Komputer SDN-2 TTA	Kel. TTA. /RT. 03 , Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Anjir	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
35	AGUS SEFFENI, S.Sos	Tambahan1 Ruangan Gedung TK Mekar Budaya Transbangdep	Kel. TTA / RT 05 , Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Anjir	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
36	AGUS SEFFENI, S.Sos	Alat Bermain anak-anak Tk. Mekar Budaya alat bermain ayunan	Kel. TTA / RT 05 , Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Anjir	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
37	AGUS SEFFENI, S.Sos	Alat Bermain anak-anak Tk. Mekar Budaya alat bermain Seluncuran	Kel. TTA / RT 05 , Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Anjir	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
38	SETIAWAN KRISBIANTORO, A.Md	Pembangunan Lapangan Volly Ball karena Tidak mempunyai lapangan volly ball, yang ada masih belum memadai 1 buah	Desa Tumbang Miwan, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Miwan	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
39	SETIAWAN KRISBIANTORO, A.Md	Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola Dikarenakan lapangan yang ada sekarang selalu digenangi air dan tidak dapat berfungsi lagi sebanyak 1 buah	Desa Tumbang Miwan, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Miwan	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
40	DONI	Kebutuhan Ruang Belajar bagi murid dan Guru sekarang tidak mampu menampung jumlah murid maka perlu dibangun baru untuk ruang belajar bagi murid dengan kebutuhan ruangan kurang lebih 2 ruangan dengan masing-masing ukuran 7 m x 16 m.	SDN 1 HURUNG BUNUT RT.04 Desa Hurung Bunut, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas., Kab. Gunung Mas	Kurun	Hurung Bunut	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
41	DONI	Penambahan Ruang Belajar mengajar bagi murid mengingat ruangan yang ada hanya menggunakan beberapa ruangan bergabung dalam satu ruangan dengan proses belajar mengajar berdampingan dengan satu pembatas triplek maka perlu dibangun baru untuk ruang belajar mengajar kebutuhan ruangan kurang lebih 4 ruangan dengan masing-masing ukuran 7 m x 10 m.	SDN 2 HURUNG BUNUT RT.04 Desa Hurung Bunut, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas., Kab. Gunung Mas	Kurun	Hurung Bunut	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
42	DONI	Kebutuhan Kursi Meja belajar bagi murid sangat kurang dan banyak rusak maka sekolah membutuhkan mobiler berupa meja dan kursi baru utuk kebutuhan belajar mengajar bagi murid tahun ajaran baru mengingat murid tiap tahun semakin bertambah. Kebutuhan Kursi 100 buah, meja 100 buah.	SDN 2 HURUNG BUNUT RT.04 Desa Hurung Bunut, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas., Kab. Gunung Mas	Kurun	Hurung Bunut	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
43	DONI	Kebutuhan Kursi Meja belajar bagi murid sangat kurang dan banyak rusak maka sekolah membutuhkan mobiler berupa meja dan kursi baru utuk kebutuhan belajar mengajar bagi murid tahun ajaran baru mengingat murid tiap tahun semakin bertambah. Kebutuhan Kursi 100 buah, meja 100 buah.	SDN 1 HURUNG BUNUT RT.04 Desa Hurung Bunut, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas., Kab. Gunung Mas	Kurun	Hurung Bunut	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
44	DONI	Kebutuhan Rumah Dinas Bagi Guru mengingat Sebagian Guru yang mengajar Tidak berdomisili ditempat, oleh sebab itu sekolah membutuhkan Rumah Dinas. Kebutuhan kurang lebih 2 unit. Masing-masing ukuran 4 m x 6 m.	SDN 1 HURUNG BUNUT RT.04 Desa Hurung Bunut, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas., Kab. Gunung Mas	Kurun	Hurung Bunut	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
45	DONI	Kebutuhan Rumah Dinas Bagi Guru mengingat Sebagian Guru yang mengajar Tidak berdomisili ditempat, oleh sebab itu sekolah membutuhkan Rumah Dinas bagi Guru. Kebutuhan kurang lebih 2 unit. Masing-masing ukuran 4 m x 6 m.	SDN 2 HURUNG BUNUT RT.04 Desa Hurung Bunut, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas., Kab. Gunung Mas	Kurun	Hurung Bunut	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
46	DONI	Kebutuhan Rumah Dinas Bagi Guru mengingat Sebagian Guru yang mengajar Tidak berdomisili ditempat, oleh sebab itu sekolah membutuhkan Rumah Dinas bagi Guru. Kebutuhan kurang lebih 1 unit. ukuran 4 m x 6 m.	SMP SATAP 2 KURUN RT.01 Desa Hurung Bunut, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas., Kab. Gunung Mas	Kurun	Hurung Bunut	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
47	DONI	Penambahan Ruang Belajar bagi murid mengingat ruangan yang ada hanya menggunakan satu ruangan dengan proses belajar mengajar berdampingan dengan pembatas triplek maka perlu dibangun baru untuk ruang belajar mengajar kebutuhan ruangan kurang lebih 2 ruangan dengan masing-masing ukuran 7 m x 10 m.	SMP SATAP 2 KURUN RT.01 Desa Hurung Bunut, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas., Kab. Gunung Mas	Kurun	Hurung Bunut	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
48	DONI	Untuk menunjang proses belajar mengajar siswa-siswi sekolah membutuhkan Laptop 10 unit Mengingat pendidikan sekarang semakin maju maka perlu dibutuhkan sarana Prasanara komputer untuk menunjang pendidikan yang ada.	SMP SATAP 2 KURUN RT.01 Desa Hurung Bunut, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas., Kab. Gunung Mas	Kurun	Hurung Bunut	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
49	DONI	Dalam peningkatan sumber daya manusia perlu adanya pelatihan bagi guru-guru PAUD Desa agar memperoleh keterampilan yang baru dalam meningkatkan Pengetahuan Pendidikan yang Berkualitas.	PAUD Beringin Desa Hurung Bunut, Kab. Gunung Mas	Kurun	Hurung Bunut	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
50	JHONEDIE	Kuarang adanya kelengkapan kursi dan meja Kepala Sekolah / Guru, SDN Penda Pilang	SDN Penda Pilang RT.002 jl. Gang Siswa, Kab. Gunung Mas	Kurun	Penda Pilang	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
51	JHONEDIE	Kekurangan Kursi dan meja Kepala sekolah dan Guru SMPN SATU ATAP - 1 KURUN	SMPN SATU ATAP-1 KURUN Desa Penda Pilang jl. gang siswa RT 002, Kab. Gunung Mas	Kurun	Penda Pilang	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
52	PANCASONA, S.Pd	Plafon Ruang UKS SMPN 2 Kurun rusak sehingga perlu perbaikan	Jln. Pelita, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tewang Pajangan	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
53	IDEN	Karena masih sedikitnya ruang kelas untuk murid belajar maka sangat perlu untuk menambah 3 ruang belajar siswa	SDN Desa Tumbang Lampahung, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Lampahung	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
54	IDEN	Untuk menambah kemampuan murid dalam pembelajaran komputer maka perlu adanya pengadaan 15 unit komputer di SDN 1 Tumbang Lampahung	SDN 1 Tumbang Lampahung Desa Tumbang Lampahung, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Lampahung	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		✓	
55	IDEN	Perlu adanya penambahan meubel untuk keperluan proses belajar mengajar yang berupa 30 kursi dan meja serta 3 buah papan tulis karena selama ini masih kekurangan kursi, meja dan	SDN 1 Tumbang Lampahung Desa Tumbang Lampahung, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Lampahung	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	✓		
56	IPONG IWAN SAGI	Pengadaan Komputer untuk menunjang kegiatan di Sekolah Dasar Negeri Tumbang Tambirah	Jl. Perjuangan Desa Tumbang Tambirah, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Tambirah	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		✓	
57	IPONG IWAN SAGI	Mohon bantuan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu di SDN Tumbang Tambirah	Jl. Perjuangan Desa Tumbang Tambirah, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Tambirah	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		✓	
58	SUHADI TAWAR (Pj.KADES)	Belum Terbangunnya Gedung LAB SDN Luwuk Langkuas.	RT/RW.003/001, Desa Luwuk Langkuas, Kec. Rungan, Kab. Gunung Mas	Rungan	Luwuk Langkuas	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	✓		
59	SUHADI TAWAR (Pj.KADES)	Belum meratanya Pembangunan Pagar SDN Luwuk Langkuas sepanjang 300 meter.	RT/RW. 003/001, Desa Luwuk Langkuas, Kab. Gunung Mas	Rungan	Luwuk Langkuas	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		✓	Dana Pokir Dewan
60	SUHADI TAWAR (Pj.KADES)	Perlunya Pembangunan Perpustakaan untuk SDN Luwuk Langkuas.	RT/RW. 003/001, Desa Luwuk Langkuas, Kab. Gunung Mas	Rungan	Luwuk Langkuas	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		✓	
61	SUHADI TAWAR (Pj.KADES)	Perlunya Pembangunan Pagar SMPN 4 Rungan Sepanjang 300 Meter.	RT/RW. 003/001, Desa Luwuk Langkuas, Kab. Gunung Mas	Rungan	Luwuk Langkuas	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		✓	
62	SUHADI TAWAR (Pj.KADES)	Perlunya Lampu penerangan untuk Lapangan Sepakbola mini Tingkat Desa sebanyak 8 buah.	RT/RW. 003/001 Desa Luwuk Langkuas, Kab. Gunung Mas	Rungan	Luwuk Langkuas	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		✓	
63	TAUFIK, SP	Untuk keamanan lingkungan sekolah SMPN 1 Rungan maka perlu dibangun pagar tembok sekolah dengan panjang 320 Meter.	JALAN PELAJAR KELURAHAN JAKATAN RAYA, Kab. Gunung Mas	Rungan	Jakatan Raya	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		✓	
64	TAUFIK, SP	masih belum dimilikinya aula bagi SMPN 1 Rungan maka perlu dilakukan Rehab Dua Ruang Kelas menjadi Aula.	JALAN PELAJAR KELURAHAN JAKATAN RAYA, Kab. Gunung Mas	Rungan	Jakatan Raya	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		✓	
65	TAUFIK, SP	Masih kurangnya Rumah dinas bagi guru di SMPN 1 Rungan sehingga perlu dibangun Rumah Dinas Guru SMPN 1 Rungan sebanyak 2 Unit.	JALAN PELAJAR KELURAHAN JAKATAN RAYA, Kab. Gunung Mas	Rungan	Jakatan Raya	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	✓		
66	TAUFIK, SP	Masih belum adanya listrik di bangunan TK Dharmawanita sehingga perlu dilakukan pemasangan Listrik 1.300 VA.	JALAN PELAJAR KELURAHAN JAKATAN RAYA, Kab. Gunung Mas	Rungan	Jakatan Raya	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		✓	BOP
67	TAUFIK, SP	Untuk keamanan bagi murid TK Dharmawanita sangat diperlukan pagar keliling sehingga perlu dibangun paga keliling sekolah.	JALAN PELAJAR KELURAHAN JAKATAN RAYA, Kab. Gunung Mas	Rungan	Jakatan Raya	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		✓	Dana Pokir Dewan
68	TAUFIK, SP	Masih belum adanya fasilitas air bersih di bangunan TK Shirathal Mustaqim sehingga perlu dibangun Tower Air sebanyak 1 Unit.	JALAN PELAJAR KELURAHAN JAKATAN RAYA, Kab. Gunung Mas	Rungan	Jakatan Raya	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		✓	

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
69	TAUFIK, SP	Masih belum adanya fasilitas WC di lingkungan sekolah TK. Shirathal Mustaqim sehingga perlu dibangun WC sebanyak 2 Ruang di TK. Shirathal Mustaqim.	JALAN PELAJAR KELURAHAN JAKATAN RAYA, Kab. Gunung Mas	Rungan	Jakatan Raya	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
70	TAUFIK, SP	Belum adanya sarana bermain di TK. Pembina sehingga perlu dibangun sarana bermain TK Pembina sebanyak 2 Unit.	JALAN PEMBINA KELURAHAN JAKATAN RAYA, Kab. Gunung Mas	Rungan	Jakatan Raya	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		Pelaksanaan TA. 2025
71	TAUFIK, SP	Bangunan Atap TK. Shirathal Mustaqim sudah banyak yang bocor sehingga perlu dilakukan rehab terhadap atap bangunan TK. Shirathal Mustaqim.	JALAN PELAJAR KELURAHAN JAKATAN RAYA, Kab. Gunung Mas	Rungan	Jakatan Raya	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
72	TAUFIK, SP	Belum adanya drainase bagi lingkungan Sekolah SDN 2 Tumbang Jutuh sehingga perlu dibangun Drainase di SDN Tumbang Jutuh sepanjang 100 Meter.	JALAN CILIK RIWUT KELURAHAN JAKATAN RAYA, Kab. Gunung Mas	Rungan	Jakatan Raya	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
73	ESTORINA, S.Pi (Pj.KADES)	Kurangnya guru di SDN Bareng Baru dapat berdampak pada menurunnya kualitas pembelajaran siswa, karena perhatian dan bimbingan yang diberikan kepada setiap siswa menjadi kurang optimal. (1 Guru ASN SD)	Desa Bereng Baru, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Rungan	Bereng Baru	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
74	ESTORINA, S.Pi (Pj.KADES)	Ketiadaan gedung olahraga yang memadai dapat menghambat aktivitas fisik dan olahraga bagi siswa atau masyarakat sekitar. Hal ini dapat berdampak pada kurangnya kesempatan untuk meningkatkan kesehatan fisik, mengembangkan keterampilan olahraga, serta membatasi kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung perkembangan mental dan sosial. (Gedung Olahraga luas 100m2)	Desa Bereng Baru, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Rungan	Bereng Baru	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
75	GARING	perlunya pagar untuk SD Tumbang Kajuei, Kajuei Datah & Trasn Kajuei, Lalu Pagar untuk SMP Tumbang kajuei	desa tumbang kajuei, Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Kajuei	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
76	MUBARIK	kurangnya keamanan siswa disekolah karna belum adanya pagar sekolah. usulan : Pagar Sekolah SDN 1 Karya Bhakti (P. 100 M x T 1,5 M)	desa karya bhakti RT. 06/ RW.01 Kecamatan Rungan, Kab. Gunung Mas	Rungan	Karya Bhakti	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
77	MUBARIK	dibutuhkan bantuan Laptop/Pc sebanyak 5 unit untuk membantu kegiatan belajar mengajar dan ujian sekolah untuk SMPN 3 Rungan.	desa karya bhakti , Kab. Gunung Mas	Rungan	Karya Bhakti	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
78	JHON BENY MENTENG	1. Penambahan Guru Agama Islam dan Olah Raga 2 Orang	RT.02/RW.01 Desa Luwuk Kantor, Kab. Gunung Mas	Rungan	Luwuk Kantor	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
79	YUDIE	Penambahan Teralis Pengaman Sekolah SDN 1 Tumbang Jutuh, Volume : 1 Paket	Desa Tumbang Jutuh, Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Jutuh	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
80	YUDIE	Usulan Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 1 Tumbang Jutuh, Volume : 1 Unit	Desa Tumbang Jutuh, Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Jutuh	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
81	DARGO, A.Md.Kep	Belum Tersedianya Fasilitas WC sekolah yang layak di SMP Satap 2 Rungan	SMP Satap 2 Rungan, Kab. Gunung Mas	Rungan	Bereng Malaka	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
82	DARGO, A.Md.Kep	Belum Tersedianya Gedung sekolah Yang memadai di SMP Satap 2 Rungan	SMP Satap 2 Rungan, Kab. Gunung Mas	Rungan	Bereng Malaka	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
83	DARGO, A.Md.Kep	belum tersedianya Fasilitas Berupa Lab di SDN Desa Bereng Malaka	SDN Desa Bereng Malaka, Kab. Gunung Mas	Rungan	Bereng Malaka	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
84	DARGO, A.Md.Kep	Belum tersedianya Fasilitas bagi tenaga Pengajar Berupa tempat tinggal di Desa bereng malaka	Desa Bereng malaka, Kab. Gunung Mas	Rungan	Bereng Malaka	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
85	DARGO, A.Md.Kep	Belum tersediannya Fasilitas Belajar yang Memadai di bidang TIK (Laptop) di SDN	SDN Desa Bereng Malaka, Kab. Gunung Mas	Rungan	Bereng Malaka	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
86	DARGO, A.Md.Kep	Belum Tersediannya Fasilitas Belajar di Bidang TIK berupa laptop bagi SD dan PC bagi SMP Satap 2 Rungan	Desa Bereng Malaka, Kab. Gunung Mas	Rungan	Bereng Malaka	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
87	DARGO, A.Md.Kep	Belum Terpenuhi secara Merata Kebutuhan terhadap tenaga Pengajar di SMP satap 2 Rungan dan SDN Desa bereng malaka	SMP Satap 2 Bereng Malaka, Kab. Gunung Mas	Rungan	Bereng Malaka	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
88	SEANLY NOVIANTI, S.Pd	perpustakaan , rehab Ruang Kelas, tenaga Pendidik jurusan Agama islam , meja dan kursi siswa lemari buku , meja guru ruang kelas	RT.001, Kab. Gunung Mas	Rungan	Talangkah	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
89	IPNO I	Pagar SDN 1 TUMBANG BARINGEI	Desa Tumbang Baringei, Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Baringei	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	Dana Pokir Dewan
90	PANJUNG, S.Hut (Pj.KADES)	Rehap Gedung Sekolah Dasar (2 Ruang)	Desa Parempei, Kab. Gunung Mas	Rungan	Parempei	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
91	PANJUNG, S.Hut (Pj.KADES)	Kurangnya Meubeler SD dan SMP Desa Parempei	Desa Parempei, Kab. Gunung Mas	Rungan	Parempei	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
92	PANJUNG, S.Hut (Pj.KADES)	Kurangnya Alat Bermain TK	Desa Parempei, Kab. Gunung Mas	Rungan	Parempei	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
93	GELVIA, S.Pd	Pembangunan Kantor SDN.1 Rabambang	SDN.1 Rabambang, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Rabambang	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
94	GELVIA, S.Pd	Pembuatan Lapangan Sekolah sarana Olah Raga	SMPN.1 Rungan Barat, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Rabambang	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
95	GELVIA, S.Pd	Pembangunan Baru Rumah Jabatan Kepala Sekolah	SMPN.1 Rungan Barat, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Rabambang	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
96	GELVIA, S.Pd	Pembangunan Rumah Dinas Guru	SMPN.1 Rungan Barat, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Rabambang	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
97	RESEP	Tambah Ruang/ Pembagunan Gedung Kantor SDN 1 Tajah Antang Raya	RT.01 Desa Tajah Antang Raya, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Tajah Antang Raya	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
98	RESEP	Rehap Plafon SDN 1 Tajah Antang Raya untuk 2 (dua) Gedung	RT.01 Desa Tajah Antang Raya, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Tajah Antang Raya	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
99	NELSON	Mobiler SD masih banyak yang tidak layak	Desa Jalemu Raya, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Jalemu Raya	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
100	NELSON	Tidak adanya Lapangan Olah Raga di SD yang memadai	Desa Jalemu Raya, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Jalemu Raya	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
101	NELSON	Belakang SD paritnya sering tertimbun kembali, perlu dipasang beton/siring	Desa Jalemu Raya, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Jalemu Raya	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	Dana Pokir Dewan
102	SALUNDIK A. SAMAT	Pengadaan Pagar SDN Masulan	Desa Jalemu Masulan, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Jalemu Masulan	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
103	SUMARJO	Rehab Perumahan Guru SDN Tusang Raya	Desa Tusang Raya, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Tusang Raya	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
104	SUMARJO	Pembangunan Gedung Kantor SDN Tusang Raya	Tusang Raya, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Tusang Raya	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
105	JHON PAULUS	Rehap Ruang Kelas SDN Tumbang Jalemu Kajuei Sebanyak 6 Ruang Kelas	RT 02 Desa Tumbang Jalemu Kajuei, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Tumbang Jalemu Kajuei	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
106	GEMBIRA	1. Belum ada pagar pembatas dengan perkiraan sepanjang ± 250 meter sebagai kebutuhan dan keamanan di lingkungan SDN Desa Hujung Pata. 2. Perawatan atau Perbaikan 1 unit MCK di SDN Desa Hujung Pata 3. mobiler	Desa Hujung Pata, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Hujung Pata	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
107	APRI, S.H.	BELUM ADANYA BANTUAN RUMAH DINAS GURU	TUMBANG LANGGAH, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Tumbang Langgah	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
108	APRI, S.H.	BELUM ADANYA WC GURU DAN MURID JIKA PERLU BUANG AIR HARUS PERGI KE SUNGAI ATAU KE WC TETANGGA	TUMBANG LANGGAH, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Tumbang Langgah	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
109	GASIE	Kurangnya tenaga pedidik dan Honorarium untuk Guru Paud Tunas Jaya Desa Jangkit	Desa Jangkit, Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Jangkit	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
110	HARMUJI	Rumah Dinas Guru SDN 1 Bangun Sari□	RT. 02 RW. 01 BANGUN SARI, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Bangun Sari	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
111	HARMUJI	Tambah Ruang Kelas SDN 2 Bumi Harjo□	RT.04 RW.02, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Bangun Sari	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
112	GUSTI RAY NOVHANDA, S.Pi, M.Si	BELUM ADA WC YANG LAYAK DI TK DHARMAWANITA KELURAHAN TUMBANG TALAKEN	JL. PELITA RT 002/ RW 001 KELURAHAN TUMBANG TALAKEN KECAMATAN MANUHING KABUPATEN GUNUNG MAS, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Tumbang Talaken	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
113	GUSTI RAY NOVHANDA, S.Pi, M.Si	BELUM ADA WC YANG LAYAK DI TK PANDOHOP KELURAHAN TUMBANG TALAKEN	JL. MERPATI RT 008/ RW 002 KELURAHAN TUMBANG TALAKEN KECAMATAN MANUHING KABUPATEN GUNUNG MAS, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Tumbang Talaken	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
114	GUSTI RAY NOVHANDA, S.Pi, M.Si	TERBATASNYA JUMLAH WASIT SEHINGGA PERLU ADANYA PELATIHAN PENINGKATAN SDM PERWASITAN UNTUK MENUNJANG OLAH RAGA SEPAKBOLA YANG DI KELOLA OLEH KARANG TARUNA DI KELURAHAN TUMBANG TALAKEN	JL. NEGARA RT 001/ RW 001 KELURAHAN TUMBANG TALAKEN KECAMATAN MANUHING KABUPATEN GUNUNG MAS, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Tumbang Talaken	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
115	GUSTI RAY NOVHANDA, S.Pi, M.Si	MASIH KEKURANGAN RUANG BELAJAR, SEHINGGA PERLU DITAMBAHKAN 3 RUANG BELAJAR DI SDN 1 TUMBANG TALAKEN	JL. MERPATI RT 008/ RW 002 KELURAHAN TUMBANG TALAKEN KECAMATAN MANUHING KABUPATEN GUNUNG MAS, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Tumbang Talaken	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
116	GUSTI RAY NOVHANDA, S.Pi, M.Si	BELUM LAYAKNYA RUANGAN KANTOR GURU DAN KEPALA SEKOLAH, SEHINGGA PERLU DITAMBAHKAN KANTOR GURU DAN KEPALA SEKOLAH DI SDN 1 TUMBANG TALAKEN	JL.MERPATI RT 008/ RW 002 KELURAHAN TUMBANG TALAKEN KECAMATAN MANUHING KABUPATEN GUNUNG MAS, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Tumbang Talaken	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
117	GUSTI RAY NOVHANDA, S.Pi, M.Si	KURANGNYA KURSI DAN MEJA UNTUK MURID SD YANG LAYAK, SEHINGGA PERLU DITAMBAHKAN KURSI DAN MEJA SEBANYAK 60 BUAH UNTUK SDN 2 TUMBANG TALAKEN	JL. PATAHU RT 002/ RW 001 KELURAHAN TUMBANG TALAKEN KECAMATAN MANUHING KABUPATEN GUNUNG MAS, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Tumbang Talaken	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
118	HAIRUL ANWAR	Perlunya rehab Total Berat/Bangunan Baru Perumahan Guru Sebanyak 3 Buah	DESA TUMBANG SEPAN, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Tumbang Sepan	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
119	HAIRUL ANWAR	Perlunya Penambahan Toilet Sekolah Sebanyak 2 Unit	DESA TUMBANG SEPAN, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Tumbang Sepan	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
120	YUEL,S.Kep.,Ns	SDN Tumbang Jalemu belum memiliki kantor yang layak seyogyanya sekolah pada umumnya	Jalan Desa, RT. 002, RW. 001, Desa Tumbang Jalemu, Kecamatan Manuhing, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Tumbang Jalemu	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
121	YUEL,S.Kep.,Ns	SDN Tumbang Jalemu belum memiliki sarana air bersih selayaknya sekolah pada umumnya	Jalan Desa, RT.002, RW. 001, Desa Tumbang Jalemu, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Tumbang Jalemu	DINAS PEKERJAAN UMUM		√	
122	YUEL,S.Kep.,Ns	SDN Tumbang Jalemu belum memiliki WC yang layak sepatutnya sekolah pada umumnya	Jalan Desa, RT.002, RW 001, Desa Tumbang Jalemu, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Tumbang Jalemu	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
123	YUEL,S.Kep.,Ns	SDN Tumbang Jalemu belum memiliki sarana Teknologi dan Informasi atau LAB TIK selayaknya sekolah pada umumnya	Jalan Desa, RT. 02, RW. 001, Desa Tumbang Jalemu, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Tumbang Jalemu	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
124	RUDYANTO, ST	Tidak Tersedia Leptop maupun Computer di Sekolah	SDN Desa Bereng Balawan, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Bereng Balawan	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
125	RUDYANTO, ST	Tidak Tersedianya WC Umum untuk Guru dan Murid di SDN Desa Bereng Balawan	Desa Bereng Balawan, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Bereng Balawan	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
126	RUDYANTO, ST	Gedung Kantor untuk Guru Masih Belum Ada	Desa Bereng Balawan, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Bereng Balawan	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
127	RAWAN, S.Pd.,MM (Pj.KADES)	pengadaan komputer/laptop untuk kegiatan UNBK di SD N 2 fajar harapan 15 paket	Fajar Harapan, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Fajar Harapan	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
128	RAWAN, S.Pd.,MM (Pj.KADES)	penambahan Ruang Belajar Di SD N 2 Fajar harapan 3 unit	fajar harapan, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Fajar Harapan	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
129	RAWAN, S.Pd.,MM (Pj.KADES)	pengadaan meja dan kursi belajar di SD N 2 Fajar Harapan 20 paket	Fajar harapan, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Fajar Harapan	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
130	RAWAN, S.Pd.,MM (Pj.KADES)	pembangunan sanggar seni di SD N 2 fajar harapan 1 unit	Fajar Harapan, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Fajar Harapan	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		√	
131	RAWAN, S.Pd.,MM (Pj.KADES)	perlengkapan olah raga di SD N 2 Fajar harapan 1 paket	Fajar harapan, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Fajar Harapan	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
132	RAWAN, S.Pd.,MM (Pj.KADES)	pengadaan perlengkapan olahraga untuk karang taruna desa fajar harapan 1 paket	fajar harapan, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Fajar Harapan	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
133	EDISON	Kurangnya Laptop/PC untuk SMP 1 Atap 1 Manuhing	Jl. Sion RT/RW.002/000, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Bereng Jun	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
134	EDISON	Rehabilitasi Ruang kantor guru dan kelas SMPN 1 atap 1 manuhing	Jl. Sion RT/RW.002/000, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Bereng Jun	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
135	EDISON	Pembangunan sekolah SD N 1 Harang Karamat	Jl. Negara RT/RW.003/000, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Bereng Jun	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
136	MADI	Penambahan Tenaga Guru Agama Islam	Jl. Pelajar No. 91 Rt.004/ RW.001 Desa Luwuk Tukau, Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Luwuk Tukau	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
137	MADI	Renovasi Ruang Kelas 1, 2 dan plafond	Jl. Pelajar No. 91 RT.004/ RW. 001 Desa Luwuk Tukau, Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Luwuk Tukau	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
138	MADI	Pengadaan Kursi, meja belajar siswa untuk 2 ruangan	Jl. Pelajar No. 91 RT.004/ RW. 001 Desa Luwuk Tukau, Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Luwuk Tukau	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
139	YANTO B. SOEPA	Rumah dinas guru rusak berat, bangunan lama sudah ambruk. tenaga pendidik sebagian menempuh perjalanan PP dari Tumbang Talaken. Tanah tersedia milik sekolah di 2 titik jalan desa.	Jl. Patahu Rt 002 Rw.001 dan Jl. Singa Ulang Rt.002 Rw.001, Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tumbang Samui	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
140	YANTO B. SOEPA	Guru agama Pada SMPN 2 Manuhing Raya dan Guru Bahasa Inggris pada SMPN 2 Manuhing Rayadan SDN Samui tidak ada.	Jl. Singa Ulang Rt.002 dan Rt.001 Rw 001 , Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tumbang Samui	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
141	YANTO B. SOEPA	Masih terdapat masyarakat yang tidak sesuai dengan lulusan standar pendidikan dasar. Paket A,B dan C tidak ada di dalam desa	Jl. Kabupaten Rt.004 Rw.001, Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tumbang Samui	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
142	DARSILO	jumlah Kursi-Meja yang ada pada SDN 1 Tumbang Mantuhe masih Kurang sebanyak 33 Paket	RT 002 Desa Tumbang Mantuhe, Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tumbang Mantuhe	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
143	DARSILO	belum tersedia WC yang layak untuk murid	RT 002 Desa Tumbang Mantuhe, Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tumbang Mantuhe	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
144	DARSILO	belum tersedianya Gedung Kantor untuk SMPN 1 ATAP 1 Manuhing Raya	RT 001 Desa Tumbang Mantuhe, Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tumbang Mantuhe	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
145	DARSILO	Perangkat untuk ANBK untuk SMPN 1 ATAP 1 Manuhing Raya	RT 002 Desa Tumbang , Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tumbang Mantuhe	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
146	ANDI LALA, S.Sos	Belum adanya wc,	RT.03/ RW.01, Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tehang	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
147	ANDI LALA, S.Sos	Mengingat Ruang kantor SDN 1 Tehang sudah rusak berat	RT.03/RW.01, Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tehang	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
148	ANDI LALA, S.Sos	WC yang ada sekarang di SDN 1 Tehang sudah rusak	RT.03/RW.01, Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tehang	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
149	ANDI LALA, S.Sos	Mengingat 3 (Tiga) ruang kelas di SDN 1 Tehang sudah rusak berat	RT.03/RW.01, Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tehang	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
150	ANDI LALA, S.Sos	Mengingat 6 (enam) Ruang kelas di SDN 2 Tehang sudah rusak berat	RT.04/RW.01, Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tehang	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
151	ANDI LALA, S.Sos	Mengingat Gedung Kantor yang ada di SMP 1 Manuhing Raya sekarang sudah rusak berat	RT. 07/RW.02, Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tehang	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
152	RAMULEN	Perlu adanya penambahan Gedung Kantor SDN Tumbang Oroi sebanyak 1 unit	Desa Tumbang Oroi , Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tumbang Oroi	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
153	RAMULEN	Kurangnya Tenaga Guru Penjaskes SDN Tumbang Oroi sebanyak 1 orang	Desa Tumbang Oroi, Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tumbang Oroi	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
154	RAMULEN	Kurangnya Tenaga Guru Agama SDN Tumbang Oroi sebanyak 1 orang	Desa Tumbang Oroi, Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tumbang Oroi	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
155	YERMINAE, S.Pd	Pengadaan Buku Pelajaran 1 paket	Desa Karason Raya, Kab. Gunung Mas	Tewah	Karason Raya	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
156	YUYU.L.MANIJAE	Kurangnya sarana pembelajaran (laptop/komputer :20 unit)	SDN SANDUNG TAMBUN, Kab. Gunung Mas	Tewah	Sandung Tambun	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
157	YUYU.L.MANIJAE	Pembangunan Perumahan Guru SDN	Sandung Tambun, Kab. Gunung Mas	Tewah	Sandung Tambun	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
158	YUYU.L.MANIJAE	Pembangunan MCK SDN	Sandung Tambun, Kab. Gunung Mas	Tewah	Sandung Tambun	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
159	JOHAN SUPIANOR, S.Pd	Pembangunan Gedung Laboratorium IPA SMP 5 Negeri Tewah (Desa Taja Urap) Dengan Ukuran 8 x 10 Meter (Cor Beton / Semipermanen)	Desa Taja Urap RT.001, Kab. Gunung Mas	Tewah	Taja Urap	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
160	JOHAN SUPIANOR, S.Pd	Pembuatan Selasar Penghubung Ruangan dan Kantor SDN 1 Taja Urap Uk. Panjang 12 Meter Lebar 2 Meter	Desa Taja Urap RT.001, Kab. Gunung Mas	Tewah	Taja Urap	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
161	ISASKAR	Kurang 3 Ruang Gedung SD Negeri Tumbang Manange	Desa Upon Batu, Kab. Gunung Mas	Tewah	Upon Batu	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
162	ISASKAR	Kurangnya Peralatan Olahraga/ Tidak Lengkap	Desa Upon Batu, Kab. Gunung Mas	Tewah	Upon Batu	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
163	ISASKAR	Tidak ada WC Guru dan Siswa	Desa Upon Batu, Kab. Gunung Mas	Tewah	Upon Batu	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
164	ISASKAR	Pengadaan laptop 3 Unit SMP Negeri Satu Atap 3 Tewah	Desa Upon Batu, Kab. Gunung Mas	Tewah	Upon Batu	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
165	GALODIE	Pengadaan Rumah Dinas Guru SDN-1	Batu Nyiwuh RT. 03, Kab. Gunung Mas	Tewah	Batu Nyiwuh	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
166	GALODIE	Pengadan Rumah Dinas Guru SDN-2	RT. 03, Kab. Gunung Mas	Tewah	Batu Nyiwuh	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
167	DIMAN JADER	Rehap Rumah Dinas Sekolah Dasar Negeri Sumur Mas Sebanyak 2 Unit	Jl. Nyai Bilem Desa Sumur Mas, Kab. Gunung Mas	Tewah	Sumur Mas	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
168	DIMAN JADER	Pengadaan Laptop Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP Negeri Satu Atap 2 Tewah) sebanyak 15 Unit	Jl. Nyai Bilem Desa Sumur Mas, Kab. Gunung Mas	Tewah	Sumur Mas	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
169	YEDIERSHEN, SE	Rehap/Pembangunan WC SDN 1 Batu Nyapau	RT.002 Desa Batu Nyapau, Kab. Gunung Mas	Tewah	Batu Nyapau	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
170	DARSANI	TIDAK ADA PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU PADA SDN 1 DATAH EMBAK	PINGGIR JL PT BUMI MAS DESA KASINTU , Kab. Gunung Mas	Tewah	Kasintu	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
171	SUDIRMAN	Pengadaan Cromebook untuk kegiatan ANBK sekolah 1 paket	RT 001, Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
172	SUDIRMAN	Pembangunan WC 2 Ruang SDN Tumbang Habaon	RT 001, Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
173	SURIADI	Permintaan Fasilitas Olahraga, Lahan Tersedia	Desa rangan Mihing, Kab. Gunung Mas	Tewah	Rangan Mihing	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
174	MULYADI	Fasilitas gedung sekolah lama susah di jangkau karena harus menyeberang sungai	Desa Sei Riang seberang, Kab. Gunung Mas	Tewah	Sei Riang	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		Lahan/Tanah Harus Ada dan Bebas
175	MULYADI	Pembangunan Gedung SDN di Jalan Lintas Desa Sei Riang 5 Ruang Belajar	Desa Sei Riang, Kab. Gunung Mas	Tewah	Sei Riang	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		Lahan/Tanah Harus Ada dan Bebas
176	DEHEN	Pembangunan Rumah Dinas Guru SLTP SATAP 2 Kahut	Desa Tumbang Sian, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Sian	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
177	YOPHAE, A.Md	perlu pembangunan Gedung Laboratorium 1 unit	SDN 2 Tumbang Miri, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
178	DEHEN	Rehab berat gedung SDN 1 Tumbang Sian	Desa Tumbang Sian, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Sian	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
179	YOPHAE, A.Md	Pengadaan Meja kursi Guru 2 Set	TK Pembina Tumbang Miri, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
180	YOPHAE, A.Md	perlunya pembangunan Ruang kantor sekolah 1 unit	SMPN 1 Kahayan Hulu Utara, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
181	BERKAT	kekurangan guru pak agama kristen pada sdn penda rangas	RT 02 desa penda rangas, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Penda Rangas	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
182	BERKAT	tidak memiliki guru agama hindu kaharingan	desa penda rangas, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Penda Rangas	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
183	IRMANTO	Perumahan Guru SD di Desa Dandang sudah beberapa tahun tidak layak dihuni, 2 bangunan sudah ambruk, sisa satu bangunan masih layak ditempati	Desa Dandang RT 02, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Dandang	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
184	IRMANTO	Penambahan Ruang Bangunan SDN Dandang, Karena jumlah siswa siswi di Dandang sudah sangat Banyak	Desa Dandang RT 02, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Dandang	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
185	TANTI	Tidak ada Guru Agama Hindu menjadikan murid agama hindu tidak lancar dalam belajar terkhususnya murid agama Hindu Kami berharap di Berikan 1 Orang Guru SD Agama Hindu	Desa Teluk Kanduri RT.002, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Teluk Kanduri	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
186	TANTI	Belum adanya Bangunan/sudah tidak layak huni Perumahan Guru SD di Desa Teluk Kanduri Maka diharapkan bisa dibangun Perumahan Guru SD 1 Couple 2 Ruang Perkiraan Dana Rp. 300.000.000,-	Desa Teluk Kanduri RT.002, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Teluk Kanduri	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
187	TANTI	sudah tidak layak huni kantor/ruang Kepsek dan Guru SD maka mohon bisa dibangun 1 Ruang/unit gedung kantor Kepsek & Guru SD Desa Teluk Kanduri perkiraan Dana Rp. 100.000.000,-	Desa Teluk Kanduri RT.002, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Teluk Kanduri	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
188	BATTU	Rehab Sedang 1 Ruang Kelas Beserta Perabotannya	Desa Tumbang Posu, Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Posu	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
189	CUMBIE, AMd.Kep	Masih Kurang memadainya Buku Perpustakaan yang ada di SMPN 1 Damang Batu	SMPN 1 Atap Satu Damang Batu Tumbang Anoi, Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Anoi	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
190	CUMBIE, AMd.Kep	Tidak adanya sarana dan prasarana ruang TIK dan kantor kepala sekolah SDN Tumbang Anoi	SDN Tumbang Anoi, Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Anoi	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
191	CUMBIE, AMd.Kep	Masih Kurangnya Perumahan Guru SMPN Satap 1 Damang Batu	SMPN Satap 1 Damang Batu Tumbang Anoi, Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Anoi	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
192	CUMBIE, AMd.Kep	Masih kurangnya tenaga pengajar untuk SMPN Satap 1 Damng Batu (1 orang Guru PPKN, Guru PJOK dan Guru TIK)	SMPN Satap 1 Damang Batu Tumbang Anoi, Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Anoi	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
193	CUMBIE, AMd.Kep	Tidak adanya tenaga pengajar untuk sanggar seni budaya SMPN satap 1 Damang Batu	SMPN satap 1 Bamang Batu, Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Anoi	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
194	CUMBIE, AMd.Kep	Masih kurang tenaga pengajar (1 orang guru agama kristen, 1 orang guru agama hindu dan 1 orang guru bahasa inggris)	SDN Tumbang Anoi, Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Anoi	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
195	CUMBIE, AMd.Kep	Tidak adanya tenaga pengajar PAUD yang PNS	PAUD Tumbang Anoi, Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Anoi	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
196	HAMZAH	kurang terpenuhi operasial pendidikan,tidak ada pagar sekolah SDN,perabotan kursi dan meja mguru dan murid dan juga buku kurikulum per jenis	Tumbang Maraya Rt.01, Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Maraya	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
197	SIUN	Penambah Guru SMP - Matematika, Olahraga, Agama, Muata Lokal dan Bahasa Indonesia	Desa Tumbang Mahuroi, Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Mahuroi	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
198	SARADIN	ada sebagian Guru yang belum memiliki rumah dinas	Jl. Desa Tumbang Koro, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Koro	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
199	ARDIUS, S.Pd	Bangunan Lab Komputer SDN Tumbang Napoi 6 x 12 M2	SDN Tumbang Napoi, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Napoi	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
200	ARDIUS, S.Pd	LAPANGAN VOLI DAN BOLA TANGKIS	Tumbang Napoi, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Napoi	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
201	YUNANTO, S.Pd	Karena Meja yang ada banyak mengalami kerusakan atau tidak layak dipakai di SDN Desa Mangkuhung yang diperlukan penambahan meja 25 unit dan kursi 25 unit	Desa Mnagkuhung, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Mangkuhung	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
202	TOBIE U. JIRAU	Bangunan Kantor SDN	Desa Tumbang Siruk, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Siruk	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
203	ANTON	terdapat kerusakan bangunan ruang kelas Sekolah Dasar Negeri Tumbang Manyoi	Tumbang Manyoi, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Manyoi	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
204	ANTON	Kurangnya Moubiler Meja Sekolah Dasar Negeri Tumbang Manyoi	Tumbang Manyoi, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Manyoi	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
205	ANTON	Kurangnya Moubiler Kursi Sekolah Dasar Negeri Tumbang Manyoi	Tumbang Manyoi, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Manyoi	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
206	ANTON	Kurangnya Buku sebagai media dan bahan ajar guru serta perlengkapan perpustakaan lainnya sebagai buku bacaan siswa	SMP Kristen Tumbang Manyoi, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Manyoi	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
207	ANTON	kurangnya perlengkapan fasilitas olahraga di sekolah menjadi salah satu faktor minimnya prestasi siswa dalam bidang olahraga	SMP Kristen Tumbang Manyoi, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Manyoi	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
208	ANTON	Belum tersedia fasilitas alat bermain bagi sekolah Paud	Tumbang Manyoi, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Manyoi	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
209	SONTO	Meja Kursi Guru 6 Set	Desa Rangan Hiran, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Rangan Hiran	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
210	SONTO	Pembangunan WC Sekolah	Desa Rangan Hiran, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Rangan Hiran	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
211	SONTO	Pengadaan Alat Olahraga Meja Tennis	Desa Rangan Hiran, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Rangan Hiran	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
212	SONTO	Pengadaan Alat Olahraga Badminton	Desa Rangan Hiran, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Rangan Hiran	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		
213	SUANDI	Mobiler kursi meja SDN Harowu	SDN Harowu, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Harowo	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	√		

REKAP INPUT DU RKP DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2026

BIDANG INFRASTRUKTUR :

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
1	DIHING,SE	PEMBUATAN DRAINASE RT.03 RW.01 DESA SEPANG KOTA	Jalan Rawan RT.03 RW.01 Desa Sepang Kota, Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Sepang Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM		✓	
2	DIHING,SE	Pelebaran Jalan Lintas Kecamatan 1 Meter Kiri Kanan Jalan Sepanjang 1 KM RT.06 RW.02 Desa Sepang Kota	Jalan Penghubung Kecamatan RT.06/RW.02 Desa Sepang Kota, Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Sepang Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
3	MEMET HARYANTO, S.Sos (Pj.KADES)	PENERANGAN LAMPU JALAN 1 PAKET	DESA PAMATANG LIMAU, Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Pamatang Limau	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
4	SIGO	Drainase jalan pelita dengan volume 1774 Meter, karena jalan sudah rusak dan butuh perbaikan	Jl Pelita RT 03 Desa Tewai Baru, Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Tewai Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
5	JUANG	1.Rumah Jabatan Lurah (1 unit) 2.Penimbunan Jalan Damai Sejahtera, Jalan Antang Taoi (150m) 3.Rehap Atap Kantor Kelurahan 4.Pengaspalan Jl.Pemda II (100m) 5.Rehap Kntor Camat Lama	Kelurahan Sepang Simin, Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Sepang Simin	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		Poin no 1
6	LINSON	Pengadaan Instalasi Listrik dan Lampu Penerangan Jalan untuk Masyarakat	Desa Rabauh Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Rabauh	DINAS PEKERJAAN UMUM		✓	
7	MALIS IPPUN	Belum Meratanya ketersediaan Sumber Air Bersih 8 unit	RT. 01, RT 02, RT 03 dan RT 4, Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Tanjung Karitak	DINAS PEKERJAAN UMUM		✓	
8	JUANG	Permohonan Pengaspalan Jl. Antang Taoi KM. 3 Kapakat Kelurahan Sepang Simin di Samping Kantor Kecamatan	Jl. Antang Taoi KM. 3 Kapakat di Samping Kantor Kecamatan Sepang Kelurahan Sepang Simin , Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Sepang Simin	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
9	PRATUNAS, S.Sos (Pj.KADES)	Ada 7 Kepala Keluarga yang Menempatai Rumah Yang sudah tidak layak huni di Wilayah Desa Tumbang Danau	RT. 001, RT. 002 dan RT 003 Desa Tumbang Danau Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Tumbang Danau	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		Proposal
10	INDRA LESMANA, S.AN	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	jalan KUSE RT/RW 002/001 Desa Rangan Tate, Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Rangan Tate	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
11	PENDI	Belum Adanya Pipa Jaringan Indu PDAM di wilayah RT.01 & RT.02 pingiran jalan lintas provinsi Sepanjang 2.200 M	RT.01 dan RT.02 Desa Dahian Tambuk, Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Dahian Tambuk	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
12	PENDI	belum adanya lapum penerangan jalan di daerah-daerah jalan yang sepi ketika malam hari, sehingga masyarakat banyak mengusulkan pembuatan lampu penerangan jalan di 6 titik jalan dilingkungan desa	RT.01, RT.02, RT.03, RT.4, RT.05 Desa Dahian Tambuk, Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Dahian Tambuk	DINAS PEKERJAAN UMUM		✓	

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
13	JUNJUNG TUAH, S.Sos	Belum tersedianya drainase dilingkungan pemukiman	Jalan Lintas Provinsi, RT-05, Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Kampuri	DINAS PEKERJAAN UMUM		✓	
14	JUNJUNG TUAH, S.Sos	Belum tersedianya infrastruktur yang memadai	Jalan Damai, Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Kampuri	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
15	JUNJUNG TUAH, S.Sos	Peningkatan pada penyambungan pipa PDAM	Jalan Lintas Provinsi, Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Kampuri	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
16	JUNJUNG TUAH, S.Sos	Tidak tersedianya tempat parkir dan penataan halaman	Jalan Lintas provinsi, Kantor Kelurahan Kampuri, Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Kampuri	DINAS PEKERJAAN UMUM		✓	
17	JUNJUNG TUAH, S.Sos	Belum tersedianya penerangan jalan	Kelurahan Kampuri, Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Kampuri	DINAS PEKERJAAN UMUM		✓	
18	JUNJUNG TUAH, S.Sos	Peningkatan jalan di Gang Kapakat	Jalan Kapakat, Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Kampuri	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
19	WILNA ELITA, M.Pd	Rehap tempat pelayanan dan Penataan halaman kantor Kelurahan	Lokasi Kantor Kelurahan kuala Kurun Jl Tjilik Riwut No. 47 , Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
20	RODI	ada beberapa titik spot di desa tumbang tariak yang sangat gelap dan rawan kecelakaan ketika malam hari, karena hal tersebut kami mohon dengan dinas terkait bisa membantu pengadaan PJU (Penerangan Jalan Umum) di titik rawan tersebut	Jalan Lintas Desa Tumbang Tariak, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Tariak	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
21	SETIAWAN KRISBIANTORO, A.Md	Drainase sepanjang 150 meter dengan lebar 1 meter RT 04 Desa Tumbang Miwan Depan SDN Sering tersumbat mengakibatkan air menggenang dan banjir di halaman sekolah SDN 1 Desa Tumbang Miwan.	Desa Tumbang Miwan, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Miwan	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
22	AGUS SEFFENI, S.Sos	Pagar Kantor Kelurahan Tampang Tumbang Anjir	Kel. TTA / RT. 02 , Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Anjir	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
23	AGUS SEFFENI, S.Sos	Penyambungan Pipa Air Bersih PDAM di Jl. Mangku Rambang	Kel. TTA / RT.03 , Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Anjir	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
24	AGUS SEFFENI, S.Sos	Usulan Gg. Tindan Kamah P = 300 m L = 4 m	Kel. TTA. /RT. 01 , Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Anjir	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
25	AGUS SEFFENI, S.Sos	Uslan Jalan dan Jembatan Gg. Tindan Kamah P = 20 m L = 4 m	Kel. TTA. /RT. 01 , Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Anjir	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
26	SETIAWAN KRISBIANTORO, A.Md	Lampu Penerangan Jalan akibat ,Kurangnya lampu penerangan Jalan bagi masyarakat Desa Tumbang Miwan sebanyak 11 unit	Desa Tumbang Miwan, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Miwan	DINAS PEKERJAAN UMUM		✓	
27	SETIAWAN KRISBIANTORO, A.Md	Banyaknya lobang - lobang serta aspal yang putus - putus disepanjang Jalan Lintas Kabupaten sekitar 4 km	Desa Tumbang Miwan, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Miwan	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
28	AMPUNG	Pembuatan Gorong-gorong Jl. SMA 2 (dua) Buah	Desa Tumbang Hakau RT. 05, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Hakau	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
29	DONI	Jembatan Sahai ukuran 16 m x 6 meter jembatan ini merupakan jembatan penghubung diantara jalan Suka Maju merupakan akses utama Masyarakat menuju pasilitas umum Pendidikan dan kesehatan, jembatan ini pertamakali dibangun tahun 2006 berbahan balok dan panel sampai sekarang keadaan jembatan rusak . Maka oleh sebab itu perlu adanya Perbaikan dan dibangun	Jalan Suka maju RT.01 Desa Hurung Bunut, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas., Kab. Gunung Mas	Kurun	Hurung Bunut	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		Pokir
30	DONI	Kebutuhan air bersih sangat dibutuhkan masyarakat, mengingat kebutuhan air diwilayah RT 02 RT 03 RT 04 Desa Hurung Bunut sangat tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, keadaan air yang Keruh dan Berkarat. Maka oleh sebab itu dibutuhkan perbaikan ulang pengeboran air baku yg dibangun sebelumnya.	Jalan Pelajar RT.04 Desa Hurung Bunut, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas., Kab. Gunung Mas	Kurun	Hurung Bunut	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
31	BERJOALDI, S.Sos.,M.A.P	belum tersedianya lampu penerangan jalan. membutuhkan 50 lampu penerangan	Desa Teluk Nyatu RT.03, Kab. Gunung Mas	Kurun	Teluk Nyatu	DINAS PEKERJAAN UMUM		✓	
32	JHONEDIE	Belum tersedianya sumur BOR AIR BERSIH di PUSTU DESA PENDA PILANG	PUSTU Jl. gang siswa RT,002 Desa Penda Pilang, Kab. Gunung Mas	Kurun	Penda Pilang	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
33	PANCASONA, S.Pd	Jalan Berlobang sulit dilewati sehingga perlu adanya lanjutan peningkatan jalan Pelita dengan volume 400 m	Jln. Pelita Rt 1, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tewang Pajangan	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
34	PANCASONA, S.Pd	Jalan rusak dan berlobang mengganggu akses transoptasi kendaraan masyarakat sehingga perlu lanjutan peningkatan jalan w siram volume 336 m	Jln. W. Siram Rt 3, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tewang Pajangan	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
35	IDEN	Peningkatan untuk pengerasan Jalan Ali karena belum adanya pengerasan jalan sepanjang 2.200 meter	Jalan Ali Desa Tumbang Lampahung, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Lampahung	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		Bertahap
35	IDEN	Melanjutkan pembangunan Cor Beton Jalan Ngantung karena belum sepenuhnya Jalan Ngantung di cor beton sepanjang 200 meter	Jalan Ngantung Desa Tumbang Lampahung, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Lampahung	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
37	IDEN	Perlu adanya pengadaan lampu penerang jalan sebanyak 34 unit karena jalan yang melintasi Desa Tumbang Lampahung tidak ada lampu penerang jalan membuat suasana jalan gelap kalau malam hari	Desa Tumbang Lampahung, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Lampahung	DINAS PEKERJAAN UMUM		✓	
38	IDEN	Masyarakat sangat memerlukan sarana air bersih untuk kebutuhan sehari-hari tetapi tidak ada jaringan instalasi maka sangat perlu sekali pengadaan jaringan instalasi sarana air bersih sebanyak 1 paket	Desa Tumbang Lampahung, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Lampahung	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		Jaringan
39	IPONG IWAN SAGI	Pemasangan Lampu jalan, dikarenakan masih banyak jalan yang tidak terdapat penerangan di desa Tumbang Tambirah (20 titik)	Desa Tumbang Tambirah, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Tambirah	DINAS PEKERJAAN UMUM		✓	
40	HEDI	Warga kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari di lingkungan Mantaha RT . 03 dan memerlukan 2 Titik Bor Air Bersih	Mantaha RT. 03 Desa Pilang Munduk , Kab. Gunung Mas	Kurun	Pilang Munduk	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		Survei & Rehab

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
41	HEDI	Setelah ada titik bor air bersih maka untuk mengalirkan air bersih ke rumah warga dibutuhkan PIPANISASI Air Bersih sepanjang 7 KM di lingkungan Mantaha RT . 03	Mantaha RT. 03 Desa Pilang Munduk, Kab. Gunung Mas	Kurun	Pilang Munduk	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
42	WANTO	Pembangunan Jembatan Gantung Melintasi Sungai Kahayan untuk mengurangi permasalahan dan meningkatkan Aksesibilitas, Perekonomian, Pendidikan, Kesehatan, Budaya dan Pariwisata dan bermanfaat untuk Desa Manyangan dan desa tetangganya. Sudah disiapkan Lahan untuk pekerjaan jembatan dari Pemerintah Desa	RT. 03 Desa Tumbang Manyangan, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Manyangan	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		DED
43	SUHADI TAWAR (Pj.KADES)	Rusaknya Jembatan penghubung antar Desa Talangkah - Luwuk Langkuas.	RT/RW.001/001, Desa Luwuk Langkuas, Kec. Rungan, Kab. Gunung Mas	Rungan	Luwuk Langkuas	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
44	SUHADI TAWAR (Pj.KADES)	Perlunya Peningkatan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 5 KK.	Desa Luwuk Langkuas, Kab. Gunung Mas	Rungan	Luwuk Langkuas	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
45	TAUFIK, SP	Kantor Camat Rungan merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas yang masih belum memiliki GPU sehingga apabila terdapat kegiatan dengan undangan yang cukup banyak Aula yang ada tidak dapat menampung undangan yang ada sehingga perlu dibangun GPU dengan ukuran 20 X 35 Meter.	JALAN CAKRA ALAM KELURAHAN JAKATAN RAYA ., Kab. Gunung Mas	Rungan	Jakatan Raya	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
46	TAUFIK, SP	Jembatan Sei Babelep merupakan akses jalan yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dimana kondisi sekarang mengalami kerusakan yang sangat berat sehingga perlu dilakukan Rehab Total pada jembatan tersebut dengan ukuran 2,5 X 35 Meter.	JALAN HENDRI MANGKIN KELURAHAN JAKATAN RAYA, Kab. Gunung Mas	Rungan	Jakatan Raya	DINAS PEKERJAAN UMUM		✓	
47	TAUFIK, SP	Jalan lingkungan yang sudah mengalami kerusakan yang cukup berat sehingga perlu dilakukan pengaspalan jalan dengan Volume 4 X 200 Meter.	JALAN PELAJAR II KELURAHAN JAKATAN RAYA, Kab. Gunung Mas	Rungan	Jakatan Raya	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
48	MELIN A. BOHOI	Instalasi Air Minum/Air Bersih	Desa Tumbang Bunut, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Bunut	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		Survei kondisi sumber
49	MELIN A. BOHOI	Jalan dan Jembatan	Desa Tumbang Bunut, Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Bunut	DINAS PEKERJAAN UMUM		✓	
50	MELIN A. BOHOI	Perbaikan Jalan TBG Bunut - Karya Bhakti	Desa Tumbang Bunut Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Bunut	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
51	TAUFIK, SP	Belum adanya saluran air pembuangan yang memadai sehingga perlu dibangun drainase sepanjang 150 Meter.	JALAN HENDRI MANGKIN KELURAHAN JAKATAN RAYA, Kab. Gunung Mas	Rungan	Jakatan Raya	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
52	TAUFIK, SP	Untuk Jalan lingkungan sudah mengalami kerusakan sehingga diperlukan perbaikan dengan Pengaspalan Jalan Lingkungan Sepanjang 200 Meter.	JALAN HENDRI MANGKIN, Kab. Gunung Mas	Rungan	Jakatan Raya	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
53	TAUFIK, SP	Jalan Lingkungan Daerah Kuluk Guhung merupakan Jalan penghubung dan merupakan akses bagi penduduk untuk menuju kawasan pendidikan terutama murid TK dimana kondisinya saat ini sudah mengalami kerusakan yang cukup berat sehingga perlu dilakukan pengaspalan Jalan sepanjang 80 Meter.	GANG SERUK KULUK GUHUNG KELURAHAN JAKATAN RAYA, Kab. Gunung Mas	Rungan	Jakatan Raya	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
54	TAUFIK, SP	Belum adanya sauran drainase merupakan salah satu penyebab kerusakan Jalan sehingga perlu dibangun Drainase sepanjang 160 Meter.	JALAN SERUK KULUK GUHUNG KELURAHAN JAKATAN RAYA, Kab. Gunung Mas	Rungan	Jakatan Raya	DINAS PEKERJAAN UMUM		✓	
55	TAUFIK, SP	AspalJalan di Jalan Lingkungan ada beberapa titik yang sudah mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan lanjutan Pengaspalan di Jalan Lingkungan tersebut.	JALAN HENDRIK TIMANG KELURAHAN JAKATAN RAYA, Kab. Gunung Mas	Rungan	Jakatan Raya	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
56	TAUFIK, SP	Jalan lingkungan di Jalan Pembina merupakan jalan bagi masyarakat untuk menuju Sekolah TK dan Rumah Penduduk yang sudah mulai banyak dimana kondisi jalan maasih tanah sehingga perlu dilakukan perbaikan jalan dengan pengaspalan jalan sepanjang 3 X 150 Meter	JALAN PEMBINA KELURAHAN JAKATAN RAYA, Kab. Gunung Mas	Rungan	Jakatan Raya	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
57	UKU J.GANI	Belum optimalnya pemenuhan air bersih	Desa linau, Kab. Gunung Mas	Rungan	Linau	DINAS PEKERJAAN UMUM		✓	Dana Desa
58	UKU J.GANI	Belum merata nya pengaspalan jalan	Desa Linau Rt. 02 dan Rt. 03, Kab. Gunung Mas	Rungan	Linau	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
59	ESTORINA, S.Pi (Pj.KADES)	Pendapatan Rendah: Sebagian besar penduduk di kawasan ini memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan, sehingga tidak mampu memperbaiki atau membangun rumah yang layak huni. Rumah Tidak Layak Huni: Banyak rumah di kawasan ini dalam kondisi rusak parah, dengan struktur yang tidak kokoh, atap bocor, dan ventilasi yang buruk, sehingga tidak memenuhi standar rumah sehat. Overcrowding (Kepadatan Tinggi): Banyak rumah dihuni oleh beberapa keluarga sekaligus. (2 Rumah Layak Huni)	Desa Bereng Baru, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Rungan	Bereng Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		Proposal
60	ISESKAR, S.Pd.SD	Jalan menuju Sekolah SMP N 2 Rungan Masih rusak	SMP-N 2 Rungan Tumbang Malahoi, Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Malahoi	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		Pokir
61	ISESKAR, S.Pd.SD	Jalan Menuju Kota Mandehan Yakni salah satu wisata yang ada di desaTumbang Malahoi, masih belum bisa bisa di akses dengan kendaraan	Jalan Menuju Kuta Mandehan RT.03 Tumbang Malahoi , Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Malahoi	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
62	GARING	perlu dibangunnya jembatan untuk mempermudah masyarakat dalam menyebrang antar sungei	desa tumbang kajuei , Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Kajuei	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
63	GARING	perbaikan jalan untuk warga trans kajuei	desa tumbang kajuei, Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Kajuei	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
64	MUBARIK	dibutuhkan Penggadaan Sumur Bor Air Bersih dan Jaringan Perpipaan untuk warga desa dikarenakan saat musim kemarau warga sangat kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari dengan ukuran kurang lebih 2000 M.	Desa karya bhakti RT. 01 s/d RT 06, RW.01 , Kab. Gunung Mas	Rungan	Karya Bhakti	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		Survei
65	MUBARIK	Dibutuhkan lampu penerangan jalan untuk Penerangan jalan yang dekat dengan gedung bangunan aset desa dibutuhkan sekitar 20 Unit	desa karya bhakti RT. 01 s/d RT 06, Kab. Gunung Mas	Rungan	Karya Bhakti	DINAS PEKERJAAN UMUM		✓	
66	MUBARIK	dibutuhkan Pembuatan Cor rigid di RT 01 dengan P 400m x L 3 m x 15 cm karna anggaran dana desa tidak mencukupi.	desa karya bhakti RT. 01/ RW.01 Kecamatan Rungan, Kab. Gunung Mas	Rungan	Karya Bhakti	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
67	JHON BENY MENTENG	1.Peningkatan/Pemeliharaan Badan Jalan Lintas Desa Tumbang Bunut menuju Desa Luwuk Kantor Panjang 14 KM 2.Pembangunan Jembatan Gantung Jalan Lintas Desa Tumbang Bunut menuju Desa Luwuk Kantor Lebar 3 Meter x Panjang 150 Meter	Desa Tumbang Bunut dan Desa Luwuk Kantor, Kab. Gunung Mas	Rungan	Luwuk Kantor	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
68	YUDIE	Bantuan Bedah Rumah (BSPS), Volume : 30 KK,	Desa Tumbang Jutuh, Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Jutuh	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
69	DARGO, A.Md.Kep	Belum Meratanya Pengerasan Jalan Desa Bereng Malaka	Desa Bereng Malaka, Kab. Gunung Mas	Rungan	Bereng Malaka	DINAS PEKERJAAN UMUM		✓	Dana Desa/CSR
70	DARGO, A.Md.Kep	Belum Tersediannya Pembangunan Box Culvert Bagi Jalan di Desa Bereng Malaka	Desa bereng malaka, Kab. Gunung Mas	Rungan	Bereng Malaka	DINAS PEKERJAAN UMUM		✓	Dana Desa/CSR
71	DARGO, A.Md.Kep	Belum Tersediannya Pengaspalan jalan Poros secara merata di desa bereng malaka	Desa bereng Malaka, Kab. Gunung Mas	Rungan	Bereng Malaka	DINAS PEKERJAAN UMUM		✓	Dana Desa/CSR
72	SEANLY NOVIANTI, S.Pd	Pembangunan Rumah Layak Huni	RT.001 dan RT.002, Kab. Gunung Mas	Rungan	Talangkah	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
73	IPNO I	ASPAL JALAN DESA TUMBANG BARINGEI	Desa Tumbang Baringei, Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Baringei	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
74	GELVIA, S.Pd	Pengaspalan jalan seluruh lingkungan Kelurahan Rabambang	Rt.01 sampai RT.12, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Rabambang	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
75	GELVIA, S.Pd	Pembangunan Jembatan Penghubung antar RT	Rt.05 sampai RT.12, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Rabambang	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
76	GELVIA, S.Pd	Pembangunan PDAM / sarana air Bersih	Rabambang, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Rabambang	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
77	GELVIA, S.Pd	Pembangunan Gedung Pertemuan Umum (GPU)	Rabambang, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Rabambang	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
78	GELVIA, S.Pd	Pembangunan Kantor Kedemangan dan Matir Adat lengkap sarana dan prasarana	Rabambang, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Rabambang	DINAS PEKERJAAN UMUM		✓	
79	RESEP	Terdapat 20 Unit rumah warga yang tidak layak hini	Desa Tajah Antang Raya, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Tajah Antang Raya	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		Siapkan Proposal
80	RESEP	Sulitnya masyarakat Desa mendapat air bersih karena suber air minum tidak memadai	Desa Tajah Antang Raya, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Tajah Antang Raya	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		Survei Lokasi
81	NELSON	Jalan antar Desa banyak titik yang rusak	Desa Jalemu Raya, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Jalemu Raya	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
82	NELSON	Gorong-gorong di RT 4 ada 2 buah rusak	Desa Jalemu Raya, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Jalemu Raya	DINAS PEKERJAAN UMUM		✓	
83	NELSON	masih ada 4 buah rumah yang tidak layak huni	Desa Jalemu Raya, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Jalemu Raya	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		Siapkan Proposal
84	SALUNDIK A. SAMAT	Pengerasan Jalan Poros Tengah Jalemu Masulan Menuju Kantor Korwil Kecamatan Rungan Barat	Desa Jalemu Masulan, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Jalemu Masulan	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
85	SALUNDIK A. SAMAT	Pengerasan Jalan Jalemu Masulan menuju Desa Tumbang Jalemu Kajuei	Desa Jalemu Masulan, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Jalemu Masulan	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
86	SALUNDIK A. SAMAT	Peningkatan Badan Jalan Desa Jalemu Masulan menuju Kelurahan Rabambang Pinggir Sungai Kajuei	Desa Jalemu Masulan, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Jalemu Masulan	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
87	SUMARJO	Peningkatan Jalan antar Desa Tusang Raya-Mangkawuk menggunakan timbunan tanah latrit dan rehab jembatan dan gorong-gorong	Desa Tusang Raya-Mangkawuk, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Tusang Raya	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
88	SUMARJO	Peningkatan jalan antar desa tusang raya ke desa tumbang bahanei menggunakan timbunan tanah latrit	Desa Tusang Raya-Desa Tumbang Bahanei, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Tusang Raya	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
89	JHON PAULUS	Pembangunan Jembatan Sei Kajuei Uk. 6x35 m	RT 01 Desa Tumbang Jalemu Kajuei, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Tumbang Jalemu Kajuei	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		Pokir
90	JHON PAULUS	Pengaspalan jalan antar Desa Jalemu Raya-Tumbang Jalemu Kajuei-Jalemu Masulan sepanjang 6 km	Jl Desa Jalemu Raya-Tumbang Jalemu Kajuei-Jalemu Masulan, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Tumbang Jalemu Kajuei	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
91	GEMBIRA	Belum tersedianya sarana air bersih pada setiap rumah masyarakat di Desa Hujung Pata	Desa Hujung Pata, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Hujung Pata	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		Survei Lokasi
92	GEMBIRA	peningkatan badan jalan penghubung antara Desa Tumbang Jalemu Kajuei dan Desa Hujung Pata	Desa Hujung Pata, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Hujung Pata	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
93	GEMBIRA	pembuatan 7 unit box beton pada badan jalan penghubung antara Desa Tumbang Jalemu Kajuei dan Desa Hujung Pata	Desa Hujung Pata, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Hujung Pata	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
94	GEMBIRA	terdapat 1 keluarga tidak mampu dan layak untuk mendapatkan bantuan bedah rumah di desa hujung pata	desa hujung pata, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Hujung Pata	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		Siapkan Proposal
95	APRI, S.H.	PERMASALAHAN BELUM ADANYA PENGASPALAN JALAN ANTAR DESA TUMBANG KUAYAN PAL 16 MENUJU KECAMATAN RUNGAN BARAT	TUMBANG LANGGAH, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Tumbang Langgah	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
96	GASIE	Parit/Drainase Jalan Lintas	Desa Jangkit, Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Jangkit	DINAS PEKERJAAN UMUM		✓	Keuangan APBN
97	SALIE	pembuatan pembangunan sumur BOR, Belum adanya sumber air bersih yang memadai untuk konsumsi masyarakat PEDESAAN apalagi yang bermukim di atas bukit sangat sulit untuk mendapatkan sumber air bersih untuk kebutuhan sehari hari	RT.001 DESA BATU PUTERKECAMATAN RUNGAN HULU, Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Batu Puter	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		Survei Kembali Lokasi

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
98	SALIE	pembuatan jembatan gantung untuk menyebrangi sei rungan, untuk pejalan kaki menuju jalan pertanian di sebrang rt 03 desa batu puter yang belum adanya akses jembatan penyebrangan menuju lokasi perkebunan masyarkat desa batu puter dengan tidak adanya jembatan gantung untuk pejalan kaki melewati atau menyebrangi sungai masyarakat sangat kesulitan menenempuh jarak sebrang sekitar : panjang 80 meter dan lebar 1,5 meter Anggaran yang di butuhkan sebesar --+ 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	RT 003 DESA BATU PUTER KECAMATAN RUNGAN HULU, Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Batu Puter	DINAS PEKERJAAN UMUM		✓	Pertanian
99	EFFANDY, SH	Pembangunan dam air bersih	Desa Tumbang Tuwe, Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Tuwe	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		Survei
100	EFFANDY, SH	Pembuatan sumur bor	Desa Tumbang tuwe, Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Tuwe	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		Survei
101	EFFANDY, SH	Perbaikan jembatan dan badan jalan	Jl. Lintas Sei Antai Tumbang Tuwe, Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Tuwe	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
102	MULIADI	Kondisi Jalan Masih Jalan Tanah	Desa Hantapang Rt.01, Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Hantapang	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
103	MULIADI	Kondisi Jalan Rusak	Desa Hantapang Rt.02, Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Hantapang	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
104	MULIADI	Kondisi Jalan Rusak dan Belum Beraspal	Desa Hantapang Rt.03, Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Hantapang	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
105	MULIADI	Jembatan Sei Rahuyan Penghubung RT.01 dan RT.02 Kondisi Rusak Parah Desa Hantapang	Desa Hantapang RT.01/RT.02, Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Hantapang	DINAS PEKERJAAN UMUM		✓	
106	TISON (KADES ANTAR WAKTU)	jembatan gantung penyebrangan sungai rungan	Desa Sangal, Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Sangal	DINAS PEKERJAAN UMUM		✓	
107	TISON (KADES ANTAR WAKTU)	wc umum RT.01,RT.02,RT.03	Desa Sangal, Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Sangal	DINAS PEKERJAAN UMUM		✓	Anggaran Dana Desa
108	TISON (KADES ANTAR WAKTU)	bedah rumah sebanyak 55 kk	Desa Sangal, Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Sangal	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
109	TISON (KADES ANTAR WAKTU)	pengaspalan jalan Desa wilayah RT.01 Dan RT.02 Desa Sangal	Desa Sangal, Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Sangal	DINAS PEKERJAAN UMUM		✓	
110	SULIANTO L.LIMIN, SE	Belum adanya Jembatan Penghubung dari Pemukiman Desa ke Tempat Dukuh Petani, akses Jembatan Penyebrangan Sungai Rungan (Jembatan Gantung Desa)	Desa Tumbang Lapan Rt. 02 / rw.01 Kecamatan Rungan Hulu Kab. Gunung mas, Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Lapan	DINAS PEKERJAAN UMUM		✓	Pertanian
111	DARMADI	Usulan Pembuatan Sumur Bor untuk pemenuhan air bersih masyarakat Kelurahan Tumbang Rahuyan Sebanyak 4 Buah	Kelurahan Tumbang Rahuyan, Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		Survei
112	DARMADI	peningkatan jalan lingkungan kelurahan tumbang rahuyan sepanjang 3 km	Kelurahan Tumbang Rahuyan, Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
113	DARMADI	Pengalihan status kawasan HPK ke APL karena di Kelurahan Tumbang Rahuyan banyak rumah dan tanah masyarakat yang tidak bisa di buatkan setifikat karena kawasan masih HPK , kami mengusulkan sekitar 4000 Hektar kawasan tersebut bisa di alihkan menjadi APL . Lukasinya kiri kanan jalan Negara	Kelurahan Tumbang Rahuyan, Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	DINAS PEKERJAAN UMUM		✓	Usulkan ke TAPEM
114	DARMADI	usul pembangunan rumah dinas Lurah Tumbang Rahuyan , karena belum, ada Rumah Dinas Lurah	kelurahan Tumbang Rahuyan , Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
115	DARMADI	usul pembangunan WC (tempat Buang Air Besar) untuk warga tidak mampu sebanyak 25 kepala keluarga di kelurahan tumbang rahuyan	Kelurahan Tumbang Rahuyan, Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
116	DARMADI	usul tempat Relokasi pemukiman warga Masyarakat Kelurahan Tumbang Rahuyan yang sering kena Banjir ,bisa sampai 3 kali kena banjir dalam satu Tahun jika Curah Hujan sering, maka air sungai akan meluap akan merendam rumah warga terutama di daerah dataran rendah , biasanya sampai 70 Rumah warga yang terendam air ,selain fasilitas sekolah	Kelurahan Tumbang Rahuyan,Rencana tempat Relokasi di Jalur Kelompok Tani Kapakat , Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		Koordinasi dengan Dinsos
117	DARMADI	usul Pembuatan jembatan box jalan gasan Injeng kelurahan tumbang rahuyan	Kelurahan Tumbang Rahuyan , Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
118	DARMADI	usul Bedah Rumah untuk masyarakat tidak mampu di Kelurahan Tumbang Rahuyan sebanyak 10 Buah rumah	Kelurahan Tumbang Rahuyan , Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
119	ROBINSON	Usulan Pembangunan Jembatan Layang di Desa Gohong	Desa Gohong, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Gohong	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
120	ROBINSON	Pembangunan Sumur Bor/ Air Bersih	Jl. Guhung RT.001 RW.000 Jl. Guhung RT.002 RW.000, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Gohong	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		Survei
121	HARMUJI	Pembangunan Jembatan Non Permanen1 Unit	RT. 002. RW. 02 Bangun Sari Jalur IX, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Bangun Sari	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
122	HARMUJI	Peningkatan Jalan Penghubung/Rehabilitasi Peningkatan Jembatan Desa Bangun Sari Ke Dusun Bumi Harjo(10 UNIT)	RT. 002. RW. 001 RT. 003. RW. 002, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Bangun Sari	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
123	HARMUJI	Rehabilitasi/Pembangunan Jembatan RT. 04 dan RT 03 Bumi Harjo□	RT.04 RW.02, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Bangun Sari	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
124	GUSTI RAY NOVHANDA, S.Pi, M.Si	JALAN MASUK SMA 1 MANUHING BELUM LAYAK, SEHINGGA PERLU DIASPAL DENGAN VOLUME 50 M	JL NEGARA RT 001/RW 001 KELURAHAN TUMBANG TALAKEN, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Tumbang Talaken	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
125	GUSTI RAY NOVHANDA, S.Pi, M.Si	BELUM ADA TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH AKHIR DI KELURAHAN TUMBANG TALAKEN, SEHINGGA MASYARAKAT SUKA BUANG SAMPAH SEMBARANGAN DI JALAN UMUM DAN SUNGAI	JL NEGARA RT 001/RW 001 KELURAHAN TUMBANG TALAKEN, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Tumbang Talaken	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERHUBUNGAN	✓		
126	GUSTI RAY NOVHANDA, S.Pi, M.Si	PERLU ADANYA GORONG GORONG UNTUK JALAN MERPATI DAN JL PELITA AGAR AKSES JALAN MENJADI LANCAR DAN MUDAH DILALUI MASYARAKAT DI KELURAHAN TUMBANG TALAKEN	JL NEGARA RT 001/RW 001 KELURAHAN TUMBANG TALAKEN, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Tumbang Talaken	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
127	GUSTI RAY NOVHANDA, S.Pi, M.Si	BELUM ADA SARANA PENGANGKU SAMPAH, SEHINGGA SANGAT MEMERLUKAN TRUCK PENGANGKUT SAMPAH	JL NEGARA RT 001/RW 001 KELURAHAN TUMBANG TALAKEN, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Tumbang Talaken	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERHUBUNGAN	✓		
128	GUSTI RAY NOVHANDA, S.Pi, M.Si	TIDAK TEMPAT RUANG RAPAT RAPAT DAN RUANG PERTEMUAN YANG LAYAK DI KANTOR KELURAHAN TUMBANG TALAKEN, SEHINGGA DI PERLUKAN PENAMBAHAN RUANG RAPAT/ AULA DI KANTOR KELURAHAN TUMBANG TALAKEN DENGAN VOLUME 10X10 M	JL NEGARA RT 001/RW 001 KELURAHAN TUMBANG TALAKEN, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Tumbang Talaken	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
129	HAIRUL ANWAR	Akses Jalan Menuju Desa Masih sulit dilalui	DESA TUMBANG SEPAN, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Tumbang Sepan	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
130	HAIRUL ANWAR	Perlunya Jembatan Gantung untuk Menuju lahan Persawahan	DESA TUMBANG SEPAN, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Tumbang Sepan	DINAS PEKERJAAN UMUM		✓	Pertanian
131	HARYUYU	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah	Jl. Pembangunan Induk RT.03/RW.01, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Takaras	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
132	HARYUYU	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah	Jl Minun RT.02/RW.01, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Takaras	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
133	SUKMADADY, S.Sos (Pj.KADES)	Pengaspalan dan Drainase Jalan Kabupaten	Jl. Negara Km. 128 Desa Belawan Mulia, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Belawan Mulia	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
134	RUDYANTO, ST	Belum Tersedianya Fasilitas dan Sarana Air Bersih yang Memadai di Desa Bereng Balawan	Desa Bereng Balawan, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Bereng Balawan	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
135	RUDYANTO, ST	Akses Jalan yang Dilalui Masyarakat Desa Masih Tanah Liat dan Licin apa bila Musim Hujan	Desa Bereng Balawan, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Bereng Balawan	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
136	RUDYANTO, ST	Jembatan yang di lewati Masyarakt Masih Belum Permanen/ Masih Darurat	Desa Bereng Balawan, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Bereng Balawan	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
137	RAWAN, S.Pd.,MM (Pj.KADES)	pembangunan sanitasi air bersih di desa fajar harapan 1 unit	Fajar harapan, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Fajar Harapan	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
138	EDISON	Sumur Bor/Air bersih untuk RT.03 dan RT.04	Desa Bereng jun, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Bereng Jun	DINAS PEKERJAAN UMUM		✓	
139	EDISON	Pembangunan Box Covert 6 unit	Jl. Negara RT.001, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Bereng Jun	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
140	EDISON	Pembangunan Dreinase pemukiman Desa bereng Jun	Jl. AR. Iman RT.001 dan RT.002, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Bereng Jun	DINAS PEKERJAAN UMUM		✓	

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
141	MADI	Pengaspalan Jalan Kabupaten (Tbg. Mantuhe-Luwuk Tukau)	Desa Luwuk Tukau - Desa Tumbang Mantuhe, Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Luwuk Tukau	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
142	YANTO B. SOEPA	Dam air yang dibangun pada tahun 2009 dan 2010 sudah tidak mampu untuk mengalir optimal ke rumah warga karena sumber air yang mengecil. pada musim kemarau debit air sangat kecil. Tersedia sumber air baru di sungai yang lebih besar di belakang desa.	Jl. Usaha Tani 1 Rt.001 Rw.001, Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tumbang Samui	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
143	YANTO B. SOEPA	Masih terdapat 7 unit bangunan rumah tidak layak huni didesa, rata - rata pemilik bangunan adalah keluarga lansia. tersebar disetiap Rt, baik dari Rt.001 s/d Rt.004, sebagian berada pada tempat rawan banjir.	Rt.001 - Rt.004 , Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tumbang Samui	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
144	YANTO B. SOEPA	Jalan kabupaten antara Tumbang Mantuhe dan Luwuk Tukau sepanjang kurang lebih 20 km masih belum teraspal, sebanyak 9 titik sering mengalami banjir. Bukit langkane yang berada di perbatasan putat duirei dan tumbang samui dan bukit Kalawit di wilayah desa tumbang oroi sebagai bukit tertinggi ke arah manuhing raya sangat licin dilalui pada saat musim hujan.	Tumbang Mantuhe - Luwuk Tukau, Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tumbang Samui	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
145	DARSILO	Jalan Rusak Berat dari Desa Tumbang Mantuhe sampai Desa Luwuk Tukau yang mengakibatkan tergangunya aktivitas masyarakat.	Jl.Lintas Kecamatan Tumbang Talaken-Tehang, Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tumbang Mantuhe	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
146	ANDI LALA, S.Sos	Belum adanya PDAM di wilayah Kelurahan Tehang	Rt. 01 s/d RT 07 Kelurahan Tehang, Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tehang	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
147	ANDI LALA, S.Sos	Pembangunan/perbaikan jalan lingkungan kelurahan	RT.01-09, Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tehang	DINAS PEKERJAAN UMUM		✓	
148	ANDI LALA, S.Sos	Perbaikan/pembangunan Baru DAM air bersih SEI JUMPIT	RT.08-09, Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tehang	DINAS PEKERJAAN UMUM		✓	
149	ANDI LALA, S.Sos	Pembangunan sarana air bersih /PDAM	RT.01-07, Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tehang	DINAS PEKERJAAN UMUM		✓	
150	YERMINAE, S.Pd	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah tidak layak Huni GAKIN 18 Unit	Desa Karason Raya, Kab. Gunung Mas	Tewah	Karason Raya	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		Proposal
151	ANTEL	Pembangunan/Rehabilitasi Gereja GKE PANENGA Desa Teluk Lawah	Jln. Gereja RT. 02, Kab. Gunung Mas	Tewah	Teluk Lawah	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		Survei
152	ANTEL	Pembangunan/Rehabilitasi Gereja GPT MORIA Desa Teluk Lawah	Jln. Lintas RT.02, Kab. Gunung Mas	Tewah	Teluk Lawah	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		Survei
153	ANTEL	Pembangunan/Rehabilitasi Masjid Daaruss Syakirien Desa Teluk Lawah	Jln. Masjid RT. 02, Kab. Gunung Mas	Tewah	Teluk Lawah	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		Survei
154	ANTEL	Pembangunan Balai Kaharingan	Jln. Lintas RT. 02, Kab. Gunung Mas	Tewah	Teluk Lawah	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		Survei
155	YUYU.L.MANIJAE	Bantuan Bedah Rumah tidak layak huni	Desa Sandung Tambun, Kab. Gunung Mas	Tewah	Sandung Tambun	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		Proposal
156	YUYU.L.MANIJAE	Peningkatan Bendungan air Bersih (2 buah)	Sandung Tambun, Kab. Gunung Mas	Tewah	Sandung Tambun	DINAS PEKERJAAN UMUM		✓	

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
157	INDA SARIANA	Pembangunan/Rehap Rumah tidak layak Huni	Sare Rangan, Kab. Gunung Mas	Tewah	Sarerangan	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		Proposal
158	NOOR IFAN SYAH, S.IP, MM	Pengaspalan Jalan Nyai Balau RT 002 Kelurahan Tewah Sepanjang 800 M	Pengaspalan Jalan Nyai Balau RT 002 Kelurahan Tewah, Kab. Gunung Mas	Tewah	Tewah	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
159	NOOR IFAN SYAH, S.IP, MM	Perbaikan Jembatan Jalan Temanggung Kenyapi dengan ukuran 16X4 Wilayah RT 003 Kelurahan Tewah	Jalan Temanggung Kenyapi RT 003 Kelurahan Tewah, Kab. Gunung Mas	Tewah	Tewah	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
160	NOOR IFAN SYAH, S.IP, MM	Perbaikan Jalan Veteran sepanjang 225 Meter	Jalan Veteran wilayah RT 012 Kelurahan Tewah, Kab. Gunung Mas	Tewah	Tewah	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
161	NOOR IFAN SYAH, S.IP, MM	Lanjutan Cor Beton/Pengaspalan Jalan Tugu arah SDN Tewah 1 Tewah dengan ukuran 3X200 Meter	JI Tugu Tewah Wilayah RT 013 kelurahan Tewah, Kab. Gunung Mas	Tewah	Tewah	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
162	NOOR IFAN SYAH, S.IP, MM	Peningkatan jalan Antang Ranggam sepanjang 80 Meter	Jalan antang Ranggam Wilayah RT 015 Kelurahan Tewah, Kab. Gunung Mas	Tewah	Tewah	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
163	NOOR IFAN SYAH, S.IP, MM	Pembangunan Aula Kantor Kelurahan Tewah	Belakang Kantor Lurah Di Kelurahan tewah wilayah RT 009 kelurahan tewah, Kab. Gunung Mas	Tewah	Tewah	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		Survei Lokasi
164	KARDIE	Rahap Atap Dan Flapon Gereja Pandohop Tumbnag Pajangei	RT . 01, Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Pajangei	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
165	DIMAN JADER	Pembangunan 30 Unit WC Yang Akan Diberikan Kepala Masyarakat Desa Sumur Mas	Desa Sumur Mas, Kab. Gunung Mas	Tewah	Sumur Mas	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
166	YEDIERSHEN, SE	Bantuan Bedah Rumah Bagi Keluarga Miskin dan Lansia	Desa Batu Nyapau, Kab. Gunung Mas	Tewah	Batu Nyapau	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		Proposal
167	GALODIE	Penyelesaian Balai Ibadah Kelompok Agama Hindu Kaharingan	Batu Nyiwuh RT. 04, Kab. Gunung Mas	Tewah	Batu Nyiwuh	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
168	SUDIRMAN	Pembukaan Jalan menuju dam Air Bersih dan perluasan Desa sepanjang 3 KM	RT 001, Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		Survei
169	MULYADI	126 KK membutuhkan Air Bersih	Desa Sei Riang, Kab. Gunung Mas	Tewah	Sei Riang	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
170	SURIADI	Belum tersedianya air Bersih di Desa	RT001 Desa Rangan Mihing, Kab. Gunung Mas	Tewah	Rangan Mihing	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		Survei
171	SUDIRMAN	Rehab Rumah Tidak Layak Huni 21 rumah	Tumbang Habaon, Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		Proposal
172	YOPHAE, A.Md	Perlu perbaikan jembatan 10 meter	Jalan Temanggung Pandung RT.07, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
173	YOPHAE, A.Md	Peningkatan jalan Damang batu 117 meter	jalan Damang batu RT.03, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
174	YOPHAE, A.Md	perlu pembuatan jalan TPU KM 2 20 meter	RT.07, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		Jembatan
175	DEHEN	pembangunan jembatan besi/baja sei Bahio	Desa Tumbang Sian, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Sian	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
176	YOPHAE, A.Md	perlunya pembangunan kantor kedadangan Kecamatan Kahayan Hulu Utara 1 unit	Kelurahan Tumbang Miri, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri	DINAS PEKERJAAN UMUM		✓	

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
177	DEHEN	Rehab Rumah Tidak layak Huni sebanyak 20 Unit	Desa Tumbang Sian, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Sian	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		Proposal
178	YULIGISON	Belum adanya air bersih yang layak di minum atau di konsumsi, di sungai kahayan dan pasangon airnya tercemar dan tidak layak di minum atau di konsumsi.	Tumbang Pasangon, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Pasangon	DINAS PEKERJAAN UMUM		✓	
179	BERKAT	masyarakat tidak mammpu membamgun rumah	rt 01 dan rt 02, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Penda Rangas	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		Proposal
180	BERKAT	masyarakar rawan air bersih pada musim hujan maupun kemerau	RT 01 dan RT 02 desa penda rangas, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Penda Rangas	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		Survei
181	IRMANTO	Pembangunan Jalan Baru, Penghubung Dari Jalan Lintas Kabupaten ke arah Jalan Desa, supa akses masyarakat lebih leluasa	Desa Dandang RT 03, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Dandang	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
182	IRMANTO	Rehab Rumah Miskin	Desa Dandang, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Dandang	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		Proposal
183	KARLI	Jalan lintas desa Dandang ke Desa Tumbang Tajungan	Akses Jalan Lintas Desa Dandang ke Desa Tumbang Tajungan belum maksimal sehingga terhambatnya transportasi masyarakat dan sering terjadi kecelakaan, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Tajungan	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
184	KARLI	Banyak rumah masyarakat tidak layak huni	Desa Tumbang Tajungan, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Tajungan	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		Proposal
185	ANDREAS	dalam hal air bersih untuk masyarakat yang kurang layak untuk di konsumsi setiap hari oleh masyarakat desa dan masih banyak masyarakat yang masih menggunakan ari dari sungai	Desa tumbang Hamputung RT 01 dan RT 02, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Hamputung	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
186	CHANDRA S,Pd	Kondisi Jalan Penghubung Desa Karetai Sarian menuju Tumbang Marikoi dalam keadaan rusak berat	Desa Karetai Sarian, Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Karetai Sarian	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
187	CHANDRA S,Pd	Jembatan Gantung penghubung antara Jl. Lintas dengan Desa Karetai Sarian belum ada	Desa Karetai Sarian, Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Karetai Sarian	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
188	BATTU	Pembangunan jembatan Penyebrangan Sungai Posu ke sungai tanoi kayu ulin	Desa Tumbang Posu, Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Posu	DINAS PEKERJAAN UMUM		✓	
189	OBIE, S.Pd	jalan lintas kabupaten masih belum pengerasan dan pengaspalan	Desa Lawang Kanji, Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Lawang Kanji	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
190	SIUN	Pembangunan Jalan Sepanjang 20 Km Tumbang Mahuroi Ke Karetai Sarian	Tumbang Mahuroi - Karetai Sarian, Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Mahuroi	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
191	SIUN	Pembangunan Jalan Sepanjang 60 KM Tumbang Mahuroi Ke Tumbang Marikoi (Ibukota Kecamatan Damang Batu)	Jalan Lintas Tumbang Mahuroi-Tumbang Marikoi, Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Mahuroi	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
192	SIUN	Pembanguna Air Bersih Desa Tumbang Mahuroi	Desa Tumbang Mahuroi, Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Mahuroi	DINAS PEKERJAAN UMUM		✓	

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
193	KASUMA, S.Hut	Pembangunan Fasilitas Air Bersih Kelurahan Tumbang Marikoi	Kelurahan Tumbang Marikoi, Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Marikoi	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
194	HORDIANTO.	Pembuatan Jembatan Gantung 1 Paket (P 60 M dan L 1,5 M)	Desa Tumbang Lapan, Kab. Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Lapan	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
195	SARADIN	peningkatan Jalan Antar Desa	Jalan Lintas Kabupaten Antar Desa, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Koroi	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
196	SARADIN	Masih ada Masyarakat masih tinggal di rumah yang kumuh/tidak layak dihuni.	Jl. Desa Tumbang Koroi, RT. 001, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Koroi	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		Melengkapi berkas
197	ARDIUS, S.Pd	Pembuatan jalan tengah Duhung 1000 m x 4 m	Tumbang Napoi, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Napoi	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		Pokir
198	ARDIUS, S.Pd	Jalan Theo E Ganti (samping Kuburan) 100 x 3 M	Tumbang Napoi, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Napoi	DINAS PEKERJAAN UMUM		✓	
199	ARDIUS, S.Pd	Cor Beton Gang Keluarga RT 04 500 M x 3 m	Tumbang Napoi RT 04, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Napoi	DINAS PEKERJAAN UMUM		✓	
200	ARDIUS, S.Pd	Gang Sepakat 100 m X3 M	RT 03 Tumbang Napoi, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Napoi	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
201	YUNANTO, S.Pd	Perlu adanya peningkatan jalan lintas antar Desa Mangkuhung sekitar 4.500 Meter ke Desa yang lain	Desa Mangkuhung, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Mangkuhung	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
202	YUNANTO, S.Pd	belum optimalnya pembangunan jembatan dan gorong-gorong di wilayah antar desa kecamatan miri manasa	Desa Mangkuhung, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Mangkuhung	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
203	SEMSUHADI	Akses jalan belum beraspal ke jalan kuburan	Desa bontoi, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Bontoi	DINAS PEKERJAAN UMUM		✓	
204	ANTON	Jalan poros antar wilayah mengalami kerusakan yang cukup parah	Tumbang Manyoi, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Manyoi	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
205	SONTO	Peningkatan Jalan Antar Desa Rangan Hiran	Desa Rangan Hiran, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Rangan Hiran	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
206	SONTO	Peningkatan COR BOX Beton Antar Desa Rangan	Desa Rangan Hiran, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Rangan Hiran	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
207	SAGARLI	belum masuknya listrik dan pembangunan jalan yang merata	tumbang hatung, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Hatung	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
208	SUANDI	Peningkatan jalan Desa	Rangan Hiran - Harowu, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Harowu	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
209	SUANDI	Gorong - Gorong Desa	Desa Harowu, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Harowu	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
210	SUANDI	Jembatan	Desa Harowu, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Harowu	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
211	NAHPA	Bantuan Perbaikan Jalan	Desa Tumbang masukih, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Masukih	DINAS PEKERJAAN UMUM	✓		
212	BENNY RIANTO. A.Md	Pembangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Simpang 4 jalan Trans Kabupaten - Sepang di Desa Tumbang Empas	RT.04/RT.01, Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Tumbang Empas	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	✓		

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
213	DARMADI	usul ganti rugi lahan tempat Pembuangan Sampah di Kelurahan Tumbang Rahuyan Tumbang rahuyan Seluas 2 Hektar an. Dibora ,nilai ganti rugi yang di minta Rp. 80.000.000 (2 hektar)	Kelurahan Tumbang Rahuyan ,jalur Kelompok Tani Kapakat Rt.07 Rw.03, Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	✓		

Diproses170

Ditolak43

Total213

Jumlah Usulan213

Diproses170

Ditolak43

REKAP INPUT DU RKP DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2026

BIDANG KESEHATAN :

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
1	JUANG	1.Pagar Pukesmas Sepang Simin (1) 2.Ambulance (1) 3.Jembatan Pukesmas (1) 4.Buku KKA (Kartu Kembang Anak) (300 buku) 5.Timbangan (2 buah) 6.BKB KIDS (alat bermain anak) (1 set) 7.Pagar Pustu Antang Taoi 8.Rehap Atap Pustu Antang Taoi	Kelurahan Sepang Simin, Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Sepang Simin	DINAS KESEHATAN DAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	✓		Point 1. ditolak
2	LINSON	Penambahan Tenaga Medis (Perawat) dengan Volume 1 Orang dalam rangka Masyarakat/ Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Jln karuhei Desa Rabauh Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Rabauh	DINAS KESEHATAN	✓		
3	LINSON	Pengadaan Motor Dinas untuk Pelayanan Kesehatan 1 Buah dalam rangka Masyarakat/ Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Jln karuhei Desa Rabauh Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas , Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Rabauh	DINAS KESEHATAN	✓		
4	BRAHIM	Belum tersedianya air bersih di pustu MCK	Desa Tampelas RT 02 RW 01, Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Tampelas	DINAS KESEHATAN	✓		
5	BRAHIM	Belum adanya palng [papan nama di pustu Desa Tampelas	Desa Tampelas RT 02/RW 01, Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Tampelas	DINAS KESEHATAN	✓		
6	TITI	Pembuatan Tandon Air, Pompa Air dan PIPANISASI Untuk Pustu Desa Tuyun	Jl. Lintas Kurun - Sepang RT.001 Desa Tuyun, Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Tuyun	DINAS KESEHATAN	✓		
7	TITI	Pembuatan/Perbaikan Sepitank WC Pustu Tuyun	Jl. Lintas Kurun - Sepang RT.001, Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Tuyun	DINAS KESEHATAN	✓		
8	TITI	Pembuatan Jembatan Box Pustu Tuyun	Jl. Lintas Kurun - Sepang RT.001, Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Tuyun	DINAS KESEHATAN	✓		
9	TITI	pembangunan pagar Pustu Tuyun	Jl. Lintas Kurun - Sepang RT.001 Desa Tuyun, Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Tuyun	DINAS KESEHATAN	✓		
10	WILNA ELITA, M.Pd	Penambahan ruang TB dan Penataan Halaman/taman Puskemas Panjang 4 Meter Lebar 3 Meter	Pukesmas Kurun Jl. Tjilik Riwut, Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	DINAS KESEHATAN	✓		
11	RODI	belum adanya pagar untuk bangunan pustu di desa tumbang tariak, untuk itu demi keamanan dan ketertiban di bidang kesehatan kami mohon agar dinas terkait dapat membangun pagar di pustu desa tumbang tariak	jalan lintas rt.01 desa tumbang tariak , Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Tariak	DINAS KESEHATAN		✗	Terakomodir 2025
12	RODI	kurangnya kelengkapan penunjang pekerjaan di pustu, untuk itu kepada dinas terkait dapat membantu dalam pengadaan Komputer (PC, Printer, meja kerja) sebagai salah satu upaya membantu pegawai pustus optimal dalam berkerja.	jalan lintas rt.01 desa tumbang tariak, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Tariak	DINAS KESEHATAN		✗	
13	RODI	demi mendukung pelayanan bagi petugas kesehatan dalam melaksanakan tugas diluar dan di dalam daerah maka kami usulkan motor dinas pustu	pustu desa tumbang tariak jalan. lintas rt.01 desa tumbang tariak, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Tariak	DINAS KESEHATAN	✓		

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
14	DEDIYANTO	Tidak tersedianya Tanah Kosong Disekitar Pustu, Mengakibatkan tidak bisa memperluas bangunan dan tidak adanya tempat parkir serta tidak adanya halaman di areal pustu, oleh sebab itu Pihak Pustu Desa Petak Bahndang Minta untuk di REALOKASI ke RT.003 Tanahnya sudah di Sediakan Oleh Desa	Desa Petak Bahandang RT.006/RW.002, Kab. Gunung Mas	Kurun	Petak Bahandang	DINAS KESEHATAN		✗	
15	WILNA ELITA, M.Pd	Pengadaan Lap Top, 10 Unit dan PC Komputer 5 Unit	Pukesmas Kurun, Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	DINAS KESEHATAN		✗	
16	AGUS SEFFENI, S.Sos	Tiang Bendera Puskesmas	Kel. TTA / RT. 02, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Anjir	DINAS KESEHATAN		✗	
17	WARTEL S. SINDI	Timbunan dan siring halaman Puskesmas, Puskesmas yang tidak memiliki halaman yang layak karena longsor dan berlubang	Desa Tanjung Riu, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tanjung Riu	DINAS KESEHATAN		✗	
18	DONI	Kebutuhan mobiler PUSTU Desa Hurung Bunut Berupa Meja, Kursi dan sarana prasarana lainnya. Untuk menopang pekerjaan Tenaga Kesehatan di Pustu yang masih kurang kebutuhannya. Maka perlu adanya pengadaan mobiler untuk Penunjang Pekerjaan tenaga kesehatan di desa Hurung Bunut.	Jalan Lintas Provinsi RT. 05 Desa Hurung Bunut Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas., Kab. Gunung Mas	Kurun	Hurung Bunut	DINAS KESEHATAN	✓		
19	DONI	Kebutuhan PUSTUKID Desa Hurung Bunut dan sarana prasarana lainnya. Untuk menopang pekerjaan Tenaga Kesehatan di Pustu yang masih kurang kebutuhannya. Maka perlu adanya pengadaan Pustukid untuk Penunjang Pekerjaan tenaga kesehatan di desa Hurung Bunut.	Jalan Lintas Provinsi RT. 05 Desa Hurung Bunut Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas., Kab. Gunung Mas	Kurun	Hurung Bunut	DINAS KESEHATAN		✗	Terakomodir Anggaran 2025
20	BERJOALDI, S.Sos.,M.A.P	Belum tersedianya lahan tempat parkir motor pustu yang memadai. kebutuhan Panjang 20 Meter Lebar 15	Desa Teluk Nyatu RT.03, Kab. Gunung Mas	Kurun	Teluk Nyatu	DINAS KESEHATAN		✗	
21	BERJOALDI, S.Sos.,M.A.P	Belum memadainya drainase /gorong-gorong di area pustu, dengan kebutuhan Panjang 20 Meter Lebar 70 cm	Desa Teluk Nyatu, Kab. Gunung Mas	Kurun	Teluk Nyatu	DINAS KESEHATAN	✓		
22	PANCASONA, S.Pd	kurang memadainya fasilitas kerja pegawai Puskesmas Tewang Pajangan sehingga perlu penambahan mobiler meja kursi	Jln. Pelita, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tewang Pajangan	DINAS KESEHATAN	✓		
23	PANCASONA, S.Pd	Kurang memadainya fasilitas kerja pegawai Puskesmas Desa Tewang Pajangan sehingga diperlukan pengadaan 5 set komputer dan printer untuk menunjang pekerjaan	Jln. Pelita, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tewang Pajangan	DINAS KESEHATAN		✗	
24	PANCASONA, S.Pd	Sering terjadi pemadaman listrik pada jam kerja dan mengganggu pelayanan kesehatan bagi masyarakat sehingga perlu generator/genset di Puskesmas Tewang Pajangan	Jln. Pelita, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tewang Pajangan	DINAS KESEHATAN	✓		
25	PANCASONA, S.Pd	Gedung Puskesmas Desa Tewang Pajangan yang lama tidak memadai untuk puskesmas rawat inap sehingga diperlukan pembangunan Gedung Puskesmas baru di lokasi yang lebih luas dan dekat jalan raya (tanah sudah disiapkan Desa)	Jln. Pelita, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tewang Pajangan	DINAS KESEHATAN		✗	
26	IDEN	Halaman Pustu keadaanya kurang baik untuk tempat parkir kendaraan karena tanahnya masih bergelombang tidak rata perlu penataan halaman Pustu untuk kenyamanan petugas dan orang yang datang berobat seluas 390 M2.	Pustu Desa Tumbang Lampahung, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Lampahung	DINAS KESEHATAN	✓		

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
27	WANTO	Permasalahan aksesibilitas pelayanan kesehatan desa dan pemenuhan layanan kesehatan yang memadai sehingga perlu Pembangunan Pustu di Desa Tumbang Manyangan. Sudah dipersiapkan lahan.	RT. 03 Desa Tumbang Manyangan, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Manyangan	DINAS KESEHATAN	✓		
28	TAUFIK, SP	Peralatan Komputer di Puskesmas Tumbang Jutuh yang masih minim sehingga perlu Pengadaan Komputer PC sebanyak 7 Unit.	JALAN CILIK RIWUT KELURAHAN JAKATAN RAYA, Kab. Gunung Mas	Rungan	Jakatan Raya	DINAS KESEHATAN		✗	
29	TAUFIK, SP	Beban Administrasi yang semakin banyak sedangkan peralatan printer sudah mengalami kerusakan sehingga perlu Pengadaan Printer sebanyak 7 Buah.	JALAN CILIK RIWUT KELURAHAN JAKATAN RAYA, Kab. Gunung Mas	Rungan	Jakatan Raya	DINAS KESEHATAN		✗	
30	JHON BENY MENTENG	1. Pengadaan Tenaga Kesehatan Bidan/Perawat 2 Orang	RT.02/RW.01 Desa Luwuk Kantor, Kab. Gunung Mas	Rungan	Luwuk Kantor	DINAS KESEHATAN	✓		SK Penempatan Pustu oleh Kadis Kesehatan
31	DARGO, A.Md.Kep	Belum Tersediannya Tenaga Medis/Kesehatan di desa Bereng Malaka	Desa Bereng Malaka, Kab. Gunung Mas	Rungan	Bereng Malaka	DINAS KESEHATAN	✓		
32	IPNO I	REHAB PUSTU DESA TUMBANG BARINGEI	Desa Tumbang Baringei, Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Baringei	DINAS KESEHATAN	✓		
33	GELVIA, S.Pd	Belum adanya Dokter gigi dan Dental Set	Kelurahan Rabambang , Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Rabambang	DINAS KESEHATAN	✓		
34	GELVIA, S.Pd	Pengadaan Mobiler Puskesmas	Upt. Puskesmas Rabambang, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Rabambang	DINAS KESEHATAN	✓		
35	NELSON	Kurangnya Moubiler Postu	Desa Jalemu Raya, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Jalemu Raya	DINAS KESEHATAN	✓		
36	SALUNDIK A. SAMAT	Membutuhkan 1 tenaga medis yaitu Perawat Desa	Desa Jalemu Masulan, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Jalemu Masulan	DINAS KESEHATAN	✓		
37	SALIE	tersediannya pasilitas kesehatan, pembangunan pustus set di desa batu puter sangat membantu masyarakat jika adanya bangunan pustu yang memadai untuk masyarkat desa dapat menjakau tidak harus keluar desa untuk mendapatkan atau ingin berobat bangunan satu set lebar 8 m panjang 8 m	RT 1 DESA BATU PUTER, Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Batu Puter	DINAS KESEHATAN	✓		
38	EFFANDY, SH	Penambahan Bidan/Tenaga kesehatan PNS 1 orang	Desa Tumbang Tuwe, Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Tuwe	DINAS KESEHATAN	✓		SK. Kadis Kesehatan
39	DARMADI	pembangunan Baru Rumah Dinas Paramedis wilayah puskesmas Tumbang Rahuyan	kelurahan Tumbang Rahuyan, Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	DINAS KESEHATAN	✓		
40	HARMUJI	Tambah Tenaga Kesehatan(2 ORANG)	RT. 02. RW. 01, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Bangun Sari	DINAS KESEHATAN	✓		SK. Kadis
41	GUSTI RAY NOVHANDA, S.Pi, M.Si	KEKURANGAN KURSI DI RUANG PERTEMUAN PUSKESMAS TUMBANG TALAKEN, SEHINGGA DI PERLUKAN 100 BUAH KURSI MEREK CHITOSE UNTUK MENUNJANG PELAYANAN DAN RAPAT RAPAT DI PUSKESMAS TUMBANG TALAKEN	JL. NEGARA RT 001/ RW 001 KELURAHAN TUMBANG TALAKEN KECAMATAN MANUHING KABUPATEN GUNUNG MAS, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Tumbang Talaken	DINAS KESEHATAN	✓		
42	YUEL,S.Kep.,Ns	Puskesmas Pembantu di Desa Tumbang Jalemu membutuhkan pengadaan meubelair dan perlengkapan alat kesehatan	Jalan Desa, RT. 002, RW. 001, Desa Tumbang Jalemu, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Tumbang Jalemu	DINAS KESEHATAN		✗	
43	SUKMADADY, S.Sos (Pj.KADES)	Belum Terpenuhi Tenaga Kesehatan di Desa	Jl. Negara Km. 128 Desa Belawan Mulia, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Belawan Mulia	DINAS KESEHATAN		✗	Bidan
44	RAWAN, S.Pd.,MM (Pj.KADES)	pengadaan alat kesehatan dan perlengkapan di desa fajar harapan 1 paket	fajar harapan, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Fajar Harapan	DINAS KESEHATAN		✗	Aplikasi Shopee

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
45	RAWAN, S.Pd.,MM (Pj.KADES)	penempatan tenaga kesehatan di desa fajar harapan 2 orang	fajar harapan, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Fajar Harapan	DINAS KESEHATAN		✗	Bidan, Perawat
46	MADI	Penambahan Tenaga Perawat	Jl. Tarik Asang No. RT.003/ RW. 001 Desa Luwuk Tukau, Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Luwuk Tukau	DINAS KESEHATAN	✓		
47	DARSILO	Belum tersedianya tenaga kesehatan (Bidan) untuk PUSKESDES Desa Tumbang Mantuhe	RT 001, Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tumbang Mantuhe	DINAS KESEHATAN	✓		
48	RAMULEN	Perlu Adanya Penambahan Tenaga Medis (Nakes) sebanyak 2 orang	Desa Tumbang Oroi, Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tumbang Oroi	DINAS KESEHATAN	✓		
49	ANTEL	Pembangunan Gedung PUSTU Desa Teluk Lawah	Jln. Lintas RT. 02 , Kab. Gunung Mas	Tewah	Teluk Lawah	DINAS KESEHATAN	✓		
50	EROE	Tidak amannya lingkungan puskesmas pembantu desa Tanjung untung	Desa Tanjung Untung , Kab. Gunung Mas	Tewah	Tanjung Untung	DINAS KESEHATAN	✓		
51	YUYU.L.MANIJAE	Pengadaan obat-obatan Postu	Sandung Tambun, Kab. Gunung Mas	Tewah	Sandung Tambun	DINAS KESEHATAN		✗	
52	YUYU.L.MANIJAE	Petugas Kesehatan dokter ,Perawat dan Bidan.	Sandung Tambun, Kab. Gunung Mas	Tewah	Sandung Tambun	DINAS KESEHATAN		✗	
53	YUYU.L.MANIJAE	Pelatihan /edukasi Bidan Kampung	Sandung Tambun, Kab. Gunung Mas	Tewah	Sandung Tambun	DINAS KESEHATAN		✗	
54	YUYU.L.MANIJAE	Pelatihan Kader-Kader Posyandu	Sandung Tambun, Kab. Gunung Mas	Tewah	Sandung Tambun	DINAS KESEHATAN		✗	
55	YEDIERSHEN, SE	Laptop Tenaga Kesehatan Desa, Alat Pengukur Tensi Digital Puskesmas, Printer yang bisa Potocopy dan ATK Operasional Tenaga Kesehatan.	RT.002 Desa Batu Nyapau, Kab. Gunung Mas	Tewah	Batu Nyapau	DINAS KESEHATAN		✗	
56	KARDIE	Penyediaan Lemari Arsip Filing Kabinet Untuk Postu Tumbang Pajangei	RT. 02 , Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Pajangei	DINAS KESEHATAN	✓		
57	KARDIE	Pengadaan Kursi Ruang Tunggu untuk Postu Tumbang Pajangei	RT. 02, Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Pajangei	DINAS KESEHATAN	✓		
58	ISASKAR	Cor Halaman Pustu (Desa Upon Batu) Uk 12 x 8 Meter	Desa Upon Batu, Kab. Gunung Mas	Tewah	Upon Batu	DINAS KESEHATAN	✓		
59	GALODIE	Rehab Gedung Pustu	Batu Nyiwuh, Kab. Gunung Mas	Tewah	Batu Nyiwuh	DINAS KESEHATAN	✓		
60	GALODIE	Laptop untuk Nakes	Batu Nyiwuh , Kab. Gunung Mas	Tewah	Batu Nyiwuh	DINAS KESEHATAN		✗	
61	GALODIE	Printer/Copy untuk Nakes	Batu Nyiwuh , Kab. Gunung Mas	Tewah	Batu Nyiwuh	DINAS KESEHATAN		✗	
62	SUDIRMAN	Pembangunan Gedung Pustu	RT 001, Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	DINAS KESEHATAN	✓		
63	MULYADI	Pengadaan Peralatan Medis/Alat Kesehatan	Desa Sei Riang, Kab. Gunung Mas	Tewah	Sei Riang	DINAS KESEHATAN	✓		
64	MULYADI	Pembangunan Gedung Pustu di Jalur Lintas 5 x 6 Meter	Desa Sei Riang, Kab. Gunung Mas	Tewah	Sei Riang	DINAS KESEHATAN	✓		
65	YOPHAE, A.Md	Rehap Rumah Dinas Paramedis 1 unit	RT.004, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri	DINAS KESEHATAN	✓		
66	DEHEN	Tambah Ruang PUSTU	Desa Tumbang Sian, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Sian	DINAS KESEHATAN		✗	Ditangguhkan
67	YOPHAE, A.Md	Perlu pengadaan kendaraan Pusling Roda 2 Sebanyak 7 unit	Puskesmas Tumbang Miri RT.04, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri	DINAS KESEHATAN	✓		1 unit
68	YOPHAE, A.Md	perlunya pengadaan Prasarana Listrik (Gmerator Set) Sebanyak 2 unit	Puskesmas Tumbang Miri, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri	DINAS KESEHATAN	✓		
69	YOPHAE, A.Md	perlunya Pengadaan AC untuk Ruang IGD dan Ruang VK	Puskesmas Tumbang Miri, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri	DINAS KESEHATAN	✓		
70	YOPHAE, A.Md	Perlu pengadaan kursi Kerja (Meubelair) 20 unit	PUSKESMAS TUMBANG MIRI, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri	DINAS KESEHATAN	✓		

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
71	YOPHAE, A.Md	perlu pengadaan meja kerja (meubelair) 15 unit	Puskesmas Tumbang Miri, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri	DINAS KESEHATAN	✓		
72	YOPHAE, A.Md	perlu pengadaan Bed pasien Rawat Inap 11 unit	Puskesmas Tumbang Miri, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri	DINAS KESEHATAN	✓		
73	YOPHAE, A.Md	Perlu Pembangunan akses Jalan menuju kamar mayat 1 unit	Puskesmas Tumbang Miri, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri	DINAS KESEHATAN	✓		
74	YOPHAE, A.Md	perlu Pembangunan Tembok/pagar Puskesmas 550 meter	Puskesmas Tumbang Miri, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri	DINAS KESEHATAN	✓		
75	YOPHAE, A.Md	Perlu Pengadaan Alat THT set 1 unit	puskesmas Tumbang Miri, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri	DINAS KESEHATAN	✓		
76	YOPHAE, A.Md	Perlu pengadaan alat set Pemeriksaan umum 2 unit	Puskesmas, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri	DINAS KESEHATAN	✓		
77	YULIGISON	Hari hujan halaman depan Pustu tergenang air dan becek perlu dicor, dan WC tidak layak di pakai perlu di rehab	Tumbang Pasangon, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provisini Kalimantan Tengah, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Pasangon	DINAS KESEHATAN	✓		
78	IRMANTO	Penenganan Dalam Hal Stunting meliputi pengarahsan, pelatihan, dan Bimbingan	Desa Dandang RT 02, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Dandang	DINAS KESEHATAN	✓		
79	MELKY SUDIARJO	Rumah pustu Rusak tidak dapat di fungsikan untuk masyarakat	Desa tumbang Ponyoi, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Ponyoi	DINAS KESEHATAN	✓		
80	CUMBIE, AMd.Kep	Tidak memadainya atau Tidak layak pakai Puskesmas Pembantu (Pustu) yang ada di Desa Tumbang Anoi	Desa Tumbang Anoi, Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Anoi	DINAS KESEHATAN	✓		
81	SIUN	Penambahan Dokter Anak, Dokter Gigi, Bidan dan Perawat	Desa Tumbang Mahuroi, Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Mahuroi	DINAS KESEHATAN		✗	
82	KASUMA, S.Hut	Penataan Halaman dan Pagar Puskesmas Kelurahan Tumbang Marikoi	Kelurahan Tumbang Marikoi, Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Marikoi	DINAS KESEHATAN	✓		
83	KASUMA, S.Hut	Penambahan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Puskemas Kelurahan Tumbang Marikoi	Kelurahan Tumbang Marikoi, Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Marikoi	DINAS KESEHATAN	✓		
84	HORDIANTO.	Penambahan Moubiler Pustu 1 Paket	Desa Tumbang Lapan, Kab. Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Lapan	DINAS KESEHATAN	✓		
85	HORDIANTO.	Motor Dinas Pegawai Pustu 1 Unit	Desa Tumbang Lapan, Kab. Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Lapan	DINAS KESEHATAN	✓		
86	HORDIANTO.	Alat Medis dan Alat Kebidanan Pustu 1 Paket	Desa Tumbang Lapan, Kab. Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Lapan	DINAS KESEHATAN	✓		
87	YUNANTO, S.Pd	Penepatan 2 Orang tenaga kesehatan/Perawat	Desa Mangkuhung, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Mangkuhung	DINAS KESEHATAN	✓		
88	TOBIE U. JIRAU	Petugas Kesehatan 1 Orang	Desa Tumbang Siruk, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Siruk	DINAS KESEHATAN	✓		
89	ANTON	Tidak ada Tenaga Kesehatan Perawat di Desa menjadi salah satu keterbatasan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, sehingga sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan fasilitas kesehatan di Desa Tumbang manyoi.	Desa Tumbang manyoi, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Manyoi	DINAS KESEHATAN	✓		
90	ANTON	Tidak ada tenaga kesehatan Bidan menjadi salah satu keterbatasan dan kesulitan bagi masyarakat desa Tumbang Manyoi khususnya bagi ibu hamil yang ingin mendapatkan fasilitas kesehatan	Tumbang Manyoi, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Manyoi	DINAS KESEHATAN	✓		
91	ANTON	Pihak Puskesmas wilayah Tumbang Masukih mengusulkan moubiler meja untuk bangunan pustu baru di Desa Tbg Manyoi sebanyak 5 buah	Tumbang Manyoi, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Manyoi	DINAS KESEHATAN	✓		

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
92	ANTON	Belum adanya bangunan Pustu mempengaruhi banyaknya kebutuhan terhadap fasilitas moubiler khususnya kursi pustu sebanyak 20 buah	Tumbang Manyoi, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Manyoi	DINAS KESEHATAN	✓		
93	ANTON	Belum adanya bangunan Pustu mempengaruhi banyaknya kebutuhan terhadap fasilitas medis sebagai sarana prasarana Pustu khususnya Alat Medis Lengkap (1 Set)	Tumbang Manyoi, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Manyoi	DINAS KESEHATAN	✓		
94	ANTON	Belum adanya bangunan Pustu mempengaruhi banyaknya kebutuhan terhadap fasilitas medis sebagai sarana prasarana Pustu khususnya Bidan Kit (1 Set)	Tumbang Manyoi, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Manyoi	DINAS KESEHATAN	✓		
95	ANTON	Belum adanya bangunan Pustu mempengaruhi banyaknya kebutuhan terhadap fasilitas Listrik sebagai sarana prasarana Pustu khususnya PLTS 1000 Watt	Tumbang Manyoi, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Manyoi	DINAS KESEHATAN	✓		
96	SONTO	Pengadaan PLTS (100 -200 Watt) Poskesdes	Desa Rangan Hiran, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Rangan Hiran	DINAS KESEHATAN	✓		
97	SONTO	Peralatan Nakes (Peralatan Perawat dan Bidan)	Desa Rangan Hiran, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Rangan Hiran	DINAS KESEHATAN	✓		
98	SONTO	Penambahan Mobiler (Lemari) Poskesdes	Desa Rangan Hiran, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Rangan Hiran	DINAS KESEHATAN	✓		
99	SONTO	Penambahan Mobiler (Meja, Kursi) Poskesdes	Rangan Hiran, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Rangan Hiran	DINAS KESEHATAN	✓		
100	SUANDI	Tenaga Kesehatan	Pustu Desa Harowu, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Harowo	DINAS KESEHATAN	✓		
101	SUANDI	Peralatan Mobiler Kesehatan	Pustu Desa Harowu, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Harowo	DINAS KESEHATAN	✓		

Diproses
76

Ditolak
25

Total
101

REKAP INPUT DU RKP DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2026

BIDANG PEREKONOMIAN :

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
1	DIHING,SE	Pengadaan 5000 Bibit Sawit dan Pupuk	Jalan Lintas Provinsi RT.06/RW.02 Desa Sepang Kota, Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Sepang Kota	DINAS PERTANIAN		✗	
2	MEMET HARYANTO, S.Sos (Pj.KADES)	MOBILER GPDI 1 PAKET	GPDI DESA PAMATANG LIMAU RT.002/RW.001, Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Pamatang Limau	SEKRETARIAT DAERAH		✗	
3	MEMET HARYANTO, S.Sos (Pj.KADES)	RUMAH PASTORI GPDI 1 PAKET	GPDI DESA PAMATANG LIMAU RT.002/RW.001, Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Pamatang Limau	SEKRETARIAT DAERAH		✗	
4	MEMET HARYANTO, S.Sos (Pj.KADES)	OPTIMALISASI CETAK SAWAH KELOMPOK TANI HIYUT PERMAI 1 PAKET	DESA PAMATANG LIMAU RT.002/RW.001, Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Pamatang Limau	DINAS PERTANIAN	✓		Buat Proposal
5	MEMET HARYANTO, S.Sos (Pj.KADES)	PENINGKATAN BIBIT PADI DAN PUPUK KELOMPOK TANI HIYUT PERMAI 1 PAKET	DESA PAMATANG LIMAU RT.002/RW.001, Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Pamatang Limau	DINAS PERTANIAN	✓		
6	MEMET HARYANTO, S.Sos (Pj.KADES)	PENGADAAN BIBIT SAYUR, JAGUNG MANIS, KACANG, LOMBOK, TERONG, TOMAT DAN PUPUK SERTA PESTISIDA GAPOKTAN RIAM PENDEM 1 PAKET	DESA PAMATANG LIMAU RT.001/RW.001 DAN RT.002/RW.001, Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Pamatang Limau	DINAS PERTANIAN	✓		
7	SIGO	Peningkatan Jalan Sawah dengan volume 1500 Meter, Karena tidak layak untuk dilewati roda dua atau roda empat untuk pergi ke sawah atau ladang	JL Bukit Putan RT 04 Desa Tewai Baru, Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Tewai Baru	DINAS PERTANIAN		✗	
8	JUANG	1.Bibit Buah-buahan (500 buah) 2.Bibit Ikan (1000) 3.Ternak Sapi (25 ekor) 4.Ternak Babi (25 ekor) 5.Ternak Ayam Broiler (200 ekor)	Kelurahan Sepang Simin, Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Sepang Simin	DINAS PERTANIAN	✓		Diterima bibit buah-buahan saja
9	SIGO	Penggadaan Bibit Babi dengan Volume 75 Ekor untuk kelompok Tani Desa Tewai Baru	Desa Tewai Baru, Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Tewai Baru	DINAS PERTANIAN		✗	
10	SIGO	Penggadaan Bibit Sapi dengan Volume 23 Ekor untuk Kelompok Tani	Desa Tewai Baru, Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Tewai Baru	DINAS PERTANIAN		✗	
11	SIGO	Penggadaan Bibit Ayam Petelor dengan Volume 1000 Ekor untuk kelompok Tani	Desa Tewai Baru, Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Tewai Baru	DINAS PERTANIAN		✗	
12	SIGO	Penggadaan Bibit Ayam Kampung dengan Volume 1000 Ekor Untuk Kelompok Tani	Desa Tewai Baru, Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Tewai Baru	DINAS PERTANIAN		✗	

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
13	MEMET HARYANTO, S.Sos (Pj.KADES)	PENGADAAN BIBIT SAPI GAPOKTAN RIAM PENDEM 20 EKOR	DESA PAMATANG LIMAU RT.001/RW.001 RT.002/RW.001, Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Pamatang Limau	DINAS PERTANIAN		✗	
14	MEMET HARYANTO, S.Sos (Pj.KADES)	PENGADAAN BIBIT TERNAK BABI GAPOKTAN RUAM PENDEM 25 EKOR	DESA PAMATANG LIMAU RT.001/RW.001 RT.002/RW.001, Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Pamatang Limau	DINAS PERTANIAN		✗	
15	MEMET HARYANTO, S.Sos (Pj.KADES)	PENGADAAN BIBIT AYAN PETELOR DAN PAKAN 2000 EKOR / KELOMPOK	DESA PAMATANG LIMAU RT.001/RW.001 RT.002/RW.001, Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Pamatang Limau	DINAS PERTANIAN		✗	
16	LINSON	Peningkatan Jalan Kelompok Tani dengan Volume 6 m x 1600 m	Jln Lintas Rt 3 Desa Rabauh, Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Rabauh	DINAS PERTANIAN		✗	
17	LINSON	Tower Signal dengan Volume 1 Paket Desa Rabauh karena kesulitan mendapatkan signal dalam tugas pekerjaan Digital dan Informasi	Rt. 3 Desa Rabauh Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Rabauh	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		✗	Sudah masuk usulan pembangunan BTS pada gelombang 2 Thn 2023 (Alasan OPSEL : Belum berpotensi secara bisnis plan)
18	LINSON	Bantuan Bibit Kambing 15 Pasang untuk Kelompok Tani	Desa Rabauh Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Rabauh	DINAS PERTANIAN		✗	
19	LINSON	Bantuan Bibit Sapi dengan Volume 20 Ekor untuk meningkatkan kapasitas kualitas Kelompok Tani	Desa Rabauh Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Rabauh	DINAS PERTANIAN		✗	
20	MALIS IPPUN	Pelatihan atau kursus bagi Ibu - ibu dan Pemuda remaja (Menjahit (5 org) Tata Rias (5 org) dan Otomotif (5 org)	Desa Tanjung karitak, Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Tanjung Karitak	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	✓		
21	MALIS IPPUN	Banytuan Bibit Anakan Sapi (20 ekor)	Desa Tanjung Karitak, Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Tanjung Karitak	DINAS PERTANIAN		✗	
22	LINSON	Bantuan Bibit Ikan Lele Jumbo dengan Volume 15000 Ekor untuk Masyarakat dan Kelompok Tani	Desa Rabauh Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas , Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Rabauh	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	✓		
23	LINSON	Pelatihan Tata Rias pada Kelompok Perempuan dengan Volume 1 Kegiatan	Desa Rabauh pada Kelompok Perempuan , Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Rabauh	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	✓		
24	LINSON	Pelatihan Komputer kepala Masyarakat dengan Volume 1 Kelompok (20 Orang)	Desa Rabauh kepada Masyarakat , Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Rabauh	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	✓		Jlh peserta dikursi max. 10 org

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
25	BRAHIM	masih kurangnya perlengkapan belajar di TPA masjid AtTaqwa di Desa Tampelas (meubilier TPA (sound system, meja,kursi dan pla[on	Desa Tampelas RT 01 RW 01, Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Tampelas	SEKRETARIAT DAERAH		✗	
26	BRAHIM	masih beceknya ja;an didepan rumah balai kaharingan Desa Tampelas yang apabila hujan selalu becek dan licin sehingga perlu pengecoran halaman di tempat ibadah tersebut	Desa Tampelas RT02/RW 01, Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Tampelas	SEKRETARIAT DAERAH	✓		
27	BRAHIM	perlunya pembangunan pagar di gereja GKE Desa Tampelas	Desa Tampelas RT 01 RW 01, Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Tampelas	SEKRETARIAT DAERAH		✗	
28	INDRA LESMANA, S.AN	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Desa Rangan Tate, Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Rangan Tate	DINAS PERTANIAN	✓		Bibit durian, Proposal kelompok
29	BENNY RIANTO. A.Md	Pemasangan Listrik Penerangan Jalan 20 Unit	RT.01 - RT.04, Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Tumbang Empas	SEKRETARIAT DAERAH		✗	
30	PENDI	Belum adanya pendopo dan perlunya pemasangan listrik diwilayah pemakaman Umum Desa Dahian Tambuk	Jalan Pintar Harati RT.05 Desa Dahian Tambuk, Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Dahian Tambuk	SEKRETARIAT DAERAH		✗	
31	PENDI	Perlunya Bantuan ternak anak Ayam dan Bibit tanaman Buah-buahan untuk Masyarakat	Desa Dahian Tambuk, Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Dahian Tambuk	DINAS PERTANIAN	✓		Acc Bibit Buah-buahan
32	PENDI	belum adanya bantuan peralatan UMKM Untuk PKK dan ibu-ibu kader di desa	Desa Dahian Tambuk, Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Dahian Tambuk	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		✗	Lebih spesifik
33	PENDI	perlunya pelatihan pengkoperasian untuk kalangan anak-anak muda di desa	DesaDahian Tambuk, Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Dahian Tambuk	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		✗	
34	PENDI	perlunya bantuan bibit ikan dan pakan untuk menunjang produktifitas kegiatan masyarakat desa	Desa Dahian Tambuk, Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Dahian Tambuk	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN		✗	
35	PENDI	perlunya Pemasangan Listrik di wilayah Pemakaman Umum Desa	jalan pintar harati RT.05 desa Dahian Tambuk, Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Dahian Tambuk	SEKRETARIAT DAERAH		✗	
36	WILNA ELITA, M.Pd	Pembuatan nama Papan Plang nama jalan	RT. 14 / RW. 002, Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	✓		
37	RODI	saat melaksanakan kegiatan ibadah hari-hari besar keagamaan selalu menyewa sound system, untuk itu kami mohon dengan dinas terkait untuk dapat mengadakan pengadaan sound system untuk gereja GKE Gloria Tumbang Tariak	jalan lintas rt.03 desa tumbang tariak, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Tariak	SEKRETARIAT DAERAH	✓		

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
38	RODI	keterbatasan jaringan telekomunikasi didesa tumbang tariak sangan berdampak sekali untuk masyarakat, dimana jaringan internet sekarang ini merupakan satu kebutuhan masyarakat untuk meng akses informasi publik, seperti layanan kesehatan informasi pendidikan dll. di desa tumbang tariak akses internet sangat buruk di banding desa-desa tetangga, untuk itu kami mohon kepada dinas kominfo bisa memperhatikan akses jaringan di desa kami dengan mendirikan menara BTS, atau jaringan kabel optik	desa tumbang tariak, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Tariak	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	✓		Akan diusulkan ke Kementerian Komunikasi dan Digital, agar dapat dilakukan pembangunan BTS di Desa Tumbang Tariak
39	RODI	di desa tumbang tariak mayoritas penduduk dengan berternak, dan demi meningkatkan taraf hidup masyarakat kami usulkan bantuan ternak bibit babi dan sapi	desa tumbang tariak, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Tariak	DINAS PERTANIAN		✗	
40	WILNA ELITA, M.Pd	Bibit Sayur, Bibit buah dan Bibit ternak Ayam	RT. 001 Kurun Hulu, Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	DINAS PERTANIAN	✓		Bibit ayam ditolak
41	WILNA ELITA, M.Pd	1.Bibit ternak; Ayam,Babi.Sapi 2.Bibit pertanian: Sayur-Sayuran Lengkap	Wilayah RT. 002, Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	DINAS PERTANIAN	✓		Bibit ternak ditolak, Proposal
42	WILNA ELITA, M.Pd	Pengadaan bibit Ternak; Ayam,Babi Sapi	Lokasi RT.06, Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	DINAS PERTANIAN		✗	
43	WILNA ELITA, M.Pd	Pengadaan Bibit ikan Nila	Lokasi RT. 011, Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN		✗	
44	WILNA ELITA, M.Pd	Kursus Menjahit, Memasak dan Pengadaan Mesin Jahit	Lokasi RT, 014, Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	✓		
45	WILNA ELITA, M.Pd	Pengadaan bibit ternak (ayam, sapi, babi) dan Pengadaan bibit buah (mangga,rambutan,jambu,alpukad), bibit sayur (terong,timun,jagung,kacang panjang,lombok).	RT. 014, Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	DINAS PERTANIAN	✓		
46	WILNA ELITA, M.Pd	Pengusulan bibit tanaman buah cangkakan (buah sawo, buah mangga, buah manggis dan buah lengkeng).	TK KRISTEN JL. A. Runting , Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	DINAS PERTANIAN	✓		
47	WILNA ELITA, M.Pd	Pembangunan Kolam Ikan.	SMKN- 1 Kurun, Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN		✗	

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
48	WILNA ELITA, M.Pd	Bantuan bibit tanaman pangan; Sayur-sayuran lengkap dan tanaman penahan longsor.	SMKN- I Kurun, Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	DINAS PERTANIAN	✓		
49	AGUS SEFFENI, S.Sos	Pembuatan Nomor Rumah Se- Kel TTA	RT. 03 Kel. TTA, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Anjir	KECAMATAN KURUN		✗	
50	AGUS SEFFENI, S.Sos	Pengadaan TOA Pengeras Suara	Kel. TTA / RT.03, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Anjir	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	✓		
51	AGUS SEFFENI, S.Sos	Usulan Lanjutan Gereja Gais Gideon	Kel. TTA. /RT. 01, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Anjir	SEKRETARIAT DAERAH	✓		
52	AGUS SEFFENI, S.Sos	Usulan Perahu Karet 8 Buah	Kel. TTA / RT.04, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Anjir	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	✓		
53	AGUS SEFFENI, S.Sos	Pembangunan Siring Mesjid AL-Mustaqin	Kel. TTA / RT. 02, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Anjir	SEKRETARIAT DAERAH	✓		
54	AGUS SEFFENI, S.Sos	Renopasi Pagar Mesjid AL-Mustaqin	Kel. TTA / RT. 02, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Anjir	SEKRETARIAT DAERAH		✗	
55	SETIAWAN KRISBIANTORO, A.Md	Permohonan Bantuan Bibit Sapi kepada Kelompok Ternak di Desa Tumbang Miwan sebanyak 30 ekor	Desa Tumbang Miwan, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Miwan	DINAS PERTANIAN		✗	
56	SETIAWAN KRISBIANTORO, A.Md	Vidiotron sebagai Media Informasi bagi masyarakat, dan sebagai bukti transparansi pemerintah desa	Desa Tumbang Miwan, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Miwan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		✗	Bidang PIP
57	SETIAWAN KRISBIANTORO, A.Md	Pelepasan Hak Guna Tanah dari Hutan Produksi agar Bisa di Buatkan Sertifikat Kepemilikan karena sudah Banyak Permukiman Warga	Desa Tumbang Miwan, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Miwan	SEKRETARIAT DAERAH		✗	
58	DONI	Perlu peningkatan jalan cor beton untuk wilayah persawahan dlm meningkatkan produksi pertanian, mengingat masyarakat membutuhkan akses ke persawahan dengan ukuran 250 m x 4 m.	Jalan Pelajar 2 RT.01 Desa Hurung Bunut, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas., Kab. Gunung Mas	Kurun	Hurung Bunut	DINAS PERTANIAN		✗	Arahkan ke Pokir
59	DONI	Masyarakat sangat membutuhkan Peningkatan Cetakan sawah yang baru seluas 60 Ha agar masyarakat bisa mengembangkan pertanian dan perkebunan di Desa dan mendukung perekonomian Masyarakat Hurung Bunut.	Persawahan RT.01 Desa Hurung Bunut, Kab. Gunung Mas	Kurun	Hurung Bunut	DINAS PERTANIAN	✓		Siapkan Proposal
60	DONI	Untuk menunjang dalam mengembangkan Pertanian di desa Perlu adanya pembenahan Parit Pembuangan Sawah yang sekarang kondisi yang tidak layak dan perlu di Rehab dan diperbaiki demi lancarnya pembuangan drainase parit pembuangan sawah. 4.000 meter	Persawahan RT.01 Desa Hurung Bunut, Kab. Gunung Mas	Kurun	Hurung Bunut	DINAS PERTANIAN	✓		Siapkan Proposal
61	DONI	Kebutuhan dalam pengolahan sawah perlu adanya sarana prasarana Produksi (saprodi) misalkan Benih, bibit, Pupuk, obat-obatan, yang diperlukan dalam pengembangan pertanian di Desa.	Desa Hurung Bunut, Kab. Gunung Mas	Kurun	Hurung Bunut	DINAS PERTANIAN	✓		Siapkan Proposal

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
62	DONI	Masyarakat membutuhkan Bibit sapi Bali untuk dibudidayakan di desa Hurung Bunut. Kurang lebih 30 ekor.	Desa Hurung Bunut, Kab. Gunung Mas	Kurun	Hurung Bunut	DINAS PERTANIAN		✗	
63	AMPUNG	Pembuatan Jalan Ke Kebun Masyarakat	Desa Tumbang Hakau RT.05, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Hakau	DINAS PERTANIAN		✗	
64	AMPUNG	Mohon Bantuan Bibit Babi 100 Ekor (Untuk mengoptimalkan Pengembangan Ekonomi Masyarakat)	Desa Tumbang Hakau, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Hakau	DINAS PERTANIAN		✗	
65	AMPUNG	Mohon Bantuan Bibit Nila 3000 Ekor (Belum Optimalnya Pengembangan Perekonomian Masyarakat)	Desa Tumbang Hakau, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Hakau	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN		✗	
66	AMPUNG	Mohon Bantuan Bibit Lele Jumbo 10.000 Ekor (Belum Optimalnya Pengembangan Perekonomian Masyarakat)	Desa Tumbang Hakau, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Hakau	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	✓		
67	AMPUNG	Mohon Bantuan Bibit Ikan Patin 10.000 Ekor (Untuk Menunjang Kegiatan Proyek Profil Penguatan Pelajar Pancasila (P5))	SMP Desa Tumbang Hakau, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Hakau	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN		✗	
68	AMPUNG	Mohon Bantuan Bibit Buah Rambutan dan Mangga untuk Kelompok Tani	Desa Tumbang Hakau, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Hakau	DINAS PERTANIAN	✓		
69	AMPUNG	Mohon Bantuan Pupuk sebanyak 20.000 (Karena pupuk saat ini dibutuhkan untuk Petani dan Masyarakat)	Desa Tumbang Hakau, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Hakau	DINAS PERTANIAN		✗	
70	AMPUNG	Pelatihan Menjahit (Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat)	Desa Tumbang Hakau, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Hakau	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	✓		
71	JHONEDIE	Belum adanya jaringan internet di desa Penda Pilang maka perlu adanya pembangunan tower telekomunikasi untuk jaringan internet	Desa Penda Pilang, Kab. Gunung Mas	Kurun	Penda Pilang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	✓		Desa ini sdh ada BTS Opsel XL namun kondisi tdk maksimal, sehingga kembali diusulkan masuk gelombang 3 dgn Opsel Telkomsel pada Thn 2024
72	JHONEDIE	Belum terbangunnya gedung Gereja di Desa penda Pilang Seberang	Penda Pilang seberang Jl. Tambun Bungai , Kab. Gunung Mas	Kurun	Penda Pilang	SEKRETARIAT DAERAH		✗	
73	BERJOALDI, S.Sos.,M.A.P	Belum tersedianya Gedung Sekolah Minggu GKE Desa Teluk Nyatu. dengan Kebutuhan Panjang 9 Meter Lebar 7 Meter	Desa Teluk Nyatu RT.03, Kab. Gunung Mas	Kurun	Teluk Nyatu	SEKRETARIAT DAERAH		✗	
74	BERJOALDI, S.Sos.,M.A.P	belum tersedianya halaman parkir yang baik dan memadai. kebutuhan 1 Paket Kegiatan 150 Meter	Desa Teluk Nyatu RT.03, Kab. Gunung Mas	Kurun	Teluk Nyatu	SEKRETARIAT DAERAH		✗	
75	BERJOALDI, S.Sos.,M.A.P	belum tersedianya pastori gereja GBI Desa Teluk Nyatu. Kebutuhan Bangunan 12 x 7 meter	Desa Teluk Nyatu RT.03, Kab. Gunung Mas	Kurun	Teluk Nyatu	SEKRETARIAT DAERAH	✓		Proposal
76	JHONEDIE	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan Daerah	IBU PKK Desa Penda Pilang RT,001/002, Kab. Gunung Mas	Kurun	Penda Pilang	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	✓		
77	JHONEDIE	Belum optimalnya pengembangan pereknomian pada Desa Penda Pilang	IBU PKK DESA PENDA PILANG RT,001/002, Kab. Gunung Mas	Kurun	Penda Pilang	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		✗	

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
78	JHONEDIE	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan di desa penda pilang/ BIBIT SAPI	Desa penda Pilang RT,001/002 , Kab. Gunung Mas	Kurun	Penda Pilang	DINAS PERTANIAN		✗	
79	JHONEDIE	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan desa penda pilang, bibit jambu kristal.	Desa Penda Pilang, Kab. Gunung Mas	Kurun	Penda Pilang	DINAS PERTANIAN	✓		
80	JHONEDIE	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan Desa penda pilang, bibit Buah rambutan	Desa Penda Pilang RT,001/002, Kab. Gunung Mas	Kurun	Penda Pilang	DINAS PERTANIAN	✓		
81	JHONEDIE	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan Desa Penda Pilang, bibit buah Jeruk	Desa Penda Pilang RT,001/002, Kab. Gunung Mas	Kurun	Penda Pilang	DINAS PERTANIAN	✓		
82	JHONEDIE	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan Desa Penda Pilang/ bibit buah Durian (musang king).	Desa Penda Pilang RT,001/002, Kab. Gunung Mas	Kurun	Penda Pilang	DINAS PERTANIAN	✓		
83	PANCASONA, S.Pd	Adanya keinginan masyarakat Desa Tewang Pajangan untuk meningkatkan keterampilan dalam bidang menjahit secara khusus untuk ibu-ibu membantu perekonomian keluarga	Desa Tewang Pajangan, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tewang Pajangan	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	✓		
84	PANCASONA, S.Pd	Menurunnya pendapatan masyarakat maka perlu bantuan bibit Sapi untuk masyarakat Desa Tewang Pajangan sebanyak 50 Ekor	Desa Tewang Pajangan, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tewang Pajangan	DINAS PERTANIAN		✗	
85	JHONEDIE	Pelatihan tata rias kecantikan bagi 40 ibu-ibu PKK Desa Penda Pilang	Desa Penda Pilang RT. 01 dan RT. 02, Kab. Gunung Mas	Kurun	Penda Pilang	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	✓		
86	JHONEDIE	Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue bagi 40 ibu-ibu PKK Desa Penda Pilang	Desa Penda Pilang RT. 01 dan RT. 02, Kab. Gunung Mas	Kurun	Penda Pilang	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	✓		Untuk 20 org peserta
87	JHONEDIE	Masyarakat sangat membutuhkan Bibit Ikan Gurami untuk dibudidaya dalam memenuhi kebutuhan ikan di Desa Penda Pilang sebanyak 50.000 ekor	Desa Penda Pilang RT. 01 dan RT. 02, Kab. Gunung Mas	Kurun	Penda Pilang	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN		✗	
88	IDEN	Pembangunan untuk 2 buah Gereja	Desa Tumbang Lampahung, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Lampahung	SEKRETARIAT DAERAH		✗	
89	IDEN	Untuk memanfaatkan lahan tidur yang dimiliki warga maka perlu adanya pengadaan bibit rambutan sebanyak 5.000 bibit sehingga nantinya bisa menambah penghasilan bagi warga	Desa Tumbang Lampahung, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Lampahung	DINAS PERTANIAN	✓		Proposal
90	IDEN	Untuk memanfaatkan lahan tidur yang dimiliki warga maka perlu adanya pengadaan bibit mangga sebanyak 5.000 bibit sehingga nantinya bisa menambah penghasilan bagi warga	Desa Tumbang Lampahung, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Lampahung	DINAS PERTANIAN	✓		Proposal

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
91	IDEN	Untuk memanfaatkan lahan yang kosong dimiliki warga maka perlu adanya pengadaan Bibit Sapi sebanyak 100 ekor bagi Kelompok Ternak yang nantinya untuk usaha peternakan sapi	Desa Tumbang Lampahung, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Lampahung	DINAS PERTANIAN		✗	
92	IPONG IWAN SAGI	Mohon bantuan untuk pembangunan Gedung Gereja GBI Tumbang Tambirah.	Jl. Perjuangan RT.05/RW.02 Desa Tumbang Tambirah, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Tambirah	SEKRETARIAT DAERAH	✓		
93	IPONG IWAN SAGI	Mohon bantuan pembangunan Gedung Gereja GPT Tumbang Tambirah	Desa Tumbang Tambirah, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Tambirah	SEKRETARIAT DAERAH	✓		
94	IPONG IWAN SAGI	Mohon bantuan pembangunan gedung gereja Katolik Tumbang Tambirah	Desa Tumbang Tambirah, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Tambirah	SEKRETARIAT DAERAH	✓		
95	IPONG IWAN SAGI	pemasangan listrik gratis karena masih ada rumah warga yang belum ada listriknya (20 rumah)	Desa Tumbang Tambirah, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Tambirah	SEKRETARIAT DAERAH	✓		
96	IPONG IWAN SAGI	Mohon Bantuan Bibititik (300 ekor), ayam kampung (250 ekor), dan sapi (50 ekor), untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat	Desa Tumbang Tambirah, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Tambirah	DINAS PERTANIAN		✗	
97	IPONG IWAN SAGI	Mohon Bantuan untuk pelatihan operator/Mengemudi	Desa Tumbang Tambirah, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Tambirah	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		✗	
98	IPONG IWAN SAGI	mohon bantuan pelatihan komputr, pengurus bumdes dan pelatihan tataboga	Desa Tumbang Tambirah, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Tambirah	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	✓		
99	IPONG IWAN SAGI	mohon bantuan alat pelampung dan tabung pemadam kebakaran, dikarenakan kalau muhim hujan rawan terdampak banjir dan kalau musim kemarau kebakaran.	Desa Tumbang Tambirah, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Tambirah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	✓		
100	IPONG IWAN SAGI	mohon bantuan bibit sayur, bibit sawit, bantuan bibit buah lengkeng dan durian, beserta bantuan pupuk sawit.	Desa Tumbang Tambirah, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Tambirah	DINAS PERTANIAN	✓		Bibit sawit dan pupuk ditolak
101	HEDI	Perlu adanya pembangunan untuk 2 Rumah Ibadah yaitu Gereja karena kondisi gereja yang sering banjir	Desa Pilang Munduk, Kab. Gunung Mas	Kurun	Pilang Munduk	SEKRETARIAT DAERAH	✓		
102	HEDI	Petani kesulitan mendapatkan Pupuk Sawit Non Subsidi maka diperlukan Pupuk Sawit sebanyak 7 Ton	Desa Pilang Munduk, Kab. Gunung Mas	Kurun	Pilang Munduk	DINAS PERTANIAN		✗	
103	WANTO	Melanjutkan Pembangunan Rumah Ibadah yang ada sekarang mencapai 40% maka perlu bantuan untuk menyelesaikan pembangunan rumah ibadah tersebut.	RT. 03 DEsa Tumbang Manyangan, Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Manyangan	SEKRETARIAT DAERAH	✓		
104	SUHADI TAWAR (Pj.KADES)	Perlunya Bantuan Perikanan untuk menunjang Ketahanan Pangan ditingkat Desa.	Desa Luwuk Langkuas, Kab. Gunung Mas	Rungan	Luwuk Langkuas	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN		✗	

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
105	SUHADI TAWAR (Pj.KADES)	Perlunya Sosialisasi Narkoba untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi Narkoba.	Desa Luwuk Langkuas, Kab. Gunung Mas	Rungan	Luwuk Langkuas	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	✓		Hanya penyediaan narasumber
106	TAUFIK, SP	Gereja merupakan salah satu tempat pembinaan terhadap umat beragama sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap Bangunan Gereja terutama untuk keamanan fasilitas yang ada salah satunya perlu dibangun Pagar Gereja Gloria dengan Volume 1 X 400 Meter.	JALAN HENDRIK TIMANG, Kab. Gunung Mas	Rungan	Jakatan Raya	SEKRETARIAT DAERAH	✓		
107	MELIN A. BOHOI	Wisata DAM Irigasi Gohong Rawai	Desa Tumbang Bunut, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Bunut	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		✗	Dana Bumdes
108	TAUFIK, SP	Gereja sebagai salah satu tempat untuk pembinaan terhadap umat sehingga perlu untuk dilakukan perbaikan terhadap bangunan diantaranya dengan dilakukan pengecatan ulang pada bangunan Gereja Gloria sehingga diperlukan bahan Cat sebanyak 500 Kg.	JALAN HENDRIK TIMANG KELURAHAN JAKATAN RAYA, Kab. Gunung Mas	Rungan	Jakatan Raya	SEKRETARIAT DAERAH		✗	
109	TAUFIK, SP	Gereja Gloria masih perlu dilakukan penanganan pembangunan salah satunya adalah dengan Pemasangan Keramik pada Teras Bangunan Gerja dengan ukuran 5 X 50 Meter	JALAN HENDRIK TIMANG KELURAHAN JAKATAN RAYA, Kab. Gunung Mas	Rungan	Jakatan Raya	SEKRETARIAT DAERAH		✗	
110	TAUFIK, SP	Mengingat masalah sampah di Kelurahan Jakatan sudah sangat mendesak untuk dilakukan penanganan sedangkan Kelurahan tidak memiliki lokasi pembuangan sampah sehingga perlu pengadaan tanah seluas 2 Hektar sebagai lokasi pembuangan sampah.	KELURAHAN JAKATAN RAYA, Kab. Gunung Mas	Rungan	Jakatan Raya	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	✓		
111	TAUFIK, SP	Volume sampah yang ada selama ini semakin banyak sedangkan Kelurahan Jakatan Raya tidak memiliki armada pengangkut sampah sehingga perlu pengadaan Mobil Pengangkut Sampah untuk Kelurahan Jakatan Raya.	KELURAHAN JAKATAN RAYA, Kab. Gunung Mas	Rungan	Jakatan Raya	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	✓		
112	TAUFIK, SP	Untuk melakukan pengangkutan sampah selama ini masih menggunakan swadaya dari masyarakat sehingga kedepan perlu adanya tenaga pengangkut sampah yang honorariumnya dibayar oleh Pemerintah sehingga tidak menjadi beban masyarakat.	KELURAHAN JAKATAN RAYA, Kab. Gunung Mas	Rungan	Jakatan Raya	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	✓		
113	UKU J.GANI	Tidak tersedia nya fasilitas untuk kegiatan pengembangan adat	Desa linau, Kab. Gunung Mas	Rungan	Linau	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		✗	Usul ke DAD
114	ESTORINA, S.Pi (Pj.KADES)	1 Erosi dan Abrasi di tepi sungai 2 Aliran air sungai terlalu deras dan merusak tepi sungai 3 Bronjong diperlukan untuk mengurangi risiko banjir dan longsor. (100m Bronjong Sungai)	Desa Bereng Baru, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Rungan	Bereng Baru	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	✓		

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
115	ESTORINA, S.Pi (Pj.KADES)	Tidak adanya mesin jahit untuk berlatih menjahit dapat menghambat kemampuan siswa atau masyarakat dalam mengembangkan keterampilan menjahit. Hal ini membatasi peluang untuk belajar dan meningkatkan keterampilan yang dapat menjadi modal untuk menciptakan lapangan kerja atau usaha mandiri di masa depan. (Kurangny sarana & prasaranan seperti 5 Peralatan Mesin Jahit)	Desa Bereng Baru, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Rungan	Bereng Baru	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		✗	Pengadaan Dana Desa, Dinas hanya memfasilitasi instruktur
116	ESTORINA, S.Pi (Pj.KADES)	Tanpa adanya hand traktor, proses pertanian akan menjadi lebih lambat dan kurang efisien. Petani terpaksa mengandalkan tenaga manual atau alat tradisional yang membutuhkan waktu dan tenaga lebih banyak, yang pada akhirnya dapat mengurangi hasil panen dan meningkatkan biaya. (1 Hand Traktor)	Desa Bereng Baru, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Rungan	Bereng Baru	DINAS PERTANIAN	✓		Buat Proposal
117	ISESKAR, S.Pd.SD	KURANG OPTIMALNYA PELAYANA PUBLIK	KANTOR PELAYANAN KANTOR DESA TUMBANG MALAHOI, Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Malahoi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	✓		Bidang PIP
118	MUBARIK	Pembukaan jalan ladang usaha tani 2 dikarenakan banyak lahan warga yang berpontensi sebagai lumbung tani apabila jalan tersebut di buka kembali dibutuhkan sekitar P 300m x L 4m.	desa karya bhakti RT. 06/ RW.01 Kecamatan Rungan, Kab. Gunung Mas	Rungan	Karya Bhakti	DINAS PERTANIAN		✗	
119	MUBARIK	dibutuhkan Pengadaan alat kesenian kuda lumping sebagai alat kesenian dan budaya di desa karya bhakti sebanyak 1 paket.	desa karya bhakti RT. 06/ RW.01 Kecamatan Rungan, Kab. Gunung Mas	Rungan	Karya Bhakti	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		✗	Sudah ditahun 2023 alat kuda lumping
120	MUBARIK	bantuan benih ikan patin sebanyak 10.000 erkor + pakan Starter sebanyak 2000 kg sehingga masyarakat mendapat bantuan dalam skala peningkatan ekonominya	desa karya bhakti , Kab. Gunung Mas	Rungan	Karya Bhakti	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	✓		
121	MUBARIK	bantuan untuk rumah ibadah sebanyak 5 rumah ibadah	Desa Karya Bhakti, Kab. Gunung Mas	Rungan	Karya Bhakti	SEKRETARIAT DAERAH	✓		
122	MUBARIK	bantuan untuk alat Pertanian Alsintan Cultivator	Desa Karya Bhakti , Kab. Gunung Mas	Rungan	Karya Bhakti	DINAS PERTANIAN	✓		Proposal
123	MUBARIK	Bantuan alat Perbengkelan	Desa Karya Bhakti, Kab. Gunung Mas	Rungan	Karya Bhakti	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	✓		
124	MUBARIK	Pelatihan Perbengkelan bagi kaum muda yang mau buka usaha.	Desa Karya Bhakti, Kab. Gunung Mas	Rungan	Karya Bhakti	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	✓		

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
125	MUBARIK	Bantuan Pembelian Mesin Jahit Bagi Masyarakat desa.	Desa Karya Bhakti, Kab. Gunung Mas	Rungan	Karya Bhakti	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		✗	Dana Desa
126	JHON BENY MENTENG	1.Bantuan Pembangunan Gereja dan Masjid	Desa Luwuk Kantor, Kab. Gunung Mas	Rungan	Luwuk Kantor	SEKRETARIAT DAERAH	✓		
127	YUDIE	Bantuan Untuk Penyandang Disabilitas dan Rentan Sakit, Volume : 2 Unit Kursi Roda,	Desa Tumbang Jutuh, Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Jutuh	DINAS SOSIAL	✓		
128	YUDIE	Bantuan Bibit Kopi,Pupuk,Petisida dan Alat Pembersih Lahan, Volume : 1 Paket	Desa Tumbang Jutuh, Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Jutuh	DINAS PERTANIAN	✓		Buat Proposal
129	SEANLY NOVIANTI, S.Pd	pelatihan untuk kader dan TP PKK	RT.001, Kab. Gunung Mas	Rungan	Talangkah	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		✗	Spesifik
130	IPNO I	PELATIHAN TATA BOGA IBU PKK	DESA TUMBANG BARINGEI, Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Baringei	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	✓		
131	IPNO I	PELATIHAN MENJAHIT / TATA BUSANA	DESA TUMBANG BARINGEI, Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Baringei	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	✓		
132	IPNO I	BANTUAN PUPUK DAN BIBIT SAWIT	DESA TUMBANG BARINGEI, Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Baringei	DINAS PERTANIAN		✗	
133	PANJUNG, S.Hut (Pj.KADES)	Pengadaan Bibit Sawit untuk Masyarakat Desa Parempei	Desa Parempei, Kab. Gunung Mas	Rungan	Parempei	DINAS PERTANIAN		✗	
134	GELVIA, S.Pd	Pembangunan Gedung Sanggar Budaya lengkap sarana dan Prasarana	Rabambang, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Rabambang	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		✗	Usul ke Pokir
135	GELVIA, S.Pd	Pembuatan Tempat Sampah Sementara (TPS) dilingkungan RT	RT.01 sampai RT.12, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Rabambang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	✓		
136	GELVIA, S.Pd	Pengadaan alat Angkut Sampah (TOSA)	Rabambang, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Rabambang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	✓		
137	GELVIA, S.Pd	Pembinaan Objek Wisata Batu Bagalang	Rabambang, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Rabambang	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		✗	
138	GELVIA, S.Pd	Kenaikan /Penambahan insentif Kader Posyandu, RT/RW, dan Mantir Adat	Rabambang, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Rabambang	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	✓		Mantir adat tetap
139	GELVIA, S.Pd	Pengadaan Mobil PICK UP alat Angkut Sampah	Kantor Kelurahan Rabambang, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Rabambang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	✓		

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
140	RESEP	pengadaan 3 Unit Kursi Roda untuk Penyandang Disabilitas atau Lansia yang tidak bisa berjalan	Desa Tajah Antang Raya, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Tajah Antang Raya	DINAS SOSIAL	✓		
141	RESEP	Bimbingan Teknis/ Pelatihan Pengurus BUMDes dalam pembuatan dan pemasaran hasil usaha	RT. 01 Desa Tajah Antang Raya, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Tajah Antang Raya	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	✓		
142	RESEP	Masih rendahnya kapasitas Aparatur Desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan keluarga terkait pengelolaan sumber daya Alam di Desa dan pembuatan produk unggulan Desa. hal ini membutuhkan pendidikan, Pelatihan baik kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat	Desa Tajah Antang Raya, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Tajah Antang Raya	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	✓		
143	NELSON	Masih belum terkelola dengan baik persampahan yang ada di Desa	Desa Jalemu Raya, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Jalemu Raya	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	✓		
144	NELSON	Belum adanya Gedung Sanggar Seni	Desa Jalemu Raya, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Jalemu Raya	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		✗	Bentuk sanggar, usul ke Pokir
145	NELSON	Tidak ada Mesin pengolah Sawah	Desa Jalemu Raya, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Jalemu Raya	DINAS PERTANIAN	✓		Lewat sewa alat, Hand Traktor
146	NELSON	Gereja GKE sudah tidak dapat menampung jamaat	Desa Jalemu Raya, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Jalemu Raya	SEKRETARIAT DAERAH	✓		Melengkapi Proposal 30 Juni ke Kesra
147	NELSON	Ada Tempat Wisata namun untuk modal pengelolaannya masih belum ada	Desa Jalemu Raya, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Jalemu Raya	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		✗	
148	NELSON	Mau berkebun tapi pengadaan bibit tidak mampu (Sawit)	Desa Jalemu Raya, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Jalemu Raya	DINAS PERTANIAN		✗	
149	NELSON	Tidak ada Transport Pemadam Api	Desa Jalemu Raya, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Jalemu Raya	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	✓		
150	NELSON	Kurangnya ketrampilan dan pengalaman (Pelatihan dan PENGadaan Aat Mobiler)	Desa Jalemu Raya, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Jalemu Raya	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	✓		
151	NELSON	Kurangnya Ketrampilan dan Pengalaman di bidang Perbengkelan (Pelatihan)	Desa Jalemu Raya, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Jalemu Raya	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	✓		
152	NELSON	Pelatihan PKK	Desa Jalemu Raya, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Jalemu Raya	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		✗	Diusulkan ke PKK Kabupaten
153	SALUNDIK A. SAMAT	Tidak Lancar Jaringan di Desa sehingga harus adanya Pengadaan Tower Telkomsel di Desa Jalemu Masulan	Desa Jalemu Masulan, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Jalemu Masulan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	✓		Akan diusulkan ke Kementerian Komunikasi dan Digital, agar dapat dilakukan pembangunan BTS di Desa Jalemu Masulan

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
154	SUMARJO	Jaringan telekomunikasi tidak lancar	Desa Tusang Raya, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Tusang Raya	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	✓		Akan disampaikan ke pihak Operator XL Axiata agar dapat meningkatkan akses layanan jaringan di Desa Tusang Raya dan Desa sekitarnya
155	SUMARJO	Tunjangan Hari Raya Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD	Tusang Raya, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Tusang Raya	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		✗	Tidak ada regulasi
156	JHON PAULUS	Pengadaan Bibit Sawit Untuk Lahan Seluas 100 ha	Tumbang Jalemu Kajuei, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Tumbang Jalemu Kajuei	DINAS PERTANIAN		✗	
157	HERLISEN, S.Pd (Pj.KADES)	Pelatihan Kader Pokja Kampung KB	Desa Mangkawuk, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Mangkawuk	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	✓		Proposal dan RAB
158	HERLISEN, S.Pd (Pj.KADES)	Pelatihan Perbengkelan	Desa Mangkawuk, Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Mangkawuk	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	✓		
159	GASIE	Pembangunan Menara Dan Pastori Gereja GKE Pandohop Desa Jangkit	Desa Jangkit, Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Jangkit	SEKRETARIAT DAERAH	✓		Proposal
160	GASIE	Pembangunan Tower Sinyal	Desa Jangkit, Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Jangkit	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		✗	Sudah masuk usulan pembangunan BTS pada gelombang 2 Thn 2023 (Alasan OPSEL : Belum berpotensi secara bisnis plan)
161	SALIE	1 PELATIHAN PERBENGKELAN DAN BANTUAN ALAT 2. PELATIHAN MEBEL DAN BANTUAN ALAT untuk menunjang kegiatan karangtaruna desa meningkatkan SDM Pemuda yang putus sekolah	DESA BATU PUTER, Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Batu Puter	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	✓		
162	SALIE	Pembangunan gedung SANGGAR Seni dan budaya dan pelatihan kesenian musik maupun tari untuk pemuda desa batu puter, tingginya minat dan bakat pemuda/pemudi di desa batu puter sehingga menarik perhatian pemerintah supaya membina dan membimbing aktivitas remaja untuk melakukan kegiatan fositip yang dapat menunjang SDM remaja	DESA BATU PUTER, Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Batu Puter	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		✗	Proses untuk pelatihan kesenian
163	TISON (KADES ANTAR WAKTU)	penggarapan jalan produksi tani di sebelah timur desa sangal dan lahan sawah	desa sangal, Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Sangal	DINAS PERTANIAN		✗	

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
164	TISON (KADES ANTAR WAKTU)	bak Sampah ,masing masing 10 buah tiap RT.01, RT.02,RT.03	Desa Sangal, Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Sangal	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	✓		
165	TISON (KADES ANTAR WAKTU)	pembelian tanah rumah ibadah umat agama hindu kaharingan	Desa Sangal, Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Sangal	SEKRETARIAT DAERAH		✗	
166	DARMADI	Penataan Pagar dan Halaman Gereja Kahanjak Tumbang Rahuyan, Pagar sepanjang 150 Meter, Halaman seluas 90 m2	Kelurahan Tumbang Rahuyan RT. 06. RW 03, Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	SEKRETARIAT DAERAH		✗	
167	DARMADI	usul pengulahan lahan ,bibit, usul pupuk dan herbisida untuk pertanian padi, jagung, sayur-sayuran ,lombok, dan jenis tanaman sayuran lainnya usulan dari kelompok tani Kapakat ,usul ternak kapakat Bersama, usul ternak kapakat Itah ,Kelompok Tani Perintis ,dan kapakat Hortikultura	Kelurahan Tumbang Rahuyan, Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	DINAS PERTANIAN	✓		Pengolahan lahan ditolak, Proposal
168	DARMADI	usul ganti rugi lahan tempat Pembuangan Sampah di Kelurahan Tumbang Rahuyan Tumbang rahuyan Seluas 2 Hektar an. Dibora ,nilai ganti rugi yang di minta Rp. 80.000.000 (2 hektar)	Kelurahan Tumbang Rahuyan ,jalur Kelompok Tani Kapakat Rt.07 Rw.03, Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	✓		
169	DARMADI	usul pembangunan Balai Basarah kelurahan Tumbang Rahuyan	Kelurahan Tumbang Rahuyan, Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	SEKRETARIAT DAERAH		✗	
170	DARMADI	usul pembangunan Knopi gereja GPT Tumbang rahuyan	Kelurahan Tumbang Rahuyan, Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	SEKRETARIAT DAERAH	✓		
171	DARMADI	usulan untuk Pengelolaan destinasi wisata BETAS JAHAWEN di Kelurahan Tumbang Rahuyan dan kami juga mengusulkan tempat Wisata Kampung Peporma Agraria Kelurahan Tumbang Rahuyan	Kelurahan Tumbang Rahuyan Rt.07.Rw.03, Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		✗	Bumdes, bentuk pengurus Desa Wisata
172	DARMADI	usul pembangunan tower yang besar ,untuk fasilitas telekomunikasi dan informasi di KeLurahan Tumbang Rahuyan dan Sekitarnya,	Kelurahan Tumbang Rahuyan, Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	✓		Akan diusulkan ke Kementerian Komunikasi dan Digital, agar dapat dilakukan pembangunan BTS seperti yang diharapkan
173	DARMADI	usul pengembangan Modal usaha untuk Kegiatan Mebeler dan kerajinan tangan lainnya untuk usaha karang taruna di Kelurahan Tumbang Rahuyan Manihan untuk menambah penghasilan keluarga	kelurahan tumbang rahuyan Rt.07. Rw. 03, Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	✓		
174	SULIANTO L.LIMIN, SE	Minimnya Pengetahuan Masyarakat dalam memelihara ternak Ayam, Memelihara Ikan, dan berkebun Sayur - sayuran Holtikultura dan Tananan Lainnya, sehingga terjadi kegagalan/ minimnya hasil panen.	Rt,01/Rw. 01 , Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Lapan	DINAS PERTANIAN	✓		Bersurat ke Dinas
175	SULIANTO L.LIMIN, SE	Belum adanya Pengetahuan Masyarakat secara Khusus para Petani dalam penggunaan Alat pertanian untuk mendukung kegiatan pertanian dan perkebunan desa	Rt,01/Rw. 01 , Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Lapan	DINAS PERTANIAN	✓		Bersurat ke Dinas

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
176	GUSTI RAY NOVHANDA, S.Pi, M.Si	SERING TERJADI KEBAKARAN DI PEMUKIMAN, SEHINGGA MEMERLUKAN TRUCK PEMADAM KEBAKARAN	JL NEGARA RT 001/RW 001 KELURAHAN TUMBANG TALAKEN, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Tumbang Talaken	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	✓		
177	GUSTI RAY NOVHANDA, S.Pi, M.Si	MASIH ADA WARGA YANG MENGANGGUR SEHINGGA PERLU ADANYA PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT UMKM DENGAN ADANYA PELATIHAN MENJAHIT, BENGKEL, SALON DAN KULINER DI KELURAHAN TUMBANG TALAKEN	JL NEGARA RT 001/RW 001 KELURAHAN TUMBANG TALAKEN, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Tumbang Talaken	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	✓		
178	GUSTI RAY NOVHANDA, S.Pi, M.Si	MASIH BANYAK WARGA MISKIN, SEHINGGA PERLU PELATIHAN KERJA DIBIDANG UMKM SEPERTI MENJAHIT, MEMASAK, SALON DAN BENGKEL DI KELURAHAN TUMBANG TALAKEN	JL NEGARA RT 001/RW 001 KELURAHAN TUMBANG TALAKEN, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Tumbang Talaken	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	✓		
179	YUEL,S.Kep.,Ns	Tidak ada bengkel kendaraan bermotor di Desa Tumbang Jalemu, karena tidak memiliki SDM di bidang otomotif sehingga perlu pelatihan otomotif	Jalan Desa, RT. 002, RW. 001, Desa Tumbang Jalemu, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Tumbang Jalemu	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	✓		
180	YUEL,S.Kep.,Ns	Desa Tumbang Jalemu membutuhkan Gedung Pusat Pelatihan Masyarakat untuk DIKLAT UMKM, Koperasi dan Tenaga Kerja	Jalan Desa, RT. 002, RW. 001, Desa Tumbang Jalemu, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Tumbang Jalemu	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		✗	
181	YUEL,S.Kep.,Ns	Gereja GKE di Desa Tumbang Jalemu masih belum selesai dan membutuhkan bantuan	Jalan Kabupaten, RT.002, RW. 001, Desa Tumbang Jalemu, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Tumbang Jalemu	SEKRETARIAT DAERAH	✓		
182	YUEL,S.Kep.,Ns	Gereja GPDI di Desa Tumbang Jalemu masih belum selesai dan membutuhkan bantuan	Jalan Desa, RT. 001, RW. 001, Desa Tumbang Jalemu, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Tumbang Jalemu	SEKRETARIAT DAERAH		✗	
183	YUEL,S.Kep.,Ns	Belum ada Mushola	Desa Tumbang Jalemu, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Tumbang Jalemu	SEKRETARIAT DAERAH	✓		
184	RUDYANTO, ST	Belum adanya Listrik di Desa Bereng Balawan	Desa Bereng Balawan, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Bereng Balawan	SEKRETARIAT DAERAH	✓		
185	RAWAN, S.Pd.,MM (Pj.KADES)	pembangunan tower sinyal di desa fajar harapan 1 unit	fajar harapan, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Fajar Harapan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	✓		Akan diusulkan ke Kementerian Komunikasi dan Digital, agar dapat dilakukan optimalisasi sinyal di Desa Fajar Harapan, mengingat sdh ada 3 BTS di Desa ini
186	RAWAN, S.Pd.,MM (Pj.KADES)	rehab bangunan PURA 1 unit	fajar harapan, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Fajar Harapan	SEKRETARIAT DAERAH	✓		
187	RAWAN, S.Pd.,MM (Pj.KADES)	pembangunan tempat ibadah gereja di desa fajar harapan 1 unit	fajar harapan, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Fajar Harapan	SEKRETARIAT DAERAH	✓		
188	RAWAN, S.Pd.,MM (Pj.KADES)	rehab bangunan Mushola di desa fajar Harapan 3 unit	fajar harapan, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Fajar Harapan	SEKRETARIAT DAERAH	✓		

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
189	RAWAN, S.Pd.,MM (Pj.KADES)	pengadaan bibit ikan 5000 ekor beserta pakan	fajar harapan, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Fajar Harapan	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	✓		Bibit ikan Patin / Lele
190	RAWAN, S.Pd.,MM (Pj.KADES)	pengadaan bibit sayur mayur 5000 bungkus	fajar harapan, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Fajar Harapan	DINAS PERTANIAN	✓		Proposal
191	RAWAN, S.Pd.,MM (Pj.KADES)	pengadaan mesin pembuat pakan ternak 5 unit	fajar harapan, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Fajar Harapan	DINAS PERTANIAN	✓		Proposal
192	RAWAN, S.Pd.,MM (Pj.KADES)	pengadaan pupuk, pestisida untuk tanaman buah dan sayuran 200 paket	fajar harapan, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Fajar Harapan	DINAS PERTANIAN	✓		Proposal
193	RAWAN, S.Pd.,MM (Pj.KADES)	pengadaan perlengkapan tanggap darurat bencana kebakaran 1 paket	fajar harapan, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Fajar Harapan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	✓		
194	EDISON	Sering terjadi kabakaran hutan dan lahan perlunya alat pemadam kebakaran dan mobil kebakaran	Desa bereng jun, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Bereng Jun	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	✓		
195	NOPENSON	Banyak nya masyarakat yang masih Membuang sampah kesungai di karenakan tidak ada Tempat Pembuangan Sampah Umum di Desa Taringen	Desa Taringen, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Taringen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	✓		
196	NOPENSON	Kurang Optimalnya Jaringan Internet	Desa Taringen, Kab. Gunung Mas	Manuhing	Taringen	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	✓		Akan disampaikan ke pihak Operator Telkomsel agar dapat meningkatkan (optimalisasi) akses layanan 4G di Desa Taringen dan sekitarnya
197	YANTO B. SOEPA	Keterampilan masyarakat masih sangat terbatas, diperlukan pelatihan pengoperasian komputer, mengemudi dan mbermain alat musik	Rt.004 Rw.001, Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tumbang Samui	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	✓		Untuk pelatihan komputer
198	YANTO B. SOEPA	Kearifan lokal dalam seni bela diri Dayak Ngaju semakin jarang ditemukan, pendampingan kerajinan masyarakat dalam membuat berbagai jenis anyaman belum maksimal, pelatihan menari dan kebutuhan kelengkapan tarian belum ada	Rt.004 Rw. 001, Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tumbang Samui	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	✓		
199	DARSILO	belum memadai sarana seperti : Ban Karet, Perahu Karet, Kayak, dan juga Pelampung, sehingga kurang menarik minat wisatawan	RT 001 Desa Tumbang Mantuhe, Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tumbang Mantuhe	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		✗	Alihkan ke Bumdes
200	DARSILO	PERLU ADANYA PELATIHAN UNTUK KELOMPOK TANI YANG ADA DI DESA DENGAN METODE YANG LEBIH MODERN SEPERTI PELATIHAN PENANAMAN METODE HIDROPONIK	RT 001 DAN RT 002, Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tumbang Mantuhe	DINAS PERTANIAN	✓		
201	DARSILO	perlu adanya Pelatihan Menjahit dan perbengkelan bagi masyarakat Desa yang memiliki kemampuan di bidangnya	RT 001 DAN RT 002, Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tumbang Mantuhe	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	✓		

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
202	ANDI LALA, S.Sos	Masih banyaknya bangunan Rumah Ibadah yang belum selesai tahap pembangunan dan masih banyaknya keperluan yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan beribadah di Kelurahan Tehang	RT. 01 s/d RT 02, Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tehang	SEKRETARIAT DAERAH	✓		Proposal
203	ANDI LALA, S.Sos	Mengingat di Kelurahan tehang sangat rawan banjir	RT.01 s/d RT 09, Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tehang	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	✓		
204	ANDI LALA, S.Sos	Masih tingginya minat masyarakat Kelurahan Tehang untuk budidaya Ikan	RT. 01 s/d RT. 09, Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tehang	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	✓		Bibit ikan Patin
205	ANDI LALA, S.Sos	Mengingat Karang Taruna yang ada di kelurahan Tehang membutuhkan Bantuan Permodalan untuk cetak batako pres 1 Set	Kelurahn Tehang, Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tehang	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	✓		Alat cetak batako
206	ANDI LALA, S.Sos	Karang Taruna Tehang sangat Membutuhkan Alat Kesenian khususnya seperangkat alat musik tradisional dan baju adat/ Tari	Kelurahan Tehang, Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tehang	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		✗	Dana Pokir, Dinsos pembinaan Karang Taruna
207	RAMULEN	Perlunya Adanya Pelatihan Mebel dan Perbengkelan sebanyak 1 kegiatan	Desa Tumbang Oro, Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tumbang Oro	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	✓		
208	RAMULEN	Perlu Adanya Bantuan pelaksanaan Upacara Tiwah bagi masyarakat yang kurang mampu	Desa Tumbang Oro, Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tumbang Oro	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		✗	Tiwah menggunakan Pokir
209	RAMULEN	Perlu Adanya Penyuluhan untuk Perlindungan Terhadap Anak sebanyak 1 kegiatan	Desa Tumbang Oro, Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tumbang Oro	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	✓		Proposal dan RAB
210	RAMULEN	Perlu Adanya Pengadaan Alat TTG berupa alat Perontok Padi sebanyak 1 unit	Desa Tumbang Koroi, Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tumbang Oro	DINAS PERTANIAN	✓		
211	RAMULEN	Perlu Adanya alat pemadam kebakaran di Desa sebanyak 1 Paket	Desa Tumbang Oro, Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tumbang Oro	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	✓		
212	RAMULEN	Perlu Adanya Peningkatan Kesiapsiagaan warga dalam kebakaran hutan dan lahan sebanyak 1 kegiatan	Desa Tumbang Oro, Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tumbang Oro	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	✓		
213	ANDI LALA, S.Sos	Pengadaan mobil operasional kelurahan Pick Up 4 x 4	Tehang, Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tehang	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		✗	
214	YERMINAE, S.Pd	Pengadaan PLTS Bagi Masyarakat Desa 96 Unit	Desa Karason Raya, Kab. Gunung Mas	Tewah	Karason Raya	SEKRETARIAT DAERAH	✓		Bantuan ESDM
215	YERMINAE, S.Pd	Pembangunan Pastori Gereja GKE Tetean Slamat 1 Unit	Desa Karason Raya, Kab. Gunung Mas	Tewah	Karason Raya	SEKRETARIAT DAERAH	✓		Proposal
216	YERMINAE, S.Pd	Rehabilitasi Gereja GPT 1 Unit	Desa Karason Raya, Kab. Gunung Mas	Tewah	Karason Raya	SEKRETARIAT DAERAH	✓		Proposal

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
217	YERMINAE, S.Pd	Bantuan Pembangunan Gereja GPT 1 Unit	Desa Karason Raya, Kab. Gunung Mas	Tewah	Karason Raya	SEKRETARIAT DAERAH	✓		Proposal
218	YERMINAE, S.Pd	Sarana prasarana tanggap darurat bencana " Bantuan kendaraan Operasional Petugas/masyarakat peduli Api Skala Desa 1Paket	Desa Karason Raya, Kab. Gunung Mas	Tewah	Karason Raya	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	✓		
219	ANTEL	Pembangunan Jalan Produksi Pertanian (Pembangunan Rabat Beton jalan desa ke areal pertanian SAKATA)	Jln. Lintas RT. 02 Desa Teluk Lawah, Kab. Gunung Mas	Tewah	Teluk Lawah	DINAS PERTANIAN		✗	
220	ANTEL	Pengadaan Tiang Listrik	Jln. Kahayan dan Jln. Walet, RT. 01 , Kab. Gunung Mas	Tewah	Teluk Lawah	SEKRETARIAT DAERAH		✗	Bermohon ke PLN
221	ANTEL	Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana Alam	Jln. Lintas RT. 02, Kab. Gunung Mas	Tewah	Teluk Lawah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	✓		
222	EROE	Tidak berkembangnya wisata yang ada	Desa Tanjung Untung , Kab. Gunung Mas	Tewah	Tanjung Untung	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		✗	Pokir
223	YUYU.L.MANIJAE	Peningkatan jalan tani	Sandung Tambun , Kab. Gunung Mas	Tewah	Sandung Tambun	DINAS PERTANIAN		✗	
224	YUYU.L.MANIJAE	Pemasangan jaringan listrik masuk Desa	Sandung Tambun, Kab. Gunung Mas	Tewah	Sandung Tambun	SEKRETARIAT DAERAH	✓		Sdh diusulkan masih koordinasi
225	YUYU.L.MANIJAE	Pembangunan Gedung Balai Basara Mantir Adat	Sandung Tambun, Kab. Gunung Mas	Tewah	Sandung Tambun	SEKRETARIAT DAERAH		✗	
226	YUYU.L.MANIJAE	Subsidi Pemasangan Listrik	Sandung Tambun, Kab. Gunung Mas	Tewah	Sandung Tambun	SEKRETARIAT DAERAH		✗	Setelah jaringan ada
227	YUYU.L.MANIJAE	Pembangunan Sarana Perpustakaan Desa	Sandung Tambun, Kab. Gunung Mas	Tewah	Sandung Tambun	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		✗	
228	YUYU.L.MANIJAE	Pengadaan Alat seni, sanggar-budaya	Sandung Tambun, Kab. Gunung Mas	Tewah	Sandung Tambun	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		✗	Usul ke Pokir
229	YUYU.L.MANIJAE	Ritual adat PAPAS LEWU	Sandung Tambun, Kab. Gunung Mas	Tewah	Sandung Tambun	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		✗	Bisa koordinasi dgn DAD
230	YUYU.L.MANIJAE	Pengadaan bibit Padi kepada Petani	Sandung Tambun, Kab. Gunung Mas	Tewah	Sandung Tambun	DINAS PERTANIAN	✓		
231	YUYU.L.MANIJAE	Pengadaan Bibit buah-buahan	Sandung Tambun, Kab. Gunung Mas	Tewah	Sandung Tambun	DINAS PERTANIAN	✓		
232	YUYU.L.MANIJAE	Pengadaan bibit sayur-sayuran	Sandung Tambun, Kab. Gunung Mas	Tewah	Sandung Tambun	DINAS PERTANIAN	✓		
233	YUYU.L.MANIJAE	Pelatihan Anyaman	sandung tambun, Kab. Gunung Mas	Tewah	Sandung Tambun	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	✓		
234	YUYU.L.MANIJAE	Pelatihan Seni Ukir	Sandung Tambun, Kab. Gunung Mas	Tewah	Sandung Tambun	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		✗	

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
235	YUYU.L.MANIJAE	Pelatihan Pandai Besi	Sandung Tambun, Kab. Gunung Mas	Tewah	Sandung Tambun	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		✗	
236	YUYU.L.MANIJAE	Pelatihan IBU-IBU PKK	Sandung Tambun, Kab. Gunung Mas	Tewah	Sandung Tambun	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		✗	Diusulkan ke PKK Kabupaten
237	YUYU.L.MANIJAE	Pelatihan menjahit	Sandung Tambun, Kab. Gunung Mas	Tewah	Sandung Tambun	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	✓		
238	YUYU.L.MANIJAE	Pembangunan Posko Siaga Bencana Desa	Sandung Tambun, Kab. Gunung Mas	Tewah	Sandung Tambun	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	✓		
239	YUYU.L.MANIJAE	Pembukaan Wisata : Riam Suran, Dam Puruk kitik dll	Sandung Tambun, Kab. Gunung Mas	Tewah	Sandung Tambun	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		✗	
240	INDA SARIANA	Pelatihan Menjahit	Sare Rangan, Kab. Gunung Mas	Tewah	Sarerangan	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	✓		
241	INDA SARIANA	Pelatihan Operator EXSA	Sare Rangan, Kab. Gunung Mas	Tewah	Sarerangan	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		✗	
242	INDA SARIANA	Pelatihan Pandai Besi	Sare Rangan, Kab. Gunung Mas	Tewah	Sarerangan	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		✗	
243	NOOR IFAN SYAH, S.IP, MM	Peningkatan Jalan usaha Tani Karet Sepanjang 5 KM	Jalan Usaha Tani wilayah RT 014 Kelurahan Tewah, Kab. Gunung Mas	Tewah	Tewah	DINAS PERTANIAN		✗	
244	JOHAN SUPIANOR, S.Pd	Jaringan Lintrik PLN Ke Desa Uk. 18 Kilo Meter	Desa Taja Urap, Kab. Gunung Mas	Tewah	Taja Urap	SEKRETARIAT DAERAH	✓		PLN
245	JOHAN SUPIANOR, S.Pd	Mobil Pemadam Kebakaran 1 Unit/1 Paket	Desa Taja Urap, Kab. Gunung Mas	Tewah	Taja Urap	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	✓		
246	KARDIE	Penambahan Jaringan Listrik Ke RT 03 Desa Tumbang Pajangei	RT . 03, Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Pajangei	SEKRETARIAT DAERAH		✗	PLN
247	KARDIE	Rehap Ringan Bangunan Situs Budaya Tambun Bungai	RT. 02 , Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Pajangei	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		✗	Belum ada dana
248	KARDIE	Pembangunan Tangga Jalan Ke Situs Budaya Bukit Rombak Haramaung	01, Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Pajangei	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		✗	Belum ada dana

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
249	KARDIE	Pengadaan Pupuk, Herbisida dan Spayer (Alat-Alat Pertanian)	RT. 01,02,03, Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Pajangei	DINAS PERTANIAN		✗	
250	KARDIE	Bantuan Sosial Untuk Korban Banjir	RT. 01,02,03, Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Pajangei	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	✓		
251	DIMAN JADER	Pembangunan 1 unit Tower Sinyal	Desa Sumur Mas, Kab. Gunung Mas	Tewah	Sumur Mas	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		✗	Sudah masuk usulan pembangunan BTS pada gelombang 2 Thn 2023 (Alasan OPSEL : Belum berpotensi secara bisnis plan)
252	GALODIE	Pengadaan /Lahan untuk Pembangunan Kantor Sekretariat Gereja GKE	Batu Nyiwuh RT. 05, Kab. Gunung Mas	Tewah	Batu Nyiwuh	SEKRETARIAT DAERAH		✗	
253	DARSANI	pelatihan tentang penanganan bencana alam ,kebakaran, banjir dan kendaraan operasional (mobil)	Desa Kasintu, Kab. Gunung Mas	Tewah	Kasintu	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	✓		
254	MULYADI	Bibit Durian Bangkok 1000 bibit	Desa Sei Rieng, Kab. Gunung Mas	Tewah	Sei Rieng	DINAS PERTANIAN		✗	
255	MULYADI	Pengadaan Bibit Jambu Kristal 1000 Bibit	Desa Sei Rieng, Kab. Gunung Mas	Tewah	Sei Rieng	DINAS PERTANIAN	✓		
256	MULYADI	Pelatihan Pertanian	Desa Sei Rieng, Kab. Gunung Mas	Tewah	Sei Rieng	DINAS PERTANIAN	✓		
257	MULYADI	Pelatihan Perbengkelan	Desa Sei Rieng, Kab. Gunung Mas	Tewah	Sei Rieng	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	✓		
258	MULYADI	Pelatihan Kesenian Daerah Dayak Ngaju	Desa Sei Rieng, Kab. Gunung Mas	Tewah	Sei Rieng	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	✓		Tahun 2026 di proses
259	SURIADI	Jalan Usaha tani Masih banyak kekurangan, dan membutuhkan dana kembali untuk melanjutkan pembangunan	RT001 Desa Rangan Mihing, Kab. Gunung Mas	Tewah	Rangan Mihing	DINAS PERTANIAN		✗	
260	SUDIRMAN	Pengadaan kendaraan Operasional angkut Sampah dan pengadaan Tong Sampah	Tumbang Habaon, Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	✓		
261	SUDIRMAN	Pengadaan Kendaraan Patroli Karhutla	Tumbang Habaon, Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	✓		
262	SUDIRMAN	Bantuan Bagi rumah Ibadah 3 gereja	Tumbang Habaon, Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	SEKRETARIAT DAERAH	✓		Proposal
263	SUDIRMAN	Pengadaan Bibit ikan dan pakan Nila, Patin, Mas 20.000 ekor	Tumbang Habaon, Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	✓		Bibit ikan Patin
264	SUDIRMAN	Pelatihan Pengelolaan Usaha Bumdesa Pertanian dan Perbengkelan	Tumbang Habaon, Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	✓		

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
265	SUDIRMAN	Penanganan bencana Banjir bantuan sembako dll	Tumbang Habaon, Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	✓		
266	YOPHAE, A.Md	pengadaan mobil damkar sebanyak 1 unit	Kelurahan Tumbang Miri, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	✓		
267	YOPHAE, A.Md	pengadaan peralatan Pemadam Karhutla 1 unit	kelurahan Tumbang miri, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	✓		
268	DEHEN	Peningkatan trafik Jaringan 5 G telekomunikasi XL dan pendirian tower telekomsel	Desa Tumbang Sian, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Sian	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	✓		Akan disampaikan ke pihak Operator XL Axiata agar dapat meningkatkan akses layanan jaringan dari 4G ke 5G di Desa Tumbang Sian
269	DEHEN	Bantuan Bibit Sapi sebanyak 30 Ekor	Desa Tumbang Sian, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Sian	DINAS PERTANIAN		✗	
270	DEHEN	Bantuan Bibit Babi Sebanyak 50 Ekor	Desa Tumbang Sian, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Sian	DINAS PERTANIAN		✗	
271	DEHEN	Bantuan Bibit Lele 10000 Ekor	Desa Tumbang Sian, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Sian	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	✓		
272	DEHEN	Pengadaan Alat Pemadam kebakaran 1 Unit	Desa Tumbang Sian, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Sian	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	✓		
273	DEHEN	Pengadaan Perahu Karet 1 Set	Desa Tumbang Sian, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Sian	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	✓		
274	DEHEN	Pengadaan tenda pengungsi 1 set	Desa tumbang Sian, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Sian	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	✓		
275	YOPHAE, A.Md	perlunya Penambahan Pegawai Negeri Sipil pada kantor Kelurahan Tumbang Miri 3 orang	kantor kelurahan tumbang miri, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	✓		
276	YULIGISON	Belum selesainya pembangunan Rumah Ibadah GKE, GBI dan Balai Kaharingan	Desa Tumbang Pasangon, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah., Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Pasangon	SEKRETARIAT DAERAH	✓		Proposal
277	YULIGISON	Pelatihan Tari dan Perlengkapan Tari	Desa Tumbang Pasangon, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Pasangon	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	✓		Pelatihan di proses 2026, OPD Pelaksana

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
278	BERKAT	jaringan komunikasi seluler kurang baik sehingga menghambat kegiatan ekonomi dan informasi punlik dan juga penggunaan aplikasi aplikasi pemerintahan yang bersipat online	desa penda rangas , Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Penda Rangas	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	✓		Akan disampaikan ke pihak Operator XL Axiata agar dapat meningkatkan akses layanan 4G di Desa Penda Rangas dan sekitarnya
279	BERKAT	longsor semakin bertambah setiap tahun ,diperlukan pembuatan tanggul beronjong di pinggir sungai kawasan pemukiman warga sepanjang 600 meter	rt 01 dan rt 02 desa penda rangas, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Penda Rangas	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	✓		
280	BERKAT	pengadaan hand traktor 2 buah	desa penda rangas, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Penda Rangas	DINAS PERTANIAN	✓		Buat Proposal
281	BERKAT	pembangunan balai ibadah hindu kaharingan 1 unit	desa penda rangas rt 02, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Penda Rangas	SEKRETARIAT DAERAH	✓		
282	BERKAT	penyuluhan tentang bahaya narkoba	penda rangas, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Penda Rangas	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	✓		Hanya penyediaan narasumber
283	BERKAT	kebanyakan waktu aparat desa bekerja diluar untuk meningkatkan kesejahteraan sehingga tugas dan fungsinya tidak optimal.diperlukan kenaikan gaji siltap aparat desa dari Rp 2.750.000.- menjadi Rp 5.000.000.- per bulan	penda rangas, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Penda Rangas	SEKRETARIAT DAERAH		✗	
284	BERKAT	pelatihan pengurus BUMDes	penda rangas, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Penda Rangas	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	✓		
285	IRMANTO	Pembangunan Rumah Adat Basara	Desa Dandang RT 03, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Dandang	SEKRETARIAT DAERAH		✗	
286	IRMANTO	Bantuan Keagamaan	Desa Dandang RT 02, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Dandang	SEKRETARIAT DAERAH	✓		
287	IRMANTO	Pelatihan, penanganan dan Bantuan dalam Segala aspek dibidang Pertanian	Desa Dandang, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Dandang	DINAS PERTANIAN	✓		
288	IRMANTO	Pelatihan BUMDES	Desa Dandang, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Dandang	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	✓		
289	IRMANTO	Bantuan untuk Bencana Alam	Desa Dandang, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Dandang	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	✓		
290	KARLI	mendukung usaha masyakat dalam beternak sapi untuk kesejahteraan masyarakat desa Tumbang Tajungan	Desa Tumbang Tajungan, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Tajungan	DINAS PERTANIAN	✓		Pelatihan
291	KARLI	Mendukung usaha ternak ayam kampung untuk kesejahteraan masyakat di Desa Tumbang Tajungan	Desa Tumbang Tajungan, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Tajungan	DINAS PERTANIAN	✓		Pelatihan
292	KARLI	Mendukung usaha masyarakat dalam beternak itik untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di desa Tumbang Tajungan	Desa Tumbang Tajungan, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Tajungan	DINAS PERTANIAN	✓		Pelatihan

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
293	KARLI	masyarakat desa Tumbang Tajungan banyak beternak babi maka perlu adanya penyuluhan dalam pembuatan pakan babi secara ekonomis	Desa Tumbang Tajungan, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Tajungan	DINAS PERTANIAN	✓		Pelatihan
294	TANTI	kurang memadai alat bermain BKB Desa Teluk Kanduri maka kami usulkan 1 paket alat bermain BKB Desa Teluk Kanduri Perkiraan Dana Rp. 10.000.000,-	Desa Teluk Kanduri RT.002, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Teluk Kanduri	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	✓		SK Pembentukan BKB
295	TANTI	Masih Kurangnya ketahanan pangan Penambahan Bibit Babi 45 Ekor upaya meningkatkan ketahanan pangan ekonomi masyarakat Desa Teluk Kanduri Perkiraan Dana Rp. 135.000.000	Desa Teluk Kanduri RT.002, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Teluk Kanduri	DINAS PERTANIAN		✗	
296	TANTI	masih kurangnya ketahanan pangan kami berharap bisa mendapatkan Bibit ayam Kampung 100 ekor untuk meningkat kesejahteraan masyarakat Desa Teluk Kanduri Perkiraan Dana	Desa Teluk Kanduri RT.002, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Teluk Kanduri	DINAS PERTANIAN		✗	
297	TANTI	tidak adanya pemeliharaan pertanian dan tanaman kami usulkan 1 paket herbisida untuk kegiatan pertanian masyarakat Desa Teluk Kanduri Perkiraan Dana Rp. 2.000.000,-	Desa Teluk Kanduri RT.002, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Teluk Kanduri	DINAS PERTANIAN		✗	
298	TANTI	tidak lengkapnya bahan dalam pertanian untuk itu kami minta 1 paket pestisida upaya peningkatan pertanian desa teluk kanduri Perkiraan Dana Rp. 2.000.000,-	Desa Teluk Kanduri RT.002, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Teluk Kanduri	DINAS PERTANIAN	✓		
299	TANTI	tidak adanya pupuk buat pertanian maka kami usul kan 1 paket pupuk urea untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil panen masyarakat desa teluk kanduri Perkiraan Dana Rp. 2.000.000,-	Desa Teluk Kanduri RT.002, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Teluk Kanduri	DINAS PERTANIAN		✗	
300	TANTI	belum adanya alat pertanian yang canggih maka kami berharap bisa mendapatkan 1 buah mesin/alat handtraktor tangan untuk meningkatkan pekerjaan pertanian desa teluk kanduri Perkiraan Dana Rp. 5.000.000,-	Desa Teluk Kanduri RT.002, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Teluk Kanduri	DINAS PERTANIAN	✓		
301	TANTI	belum lengkapnya bibit buah-buahan untuk kami usulkan 192 Bibit buah-buahan supaya meningkatkan tanaman masyarakat desa teluk kanduri Perkiraan Dana Rp. 9.600.000,-	Desa Teluk Kanduri RT.002, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Teluk Kanduri	DINAS PERTANIAN	✓		
302	TANTI	kurangnya bibit sayuran desa teluk kanduri kami usulkan 192 bibit sayur-sayuran upaya meningkatkan tanaman masyarakat desa teluk kanduri Perkiraan Dana Rp. 2.880.000,-	Desa Teluk Kanduri RT.002, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Teluk Kanduri	DINAS PERTANIAN	✓		
303	TANTI	tidaknya alat kesenian budaya di Desa Teluk Kanduri kami usulkan 2 buah alat kesenian Kecapi untuk meningkat sosial dan budaya desa teluk kanduri Perkiraan Dana Rp. 1.000.000,-	Desa Teluk Kanduri RT.002, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Teluk Kanduri	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		✗	Buat Proposal, bentuk sanggar

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
304	TANTI	belum adanya rebab alat kesenian dan budaya di desa teluk kanduri kami usulkan 3 buah Rebab untuk meningkatkan alat kesenian dan budaya di desa teluk kanduri Perkiraan Dana Rp. 2.000.000,-	Desa Teluk Kanduri RT.002, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Teluk Kanduri	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		✗	Buat Proposal, bentuk sanggar
305	TANTI	tidak adanya Gong alat kesenian dan budaya untuk meningkatkan sosial dan kebudayaan masyarakat desa teluk kanduri kami usulkan 4 buah Gong Perkiraan Dana Rp. 3.000.000,-	Desa Teluk Kanduri RT.002, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Teluk Kanduri	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		✗	Buat Proposal, bentuk sanggar
306	TANTI	Belum tersedianya alat kesenian sosial dan budaya maka kami usulkan 1 paket alat kangkanong supaya meningkat dibidang kesenian dan budaya desa teluk kanduri Perkiraan Dana Rp. 2.500.000,-	Desa Teluk Kanduri RT.002, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Teluk Kanduri	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		✗	Buat Proposal, bentuk sanggar
307	ANDREAS	masih berdampak banjir di karenakan cuaca tidak menentu dan di perlukan perahu karet untuk mengevakuasi warga yang berdampak dan terkena banjir	Desa Tumbang Hamputung RT 01 dan RT 02, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Hamputung	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	✓		
308	MELKY SUDIARJO	Sampah dan limbah Rumah tangga sering dibuang sungai sehingga menimbulkan banyak sampah berserakan disungai	TUMBANG PONYOI, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Ponyoi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	✓		
309	MELKY SUDIARJO	usulan alat Bantu untuk penyandang disabilitas dan batuan permakanan untuk lansia	Desa Tumbang ponyoi, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Ponyoi	DINAS SOSIAL	✓		
310	MELKY SUDIARJO	Mengusulkan bantuan untuk pelatihan penjahit dan mesin jahit 10 unit	Desa tumbang ponyoi, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Ponyoi	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	✓		
311	MELKY SUDIARJO	mengusulkan bibit babi	Desa Tumbang ponyoi, Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Ponyoi	DINAS PERTANIAN		✗	
312	CHANDRA S,Pd	memohon bantuan bibit buah mangga, dan bibit durian bangkok	Desa Karetan Sarian, Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Karetan Sarian	DINAS PERTANIAN	✓		
313	BATTU	Pengadaan Bibit Ikan sepuluh ribu ekor	Desa Tumbang Posu, Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Posu	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	✓		Bibit ikan Patin
314	CUMBIE, AMd.Kep	Tidak adanya tempat istirahat atau singgah di wisata karamat korong henjan	Desa Tumbang Anoi, Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Anoi	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		✗	Belum ada anggaran, gunakan Dana Desa
315	HAMZAH	kurangnya peningkatan pkk	tumbang maraya Rt.02, Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Maraya	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		✗	Diusulkan ke PKK Kabupaten
316	HAMZAH	tidak ada kendaraan operasional penanganan bencana	tumbang maraya Rt.01 dan 02, Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Maraya	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	✓		
317	HAMZAH	karena masyarakat kurang mencukupi Dana tiwah dan memerlukan 20 ekor sapi atau babi	tumbang maraya Rt.01 dan 02, Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Maraya	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		✗	Usul ke Pokir
318	HORDIANTO.	Pengembangan Daerah Wisata "Sahai Hatoan" 1 Paket	Desa Tumbang Lapan, Kab. Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Lapan	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		✗	Kelola oleh Desa

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
319	SARADIN	bantuan mesin penggilingan padi untuk Masyarakat Peladang berpindah-pindah.	Hulu Sungai Koro, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Koro	DINAS PERTANIAN	✓		Proposal
320	ARDIUS, S.Pd	Pengadaan Bibit Tanaman Padi 1 Paket	Tumbang Napoi, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Napoi	DINAS PERTANIAN	✓		Proposal
321	YUNANTO, S.Pd	belum memadai bahan material dan perlunya ada bantuan pemerintah untuk tiga sekte GKE, HINDU Dan GBI	Desa Mangkuhung, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Mangkuhung	SEKRETARIAT DAERAH	✓		Proposal
322	YUNANTO, S.Pd	Belum adanya aliran listrik ke antar Desa-desa	Desa Mangkuhung, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Mangkuhung	SEKRETARIAT DAERAH	✓		PLN
323	YUNANTO, S.Pd	pengadaan bibit jagung merah sekitar 90 kg,karena di wilayah kami sangat cocok	Desa Mangkuhug, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Mangkuhung	DINAS PERTANIAN	✓		Proposal
324	YUNANTO, S.Pd	belum mempunyai/pengadaan bibit sayur 90 kg	Desa Mangkuhung, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Mangkuhung	DINAS PERTANIAN	✓		Proposal
325	YUNANTO, S.Pd	Belum mempunyai bibit/pengadaan bibit padi sekitar 7.200 kg	Desa Mangkuhung, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Mangkuhung	DINAS PERTANIAN	✓		Proposal
326	YUNANTO, S.Pd	Perlu adanya pendampingan/penepatan pelatihan menjahit bagi ibu-ibu di Desa Kami	Desa Mangkuhung, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Mangkuhung	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	✓		
327	YUNANTO, S.Pd	perlu adanya pelatihan anyam-anyaman untuk 20 Orang	Desa Mangkuhung, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Mangkuhung	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	✓		
328	YUNANTO, S.Pd	perlu adanya pendampingan/pelatihan mobiler/molding sekitar 15 Orang	Desa Mangkuhung, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Mangkuhung	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	✓		
329	YUNANTO, S.Pd	Pelatihan/bimbingan perbengkelan sepeda motor sangat perlu bagi anak-anak muda di desa kami yang adanya sekitar 20 orang	Desa Mangkuhung, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Mangkuhung	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	✓		
330	TOBIE U. JIRAU	Bibit Buah Buahan	Desa Tumbang Siruk, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Siruk	DINAS PERTANIAN	✓		Proposal
331	ANTON	Desa belum teraliri jaringan listrik PLN yang menjadi salah satu keterbatasan masyarakat desa Tumbang Manyoi	Tumbang Manyoi, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Manyoi	SEKRETARIAT DAERAH	✓		PLN
332	ANTON	Akan dibangunnya bangunan Pustu mempengaruhi banyaknya kebutuhan terhadap fasilitas sebagai sarana prasarana Pustu khususnya Alat Elektronik Laptop sebagai penunjang Informasi dan komunikasi publik sebanyak 2 buah	Tumbang Manyoi, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Manyoi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		✗	Untuk pemenuhan keperluan dimaksud silahkan koordinasikan dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Tumbang Masukih

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	HASIL FORGAB		KETERANGAN
							PROSES	TOLAK	
333	ANTON	Akan dibangunnya bangunan Pustu mempengaruhi banyaknya kebutuhan terhadap fasilitas sebagai sarana prasarana Pustu khususnya Alat Cetak dan Penggandaan Printer sebagai penunjang Informasi dan komunikasi publik sebanyak 2 buah	Tumbang Manyoi, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Manyoi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		✗	Untuk pemenuhan keperluan dimaksud silahkan koordinasikan dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Tumbang Masukih
334	SONTO	Pembangunan Sarana Prasarana Listrik PLN Desa Rangan Hiran	Desa Rangan Hiran, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Rangan Hiran	SEKRETARIAT DAERAH	✓		PLN
335	SONTO	Pengadaan Tenda Pengungsian Penduduk	Desa Ranga Hiran, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Rangan Hiran	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	✓		
336	SONTO	Pelatihan dan Peralatan TIM SAR (Safe And Rescue)	Desa Rangan Hiran, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Rangan Hiran	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	✓		
337	SONTO	Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan 20 Unit	Desa Rangan Hiran, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Rangan Hiran	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	✓		
338	SONTO	Peningkatan Ekowisata Air Terjun Tondan	Desa Rangan Hiran, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Rangan Hiran	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		✗	Tidak ada Dana, Dana Desa saja
339	SUANDI	Jaringan listrik (PLN)	Desa Harowu, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Harowo	SEKRETARIAT DAERAH	✓		PLN
340	SEMSUHADI	Belum tersedianya alat dan mesin pertanian	Desa Bontoi, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Bontoi	DINAS PERTANIAN	✓		Proposal
341	SEMSUHADI	1.Partisipasi petani dalam kegiatan penyuluhan yang masih kurang 2. Koordinasi dengan lembaga setempat yang belum maksimal	Desa Bontoi, Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Bontoi	DINAS PERTANIAN	✓		
342	BENNY RIAN TO. A.Md	5 Paket Mesin Pompa Air	Desa Tumbang Empas, Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Tumbang Empas	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	✓		
343	PENDI	perlunya pendataan untuk warga yang belum menerima BPJS warga Tidak mampu (JKN) yang ada di desa	Desa Dahian Tambuk, Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Dahian Tambuk	DINAS SOSIAL	✓		
344	PENDI	perlunya pemberdayaan Posyandu dan lembaga adat yang ada di desa	Desa Dahian Tambuk, Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Dahian Tambuk	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	✓		

Diproses
215

Ditolak
129

Total
344

**4.7 USULAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DARI KABUPATEN
GUNUNG MAS KE PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Kabupaten Gunung Mas, sebagai bagian integral dari Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ini mengajukan usulan perencanaan pembangunan untuk tahun 2026. Usulan ini merupakan hasil dari proses perencanaan partisipatif di tingkat lokal, yang mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat serta potensi dan tantangan spesifik daerah. Kami berkomitmen penuh untuk mendukung visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah, sejalan dengan prioritas nasional.

Berikut ini adalah daftar usulan perencanaan pembangunan dari Kabupaten Gunung Mas ke Provinsi Kalimantan Tengah:



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH

Jalan Brigjen Katamso Nomor 99, Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah
Telp/Fax. (0537) – 3032766 Email/Website : www.gunungmaskab.go.id

Kuala Kurun, 20 Februari 2025

Nomor : 000.7.2/3/BAPPERIDA/II/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : **Usulan Program/Kegiatan Kabupaten
Gunung Mas melalui APBD
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026.**

Yth. **DAFTAR TERLAMPIR**

di –

Palangka Raya

Menindaklanjuti hasil pembahasan Forum Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap usulan Kabupaten/Kota yang sudah diinput di SIPD RI tahun 2026, bahwa Pemerintah Daerah juga diminta untuk menyampaikan secara tertulis usulan yang telah diinput paling banyak sejumlah 50 (lima puluh) usulan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi pada Kabupaten/Kota.

Berkenaan dengan hal diatas, berikut disampaikan usulan program/kegiatan prioritas Kabupaten Gunung Mas yang merupakan kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah (*daftar terlampir*), mohon kiranya dapat diterima dan diakomodir pada APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026.

Demikian surat ini disampaikan untuk bahan lebih lanjut, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan,



Yantrio Aulia, M.Ec.Dev.
Pembina Tk.I
NIP. 197801192006041013

Tembusan :

1. Bupati Gunung Mas sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas; dan
3. Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah.

**Lampiran I Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Gunung Mas**

Nomor : 000.7.2/3/BAPPERIDA/II/2025

Tanggal : 20 Februari 2025

Hal : **Usulan Program/Kegiatan Kabupaten Gunung Mas melalui APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026**

DAFTAR LAMPIRAN SURAT

Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
2. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
4. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah
5. Kepala Dinas TPH dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah
8. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah

**Lampiran II Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Gunung Mas**

Nomor : 000.7.2/3/BAPPERIDA/II/2025

Tanggal : 20 Februari 2025

Hal : **Usulan Program/Kegiatan Kabupaten Gunung Mas melalui APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026**

**DAFTAR USULAN PROGRAM/KEGIATAN KEWENANGAN PROVINSI
DI KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026**

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	VOLUME	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Perlunya pengembangan dan optimalisasi destinasi wisata	Rehap Plapon dan Penataan Kamar dalam Betang Damang Batu	Desa Tumbang Anoi, Kecamatan Damang Batu , Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Rekomendasikan dengan memperhatikan kewenangan dan ketersediaan anggaran Proposal dan Usulan di Perjelas	Dilanjutkan dengan menyesuaikan anggaran	-	-	Pengembangan Cagar Budaya
2	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Perlunya pengembangan dan optimalisasi destinasi wisata	Pemberdayaan Masyarakat Pengelola Wisata Tumbang Anoi	Desa Tumbang Anoi, Kecamatan Damang Batu , Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Rekomendasikan dengan memperhatikan kewenangan dan ketersediaan anggaran Proposal dan Usulan di Perjelas (DPMD)	Dilaksanakan di tingkat provinsi dengan peserta 13 kabupaten/1 kota	-	-	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
3	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Rendahnya persentase pemuda wirausaha	Sosialisasi meningkatkan kompetensi kewirausahaan bagi pemuda/pemudi	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Lengkapi data dukung : proposal, foto Lokasi	Pelatihan Kewirausahaan TA.2025	30	63870486	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan
4	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Rendahnya partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan kemasyarakatan	Pendampingan memperoleh perizinan dan sertifikasi bagi pemuda/pemudi	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pemuda dan Olahraga	Rekomendasikan dengan memperhatikan kewenangan dan ketersediaan anggaran. (Usulan diperjelas dan proposal rincian)	Akan dipertimbangkan bila sharing anggaran antara APBD Provinsi dan APBD Kabupaten (Dispora Gumas)	100	200000000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
5	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Rendahnya persentase pemuda wirausaha	Bantuan Modal/Peralatan/Perlengkapan bagi usaha pemuda/pemudi	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Lengkapi data dukung: proposal, foto lokasi	Bantuan Produktif Usaha Mikro dan Kecil (BPUM) (namun tidak termasuk bantuan peralatan dan perlengkapan) TA.2025	20000	50000000000	Menumbuhkan embangan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
6	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Rendahnya persentase pemuda wirausaha	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Kewirausahaan	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Koperasi Usaha Kecil	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Lengkapi data dukung: proposal, foto lokasi	Pelatihan Kewirausahaan TA.2025	40	63870486	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			an melalui pemasaran digital bagi pemuda/pe mudi	Dan Menengah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah						serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausaha an
7	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Perlunya peningkatan kualitas jalan	Masih tingginya Kondisi jalan provinsi dalam kondisi rusak, baik kondisi rusak ringan maupun rusak berat (Rekonstruks i Jalan Bawan - Kuala Kurun seluas 64,23 Km)	Ruas Jalan Bawan - Kuala Kurun, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, memperhatikan kewenangan provinsi dan melengkapi data dukung (readliness criteria)	-	-	-	-
8	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Perlunya peningkatan kualitas jalan	Masih tingginya Kondisi jalan provinsi dalam kondisi rusak, baik kondisi rusak ringan maupun rusak berat (Rekonstruks i Jalan Kuala Kurun - Linau, seluas 45 Km)	Ruas Jalan Kuala Kurun - Linau, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, memperhatikan kewenangan provinsi dan melengkapi data dukung (readliness criteria)	-	-	-	-
9	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Perlunya peningkatan kualitas jalan	Rekonstruksi Tumbang Talaken - Tumbang Jutuh, seluas 22 Km	Ruas Jalan Tumbang Talaken- Tumbang Jutuh, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, memperhatikan kewenangan provinsi dan melengkapi data dukung (readliness criteria)	-	-	-	-
10	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Perlunya peningkatan kualitas jalan	Rekonstruksi Tumbang Jutuh - Tewah, seluas 46,7 Km	Ruas Jalan Tumbang Jutuh - Tewah, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, memperhatikan kewenangan provinsi dan melengkapi data dukung (readliness criteria)	-	-	-	-
11	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Keterbatasan kesediaan infrastruktur yang menunjang aktivitas ekonomi	Pembangun an Jembatan Sei Kahayan di Sepang Kota kelas A seluas 305 Meter	Kelurahan Sepang Kota, Kec. Sepang, Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, memperhatikan kewenangan provinsi dan melengkapi data dukung (readliness criteria)	-	-	-	-
12	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Masih rendahnya capaian rumah layak huni	Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Rungan Hulu sebanyak 125 Unit	Kelurahan Tumbang Rahuyan dan Desa Sangal, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, memperhatikan kewenangan provinsi dan melengkapi data dukung (readliness criteria)	Dapat dilengkapi data dukung berupa BNBA dan Koordinat Lokasi. Dapat di verifikasi lebih lanjut jika berada di lokasi kewenangan pemerintah provinsi (Kawasan kumuh 10s.d. <15 Ha berdasarkan SK Kumuh)	-	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
13	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Infrastruktur sarana dan	Pengadaan Ternak Sapi	Desa Tumbang Tambirah,	Dinas Tanaman Pangan,	a. Usulan menyesuaikan	Disetujui, Apabila dana	1	150000000	Pengadaan Bibit Ternak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		prasarana pertanian dan peternakan masih kurang serta relatif terbatas	di Demplot Hijauan Pakan Ternak (HPT) 20 Ekor	Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Hortikultura dan Peternakan	dengan ketersediaan anggaran b. Lengkapi data dukung	tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah, Data dukung proposal dan Foto Lokasi bisa dilengkapi			yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
14	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang serta relatif terbatas	Optimalisasi Cetak Sawah Kelompok Tani Hiyut Permai 1 Paket	Desa Pematang Limau, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	a. Usulan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran b. Lengkapi data dukung	Di Pending, Untuk Kegiatan Cetak Sawah dan OPLA, bisa diusulkan ke APBN Dana Tugas Pembantuan, Data dukung proposal dan Foto Lokasi bisa dilengkapi	-	-	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestsida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
15	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang serta relatif terbatas	Pengadaan Bibit Ayam Petelor Dan Pakan 2000 Ekor	Desa Pematang Limau, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	a. Usulan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran b. Lengkapi data dukung	Disetujui, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah, Data dukung proposal dan Foto Lokasi bisa dilengkapi	1	150000000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
16	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang serta relatif terbatas	Peningkatan Jalan Sawah dengan volume 1500 Meter, Karena tidak layak untuk dilewati roda dua atau empat untuk pergi ke sawah atau ladang	Desa Tewai Baru, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	a. Usulan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran b. Lengkapi data dukung	Disetujui, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah, Data dukung proposal dan Foto Lokasi bisa dilengkapi	1	210000000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
17	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang serta relatif terbatas	Pembangunan Kandang Babi di Demplot Hijauan Pakan Ternak (HPT) berukuran 120 M2	Desa Tumbang Tambirah, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	a. Usulan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran b. Lengkapi data dukung	Disetujui, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah, Data dukung proposal dan Foto Lokasi bisa dilengkapi	1	100000000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
18	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang serta relatif terbatas	Pengadaan dan Pendistribusi an Ternak Babi Jantan Demplot (Indukan) 5 Ekor	Desa Tumbang Tambirah, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	a. Usulan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran b. Lengkapi data dukung	Disetujui, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah, Data dukung proposal dan Foto Lokasi bisa dilengkapi	1	750000000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
19	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang serta relatif terbatas	Pembangunan Unit Olahan Pakan Ternak (Ruminansia dan Unggas) di Demplot Hijauan Pakan Ternak (HPT)	Desa Tumbang Tambirah, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	a. Usulan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran b. Lengkapi data dukung	Disetujui, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah, Data dukung proposal dan Foto Lokasi bisa	1	100000000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

							dilengkapi			
20	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang serta relatif terbatas	Pembangunan Renovasi Unit Produksi Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Sarana Pendukungnya	Desa Tumbang Tambirah, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	a. Usulan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran b. Lengkapi data dukung	Di Tolak : Pembiayaannya oleh APBD II Kabupaten	1	50000000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
21	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang serta relatif terbatas	Pembangunan Jalan Produksi untuk kegiatan tanaman perkebunan berukuran 2,5 Km	Kelurahan Tumbang Rahuyan, Kecamatan Rungan Hulu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perkebunan	a. Usulan diakomodir menyesuaikan dengan ketersediaan pagu anggaran b. Agar melampirkan data dukung c. Usulan merupakan kewenangan Dinas Perkebunan	Jalan Produksi/Jalan Usaha Tani tidak menjadi kewenangan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	-	-	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
22	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang serta relatif terbatas	Pengadaan bibit sayur mayur sebanyak 5000 bungkus	Desa Fajar Harapan, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	a. Usulan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran b. Lengkapi data dukung	Disetujui, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah, Data dukung proposal dan Foto Lokasi bisa dilengkapi	1	50000000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
23	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan yang masih rendah	Belum tersedianya bibit kelapa sawit di masyarakat sebanyak 3600 bibit	Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perkebunan	Usulan diakomodir menyesuaikan dengan ketersediaan pagu anggaran dan agar melampirkan data dukung	Menyesuaikan Pagu Anggaran di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	1	15000000	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan
24	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan yang masih rendah	Pengusulan bibit tanaman buah cangkokan (buah sawo, buah mangga, buah manggis dan buah lengkeng). Sebanyak 120 bibit	Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	a. Usulan diakomodir menyesuaikan dengan ketersediaan pagu anggaran b. Agar melampirkan data dukung c. Usulan merupakan kewenangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Disetujui, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah, Data dukung proposal dan Foto Lokasi bisa dilengkapi	120	25000000	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
25	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan yang masih rendah	Bantuan bibit tanaman pangan, Sayur-sayuran lengkap sebanyak 100 Bungkus	Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	a. Usulan diakomodir menyesuaikan dengan ketersediaan pagu anggaran b. Agar melampirkan data dukung c. Usulan merupakan kewenangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Disetujui, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah, Data dukung proposal dan Foto Lokasi bisa dilengkapi	100	25000000	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
26	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang serta relatif terbatas	Peningkatan jalan usaha tani seluas 1,5 KM	Desa Sandung Tambun, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	a. Usulan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran b. Lengkapi data dukung	Disetujui, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah, Data dukung proposal dan	1	210000000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

							Foto Lokasi bisa dilengkapi			
27	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan yang masih rendah	Pengadaan Bibit karet unggul/Karet Kolasi sebanyak 1000 Batang	Desa Sandung Tambun, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perkebunan	Usulan diakomodir menyesuaikan dengan ketersediaan pagu anggaran dan agar melampirkan data dukung	Menyesuaikan Pagu Anggaran di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	1	15000000	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan
28	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan yang masih rendah	Bantuan bibit sayuran sebanyak 192 Bungkus	Desa Teluk Kanduri, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	a. Usulan diakomodir menyesuaikan dengan ketersediaan pagu anggaran b. Agar melampirkan data dukung c. Usulan merupakan kewenangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Disetujui, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah, Data dukung proposal dan Foto Lokasi bisa dilengkapi	192	25000000	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
29	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang serta relatif terbatas	Penyediaan bantuan ternak sapi sebanyak 18 Ekor	Kelurahan Tumbang Napoi, Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	a. Usulan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran b. Lengkapi data dukung	Disetujui, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah, Data dukung proposal dan Foto Lokasi bisa dilengkapi	1	50000000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
30	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang serta relatif terbatas	Sarana perbengkela n	Gudang Alsintan Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Dianggarkan melalui dana APBD Kabupaten	Disetujui, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah, Data dukung proposal dan Foto Lokasi bisa dilengkapi	1	50000000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
31	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang serta relatif terbatas	Sarana perbengkela n	Gudang Alsintan Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Agar dianggarkan melalui dana APBD Kabupaten	Disetujui, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah, Data dukung proposal dan Foto Lokasi bisa dilengkapi	1	50000000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
32	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang serta relatif terbatas	Sarana perbengkela n	Gudang Alsintan Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Agar dianggarkan melalui dana APBD Kabupaten	Disetujui, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah, Data dukung proposal dan Foto Lokasi bisa dilengkapi	1	50000000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
33	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang	Sarana perbengkela n	Gedung Asintan Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Agar dianggarkan melalui dana APBD Kabupaten	Disetujui, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan	1	50000000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana

		serta relatif terbatas		Kalimantan Tengah			Anggaran Perangkat Daerah, Data dukung proposal dan Foto Lokasi bisa dilengkapi			Pendukung Pertanian
34	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Masih minimnya ketersediaan anggaran untuk pemenuhan standar minimal logistik dan peralatan penanggulangan bencana	Pembangunan Gedung, Sarana dan Prasarana, Peningkatan SDM, dan Honor Personil PUSDALOPS (1 Unit Gedung Bangunan)	Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, (Komplek BPBD Gunung Mas), Provinsi Kalimantan Tengah	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Rekomendasikan dengan memperhatikan kewenangan dan ketersediaan anggaran. (Usulan diperjelas proposal dan RAB, CNC)	-	-	-	-
35	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Masih minimnya ketersediaan anggaran untuk pemenuhan standar minimal logistik dan peralatan penanggulangan bencana	Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk Penanggulangan Bencana sebanyak 17 jenis	Kantor BPBD Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Rekomendasikan dengan memperhatikan kewenangan dan ketersediaan anggaran. (Usulan diperjelas proposal dan rincian)	-	-	-	-
36	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Belum optimalnya upaya pengembangan literasi masyarakat	Sosialisasi Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Rekomendasikan dengan memperhatikan kewenangan dan ketersediaan anggaran. (Usulan diperjelas dan proposal rincian)	Dapat saja diakomodir menyesuaikan anggaran yang tersedia	-	-	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
37	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Nilai indeks kualitas keluarga masih di bawah nilai nasional	Usulan Bimtek Konvensi Hak Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rekomendasikan dengan memperhatikan kewenangan dan ketersediaan anggaran. (Usulan diperjelas dan proposal)	Usulan ini dapat diakomodir hanya tingkat kabupatenberupa Narasumber Kegiatan, fasilitas Koordinasi dan Konsultasi dengan catatan jika tersedia memadai APBD TA 2026 Dinas P3APPKB Prov. Kalteng	1	15000000	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi
38	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Kecenderungan penurunan TPAK perempuan	Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam Kewirausahaan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rekomendasikan dengan memperhatikan kewenangan dan ketersediaan anggaran. (Usulan diperjelas dan proposal)	Usulan ini dapat diakomodir hanya tingkat kabupatenberupa Narasumber Kegiatan, fasilitas Koordinasi dan Konsultasi dengan catatan jika tersedia memadai APBD TA 2026 Dinas P3APPKB Prov. Kalteng	1	15000000	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
39	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Perkawinan usia anak tinggi	Seminar Pendewasaan Usia Perkawinan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rekomendasikan dengan memperhatikan kewenangan dan ketersediaan anggaran. (Usulan diperjelas dan proposal)	Usulan ini dapat diakomodir hanya tingkat kabupatenberupa Narasumber Kegiatan, fasilitas Koordinasi dan Konsultasi dengan catatan jika tersedia memadai APBD TA 2026 Dinas P3APPKB Prov.	1	15000000	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

				Tengah			Kalteng			
40	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Perlunya peningkatan penyediaan jaringan air siap minum perpipaan di perkotaan	Peningkatan Kapasitas IKK Kuala Kurun, 10 Liter/Detik	Kota Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekomendasikan dengan memperhatikan kewenangan dan ketersediaan anggaran. (Usulan diperjelas dan proposal)	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, memperhatikan kewenangan provinsi dan melengkapi data dukung (readliness criteria)			

Kepala Badan,



Yantrio Aulia, M.Ec.Dev.
Pembina Tk.I
NIP. 197801192006041013

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Arah kebijakan pembangunan merupakan instrumen perencanaan esensial yang memandu pemerintah daerah dalam menentukan dan mencapai tujuannya. Kebijakan ini menetapkan tahapan dan prioritas yang harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan, dengan mempertimbangkan pengaturan waktu yang tepat. Lebih dari itu, arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan solusi atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan yang ada.

Analisis mendalam terhadap permasalahan dan isu-isu strategis kewilayahan akan menjadi basis utama dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan kewilayahan. Hal ini bertujuan untuk menentukan prioritas yang fokus pada pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah-daerah unggulan. Ke depannya, fokus kebijakan kewilayahan ini harus dipedomani bersama oleh pemerintah pusat, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Gunung Mas termasuk seluruh Perangkat Daerah yang terlibat di dalamnya, demi mencapai sinergi pembangunan.

Secara spesifik, arah pembangunan Kabupaten Gunung Mas akan menitikberatkan pada peningkatan kapasitas infrastruktur yang memadai. Ini dianggap krusial sebagai percepatan aksesibilitas wilayah, yang diharapkan mampu menjadi fondasi kuat untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di berbagai sektor. Peningkatan infrastruktur ini akan berdampak langsung pada:

- **Ekonomi:** Memperlancar distribusi barang dan jasa, menarik investasi, serta membuka peluang usaha baru.
- **Sumber Daya Manusia (SDM):** Mempermudah akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta mobilitas tenaga kerja.
- **Tata Kelola Pemerintahan:** Meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan koordinasi antarwilayah.

Dampak dari penguatan infrastruktur ini diharapkan akan sangat terasa pada bidang ekonomi dan sosial masyarakat, menciptakan kemajuan yang signifikan bagi seluruh warga Kabupaten Gunung Mas. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas menerjemahkannya ke dalam arah kebijakan

pembangunan daerah. Arah kebijakan ini, bersama dengan strategi yang dipilih, menjadi sarana krusial dalam melaksanakan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah.

Pada dasarnya, ini adalah peta jalan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan adanya strategi dan arah kebijakan yang jelas, setiap langkah yang diambil akan lebih terarah dan efisien, sehingga dampak positifnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.

1. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi memegang peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai kerangka perencanaan yang sistematis, strategi memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang pembangunan. Strategi yang dirancang dengan jelas dapat menjadi upaya dalam mencapai visi dan misi pembangunan daerah yang terfokus dan memberikan dampak yang signifikan. Oleh karena itu, strategi dirancang untuk menjembatani antara misi yang bersifat jangka panjang dengan kebijakan dan program konkret yang dapat diimplementasikan, sehingga setiap langkah pembangunan berjalan terarah dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Pada tahap pertama RPJPD, Kabupaten Gunung Mas memiliki fokus dalam peningkatan infrastruktur pembangunan sosial ekonomi yang berkualitas dan merata. Hal ini dilakukan dalam rangka memperkuat fondasi transformasi pembangunan melalui peningkatan kualitas infrastruktur serta peningkatan ketahanan dan mitigasi bencana. Strategi yang dapat diterapkan dalam mewujudkan penguatan fondasi transformasi di Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut:

1. Strategi Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Gunung Mas

MISI	STRATEGI PEMBANGUNAN
Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terintegrasi dan Berkelanjutan	Peningkatan aksesibilitas pembangunan, sarana prasarana permukiman, kawasan perekonomian dan infrastruktur pelayanan publik
	Optimalisasi pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup
Peningkatan Kualitas Pembangunan SDM yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan menuju masyarakat yang unggul
	Penguatan sosial budaya masyarakat yang madani dan setara
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Peningkatan hilirisasi potensi SDA unggulan dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat
	Pemanfaatan program perlindungan sosial yang adaptif dan integratif
Peningkatan Reformasi Birokrasi	Peningkatan kinerja pemerintah daerah yang akuntabel dan berorientasi pelayanan

- a. Peningkatan aksesibilitas pembangunan, sarana prasarana permukiman, kawasan perekonomian dan infrastruktur pelayanan publik

Strategi peningkatan aksesibilitas pembangunan di Kabupaten Gunung Mas diarahkan pada pemenuhan dan peningkatan kualitas infrastruktur yang merata, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Hal ini menitikberatkan pada pembangunan sarana prasarana permukiman seperti jalan lingkungan, sistem drainase, air bersih, dan sanitasi yang layak guna menciptakan permukiman yang sehat dan tertata. Selain itu, peningkatan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan dan perbaikan jaringan jalan serta jembatan menjadi prioritas untuk

memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang serta jasa, terutama di daerah terpencil dan pedalaman. Pada sektor perekonomian dan pelayanan publik, strategi difokuskan pada pembangunan infrastruktur pendukung kawasan ekonomi lokal seperti pasar rakyat, fasilitas penyimpanan hasil pertanian, serta sarana transportasi dan komunikasi yang memadai. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing daerah.

b. Optimalisasi pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup

Strategi optimalisasi pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup di Kabupaten Gunung Mas diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Strategi ini menekankan pentingnya perencanaan infrastruktur yang memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, seperti pembangunan jalan dan jembatan yang menghindari kawasan lindung, serta penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam sistem sanitasi, air bersih, dan pengelolaan limbah. Selain itu, ruang terbuka hijau dan infrastruktur hijau seperti taman kota dan sistem penyerapan air hujan menjadi bagian dari strategi untuk menekan degradasi lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas juga menegaskan kebijakan penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal. Langkah ini mencakup pengawasan intensif terhadap wilayah rawan tambang ilegal, penindakan tegas terhadap pelaku, serta kerja sama lintas sektor dalam penegakan hukum lingkungan. Kebijakan ini juga mengarah pada pemulihan ekosistem melalui program rehabilitasi tambang yang mencakup reklamasi lahan bekas tambang serta pelibatan masyarakat lokal dalam upaya pemulihan lingkungan.

c. Meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan menuju masyarakat yang unggul

Strategi peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Gunung Mas difokuskan pada pemenuhan serta peningkatan infrastruktur dasar yang mendukung terciptanya

masyarakat yang sehat dan berdaya saing. Dalam sektor kesehatan, pemerintah daerah berkomitmen membangun dan merevitalisasi fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, puskesmas pembantu, dan rumah sakit dengan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai standar. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan juga didorong melalui penyediaan transportasi rujukan medis dan pemanfaatan teknologi digital dalam layanan kesehatan jarak jauh, khususnya di daerah pedalaman dan terpencil.

Di bidang pendidikan, strategi diarahkan pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur sekolah dari jenjang dasar hingga menengah, termasuk penyediaan ruang kelas yang layak, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya. Pemerintah daerah juga memperhatikan pemerataan infrastruktur pendidikan di wilayah pelosok agar tidak terjadi ketimpangan kualitas pembelajaran. Selain itu, digitalisasi sekolah melalui penyediaan jaringan internet dan perangkat pembelajaran modern menjadi bagian dari upaya mendorong pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

d. Penguatan sosial budaya masyarakat yang madani dan setara

Strategi penguatan sosial budaya masyarakat yang madani dan setara di Kabupaten Gunung Mas diarahkan pada penciptaan ruang-ruang publik yang inklusif dan fasilitas sosial budaya yang mampu menjadi wadah interaksi, edukasi, dan pelestarian nilai-nilai lokal. Pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan kualitas infrastruktur seperti balai adat, taman budaya, dan pusat kegiatan masyarakat yang representatif serta mudah diakses oleh semua kalangan, termasuk kelompok rentan. Infrastruktur ini berperan penting dalam memperkuat identitas budaya lokal, memfasilitasi dialog antar komunitas, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial dan kebudayaan. Selain itu, pemenuhan infrastruktur yang mendukung kesetaraan sosial juga menjadi fokus utama, seperti pembangunan fasilitas umum yang ramah difabel, ruang ibadah berbagai agama yang layak, serta tempat-tempat pelayanan sosial yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

- e. Peningkatan hilirisasi potensi SDA unggulan dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat

Strategi peningkatan hilirisasi potensi sumber daya alam (SDA) unggulan di Kabupaten Gunung Mas dilakukan dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta didukung oleh pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Dalam sektor pertanian, pemerintah daerah mendorong pertanian berkelanjutan melalui kebijakan subsidi pupuk organik dan penerapan pengendalian hama alami, guna mengurangi ketergantungan pada bahan kimia berbahaya dan menjaga kesuburan tanah jangka panjang. Untuk menunjang hal tersebut, infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan usaha tani, gudang penyimpanan hasil panen, dan pusat pengolahan hasil pertanian terus ditingkatkan agar proses produksi hingga distribusi dapat berjalan efisien dan bernilai tambah tinggi bagi petani lokal.

Sementara itu, dalam sektor pariwisata, strategi diarahkan pada pengembangan destinasi yang mengedepankan kelestarian lingkungan dan nilai-nilai budaya lokal. Kebijakan pengendalian daya dukung lingkungan di kawasan wisata, seperti pengaturan jumlah pengunjung, pengelolaan sampah, dan pelestarian kawasan alami, menjadi prioritas untuk menjaga kualitas lingkungan sekaligus meningkatkan daya tarik wisata jangka panjang. Infrastruktur pendukung seperti akses jalan ke objek wisata, fasilitas sanitasi, pusat informasi wisata, serta akomodasi ramah lingkungan dibangun dan ditata dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat sekitar. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor hilir SDA unggulan, tetapi juga memastikan keberlanjutan ekologis dan pelestarian budaya daerah.

- f. Pemanfaatan program perlindungan sosial yang adaptif dan integratif

Strategi pemanfaatan program perlindungan sosial yang adaptif dan integratif di Kabupaten Gunung Mas diarahkan untuk menjawab tantangan kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat melalui pendekatan yang holistik dan berbasis kebutuhan lokal. Pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan infrastruktur layanan sosial yang berkualitas, seperti pusat pelatihan

keterampilan, balai latihan kerja desa, serta fasilitas pendukung pemberdayaan masyarakat. Salah satu fokus utama adalah peningkatan keterampilan petani melalui pelatihan terpadu yang mencakup teknik pertanian modern, penggunaan alat pertanian yang efisien, serta pengelolaan hasil pascapanen. Infrastruktur pendukung seperti demplot pertanian, gudang komunal, dan akses jalan ke sentra produksi juga ditingkatkan agar petani lebih siap menghadapi perubahan iklim dan dinamika pasar, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Selain itu, strategi ini juga mencakup rencana peningkatan kapasitas pelaku pariwisata lokal melalui pelatihan kewirausahaan, pelayanan prima, manajemen homestay, serta pemanfaatan teknologi digital untuk promosi dan pemasaran destinasi. Pembangunan infrastruktur pendukung seperti pusat informasi pariwisata, tempat pelatihan terpadu, dan akses transportasi menuju lokasi wisata dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat lokal benar-benar terlibat dalam rantai nilai pariwisata. Dengan pemanfaatan program perlindungan sosial yang tidak hanya bersifat bantuan langsung, tetapi juga meningkatkan kapasitas dan daya saing masyarakat, Kabupaten Gunung Mas menyiapkan pondasi untuk memperluas kesempatan kerja, memperbaiki taraf hidup, dan menciptakan masyarakat yang tangguh serta mandiri.

g. Peningkatan kinerja pemerintah daerah yang akuntabel dan berorientasi pelayanan

Strategi peningkatan kinerja pemerintah daerah yang akuntabel dan berorientasi pelayanan di Kabupaten Gunung Mas dilaksanakan melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berbasis data. Pemerintah daerah menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan membangun infrastruktur digital yang memadai, seperti jaringan internet yang stabil hingga ke tingkat kecamatan dan desa, serta sistem pelayanan publik berbasis elektronik (e-government). Dengan infrastruktur ini, proses administrasi dan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan terbuka, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur fisik kantor pemerintahan, fasilitas pelayanan publik seperti kantor kecamatan, kelurahan, dan unit layanan terpadu juga menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan yang optimal. Pemerintah daerah mendorong pembentukan ruang pelayanan yang ramah masyarakat, inklusif, serta mudah diakses oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Di sisi lain, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara melalui pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pegawai memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan akuntabel.

2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan dirumuskan dalam rangka mencapai strategi pembangunan, juga sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan ini disusun berdasarkan misi dan mempertimbangkan potensi, tantangan, dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Gunung Mas. Fokus utama arah kebijakan meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam mewujudkan strategi pembangunan jangka menengah di Kabupaten Gunung Mas, dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN 2026
Peningkatan aksesibilitas pembangunan, sarana prasarana permukiman, kawasan perekonomian dan infrastruktur pelayanan publik	Penyediaan jalur transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik, dan penyediaan infrastruktur layanan dasar kewilayahan	√
	Peningkatan akses perumahan dan permukiman layak huni	√
Optimalisasi pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup	Penguatan aksi pembangunan rendah karbon dalam mendukung pelestarian lingkungan	√

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN 2026
Meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan menuju masyarakat yang unggul	Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai	√
	Peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan dan kualitas jaminan kesehatan masyarakat	√
Penguatan sosial budaya masyarakat yang madani dan setara	Peningkatan pendidikan dan partisipasi pembangunan bagi perempuan	√
Peningkatan hilirisasi potensi SDA unggulan dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat	Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berkualitas, khususnya produksi, pengolahan dan pemasaran	√
Pemanfaatan program perlindungan sosial yang adaptif dan integratif	Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marginal	√
Peningkatan kinerja pemerintah daerah yang akuntabel dan berorientasi pelayanan	Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif	√
	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah	√

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

6.1 Program Pembangunan RPJMD dan Target Capaian Tahun 2026

Sesuai dengan kebijakan umum pembangunan daerah seperti yang dinyatakan pada sub bab maka arah kebijakan pembangunan daerah adalah merupakan upaya lebih jauh untuk mencapai sasaran pembangunan dimaksud, pengelompokan bidang-bidang pembangunan dalam uraian mengenai arah kebijakan pembangunan daerah ini dilakukan dengan berpedoman pada perumpunan urusan pemerintahan seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan nama-nama program disesuaikan dengan Permendagri 90 tahun 2019 dan pemutahirannya.

Program pembangunan Daerah berdasarkan urusan wajib dan pilihan adalah sebagai berikut :

I. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR:

1. Pendidikan, meliputi :
 - a. Program Pengelolaan Pendidikan;
 - b. Program Pengembangan Kurikulum;
 - c. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan;
 - d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan;
 - e. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra.
2. Kesehatan, meliputi :
 - a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
 - b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman;
 - d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi :
 - a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
 - b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - c. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional;

- d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
 - e. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
 - f. Program Pengembangan Permukiman;
 - g. Program Penataan Bangunan Gedung;
 - h. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya;
 - i. Program Penyelenggaraan Jalan;
 - j. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
 - k. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, meliputi :
- a. Program Pengembangan Perumahan;
 - b. Program Kawasan Permukiman;
 - c. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh;
 - d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU);
 - e. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, meliputi :
- a. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
 - b. Program Penanggulangan Bencana;
 - c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.
6. Sosial, meliputi :
- a. Program Pemberdayaan Sosial;
 - b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
 - c. Program Rehabilitasi Sosial;
 - d. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
 - e. Program Penanganan Bencana;
 - f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

II. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

1. Tenaga Kerja, meliputi :
- a. Program Perencanaan Tenaga Kerja;
 - b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - c. Program Penempatan Tenaga Kerja;

- d. Program Hubungan Industrial.
- 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, meliputi :
 - a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;
 - b. Program Perlindungan Perempuan;
 - c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
 - d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak;
 - e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
 - f. Program Perlindungan Khusus Anak.
- 3. Pangan, meliputi :
 - a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan;
 - b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
 - c. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
 - d. Program Pengawasan Keamanan Pangan.
- 4. Pertanahan, meliputi :
 - a. Program Pengelolaan Izin Lokasi;
 - b. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
 - c. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan;
 - d. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee;
 - e. Program Penetapan Tanah Ulayat;
 - f. Program Pengelolaan Tanah Kosong;
 - g. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah;
 - h. Program Penatagunaan Tanah;
 - i. Program Pengurusan Hak Atas Tanah;
 - j. Program Survei, Pengukuran Dan Pemetaan;
 - k. Program Pengembangan Dan Pembinaan Sdm Dan Kelembagaan Pertanahan;
 - l. Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan;
 - m. Program Penanganan Konflik, Sengketa Dan Perkara Pertanahan.
- 5. Lingkungan Hidup, meliputi :
 - a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
 - b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
 - d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3);
 - e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 - f. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH;
 - g. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
 - h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
 - i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
 - j. Program Pengelolaan Persampahan.
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, meliputi :
- a. Program Pendaftaran Penduduk;
 - b. Program Pencatatan Sipil;
 - c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, meliputi :
- a. Program Penataan Desa;
 - b. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
 - c. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
 - d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, meliputi :
- a. Program Pengendalian Penduduk;
 - b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
 - c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).
9. Perhubungan, meliputi :
- a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ);
 - b. Program Pengelolaan Pelayaran;
 - c. Program Pengelolaan Penerbangan.
10. Komunikasi dan Informatika
- a. Program Informasi Dan Komunikasi Publik;
 - b. Program Aplikasi Informatika;

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, meliputi :
 - a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
 - b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi;
 - c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
 - d. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian;
 - e. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi;
 - f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM);
 - g. Program Pengembangan UMKM.
12. Penanaman Modal, meliputi :
 - a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - b. Program Promosi Penanaman Modal
 - c. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
13. Kepemudaan dan Olah Raga, meliputi :
 - a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
 - b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
 - c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.
14. Statistik, meliputi :
 - a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
15. Persandian, meliputi :
 - a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.
16. Kebudayaan, meliputi :
 - a. Program Pengembangan Kebudayaan;
 - b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
 - c. Program Pembinaan Sejarah;
 - d. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya.
17. Perpustakaan, meliputi :
 - a. Program Pembinaan Perpustakaan;
 - b. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno.
18. Kearsipan, meliputi :
 - a. Program Pengelolaan Arsip;
 - b. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip;
 - c. Program Perizinan Penggunaan Arsip.

III. URUSAN PILIHAN

1. Kelautan dan Perikanan, meliputi :
 - a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
 - b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
 - c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan;
 - d. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.
2. Pariwisata, meliputi :
 - a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
 - b. Program Pemasaran Pariwisata;
 - c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
 - d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.
3. Pertanian, meliputi :
 - a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;
 - b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
 - c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - d. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
 - e. Program Perizinan Usaha Pertanian;
 - f. Program Penyuluhan Pertanian.
4. Kehutanan, meliputi :
 - a. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.
5. Energi dan Sumber Daya Mineral, meliputi :
 - a. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan.
6. Perdagangan, meliputi :
 - a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan;
 - b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
 - c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting;
 - d. Program Pengembangan Ekspor;
 - e. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen;
 - f. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
7. Perindustrian, meliputi :
 - a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri;
 - b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota;

- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.
- 8. Transmigrasi, meliputi :
 - a. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi;
 - b. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
 - c. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

IV. UNSUR PENDUKUNG

- 1. Sekretariat Daerah, meliputi :
 - a. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Program Perekonomian Dan Pembangunan.
- 2. Sekretariat Dewan, meliputi :
 - a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD.

V. UNSUR PENUNJANG

- 1. Perencanaan, meliputi :
 - a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 2. Keuangan, meliputi :
 - a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- 3. Kepegawaian, meliputi :
 - a. Program Kepegawaian Daerah.
- 4. Pendidikan dan Pelatihan, meliputi :
 - a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- 5. Penelitian dan Pengembangan, meliputi :
 - a. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah.
- 6. Pengelolaan Perbatasan, meliputi :
 - a. Program Pengelolaan Perbatasan.

VI. UNSUR PENGAWASAN

- 1. Inspektorat Daerah, meliputi :
 - a. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
 - b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.

VII. UNSUR KEWILAYAHAN

- 1. Kecamatan, meliputi :
 - a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
 - b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
 - c. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
 - d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 - e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

VIII. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

- 1. Kesatuan Bangsa Dan Politik, meliputi :
 - a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
 - b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
 - c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
 - e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Target capaian pembangunan Tahun 2026 yang telah ditetapkan di RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1. Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 Kabupaten Gunung Mas

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Target 2026
Indikator Tujuan				
1	Indeks Infrastruktur	Poin		62.5
2	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%		15.00
3	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73.88	74.64
4	Laju pertumbuhan Ekonomi	%	4.48	5.20
5	PDRB per Kapita	Juta Rp/ Kapita	67.08	71.00
6	Tingkat Kemiskinan	%	5.68	4.41
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin		62.00
8	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3.27	3.43
Indikator Sasaran				
1	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%		53.65
2	Indeks Konektivitas Wilayah	Poin	80.12	81.75
3	Persentase Desa Mandiri	%		2.63

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Target 2026
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69.33	71.55
5	Indeks Risiko Bencana	Poin		121.85
6	Indeks Pendidikan	Poin	64.84	66.72
7	Indeks Kesehatan	Poin	82.43	82.78
8	Indeks Ketimpangan Gender	Poin		0.47
9	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin		58.82
10	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	69.36	71.24
11	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	2.18	6.52
12	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	1.54	3.03
13	Kontribusi PDRB Gunung Mas terhadap PDRB Kalimantan Tengah	%	4.38	4.36
14	Gini Rasio	Poin	0.309	0.274
15	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.12	3.73
16	Nilai SAKIP	Poin	61.63	64.42
17	Indeks Pelayanan Publik	Poin		81.70
18	Indeks Integritas Nasional	Poin		75.67

Tabel 6.2. Target Indikator Kinerja Daerah Tahun 2026 Kabupaten Gunung Mas

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun 2026	KET.
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI				
1.	Indeks Ketahanan Pangan		NA	57.42	
2.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	NA	7.06	
3.	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)		NA	36.00	
4.	% RT Pengguna Listrik PLN		NA	76.00	
5.	Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan/atau dimodernisasi		NA	21.00	
6.	Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan/atau dimodernisasi		NA	21.00	
7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	IKLH	69.33	71.55	
8.	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman		NA	15.20	
9.	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan		NA	37.18	
10.	Persentase angka BABS di tempat terbuka		NA	2.90	
11.	Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan		NA	53.65	
12.	Persentase kondisi mantap jalan		NA	36.20	
13.	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	NA	15.00	
14.	Indeks Risiko Bencana	poin	NA	121.85	
15.	Indeks Ketahanan Daerah	poin	NA		
16.	Jumlah Penduduk	Ribu Jiwa	145.54	150.94	
17.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.89	1.83	
18.	Rasio Penduduk	%	110.49	109.99	
19.	Kepadatan Penduduk	Orang/m2	15.62	16.20	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4.48	5.20	
2.	Tingkat Kemiskinan	%	5.68	4.41	
3.	PDRB Per Kapita	Rp Juta	67.08	71.00	
4.	Pengeluaran Per Kapita (Ribu/Tahun		NA	11,680	
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.12	3.73	
6.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan			48.23	
7.	Indeks Gini	angka	0.309	0.274	
8.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		NA	46.38	
9.	Indeks Modal Manusia	angka	73.88	74.64	
10.	Indeks Kesehatan		82.20	82.78	

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun 2026	KET.
11.	Usia Harapan Hidup	tahun	73.58	73.804	
12.	Angka Kematian Ibu		110	109.3	
13.	Indeks Keluarga Sehat	indeks			
14.	Prevalensi Stunting	%	10.39	9.88	
15.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)		NA	90.65	
16.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	NA	99.5	
17.	Indeks Pendidikan		64.84	66.72	
18.	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	9.37	9.58	
19.	Harapan Lama Sekolah	tahun	12.10	12.52	
20.	Angka Partisipasi Sekolah (5-6)		NA	100	
21.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15		NA	100	
22.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan		NA	100	
23.	Angka Literasi/Numerasi	%	NA		
24.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	NA	40.59	
25.	Kemampuan Literasi SD		NA	55.29	
26.	Kemampuan Literasi SMP		NA	68.50	
27.	Kemampuan Numerasi SD		NA	38.26	
28.	Kemampuan Numerasi SMP		NA	63.63	
29.	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B		NA	30.43	
30.	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4		NA	64.84	
31.	Iklim Keamanan SD		NA	77.33	
32.	Iklim Keamanan SMP		NA	77.68	
33.	Iklim Kebinekaan SD		NA	77.60	
34.	Iklim Kebinekaan SMP		NA	79.81	
35.	Iklim Inklusivitas SD		NA	61.80	
36.	Iklim Inklusivitas SMP		NA	65.36	
37.	Indeks Literasi Digital	angka	NA		
38.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	NA		
39.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	skor	NA	80.72	
40.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	angka	NA	58.82	
41.	Indeks Perlindungan Anak	angka	NA		
42.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	0-100	NA	71.24	
43.	Capaian Kabupaten Layak Anak		NA	521.00	
44.	Indeks Ketimpangan Gender	poin	NA	0.468	
45.	Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	%	NA	2.33	
III ASPEK DAYA SAING DAERAH					
	Angka Ketergantungan	%	44.13	44.22	
2.	Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	%	8.28	11.85	
3.	Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		9.98	9.99	
4.	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	1.65	1.70	
5.	Skor dan Predikat Inovasi Daerah		50.54	53,69 (Inovatif)	
6.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		2.18	6.52	
7.	Kontribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		33.05	33.18	
8.	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	1.54	3.03	
9.	Kontribusi PDRB Gunung Mas terhadap PDRB Kalimantan Tengah		4.38	4.36	
10.	jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara		NA	26,674	
11.	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	NA		
12.	Indeks Infrastruktur		NA	62.5	
13.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	NA	53.65	
14.	Persentase Desa Mandiri	%	NA	2.63	

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun 2026	KET.
15.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	NA		
16.	Tingkat Inflasi	%	NA		
17.	Indeks Konektivitas Wilayah		80.12	81.75	
IV ASPEK PELAYANAN UMUM					
	Indeks Reformasi Hukum		NA		
2.	Indeks Reformasi Birokrasi		NA	62.00	
3.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)		B (61,63)	64.42	
4.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	poin	NA	2.67	
5.	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan		NA	16.00	
6.	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda		NA	100.00	
7.	Indeks Pelayanan Publik	angka	NA	81.70	
8.	Indeks Integritas Nasional	angka	NA	75.67	
9.	Persentase Penegakan Perda	%	NA	100.00	
10.	Indeks Daya Saing Daerah	nilai	3.27	3.43	

6.2. Rencana Kerja RKPD Tahun 2026

Program dan kegiatan prioritas Tahun 2026 berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan adalah seperti yang disajikan dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENIA OPD)
KAB. GUNUNG MAS
TAHUN 2026

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA						358.956.425.187,12							0,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						348.535.345.187,12							0,00	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						348.535.345.187,12							0,00	
1	1	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	284.654.984.586,40						-	0,00	
	1	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-		-	150.000.000,00			-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-	-	0,00	
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	110.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD													
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

	1		01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-					281.459.224.073,40					2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-				0,00		
	1		01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	281.280.076.653,40	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJUKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSI GURU PNSD, DAK NON FISIK-TKG PNSD	-		2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-				0,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1		01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	108.710.520,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-				0,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1		01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	70.436.900,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-				0,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1		01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	35.292.749,00			-		2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-				0,00			
	1		01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	19.946.149,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-				0,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1		01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	10.038.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-				0,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1		01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			

						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-					1 Laporan	5.308.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-						850.958.000,00			-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	
	1	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-					12 Dokumen	752.401.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-					10 Orang	98.557.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-						1.191.712.760,00			-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi										-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-					1 Paket	39.183.250,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-					2 Paket	212.973.480,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-					1 Paket	47.520.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat"	-				

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					100 Paket	120.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					4 Dokumen	13.248.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA
1	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																	
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					0 Paket	156.168.030,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA
1	01	01	2.05	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					4 Laporan	152.620.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					300 Laporan	450.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	155.402.750,00				-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-	-	-	0,00	
1	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					5 Unit	155.402.750,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	207.720.000,00				-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-	-	-	0,00	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					100 Laporan	15.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	192.720.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-				-	604.674.254,00			-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	
	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					50 Unit	219.789.213,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					50 Unit	16.500.261,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					20 Unit	168.384.780,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	200.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-				-	63.720.174.900,72						-		0,00	

1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	-	-	-	32.191.681.046,00	-	-	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-	-	-	0,00	
1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-	-	-	0 Ruang	287.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-	-	-	0 Unit	1.694.962.540,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.01	0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	-	-	-	0 Unit	1.760.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.01	0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	-	-	-	0 Unit	690.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	-	-	-	0 Paket	225.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-	-	-	0 Peserta Didik	416.989.100,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		-	-	-					-		-	-	-		

							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					0 Orang	949.837.338,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berakarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-				0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN LAH RAGA
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
							Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah					0 Satuan Pendidikan	1.337.063.274,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berakarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-				0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN LAH RAGA
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS					0 Satuan Pendidikan	18.944.530.175,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berakarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-				0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN LAH RAGA
1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
							Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					0 Orang	327.296.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berakarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-				0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN LAH RAGA
1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																		
							Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun					0 Ruang	345.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berakarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-				0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN LAH RAGA
1	01	02	2.01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan					0 Orang	401.474.813,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berakarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-				0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN LAH RAGA
1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					0 Dokumen	196.023.920,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berakarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-				0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN LAH RAGA
1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		

							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi					0 Komunitas	522.745.274,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi					0 Kegiatan	296.066.411,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.01	0045	Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik					0 Buku	82.680.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia					1333 Paket	1.005.656.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.01	0048	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan					0 Orang	949.553.021,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar					0 Satuan Pendidikan	334.303.180,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					0 Ruang	1.009.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																	

							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia					1 Paket	416.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	20.773.756.766,72			-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	
	1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium																
							Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun					0 Ruang	345.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.02	0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																
							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun					0 Unit	2.362.922.247,72	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun					0 Unit	1.167.250.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																
							Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					0 Ruang	1.652.900.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.02	0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																
							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					0 Unit	1.652.900.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					0 Unit	207.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

1		01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				0 Paket	350.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berakarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN LAH RAGA
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta Didik	105.057.900,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berakarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN LAH RAGA	
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	949.837.338,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berakarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN LAH RAGA	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																
						Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	9.066.399.825,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berakarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN LAH RAGA	
1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																
						Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				0 Orang	150.657.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berakarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN LAH RAGA	
1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				0 Orang	308.466.880,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berakarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN LAH RAGA	
1	01	02	2.02	0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																
						Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				0 Konten Digital	56.044.180,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berakarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN LAH RAGA	
1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					0 Dokumen	80.216.560,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																	
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan					0 Dokumen	42.674.616,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																	
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi					0 Komunitas	348.697.880,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																	
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar					0 Satuan Pendidikan	389.456.340,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																	
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik					0 Buku	55.120.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																	
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia					0 Paket	1.005.156.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																	
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia					0 Paket	478.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)																	
							-	-				-	10.047.893.479,00			-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		-	0,00	

1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD															
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun					0 Unit	800.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD															
						Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia					0 Paket	184.690.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD															
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					0 Orang	949.837.338,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD															
						Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen					153 Satuan Pendidikan	244.244.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD															
						Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP					153 Satuan Pendidikan	2.691.978.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.03	0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan															
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan					153 Orang	446.175.250,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.03	0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan															
						Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan					0 Orang	279.057.450,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.03	0025	koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan															
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					0 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai Filosofi "Belom Bahadat"	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

[illegible]

						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					0 Ruang	950.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	706.843.609,00			-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00		
	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																
						Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP					2 Satuan Pendidikan	139.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																
						Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan					0 Orang	187.516.140,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					2 Dokumen	167.809.516,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.04	0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																
						Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan					2 Dokumen	109.949.829,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.04	0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia					1 Paket	102.568.124,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
3	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-				-	160.185.700,00						-			0,00	

[illegible]

							Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota					0 Orang	305.875.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.03			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-				-	1.566.571.306,00			-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	
	2	19	03	2.03	0006	Seleksi Atlet Daerah																
							Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi					0 Orang	572.112.237,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.03	0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga																
							Jumlah penerima Penghargaan olahraga					0 Orang	349.999.895,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.03	0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)																
							Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)					0 Pelatda	262.448.188,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota																
							Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan					0 Orang	382.010.986,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.04			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-				-	2.250.000.000,00			-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat"	-			0,00	
	2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait																
							Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota					0 Dokumen	2.250.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat"	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	20.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	70.018.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					4 Dokumen	24.999.999,24	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																	
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket	30.009.294,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					2 Laporan	24.980.550,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2 Laporan	1.645.616.162,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	4.094.065.653,00			-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-	-		0,00		
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	139.999.653,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					2 Laporan	100.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	3.854.066.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	1.249.364.248,22			-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-	-		0,00		
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					4 Unit	100.380.312,14		Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-				0,00		DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					25 Unit	998.983.936,08		Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-				0,00		DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					4 Unit	150.000.000,00		Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-				0,00		DINAS KESEHATAN
9	1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-		-		-	77.179.187.217,28							-			0,00		
1	02	02	2.01				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-		-		-	15.533.088.789,28				-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		-		0,00		
1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																				
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun					5 Unit	4.522.932.963,00		Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-				0,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																				
							Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun					1 Unit	414.067.075,00		Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-				0,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas																				
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar					2 Unit	1.684.425.539,00		Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-				0,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																				
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar					15 Unit	1.613.247.694,00		Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-				0,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																				
							Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya					1 Unit	835.496.202,00		Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-				0,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																				
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan					50 Unit	983.991.870,00		Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-				0,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																				

							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					17 Unit	152.296.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan					2 Paket	3.489.282.954,28	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)																
							Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan					5 Layanan	911.203.492,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																
							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan					17 Paket	926.145.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	-	61.611.458.428,00			-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-	-		0,00		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					2353 Orang	1.257.656.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					2246 Orang	835.646.046,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					2139 Orang	140.848.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					10794 Orang	102.371.050,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					19283 Orang	1.014.289.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					22097 Orang	184.043.120,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN

[illegible]

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					4 Dokumen	579.476.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)												4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					238 Orang	205.247.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA												4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					228 Orang	46.435.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular												4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					4 Dokumen	1.769.016.078,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat												4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					4 Dokumen	37.867.826.516,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional												4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan					3 Paket	33.219.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat												4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat					4 Dokumen	224.460.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit												4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit					4 Dokumen	4.000.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas												4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					4 Dokumen	4.234.427.676,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya												4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					4 Dokumen	779.243.194,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																	

						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota					17 Unit	252.664.640,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				2 Dokumen	169.024.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1868 Orang	101.850.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				377 Orang	14.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				1200 Orang	182.612.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				4 Dokumen	221.975.270,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				4 Dokumen	303.717.840,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				4 Dokumen	435.051.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				4 Dokumen	864.879.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	-	34.640.000,00			-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-	-		0,00		
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	34.640.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN

						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	-	-	2.268.584.000,00							0,00		
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	900.000.000,00			-		4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-	-	0,00	
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)					30 Orang	900.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	1.368.584.000,00			-		4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-	-	0,00	
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya					50 Orang	1.368.584.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
11	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-	-	-	642.326.580,00						-	0,00		
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-	-	-	240.757.000,00			-		4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-	-	0,00	
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					4 Dokumen	240.757.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-	-	-	118.922.000,00			-		4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-	-	0,00	
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					4 Dokumen	118.922.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	-	-	-	44.864.580,00			-		4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-	-	0,00	
	1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)					4 Dokumen	44.864.580,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN

[illegible]

							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	57.265.830,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			58.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
1	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	14.951.800,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			15.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1 Dokumen	12.966.200,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			13.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
1	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1 Dokumen	1.638.201,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			1.700.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	36.848.200,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			37.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
1	02	01	2.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun					3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			30.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	34.625.008.890,23				-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-	-	-	35.072.000.000,00	
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					276 Orang/bulan	34.573.095.370,23	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			35.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
1	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			50.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					1 Laporan	21.913.520,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			22.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	307.113.362,00				-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-	-	-	3.100.000.000,00	
1	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	

[illegible]

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	651.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			800.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
	1	02	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-		-	419.800.000,00			-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-	-		535.000.000,00	
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					1 Unit	20.800.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			35.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					12 Unit	171.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			200.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					160 Unit	228.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			300.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
	1	02	01	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	-		-		-	14.850.000.000,00			-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-	-		15.000.000.000,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	14.850.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			15.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
	1	02	01	2.13			Penataan Organisasi	-		-		-	9.000.000,00			-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-	-		15.000.000,00	
	1	02	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana					1 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			15.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
14	1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-		-		-	1.758.000.000,00						-		3.160.000.000,00	
	1	02	02	2.01			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-		-		-	1.336.000.000,00			-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-	-		2.650.000.000,00	
	1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit					20 Unit	194.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			250.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN

[illegible]

							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan					1 Unit	74.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		75.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
15	1	02	03				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-			-	6.644.235.862,00					-	-	7.500.000.000,00	
	1	02	03	2.02			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	6.494.235.862,00				4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-	-	7.150.000.000,00	
	1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan															
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan					1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		150.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar															
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)					164 Orang	6.394.235.862,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		7.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
	1	02	03	2.03			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	150.000.000,00				4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-	-	350.000.000,00	
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya					62 Orang	150.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		350.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
16	1	02	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	56.000.000,00					-	-	80.000.000,00	
	1	02	05	2.01			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	56.000.000,00				4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-	-	80.000.000,00	
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat															
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat					1 Dokumen	56.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		80.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
													218.014.584.615,81								
													218.014.584.615,81								
													202.105.767.145,81								
17	1	03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	17.914.562.984,81					-	-	15.174.650.000,00	

	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-					198.000.000,00						3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-				220.000.000,00	
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3 Dokumen	76.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-				80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					5 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-				10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					5 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-				10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					5 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-				10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															-				

							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					5 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				-	11.375.766.424,81			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		-	11.584.000.000,00	
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					123 Orang/bulan	11.296.566.424,81	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			11.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			4.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																

[illegible]

							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					1 Paket	250.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					2 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					10 Orang	200.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-				-	832.566.400,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		-	905.000.000,00	
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	20.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	25.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					2 Paket	350.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket	15.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																	

							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket	10.566.400,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							1 Laporan	400.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	3.120.128.000,00					-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-	-		100.000.000,00	
1	03	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar							2 Unit	2.500.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							10 Unit	620.128.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

[illegible]

							Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara					2 KM	250.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	02	2.01	0107	Pembangunan Unit Air Baku																	
							Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun					2 Unit	2.500.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	02	2.01	0113	Pembangunan Kanal Banjir																	
							Panjang Kanal Banjir yang Dibangun					0,5 KM	3.000.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-	5.500.000.000,00				-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-	-		7.000.000.000,00	
1	03	02	2.02	0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa																	
							Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun					0,25 KM	2.000.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																	
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan					0,5 KM	1.500.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																	

[illegible]

21						PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-	-	-	-	20.555.128.600,00							25.200.000.000,00		
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		-				20.555.128.600,00			-		1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		25.200.000.000,00	
	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota															
						Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					10 Dokumen	20.386.545.650,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		25.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG															
						Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG					10 Dokumen	168.582.950,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
22	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-	-	-	-	500.000.000,00						-	500.000.000,00		
	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	500.000.000,00			-		1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-	-	500.000.000,00	
	1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota															
						Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
23	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-	-	-	-	128.621.144.830,00						-	134.600.000.000,00		

[illegible]

							Panjang Jembatan yang Direhabilitasi					30 Meter	1.450.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	10	2.01	0059	Rekonstruksi Jalan																	
							Panjang Jalan yang Direkonstruksi					10 KM	75.000.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			80.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	10	2.01	0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan																	
							Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin					2 Jembatan	553.669.660,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	10	2.01	0069	Pembangunan Jembatan																	
							Panjang jembatan yang dibangun					60 Meter	15.000.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			20.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
24	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-				-	514.307.331,00						-			565.000.000,00	
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-				-	180.000.000,00				1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		-		200.000.000,00	
	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																	
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih					25 Orang	180.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-	234.307.331,00				1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		-		265.000.000,00	
	1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota																	

							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan						2 Dokumen	200.000.000,00		Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-				225.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	11	2.02	0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPIAKI																				
							Jumlah Pengelola SIPIAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya						2 Orang	22.219.500,00		Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-				25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	11	2.02	0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi																				
							Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan						1 Layanan Informasi	12.087.831,00		Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-				15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-		-				-	100.000.000,00					-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		-		100.000.000,00	
1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																				
							Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan						15 Paket Pekerjaan	100.000.000,00		Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-				100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
25	1	03	12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-	-					-	546.250.000,00							-		-		410.000.000,00	
	1	03	12	2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-					-	221.250.000,00					-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		-		25.000.000,00	
1	03	12	2.01	0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota																				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan					1 Dokumen	107.891.490,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM			
	1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan																			
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan					1 Laporan	75.209.520,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM			
	1	04	05	2.01	0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan																			
							Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum					2 Lokasi	5.000.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM			
	1	04	05	2.01	0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan																			
							Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum					11 Lokasi	7.500.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM			
						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA											12.595.653.134,42							0,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											12.595.653.134,42							0,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											12.595.653.134,42							0,00	
29	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-					-	11.520.653.134,42						-			0,00			

	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-				25.215.625,00					7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00		
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	25.215.625,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	10.272.043.960,42					5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		0,00		
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				194 Orang/bulan	10.263.643.960,42	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	8.400.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	30.756.800,00					5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		0,00		
	1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	30.756.800,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	843.365.420,00					5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		0,00		
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	25.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	160.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan					20 laporan	150.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0022	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																
							Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Tranitibus dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal					12 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-				-	330.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		0,00	
	1	05	02	2.02	0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					12 laporan	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					12 Laporan	80.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP					12 Laporan	120.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					12 Laporan	80.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
31	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-				-	280.000.000,00			-		-			0,00	
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-	280.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		0,00	
	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya					12 Dokumen	130.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	2.01	0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																

[illegible]

						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-					12 Laporan	9.434.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatkan ketetraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideolog Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	-							201.200.000,00			-	7. Meningkatkan ketetraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-			0,00	
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-					67 Paket	51.100.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatkan ketetraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-					13 Orang	150.100.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatkan ketetraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-						543.029.240,00			-	7. Meningkatkan ketetraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-			0,00		
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-					2 Paket	12.430.190,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatkan ketetraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-					4 Paket	73.964.850,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatkan ketetraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-					4 Paket	23.079.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatkan ketetraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-					3 Paket	31.050.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatkan ketetraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

										Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia					1 Dokumen	33.831.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	1	05	03	2.04	0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota																							
						Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalikan					12 Orang	32.174.310,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								
	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																							
						Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalikan					2 Kegiatan	347.593.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								
						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											8.301.272.182,56								10.115.220.791,75				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											64.593.000,00								64.593.000,00				
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											64.593.000,00								64.593.000,00				
34	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-						64.593.000,00						-			64.593.000,00							
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-						64.593.000,00				7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			64.593.000,00								
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					24 Laporan	64.593.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			64.593.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											8.236.679.182,56								10.050.627.791,75				
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											8.236.679.182,56								10.050.627.791,75				
35	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-					4.396.007.182,56							-			5.640.004.871,75							
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-					30.551.144,00				7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			65.551.144,00									
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					6 Dokumen	30.551.144,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			65.551.144,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-					3.686.900.000,00				7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			4.616.411.784,00									
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																							

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					45 Orang/bulan	3.662.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			4.565.752.540,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					12 Dokumen	24.900.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-		7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			50.659.244,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-				-	6.682.400,00			-		7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		12.000.000,00	
	8	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					12 Laporan	6.682.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-		7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			12.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	-	-				-	43.240.000,00			-		7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		50.000.000,00	
	8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					45 Paket	43.240.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-		7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				-	271.071.786,00			-		7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		421.000.000,00	
	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					4 Paket	5.303.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-		7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			6.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					13 Paket	19.553.538,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-		7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					5 Paket	11.903.928,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-		7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	15.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	7. Meningkatkan ketertarikan dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	7. Meningkatkan ketertarikan dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			12.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material															
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				45 Paket	24.013.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	7. Meningkatkan ketertarikan dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			32.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250 Laporan	183.297.820,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	7. Meningkatkan ketertarikan dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	37.500.000,00			-	7. Meningkatkan ketertarikan dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		-	165.089.343,75	
8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	37.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	7. Meningkatkan ketertarikan dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			165.089.343,75	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	107.000.000,00			-	7. Meningkatkan ketertarikan dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		-	107.000.000,00	
8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	7.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	7. Meningkatkan ketertarikan dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			7.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 Laporan	100.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	7. Meningkatkan ketertarikan dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-					213.061.852,56					7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			202.952.600,00	
	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															45.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	42.072.900,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-			7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				
	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																125.849.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					13 Unit	88.750.900,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-			7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				
	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																17.103.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					8 Unit	17.103.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-			7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				
	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	65.134.452,56	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-			7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				
36	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-			-	1.377.650.000,00							-			1.475.000.000,00	
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-			-	1.377.650.000,00						7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			1.475.000.000,00	
	8	01	02	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																65.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun					20 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-			7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																210.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					200 Orang	200.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-			7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka																1.200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Paskibraka					200 Orang	1.112.650.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-			7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				

37		8		01	03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	-	-	-	1.610.072.000,00					-	1.590.624.500,00			
		8		01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-	-	-	1.610.072.000,00					7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	1.590.624.500,00	
		8		01	03	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun					9 Dokumen	47.320.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		15.237.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8		01	03	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
							Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun					9 Dokumen	13.400.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		26.035.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8		01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					1000 Orang	1.549.352.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		1.549.352.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
38		8		01	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-	-	-	205.900.000,00					-	442.813.660,00			
		8		01	04	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-	-	-	205.900.000,00					7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	442.813.660,00	
		8		01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah													
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					100 Orang	70.800.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		214.955.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8		01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah													
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					20 Laporan	135.100.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		227.858.560,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
39		8		01	05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-	-	-	162.580.000,00					-	265.000.000,00			
		8		01	05	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-	-	-	162.580.000,00					7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	265.000.000,00	

	8		01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					500 Orang	97.480.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8		01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					50 Orang	65.100.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			65.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
40	8		01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-			-	484.470.000,00				-		-			637.184.760,00	
	8		01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-				484.470.000,00				-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			637.184.760,00	
	8		01	06	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun					12 Dokumen	73.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			82.879.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8		01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					70 Orang	114.420.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			120.305.760,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8		01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					60 Orang	40.300.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8		01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					12 Laporan	18.310.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			34.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8		01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota					12 Dokumen	238.440.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			375.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
							DINAS SOSIAL						9.607.312.958,74									10.326.830.125,00	
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.605.396.958,74									10.324.818.325,00	
	1	06					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						9.605.396.958,74									10.324.818.325,00	

41	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	5.970.385.213,74						6.709.676.631,00		
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	43.081.840,00			-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	45.234.882,00	
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		4.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				69 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		12.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	27.081.840,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		28.434.882,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				3 Dokumen	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	3.904.964.245,74			-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		6.099.152.603,00	
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/bulan	3.875.711.645,74	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		6.068.437.373,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.364.800,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		2.483.040,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									-					

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	44.521.968,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		46.748.066,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-		-	487.365.158,00			-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	18.613.350,00	
	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					19 Unit	213.308.215,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel															
							Jumlah Mebel yang Dipelihara					30 Unit	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					25 Unit	17.727.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		18.613.350,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					5 Unit	256.329.943,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.13			Penataan Organisasi	-				-	47.863.792,00			-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	
	1	06	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan															
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					12 Dokumen	47.863.792,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	DINAS SOSIAL
42	1	06	02				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-		-		-	632.415.693,00			-		-		315.557.235,00	

1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	632.415.693,00	-	-	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat"	-	-	-	315.557.235,00	-
1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat"	-	-	-	-	-
					Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	12 Keluarga	136.522.900,00	-	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat"	-	-	189.073.710,00	DINAS SOSIAL
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat"	-	-	-	-	-
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	1 Lembaga	25.695.200,00	-	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat"	-	-	126.483.525,00	DINAS SOSIAL
1	06	02	2.03	0013	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat"	-	-	-	-	-
					Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	-	-	-	-	0 Lembaga	36.997.593,00	-	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat"	-	-	0,00	DINAS SOSIAL
1	06	02	2.03	0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat"	-	-	-	-	-
					Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	-	-	-	-	0 Orang	433.200.000,00	-	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat"	-	-	0,00	DINAS SOSIAL
43	1	06	04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-	-	-	-	515.983.196,00	-	-	-	-	-	-	-	613.736.691,00	-
	1	06	04	2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-	-	-	-	361.430.421,00	-	-	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat"	-	-	-	444.955.426,00	-
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat"	-	-	-	-	-
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	150 Orang	75.814.550,00	-	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat"	-	-	82.199.554,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat"	-	-	-	-	-
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	50 Orang	12.086.700,00	-	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat"	-	-	21.193.725,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat"	-	-	-	-	-

							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota					45 Orang	77.043.150,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			80.895.307,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					10 Orang	40.193.300,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			42.202.965,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota					5 Orang	17.067.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			17.920.560,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																
							Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					4 Orang	13.767.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			14.455.980,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota					5 Orang	18.053.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			10.555.860,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota					50 Orang	43.667.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			53.117.400,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota					10 Orang	12.143.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			33.303.060,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					50 Orang	5.750.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			14.821.065,00	DINAS SOSIAL

[illegible]

[illegible]

	X	XX	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-				1.916.000,00			-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			2.011.800,00	
	X	XX	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	1.916.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			2.011.800,00	DINAS SOSIAL
						DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						10.157.517.494,40							11.242.614.058,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.157.517.494,40							11.242.614.058,00	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						6.070.089.312,48							7.653.987.310,00	
47	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-				5.695.264.263,26							7.163.987.310,00	
	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-				7.068.727,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			50.000.000,00	
	2	08	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	841.635,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					2 Dokumen	871.801,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					20 Dokumen	2.287.598,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					20 Dokumen	2.545.015,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					4 Laporan	522.678,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-					4.834.505.205,25					2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan				5.919.687.288,00	
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	4.817.872.607,25	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan				5.900.187.288,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	518.857,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-			2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan				1.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	16.113.741,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-			2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan				18.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah		-			-	6.033.226,00			-			2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan				120.000.000,00	
	2	08	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	1.533.226,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-			2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan				50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-			2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan				35.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-			2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat"				35.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		-			-	237.274.478,00			-			2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan				476.000.000,00	

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					30 Unit	82.383.959,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			184.360.362,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					10 Unit	15.706.195,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			16.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					3 Unit	47.536.577,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
48	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-			-	93.881.520,00						-	-		150.000.000,00	
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	38.881.520,00				-	-	-	-		90.000.000,00	
	2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG																
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota					40 Dokumen	23.881.520,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.01	0012	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota																
							Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota					1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	55.000.000,00				-	-	-	-		60.000.000,00	
	2	08	02	2.02	0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota																
							Jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi					150 orang	55.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
49	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-			-	30.000.000,00						-	-		0,00	
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	30.000.000,00				-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-		0,00	
	2	08	03	2.02	0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota					3 orang	30.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang					1 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-		2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
						Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja					30 Organisasi	146.892.868,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-		-	-			200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-					-	1.139.565.831,00				-		2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			375.800.000,00	
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
						Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)					254 Orang	786.460.421,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-		2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	03	2.02	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																		
						Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)					2 Laporan	353.105.410,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			375.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-					-	209.517.351,92				-		-	-			279.139.302,00	
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
						0					6 0	32.929.690,14	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-		-	-			52.872.600,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)					400 Orang	114.276.343,53	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-		-	-			125.011.700,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	03	2.03	0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB																		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB					15 Orang	15.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			17.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					3 Laporan	22.172.106,39	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-		-	-			24.255.002,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																		

[illegible]

							Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				10 laporan	383.109.865,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-		-			381.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																	
							Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				10 laporan	459.731.838,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-		-			457.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	14	04	2.02	0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga																	
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga				6 Laporan	33.786.066,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		-			95.528.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
						DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN						15.638.144.210,81						300.000.000,00					
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						15.188.451.137,81						300.000.000,00					
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						14.376.186.477,81						300.000.000,00					
57	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	8.896.769.135,21						-		180.000.000,00			
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	670.624.700,00			-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-	-	0,00			
	2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					7 Laporan	670.624.700,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN		
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.882.760.889,50			-		2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-	-	0,00			
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					50 Orang/bulan	6.869.660.889,50	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN		
	2	11	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					1 Dokumen	13.100.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN		

	2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-		-		31.134.285,71			-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-	-	0,00	
	2	11	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan		31.134.285,71	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-		169.836.992,00			-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-	-	130.000.000,00	
	2	11	01	2.05	0002	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan			50 Paket		102.186.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-	-	130.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2	11	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			17 Orang		67.650.392,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-		702.490.082,00			-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-	-	50.000.000,00	
	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket		16.511.250,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3 Paket		50.822.260,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									-					

[illegible]

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	137.973.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	64.441.334,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	225.507.852,00			-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-			0,00		
	2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					2 Unit	137.409.719,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					3 Unit	72.240.798,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					3 Unit	15.857.335,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
58	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-				-	51.644.525,60			-		-		-		0,00	
	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-	-				-	51.644.525,60			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-		-		0,00	
	2	11	02	2.01	0007	Pemantauan dan Evaluasi RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan																	
							Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan yang dilakukan pemantauan dan evaluasi					1 Dokumen	51.644.525,60	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
59	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-				-	422.500.000,00					-		-		120.000.000,00	

	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	-	-	422.500.000,00	-	-	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-	-	120.000.000,00	-
	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	-	-	1 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2	11	03	2.01	0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	-	-	1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-	-	120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2	11	03	2.01	0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	-	-	40 Paket	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2	11	03	2.01	0014	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	-	-	1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	-	-	1 Dokumen	137.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
60	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	-	-	-	40.000.000,00					-	-	0,00	

	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		-					40.000.000,00					3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-			0,00		
	2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				1 Unit	40.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-			0,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
61	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		-			-	100.950.800,00							-			0,00		
	2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3		-			-	100.950.800,00					3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			0,00			
	2	11	05	2.01	0005	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)				1 Dokumen	100.950.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			0,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
62	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		-			-	222.499.604,00							-			0,00		

	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	222.499.604,00	-	-	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-	-	-	0,00	-	
	2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau	Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	-	-	-	30 Badan Usaha	222.499.604,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
63	2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	-	-	-	-	-	103.490.855,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	
	2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	-	-	-	-	-	103.490.855,00	-	-	-	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-	-	-	0,00	-
	2	11	07	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	-	-	-	1 Dokumen	103.490.855,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
64	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-	-	-	-	14.847.635,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	14.847.635,00	-	-	-	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-	-	-	0,00	-
	2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	-	-	-	1 Lembaga	14.847.635,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
65	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-	-	-	-	4.523.483.923,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	

[illegible]

											Persentase luas layanan pengumpulan sampah					0 Persentase	50.822.260,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pembangunan dan pemeratan infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN							
	2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TP53R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLT5a, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan																							0,00					
							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TP53R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLT5a, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan								5 Ton	3.298.888.630,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-				0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN							
	2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional																									0,00			
							Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTKabupaten/kota atau TPA/TPST Regional								0 Ton	50.822.260,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-				0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN							
	2	11	11	2.01	0024	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah																											0,00	
							Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali								1 Ton	37.009.813,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-				0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN							
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																											0,00	
66	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					-	-			-	812.264.660,00	756.014.660,00							-				0,00						

	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-							50.822.260,00				-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-				0,00	
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																				
						Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	-						0 Unit	50.822.260,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-				0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-							82.850.000,00				-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-				0,00	
	2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																				
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	-						9 Unit	82.850.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-				0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					5 Paket	200.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	37.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			37.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.05	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					3 Paket	38.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			38.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					3 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			8.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.05	0007	Penyediaan Bahan/Material																	
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					6 Paket	60.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.05	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					150 Laporan	300.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			320.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					2 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			7.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	-	30.000.000,00	
2	12	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

								Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	30.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.08					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	315.400.000,00			-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				340.400.000,00	
2	12	01	2.08	0001				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.400.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				5.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.08	0002				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	85.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.08	0003				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	200.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				220.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.08	0004				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.09					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	395.000.000,00			-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				402.000.000,00	
2	12	01	2.09	0001				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	150.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.09	0002				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	45.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.09	0006				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									-								

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					30 Unit	25.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			27.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	175.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			180.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-				-	5.000.000,00			-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		5.000.000,00	
	2	12	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah					2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
70	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-				-	537.250.000,00							-		552.250.000,00	
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-				-	185.000.000,00			-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		195.000.000,00	
	2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan					750 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk					750 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk																	
							Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk					150 Orang	45.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																	
							Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk					25 Laporan	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

[illegible]

							Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan					6 Layanan	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.01	0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan																	
							Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia					5 Paket	35.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-				-	205.000.000,00			-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		215.000.000,00	
	2	12	03	2.02	0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil					5 Laporan	85.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02	0005	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil																	
							Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil					2 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02	0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil					1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02	0007	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil					25 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-				-	30.000.000,00			-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		30.000.000,00	
	2	12	03	2.03	0003	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil																	
							Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan					3 Laporan	30.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
72	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-				-	135.000.000,00						-	-		135.000.000,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					14 Unit	50.421.706,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			51.553.827,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	45.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			46.010.387,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					4 Unit	20.153.594,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			20.606.103,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
75	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	-	-	-	-	-	-	40.000.000,00			-		-	-	-	0,00	
	2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	-	-	-	-	-	-	40.000.000,00			-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-	-	-	0,00	
	2	13	02	2.01	0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa																
							Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa					1 Desa	40.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
76	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	-	-	-	-	-	-	40.000.000,00			-		-	-	-	40.000.000,00	

[illegible]

						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa					114 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			204.490.610,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																	
						Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas					114 Orang	1.824.107.309,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			1.865.064.088,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa					1 Dokumen	70.600.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			81.226.735,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																	
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa					114 Laporan	9.008.008,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			9.210.266,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																	
						Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun					114 Dokumen	25.458.907,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			26.030.537,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	04	2.01	0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa																	

							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa					1 Dokumen	255.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			230.051.937,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0013	Fasilitas Pengelolaan Aset Desa																
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa					114 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			92.020.774,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0015	Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa																
							Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa					114 Desa	36.362.958,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			37.179.417,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0018	Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan					1 Dokumen	45.678.672,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			46.704.390,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
78	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-			-	425.000.000,00				-		-			433.419.893,00	
	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	425.000.000,00				-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-	-		433.419.893,00	
	2	13	05	2.01	0002	Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																

										Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					114 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-		6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			51.122.652,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya					114 Lembaga	75.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-		6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			76.683.979,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
	2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa					1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-		6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna					1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-		6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			51.122.652,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
	2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga					114 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-		6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			204.490.610,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
						DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN																		0,00			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				0,00	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																				0,00	
79	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-					-	5.655.959.452,02								-		0,00				

[illegible]

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					3 Laporan	40.617.008,29	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	1.250.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	
	2	16	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	1.250.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.05			Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	-				-	47.049.594,28			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	
	2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					1 Paket	22.853.106,80	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					9 Orang	24.196.487,48	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	302.080.470,90			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	5.027.185,75	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					5 Paket	91.127.658,64	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					2 Paket	16.964.760,27	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

[illegible]

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-					1 Laporan	464.719.431,43	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-						107.844.444,32			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	
2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	-					33 Unit	94.107.002,39	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-					2 Unit	13.737.441,93	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.13			Penataan Organisasi	-						1.005.537,70			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	
2	16	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																	
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-					1 Dokumen	1.005.537,70	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
80	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-						3.484.099.509,76			-		-			0,00	
2	16	02	2.01			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-						3.484.099.509,76			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	
2	16	02	2.01	0014	Relasi Media																	
						Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	-					2 Laporan	4.055.624,31	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																	
						Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-					1 Komunitas	5.716.739,26	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik																	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

								Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket	82.175.095,30	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			84.020.177,10	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	159.827.738,51	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			163.416.359,26	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	07	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
								Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1 Dokumen	2.941.398,89	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			3.007.442,28	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	38.825.168,26				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	-	39.696.911,83	
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					2 Unit	38.825.168,26	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			39.696.911,83	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	393.711.016,25				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	-	402.551.030,70	
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	3.318.274,43	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			3.392.779,82	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	96.606.443,73	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			98.775.553,36	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	293.786.298,09	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			300.382.697,52	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	85.000.113,26				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	-	286.908.625,34	

	2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					2 Unit	44.865.483,53	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		45.872.850,62	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	40.134.629,73	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		41.035.774,72	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		200.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	07	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-			-	2.409.670,56			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	2.463.775,02	
	2	07	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	2.409.670,56	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		2.463.775,02	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
85	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	-	-			-	17.704.804,04					-	-	123.102.330,94	
	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-	-			-	17.704.804,04			-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah	-	-	123.102.330,94	
	2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	17.704.804,04	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah	-		18.102.330,94	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	07	02	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				5 Orang	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		105.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
86	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-			-	144.681.223,66					-	-	147.929.758,89	

	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-	-	-	144.681.223,66	-	-	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	147.929.758,89	-
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-	-	25 Orang	134.681.223,66	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	137.705.228,36	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	07	03	2.01	0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	-	-	5 Orang	10.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	10.224.530,53	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
87	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-	-	-	24.022.150,82	-	-	-	-	-	-	100.000.000,00	-
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	0,00	-	-	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	100.000.000,00	-
	2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	-	-	15 Orang	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	50.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	-	-	10 Orang	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	50.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-	-	-	24.022.150,82	-	-	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah	-	-	0,00	-
	2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	-	-	30 Orang	24.022.150,82	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah	-	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
88	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-	-	-	125.574.140,85	-	-	-	-	-	-	128.393.663,73	-

[illegible]

	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	19.408.285,45			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	19.844.060,72	
	2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	19.408.285,45	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	19.844.060,72	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
90	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	-	-	-	-	52.962.429,23			-		-	-	54.151.597,48	
	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	52.962.429,23			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-	-	54.151.597,48	
	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan		10 Unit Usaha	52.962.429,23	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-	-	54.151.597,48	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
91	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	-	-	-	97.483.074,29			-		-	-	99.671.866,96	
	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	97.483.074,29			-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	99.671.866,96	
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		54 Orang	97.483.074,29	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	99.671.866,96	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
92	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-	-	-	-	10.000.000,00			-		-	-	10.224.530,53	
	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	10.000.000,00			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	10.224.530,53	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	1.709.414,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			1.747.795,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	1.407.752,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			1.439.361,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1 Dokumen	2.513.844,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			2.570.287,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1 Dokumen	1.407.752,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			1.439.361,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					3 Laporan	6.234.333,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			6.374.313,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Laporan	4.122.704,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			4.215.271,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	-				17 Orang	2.828.063.387,07			-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			2.891.562.044,95	
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					17 Orang/bulan	2.819.133.409,07	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			2.882.431.561,95	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	727.204,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			743.532,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					1 Laporan	8.202.774,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			8.386.951,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat SKPD	-				1 Lap.	1.068.685,00			-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			1.092.680,00	
	2	18	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	1.068.685,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			1.092.680,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-					1 Paket	24.517.143,80				Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			24.517.143,80	
	2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						0 Paket	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						5 Orang	24.517.143,80	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			24.517.143,80	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-					-	273.893.511,00				Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		280.043.255,00	
	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						1 Paket	6.946.053,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			7.102.013,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						1 Paket	5.481.588,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			5.604.666,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	8.823.392,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			9.021.504,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		6.987.584,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					4 Dokumen	6.834.137,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			6.987.584,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	2	18	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																		52.969.826,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket	51.806.609,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			52.969.826,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		9.018.008,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					4 Laporan	8.819.973,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			9.018.008,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		171.920.172,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					55 Laporan	168.144.808,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			171.920.172,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	2	18	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		17.419.482,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1 Dokumen	17.036.951,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			17.419.482,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			

	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-					253.073.327,00				-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital				258.755.596,00		
	2	18	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit		253.073.327,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			258.755.596,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-					-	473.740.084,00				-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		484.376.995,00		
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					2 Laporan		68.125.682,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			69.655.311,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2	18	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					3 Laporan		34.217.744,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			34.986.037,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan		371.396.658,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			379.735.647,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		

	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-						309.222.543,00					3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				316.165.533,00		
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	207.066.904,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					14 Unit	202.519.718,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				207.066.904,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		109.098.629,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	106.702.825,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				109.098.629,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-			-	2.815.504,00			-			3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-			2.878.722,00		
	2	18	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		1.439.361,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi					1 Dokumen	1.407.752,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				1.439.361,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		1.439.361,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah					1 Dokumen	1.407.752,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				1.439.361,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
99	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM Penanaman Modal	Persentase pengembangan iklim Penanaman Modal	-			90 Persen	39.989.430,00								-			40.887.314,00		

						Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Daerah Kab./Kota	-					1 Dok.	39.989.430,00					3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital				40.887.314,00	
	2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						1 Dokumen	19.799.339,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			20.243.894,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						1 Dokumen	20.190.091,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			20.643.420,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
100	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	-				10 Investor	374.412.606,00								-		382.819.313,00	
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/kota	-				1 Dok.	374.412.606,00				Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Pelaku Usaha, PMA/PMDN	-		382.819.313,00		
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota						1 Dokumen	205.078.157,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Pelaku Usaha, PMA/PMDN			209.682.788,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																		
						Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota						1 Dokumen	169.334.449,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Pelaku Usaha, PMA/PMDN			173.136.525,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		

[illegible]

							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya					8 Kegiatan Usaha.	32.431.406,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			33.159.590,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko					140 Pelaku Usaha	66.544.072,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			68.038.189,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha					14 Kegiatan Usaha	76.581.550,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			78.310.040,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
103	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemanfaatan data dan sistem informasi penanaman modal	-				94.5 Persen	28.447.264,00						-			29.085.992,00		
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	-				3 Dok	28.447.264,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		29.085.992,00			
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan					3 Dokumen	28.447.264,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			29.085.992,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN												7.350.846.574,74						
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												7.350.846.574,74						
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN												6.742.650.792,73						
104	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-				-	5.636.674.752,73						-		8.096.500.000,00			
	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-				-	83.603.600,00			-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-		130.000.000,00			

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	30.611.360,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	7.493.832,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			16.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	10.267.200,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	30.011.625,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	125.740.300,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			260.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	8.293.050,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			17.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	731.094.058,00				-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			293.500.000,00	
2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	2.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan					10 Berkas	0,00		Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan				20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
2	24	03	2.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																					
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun					10 Arsip	0,00		Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	-		-				-	0,00				-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		-	40.000.000,00				
2	24	03	2.03	0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota																					
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota					10 Arsip	0,00		Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	-	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
2	24	03	2.03	0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan																					
							Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan					100 Arsip	0,00		Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
109	2	24	04		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	-		-				-	0,00							-		-	40.000.000,00			
2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	-		-				-	0,00				-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		-	40.000.000,00				
2	24	04	2.01	0003	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup																					
							Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan					1 SOP	0,00		Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
2	24	04	2.01	0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup																					
							Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup					100 Arsip	0,00		Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
													8.971.682.227,39											10.481.227.154,28		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												7.937.195.302,39											8.901.152.449,28		
2	09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN												7.937.195.302,39											8.901.152.449,28	
110	2	09	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		-				-	7.378.688.102,39				-		-		-	8.153.858.149,28				

	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-				39.561.655,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	98.906.010,00	
	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	22.968.850,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		52.991.430,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGKAN
	2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	16.592.805,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		45.914.580,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGKAN
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.604.111.918,42			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-	-	6.743.851.213,58	
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				532 Orang/bulan	5.575.495.218,42	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		6.694.165.613,58	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGKAN
	2	09	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				10 Laporan	28.616.700,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		49.685.600,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGKAN
	2	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	1.174.380,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	2.348.760,00	
	2	09	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				20 Laporan	1.174.380,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		2.348.760,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGKAN
	2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	46.683.775,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-	-	166.947.740,73	

2	09	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		77.233.800,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-							
2	09	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain												5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		36.993.940,73	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain				10 Dokumen	13.043.400,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-							
2	09	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-		52.720.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	33.640.375,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-							
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	408.758.069,00			-			5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	487.095.825,00	
2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi												5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		5.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-							
2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		61.657.170,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	59.575.920,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-							
2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		10.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	10.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-							
2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		32.701.980,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	16.350.990,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-							
2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		9.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-							

2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	131.514.675,00	-	-	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	-	224.209.850,00	-	
2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	21 Unit	100.764.711,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	-	185.709.921,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	20 Unit	23.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	-	23.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	1 Unit	7.749.964,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	-	15.499.929,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
111	2	09	03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-	-	-	-	390.938.920,00						-	-	477.113.540,00		
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-	-	-	297.863.420,00				1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-	-	-	344.384.440,00		
2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	-	-	-	12 Laporan	244.728.100,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-	-	-	277.998.200,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	-	-	-	12 Laporan	53.135.320,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-	-	-	66.386.240,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-	-	-	93.075.500,00				1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-	-	-	132.729.100,00		
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peneanekaragaman Konsumsi Panean Berbasis Sumber Daya Lokal		-	-	-							-	-			

							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					2 Laporan	93.075.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-			132.729.100,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
112	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-	-			-		89.983.625,00					-	-		149.159.450,00	
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-		89.983.625,00			-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-	-		149.159.450,00	
	2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																
						Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					12 Dokumen	69.168.325,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-			102.226.650,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																
						Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota					8 Laporan	20.815.300,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-			46.932.800,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
113	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	-			-		77.584.655,00					-	-		121.021.310,00	
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-		77.584.655,00			-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-	-		121.021.310,00	
	2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																
						Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan					10 Dokumen	77.584.655,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-			121.021.310,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.034.486.925,00									1.580.074.705,00	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						1.034.486.925,00									1.580.074.705,00	
114	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-			-		87.959.920,00					-	-		241.871.560,00	

[illegible]

[illegible]

							Jumah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan					5 Dokumen	212.767.150,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-				323.716.550,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN									
116	3	25	06				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-				-	161.826.700,00						-				251.258.700,00									
	3	25	06	2.01			Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-				-	14.407.800,00				3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-					51.272.700,00									
	3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko																										
							Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko					30 Dokumen	14.407.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-				51.272.700,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN									
	3	25	06	2.03			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	147.418.900,00				3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-					199.986.000,00									
	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																										
							Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					36 Ton	147.418.900,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-					199.986.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN								
						DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA												10.341.338.848,29														
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												9.990.338.848,29											14.140.000.000,00			
																															13.580.000.000,00	

[illegible]

							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	7.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			7.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					12 Laporan	7.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-		7.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22	01	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	-	-				-	50.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	80.000.000,00		
2	22	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					10 Orang	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		80.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				-	443.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-	-	565.000.000,00		
2	22	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					10 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-		25.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	80.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-		90.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

											Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

						Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		-						1.198.338.848,00					8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah "Huma Betang" Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-				2.500.000.000,00	
	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan					15 Objek	1.198.338.848,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah "Huma Betang" Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-				2.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-	2.500.000.000,00			-		8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah "Huma Betang" Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-				3.000.000.000,00		
	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan					1 Objek	1.000.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah "Huma Betang" Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-				1.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
	2	22	02	2.02	0002	Pembiinan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembiinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional					1 Laporan	1.500.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-		7. Meningkatkan ketentraman dan keterlibatan masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-				1.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
119	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	-				-	180.000.000,00							-				490.000.000,00	
	2	22	03	2.01		Pembiinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-	180.000.000,00			-		2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-				490.000.000,00		
	2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)					80 Orang	80.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-		2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-				90.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
	2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya					1 Lembaga	100.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-		8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah "Huma Betang" Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-				400.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
120	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-	-				-	50.000.000,00							-				200.000.000,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

						Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	-	-	-	-	1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-	-	0,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	-	-	-	-	486.360.964,22			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-	-	0,00	
	3	27	02	2.05	0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				1 Ton	434.910.367,37	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Tambirah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-	-	0,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				500 Ekor	51.450.596,85	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-	-	0,00	DINAS PERTANIAN
129	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-	-	-	-	1.684.964.100,48			-		-	-	0,00	
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	-	-	-	1.139.268.843,49			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-	-	0,00	
	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya									-		-	-		

[illegible]

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

[illegible]

							Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan					5 Ha	75.960.033,51	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-			0,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	05	2.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						5 Ha	46.706.305,09	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-			0,00	DINAS PERTANIAN
132	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	-	-				-	116.787.168,13			-			-		0,00	
	3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-	116.787.168,13			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-	-		0,00	
	3	27	06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian						12 Laporan	116.787.168,13	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-			0,00	DINAS PERTANIAN
133	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-				-	877.677.582,46			-			-		0,00	
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-				-	877.677.582,46			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-	-		0,00	

	3		27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa					Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya					6 Unit	182.701.465,81	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-			0,00	DINAS PERTANIAN				
	3		27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya					6 Unit	300.618.853,54	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-			0,00	DINAS PERTANIAN				
	3		27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian					Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian					6 Unit	55.723.335,82	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-			0,00	DINAS PERTANIAN				
	3		27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota					Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi					6 Unit	80.713.506,02	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-			0,00	DINAS PERTANIAN				
	3		27	07	2.01	0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian					Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya					0 Orang	257.920.421,27	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-			0,00	DINAS PERTANIAN				
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																		6.128.870.040,62												131.690.956,00		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					0 Laporan	58.800.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					0 Laporan	150.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-					-	258.939.193,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-			0,00	
	3	30	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					20 Unit	150.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					0 Unit	40.935.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					0 Unit	68.004.193,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	01	2.13			Penataan Organisasi	-				-	3.800.000,00			-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-			0,00		
	3	30	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					0 Dokumen	3.800.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan Infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
135	3	30	02				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	-				-	22.006.000,00							-			0,00	
	3	30	02	2.01			Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	-				-	2.076.000,00			-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah	-			0,00		
	3	30	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
							Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					35 Dokumen	2.076.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

[illegible]

							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan					1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					12 Laporan	600.757.380,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-			-	28.048.000,00			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah	-	-		0,00		
	3	30	04	2.03	0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan																0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
							Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan					6 Dokumen	22.542.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
							Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%					12 Laporan	5.506.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
137	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-				-	345.425.600,00					-			0,00		

	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		-					345.425.600,00			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-			0,00	
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang					800 Unit	191.382.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina					310 Orang	154.043.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
138	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-	-			-	257.713.535,00						-			0,00	
	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		-					257.713.535,00			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-			0,00	
	3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota					1 UMKM	257.713.535,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					557.705.502,00							131.690.956,00		
139	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-				369.002.600,00						-	131.690.956,00		
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-				369.002.600,00			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	131.690.956,00		
	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri					3 Dokumen	225.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri					1 Dokumen	59.002.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		40.002.600,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat					2 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah Kab. Gunung Mas, Manuhing, Tumbang Talaken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		91.688.356,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	02	2.01	0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota														
						- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan					3 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
140	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	-				-	30.773.400,00					-	0,00		

3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	30.773.400,00						3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	0,00			
3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-									-	-			
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-	-	-	-	1 Dokumen	30.773.400,00		Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	0,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
141	3	31	04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	-	-	-	-		157.929.502,00							-	-	0,00		
	3	31	04	2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-		157.929.502,00				-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-	-	0,00		
3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-	-	-	-	-									-	-	0,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-	-	-	-	2 Dokumen	64.352.000,00		Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-	-	0,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	04	2.01	0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	-	-	-	-	-									-	-			
						Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	-	-	-	-	3 Dokumen	62.804.102,00		Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-	-	0,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	04	2.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	-	-	-	-	-									-	-			

[illegible]

						Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah					1 Dokumen	131.202.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			134.147.000,00	SEKRETARIAT DAERAH					
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							44.537.679.946,23							46.301.123.900,00						
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH							44.537.679.946,23								46.301.123.900,00					
145	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	31.111.145.190,23						-		32.133.131.900,00						
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	371.734.700,00				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	379.013.900,00						
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dokumen	92.034.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			93.033.300,00	SEKRETARIAT DAERAH					
	4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																				
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	9.778.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			9.998.000,00	SEKRETARIAT DAERAH					
	4	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																				
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	9.778.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			9.998.000,00	SEKRETARIAT DAERAH					
	4	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																				
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1 Dokumen	7.520.100,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			7.689.000,00	SEKRETARIAT DAERAH					
	4	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD																				
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1 Dokumen	7.520.100,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			7.689.000,00	SEKRETARIAT DAERAH					
	4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																				
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					12 Laporan	245.103.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			250.606.600,00	SEKRETARIAT DAERAH					
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	13.457.288.490,23				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	14.059.064.800,00						
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				

[illegible]

							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					4 Dokumen	135.460.200,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			138.501.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					3 Paket	38.104.900,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			38.960.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					1 Laporan	320.311.100,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			327.503.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					120 Laporan	2.329.032.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			2.381.326.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1 Dokumen	47.286.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			48.347.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				-	987.359.100,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		1.009.528.400,00	
	4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	726.152.800,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			742.457.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					8 Unit	261.206.300,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			267.071.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	3.624.072.200,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		3.732.443.800,00	
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																

[illegible]

[illegible]

[illegible]

						Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	-	-	-	-	40 Dokumen	51.241.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	52.391.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-	-	-		54.846.476,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	56.078.000,00	
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	-	-	-	1 Dokumen	54.846.476,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	56.078.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
147	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	-	-		1.563.040.180,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	1.597.455.400,00	
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-	-	-		407.406.080,00			-	-	-	-	416.553.600,00	
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	0	-	-	-	0 0	319.747.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	326.926.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	-	-	-	4 Laporan	87.658.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	89.626.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-	-	-		208.206.100,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	212.881.000,00	
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	-	-	-	1 Dokumen	133.281.900,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	136.274.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	-	-	-	1 Laporan	74.924.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	76.606.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-		815.525.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	833.836.000,00	
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	150 Dokumen	393.111.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	401.937.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Lavanan Penadaan Secara Elektronik		-	-	-					-		-	-		

						Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik					5 Dokumen	217.590.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			222.475.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					14 Orang	204.823.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			209.422.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-				-	131.903.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		134.184.800,00	
4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian					1 Dokumen	57.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			57.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanianahan					1 Dokumen	74.903.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			76.584.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
						SEKRETARIAT DPRD											38.386.212.472,85				
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											38.386.212.472,85				
4	02					SEKRETARIAT DPRD											38.386.212.472,85				
148	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	26.562.527.542,98						-		27.158.937.392,49	
4	02	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	48.086.713,77			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		49.166.407,29	
4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5 Dokumen	24.231.153,39	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			24.775.216,75	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	6.744.842,89	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			6.896.285,20	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1 Dokumen	8.638.392,58	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			8.832.350,87	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penvusunan Perubahan DPA- SKPD																

							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1 Dokumen	8.472.324,91	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			8.662.554,47	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	4.329.367.286,30			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			4.426.574.801,04	
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					75 Orang/bulan	4.173.546.550,26	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			4.267.255.413,69	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	67.675.391,73	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			69.194.910,92	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					12 Laporan	88.145.344,31	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			90.124.476,43	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05			Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	-				-	225.970.257,33			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			231.043.979,59	
	4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					3 Paket	157.808.600,30	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			161.351.885,23	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					25 Orang	68.161.657,03	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			69.692.094,36	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	1.141.609.524,03			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			1.167.242.143,59	
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	18.585.896,08	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			19.003.206,20	SEKRETARIAT DPRD

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	1.745.541.209,93	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			1.784.733.939,87	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	403.209.549,80	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			412.262.835,34	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-				-	329.742.929,24			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		337.146.664,83	
	4	02	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan																
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan					2 Laporan	329.742.929,24	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			337.146.664,83	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-				-	14.329.694.873,95			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		14.651.440.277,71	
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																
							Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD					25 Orang/Bulan	13.454.714.620,14	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			13.756.814.045,56	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan					2 Paket	329.893.353,04	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			337.300.466,11	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD					25 Orang	545.086.900,77	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			557.325.766,04	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	-	-				-	1.289.008.152,93			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		1.317.950.321,77	
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD					2 Laporan	218.915.259,57	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			223.830.575,57	SEKRETARIAT DPRD

4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	-	-	-	2 Paket	1.070.092.893,36	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	1.094.119.746,20	SEKRETARIAT DPRD	
149	4	02	02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	-	-	-	-	11.823.684.929,87					-	-	12.089.162.728,54		
	4	02	02	2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-	-	-	-	1.238.977.755,48			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	1.266.796.589,14		
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	-	-	-	2 Dokumen	10.388.222,11	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	10.621.469,42	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	-	-	-	0 Dokumen	311.633.097,23	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	318.630.211,79	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	-	-	-	2 Dokumen	468.969.106,79	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	479.498.895,17	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	-	-	-	2 Dokumen	447.987.329,35	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	458.046.012,76	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-	-	-	-	199.197.290,72			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	203.669.878,10		
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	-	-	-	2 Dokumen	18.417.690,08	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	18.831.223,46	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	-	-	-	2 Dokumen	19.196.903,26	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	19.627.932,35	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD		-	-	-	-	-			-	-	-	-		

							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD					1 Dokumen	88.857.050,62	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	S. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			90.852.162,71	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan					1 Dokumen	49.319.636,11	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	S. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			50.427.012,53	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD					1 Dokumen	23.406.010,65	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	S. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			23.931.547,05	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-				-	1.455.191.055,72			-	S. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	-	1.487.864.538,16	
	4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum					25 Laporan	448.750.023,97	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	S. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			458.825.832,21	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur					25 Laporan	500.644.804,08	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	S. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			511.885.808,59	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																
							Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat					25 Laporan	448.750.023,97	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	S. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			458.825.832,21	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan					1 Dokumen	31.341.763,28	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	S. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			32.045.481,56	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan																
							Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah					1 Dokumen	25.704.440,42	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	S. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			26.281.583,59	SEKRETARIAT DPRD

	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD		-					4.189.020.217,54					5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital				4.283.076.481,99	
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				25 Dokumen	1.881.343.759,53	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital				1.923.585.671,36	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				6 Orang	219.003.712,73	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital				223.921.014,78	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				18 Dokumen	53.541.592,72	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital				54.743.764,96	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	8.920.766,44	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital				9.121.064,89	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				74 Dokumen	2.026.210.386,12	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital				2.071.704.966,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		-				1.324.308.523,89			-			5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital				1.354.043.293,86	
	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				25 Laporan	501.782.097,46	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital				513.048.637,68	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	38.571.116,39	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital				39.437.155,72	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses									-								

[illegible]

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	12.937.453,72	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	9.852.023,45	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	9.003.494,08	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	12.807.466,90	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				19 Laporan	19.509.281,59	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.996.971.974,41			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	5.962.538.790,26	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	9.338.582,89	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	25.094.601,26	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

[illegible]

							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	18.663.100,98	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-			397.028.829,76			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		0,00	
5	01	01	2.08	0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	7.097.342,54	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.08	0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	104.582.850,48	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.08	0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	285.348.636,74	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-			384.947.623,12			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		0,00	
5	01	01	2.09	0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	41.744.410,23	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.09	0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	164.811.843,68	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.09	0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	68.397.682,20	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.09	0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									-						

										Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	109.993.687,01	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
151	5	01	02							PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-	-			-	1.307.252.773,30						-			97.242.010,00	
	5	01	02	2.01						Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-			-	1.201.680.448,83					5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		0,00	
	5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																				
										Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)					4 Dokumen	438.904.069,25	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																				
										Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah					2 Dokumen	18.349.708,69	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																				
										Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik					1 Berita Acara	17.571.945,39	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.01	0004	koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																				
										Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah					1 Berita Acara	46.144.577,06	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																				
										Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota					2 Berita Acara	93.590.587,74	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																				
										Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan					1128 Usulan	62.827.805,39	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																				
										Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RP/MD/RKPD)					3 Dokumen	524.291.755,31	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	8.456.929,77				5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	
5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah														
					Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	-	-	-	-	205 Orang	8.456.929,77	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	74.654.288,75			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	97.242.010,00	
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/kota														
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	-	-	-	-	6 Laporan	58.771.439,91	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	-	-	-	-	3 Laporan	15.882.848,84	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	97.242.010,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	22.461.105,95			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	
5	01	02	2.04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah														
					Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	-	-	-	-	2 Dokumen	22.461.105,95	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
152	5	01	03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-	-	1.705.214.534,25			-		-	-	0,00	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	-	-	-	754.188.057,57			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	-	-	-	-	2 Laporan	239.933.316,49	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														

							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				4 Laporan	514.254.741,08	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-		-	485.461.717,72			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	
	5	01	03	2.02	0004	koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				2 Laporan	180.615.692,56	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA														
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				5 Laporan	304.846.025,16	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.03			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-		-	465.564.758,96			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	
	5	01	03	2.03	0004	koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				5 Laporan	233.888.195,64	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				5 Laporan	231.676.563,32	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						874.056.204,40							0,00	
153	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					-	874.056.204,40						-	0,00	
	5	05	02	2.01			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-		-	8.897.634,17			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	
	5	05	02	2.01	0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan														
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				1 Laporan	8.897.634,17	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

		5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		-					86.258.556,35					5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00						
		5	05	02	2.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	86.258.556,35	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-			5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH					
		5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		-				521.434.304,37					-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00						
		5	05	02	2.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	521.434.304,37	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-			5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH					
		5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-				257.465.709,51					-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00						
		5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	240.839.474,87	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-			5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH					
		5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				3 Laporan	16.626.234,64	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-			5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH					
							BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																		191.875.575.925,30				
		5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																				184.124.548.907,30		
		5	02				KEUANGAN																					184.124.548.907,30	
154		5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.022.662.366,16								-			9.768.817.729,09					
		5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	18.285.092,00						-	-	-			19.858.900,00					
		5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	6.109.420,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAJAK DAERAH	-		-	-	-				6.675.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
		5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	6.085.139,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAJAK DAERAH	-		-	-	-				6.681.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
		5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	6.090.533,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAJAK DAERAH	-		-	-	-				6.502.700,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
		5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	49.698.633,00					-	-	-	-			56.092.100,00					

5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	2.834.374,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAJAK DAERAH	-	-	-	5.366.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					1 Laporan	44.495.775,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAJAK DAERAH	-	-	-	47.486.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					12 Dokumen	2.368.484,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAJAK DAERAH	-	-	-	3.238.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	-				-	17.424.875,00			-	-	-	295.644.160,00	
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
					Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan					1 Paket	6.752.614,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAJAK DAERAH	-	-	-	157.371.360,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					12 Orang	10.672.261,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAJAK DAERAH	-	-	-	138.272.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	1.576.036.454,82			-	-	-	1.804.723.775,60	
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	20.637.115,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAJAK DAERAH	-	-	-	18.984.663,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	421.888.721,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAJAK DAERAH	-	-	-	453.351.750,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	40.597.618,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAJAK DAERAH	-	-	-	45.008.835,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket	20.816.172,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAJAK DAERAH	-	-	-	22.252.725,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					6 Dokumen	18.644.211,91	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAJAK DAERAH	-	-	-	18.388.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket	4.959.518,31	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAJAK DAERAH	-	-	-	30.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					1 Laporan	27.021.253,98	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	36.363.600,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					10 Laporan	276.250.877,68	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAJAK DAERAH	-	-	-	373.339.700,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1500000 Dokumen	745.220.966,94	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAJAK DAERAH	-	-	-	807.034.002,60	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	690.342.286,00			-	-	-	6.375.285.000,00	
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					12 Unit	690.342.286,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAJAK DAERAH, PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	-	-	6.375.285.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	1.422.607.548,34			-	-	-	398.213.918,02	
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	690.342.286,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAJAK DAERAH	-	-	-	9.324.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					8 Laporan	347.492.704,32	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAJAK DAERAH	-	-	-	338.880.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					2 Laporan	384.772.558,02	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH	-	-	-	50.009.918,02	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	248.267.477,00			-	-	-	818.999.875,47	
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					30 Unit	218.267.477,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAJAK DAERAH	-	-	-	639.316.675,47	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	4 Unit	30.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAIAK DAERAH	-	-	-	-	179.683.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
155	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		-	-	-	-	206.170.853.342,74				-	-	-	-	172.979.013.731,21			
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		-	-	-	-	880.133.504,00				-	-	-	-	1.125.270.021,00			
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																	
						Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		-	-	-	-	2 Dokumen	70.818.269,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAIAK DAERAH	-	-	-	-	75.164.094,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																	
						Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		-	-	-	-	2 Dokumen	69.873.128,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAIAK DAERAH	-	-	-	-	73.800.570,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																	
						Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi		-	-	-	-	42 Dokumen	27.029.590,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAIAK DAERAH	-	-	-	-	29.627.010,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																	
						Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi		-	-	-	-	42 Dokumen	44.752.952,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAIAK DAERAH	-	-	-	-	29.627.010,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																	
						Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi		-	-	-	-	42 Dokumen	14.814.673,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAIAK DAERAH	-	-	-	-	25.636.005,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																	
						Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi		-	-	-	-	42 Dokumen	31.162.201,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAIAK DAERAH	-	-	-	-	35.411.120,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																	
						Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		-	-	-	-	2 Dokumen	182.434.302,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAIAK DAERAH	-	-	-	-	231.248.106,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																	
						Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		-	-	-	-	2 Dokumen	156.935.596,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAIAK DAERAH	-	-	-	-	220.391.943,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																	
						Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		-	-	-	-	4 Dokumen	103.976.592,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAIAK DAERAH	-	-	-	-	131.554.861,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		-	-	-	-	2 Dokumen	8.913.248,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAIAK DAERAH	-	-	-	-	21.997.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		-	-	-	-	42 Dokumen	21.595.184,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAIAK DAERAH	-	-	-	-	22.199.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		-	-	-	-	2 Dokumen	10.652.097,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAIAK DAERAH	-	-	-	-	21.386.600,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	10 Orang	137.175.672,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAIAK DAERAH	-	-	-	-	207.226.202,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		-	-	-	-	-	760.764.526,00			-	-	-	-	1.011.827.694,00			
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		-	-	-	-	24 Dokumen	85.612.039,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAIAK DAERAH	-	-	-	-	135.188.374,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		-	-	-	-	39 Dokumen	15.389.208,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAIAK DAERAH	-	-	-	-	16.314.114,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		-	-	-	-	10 Dokumen	67.179.328,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAIAK DAERAH	-	-	-	-	84.768.280,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-	-	-	39 Dokumen	7.224.172,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	8.074.140,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																	

						Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)					10 Laporan	83.840.497,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-			135.525.555,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas																		
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas						5 Dokumen	10.385.521,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAIAK DAERAH	-	-	-	-			19.320.700,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait						39 Dokumen	153.769.685,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAIAK DAERAH	-	-	-	-			194.503.941,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota						39 Orang	337.364.076,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAIAK DAERAH	-	-	-	-			418.132.590,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-					-	595.068.487,00			-	-	-	-	-		672.837.649,00		
5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																		
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban						39 Dokumen	39.435.816,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAIAK DAERAH	-	-	-	-			52.805.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
					Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran						4 Laporan	16.672.113,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAIAK DAERAH	-	-	-	-			30.761.352,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
					Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi						39 Laporan	94.172.222,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAIAK DAERAH	-	-	-	-			161.999.949,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
					Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						4 Dokumen	113.115.064,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAIAK DAERAH	-	-	-	-			178.598.845,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	2.03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		
					Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						1 Dokumen	13.192.042,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAIAK DAERAH	-	-	-	-			13.197.423,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah																		
					Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah						1 Dokumen	20.028.254,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAIAK DAERAH	-	-	-	-			52.141.660,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
					Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah						1 Dokumen	14.665.938,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAIAK DAERAH	-	-	-	-			26.358.310,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan																		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota						100 Orang	283.787.038,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAIAK DAERAH	-	-	-	-			156.974.710,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-					-	203.665.299.810,74			-	-	-	-	-		170.051.988.977,21		
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		

						Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan					1 Laporan	192.258.856.439,19	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	-	165.301.988.977,21	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-	-	-	1 Laporan	11.406.443.371,55	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	-	4.750.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	-	-	-	269.587.015,00				-	-	-	-	-	117.089.390,00	
	5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	-	-	-	4 Dokumen	269.587.015,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH	-	-	-	-	-	117.089.390,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
156	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-	-	-	1.047.721.758,00				-	-	-	-	-	1.376.717.447,00	
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	1.047.721.758,00				-	-	-	-	-	1.376.717.447,00	
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	-	-	-	1 Dokumen	29.345.049,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAJAK DAERAH, PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	-	-	-	64.830.522,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	-	-	5 Dokumen	7.996.103,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAJAK DAERAH	-	-	-	-	-	17.091.944,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	-	-	-	1 Laporan	11.063.301,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAJAK DAERAH	-	-	-	-	-	106.773.132,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	-	-	-	1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAJAK DAERAH	-	-	-	-	-	124.880.425,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	-	-	-	1 Laporan	85.156.045,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAJAK DAERAH	-	-	-	-	-	109.825.300,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	-	39 Laporan	553.064.449,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAJAK DAERAH	-	-	-	-	-	541.845.356,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	-	-	-	5 Dokumen	108.972.492,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAJAK DAERAH	-	-	-	-	-	108.631.255,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	-	-	-	1 Laporan	178.245.545,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAJAK DAERAH	-	-	-	-	-	188.203.650,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	-	-	-	1 Laporan	70.878.774,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAJAK DAERAH	-	-	-	-	-	114.635.863,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	X					NON URUSAN					6.425.275.392,87									7.751.027.018,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					6.425.275.392,87									7.751.027.018,00	
157	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	6.425.275.392,87				-	-	-	-	-	7.751.027.018,00	
	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	6.420.275.392,87				-	-	-	-	-	7.629.040.793,00	
	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	50 Orang/bulan	6.420.275.392,87	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	-	7.629.040.793,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	5.000.000,00				-	-	-	-	-	121.986.225,00	
	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	11 Unit	5.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PAJAK DAERAH	-	-	-	-	-	121.986.225,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						BADAN PENDAPATAN DAERAH					11.493.604.063,23									11.654.686.009,20	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN					11.493.604.063,23									11.654.686.009,20	
158	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	11.493.604.063,23								-	11.654.686.009,20	
											9.260.394.611,23									9.436.267.557,20	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	80.405.906,00				-		1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-	80.405.906,00	
																	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital				
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dokumen	29.674.212,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			29.674.212,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	4.939.500,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			4.939.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	4.717.500,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			4.717.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1 Dokumen	4.939.056,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			4.939.056,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1 Dokumen	4.308.576,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			4.308.576,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					5 Laporan	31.827.062,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			31.827.062,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	7.095.632.720,23			-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	-	7.252.585.628,20	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					40 Orang/bulan	6.981.185.132,23	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			7.138.138.040,20	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					24 Dokumen	105.952.092,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			105.952.092,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	4.222.440,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			4.222.440,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					1 Laporan	4.273.056,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			4.273.056,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	30.531.520,00						1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		9.247.758,00	
5	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2.264.178,00		Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		2.264.178,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	28.267.342,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		6.983.580,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	167.384.040,00					-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		107.421.840,00	
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				80 Paket	119.924.400,00		Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		59.962.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	47.459.640,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		47.459.640,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	642.321.291,00					-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		632.321.291,00	
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	38.013.615,00		Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		38.013.615,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.196.680,00		Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		12.196.680,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	120.820.380,00		Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		120.820.380,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	17.629.500,00		Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		17.629.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material										-		-	-			

						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket	161.586.240,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			161.586.240,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					50 Laporan	278.074.876,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			278.074.876,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD															
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					10 Dokumen	14.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			4.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				-	744.000.000,00			-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	834.166.000,00	
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					5 Unit	544.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			600.200.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					5 Unit	200.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			233.966.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	252.676.000,00			-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	272.676.000,00	
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	16.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		16.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					4 Laporan	236.176.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		256.176.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	231.009.234,00			-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	231.009.234,00	
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					29 Unit	157.794.800,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		157.794.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					120 Unit	65.464.470,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital				65.464.470,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	7.749.964,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital				7.749.964,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-				-	16.433.900,00			-		1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		-	16.433.900,00	
	5	02	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																	
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					3 Dokumen	16.433.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital				16.433.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
159	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-				-	2.233.209.452,00								-	2.218.418.452,00	
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-				-	2.233.209.452,00			-		1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		-	2.218.418.452,00	
	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																	
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah					5 Dokumen	186.987.932,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital				186.987.932,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah					22 Dokumen	205.982.357,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			205.982.357,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					3 Laporan	122.331.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			122.331.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah					5 Unit	327.806.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			327.806.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah					22 Laporan	96.915.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			96.915.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																	

						Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah					22 Laporan	250.727.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			250.727.280,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																	
						Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya					35500 Obyek Pajak	188.372.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			188.372.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																	
						Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah					22 Dokumen	39.226.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			39.226.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																	
						Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah					7 Layanan	140.066.300,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			125.266.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																	
						Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi					22 Dokumen	65.478.455,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			65.487.455,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah					22 Dokumen	359.428.490,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			359.428.490,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah					22 Dokumen	70.167.138,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			70.167.138,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah					22 Dokumen	60.187.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			60.187.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																	
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					4 Laporan	63.533.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			63.533.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																	
						Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah					1 Laporan	56.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			56.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA												11.471.184.660,84								12.195.394.625,00		
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											11.411.184.660,84								12.132.394.625,00		
5	03	KEPEGAWAIAN											8.438.489.257,55								8.930.174.757,00	
160	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	6.672.800.000,55						-	6.771.500.000,00			

	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-				134.000.000,00				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			96.000.000,00	
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	63.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0003	koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0004	koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0005	koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0006	koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	41.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			41.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-				4.855.000.000,55			-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			4.958.500.000,00	
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	4.800.000.000,55	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			4.900.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02	0005	koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	8.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02	0007	koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									-							

[illegible]

							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					5 Orang	75.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				-	496.800.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-		506.500.000,00	
	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					25 Paket	8.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			9.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					25 Paket	11.100.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			12.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					2 Dokumen	5.200.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			5.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					3 Paket	125.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			130.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					50 Laporan	347.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				-	110.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-		115.000.000,00	
	5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					10 Unit	110.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			115.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	246.200.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-		251.500.000,00	

	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50 Laporan	8.200.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		8.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	85.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		90.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	153.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		153.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-			-	297.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	300.000.000,00	
	5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Pemeliharaan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				3 Unit	128.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		130.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	29.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	140.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		140.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.13		Penataan Organisasi		-			-	9.300.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	10.000.000,00	
	5	03	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				1 Dokumen	9.300.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
161	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		-			-	1.765.689.257,00						-	2.158.674.757,00	

	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		-					271.935.000,00					5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			382.000.000,00	
	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																	
						Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					2 Dokumen	68.940.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																	
						Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					2 Dokumen	131.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			235.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi																	
						Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian					1 Dokumen	11.995.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			12.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	-	-			-	334.079.500,00			-			5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-		517.000.000,00	
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah					5 Dokumen	35.479.300,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			37.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																	
						Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					50 Dokumen	118.855.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN					1 Dokumen	179.745.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			360.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN		-					1.031.484.757,00					5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-				1.131.484.757,00	
	5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				50 Orang	672.123.919,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-				672.123.919,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				5 Orang	205.665.200,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-				305.665.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1 Dokumen	44.215.200,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Hurung Bunut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-				44.215.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				25 Orang	109.480.438,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-				109.480.438,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-			-	128.190.000,00			-			5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		-		128.190.000,00	
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				50 Orang	35.532.500,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-				35.532.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				25 Orang	43.125.500,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-				43.125.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				3 Laporan	49.532.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-				49.532.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						2.972.695.403,29											3.202.219.868,00	
162	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-			-	2.972.695.403,29									-		3.202.219.868,00	

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					3 Paket	82.204.400,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			20.000.000,00	INSPEKTORAT		
	6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			5.000.000,00	INSPEKTORAT
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					40 Dokumen	11.385.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-					INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				
							Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					5 Laporan	65.783.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				20.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					20 Laporan	583.808.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				100.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				-	500.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-			200.000.000,00		
	6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					3 Unit	200.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				100.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					2 Unit	300.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				100.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	100.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-			10.000.000,00		
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					3 Laporan	100.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				10.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	871.515.442,46			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-			160.000.000,00		

[illegible]

							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa					60 Laporan	805.593.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																	
							Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk					2 Kesepakatan	220.304.368,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																	
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP					5 Dokumen	464.110.308,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-	-	-	-	532.925.320,00				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	-		60.000.000,00	
	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian																	
							Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani					5 Laporan	102.334.240,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				10.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu					30 Laporan	430.591.080,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				50.000.000,00	INSPEKTORAT
166	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-	-	-	-	-	1.358.751.318,00				-		-				400.000.000,00	
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	-	-	-	-	189.744.580,00				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	-		50.000.000,00	
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																	
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun					2 Rekomendasi	189.744.580,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	-	-	-	-	-	1.169.006.738,00				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	-		350.000.000,00	
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																	

										Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah					38 perangkat daerah	237.048.542,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			100.000.000,00	INSPEKTORAT
6		01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																			
										Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi					38 perangkat daerah	351.103.955,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			100.000.000,00	INSPEKTORAT
6		01	03	2.02	0003	koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																			
										Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi					4 Kegiatan	390.050.605,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			100.000.000,00	INSPEKTORAT
6		01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																			
										Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas					38 perangkat daerah	190.803.636,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			50.000.000,00	INSPEKTORAT
						KECAMATAN KURUN										4.445.396.989,02								4.824.706.048,75	
7						UNSUR KEWILAYAHAN										371.925.690,00								389.618.260,00	
7		01				KECAMATAN										371.925.690,00								389.618.260,00	
167	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-						-	315.761.390,00							-		333.453.960,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-						-	12.139.150,00					5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		12.139.150,00	
7		01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																			
										Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					1 Lembaga Kemasyarakatan	12.139.150,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			12.139.150,00	KECAMATAN KURUN
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-						-	303.622.240,00				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		321.314.810,00	
7		01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																			
										Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan					4 Lembaga Kemasyarakatan	303.622.240,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			321.314.810,00	KECAMATAN KURUN
168	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-						-	56.164.300,00							-		56.164.300,00	
	7	01	06	2.01		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-						-	56.164.300,00				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		56.164.300,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	146.667.212,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		146.667.212,00	KECAMATAN KURUN
	X	XX	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	156.263.216,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	199.195.824,11	
	X	XX	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	61.731.701,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		61.731.701,00	KECAMATAN KURUN
	X	XX	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	45.467.211,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		78.363.615,00	KECAMATAN KURUN
	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	18.955.692,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		18.955.692,00	KECAMATAN KURUN
	X	XX	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30.108.612,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		40.144.816,11	KECAMATAN KURUN
							KELURAHAN KURUN					623.866.391,94							0,00	
	7						UNSUR KEWILAYAHAN					623.866.391,94							0,00	
	7	01					KECAMATAN					623.866.391,94							0,00	
170	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				275.000.000,00							0,00	
	7	01	01	2.05			Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	-				28.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan				16 Paket	13.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KELURAHAN KURUN
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	15.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai Filosofi “Belom Bahadat” Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		0,00	KELURAHAN KURUN

[illegible]

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					2 Laporan	15.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KELURAHAN KURUN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	9.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KELURAHAN KURUN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	49.500.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		0,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	6.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KELURAHAN KURUN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					3 Unit	13.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KELURAHAN KURUN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	30.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KELURAHAN KURUN
171	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-				-	348.866.391,94						-		0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-				-	323.866.391,94			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		0,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					3 Lembaga Kemasyarakatan	4.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KELURAHAN KURUN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					3 Pokmas / Ormas	319.866.391,94	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KELURAHAN KURUN

[illegible]

											Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						1 Paket	5.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		S. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			0,00	KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR				
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					10 Paket	30.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		S. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			0,00	KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket	7.091.524,83	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		S. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			0,00	KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1 Dokumen	2.484.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		S. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			0,00	KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	22.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		S. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			0,00	KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR

	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-								25.000.000,00					-		S. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			0,00				
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																									
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						3 Unit				25.000.000,00		Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		S. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			0,00	KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR				
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-				10.120.000,00					-		S. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		-	0,00				
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1 Laporan				2.500.000,00		Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		S. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			0,00	KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR				
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						2 Laporan				7.620.000,00		Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		S. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			0,00	KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR				

[illegible]

[illegible]

								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	2.743.200,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			2.743.200,00	KECAMATAN TEWAH
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								1 Dokumen	2.674.600,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			2.674.600,00	KECAMATAN TEWAH
7	01	01	2.01	0004	koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								1 Dokumen	2.685.400,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			2.685.400,00	KECAMATAN TEWAH
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD								1 Dokumen	2.899.200,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			2.899.200,00	KECAMATAN TEWAH
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								1 Laporan	2.067.400,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			2.067.400,00	KECAMATAN TEWAH
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-					98 Persen	2.490.984.893,67				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Pegawai kecamatan Tewah	-		2.490.984.893,67	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								24 Orang/bulan	2.453.656.513,67	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Pegawai kecamatan Tewah			2.453.656.513,67	KECAMATAN TEWAH
7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								85 Dokumen	21.489.980,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Pegawai kecamatan Tewah			21.489.980,00	KECAMATAN TEWAH
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								18 Laporan	15.838.400,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Pegawai kecamatan Tewah			15.838.400,00	KECAMATAN TEWAH

[illegible]

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	62.478.400,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	kantor keamatan tewah		62.478.400,00	KECAMATAN TEWAH
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.326.202,37	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	kantor keamatan tewah		3.326.202,37	KECAMATAN TEWAH
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material															
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	27.372.028,50	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	kantor keamatan tewah		27.372.028,50	KECAMATAN TEWAH
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	7.567.000,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	kantor keamatan tewah		7.567.000,00	KECAMATAN TEWAH
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				167 Laporan	138.643.824,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	kantor keamatan tewah		138.643.824,00	KECAMATAN TEWAH
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				98 Persen	84.200.215,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	kantor kecamatan tewah	-	84.200.215,00	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	25.334.700,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	kantor kecamatan tewah		25.334.700,00	KECAMATAN TEWAH
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	13.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	kantor kecamatan tewah		13.500.000,00	KECAMATAN TEWAH
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	45.365.515,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	kantor kecamatan tewah		45.365.515,00	KECAMATAN TEWAH

	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhnya Penyediaan Jasa Penunjang untuk Kebutuhan Kantor dan Pegawai Kantor	-				98 Persen	220.489.496,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	kantor kecamatan tewah	-	283.735.011,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1 Laporan	2.120.000,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	kantor kecamatan tewah		65.365.515,00	KECAMATAN TEWAH
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						3 Laporan	47.021.500,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	kantor kecamatan tewah		47.021.500,00	KECAMATAN TEWAH
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						12 Laporan	171.347.996,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	kantor kecamatan tewah		171.347.996,00	KECAMATAN TEWAH
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang digunakan oleh Perangkat Daerah	-				98 Persen	104.578.689,03			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	kantot kecamatan tewah	-	104.578.689,03	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						3 Unit	35.922.242,33	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	kantot kecamatan tewah		35.922.242,33	KECAMATAN TEWAH
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						2 Unit	39.993.889,40	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	kantot kecamatan tewah		39.993.889,40	KECAMATAN TEWAH
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5 Unit	7.312.678,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	kantot kecamatan tewah		7.312.678,00	KECAMATAN TEWAH
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						2 Unit	21.349.879,30	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	kantot kecamatan tewah		21.349.879,30	KECAMATAN TEWAH
175	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-		8.500.000,00						-	8.500.000,00	

[illegible]

										Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						12 Laporan	12.450.000,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			12.450.000,00	KECAMATAN TEWAH	
178	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-								98 Persen	71.721.380,00							-		91.721.380,00		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-								98 Persen	71.721.380,00			-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Masyarakat Kecamatan Tewah	-		91.721.380,00		
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																						
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								45 Orang	71.721.380,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Masyarakat Kecamatan Tewah			91.721.380,00	KECAMATAN TEWAH		
179	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-								98 Persen	96.362.600,00							-		96.362.600,00		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-								98 Persen	96.362.600,00			-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Desa Kecamatan Tewah	-		96.362.600,00		
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																						
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa									6 Dokumen	11.815.600,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Desa Kecamatan Tewah			11.815.600,00	KECAMATAN TEWAH	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																						
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa									15 Dokumen	67.639.200,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Desa Kecamatan Tewah			67.639.200,00	KECAMATAN TEWAH	
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																						
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa									6 Dokumen	8.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Desa Kecamatan Tewah			8.500.000,00	KECAMATAN TEWAH	
	7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																						
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa									15 Dokumen	8.407.800,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Desa Kecamatan Tewah			8.407.800,00	KECAMATAN TEWAH	
						KELURAHAN TEWAH											589.755.629,37								675.000.000,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN											589.755.629,37									675.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN											589.755.629,37										675.000.000,00	
180	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-								98 Persen	205.849.922,50							-		246.849.922,50		

	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhiya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-					98 Persen	11.884.100,00				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital		pegawai kantor kelurahan tewah	-		15.884.100,00		Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.
	7	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																				
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-					3 Unit	11.884.100,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital		pegawai kantor kelurahan tewah	-		15.884.100,00		KELURAHAN TEWAH	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhiya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-					98 Persen	99.814.639,97				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital		kantor kelurahan tewah	-		99.814.639,97		Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-					1 Paket	2.289.000,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital		kantor kelurahan tewah	-		2.289.000,00		KELURAHAN TEWAH	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-					6 Paket	21.812.300,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital		kantor kelurahan tewah	-		21.812.300,00		KELURAHAN TEWAH	
	7	01	01	2.05	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-					1 Paket	3.120.639,97	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital		kantor kelurahan tewah	-		3.120.639,97		KELURAHAN TEWAH	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-					38 Laporan	72.592.700,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital		kantor kelurahan tewah	-		72.592.700,00		KELURAHAN TEWAH	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-					-	51.019.800,00				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital		kantor kelurahan tewah	-		69.019.800,00		Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-					1 Unit	25.081.000,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital		kantor kelurahan tewah	-		30.081.000,00		KELURAHAN TEWAH	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				

						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-					2 Unit	25.938.800,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	kantor kelurahan tewah	-	38.938.800,00	KELURAHAN TEWAH
7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-					-	19.144.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	kantor kecamatan tewah	-	22.144.000,00	
7	01	01	2.08	0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	kantor kecamatan tewah		1.000.000,00	KELURAHAN TEWAH
7	01	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					3 Laporan	18.144.000,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	kantor kecamatan tewah		21.144.000,00	KELURAHAN TEWAH
7	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang digunakan oleh Perangkat Daerah	-				98 Persen	23.987.382,53			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	kantor kelurahan tewah	-	39.987.382,53	
7	01	01	2.09	0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					3 Unit	12.517.500,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	kantor kelurahan tewah		15.517.500,00	KELURAHAN TEWAH
7	01	01	2.09	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					3 Unit	4.889.000,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	kantor kelurahan tewah		17.889.000,00	KELURAHAN TEWAH
7	01	01	2.09	0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	6.580.882,53	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	kantor kelurahan tewah		6.580.882,53	KELURAHAN TEWAH
181	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-				98 Persen	383.905.706,87			-			-	428.150.077,50	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terpenuhya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				98 Persen	383.905.706,87			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	kinerja Rt/Rw kelurahan tewah	-	428.150.077,50	
7	01	03	2.02	0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										-					

[illegible]

							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								8 Laporan	9.584.000,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Tumbang Miri	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-					-	1.669.326.217,22			-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		0,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN								12 Orang/bulan	1.659.742.217,22	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Tumbang Miri	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								29 Dokumen	4.792.000,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																				
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								18 Laporan	4.792.000,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Tumbang Miri	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7	01	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-		-					-	7.667.200,00			-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		0,00	
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																				
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								10 Laporan	7.667.200,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Tumbang Miri	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7	01	01	2.05			Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	-		-					-	37.490.250,00			-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-	-		0,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan								3 Paket	37.490.250,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Tumbang Korik	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					250 Laporan	2.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Tumbang Miri	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					3 Laporan	24.114.500,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Tumbang Miri	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					9 Laporan	89.123.200,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Tumbang Miri	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	152.012.755,77			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	-	0,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	24.058.248,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Tumbang Miri	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					6 Unit	58.027.574,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Tumbang Miri	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					25 Unit	19.559.088,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Tumbang Miri	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					3 Unit	50.367.845,77	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Tumbang Miri	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
183	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-				-	248.419.722,00						-		0,00	

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					3 Paket	5.841.965,14	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Tumbang Miri	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	S. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KELURAHAN TUMBANG MIRI
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					60 Laporan	24.240.200,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Tumbang Miri	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	S. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KELURAHAN TUMBANG MIRI
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				-	8.352.773,86			-	S. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					3 Unit	8.352.773,86	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Tumbang Miri	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	S. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KELURAHAN TUMBANG MIRI
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	6.680.000,00			-	S. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					200 Laporan	2.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Tumbang Miri	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	S. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KELURAHAN TUMBANG MIRI
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					2 Laporan	4.680.000,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Tumbang Miri	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	S. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KELURAHAN TUMBANG MIRI
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	16.464.880,29			-	S. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					2 Unit	8.657.225,76	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Tumbang Miri	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	S. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KELURAHAN TUMBANG MIRI
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					9 Unit	6.145.848,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Tumbang Miri	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	S. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KELURAHAN TUMBANG MIRI

[illegible]

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					34 Orang	94.663.500,00		Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00		KECAMATAN SEPANG			
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																							
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					4 Dokumen	12.704.400,00		Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00		KECAMATAN SEPANG			
191	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-				-	67.259.000,00					-		-			0,00					
7	01	06	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-				-	67.259.000,00					-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		0,00					
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																							
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					12 Dokumen	42.600.000,00		Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00		KECAMATAN SEPANG			
7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																							
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					4 Dokumen	12.656.000,00		Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00		KECAMATAN SEPANG			
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																							
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					12 Laporan	12.003.000,00		Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00		KECAMATAN SEPANG			
X					NON URUSAN										3.195.440.914,70										0,00			
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX										3.195.440.914,70											0,00		
192	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-				-	3.195.440.914,70					-		-			0,00					
X	XX	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-				-	43.162.840,00					-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		0,00					
X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3 Dokumen	12.680.000,00		Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00		KECAMATAN SEPANG			
X	XX	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																							

[illegible]

							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					2 Laporan	7.134.000,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pengecahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KECAMATAN SEPANG
X	XX	01	2.04				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-		-			6.968.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pengecahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	
X	XX	01	2.04	0007			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah					4 Dokumen	6.968.000,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pengecahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KECAMATAN SEPANG
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah										5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pengecahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				
X	XX	01	2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-			215.707.231,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pengecahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	
X	XX	01	2.06	0001			Penyediaan Komponen Instalasi					1 Paket	9.929.000,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pengecahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KECAMATAN SEPANG
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan										5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pengecahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				
X	XX	01	2.06	0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					1 Paket	59.001.900,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pengecahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KECAMATAN SEPANG
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan										5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pengecahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				
X	XX	01	2.06	0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					1 Paket	16.508.061,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pengecahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KECAMATAN SEPANG
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan										5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pengecahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				
X	XX	01	2.06	0007			Penyediaan Bahan/Material					1 Paket	21.774.590,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pengecahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KECAMATAN SEPANG
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan										5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pengecahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				
X	XX	01	2.06	0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu					2 Laporan	2.928.000,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pengecahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KECAMATAN SEPANG
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu										5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pengecahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				
X	XX	01	2.06	0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pengecahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	105.565.680,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KECAMATAN SEPANG
	X	XX	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	147.516.669,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	
	X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					4 Unit	147.516.669,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KECAMATAN SEPANG
	X	XX	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	113.593.900,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	
	X	XX	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KECAMATAN SEPANG
	X	XX	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	18.886.800,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KECAMATAN SEPANG
	X	XX	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12 Laporan	4.275.000,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KECAMATAN SEPANG
	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	85.432.100,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KECAMATAN SEPANG
	X	XX	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	85.190.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	
	X	XX	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					1 Unit	24.040.000,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KECAMATAN SEPANG

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					3 Dokumen	101.395.416,12	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatkan ketentraman dan keterlibatan masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			0,00	KECAMATAN MANUHING
197	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELLURAHAN	-	-			-	60.971.352,00					-	-		0,00	
	7	01	03	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	15.000.000,00				5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-	-		0,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					5 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			0,00	KECAMATAN MANUHING
	7	01	03	2.03			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	45.971.352,00				5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-	-		0,00	
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan					2 Lembaga Kemasyarakatan	45.971.352,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			0,00	KECAMATAN MANUHING
198	7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	80.643.870,00					-	-		0,00	

[illegible]

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	28.446.000,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Tumbang Talaken	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pembangunan dan pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			0,00	KELURAHAN TUMBANG TALAKEN	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	20.117.500,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Tumbang Talaken	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Pembangunan dan pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			0,00	KELURAHAN TUMBANG TALAKEN		
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	7.058.726,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Tumbang Talaken	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi.	-			0,00	KELURAHAN TUMBANG TALAKEN		
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					50 Laporan	65.069.975,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Tumbang Talaken	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pembangunan dan pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			0,00	KELURAHAN TUMBANG TALAKEN		
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				-	35.298.000,00			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kerutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pembangunan dan pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-	-	-	0,00			
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		

							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	35.298.000,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Tumbang Talaken	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		0,00	KELURAHAN TUMBANG TALAKEN
200	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-		-	395.045.724,00					-	-	0,00	
	7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-		-	395.045.724,00			-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	10.386.740,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Tumbang Talaken	-	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		0,00	KELURAHAN TUMBANG TALAKEN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	161.115.440,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Tumbang Talaken	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	7. Meningkatkan ketertarikan dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		0,00	KELURAHAN TUMBANG TALAKEN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	223.543.544,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Tumbang Talaken	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		0,00	KELURAHAN TUMBANG TALAKEN
						KECAMATAN RUNGAN						3.495.681.234,69							2.622.788.267,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						3.495.681.234,69							2.622.788.267,00	
	7	01				KECAMATAN						3.495.681.234,69							2.622.788.267,00	
201	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	3.259.521.134,13					-	-	2.622.788.267,00	

7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	9.000.000,00	-	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	0,00	KECAMATAN RUNGAN
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	-	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	0,00	KECAMATAN RUNGAN
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	0,00	KECAMATAN RUNGAN
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	2.479.521.134,13				-	-	2.622.788.267,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	21 Orang/bulan	2.467.521.134,13	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	2.622.788.267,00	KECAMATAN RUNGAN
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	12 Laporan	12.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	0,00	KECAMATAN RUNGAN
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	57.000.000,00				-	-	0,00	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	22 Paket	32.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	0,00	KECAMATAN RUNGAN
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		-	-	-					-	-		

							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					5 Orang	25.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-			0,00	KECAMATAN RUNGAN
7	01	01	2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	-					341.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-			0,00	
7	01	01	2.06	0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	8.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-			0,00	KECAMATAN RUNGAN
7	01	01	2.06	0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					4 Paket	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KECAMATAN RUNGAN
7	01	01	2.06	0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					2 Paket	3.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KECAMATAN RUNGAN
7	01	01	2.06	0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KECAMATAN RUNGAN
7	01	01	2.06	0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					300 Laporan	260.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-			0,00	KECAMATAN RUNGAN
7	01	01	2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-					150.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	
7	01	01	2.07	0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0 Unit	0,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KECAMATAN RUNGAN
7	01	01	2.07	0005			Pengadaan Mebel									-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				

[illegible]

							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					7 Unit	125.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				0,00	KECAMATAN RUNGAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					7 Unit	10.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				0,00	KECAMATAN RUNGAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	20.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				0,00	KECAMATAN RUNGAN
202	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	6.069.147,00				-			-			0,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	6.069.147,00				-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-			0,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					5 Lembaga Kemasyarakatan	6.069.147,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				0,00	KECAMATAN RUNGAN
203	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	205.090.953,56				-			-			0,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	205.090.953,56				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-			0,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					45 Orang	55.090.953,56	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				0,00	KECAMATAN RUNGAN
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					30 Orang	150.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-				0,00	KECAMATAN RUNGAN
204	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	25.000.000,00				-			-			0,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	25.000.000,00				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-	-			0,00	
	7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																	

[illegible]

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	25.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KELURAHAN JAKATAN RAYA			
206	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	267.062.252,50					-	-	0,00				
	7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	146.062.252,50			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00				
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					5 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KELURAHAN JAKATAN RAYA			
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					5 Pokmas / Ormas	143.062.252,50	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KELURAHAN JAKATAN RAYA			
	7	01	03	2.03			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	121.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00				
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan					5 Lembaga Kemasyarakatan	121.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KELURAHAN JAKATAN RAYA			
						KECAMATAN MIHING RAYA											3.206.741.439,89					3.228.100.000,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN											3.180.741.439,89						3.201.100.000,00	
	7	01				KECAMATAN											3.180.741.439,89						3.201.100.000,00	
207	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.781.741.439,89					-	-	2.793.100.000,00				
	7	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	15.600.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	17.000.000,00				
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		5.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA			
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					6 Dokumen	5.600.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		6.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA			

	7		01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-				9 Laporan	5.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	6.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7		01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				-	2.092.341.439,89			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	2.093.000.000,00	
	7		01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-				18 Orang/bulan	2.076.541.439,89	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	2.077.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7		01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-				14 Laporan	15.800.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	16.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7		01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-				-	8.500.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	9.000.000,00	
	7		01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-				12 Laporan	8.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	9.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7		01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-				-	91.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	90.500.000,00	
	7		01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-				22 Paket	23.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	23.500.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7		01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-				5 Orang	68.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	67.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7		01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				-	218.600.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	220.100.000,00	

	7		01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					5 Paket	6.100.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		6.200.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7		01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					2 Paket	35.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		35.200.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7		01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					3 Paket	3.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		3.500.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7		01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan					2 Paket	15.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		15.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7		01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					18 Paket	25.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		25.200.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7		01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					60 Laporan	134.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		135.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7		01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	92.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		94.000.000,00	
	7		01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					4 Unit	36.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		37.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7		01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					2 Unit	56.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		57.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA

	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	141.700.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	143.000.000,00	
	7	01	01	0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0 Laporan	3.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		3.500.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			0 Laporan	25.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		26.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			6 Laporan	113.200.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		113.500.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	122.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	126.500.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Pemeliharaan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			9 Unit	60.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		62.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			3 Unit	10.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		11.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			10 Unit	15.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		15.500.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	37.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		38.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
208	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELLURAHAN	-	-	-	-	155.000.000,00					-	-	158.500.000,00	

7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	-	-	10.000.000,00	-	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	-	10.500.000,00		
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa															
					Jumlah Lembaga Masyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	-	-	-	5 Lembaga Masyarakatan	10.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihiang Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	-	10.500.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Masyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-	145.000.000,00	-	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	-	148.000.000,00		
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakatan															
					Jumlah Lembaga Masyarakatan yang Diselenggarakan	-	-	-	-	5 Lembaga Masyarakatan	125.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	-	126.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat															
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	-	-	-	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	-	22.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
209	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	-	-	168.000.000,00	-	-	-	-	-	-	172.000.000,00		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	-	-	168.000.000,00	-	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	-	172.000.000,00		
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun															
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	-	-	-	25 Orang	16.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihiang Raya, Kampuri	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	-	17.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA	
7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional															
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	-	-	-	35 Orang	21.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihiang Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	-	22.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa															
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-	-	-	-	17 Orang	77.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihiang Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	-	78.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional															

[illegible]

							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					3 Orang	23.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		25.000.000,00	KELURAHAN KAMPURI
	7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	285.234.845,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		295.000.000,00	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					20 Paket	176.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		177.000.000,00	KELURAHAN KAMPURI
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					20 Paket	39.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		40.000.000,00	KELURAHAN KAMPURI
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							0					0 0	70.234.845,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		78.000.000,00	KELURAHAN KAMPURI
	7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	7.500.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		8.000.000,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					24 Laporan	7.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		8.000.000,00	KELURAHAN KAMPURI
	7	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	12.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		14.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					5 Unit	5.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		6.000.000,00	KELURAHAN KAMPURI
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					5 Unit	7.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		8.000.000,00	KELURAHAN KAMPURI
213	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	220.500.000,00						-	222.000.000,00	

	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	-	220.500.000,00	-	-	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	222.000.000,00	-		
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-	-	8 Lembaga Kemasyarakatan	3.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	4.000.000,00	KELURAHAN KAMPURI		
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	8 Pokmas / Ormas	217.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	218.000.000,00	KELURAHAN KAMPURI		
214	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	-	4.000.000,00			-		-	-	4.000.000,00			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	-	4.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	4.000.000,00			
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional															
						Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	-	-	36 Orang	4.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	4.000.000,00	KELURAHAN KAMPURI		
						KECAMATAN RUNGAN HULU										3.328.571.775,90				0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN										368.736.150,00				0,00	
	7	01				KECAMATAN										368.736.150,00				0,00	
215	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	-	27.034.900,00			-		-	-	0,00			
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	-	-	27.034.900,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00			
	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	-	-	-	3 Dokumen	27.034.900,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU		
216	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	-	22.300.680,00			-		-	-	0,00			
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	-	14.825.160,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00			
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan															

[illegible]

							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					30 Paket	4.279.500,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	X	XX	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					10 Orang	17.775.600,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-			-	230.630.360,99			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		0,00	
	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					11 Paket	16.709.920,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					50 Paket	45.192.329,35	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	X	XX	01	2.05	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					36 Paket	3.836.400,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					100 Laporan	164.891.711,64	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-			-	121.790.310,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		0,00	
	X	XX	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					1 Unit	45.009.390,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																

[illegible]

							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-					10 Orang	85.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Tumbang Rahuyan	-		-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			85.000.000,00	KELURAHAN TUMBANG RAHUYAN
	7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-					-	81.950.400,00			-	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			81.950.400,00	
	7	01	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12 Paket	44.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Tumbang Rahuyan	-		-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			44.000.000,00	KELURAHAN TUMBANG RAHUYAN
	7	01	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					0 Laporan	37.950.400,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Tumbang Rahuyan	-		-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			37.950.400,00	KELURAHAN TUMBANG RAHUYAN
	7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-					-	7.000.000,00			-	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			7.000.000,00	
	7	01	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					3 Laporan	7.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Tumbang Rahuyan	-		-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			7.000.000,00	KELURAHAN TUMBANG RAHUYAN
222	7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-					-	6.329.425,00			-	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			6.329.425,00	
	7	01	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-					-	6.329.425,00			-	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			6.329.425,00	
	7	01	02	2.01	0001		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					2 Laporan	6.329.425,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Tumbang Rahuyan	-		-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			6.329.425,00	KELURAHAN TUMBANG RAHUYAN
223	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-					-	372.555.447,50			-	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			444.720.175,00	
	7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-					-	372.555.447,50			-	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			444.720.175,00	
	7	01	03	2.02	0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										-	-						

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket	200.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	X	XX	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					4 Laporan	25.130.000,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					4 Laporan	153.164.983,11	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	145.961.114,00			-	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		0,00	
	X	XX	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					4 Laporan	23.498.000,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	X	XX	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	15.750.000,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					4 Laporan	106.713.114,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	99.741.000,00			-	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		0,00	
	X	XX	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					8 Unit	5.836.800,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

[illegible]

						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen	12.086.201,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			12.086.201,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	2.174.402,25	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			2.174.402,25	KECAMATAN MANUHING RAYA
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	7.063.000,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			7.063.000,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1 Dokumen	1.093.600,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			1.093.600,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	9.174.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			9.174.400,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				-	1.469.374.340,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	1.469.374.340,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					11 Orang/bulan	1.459.574.340,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			1.459.574.340,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					1 Laporan	9.800.000,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		9.800.000,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-				-	26.280.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	26.280.000,00	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															

							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					1 Paket	26.280.000,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		28.280.000,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	303.885.990,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	303.885.990,00	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	58.201.800,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		58.201.800,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	81.663.390,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		81.663.390,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	14.020.800,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		14.020.800,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		150.000.000,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	0,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					1 Unit	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	27.471.901,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	27.471.901,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	27.471.901,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		27.471.901,00	KECAMATAN MANUHING RAYA

	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-					0,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7	01	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-		-	1.586.800,00				-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		1.586.800,00	
	7	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1.586.800,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			1.586.800,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
230	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-		-	84.054.200,00							-		-	84.054.200,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-		-	84.054.200,00				-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		84.054.200,00	
	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	38.025.000,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			38.025.000,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	46.029.200,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			46.029.200,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
231	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-		-	164.307.488,00							-		-	164.307.488,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-		-	29.511.200,00				-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		29.511.200,00	
	7	01	03	2.01	0002	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	29.511.200,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			29.511.200,00	KECAMATAN MANUHING RAYA

	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		-					134.796.288,00					5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				134.796.288,00	
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan					1 Lembaga Kemasyarakatan	100.707.688,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				100.707.688,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya					1 Lembaga Kemasyarakatan	34.088.600,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				34.088.600,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
232	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	127.306.000,00								-			127.306.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	127.306.000,00				-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				127.306.000,00	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					1 Orang	127.306.000,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				127.306.000,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
						KELURAHAN TEHANG						572.996.700,00											0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						572.996.700,00											0,00	
	7	01				KECAMATAN						572.996.700,00											0,00	
233	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	195.066.730,00								-			0,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	195.066.730,00				-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				0,00	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	78.179.130,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Tehang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				0,00	KELURAHAN TEHANG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2 Laporan	116.887.600,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Tehang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-				0,00	KELURAHAN TEHANG
234	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	377.929.970,00								-			0,00	

	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		-					377.929.970,00					5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00				
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																				
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		-				1 Lembaga Kemasyarakatan	6.010.000,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Tehang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00		KELURAHAN TEHANG		
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																				
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		-				1 Unit	202.824.080,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Tehang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00		KELURAHAN TEHANG		
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																				
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		-				1 Pokmas / Ormas	169.095.890,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Tehang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00		KELURAHAN TEHANG		
						KECAMATAN MIRI MANASA												2.815.982.110,91						3.301.864.152,66		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN												2.815.982.110,91						3.301.864.152,66		
	7	01				KECAMATAN												2.815.982.110,91						3.301.864.152,66		
235	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya anggaran untuk Gaji dan Tunjangan ASN Terfasilitasinya Pelaporan Keuangan Kantor Kecamatan Miri Manasa	-				10 Orang 4 Laporan	2.505.131.294,91							-		2.865.214.152,66				
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaporan keuangan Kantor Kecamatan dapat tepat waktu Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	-				4 Laporan 10 Orang	1.656.174.694,91				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Pemerintah Kecamatan Miri Manasa	-		1.760.892.092,66				
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		-				10 Orang/bulan	1.620.763.724,91	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Pemerintah Kecamatan Miri Manasa			1.720.763.724,66		KECAMATAN MIRI MANASA			
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																				
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		-				4 Laporan	35.410.970,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Pemerintah Kecamatan Miri Manasa			40.128.368,00		KECAMATAN MIRI MANASA			
	7	01	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Data yang dilaporkan semakin baik dan akurat	-				2 Laporan	22.690.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Masyarakat Kecamatan Miri Manasa	-		30.692.200,00				
	7	01	01	2.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah																				
						Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah		-				2 Laporan	22.690.000,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Masyarakat Kecamatan Miri Manasa			30.692.200,00		KECAMATAN MIRI MANASA			

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					1 Laporan	4.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Meningkatkan ketentrman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Masyarakat Kecamatan Miri Manasa		4.500.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
239	7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya dan adanya Pembinaan Kepemudaan di Kecamatan Miri Manasa	-			17 orang	75.000.000,00						-	85.000.000,00	
	7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Program Kegiatan Pembinaan Kepemudaan di Tingkat Kecamatan	-			17 Orang	75.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Meningkatkan ketentrman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Pemuda di Kecamatan Miri Manasa	-	85.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					17 Orang	75.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Meningkatkan ketentrman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Pemuda di Kecamatan Miri Manasa		85.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
240	7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terfasilitasinya Kegiatan serta Koordinasi Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan	-			10 Desa 1 Kegiatan	71.350.816,00						-	117.000.000,00	
	7	01	06	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terciptanya Pemerintahan Desa bersih transparan dalam pengelolaan Keuangan Desa serta berdaya saing dan mandiri Terfasilitasinya usulan perencanaan Desa/Kelurahan di Musrenbang Tingkat Kecamatan	-			10 Desa 1 Kegiatan	71.350.816,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Pemerintah desa Kecamatan Miri Manasa	-	117.000.000,00	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa															
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					10 Dokumen	49.850.816,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Pemerintah desa Kecamatan Miri Manasa		85.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa															
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa					2 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Pemerintah desa Kecamatan Miri Manasa		9.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa															
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa					2 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Pemerintah desa Kecamatan Miri Manasa		8.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif															

							Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif					1 Dokumen	6.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Pemerintah desa Kecamatan Miri Manasa			15.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
							KELURAHAN TUMBANG NAPOI						533.346.000,00								553.593.100,00	
	7						UNSUR KEWILAYAHAN						533.346.000,00								553.593.100,00	
	7	01					KECAMATAN						533.346.000,00								553.593.100,00	
241	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Logistik untuk Pelayanan kepada masyarakat	-			2 Kegiatan	277.623.041,00							-	319.993.041,00	
	7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-			90 Laporan 100 Paket	216.418.651,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	Masyarakat Kelurahan Tumbang Napoi	-		216.418.650,00	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					2 Paket	41.555.531,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	Masyarakat Kelurahan Tumbang Napoi			41.555.530,00	KELURAHAN TUMBANG NAPOI
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					100 Laporan	174.863.120,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Masyarakat Kelurahan Tumbang Napoi			174.863.120,00	KELURAHAN TUMBANG NAPOI
	7	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-			2 Paket	59.544.940,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Masyarakat Kelurahan Tumbang Napoi	-		101.914.940,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1 Unit	59.544.940,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Tumbang Napoi	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Masyarakat Kelurahan Tumbang Napoi			101.914.940,00	KELURAHAN TUMBANG NAPOI
	7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-			2 Laporan	1.659.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Masyarakat Kelurahan Tumbang Napoi	-		1.659.451,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	1.659.450,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Tumbang Napoi	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Masyarakat Kelurahan Tumbang Napoi			1.659.451,00	KELURAHAN TUMBANG NAPOI
242	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terfasilitasinya pemberdayaan kepada masyarakat	-			2 Kegiatan	255.722.959,00						-		233.600.059,00	

7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman untuk PKK kelurahan tumbang Napoi Belanja Natura dan Pakan-Natura Jumlah Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-				100 Paket 100 Paket 50 kotak	255.722.959,00				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	Masyarakat Kelurahan Tumbang Napoi	-		233.600.059,00			
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						1 Lembaga Kemasyarakatan	9.018.058,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Tumbang Napoi	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	Masyarakat Kelurahan Tumbang Napoi			9.018.058,00	KELURAHAN TUMBANG NAPOI			
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun						1 Unit	125.373.768,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Tumbang Napoi	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	Masyarakat Kelurahan Tumbang Napoi			103.250.868,00	KELURAHAN TUMBANG NAPOI			
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						2 Pokmas / Ormas	121.331.133,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Tumbang Napoi	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat Kelurahan Tumbang Napoi			121.331.133,00	KELURAHAN TUMBANG NAPOI			
					KECAMATAN RUNGAN BARAT												2.783.515.773,06						3.008.628.948,00	
7					UNSUR KEWILAYAHAN												2.783.515.773,06						3.008.628.948,00	
7	01				KECAMATAN												2.783.515.773,06						3.008.628.948,00	
243	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-				-	2.422.196.424,96						-		2.647.309.599,90				
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				-	1.514.023.473,06				-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berakarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	1.739.136.648,00				
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						11 Orang/bulan	1.504.223.473,06	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berakarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		1.729.336.648,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT				
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD																			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					3 Orang	34.025.520,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		34.025.520,00	KELURAHAN RABAMBANG
	7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	161.983.872,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	143.890.872,00	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4 Paket	31.393.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Rabambang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		13.300.000,00	KELURAHAN RABAMBANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					24 Paket	37.670.800,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Rabambang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		37.670.800,00	KELURAHAN RABAMBANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket	3.405.672,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Rabambang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		3.405.672,00	KELURAHAN RABAMBANG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					54 Laporan	89.514.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		89.514.400,00	KELURAHAN RABAMBANG
	7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	4.500.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	4.500.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					150 Laporan	1.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Rabambang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		1.500.000,00	KELURAHAN RABAMBANG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					2 Laporan	3.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Rabambang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		3.000.000,00	KELURAHAN RABAMBANG
	7	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	9.854.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	9.854.000,00	

	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					2 Unit	9.854.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Rabambang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		9.854.000,00	KELURAHAN RABAMBANG					
249	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	343.389.198,00						-	414.636.608,00						
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	343.389.198,00				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	414.636.608,00					
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					1 Lembaga Kemasyarakatan	6.588.584,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Rabambang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		6.588.584,00	KELURAHAN RABAMBANG					
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					1 Unit	136.800.614,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Rabambang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		208.048.024,00	KELURAHAN RABAMBANG					
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					23 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Rabambang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		200.000.000,00	KELURAHAN RABAMBANG					
												J U M L A H	1.370.590.110.011,84											716.903.528.833,42	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas dalam bentuk kinerja nyata dari seluruh perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penetapan kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam pembangunan jangka menengah sampai dengan Tahun 2026.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode RPD.

Penetapan IKU daerah yang memberi gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas. Pada tabel ini disajikan indikator kinerja tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Implementasi dari IKU di setiap tahun disusun beserta Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk keperluan penilaian LAKIP/SAKIP.

Berikut ini penetapan indikator kinerja utama pada pembangunan Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2029 yang tersaji pada tabel berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indikator Tujuan									
1	Indeks Infrastruktur	Poin		60.0	62.5	65.0	67.5	70.0	75.0
2	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%		10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00
3	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73.88	74.17	74.64	75.12	75.59	76.06	76.53
4	Laju pertumbuhan Ekonomi	%	4.48	5.00	5.20	5.40	5.60	5.80	6.00
5	PDRB per Kapita	Juta Rp/ Kapita	67.08	70.00	71.00	72.00	73.00	74.00	75.00
6	Tingkat Kemiskinan	%	5.68	4.61	4.41	4.21	4.00	3.80	3.60
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin		60.00	62.00	64.00	66.00	68.00	70.00
8	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3.27	3.35	3.43	3.52	3.60	3.68	3.76
Indikator Sasaran									
1	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%		52.55	53.65	54.75	55.85	56.95	58.05
2	Indeks Konektivitas Wilayah	Poin	80.12	80.93	81.75	82.56	83.37	84.19	85.00
3	Persentase Desa Mandiri	%		1.75	2.63	2.63	3.51	3.51	4.39
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69.33	70.44	71.55	72.67	73.78	74.89	76.00
5	Indeks Risiko Bencana	Poin		123.56	121.85	120.14	118.42	116.71	115.00
6	Indeks Pendidikan	Poin	64.84	65.78	66.72	67.66	68.60	69.53	70.47
7	Indeks Kesehatan	Poin	82.43	82.54	82.78	83.01	83.25	83.49	83.72
8	Indeks Ketimpangan Gender	Poin		0.49	0.47	0.45	0.42	0.40	0.38
9	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin		58.53	58.82	59.12	59.41	59.71	60.00
10	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	69.36	70.30	71.24	72.18	73.12	74.06	75.00
11	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	2.18	6.50	6.52	6.54	6.56	6.58	6.60
12	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	1.54	2.28	3.03	3.77	4.51	5.26	6.00
13	Kontribusi PDRB Gunung Mas terhadap PDRB Kalimantan Tengah	%	4.38	4.33	4.36	4.39	4.42	4.45	4.47
14	Gini Rasio	Poin	0.309	0.280	0.274	0.268	0.262	0.256	0.250
15	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.12	3.91	3.73	3.55	3.36	3.18	3.00
16	Nilai SAKIP	Poin	61.63	63.03	64.42	65.82	67.21	68.61	70.00

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
17	Indeks Pelayanan Publik	Poin		81.66	81.70	81.74	81.78	81.82	81.86
18	Indeks Integritas Nasional	Poin		74.59	75.67	76.75	77.84	78.92	80.00

Kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Daerah. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; serta
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Penetapan indikator kinerja daerah pada program pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas merupakan capaian pembangunan Tahun 2025-2029 yang berisikan data indikator berupa target yang akan dicapai dengan mempertimbangkan capaian indikator dari tahun sebelumnya. Penetapan Indikator Kinerja tersebut berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana PP 13/2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemda (Dokumen LPPD/LKPJ). Penetapan indikator kinerja daerah beserta targetnya dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1.	Indeks Ketahanan Pangan		NA	56.78	57.42	58.07	58.71	59.36	60.00	
2.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	NA	7.44	7.06	6.71	6.38	6.06	5.75	
3.	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)		NA	35.00	36.00	37.00	38.00	39.00	40.00	
4.	% RT Pengguna Listrik PLN		NA	75.00	76.00	77.00	78.00	79.00	80.00	
5.	Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan/atau dimodernisasi		NA	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00	
6.	Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan/atau dimodernisasi		NA	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00	
7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	IKLH	69.33	70.44	71.55	72.67	73.78	74.89	76.00	
8.	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman		NA	14.00	15.20	16.40	17.60	18.80	20.00	
9.	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan		NA	36.48	37.18	37.89	38.59	39.30	40.00	
10.	Persentase angka BABS di tempat terbuka		NA	3.00	2.90	2.80	2.70	2.60	2.50	
11.	Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan		NA	52.55	53.65	54.75	55.85	56.95	58.05	
12.	Persentase kondisi mantap jalan		NA	35.00	36.20	37.40	38.60	39.80	41.00	
13.	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	NA	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	
14.	Indeks Risiko Bencana	poin	NA	123.56	121.85	120.14	118.42	116.71	115.00	
15.	Indeks Ketahanan Daerah	poin	NA							
16.	Jumlah Penduduk	Ribu Jiwa	145.54	148.23	150.94	153.61	156.26	158.87	161.46	
17.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.89	1.85	1.83	1.77	1.73	1.67	1.63	
18.	Rasio Penduduk	%	110.49	110.21	109.99	109.69	109.42	109.22	108.93	
19.	Kepadatan Penduduk	Orang/ m2	15.62	15.91	16.20	16.49	16.77	17.05	17.33	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4.48	5.00	5.20	5.40	5.60	5.80	6.00	
2.	Tingkat Kemiskinan	%	5.68	4.61	4.41	4.21	4.00	3.80	3.60	
3.	PDRB Per Kapita	Rp Juta	67.08	70.00	71.00	72.00	73.00	74.00	75.00	
4.	Pengeluaran Per Kapita (Ribu/Tahun		NA	11,600	11,680	11,760	11,840	11,920	12,000	

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.12	3.91	3.73	3.55	3.36	3.18	3.00	
6.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan			48.2	48.23	48.26	48.29	48.32	48.35	
7.	Indeks Gini	angka	0.309	0.280	0.274	0.268	0.262	0.256	0.250	
8.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		NA	43.97	46.38	48.78	51.19	53.59	56.00	
9.	Indeks Modal Manusia	angka	73.88	74.17	74.64	75.12	75.59	76.06	76.53	
10.	Indeks Kesehatan		82.20	82.54	82.78	83.01	83.25	83.49	83.72	
11.	Usia Harapan Hidup	tahun	73.58	73.65	73.804	73.958	74.112	74.266	74.42	
12.	Angka Kematian Ibu		110	109.65	109.3	108.95	108.6	108.25	107.9	
13.	Indeks Keluarga Sehat	indeks								
14.	Prevalensi Stunting	%	10.39	10.13	9.88	9.62	9.36	9.11	8.85	
15.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)		NA	90.00	90.65	91.30	91.95	92.60	93.25	
16.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	NA	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	
17.	Indeks Pendidikan		64.84	65.78	66.72	67.66	68.60	69.53	70.47	
18.	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	9.37	9.48	9.58	9.69	9.79	9.90	10.00	
19.	Harapan Lama Sekolah	tahun	12.10	12.31	12.52	12.74	12.95	13.16	13.37	
20.	Angka Partisipasi Sekolah (5-6)		NA	100	100	100	100	100	100	
21.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15		NA	100	100	100	100	100	100	
22.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan		NA	100	100	100	100	100	100	
23.	Angka Literasi/Numerasi	%	NA							
24.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	NA	38.65	40.59	42.62	44.75	46.98	49.33	
25.	Kemampuan Literasi SD		NA	52.86	55.29	57.72	60.14	62.57	65.00	
26.	Kemampuan Literasi SMP		NA	68.12	68.50	68.87	69.25	69.62	70.00	
27.	Kemampuan Numerasi SD		NA	37.83	38.26	38.70	39.13	39.57	40.00	
28.	Kemampuan Numerasi SMP		NA	63.54	63.63	63.72	63.82	63.91	64.00	
29.	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B		NA	30.29	30.43	30.57	30.72	30.86	31.00	
30.	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4		NA	64.80	64.84	64.88	64.92	64.96	65.00	
31.	Iklim Keamanan SD		NA	77.16	77.33	77.50	77.66	77.83	78.00	

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
32.	Iklim Keamanan SMP		NA	77.60	77.68	77.76	77.84	77.92	78.00	
33.	Iklim Kebinekaan SD		NA	77.50	77.60	77.70	77.80	77.90	78.00	
34.	Iklim Kebinekaan SMP		NA	79.76	79.81	79.86	79.90	79.95	80.00	
35.	Iklim Inklusivitas SD		NA	61.75	61.80	61.85	61.90	61.95	62.00	
36.	Iklim Inklusivitas SMP		NA	65.27	65.36	65.44	65.53	65.61	65.70	
37.	Indeks Literasi Digital	angka	NA							
38.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	NA							
39.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	skor	NA	80.40	80.72	81.04	81.36	81.68	82.00	
40.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	angka	NA	58.53	58.82	59.12	59.41	59.71	60.00	
41.	Indeks Perlindungan Anak	angka	NA							
42.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	0-100	NA	70.30	71.24	72.18	73.12	74.06	75.00	
43.	Capaian Kabupaten Layak Anak		NA	501.00	521.00	541.00	561.00	581.00	601.00	
44.	Indeks Ketimpangan Gender	poin	NA	0.490	0.468	0.446	0.424	0.402	0.380	
45.	Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	%	NA	2.34	2.33	2.32	2.31	2.30	2.29	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
	Angka Ketergantungan	%	44.13	44.15	44.22	44.32	44.43	44.60	44.77	
2.	Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	%	8.28	10.07	11.85	13.64	15.43	17.21	19.00	
3.	Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		9.98	9.98	9.99	9.99	9.99	10.00	10.00	
4.	Rasio PDRB Akomodasi Makanan dan Minum	%	1.65	1.68	1.70	1.71	1.73	1.74	1.75	
5.	Skor dan Predikat Inovasi Daerah		50.54	52,12 (Inovatif)	53,69 (Inovatif)	55,27 (Inovatif)	56,85 (Inovatif)	58,42 (Inovatif)	60 (Inovatif)	
6.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		2.18	6.50	6.52	6.54	6.56	6.58	6.60	
7.	Kontribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		33.05	33.12	33.18	33.25	33.32	33.38	33.45	

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8.	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	1.54	2.28	3.03	3.77	4.51	5.26	6.00	
9.	Kontribusi PDRB Gunung Mas terhadap PDRB Kalimantan Tengah		4.38	4.33	4.36	4.39	4.42	4.45	4.47	
10.	jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara		NA	25,843	26,674	27,506	28,337	29,169	30,000	
11.	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	NA							
12.	Indeks Infrastruktur		NA	60.0	62.5	65.0	67.5	70.0	75.0	
13.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	NA	52.55	53.65	54.75	55.85	56.95	58.05	
14.	Persentase Desa Mandiri	%	NA	1.75	2.63	2.63	3.51	3.51	4.39	
15.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	NA							
16.	Tingkat Inflasi	%	NA							
17.	Indeks Konektivitas Wilayah		80.12	80.93	81.75	82.56	83.37	84.19	85.00	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM									
	Indeks Reformasi Hukum		NA							
2.	Indeks Reformasi Birokrasi		NA	60.00	62.00	64.00	66.00	68.00	70.00	
3.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)		B (61,63)	63.03	64.42	65.82	67.21	68.61	70.00	
4.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	poin	NA	2.65	2.67	2.69	2.71	2.73	2.75	
5.	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan		NA	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	
6.	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda		NA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
7.	Indeks Pelayanan Publik	angka	NA	81.66	81.70	81.74	81.78	81.82	81.86	
8.	Indeks Integritas Nasional	angka	NA	74.59	75.67	76.75	77.84	78.92	80.00	
9.	Persentase Penegakan Perda	%	NA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
10.	Indeks Daya Saing Daerah	nilai	3.27	3.35	3.43	3.52	3.60	3.68	3.76	

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Permendagri 59/2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Pemerintah daerah wajib menyusun dan menetapkan SPM untuk setiap urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan daerah. Penyusunan SPM harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah daerah harus melaksanakan SPM secara optimal. Evaluasi pencapaian SPM dilakukan secara berkala oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPM memiliki peran penting dalam mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas dan berkeadilan bagi setiap warga negara. SPM juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

SPM bertujuan untuk :

- Mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas dan berkeadilan bagi setiap warga negara.
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut ini :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET
PENDIDIKAN			
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	100%
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	100%
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	100%
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	100%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%
KESEHATAN			
	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%
	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET
	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan	100%
	Pelayanan Kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
	Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%
	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
PEKERJAAN UMUM			
	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%
	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%
PERUMAHAN RAKYAT			
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%
TRANTIBUMLINMAS			
	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten	100%
	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%
SOSIAL			
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%
	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%
	Perlindungan dan jaminan sosial padasaat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	100%

BAB VIII

P E N U T U P

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 merupakan pedoman penyusunan APBD Tahun 2026, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis tahunan serta telah dibahas dalam forum MUSRENBANG Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 sehingga dengan demikian RKPD Tahun 2026 adalah komitmen seluruh Pemangku Kepentingan di daerah yang berisi rincian program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada pembangunan Kabupaten Gunung Mas untuk dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026.

Mengingat RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 merupakan Komitmen Pemangku Kepentingan di daerah, maka dokumen RKPD dimaksud harus menjadi acuan masing-masing Perangkat Daerah serta acuan bagi partisipasi masyarakat termasuk LSM dan dunia usaha dalam proses pembangunan di Kabupaten Gunung Mas.

Dalam rangka pelaksanaan RKPD Tahun 2026 Kabupaten Gunung Mas, terlebih dahulu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. RKPD Tahun 2026 merupakan rencana program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2026 dilaksanakan oleh seluruh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
2. RKPD Tahun 2026 merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026.

3. RKPD Tahun 2026 juga merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam menyusun KUA dan PPAS serta APBD Tahun Anggaran 2026.
4. RKPD Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunung Mas dengan memperhatikan saran-saran dan masukan-masukan dari seluruh Pemangku Kepentingan termasuk DPRD Kabupaten Gunung Mas pada saat Forum Gabungan Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten pada Tahun 2025.
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas, Bupati Gunung Mas berkewajiban untuk melakukan pengendalian, monitoring serta melakukan evaluasi kinerja Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan RKPD khususnya yang terkait dengan sumber pembiayaan pembangunan dari APBD dan APBN.
6. Untuk itu bagi setiap pelaksanaan program berkewajiban menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program pembangunan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Gunung Mas Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas. Keseluruhan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut akan dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan (RAKORDAL) dan menjadi bahan acuan dalam penyusunan RKPD pada tahun berikutnya.

RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya Peraturan Bupati Gunung Mas tentang RKPD sampai dengan 31 Desember 2026. Untuk itu agar semua Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mentaatinya serta melakukan langkah-langkah sinkronisasi atau memaduserasikan Rencana Kerja hingga pelaksanaannya.

Keberhasilan pelaksanaan RKPD Tahun 2026 Kabupaten Gunung Mas ini tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaku pembangunan serta Pemangku Kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas.

Perlu kesungguhan dari semua pihak terutama harus adanya satu kesatuan langkah dan semangat dalam menyikapi tujuan serta arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2026 sehingga

sasaran yang menjadi target pembangunan dapat memberikan manfaat dan hasil yang optimal untuk dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata di Bumi Habangkalan Penyang Karuhei Tatau.

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG